SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 30B TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 57 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 263 ayat (4) serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024, maka Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);

9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
2. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 22);
3. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 57 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 8 Agustus 2024,

WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD.
STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,
TTD.
STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 30B

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMMAD, S.H.
Pembina/ IV (a)
NIP. 19790407 200902 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 30B TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 57 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2024

WALI KOTA PEKALONGAN
TTD
STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024

DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, karena dengan pertolongan dan kemudahan dari-Nya, Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 ini selain mempertimbangkan aspek-aspek pendekatan teknokratik juga sudah mengkolaborasikan pendekatan politis berupa Visi Misi Walikota-Wakil Walikota Pekalongan Periode 2021-2026 dan pendekatan *bottom-up* dalam Musrenbang RKPD.

Berdasarkan pasal 360 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2024 berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

Secara umum, Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan ini disusun dalam 4 bab. Bab I membahas tentang Pendahuluan, Bab II membahas tentang Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, , Bab III membahas Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan terakhir Bab IV penutup.

Harapan kami, Dokumen ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan penganggaran program dan kegiatan untuk selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan tahun 2024. Tak lupa kami mohon masukan kritik dan saran yang membangun demi hasil yang lebih baik di masa depan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pekalongan

ZAINUL HAKIM, S.H.,M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19650211 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 5
1.1 LATAR BELAKANG 5
1.2 LANDASAN HUKUM 5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD 9
2.2. ANALISIS HASIL PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENJA 23
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH 26
BAB IV PENUTUP 44
DAFTAR PUSTAKA 45

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II ttahun 2024.....	10
Tabel III.1	Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.....	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) merupakan penjabaran perencanaan pembangunan tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2024 telah memasuki tahun kedua dari RPJMD Kota Pekalongan periode 2021-2026.

Dinas Pendidikan Kota Pekalongan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Pekalongan, dalam menyelenggarakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yakni menyusun satu dokumen rencana kerja (RENJA) sebagaimana diatur Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 21 ayat 3.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2024 mengacu pada RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024, dan memperhatikan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024. Selain itu dalam penyusunan Renja Tahun Anggaran 2024, terdapat perbedaan secara mendasar dalam hal pengalokasian anggaran sesuai dengan sumber anggaran sebagai akibat pagu indikatif dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang baru dapat diterima setelah penetapan Renja 2024. Kepastian ada tidaknya anggaran untuk program kegiatan yang sebelumnya dialokasikan dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 baru dapat diterima setelah ditetapkannya APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024. Kondisi semacam ini, tentu harus ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan mulai dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2024.

Dengan melihat uraian permasalahan di atas serta berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Pekalongan, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2024 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang Peraturan menteri Dalamm Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah daerah;

21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
26. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
27. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2024 atas adanya perubahan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, perubahan kebijakan maupun prioritas strategis yang harus segera mendapatkan tindak lanjut guna penyesuaian target kinerja.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan adalah :

a. Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
b. Memberikan landasan operasional bagi para pelaksana sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
c. Menjadi salah satu dokumen pengawasan dan pengendalian untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
d. Mengukur tingkat pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dalam menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan;
e. Menyajikan satu dokumen yang akan menjadi salah satu pijakan dalam penyusunan rencana kerja pada tahun-tahun anggaran selanjutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Berisi hasil evaluasi renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi pagu anggaran dan target kinerja perubahan tahun 2024

BAB V PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 360 menyebutkan bahwa penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2024 berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan sampai dengan triwulan II tahun 2024 ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan II, seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel II.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2024
Dinas Pendidikan Kota Pekalongan

Kode OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target APBD 2024		Capaian s.d Triwulan II	
			Target	Satuan	Fisik	Persentase (%)
1.01.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan**					
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	Persen	38,55	38,55
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	persen	10,42	10,42
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	0	0
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	0	0
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Laporan	5	31,25
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	Persen	66,67	66,67

1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.339	Orang/ bulan	1376	102,76
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	6	50
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	100
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	33,17	33,17
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	100	persen	100	100
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	93	Laporan	93	100
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	persen	0	0
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	0	0
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100	persen	49,53	49,53

1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	2	50
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	paket	2	50
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	paket	2	50
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	2	50
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	1	50
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	1	50
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145	laporan	67	46,21
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	dokumen	2	50
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	50	50
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	2	50
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	6	50

1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	6	50
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	432,15	432,15
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	432,14	432,14
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	unit	13	46,43
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	3	75
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	unit	47	1.175
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM pendidikan	89,50	persen	98,65	110,22
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK Outcome / SPM)	99	persen	99,98	100,99
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1	ruang	0	0

1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1	ruang	0	0
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0	unit	0	0
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	ruang	0	0
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	ruang	0	0
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	ruang	0	0
1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	71	paket	0	0
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	71	paket	42	59,15
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5	unit	4	80
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	9	paket	1	11,11
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	11.680	peserta didik	5.596	47,91

1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1091	orang	1091	100
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	103	satuan pendidikan	103	100
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	103	satuan pendidikan	103	100
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	309	orang	309	100
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2	ruang	0	0
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	309	orang	0	0
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2	ruang	0	0
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8	unit	0	0
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	103	satuan pendidikan	103	100

1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	97	ruang	0	0
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK Outcome / SPM)	95	persen	96,72	101,81
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	ruang	0	0
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1	ruang	0	0
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1	ruang	0	0
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3	unit	0	0
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18	ruang	0	0
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	ruang	0	0
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	ruang	0	0
1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	unit	0	0

1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8	unit	0	0
1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	17	paket	0	0
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	34	paket	34	100
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3	unit	0	0
1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.325	paket	0	0
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3	paket	0	0
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.035	siswa	615	59,42
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	105	orang	105	100
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	29	satuan pendidikan	30	103,45
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	29	satuan pendidikan	30	103,45

1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	28	orang	90	321,43
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	87	orang	0	0
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	29	satuan pendidikan	30	103,45
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	ruang	0	0
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK Outcome / SPM)	99	persen	93,56	94,50
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3	unit	2	66,67
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14	unit	4	28,57
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	unit	2	100
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4	paket	3	75
1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	4	paket	4	100

1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2	paket	0	0
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	9	paket	6	66,67
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	10.159	peserta didik	0	0
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2	orang	2	100
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	268	satuan pendidikan	268	100
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	268	satuan pendidikan	266	99,25
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	804	orang	798	99,25
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4	ruang	0	0
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	800	paket	0	0
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	4	unit	3	75
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK Outcome / SPM)	65	persen	22,77	35,03

1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	3	unit	2	66,67
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1	paket	0	0
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	13	orang	13	100
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	15	satuan pendidikan	14	93,33
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	15	satuan pendidikan	13	86,67
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	45	orang	26	57,78
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	400	paket	0	0
1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1	paket	1	100
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1554	peserta didik	1554	100
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	45	paket	44	97,78

1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2	unit	2	100
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100	persen	100	100
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	100	persen	100	100
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1	dokumen	0	0
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	500	Buku	1.785	357
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	10	orang	0	0
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1	dokumen	0	0
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD PNF	100	persen	100	100
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1	Dokumen	0	0
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak	500	Buku	0	0

	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1	Dokumen	1	100
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100	persen	56,11	56,11
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan PAUD/PNF	86,75	persen	45,83	52,83
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1237	dokumen	7	0,57
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7	laporan	7	100

2.2. ANALISIS HASIL PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENJA

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan kuat yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan semakin kritisnya pemikiran masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan, disamping adanya pengaruh globalisasi. Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah untuk selalu tanggap atas tuntutan masyarakat dan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan sesuai kebijakan daerah serta melaksanakan tugas-tugas pembantuan yang diberikan pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan dan penetapan sasaran, program di bidang pendidikan;
2. perumusan kebijakan di bidang Pendidikan;
3. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
4. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
5. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;
7. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan ;
8. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
9. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang pendidikan;
10. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
11. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan;

12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Isu-isu strategis dalam perumusan program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan pendidikan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan mutu dan capaian SPM Pendidikan sesuai Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022 tentang Standar teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
2. Implementasi kurikulum merdeka pada semua satuan pendidikan, termasuk didalamnya Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Program Guru Penggerak (PGP) yang merupakan bagian dari upaya agar IKM berjalan dengan baik di satuan pendidikan. Peraturan Walikota nomor 58 tahun 2022 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Kota Pekalongan diharapkan mampu dijadikan salah satu pedoman dalam mendukung upaya pelaksanaan IKM di Kota Pekalongan dapat berjalan dengan baik. Saat ini masih diperlukan pendampingan dari pemerintah kepada beberapa satuan pendidikan yang melaksanakan IKM secara mandiri, yang sejauh ini dirasa masih kurang, apalagi jika disandingkan dengan sekolah yang mendapatkan program sekolah penggerak melalui BOS Kinerja.
3. Project Penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam projek penguatan ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mengupas dan memahami tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi dan lain-lain, sehingga ia bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Tema ini dapat berubah setiap tahunnya, ditentukan oleh pemerintah pusat (Kemdikbud) berdasarkan isu yang diprioritaskan. Pada tahun 2024 Dinas Pendidikan merencanakan pengimplementasian Kurikulum Mulok Kebencanaan pada mata pelajaran jenjang SD, SMP dan PAUD melalui program pengembangan kurikulum.
4. Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas layanan pendidikan yang merata, salah satunya berupa keterjangkauan biaya pendidikan melalui peningkatan bantuan fasilitasi operasional pendidikan / BOSDA, pemberian perlengkapan dasar siswa, beasiswa atau biaya personil untuk peserta didik yang berasal dari keluarga miskin.
5. Peningkatan profesionalisme dan kualifikasi guru yang diharapkan akan berdampak kepada peningkatan kualitas dan kompetensi lulusan PAUD, SD dan SMP

6. Pemenuhan dan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan, salah satunya melalui kebijakan tenaga pendidik / guru pengganti.
7. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan non ASN / honorer melalui bantuan harlindung dan status legal formal PTK honorer dari penugasannya oleh Kepala Sekolah menjadi Pemerintah / Kepala Dinas Pendidikan.
8. Peningkatan akses layanan informasi seputar dunia pendidikan, dalam upaya memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya mengikuti pendidikan di sekolah formal maupun non formal, khususnya jenjang PAUD dan Kesetaraan
9. Penguatan sarana prasarana pendidikan dengan merehabilitasi dan memperluas sarana dan prasarana pendidikan yang kurang layak / memadai dalam rangka mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM) khususnya di sekolah-sekolah yang berada di daerah banjir/rob
10. Optimalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sebagai salah satu upaya penanganan ATS (Anak Tidak Sekolah) agar kembali bersekolah.
11. Peningkatan kualitas dan implementasi pendidikan karakter bagi peserta didik dan didukung tata kehidupan masyarakat sekolah yang berakhlak mulia.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja atas evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dapat kami sajikan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan. Namun demikian ada beberapa yang perlu menjadi catatan, yaitu :
    - Sub Kegiatan Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan (pengelolaan Pendidikan SD) pagu yang dianggarkan untuk bantuan transport guru dan pengawas BTQ SD masih 10 bulan, sehingga pada perubahan anggaran perlu diusulkan untuk pemenuhan anggaran 12 bulan.
    - Beberapa pekerjaan fisik sudah selesai tahap perencanaan, namun juga masih ada yang dalam tahap penunjukan penyedia maupun proses SPK.
2. Program Pengembangan Kurikulum secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan.
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bidang Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sejalan dengan visi dan misi Walikota Pekalongan 2021-2026, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang bermutu di Kota Pekalongan baik dari segi akses maupun kualitas. Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan pendidikan di Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Indeks Pencapaian SPM Pendidikan tahun 2022 yang belum optimal, yakni 90,94% dari 100% yang ditargetkan, menjadi permasalahan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan untuk meningkatkan indeks pencapaian SPM urusan pendidikan. Dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 akan difokuskan pada upaya pemenuhan capaian dan mutu SPM pendidikan, Impelentasi Kurikulum Merdeka yang merupakan *mandatory* dari kebijakan nasional serta kebijakan-kebijakan nasional yang lain khususnya dalam urusan pendidikan, seperti transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dan Gerakan Sekolah Sehat antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
2. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
3. Penataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan
4. Peningkatan sarpras pendidikan
5. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
6. Peningkatan budaya literasi dan penyediaan kurikulum muatan lokal

Selanjutnya guna mengampu upaya pemenuhan capaian dan mutu SPM pendidikan dan kebijakan pemerintah urusan pendidikan, Pada tahun 2024 Dinas Pendidikan akan melaksanakan 4 program, yaitu :

1. Program pengelolaan pendidikan
2. Program pengembangan kurikulum
3. Program pendidik dan tenaga kependidikan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota

Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan tahun 2024 Dinas Pendidikan Kota Pekalongan secara rinci kami sajikan sebagai berikut :

Tabel III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Perubahan RENJA 2024

Kode OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Perubahan APBD 2024		Pagu Perubahan APBD 2024
			Target	Satuan	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan				**242.546.049.000**
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	persen	161.879.804.000
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	persen	94.784.000
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	3.500.000
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	4.250.000
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Laporan	87.034.000
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	persen	160.227.279.000

Kode OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Perubahan APBD 2024		Pagu Perubahan APBD 2024
			Target	Satuan	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.376	Orang/ bulan	159.689.579.000
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	533.800.000
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	3.900.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	100	persen	105.303.000
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	186	Laporan	105.303.000
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	persen	5.000.000
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	5.000.000

Kode OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Perubahan APBD 2024		Pagu Perubahan APBD 2024
			Target	Satuan	
	Kelengkapannya				
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100	persen	570.992.000
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	10.500.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	paket	123.322.000
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	paket	13.117.000
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	89.500.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	15.000.000
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	2.550.000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176	laporan	190.000.000

Kode OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Perubahan APBD 2024		Pagu Perubahan APBD 2024
			Target	Satuan	
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	dokumen	127.003.000
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	674.873.000
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	7.000.000
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	290.997.000
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	376.876.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	201.573.000
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	unit	72.073.000

Kode OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Perubahan APBD 2024		Pagu Perubahan APBD 2024
			Target	Satuan	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	75.000.000
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	109	unit	54.500.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM pendidikan	100	persen	**65.673.284.000**
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK Outcome / SPM)	99	persen	**29.136.918.000**
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1	ruang	200.000.000
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1	ruang	474.982.000
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0	unit	38.777.000
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	ruang	252.076.000
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	ruang	86.315.000

Kode OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Perubahan APBD 2024		Pagu Perubahan APBD 2024
			Target	Satuan	
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	ruang	75.000.000
1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	71	paket	88.750.000
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	42	paket	143.650.000
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	4	unit	50.000.000
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	9	paket	744.005.000
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10.882	peserta didik	375.000.000
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1091	orang	2.768.076.000
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	103	satuan pendidikan	183.818.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	103	satuan pendidikan	18.064.400.000

Kode OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Perubahan APBD 2024		Pagu Perubahan APBD 2024
			Target	Satuan	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	309	orang	37.500.000
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2	ruang	532.756.000
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	309	orang	67.230.000
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2	ruang	400.000.000
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7	unit	395.000.000
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	103	satuan pendidikan	133.098.000
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	41	ruang	4.026.485.000
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK Outcome / SPM)	95	persen	**23.177.821.000**

Kode OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Perubahan APBD 2024		Pagu Perubahan APBD 2024
			Target	Satuan	
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	ruang	99.295.000
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1	ruang	400.000.000
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1	ruang	482.500.000
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3	unit	81.950.000
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	19	ruang	3.423.725.000
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	ruang	454.939.000
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	ruang	1.042.248.000
1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	unit	350.000.000
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	unit	825.070.000

Kode OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Perubahan APBD 2024		Pagu Perubahan APBD 2024
			Target	Satuan	
1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	17	paket	34.400.000
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	34	paket	212.500.000
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3	Unit	132.000.000
1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.325	paket	182.350.000
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3	paket	210.665.000
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.035	siswa	373.960.000
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	105	orang	293.470.000
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	30	satuan pendidikan	309.656.000
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	30	satuan pendidikan	13.215.800.000

Kode OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Perubahan APBD 2024		Pagu Perubahan APBD 2024
			Target	Satuan	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	90	orang	20.920.000
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	60	orang	38.830.000
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	30	satuan pendidikan	117.338.000
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	ruang	876.205.000
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK Outcome / SPM)	99	persen	**9.097.976.000**
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3	unit	213.990.000
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13	unit	1.110.341.000
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	unit	10.000.000

Kode OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Perubahan APBD 2024		Pagu Perubahan APBD 2024
			Target	Satuan	
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4	paket	15.000.000
1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	4	paket	10.000.000
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1	paket	25.000.000
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	13	paket	327.752.000
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	10.159	peserta didik	231.119.000
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2	orang	55.440.000
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	268	satuan pendidikan	440.217.000
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	266	satuan pendidikan	6.021.600.000
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	798	orang	82.055.000
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2	ruang	420.462.000
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	750	paket	100.000.000

Kode OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Perubahan APBD 2024		Pagu Perubahan APBD 2024
			Target	Satuan	
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	4	unit	35.000.000
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK Outcome / SPM)	65	persen	**4.260.569.000**
1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	4	unit	967.000.000
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1	paket	40.000.000
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	13	orang	328.692.000
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14	satuan pendidikan	101.762.000
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	13	satuan pendidikan	2.467.900.000

Kode OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Perubahan APBD 2024		Pagu Perubahan APBD 2024
			Target	Satuan	
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	26	orang	20.203.000
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	300	paket	50.000.000
1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1	paket	20.000.000
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.554	peserta didik	185.012.000
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	60	paket	60.000.000
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2	unit	20.000.000
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100	persen	**272.429.000**
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	100	persen	**191.129.000**
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1	dokumen	8.350.000
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	1785	Buku	150.000.000

Kode OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Perubahan APBD 2024		Pagu Perubahan APBD 2024
			Target	Satuan	
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	10	orang	21.246.000
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1	dokumen	11.533.000
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD PNF	100	persen	**81.300.000**
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1	Dokumen	10.600.000
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	500	Buku	60.000.000
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1	Dokumen	10.700.000
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100	persen	14.720.532.000

Kode OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Perubahan APBD 2024		Pagu Perubahan APBD 2024
			Target	Satuan	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan PAUD/PNF	86,75	persen	14.720.532.000
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25	dokumen	1.043.393.000
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15	laporan	13.677.139.000

BAB IV PENUTUP

Rencana kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun seabagai upaya pencapaian Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan 2021-2026 dengan memperhatikan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024 serta RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan segenap jajaran pendidikan dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholder) secara konsisten dalam mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkeadilan, melaksanakan pemerataan pendidikan yang berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna peningkatan mutu pendidikan di Kota Pekalongan pada semua jenjang pendidikan.

Harapan kami, Dokumen ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan penganggaran program dan kegiatan untuk selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Tak lupa kami mohon masukan kritik dan saran yang membangun demi hasil yang lebih baik di masa depan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pekalongan

ZAINUL HAKIM, S.H.,M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19650211 199403 1 005

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan

Peraturan Walikota Pekalongan nomor 55 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan walikota pekalongan nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2024

Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. (2022). Profil Pendidikan Kota Pekalongan.

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

2024

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

GERMAS
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2021-2026 dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan indikatif Dinas Kesehatan Kota Pekalongan selama satu tahun berjalan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi.

Penyusunan Perubahan Renja Kerja (PERUBAHAN RENJA) ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan Dinas Kesehatan yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, besar harapan kami agar Perubahan Renja ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan. Adapun dalam penyusunan Perubahan Renja ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga diharapkan adanya masukan kritik dan saran bagi penyempurnaan penyusunan dokumen Perubahan Renja ini di masa yang akan datang.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pekalongan

Dr. Slamet Budiyanto, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19710118 199303 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 7

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 7

2.2 Evaluasi Renja Triwulan II 8

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 20

BAB IV PENUTUP 51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024……	8
Tabel 3.1	Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2024…….……..	21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2024

2.1 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembanguan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 201 3 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);

21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (LembaranDaerah Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

3.1 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

   Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun untuk memberikan pedoman, gambaran dan arah pembangunan di bidang kesehatan dalam jangka pendek (satu tahun) yaitu untuk tahun 2024.

2. Tujuan

   Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dengan tujuan :

   a. Memberikan informasi yang komprehensif tentang rencana program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.
   b. Menyediakan dokumen acuan yang pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2024.

c. Memberikan pedoman operasional sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam mengoperasionalisasikan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.1 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubaha Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Perubahan Renja K/L dan Perubahan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

2.2 Evaluasi Renja Triwulan II

Memuat hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Kota Pekalongan merupakan salah satu pelaksana Pembangunan Kesehatan di Kota Pekalongan. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 Tahun 2016. Di dalam PMK tersebut, SPM Bidang Kesehatan terdiri atas 12 indikator. Adapun capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator SPM	Target	Capaian 2023	KET
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	97.50%	Tidak Tercapai
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	100%	**Tercapai**
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	99.16%	Tidak Tercapai
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	99.86%	Tidak Tercapai
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	100%	**Tercapai**
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%	85.96%	Tidak Tercapai
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%	89.78%	Tidak Tercapai
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	65.29%	Tidak Tercapai
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100%	100%	**Tercapai**
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%	100%	**Tercapai**
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)	100%	100%	**Tercapai**
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	100%	**Tercapai**

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Prosentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2023 sebesar 94,79%, dengan keterangan dari 12 indikator SPM hanya 6 indikator yang berhasil mencapai target sedangkan 6 indikator lainnya belum dapat mencapai target.

2.2 Evaluasi Renja Triwulan II

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja

adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

a) Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

b) Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

c) Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

   Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Hasil evaluasi periode pelaksanaan triwulan II tahun 2024 Renja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Evaluasi pelaksanaan Renja

Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan (N) yang dievaluasi (2024)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI RENJA YANG DI EVALUASI (%)	
			RENJA			APBD			I		II					
			K	Satuan	Anggaran	K	Satuan	Anggaran	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dinas Kesehatan				108.183.227.000			92.648.436.000								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				108.183.227.000			92.648.436.000								
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100**	**persen**	**66.980.920.000**	**100**	**persen**	**49.753.819.000**	**29,45**	**16.248.746.508**	**11,67**	**21.653.421.839**	**41**	**37.902.168.347**	**41,12**	**76,18**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**persen**	**21.985.000**	**100**	**persen**	**21.985.000**	**8,89**	**2.091.000**	**6,67**	**1.585.000**	**16**	**3.676.000**	**15,56**	**16,72**
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	3.500.000	2	dokumen	3.500.000	0	2.091.000	0	1.200.000	-	**3.291.000**	-	**94,03**
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	3.485.000	2	dokumen	3.485.000	0	-	0	-	-	-	-	-
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	laporan	15.000.000	15	laporan	15.000.000	4	-	3	385.000	**7**	**385.000**	**46,67**	**2,57**
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**persen**	**64.264.562.000**	**100**	**persen**	**47.045.580.000**	**50**	**15.979.397.893**	**16,67**	**21.319.444.529**	**67**	**37.298.842.422**	**66,67**	**79,28**

1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	492	Orang/bulan	64.177.937.000	484	Orang/bulan	46.958.955.000		15.966.307.893		21.291.164.529	-	37.257.472.422	-	**79,34**
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	83.395.000	12	dokumen	83.395.000	3	13.090.000	3	27.780.000	**6**	**40.870.000**	**50,00**	**49,01**
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	3.230.000	1	laporan	3.230.000	1	-	0	500.000	**1**	**500.000**	**100,00**	**15,48**
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**persen**	**5.000.000**	**100**	**persen**	**5.000.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	5.000.000	1	paket	5.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**persen**	**401.626.000**	**100**	**persen**	**401.626.000**	**17,58**	**46.754.000**	**25,38**	**85.421.500**	**43**	**132.175.500**	**42,96**	**32,91**
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	paket	5.000.000	4	paket	5.000.000	1	-	1	-	**2**	-	**50,00**	-
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	132.067.000	4	paket	132.067.000	1	5.308.500	1	18.088.000	**2**	**23.396.500**	**50,00**	**17,72**
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	paket	7.500.000	4	paket	7.500.000	1	-	1	1.088.000	**2**	**1.088.000**	**50,00**	**14,51**
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	paket	96.559.000	4	paket	96.559.000	1	9.284.500	1	9.201.000	**2**	**18.485.500**	**50,00**	**19,14**

1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	20.000.000	2	paket	20.000.000	0	-	1	-	**1**	-	**50,00**	-
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	2.500.000	2	dokumen	2.500.000	0	240.000	0	320.000	**-**	**560.000**	**-**	**22,40**
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	138.000.000	260	laporan	138.000.000	60	31.921.000	72	56.724.500	**132**	**88.645.500**	**50,77**	**64,24**
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**persen**	**1.111.811.000**	**100**	**persen**	**1.161.987.000**	**25**	**204.593.236**	**25**	**212.168.810**	**50**	**416.762.046**	**50,00**	**35,87**
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	600.000	4	laporan	600.000	1	-	1	-	**2**	-	**50,00**	-
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	625.383.000	12	laporan	625.383.000	3	63.899.935	3	82.143.917	**6**	**146.043.852**	**50,00**	**23,35**
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	485.828.000	12	laporan	536.004.000	3	140.693.301	3	130.024.893	**6**	**270.718.194**	**50,00**	**50,51**
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**persen**	**1.175.936.000**	**100**	**persen**	**1.117.641.000**	**11,28**	**15.910.379**	**20,95**	**34.802.000**	**32**	**50.712.379**	**32,23**	**4,54**
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	unit	360.936.000	35	unit	360.936.000	8	15.910.379	12	34.802.000	**20**	**50.712.379**	**57,14**	**14,05**

1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	750.000.000	3	unit	691.705.000	0	-	0	-	-	-	-	-
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	65.000.000	91	unit	65.000.000	10	-	26	-	**36**	-	**39,56**	-
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**91**	**persen**	**38.632.360.000**	**91**	**persen**	**39.388.317.000**	**0**	**6.902.045.549**	**0**	**8.676.669.563**	**-**	**15.578.715.112**	**-**	**39,55**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD)**	**100**	**persen**	**8.632.645.000**	**100**	**persen**	**11.848.039.000**	**0**	**8.198.400**	**0**	**727.173.364**	**-**	**735.371.764**	**-**	**6,21**
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	unit	100.000.000	6	unit	3.367.515.000	0	-	0	-	-	-	-	-
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4	unit	451.444.000	3	unit	451.444.000	0	1.025.000	0	1.500.000	-	**2.525.000**	-	**0,56**
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	unit	225.000.000	1	unit	283.295.000	0	-	0	18.490.000	-	**18.490.000**	-	**6,53**

1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	51	unit	1.200.000.000	6	unit	1.057.890.000	0	-	0	-	-	-	-	-
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	190	unit	222.496.000	94	unit	203.304.000	0	3.688.400	0	18.081.900	-	**21.770.300**	-	**10,71**
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3	paket	6.364.905.000	3	paket	6.419.591.000	0	3.485.000	0	662.505.464	-	**665.990.464**	-	**10,37**
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12	paket	68.800.000	12	paket	65.000.000	3	-	3	26.596.000	**6**	**26.596.000**	**50,00**	**40,92**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100**	**persen**	**29.907.540.000**	**100**	**persen**	**27.448.103.000**	**100**	**6.893.847.149**	**100**	**7.949.496.199**	**200**	**14.843.343.348**	**200,00**	**54,08**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6600	orang	125.000.000	6600	orang	125.000.000	1092	15.930.000	0	10.405.000	**1.092**	**26.335.000**	**16,55**	**21,07**
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5972	orang	46.070.000	5972	orang	196.795.000	966		0	9.750.000	**966**	**9.750.000**	**16,18**	**4,95**
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31662	orang	156.413.000	31662	orang	156.413.000	11731	34.205.000	0	-	**11.731**	**34.205.000**	**37,05**	**21,87**

1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28386	orang	99.142.000	28386	orang	99.142.000	12128	-	0	1.435.000	**12.128**	**1.435.000**	**42,73**	**1,45**
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	207789	orang	163.173.000	207789	orang	163.173.000	43372	-	0	95.260.000	**43.372**	**95.260.000**	**20,87**	**58,38**
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36516	orang	27.053.000	36516	orang	27.053.000	9204	-	0	-	**9.204**	-	**25,21**	**-**
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76872	orang	6.576.000	76872	orang	6.576.000	15147	-	0	-	**15.147**	-	**19,70**	**-**
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6446	orang	6.291.000	6446	orang	6.291.000	2714	-	0	-	**2.714**	-	**42,10**	**-**
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	785	orang	11.520.000	785	orang	11.520.000	172	-	0	11.520.000	**172**	**11.520.000**	**21,91**	**100,00**
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5391	orang	62.734.000	5391	orang	62.734.000	2394	31.299.000	0	6.370.000	**2.394**	**37.669.000**	**44,41**	**60,05**
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12563	orang	73.286.000	12563	orang	73.286.000	3973	8.953.000	0	12.773.000	**3.973**	**21.726.000**	**31,62**	**29,65**

1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	dokumen	1.970.563.000	4	dokumen	204.488.000	0	9.737.500	0	579.850.000	-	**589.587.500**	-	**288,32**
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4	dokumen	49.125.000	2	dokumen	49.125.000	0	-	0	14.519.000	-	**14.519.000**	-	**29,56**
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2	dokumen	171.150.000	2	dokumen	171.150.000	0	17.346.000	0	24.022.000	-	**41.368.000**	-	**24,17**
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2	dokumen	1.416.948.000	1	dokumen	1.089.313.000	0	46.539.000	0	146.014.000	-	**192.553.000**	-	**17,68**
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3	dokumen	357.789.000	3	dokumen	357.789.000	0	21.305.600	0	186.414.800	-	**207.720.400**	-	**58,06**
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	dokumen	23.516.500.000	1	dokumen	22.887.216.000	0	6.402.646.400	0	6.574.636.000	-	**12.977.282.400**	-	**56,70**
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	dokumen	47.237.000	1	dokumen	47.237.000	0	180.000	0	-	-	**180.000**	-	**0,38**
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	dokumen	1.568.982.000	2	dokumen	1.681.814.000	0	296.270.649	0	271.617.399	-	**567.888.048**	-	**33,77**
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2	dokumen	31.988.000	2	dokumen	31.988.000	0	9.435.000	1	4.910.000	**1**	**14.345.000**	**50,00**	**44,84**
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Terlaksananya pemeliharaan sarana komunikasi data dan informasi**	**100**	**persen**	**22.500.000**	**100**	**persen**	**22.500.000**	**0**	**-**	**100**	**-**	**100**	-	**100,00**	**-**

1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	dokumen	22.500.000	1	dokumen	22.500.000	0	-	0	-	-	-	-	-
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasyankes yang diberikan rekomendasi tepat waktu**	**100**	**persen**	**69.675.000**	**100**	**persen**	**69.675.000**	**0**	**-**	**70**	**-**	**70**	**-**	**70,00**	**-**
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	52	unit	69.675.000	52	unit	69.675.000	22	-	13	-	**35**	**-**	**67,31**	**-**
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek**	**94,5**	**persen**	**972.721.000**	**94,5**	**persen**	**716.411.000**	**0**	**-**	**100**	**9.515.000**	**100**	**9.515.000**	**105,82**	**1,33**
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase penerbitan rekomendasi Surat Ijin Praktek tenaga kesehatan tepat waktu**	**100**	**persen**	**972.721.000**	**100**	**persen**	**716.411.000**	**0**	**-**	**100**	**9.515.000**	**100**	**9.515.000**	**100,00**	**1,33**
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	dokumen	972.721.000	2	dokumen	716.411.000	0	-	0	9.515.000	**-**	**9.515.000**	**-**	**1,33**
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar**	**100**	**persen**	**629.013.000**	**100**	**persen**	**600.676.000**	**0**	**15.774.214**	**62,5**	**192.491.014**	**63**	**208.265.228**	**62,50**	**34,67**
		Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	**96**	**persen**		**96**	**persen**		**0**		**0**		**-**	**-**	**-**	**-**

		Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	**98**	**persen**		**98**	**persen**		**0**		**64,58**		**65**	-	**65,90**	-
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase apotek, toko obat dan toko alat kesehatan yang dilakukan pengawasan**	**100**	**persen**	**46.991.000**	**100**	**persen**	**48.495.000**	**23,7**	**12.649.214**	**16,3**	**9.758.214**	**40**	**22.407.428**	**40,00**	**46,21**
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2	dokumen	46.991.000	2	dokumen	48.495.000	0	12.649.214	0	9.758.214	-	**22.407.428**	-	**46,21**
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan**	**100**	**persen**	**533.272.000**	**100**	**persen**	**503.431.000**	**16,67**	**3.125.000**	**16,67**	**155.783.800**	**33**	**158.908.800**	**33,34**	**31,57**

1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	5	dokumen	533.272.000	5	dokumen	503.431.000	0	3.125.000	0	155.783.800	-	**158.908.800**	-	**31,57**
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan pengawasan**	**95**	**persen**	**48.750.000**	**95**	**persen**	**48.750.000**	**0**	**-**	**0**	**26.949.000**	**-**	**26.949.000**	**-**	**55,28**
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2	dokumen	48.750.000	2	dokumen	48.750.000	0	-	0	26.949.000	-	**26.949.000**	-	**55,28**
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga Sehat**	**93**	**persen**	**968.213.000**	**93**	**persen**	**2.189.213.000**	**0**	**395.923.000**	**0**	**368.254.100**	**-**	**764.177.100**	**-**	**34,91**

1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Posyandu dengan Strata Mandiri**	**33**	**persen**	**906.518.000**	**33**	**persen**	**2.127.518.000**	**0**	**386.348.000**	**0**	**363.548.000**	**-**	**749.896.000**	**-**	**35,25**
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3	dokumen	906.518.000	3	dokumen	2.127.518.000	0	386.348.000	0	363.548.000	-	**749.896.000**	-	**35,25**
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan**	**100**	**persen**	**61.695.000**	**100**	**persen**	**61.695.000**		**9.575.000**	**100**	**4.706.100**	**100**	**14.281.100**	**100,00**	**23,15**
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	6	dokumen	61.695.000	2	dokumen	61.695.000	0	9.575.000	0	4.706.100	-	**14.281.100**	-	**23,15**

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja OPD.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2024 terdari dari 5 Program dan 16 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan dengan total anggaran dalam penetapan RKPD sebesar Rp. 108.183.227.000 ,-, sedangkan dalam APBD menjadi Rp. 92.648.436.000,-. Dalam perkembangannya anggaran banyak mengalami perubahan baik karena refocusing maupun penyesuaian nomenklatur baru. Anggaran dalam perubahan RKPD menjadi Rp. 111.125.993.000,-. Program dan Kegiatan tersebut dilaksanan oleh 3 Bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dan 1 (satu) Sekretariat.

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pekalongan. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan renja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan (N) yang dievaluasi (2024)					
			APBD			PERUBAHAN RENJA		
			K	Satuan	Anggaran	K	Satuan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dinas Kesehatan				92.648.436.000			111.125.993.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				92.648.436.000			111.125.993.000
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100**	**persen**	**49.753.819.000**	**100**	**persen**	**64.813.817.000**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**persen**	**21.985.000**	**100**	**persen**	**21.985.000**
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	3.500.000	2	dokumen	3.500.000
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	3.485.000	2	dokumen	3.485.000
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	laporan	15.000.000	15	laporan	15.000.000

1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**persen**	**47.045.580.000**	**100**	**persen**	**62.169.490.000**
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	484	Orang/bulan	46.958.955.000	484	Orang/bulan	62.082.865.000
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	83.395.000	12	dokumen	83.395.000
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	3.230.000	1	laporan	3.230.000
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**persen**	**5.000.000**	**100**	**persen**	**5.000.000**
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	5.000.000	1	paket	5.000.000
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**persen**	**401.626.000**	**100**	**persen**	**437.626.000**
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	5.000.000	4	paket	5.000.000
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	paket	132.067.000	4	paket	132.067.000

1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	paket	7.500.000	4	paket	7.500.000
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	96.559.000	4	paket	96.559.000
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	20.000.000	2	paket	26.000.000
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	2.500.000	2	dokumen	2.500.000
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260	laporan	138.000.000	280	laporan	168.000.000
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**persen**	**1.161.987.000**	**100**	**persen**	**1.161.987.000**
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	600.000	4	laporan	600.000
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	625.383.000	12	laporan	625.383.000
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	536.004.000	12	laporan	536.004.000
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**persen**	**1.117.641.000**	**100**	**persen**	**1.017.729.000**

1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	unit	360.936.000	41	unit	252.024.000
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	691.705.000	3	unit	700.705.000
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	91	unit	65.000.000	91	unit	65.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**91**	**persen**	**39.388.317.000**	**91**	**persen**	**42.808.881.000**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD)**	**100**	**persen**	**11.848.039.000**	**100**	**persen**	**11.635.521.000**
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6	unit	3.367.515.000	6	unit	3.364.015.000
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3	unit	451.444.000	3	unit	536.444.000

1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	unit	283.295.000	1	unit	283.295.000
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6	unit	1.057.890.000	6	unit	756.660.000
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	94	unit	203.304.000	94	unit	303.201.000
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3	paket	6.419.591.000	3	paket	6.326.906.000
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12	paket	65.000.000	12	paket	65.000.000

1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100**	**persen**	**27.448.103.000**	**100**	**persen**	**31.081.185.000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6600	orang	125.000.000	6006	orang	125.000.000
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5972	orang	196.795.000	5462	orang	196.795.000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31662	orang	156.413.000	18314	orang	156.413.000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28386	orang	99.142.000	45000	orang	99.142.000
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	207789	orang	163.173.000	210465	orang	163.173.000
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36516	orang	27.053.000	36783	orang	27.053.000
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76872	orang	6.576.000	76872	orang	6.576.000

1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6446	orang	6.291.000	14148	orang	6.291.000
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	785	orang	11.520.000	1013	orang	11.520.000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5391	orang	62.734.000	6836	orang	62.734.000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12563	orang	73.286.000	16169	orang	73.286.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	dokumen	204.488.000	2	dokumen	2.178.944.000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2	dokumen	49.125.000	2	dokumen	49.125.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2	dokumen	171.150.000	2	dokumen	171.150.000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	dokumen	1.089.313.000	1	dokumen	1.085.106.000

1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3	dokumen	357.789.000	3	dokumen	357.789.000
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	dokumen	22.887.216.000	1	dokumen	24.500.049.000
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	dokumen	47.237.000	1	dokumen	47.237.000
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	dokumen	1.681.814.000	2	dokumen	1.731.814.000
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2	dokumen	31.988.000	2	dokumen	31.988.000
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Terlaksananya pemeliharaan sarana komunikasi data dan informasi**	**100**	**persen**	**22.500.000**	**100**	**persen**	**22.500.000**
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	dokumen	22.500.000	1	dokumen	22.500.000
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasyankes yang diberikan rekomendasi tepat waktu**	**100**	**persen**	**69.675.000**	**100**	**persen**	**69.675.000**

1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	52	unit	69.675.000	52	unit	69.675.000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek**	**94,5**	**persen**	**716.411.000**	**94,5**	**persen**	**713.406.000**
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase penerbitan rekomendasi Surat Ijin Praktek tenaga kesehatan tepat waktu**	**100**	**persen**	**716.411.000**	**100**	**persen**	**713.406.000**
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	dokumen	716.411.000	2	dokumen	713.406.000
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar**	**100**	**persen**	**600.676.000**	**100**	**persen**	**600.676.000**
		Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	**96**	**persen**		**96**	**persen**	
		Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	**98**	**persen**		**98**	**persen**	
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase apotek, toko obat dan toko alat kesehatan yang dilakukan pengawasan**	**100**	**persen**	**48.495.000**	**100**	**persen**	**48.495.000**

1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2	dokumen	48.495.000	2	dokumen	48.495.000
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan**	**100**	**persen**	**503.431.000**	**100**	**persen**	**503.431.000**
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	5	dokumen	503.431.000	5	dokumen	503.431.000

1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan pengawasan**	**95**	**persen**	**48.750.000**	**95**	**persen**	**48.750.000**
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2	dokumen	48.750.000	1	dokumen	48.750.000
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga Sehat**	**93**	**persen**	**2.189.213.000**	**93**	**persen**	**2.189.213.000**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Posyandu dengan Strata Mandiri**	**33**	**persen**	**2.127.518.000**	**33**	**persen**	**2.127.518.000**
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3	dokumen	2.127.518.000	3	dokumen	2.127.518.000

1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan**	**100**	**persen**	**61.695.000**	**100**	**persen**	**61.695.000**
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2	dokumen	61.695.000	2	dokumen	61.695.000

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan tatakelola Pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan adalah Program Tahunan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024. Dengan Perubahan Renja, pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pekalongan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pekalongan

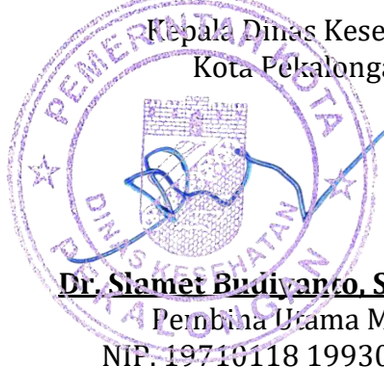

Dr. Slamet Budiyanto, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19710118 199303 1 005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
RSUD BENDAN
TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah

RSUD Bendan Kota Pekalongan adalah lembaga teknis daerah yang didirikan berdasarkan Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) “Bendan” Kota Pekalongan.

Berdiri pada tahun 2009 dan menjadi rumah sakit tipe C sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 534/MENKES/SK/2010. Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat RSUD Bendan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) mulai taun 2009. PPK BLUD merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat yang ditetapakan berdasarkan SK Walikota Pekalongan Nomor 445/071 Tahun 2009 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan Sebagai Badan Layanan Umum (BLU). RSUD Bendan terakreditasi paripurna oleh KARS pada tahun 2021 dan kembali terkreditasi PARIPURNA oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP) pada tahun 2022 .

RSUD Bendan merupakan Unit Organisasi yang Bersifat Khusus (UOBK) dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan kepegawaian sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kelas C.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tiugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kelas C, bahwa Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah terdiri dari :

a. Direktur;
b. Bagian Tata Usaha
    1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
    2) Subbagian Keuangan; dan
    3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pelayanan Medis
    1) Seksi Pelayanan Medis dan Rekam Medis; dan
    2) Seksi Pengembangan Pelayanan Medis.
d. Bidang Pelayanan Keperawatan
    1) Seksi Asuhan Pelayanan Keperawatan; dan
    2) Seksi Pengembangan dan Etika Keperawatan.
e. Bidang Pengembangan dan Penunjang Pelayanan
    1) Seksi Penunjang Pelayanan Non Medis dan Pengembangan Pelayanan Penunjang; dan
    2) Seksi Penunjang Pelayanan medis.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Unit Organisasi Pendukung

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Tugas Dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dimana menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Kegiatan pelayanan di RSUD Bendan Kota Pekalongan di antaranya adalah:

1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).
2. Pelayanan Instalasi Rawat Inap

    Dengan adanya pandemi covid-19, ruang pelayanan rawat inap mengalami perubahan sebagai berikut:

    a. Ruang Buketan, digunakan untuk rawat inap penyakit dalam dan ruang isolasi.
    b. Ruang Jlamprang, digunakan untuk rawat inap bedah
    c. Ruang Sekar Jagad, ruang rawat inap anak
    d. Ruang Truntum, ruang rawat penyakit dalam
    e. Ruang Terang Bulan, digunakan untuk ruang rawat inap VIP dan VVIP
    f. Ruang VK NIfas, ruang perawatan kebidanan dan kandungan
    g. Ruang Perinatologi, ruang perawatan bayi
    h. Pelayanan Intensive Care (ICU/ICCU/PICU/NICU)
3. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
    a. Klinik Umum
    b. Klinik Gigi dan Mulut
    c. Klinik DOTS

d. Klinik VCT/CST

e. Klinik Spesialis/SubSpesialis : anak, bedah umum, bedah orthopedi, bedah syaraf, bedah digestive, bedah mulut, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, mata,syaraf, THT, kesehatan jiwa, jantung, paru, kulit dan kelamin, klinik eksekutif Parikesit.

4. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
5. Pelayanan Penunjang : laboratoriumpatologi klinik, laboratorium patologi anatomi, radiologi, hemodialisa, rekam medik, cathlab, rehabilitasi medik, psikologi, farmasi, gizi, CSSD, laundry, IPSRS, BDRS, ambulans, pemulasaraan jenazah, IPAL dan IT.
6. Pelayanan Unggulan: klinik spesialis mata, orthopedi, jantung dan rehab medik
7. Pelayanan yang diberikan oleh praktisi independent:
   Pemeriksaan CT Scan dan MRI
8. Pelayanan yang dirujuk: rawat inap pasien dengan gangguan jiwa dan penyalahgunaan narkoba.

1.2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tersaji pada tabel 1.1 berdasarkan tabel tersebut, indikator SPM sampai dengan triwulan II yang tidak memenuhi target yang direncanakan antara lain:

1. Jam Visite Dokter Spesialis
2. Kematian pasien > 48 jam
3. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr
4. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria
5. Pemberian pelayanan unit intensif
6. Waktu tunggu pelayanan obat jadi
7. Penulisan resep sesuai formularium
8. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi
9. Kelengkapan Informed consent

10. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun
11. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap
12. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah
13. Ada anggota Tim PPI yang terlatih

Tabel 1.1

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah RSUD Bendan Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Tahun 2024	Realisasi s.d TW II Tahun 2024	Catatan Analisis
1	*2*	*3*	*4*	*8*	*9*	*13*
I.	IGD					
	1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%		100%	100%	Tercapai
	2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam		24 jam	24 jam	Tercapai
	3. Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%		100%	100%	Tercapai
	4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 tim		1 tim	3 tim	Tercapai
	5. Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat	<5 menit		<5 menit	1 menit 33 detik	Tercapai
	6. Kepuasan pelanggan pada Gawat Darurat	>70%		>70%	93,61%	Tercapai
	7. Kematian pasien < 24 jam	<2‰		<2‰	1,87‰	Tercapai
	8. Tidak adanya pasien yang harus membayar uang muka	100%		100%	100%	Tercapai
II.	RAWAT JALAN					
	1. Dokter Pemberi pelayanan di Klinik spesialis	100%		100%	100%	Tercapai
	2. Ketersediaan pelayanan	Klinik anak, penyakit dalam, kebidanan bedah		Klinik anak, penyakit dalam, kebidanan bedah	Tersedia	Tercapai
	3. Jam Buka pelayanan	100%		100%	100%	Tercapai
	4. Waktu tunggu di rawat jalan	<60 menit		<60 menit	33,47menit	Tercapai
	5. Kepuasan pelanggan pada Rawat Jalan	>90%		>90%	96,83%	Tercapai
	6. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB dg strategi DOTS	>60%		>60%	84,15%	Tercapai
	7. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	>60%		>60%	99%	Tercapai
III.	RAWAT INAP					
	1. Pemberian pelayanan rawat inap	100%		100%	100%	Tercapai
	2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%		100%	100%	Tercapai
	3. Ketersediaan pelayanan rawat inap	Anak, penyakit dalam, kebidanan, bedah		Anak, penyakit dalam, kebidanan, bedah	Tersedia	Tercapai
	4. Jam Visite Dokter Spesialis	100%		100%	92,88%	Belum Tercapai
	5. Kejadian Infeksi pasca operasi	≤1,5%		≤1,5%	0,18%	Tercapai
	6. Kejadian infeksi nosokomial	≤1,5%		≤1,5%	0,11%	Tercapai

	7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%		100%	100%	Tercapai
	8. Kematian pasien > 48 jam	≤0,24%		≤0,24%	2,61%	BelumTercapai
	9. Kejadian pulang paksa	≤5%		≤5%	1,09%	Tercapai
	10. Kepuasan pelanggan rawat inap	≥90%		≥90%	93,05%	Tercapai
	11. Rawat Inap TB					
	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	≥60%		≥60%	80,48%	Tercapai
	b. Terlaksananya Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan TB	≥60%		≥60%	100%	Tercapai
IV.	BEDAH SENTRAL					
	1. Waktu tunggu operasi efektif	≤2 hari		≤2 hari	0,80%	Tercapai
	2. Kejadian kematian di meja operasi	≤1%		≤1%	0%	Tercapai
	3. Tidak adanya kejadian salah sisi	100%		100%	100%	Tercapai
	4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%		100%	100%	Tercapai
	5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%		100%	100%	Tercapai
	6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%		100%	100%	Tercapai
	7. Komplikasi anestesi overdosis, reaksi dan salah penempatan ET	≤6%		≤6%	0%	Tercapai
V.	PERSALINAN, PERINATOLOGI					
	1. Kejadian kematian Ibu karena persalinan					
	a. Perdarahan	≤1%		≤1%	0%	Tercapai
	b. Pre-Eklamsia	≤30%		≤30%	0%	Tercapai
	c. Sepsis	≤0,2%		≤0,2%	0%	Tercapai
	2. Pemberi layanan persalinan normal	100%		100%	100%	Tercapai
	3. Pemberi layanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK terlatih		Tim PONEK terlatih	Tersedia	Tercapai
	4. Pemberi layanan persalinan dengan tindakan operasi	100%		100%	100%	Tercapai
	5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100%		100%	93,51%	Belum Tercapai
	6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤20%		≤20%	37,17	Belum Tercapai
	7. a. Keluarga Berencana	100%		100%	100%	Tercapai
	b. Konseling KB Mantap	100%		100%	100%	Tercapai
	8. Kepuasan pelanggan	≥ 80%		≥ 80%	94,77%	Tercapai
VI.	INTENSIF					
	1. Rata-rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama ≤ 72jam	≤3%		≤3%	0%	Tercapai
	2. Pemberian pelayanan unit intensif	100%		100%	88%	Belum Tercapai
VII.	RADIOLOGI					
	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	<3 jam		<3 jam	0,75 jam	Tercapai
	2. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	kerusakan foto <2%		kerusakan foto <2%	1,05%	Tercapai
	3. Pelaksanaan ekspertisi	100%		100%	100%	Tercapai
	4. Kepuasan pelanggan	>80%		>80%	98,17%	Tercapai
VIII.	LAB.PATOLOGI KLINIK					
	1. Waktu tunggu pelayanan Laboratorium	<140 menit		<140 menit	39 menit 38 detik	Tercapai
	2. Pelaksanaan Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	100%		100%	100%	Tercapai
	3. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%		100%	100%	Tercapai
	4. Kepuasan pelanggan	80%		80%	99,40%	Tercapai
IX.	REHABILITASI MEDIK					

	1. Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	<50%		<50%	5,93%	Tercapai
	2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%		100%	100%	Tercapai
	3. Kepuasan pelanggan	>80%		>80%	96,33%	Tercapai
X	FARMASI					
	1. Waktu tunggu pelayanan					
	Obat Jadi	<30 menit		<30 menit	38,76menit	Belum Tercapai
	Obat Racikan	<60 menit		<60 menit	46,64 menit	Tercapai
	2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%		100%	100%	Tercapai
	3. Kepuasan pelanggan	>80 %		>80 %	99,01%	Tercapai
	4. Penulisan resep sesuai formularium	100%		100%	99,99%	Belum Tercapai
XI.	GIZI					
	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	>90%		>90%	100%	Tercapai
	2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	<20%		<20%	10,52%	Tercapai
	3. Tidak adanya kesalahan dalam pemberian Diet	100%		100%	100%	Tercapai
XII.	TRANSFUSI DARAH					
	1. kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%		100%	92,17%	Belum Tercapai
	2. Kejadian reaksi transfusi	<0,01%		<0,01%	0%	Tercapai
XIII.	PELAYANAN GAKIN Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%		100%	100%	Tercapai
XIV.	REKAM MEDIK					
	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam	100%		100%	100%	Tercapai
	2. Kelengkapan Informed consent	100%		100%	98,12%	Belum Tercapai
	3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	<10 menit		<10 menit	1menit	Tercapai
	4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	<15 menit		<15 menit	4,01 menit	Tercapai
XV.	PENGELOLAAN LIMBAH					
	1. Baku mutu limbah cair	100%		100%	100%	Tercapai
	2. Pengelolaan limbah padat infeksius dengan aturan	100%		100%	100%	Tercapai
XVI.	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN					
	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan	100%		100%	100%	Tercapai
	2. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%		100%	100%	Tercapai
	3. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%		100%	100%	Tercapai
	4. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	≥60%		≥60%	4,77%	Belum Tercapai
	5. Kelengkapan Laporan Akuntabilitas kinerja	100%		100%	100%	Tercapai
	6. Cost Recovery	≥40%		≥40%	108,67%	Tercapai
	7. Ketepatan waktu penyusunan laporan Keuangan	100%		100%	100%	Tercapai
	8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤2 Jam		≤2 Jam	212,40 menit	BelumTercapai
	9. Kecepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%		100%	100%	Tercapai
XVII.	AMBULANCE / KERETA					

	JENAZAH 1. Waktu pelayanan ambulance (kereta jenazah) 2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah	24 Jam 100%		24 Jam 100%	24 Jam 98,82%	Tercapai Belum Tercapai
XVIII.	PELAYANAN JENAZAH Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤2 Jam		≤2 Jam	30,05 menit	Tercapai
XIX.	PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT 1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat 2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat 3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	 ≥80 % 100% 100%		 ≥80 % 100% 100%	 89,44% 100% 100%	 Tercapai Tercapai Tercapai
XX.	PELAYANAN LAUNDRY 1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang 2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk rawat inap	 100% 100%		 100% 100%	 100% 100%	 Tercapai Tercapai
XXI.	PPI 1. Ada anggota Tim PPI yang terlatih 2. Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen 3. Kegiatan Pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (min 1 Parameter)	 75% 75% 75%		 75% 75% 75%	 6,25 % 100% 100%	 Belum Tercapai Tercapai Tercapai

1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu strategis yang berasal dari internal rumah sakit adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar.
2. Belum optimalnya Tenaga Kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.
3. Belum cukupnya penerimaan keuangan BLUD untuk mengcover seluruh biaya operasional.

Analisis isu strategis yang berasal dari eksternal rumah sakit adalah sebagai berikut:

1. Perubahan perilaku yang mengakibatkan perubahan pola penyakit.
2. Perubahan preferensi baru pada pasien yang menginginkan pelayanan kesehatan yang lebih mudah melalui telemedicine atau perawatan berbasis rumah.
3. Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

4. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat.
5. Banyaknya layanan kesehatan rujukan di Kota Pekalongan yang menyebabkan tingkat persaingan dalam industri kesehatan di Kota Pekalongan menjadi semakin ketat.

1.4. Inovasi Kebijakan Pembangunan

RSUD Bendan mendukung kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan dengan memuat inovasi dan menerapkannya secara berkelanjutan, dimana inovasi yang masih relevan akan terus digunakan dan dikembangkan lebih lanjut di tahun 2024, antara lain:

1. BEMBI NAIK SI BEMO merupakan aplikasi yang disusun RSUD pada tahun 2021, melalui pengembangan terbaru adanya penambahan menu panggilan darurat yang langsung terhubung ke call center BEMBI (Bendan Emergency Mobile) yaitu merupakan layanan penjemputan pasien gawat darurat oleh tenaga yang berkompeten dimana pasien dijemput dengan ambulance BEMBI, langsung ditangani kegawatdaruratan ditempat pasien untuk selanjutnya dibawa ke IGD RSUD Bendan. Aplikasi ini masih relevan untuk digunakan dan dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan/perluasan jarak tempuh menjadi 30 km mengingat respon penerima manfaat cukup baik dan jumlahnya cukup banyak.
2. DOI SUPER ANTIK (Dokumentasi Asuhan Keperawatan Elektronik), yang merupakan aplikasi Rekam Medis Elektronik yang dikembangkan RSUD Bendan pada tahun 2021 sebagai upaya pelayanan kepada pasien dan dokter di lingkungan RSUD Bendan. Inovasi ini digunakan pada seluruh pasien sehingga kemanfaaatan penggunanya cukup luas. Hal ini relevan untuk dipertahankan serta dikembangkan fitur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
3. Manajemen Karyawan Online (MAKARYO) yang merupakan aplikasi manajemen karyawan dimana semua pegawai dapat mengakses data diri secara cepat dan akurat dimana saja melalui android termasuk pengajuan cuti dan absensi. Hal ini relevan untuk dipertahankan serta dikembangkan fitur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
4. Bendan Asistant Personal (BAPER) yang merupakan aplikasi untuk memantau kinerja dokter spesialis yang dapat melihat berapa pasien yang ditangani dan berapa jasa pelayanan yang didapatkan secara realtime. Hal

ini relevan untuk dipertahankan serta dikembangkan fitur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

5. Manajemen Goes Online (MEGONO) yang merupakan aplikasi untuk manajemen yang dapat melihat dan memantau kinerja rumah sakit termasuk jumlah pasien dan siapa saja dokter yang praktik pada hari itu juga. Hal ini relevan untuk dipertahankan serta dikembangkan fitur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
6. Inovasi SISARASA (Sistem Informasi Kerjasama Rumah Sakit) yang merupakan inovasi pengelolaan perjasama di RSUD Bendan yg semula masih manual menjadi tersistem secara digitalisasi yang terintegrasi dengan website RSUD Bendan, efektif, efisien dan terdapat notifikasi sebagai pengingat pada saat menjelang berakhirnya perjanjian kerjasama dengan RSUD Bendan. Hal ini relevan untuk dipertahankan serta dikembangkan fitur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
7. JEMPOL (JEMbatan Pembayaran OnLine) yaitu sebuah sistem pembayaran perbankan berbasis QRIS yang sudah terintegrasi dengan sistem keuangan RSUD Bendan, sehingga sangat praktis, mudah dan cepat secara pelayanan kepada pasien dan laporan keuangan otomatis tersusun dan terekonsiliasi dengan bank. Hal ini relevan untuk dipertahankan serta dikembangkan fitur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
8. Inovasi layanan RATRI TOBAT (Ora Usah Antri Tunggu Obat) yang mwerupakan layanan ini memberikan kemudahan kepada pasien untuk memilih antrian obat ditunggu, ditinggal atau diantar melalui anjungan antrian farmasi. Hal ini relevan untuk dipertahankan serta dikembangkan fitur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

1.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II

Rencana Kerja RSUD Bendan Kota Pekalongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis RSUD Bendan Kota Pekalongan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut dilakukan pengukuran kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. yang telah diraih atau dilaksanakan oleh RSUD Bendan Kota Pekalongan sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Tabel 2.1

Sumber Anggaran pada DPA RSUD Bendan Tahun Anggaran 2023

No.	Sumber Anggaran	Rp	%
1.	DAU	368.714.000,-	0,39
2.	DAK	1.500.000.000,-	1,60
3.	BANKEU	5.000.000.000,-	5,31
4.	BLUD	87.000.000.000,-	92,68
Total		93.868.714.000,-	100

Sampai dengan triwulan II, anggaran telah direalisasikan sebesar 42.117.003.559,- atau 44,87% dari pagu. Berikut adalah tabel yang menggambarkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi keuangan dan *output* serta *outcome* sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Tabel 2.3

Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RSUD Bendan Kota Pekalongan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	*Output* dan *Outcome*					Keuangan		
		Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	%	Pagu	Realisasi s.d TW II	%
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Presentase ketersediaan layanan BLUD** **2. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja** **3. Presentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100** **100** **100**	**50** **33,34** **33,33**	**50** **33,34** **33,33**	**87.093.855.000**	**42.092.191.131**	**48**
1.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**16,67**	**16,67**	**8.485.000**	**1.710.000**	**20**
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	0	0	870.000	0	**0**
b.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	0	0	615.000	0	**0**
c.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	5	50	7.000.000	1.710.000	**24**

2.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**%**	**100**	**50**	**50**	**57.370.000**	**11.925.000**	**21**
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	0	0	0	**-**	**0**	**0**
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	6	50	56.800.000	11.925.000	**21**
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	**1**	**100**	570.000	0	**0**
3.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**%**	**100**	**33,33**	**33,33**	**28.000.000**	**12.804.431**	**46**
a.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	**10**	**33,33**	28.000.000	12.804.431	**46**
4.	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD**	**%**	**100**	**50**	**50**	**87.000.000.000**	**42.065.751.700**	**48**
a.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	**1**	**100**	87.000.000.000	42.065.751.700	**48**
II.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA**	**Presentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD**	**%**	**67,5**	**100**	**148,15**	**6.709.813.000**	**3.145.000**	**0**

	KESEHATAN MASYARAKAT	**yang sesuai standar**							
1.	**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan**	**%**	**100**	**0**	**0**	**6.594.500.000**	**0**	**0**
a.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	22	0	0	6.594.500.000	0	**0**
2.	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**%**	**100**	**100**	**100**	**32.813.000**	**3.145.000**	**10**
a.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	900	**340**	**37,78**	32.813.000	3.145.000	**10**
3.	**Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan**	**%**	**100**	**50**	**50**	**82.500.000**	**0**	**0**
a.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan	Unit	27	**27**	**100**	82.500.000	0	**0**

		kesehatan							
III.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Presentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan**	**%**	**50**	**100**	**200**	**65.046.000**	**21.667.428**	**33**
1.	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase perawat dan bidan yang terkredensial**	**%**	**100**	**100**	**100**	**48.921.000**	**20.167.428**	**41**
a.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	1	**0**	**0**	0	0	**0**
b.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	2	**1**	**50**	48.921.000	20.167.428	**41**
2.	**Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perawat/bidan yang bersertifikat pelatihan pengembangan kompetensi**	**%**	**20**	**0**	**0**	**16.125.000**	**1.500.000**	**9**

a.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	92	0	0	16.125.000	1.500.000	**9**
						TOTAL	**93.868.714.000**	**42.117.003.559**	**45**

Terdapat 2 indikator program yang capaian indikator kinerjanya jauh melebihi target dikarenakan :

1. Pengembangan Pelayanan dan Inovasi di RSUD Bendan dalam pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Tipe C)
2. Adanya UU Nomor 17 tahun 2023 dimana diwajibkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR dan SIP, sehingga pada saat ini semua tenaga kesehatan RSUD yang masuk dan bekerja di RSUD telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, RSUD Bendan adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup.
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan sumber daya kesehatan.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan, yaitu meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan perannya diarahkan tidak hanya berfokus pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif untuk mengejar *revenue*, tetapi harus mempunyai peran dalam program prioritas, seperti penurunan kematian maternal, penurunan kematian bayi, penurunan *stunting*, penurunan *wasting*, dan juga pengendalian penyakit.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026, misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang berkaitan dengan kesehatan adalah misi 1, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Uraian tujuan pada misi tersebut adalah:

Tujuan:

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran:

a. Meningkatnya indeks keluarga sehat.
b. Meningkatnya penanganan kemiskinan.

RSUD Bendan sebagai unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan. Tujuan Dinas Kesehatan adalah:

a. Meningkatkan kualitas layanan publik
b. Meningkatkan indeks keluarga sehat.

Sasaran Dinas Kesehatan adalah:

a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
b. Tercapainya kinerja standar pelayanan minimal kesehatan.

IKU Dinas Kesehatan adalah:

a. Nilai SAKIP OPD.
b. Persentase capaian SPM Kesehatan.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Beberapa hal yang terjadi sampai dengan triwulan II tahun 2024 yang perlu menjadi pertimbangan dalam penganggaran. Isu-isu penting terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Bendan dan memerlukan perhatian adalah :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dipindah ke Dinas Kesehatan sehingga Anggaran di RSUD di nol kan.
2. Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sesuai Standar dilebur menjadi satu pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan sehingga pagu anggaran juga digabung.
3. Adanya Penyesuaian Pagu DAK Fisik sesuai dengan nilai kontrak.
4. Adanya SILPA pada anggaran BLUD tahun 2023 yang akan dimanfaatkan untuk pembiayaan di tahun 2024.

Untuk mendukung prioritas kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dan menjawab isu-isu yang terjadi sampai dengan triwulan II tahun 2024, dengan ini RSUD Bendan mengusulkan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2024 ini. Dari semula terdiri dari 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan menjadi 12 (dua belas) Sub Kegiatan dengan anggaran Rp 93.868.714.000,- menjadi Rp 111.955.118.000,-. Adapun rekapitulasi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.

Rencana Perubahan Program dan Kegiatan

RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Rencana Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Presentase ketersediaan layanan BLUD** **2. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja** **3. Presentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100** **100** **100**	**105.273.259.000**	
1.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**8.485.000**	

a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	870.000	DAU
b.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	615.000	DAU
c.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	7.000.000	DAU
2.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**57.370.000**	
a.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	56.800.000	DAU
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	570.000	
3.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**28.000.000**	
a.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	28.000.000	DAU
4.	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD**	**100**	**105.179.404.000**	
a.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	105.179.404.000	DAU
II.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Presentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar**	**100**	**6.709.813.000**	
1.	**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan**	**Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan**	**100**	**6.501.500.000**	

	Daerah Kabupaten/Kota				
a.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	22	6.501.500.000	DAK BANKEU DAU
2.	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100**	**32.813.000**	
a.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500	32.813.000	DAU
3.	**Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan**	**100**	**82.500.000**	
a.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	27	82.500.000	DAU
III.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Presentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan**	**100**	**65.046.000**	
1.	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase perawat dan bidan yang terkredensial**	**100**	**48.921.000**	
a.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	48.921.000	DAU
2.	**Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan**	**Persentase perawat/bidan yang bersertifikat pelatihan pengembangan kompetensi**	**100**	**16.125.000**	

	Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
b.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	92	16.125.000	**DAU**
TOTAL				**111.955.118.000**	

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 secara lebih rinci terdapat pada lampiran.

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan RSUD Bendan Kota Pekalongan tahun 2024 ini disusun dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan sasaran RSUD Bendan disesuaikan Arah Kebijakan dan Prioritas Program Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024.

Dalam rangka mengimplementasikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan RSUD Bendan Tahun 2024, RSUD Bendan mempertimbangkan seluruh potensi pendanaan baik dari APBD Kota Pekalongan maupun Bantuan Pendanaan yang bersumber dari APBN.

Kemudian dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD Bendan Kota Pekalongan Tahun 2024 ini maka diharapkan penetapan prioritas pembangunan Kota Pekalongan terutama bidang kesehatan dapat lebih terkoordinasi dan tersinergikan dengan Instansi/Perangkat Daerah serta stakeholder terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Direktur RSUD Bendan
Kota Pekalongan

dr. DWI HERI WIBAWA, M.Kes

LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DOKUMEN PERUBAHAN

RENJA

RENCANA KERJA

DPUPR KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadir/an Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Renja Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Rancangan Renja ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022-2026. Rencana Kerja Tahunan ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah diselesaikan sesuai dengan RENJA tahun lalu dan kebijakan serta rencana kerja.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2024. Rencana Kerja Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama 5 (lima) tahun, dimana rencana kerja ini disusun dalam upaya memberikan arah / pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2024. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pekalongan, 12 September 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang,
Kota Pekalongan

BAMBANG SUGIARTO, ST.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710304 199903 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud danTujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II HASI; EVALUASI RENJA DPUPR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2024 6
2.1. Hasil Evaluasi Renja DPUPR Sampai Dengan Triwulan Ii 2024 6
2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan 43
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 46
2.1. Rekapitulasi Perubahan kegiatan Renja DPUPR Tahun 2024 46
2.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif 2024 46
BAB IV PENUTUP 56

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian Sasaran Strategis DPUPR Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 8
Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Program DPUPR sampai dengan Triwulan II 2024..... 11
Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Indikator kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2024..... 14
Tabel 2. 4 Sasaran Strategis dan IKU DPUPR Kota Pekalongan Tahun 2024 43
Tabel 2. 5 Capaian Indikator Kinerja Utama DPUPR Kota Pekalongan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 44
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan DPUPR 46
Tabel 3. 2 Rekap Perubahan Pagu Indikatif DPUPR Tahun 2024 47
Tabel 3. 3 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif RDPUPR Tahun 2024 48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah DPUPR Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah DPUPR untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kota Pekalongan.

Rencana Kerja (Renja) perubahan DPUPR Kota Pekalongan ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana perubahan tahunan, Rencana Kerja perubahan ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung tujuan DPUPR Kota Pekalongan mengingat bahwa :

a) Rencana Kerja Perubahan merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan sesuai dengan Perwal no 55 tahun 2022 tanggal 28 Juli 2024 tentang penetapan RKPD Perubahan Tahun 2024
b) Rencana Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA- P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Pekalongan.
c) Rencana Kerja perubahan merupakan salah satu instrumen untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian dan realisasi kinerja Perangkat Daerah serta capaian dan realisasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah tercapai

Dokumen Perubahan Renja DPUPR Kota Pekalongan Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja Perubahan DPUPR Kota Pekalongan Tahun 2024 memuat rumusan tujuan,

sasaran, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2024 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan;
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan;
19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8)
24. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2024 tenatng Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 adalah:

1.1.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 adalah:

1. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidaksesuaian yang terjadi setelah dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024;

2. Mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah tahun 2024;
3. Memberikan pedoman perubahan indikator kinerja kegiatan yang meliputi perubahan keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan dan pagu indikatif kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 ini adalah:

1. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Untuk menyikapi berbagai dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan ataupun berbagai perubahan kebijakan dari Provinsi dan Pemerintah Pusat;
3. Untuk menjaga konsistensi rencana pembangunan daerah dengan anggaran pembangunan daerah yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024;
4. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi; dan
5. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.2. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Menguraikan analisis gambaran pelayanan, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II : Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan II tahun 2024.

2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan

Memuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan pengendalian pelaksanaanya.

Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan rencana pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bab IV : Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan angaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKALONGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Hasil Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Untuk memantapkan perubahan rencana kerja tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024. Pada pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi.

Tujuan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan Kota Pekalongan. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam capaian kinerja strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2024 memuat 10 (sepuluh) program dan 20 (dua puluh) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 70.646.869.000,-. Setelah melalui

beberapa tahapan proses perencanaan dan pembahasan oleh TAPD, dalam Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan tahun 2024 anggaran berubah menjadi sebesar Rp. 69.396.480.000,-. dengan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan sama dengan penetapan APBD.

Realisasi Target Kinerja (sasaran strategis, program, kegiatan dan anggaran) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 berserta analisisnya, tersaji dalam tabel 2.1, tabel 2.2 dan tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Capaian Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama) Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Tipe Indi / Capaian / f.pengali	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
							TW 1	TW 2				
1.1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	Indeks	85.50	84.45	0.00	n/a	n/a	n/a	belum tersedia data	**Analisis :** Menunggu rilis nilai dari Inspektorat Kota Pekalongan di TW. IV **Hambatan/Permasalahan:** - **Rencana Tindak Lanjut :** -
2.1.	Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	persen	99.00	100.00	0.00	100.00	100.00	101.01	Tercapai	**Analisis :** Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD 62100 jumlah rumah kab/kota 62100 **Hambatan/Permasalahan:** - kurangnya informasi terkait dengan tata cara pendaftaran dan biaya sedot tinja - Kurangnya sdm untuk melakukan survey terkait dengan pendataan jumlah sanitasi **Rencana Tindak Lanjut :** - Melakukan sosialisasi terkait jamban aman - Melakukan pendataan terkait dengan jumlah sanitasi di masyarakat, baik secara individual maupun komunal.
3.1.	Meningkatnya	Persentase	Data Terakhir/	persen	80.42	77.88	77.88	77.88	77.88	96.84	Tidak	**Analisis :**

Kode	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Tipe Indi / Capaian / f.pengali	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
							TW 1	TW 2				
	sarpras pengendali banjir dalam kondisi baik	Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Semakin Tinggi Semakin Baik / 100								Tercapai	Luas Kawasan Kota yang Terlindungi Infrastruktur Pengendali Banjir 3615.19 Luas Wilayah Kota 4642 data masih mengacu pada Tahun 2023 **Hambatan/Permasalahan:** - Salah satu penyebab banjir rob saat ini melalui sungai dan drainase di wilayah kota Pekalongan yang merupakan kewenangan Balai PSDA Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan. **Rencana Tindak Lanjut :** - Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi Jawa Tengah serta kabupaten pekalongan untuk secara sinergi melakukan penanganan banjir dan rob
4.1.	Meningkatnya layanan air bersih perpipaan	persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	persen	89.66	100.00	100.00	100.00	100.00	111.53	Tercapai	**Analisis :** Kota Pekalongan sudah terlayani air minum 100% (data SPM) 317.535 jiwa **Hambatan/Permasalahan:** - Masih diperlukan penambahan jaringan Sambungan Rumah (SR) - Masih kurangnya pembangunan perluasan perpipaan di Perkotaan **Rencana Tindak Lanjut :** - penambahan jaringan Sambungan Rumah (SR) - pembangunan perluasan perpipaan di Perkotaan
5.1.	Meningkatnya pengembangan sarana	Pengembangan Sarana Persampahan	Akumulasi dengan Tahun sebelumnya/	persen	60.00	20.00	20.00	20.00	60.00	100.00	Tercapai	**Analisis :** 2022 = 0 komponen 2023 = 3

Kode	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Tipe Indi / Capaian / f.pengali	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
							TW 1	TW 2				
	persampahan		Semakin Tinggi Semakin Baik / 100									komponen (TPS3R Kelurahan Pringrejo) rencana 2024 = 6 komponen (TPS3R Kelurahan Bugisan dan TPST di Kelurahan Kuripan Kertoharjo) **Hambatan/Permasalahan:** - Sudah ada perencanaan namun terkendala masalah lahan **Rencana Tindak Lanjut :** - Kedepan untuk lebih dicermati terkait masalah lahan agar kiranya apa yang sudah direncanakan dan dianggarkan agar bisa terbangun
6.1.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan perkotaan	Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	persen	1.09	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	**Analisis :** (Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap pada Tahun N - Panjang Jala Dalam Kondisi Mantap Tahun N-1) = 123,464 km - 123,464 km = 0 Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Tahun N-1 = 123,464 km **Hambatan/Permasalahan:** - Beberapa ruas jalan yang berada di daerah atau tergenang sehingga memberikan andil yang cukup besar terhadap kerusakan jalan dan jembatan; **Rencana Tindak Lanjut :** - Melakukan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap jalan dan jembatan yang telah terbangun
7.1.	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	persen	96.22	99.89	99.45	99.45	99.45	103.36	Tercapai	**Analisis :** Luas Kawasan Lindung dan Budidaya sesuai RTRW tahun N = 4616,48 Luas Kawasan Lindung dan Budidaya sesuai RTRW = 4642 Ha

Kode	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Tipe Indi / Capaian / f.pengali	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
							TW 1	TW 2				
	perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang	Pemanfaatan Ruang										**Hambatan/Permasalahan:** - Pengetahuan masyarakat tentang perizinan pemanfaatab ruang yang masih rendah **Rencana Tindak Lanjut :** - Sosialisasi terkait tata ruang kepada masyarakat

Tabel 2. 2
Capaian Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum sampai dengan Triwulan II 2024

Kode	Nama Program	Indikator Program	Tipe Indi / Capaian / f.pengali	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
							TW 1	TW 2				
1.03.03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik /	Persen	89.66	67.42	67.42	67.42	67.42	75.19	Tidak Tercapai	Jumlah Pamsimas sebanyak 13.660 sambungan rumah, jumlah PDAM sebanyak 28.207 sambungan rumah. Jumlah total layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah Kota Pekalongan sebanyak 41.867 sambungan rumah. Jumlah rumah di Kota Pekalongan secara keseluruhan sebanyak 62.100 rumah = (41.867/62.100) x 100% =67.41 (data masih menggunakan tahun 2023)
1.03.06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik /	Persen	69.48	68.58	68.58	68.58	68.58	98.71	Tidak Tercapai	Data masih mengacu pada tahun 2023

Kode	Nama Program	Indikator Program	Tipe Indi / Capaian / f.pengali	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
							TW 1	TW 2				
			100									
1.03.01	Program Penungjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Data Tiap Triwulan/ Semakin tinggi Semakin Baik / 1	Persen	100	100	28.85	12.29	41.14	41.14	Tidak Tercapai	Persentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah = 9,09% Persentase capaian kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah = 15,48%
1.03.01	Program Penungjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Data Tiap Triwulan/ Semakin tinggi Semakin Baik / 1	Persen	100	100.28	26.54	17.29	43.83	43.83	Tidak Tercapai	Persentase capaian kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah = 0% Persentase capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah = 26,66 % Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah = 25%
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Persampahan Regional	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	Persen	60.00	20.00	20.00	20.00	20.00	33.33	Tidak Tercapai	2022= 0 komponen 2023 = 3 komponen (TPS3R Kelurahan Pringrejo) rencana 2024 = 6 komponen (TPS3RKelurahan Bugisan dan TPST di Kelurahan Kuripan Kertoharjo)
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	Akumulasi dengan Tahun sebelumnya/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	persen	100	45.24	0.00	0.00	45.24	45.24	Tidak Tercapai	Target : 1. Perda Garis Sempadan terealisasi tahun 2022 2. Perwal Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok Denda Retribusi PBG 2023 3. Perda Penyelenggaraan Bangunan Gedung 2024 4. Perwal RDTR 2024 5. PerwalPenataan dan Pengendalian

Kode	Nama Program	Indikator Program	Tipe Indi / Capaian / f.pengali	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
							TW 1	TW 2				
												Jaringan Fiber Optik 2024 6. Perwal Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 2024 7. Perwal Penyelenggaraan Bangunan Gedung 2025
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan barang milik daerah	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	Persen	100	100	29.43	8.25	37.68	37.68	Tidak tercapai	Persentase capaian kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah = 0% Persentase Capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah = 16,5%
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	Akumulasi dengan Tahun sebelumnya/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	persen	11.67	17.68	0.09	0.06	17.82	152.72	Tercapai	Jumlah layanan DAK/USRI = 3502 KK Jumlah KK yang terlayani IPLT tahun 2022 = 264 KK Jumlah KK yang terlayani IPLT tahun 2023 = 175 KK Jumlah tambahan layanan MCK tahun 2023 = 90 KK Jumlah KK yang terlayani IPLT tahun 2024 Triwulan I = 54 KK Jumlah KK yang terlayani IPLT tahun 2024 Triwulan II = 37 KK Jumlah rumah tangga yang memperoleh fasilitasi penyediaan pengolahan air limbah domestik dari pemerintah = 4122 KK total jumlah rumah tangga = 62100
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (sda)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	Persen	93.10	100.00	100.00	100.00	100.00	107.41	Tercapai	Catatan Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik = 34 unit Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob Keseluruhan = 34 unit
1.03.08	Program Penataan	Rasio Kepatuhan	Data Terakhir/ Semakin	persen	18.14	17.34	17.20	17.26	17.26	95.13	Tidak Tercapai	Catatan Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dikeluarkan PBG nya

Kode	Nama Program	Indikator Program	Tipe Indi / Capaian / f.pengali	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
							TW 1	TW 2				
	Bangunan Gedung	PBG Kab/Kota	Tinggi Semakin Baik / 100									tahun 2023 = 15373 Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dikeluarkan PBG nya tahun 2024 TW I = 52 ; TW 2 =49, Jumlah Bangunan Gedung Keseluruhan = 89669
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	persen	15.87	7.61	7.61	8.79	8.79	55.37	Tidak Tercapai	Catatan Jumlah Tenaga Bangunan yang Memiliki Sertifikat Kompetensi 233 Jumlah Tenaga Bangunan yang ada 3061 Tahun 2024 pada triwulan II terealisasi sebanyak 36 tenaga bangunan (233+36)= 269
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	persen	84.39	83.77	82.16	82.16	82.16	97.35	Tidak Tercapai	Catatan Sudah ada SK Baru Walikota tentang Jalan, dengan total panjang jalan = 150,274 km sedangkan SK Lama, total panjang jalan = 153,407 km

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan II 2024

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi	persen	100.00	0.00	12.12	9.09	21.21	21.21	**Tidak Tercapai**	

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
	perangkat daerah	Semakin Baik									
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0.00	0.00				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	(target finalisasi penyusunan renja penetapan 2025 dan renja perubahan 2024 di TW. III)
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0.00	0.00				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	(target finalisasi penyusunan RKA penetapan 2025 dan RKA perubahan 2024 di TW. III dan TW. IV)
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					36.36	27.27				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	11.00	0.00	4.00	3.00	7.00	63.64	Tidak Tercapai	1. Dokumen evaluasi renja : 1 dokumen (Triwulan 2) 2. Dokumen SPIP& Laporan Pemantauan RTP : 1 dokumen TW 2 3. Laporan monev per triwulan : 1 dokumen (Triwulan 2) (Target akan dirubah menjadi 15

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
											laporan)
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100.00	100.00	48.81	15.48	64.29	64.29	**Tidak Tercapai**	Ketercapaian sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN : Asumsi Total ASN yang difasilitasi gaji : 62 * 14 bulan = 868 TW. II : (3*62) / 868 * 100 = 21,43% ketercapaian sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : TW. II : 3 bulan / 12 bulan *100 = 25% ketercapaian sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : TW. II : 1 dokumen / 1 dokumen * 100 = 100% jadi, ketercapaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : TW. I : (21,43 +

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
											25,00 + 0)/3 = 46.43/3 = 15.47
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Angka Terbanyak / Semakin Tinggi Semakin Baik	Orang/bulan	62.00	0.00	62.00	62.00	62.00	100.00	Tercapai	62 org/bulan * 3 = 186 orang
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	12.00	0.00	3.00	3.00	6.00	50.00	Tidak Tercapai	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD bulan April, Mei dan Juni
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	Tercapai	sudah terealisasi pada triwulan I
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
	Persentase ketercapaian	Angka Terbanyak	persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**Tidak Tercapai**	masih proses

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
	administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	/ Semakin Tinggi Semakin Baik									
1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	belum terealisasi, laporan selesai di TW 3
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100.00	100.00	8.33	0.00	8.33	8.33	**Tidak Tercapai**	
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0.00	0.00				
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Paket	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	belum terealisasi

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					16.67	0.00				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Orang	180.00	0.00	30.00	0.00	30.00	16.67	Tidak Tercapai	Tidak sosialisasi di TW 2
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Persen	100.00	100.00	46.29	26.86	73.14	73.14	**Tidak Tercapai**	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					25.00	25.00				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Paket	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	50.00	Tidak Tercapai	1. Paket laporan
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					25.00	25.00				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi	Paket	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	50.00	Tidak Tercapai	1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
		Semakin Baik									
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					25.00	25.00				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Paket	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	50.00	Tidak Tercapai	1 Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					25.00	25.00				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Paket	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	50.00	Tidak Tercapai	1 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					100.00	0.00				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Paket	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	Tercapai	sudah terealisasi di TW I
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					100.00	0.00				

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	Tercapai	sudah terealisasi pada Triwulan I
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					24.00	88.00				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	50.00	0.00	12.00	44.00	56.00	112.00	Tercapai	44 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (target disesuaikan di perubahan)
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Persen	100.00	100.00	25.00	25.00	50.00	50.00	**Tidak Tercapai**	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					25.00	25.00				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	50.00	Tidak Tercapai	1 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					25.00	25.00				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	12.00	0.00	3.00	3.00	6.00	50.00	Tidak Tercapai	3 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					25.00	25.00				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	12.00	0.00	3.00	3.00	6.00	50.00	Tidak Tercapai	3 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Persen	100.00	100.00	58.85	16.50	75.36	75.36	**Tidak Tercapai**	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					85.42	14.58				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Akumulasi Tiap Triwulan/	Unit	48.00	0.00	41.00	7.00	48.00	100.00	Tercapai	kendaraan Dinas Roda 2 : 2 unit Viar : 3 unit roda 4 : 2

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semakin Tinggi Semakin Baik									unit
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					30.00	30.00				
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Unit	10.00	0.00	3.00	3.00	6.00	60.00	Tidak Tercapai	Dump Truk 1 Crane 2
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					100.00	0.00				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Unit	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	Tercapai	sudah terealisasi pada triwulan I
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					20.00	21.43				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Unit	70.00	0.00	14.00	15.00	29.00	41.43	Tidak Tercapai	1. Service AC 14 unit 2. Service Laptop 1 unit

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
	Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik	unit	27.00	33.00	34.00	34.00	34.00	125.93	**Tercapai**	Realisasi masih mengacu pada tahun 2023 (ditambah Stasiun Pompa Jl. Slamet), Rencana 2024 bertambah 5 Stasiun Pompa : 1. Stasiun Pompa Bugisan 1 2. Stasiun Pompa Bugisan 2 3. Stasiun Pompa Bugisan 3 4. Stasiun Pompa Tirto Meduri Gang 8-12 5. Stasiun Pompa Kampung Baru Tirto
1.03.02.2.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir										
	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Unit	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir Kampung Bugisan (masih proses pengadaan barang & jasa) 2. Pembangunan Stasiun Pompa Bugisan 3 (masih

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
											proses pengadaan barang & jasa) 3. Pembangunan Stasiun Pompa Tirto Meduri Gang 8-12 (masih proses pengadaan barang & jasa) 4. Pembangunan Stasiun Pompa Kampung Baru Tirto (masih proses pengadaan barang & jasa)
1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir										
	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Unit	7.00	0.00	0.00	3.00	3.00	42.86	Tidak Tercapai	1. Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir Pabean Utara (selesai) 2. Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir Pabean Selatan (masih dalam proses pengadaan barang & jasa) 3. Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir Sekota (5 unit / lokasi) (sudah selesai 2 unit dan yang 3 unit masih proses) 4. Rehabilitasi Sarana Prasarana

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
											Pengendali Banjir 8 Sub. Sistem (insidental)
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir										
	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Unit	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	Semua stasiun pompa yang ada di Kota Pekalongan selama 1 tahun
1.03.02.2.01.0009	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing										
	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	KM	0.46	0.00	0.00	0.10	0.10	20.65	Tidak Tercapai	1. Peningkatan/Peningggian Talud Tirto Bremi (masih proses pekerjaan dan baru selesai ± 0,095 KM) 2. Talud / Sabuk Kampung Bandengan Rw.16 Selatan dan Utara Rw.14 (masih dalam proses pengadaan barang jasa)
1.03.02.2.01.0010	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing										
	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin	KM	2.00	0.00	0.00	0.50	0.50	25.00	Tidak Tercapai	1. Perbaikan dan Pembuatan Talud Sungai Kali Karangmalang dan

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
		Tinggi Semakin Baik									Dekoro Kelurahan Setono (masih proses pengadaan barang & jasa) 2. Perbaikan Talud Sungai Kali Baros - RW 1 s.d. 3 (masih proses pengadaan barang & jasa) 3. Rehab Senderan dan Pengerukan Sungai - Kradenan Gg.9 RT.02 RW.05 (masih proses pengadaan barang & jasa) 4. Normalisasi Kali Bremi (Gajahmada ke Utara) (masih proses pengadaan barang & jasa) 5. Normalisasi Kali Bremi (Jl. Pelita II - Jl. Untung Suropati) (masih proses pengadaan barang & jasa) 6. Normalisasi Kali Bremi (Jl. Untung Suropati - Jl. Supriyadi) (masih proses pengadaan barang & jasa) 7. Rehab Talud dan Jalan Inspeksi Bremi - Pabean

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
											(masih proses pengadaan barang & jasa) 8. Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Sekota (masih digunakan untuk pekerjaan tanggul darurat sandbag sepanjang 0.5 KM)
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (IKK Output)	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	83.39	82.57	82.57	82.57	82.57	99.01	**Tidak Tercapai**	Data masih mengacu tahun kemarin
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan										
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	KM	1.00	0.00	0.00	0.10	0.10	10.00	Tidak Tercapai	1. Normalisasi dan pengerukan sungai asem binatur RW. 1,2,3,7 Kelurahan Podosugih (masih dalam proses pengadaan barang dan jasa) 2. Normalisasi saluran ASB bendung kesetu ke hilir (masih dalam

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
											proses pengadaan barang dan jasa) 3. Normalisasi saluran irigasi BPT 7 ke hilir (masih dalam proses pengadaan barang dan jasa) 4. Normalisasi saluran irigasi larangan 4 ke hilir (masih dalam proses pengadaan barang dan jasa) 5. Pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi 5 sistem (podo timur, grabyak, asembinatur, larangan, baros) (sudah dikerjakan di Sal. Larangan sepanjang 0.1 KM)
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota										
	Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) didaerah kab/kota dilaksanakan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**Tidak Tercapai**	Jumlah perluasan SR yang terealisasi = 0 perluasan SR yang direncanakan = 232 SR (212 SR Bugisan, 20 Rekolasi Bugisan) Jumlah sarpras air bersih yang direvitalisasi = 0

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
											Jumlah sarpras air bersih yang direncanakan utk direvitalisasi = 4 Keterangan : 1. Pemeliharaan PAMSIMAS di Kelurahan Klego 2. Pemeliharaan PAMSIMAS di Karangmalang Kelurahan Setono 3. Perbaikan PAMSIMAS Jl. Pelita V Kelurahan Kuripan Kertoharjo 4. Pemeliharaan PAMSIMAS di Kelurahan Jenggot
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan										
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	SR	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	perluasan SR yang direncanakan = 232 SR (212 SR Bugisan, 20 Rekolasi Bugisan)
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota										
	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota	Akumulasi Tiap Triwulan/	Persen	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**Tidak Tercapai**	tidak ada kegiatan pembangunan TPA

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
		Semakin Tinggi Semakin Baik									
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS										
	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Ton/hari	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun 0.06 x 212 = 12.72 target akan dirubah pada anggaran perubahan menjadi 12.72 ton/hari
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota										
	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T (IKK Output)	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	unit	59,851.00	68,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**Tidak Tercapai**	Tahun 2024 mendapatkan anggaran DAK PPKT di Kampung Bugisan untuk pembangunan 7 titik SPALD S
1.03.05.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman										
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah	Akumulasi Tiap	M?/Hari	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
	Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik									Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan 0 target akan dirubah pada anggaran perubahan menjadi 33.92 M3 / Hari (0.16 x 212)
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota										
	Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik	meter	172,142.18	178,504.65	0.00	0.00	0.00	0.00	**Tidak Tercapai**	Progres pada akhir tahun
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan										
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Sistem Drainase Perkotaan	8.00	0.00	0.00	2.00	2.00	25.00	Tidak Tercapai	1. Penataan Drainase Bendan Kergon Kali Loji (masih dalam proses pengadaan barang dan jasa) 2. Perbaikan Saluran dan Platdekker - Jl. Tondano (dari samping Aquarius sampai dengan depan kecamatan sisi barat) RW 1 dan RW 2 Kelurahan

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
											Noyontaansari (masih dalam proses pengadaan barang dan jasa) 3. Normalisasi Saluran Panjang Baru Timur (masih dalam proses pekerjaan) 4. Perbaikan Saluran Drainase Pasirsari (masih dalam proses pengadaan barang dan jasa) 5. Normalisasi Saluran Kandang Ayam (Bendung kesetu ke hilir) (masih dalam proses pengadaan barang dan jasa) 6. Rehab / Pemeliharaan Saluran Drainase Sekota (8 Sub Sistem) (sudah dilaksanakan di 2 Sub Sistem)
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan										
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin	Sistem Drainase Perkotaan	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	8 Sub Sistem Drainase Perkotaan realisasi realisasi akan pada triwulan IV

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
		Baik									
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung										
	Jumlah PBG yang diberikan oleh pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting (IKK Output)	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	dokumen	330.00	173.00	225.00	49.00	274.00	83.03	**Tidak Tercapai**	Jumlah PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota sampai dengan tahun 2023 = 173 Januari sd Juni 2024 = 52+49 = 101
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota										
	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Bangunan Gedung	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	rencana : 1. Rehab Kantor Mapolres Pekalongan Kota 2.Rehab Rumdin Kejaksaan Kota Pekalongan 3.Rehab Rumah Dinas Danramil Pekalongan Timur 4.Rehab Rumah Dinas Kodim Jalan Pembangunan 5.Rehab Rumdin Kodim Jalan Karimun Jawa 6.Pemeliharaan Masjid Al Ikhlas Jetayu

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung										
	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	realisasi pada triwulan IV
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG										
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	130.00	0.00	67.00	68.00	135.00	103.85	Tercapai	- PBG = 49 - SLF = 19
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										
	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	Data Terakhir/ Semakin Tinggi	KM	129.47	128.68	123.46	123.46	123.46	95.36	**Tidak Tercapai**	Target diubah karena terbitnya SK Walikota Tentang Jalan yang baru.

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
		Semakin Baik									Total panjang jalan pada SK Baru yaitu 150,274 km sedangkan pada SK Lama yaitu 153 km. Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang pada Tahun N = 123.46 km
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan										
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	Rencana Dokumen DED Jalan direalisasikan pada TW IV
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan										
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	KM	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	Pekerjaan rekonstruksi jalan beberapa sudah mulai dikerjakan tetapi belum selesai 100%. Realisasi Pekerjaan akan dilaksanakan mulai TW II, Meliputi pekerjaan : 1

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
											Peningkatan Jalan Binagriya Raya 2 Peningkatan Jalan KH Syabrawi 3 Peningkatan Jalan Labuan III 4 Peningkatan Jalan Parkit / Merpati 5 Peningkatan Jalan Oto Iskandar di Nata 6 Peningkatan Jalan Randu Jajar 7 Peningkatan Jalan Samudra 8 Peningkatan Jalan Selat Karimata 9 Peningkatan Jalan Truntum 10 Rekonstruksi Jalan Pantaisari 11 Rekonstruksi Jalan Boyongsari 12 Rekonstruksi Jalan Jlamprang 13 Rekonstruksi Jalan Ir. Sutami 14 Rekonstruksi Jalan Achmad Djunaid
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan										
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi	Jembatan	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	1. Target akan disesuaikan pada anggaran perubahan 2. Realisasi pekerjaan

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
		Semakin Baik									akan dilaksanakan mulai TW III
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan										
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	KM	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	1. Target akan disesuaikan pada anggaran perubahan menyesuaikan Panjang Jalan Kota pada SK yang Baru (SK 2023) 2. Realisasi Pekerjaan akan dilakukan pada TW IV
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan										
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	KM	2.00	0.00	0.31	0.30	0.61	30.30	Tidak Tercapai	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin = 0,301 km
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan										
	Panjang Jalan yang Dibangun	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik	KM	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	1. Target akan diubah pada anggaran perubahan 2. Realisasi pekerjaan akan dilaksanakan pada TW III

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan										
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik	KM	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	Semua pekerjaan Rehabilitasi sudah mulai dikerjaan tp belum selesai, seperti : Rehabilitasi Jalan Ir. Sutami Rehabilitasi Jalan Sidomukti Raya Rehabilitasi Jalan Untung Suropati Rehabilitasi Saluran Pematus Jalan Pantaisari Rehabilitasi Saluran Pematus Jalan Urip Sumoharjo
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi										
	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	kali	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	**Tercapai**	Pelatihan tukang bangunan (pemasangan batu bata)
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis										
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin	Orang	40.00	0.00	0.00	36.00	36.00	90.00	Tidak Tercapai	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
	Dilatih	Tinggi Semakin Baik									atau Analis yang Dilatih = 36 orang realisasi pada triwulan II
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										
	Persentase informasi jasa konstruksi yang tersedia	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100.00	100.00	50.00	0.00	50.00	50.00	**Tidak Tercapai**	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan = 1 dokumen (AHSP, HSPK, HSD, dan SHST) / semester akan dilaksanakan pada triwulan I dan III
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota										
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00	Tidak Tercapai	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan = 1 dokumen (AHSP, HSPK, HSD, dan SHST) / semester Triwulan I dan III
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota										

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan RTRW/RRTR	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	0.00	1.00	0.00	25.00	25.00	0.00	**Tidak Tercapai**	Pelaksanaan Evaluasi = 0% Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang = 50%
1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota										
	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	Masih dalam proses harmonisasi di bagian Hukum Provinsi untuk penyusunan Perkada RDTR
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang										
	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Orang	200.00	0.00	0.00	50.00	50.00	25.00	Tidak Tercapai	Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang ke PKK se-Kota Pekalongan
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Tata	Akumulasi Tiap Triwulan/	Kali	12.00	0.00	3.00	3.00	6.00	50.00	**Tidak Tercapai**	jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW 2				
	Ruang yang dilaksanakan	Semakin Tinggi Semakin Baik									ruang yang dilaksanakan pada tahun 2024 (TW 2) = 3 kali
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang										
	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	belum ada permohonan PKKPR masuk
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Kali	12.00	0.00	3.00	3.00	6.00	50.00	**Tidak Tercapai**	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang										
	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	penialian akan dilakukan pada triwulan IV

2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan

Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada DPUPR Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja utama Rencana Stategis DPUPR Kota Pekalongan. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Kinerja pelayanan DPUPR Kota Pekalongan dapat dilihat pada capaian pelaksanaan tugas pokoknya yaitu memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diantaranya Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Ruang dan bangunan Gedung. Pada tahun 2024 sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan 1 (satu) indikator;
2. Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan limbah domestik dengan 1 (satu) indikator;
3. Meningkatnya sarpras pengendali banjir dalam kondisi baik dengan 1 (satu) indikator;
4. Meningkatnya layanan air bersih perpipaan daerah dengan 1 (satu) indikator;
5. Meningkatnya pengembangan sarana persampahan dengan 1 (satu) indikator;
6. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan perkotaan dengan 1 (satu) indikator;
7. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan tara ruang dan pemanfaatan ruang dengan 1 (satu) indikator.

Tabel 2. 3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Nilai SAKIP Tahun N
2	Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)	(Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) / jumlah rumah kab/kota * 100%
3	Meningkatnya sarpras pengendali banjir dalam kondisi baik	Persentase luas Kawasan kota rawan banjir dan rob yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	Luas Kawasan Kota yang Terlindungi Infrastruktur Pengendali Banjir / Luas Wilayah Kota * 100%
4	Meningkatnya layanan air bersih perpipaan	Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Jumlah jiwa yang terlayani air minum perkotaan (domestik + non domestik) dibagi jumlah penduduk Keterangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
5	Meningkatnya pengembangan sarana persampahan	Pengembangan sarana persampahan	Jumlah komponen yang ditingkatkan menjadi kondisi baik sampai dengan tahun N/target penanganan sampai dengan tahun akhir RPJMD
6	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan perkotaan	persentase peningkatan kemantapan jalan dan jembatan perkotaan	(Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap pada Tahun N - Panjang Jala Dalam Kondisi Mantap Tahun N-1) / Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Tahun N-1 *100%
7	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan tara ruang dan pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Luas kawasan lindung dan budidaya yang sesuai dengan perda RTRW tahun N / Luas kawasan lindung dan budidaya sesuai perda RTRW * 100%

Penilaian capaian kinerja utama DPUPR Kota Pekalongan tahun 2024 difokuskan pada 10 (sepuluh) program sebagai berikut:

1. Program Program pengelolaan dan pengembangan sistem Penyediaan Air Minum;
2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
3. Program Penungjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota;
4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (sda);
8. Program Penataan Bangunan Gedung;
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
10. Program Penyelenggaraan Jalan.

Tabel 2. 4
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran Stretegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	85.50 Indeks	N/A	N/A
2	Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)	99.00%	100.00%	101.01
3	Meningkatnya sarpras pengendali banjir dalam kondisi baik	Persentase luas Kawasan kota rawan banjir dan rob yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	80,42%	77.88%	96.84
4	Meningkatnya layanan air bersih perpipaan	Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	89.659 %	100.00%	111.53
5	Meningkatnya pengembangan sarana persampahan	Pengembangan sarana persampahan	60%	60.00%	100.00
6	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan perkotaan	persentase peningkatan kemantapan jalan dan jembatan perkotaan	1,09 %	0.00%	0.00
7	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan tara ruang dan pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	96.219 %	99.45%	103.36

Hasil analisis berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel diatas adalah sebagai berikut:

a. Capaian kinerja yang sudah pencapaian target ditunjukkan pada indikator Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome) dengan capaian 101.01%, Indikator Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk dengan capaian 111.53 %, Indikator Pengembangan sarana persampahan dengan capaian 100.00% dan Indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan capaian 103.36%.
b. Capaian kinerja yang masih proses dalam pencapaian target ditunjukkan pada indikator Persentase luas Kawasan kota rawan banjir dan rob yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir dengan capaian kinerja 96.84%.
c. Capaian kinerja yang yang masih 0% ada pada indikator persentase nilai SAKIP OPD karena penilaian dilakukan di akhir tahun atau triwulan IV.
d. Hambatan dan rencana tindak lanjut dalam pencapaian sasaran strategis (Indikator Kinerja Utama) telah tercantum pada tabel 2.1

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 ini akan dijelaskan perubahan target kinerja dan perubahan pagu RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 berdasarkan perubahan kebijakan sebagaimana dijelaskan dalam Bab I. Pada perubahan ini akan dimuat tentang kegiatan yang mengalami penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif, kegiatan yang mengalami penghapusan, serta kegiatan dengan pagu indikatif tetap.

3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 Secara ringkas dibandingkan dengan APBD 2024, dari total sub kegiatan sebanyak 50 sub kegiatan, terdapat 29 sub kegiatan (58%) dengan anggaran tetap, 14 sub kegiatan (28%) dengan anggaran bertambah, 7 sub kegiatan (14%) dengan anggaran berkurang. Adapun pola perubahan kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut ini :

Tabel 3. 1
Rekapitulasi Perubahan Kegiatan DPUPR

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA					
		TETAP	BER-TAMBAH	BER-KURANG	KEG BARU	KEG DI-HAPUS	JML
1.	DPUPR	8	8	4	0	0	20

Sumber : Data dielaborasi

Dari tabel diatas dapat diketahui Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan paling banyak adalah pengurangan anggaran, hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan refocussing anggaran karena penetapan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun anggaran sebelumnya terlalu tinggi dengan realisasi yang lebih rendah dan menurunnya DAU dari pusat sehingga harus mengurangi anggaran tahun berjalan.

3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024

Perubahan asumsi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan **menyebabkan** perubahan pagu kegiatan dan target kinerja pada setiap Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan pagu indikatif pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan dalam tabel 3.2. Adapun perubahan target kinerja per urusan yang diikuti penyesuaian pagu indikatif ditunjukkan dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Rekap Perubahan Pagu Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD PENETAPAN	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4
1	DPUPR	54.262.596.000	70.646.869.000	69.396.480.000	-1.250.389.000

Sumber : Data Bappeda

Rumusan rencana kerja Perubahan dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3. 3
Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	8	9	10	11	12
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				**54.262.596.000,00**	**60.126.468.000,00**	**70.646.869.000,00**
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**54.262.596.000,00**	**60.126.468.000,00**	**70.646.869.000,00**
	1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**54.262.596.000,00**	**60.126.468.000,00**	**70.646.869.000,00**
1	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen	100,00 persen	13.247.690.000,00	13.363.906.000,00	13.282.811.000,00
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	16.950.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	15 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	6.950.774.000,00	7.028.834.000,00	7.028.834.000,00
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	6.849.074.000,00	6.927.134.000,00	6.824.951.000,00
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	99.800.000,00	99.800.000,00	99.800.000,00

	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	35.578.000,00	35.578.000,00	35.578.000,00
	1	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	35.578.000,00	35.578.000,00	35.578.000,00
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	17.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang	180 Orang	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	588.000.000,00	608.000.000,00	608.000.000,00
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	230.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	4 Paket	114.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	125 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	4.853.135.000,00	4.871.291.000,00	4.871.291.000,00
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.423.250.000,00	4.423.250.000,00	4.423.250.000,00
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	426.885.000,00	445.041.000,00	445.041.000,00
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	785.453.000,00	785.453.000,00	785.453.000,00
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 Unit	48 Unit	599.453.000,00	599.453.000,00	620.541.000,00
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit	70 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	93,10 persen	93,10 persen	11.757.760.000,00	16.405.420.000,00	16.582.011.000,00

	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik	35 unit	34 unit	10.320.260.000,00	14.573.100.000,00	14.573.100.000,00
	1	03	02	2.01	0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir						
							Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	1 Unit	5 Unit	3.080.000.000,00	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00
	1	03	02	2.01	0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir						
							Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	5 Unit	7 Unit	1.500.000.000,00	2.555.000.000,00	2.555.000.000,00
	1	03	02	2.01	0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir						
							Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	35 Unit	34 Unit	3.534.110.000,00	3.611.950.000,00	3.830.950.000,00
	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing						
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,24 KM	0,46 KM	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
	1	03	02	2.01	0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing						
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0,6775 KM	2,79 KM	1.606.150.000,00	2.106.150.000,00	2.206.150.000,00
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (IKK Output)	83,39 persen	83,39 persen	1.437.500.000,00	1.832.320.000,00	1.832.320.000,00
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,731 KM	0,9 KM	1.437.500.000,00	1.832.320.000,00	1.689.911.000,00
3	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	89,66 persen	89,66 persen	428.000.000,00	1.662.400.000,00	1.581.070.000,00
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) didaerah kab/kota dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	428.000.000,00	1.662.400.000,00	1.662.400.000,00
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	120 SR	212 SR	428.000.000,00	1.662.400.000,00	1.581.070.000,00
4	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	60,00 persen	60,00 persen	860.000.000,00	925.000.000,00	952.450.000,00

	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota	60 Persen	60 Persen	860.000.000,00	925.000.000,00	925.000.000,00
	1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1 Ton/hari	0,112 Ton/hari	860.000.000,00	925.000.000,00	952.450.000,00
5	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	11,67 persen	11,67 persen	927.783.000,00	3.329.719.000,00	3.669.141.000,00
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T (IKK Output)	59851 unit	59851 unit	927.783.000,00	3.329.719.000,00	3.329.719.000,00
	1	03	05	2.01	0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman						
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	2 M^3/Hari	5,44 M^3/Hari	927.783.000,00	3.329.719.000,00	3.669.141.000,00
6	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	69,48 persen	69,48 persen	3.689.840.000,00	4.270.800.000,00	4.542.015.000,00
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	180841 meter	180841 meter	3.689.840.000,00	4.270.800.000,00	4.270.800.000,00
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan						
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	8 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	3.200.000.000,00	3.790.000.000,00	4.059.000.000,00
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan						
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	8 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	489.840.000,00	480.800.000,00	483.015.000,00
7	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,14 persen	18,14 persen	1.097.910.000,00	1.425.190.000,00	1.537.749.000,00
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah PBG yang diberikan oleh pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting (IKK Output)	330 dokumen	330 dokumen	1.097.910.000,00	1.425.190.000,00	1.425.190.000,00
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						

							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3 Bangunan Gedung	6 Bangunan Gedung	801.960.000,00	1.129.240.000,00	1.226.799.000,00
	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung						
							Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	130 Dokumen	130 Dokumen	195.950.000,00	195.950.000,00	210.950.000,00
8	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	84,39 persen	84,39 persen	21.595.513.000,00	18.077.303.000,00	27.850.932.000,00
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	129,628 KM	129,628 KM	21.595.513.000,00	18.077.303.000,00	18.077.303.000,00
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	64.500.000,00	64.500.000,00	64.500.000,00
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan						
							Panjang Jalan yang Dibangun	0,5 KM	0,14 KM	800.000.000,00	900.000.000,00	499.700.000,00
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan						
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	4 KM	4,3 KM	13.275.000.000,00	10.058.790.000,00	20.191.744.000,00
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan						
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5 Jembatan	5 Jembatan	300.000.000,00	302.280.000,00	302.280.000,00
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	153,607 KM	153,607 KM	141.400.000,00	141.400.000,00	141.400.000,00
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan						
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,8 KM	0,65 KM	2.500.000.000,00	2.116.000.000,00	2.106.975.000,00

	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan					
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2,5 KM	2,5 KM	4.514.613.000,00	4.494.333.000,00	4.544.333.000,00
9	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	15,87 persen	15,87 persen	102.900.000,00	102.900.000,00	102.358.000,00
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	1 kali	1 kali	62.900.000,00	62.900.000,00	62.900.000,00
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	40 Orang	36 Orang	62.900.000,00	62.900.000,00	65.278.000,00
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi jasa konstruksi yang tersedia	100 Persen	100 Persen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota						
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	4 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	37.080.000,00
10	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100,00 persen	100,00 persen	555.200.000,00	563.830.000,00	546.332.000,00
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan RTRW/RRTR	100 persen	100 persen	155.000.000,00	160.210.000,00	160.210.000,00
	1	03	12	2.01	0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota						
							dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	120.500.000,00	0,00	0,00
							dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	-	1 Dokumen	0,00	120.500.000,00	117.292.000,00
	1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang						
							Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1 Orang	350 Orang	34.500.000,00	39.710.000,00	66.570.000,00
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	361.440.000,00	364.860.000,00	364.860.000,00
	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang						
							Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	10 Dokumen	2 Dokumen	361.440.000,00	364.860.000,00	323.710.000,00

	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	38.760.000,00	38.760.000,00	38.760.000,00
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	2 Dokumen	38.760.000,00	38.760.000,00	38.760.000,00
	J U M L A H									**54.262.596.000,00**	**60.126.468.000,00**	**70.646.869.000,00**

BAB IV
PENUTUP

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Penataan Ruang Kota Pekalongan sampai dengan triwulan II tahun 2024 dilaksanakan sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dan mulai mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Menyadari sepenuhnya model atau pola perencanaan pembangunan seperti dituangkan pada Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tersebut, bukanlah satu-satunya alat ukur ketepatan penyusunan program pembangunan di daerah, sebab disampingnya masih terdapat alat ukur seperti arah kebijakan umum, Visi dan Misi, aspirasi dari berbagai kalangan yang lebih luas.

Evaluasi yang dilaksanakan adalah terhadap pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 berdasarkan rencana target yang terdapat dalam Rencana Kerja Tahun 2024 secara berkesinambungan maka format penyusunan Perubahan Rencana Kerja disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010. Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024 diharapkan bisa menjadi tolak ukur untuk pencapaian target kinerja pada triwulan selanjutnya. Sehingga, untuk itu perlu kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2024 ini sebagai mana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2022-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Pekalongan serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2024

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terakomodasi, terintergrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan

sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Pekalongan maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Dengan segala keterbatasan pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan menjadi menjadi salah satu kendala untuk menghasilkan perencanaan yang memiliki bobot kualitas memadai dalam menterjemahkan kebutuhan program dan kegiatan yang sebenarnya, sehingga diharapkan dapat mewujudkan produk perencanaan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pekalongan, 12 September 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang,
Kota Pekalongan

RAMBANG SUGIARTO, ST.MM
Pembina Utama Muda
NIP 19710304 199903 1 011

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKALONGAN

BUKU RENJA PERUBAHAN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKALONGAN

JL.Singosari No.2 Pekalongan
No Telp.(0285) 422581

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Renja Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Rancangan Renja Perubahan ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Perubahan Tahunan ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah diselesaikan sesuai dengan RENJA Penetapan tahun berjalan dan kebijakan serta rencana kerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2024. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama 5 (lima) tahun, dimana rencana kerja ini disusun dalam upaya memberikan arah / pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama tahun 2025. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja Perubahan ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pekalongan,09 September 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman Kota
Pekalongan

ANDRIANTO, ST,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730111 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
Latar Belakang 1
Landasan Hukum 4
Maksud dan Tujuan 6
Sistematika Penulisan .....
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan 13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan 14
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 41
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 41
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 41
3.3 Program, Kegiatan dan sub Kegiatan 42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINPERKIM 47
BAB V PENUTUP 61

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perubahan Dinperkim merupakan dokumen perencanaan Dinperkim untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinperkim sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinperkim kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perubahan Dinperkim mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah(OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perubahan Dinperkim disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perubahan Dinperkim digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Renja Perubahan Dinperkim merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perubahan Dinperkim memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja Perubahan Dinperkim merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah

terendah dan terkecil. Dinperkim berhubungan langsung dengan pelayanan pada

masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perubahan Dinperkim sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Rencana Kerja Perubahan yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat pada tahun 2025 Program, kegiatan, alokasi dan indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3. Urusan wajib Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mengacu pada SPM Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan
4. Ruang sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan disusun dengan tahapan sebagai berikut:

A. Persiapan penyusunan Renja meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja; penyusunan agenda tim penyusun Renja dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

B. Penyusunan rancangan Renja mencakup :

1. Perumusan yang meliputi persiapan penyusunan rancangan Renja Perubahan, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan OPD, mereview hasil evaluasi Renja Perubahan tahun lalu

berdasarkan Renstra Perubahan Perubahan, penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, penelaahan rancangan awal RKPD Kota Pekalongan, perumusan tujuan dan sasaran; penelaahan usulan masyarakat; dan perumusan kegiatan prioritas.

2. Penyajian Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah Berdasarkan

   Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 sebagai berikut:

   a. Pendahuluan;

   b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu;

   c. tujuan, sasaran, program dankegiatan;

   d. Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan

   Perangkat e. penutup.

C. Pelaksanaan forum OPD

Forum OPD membahas Pembahasan rancangan Renja Perubahan RKPD kabupaten/kota mencakup:

1. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang keluarahan dan kecamatan;
2. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan;
3. Penyelarasan program dan kegiatan antar OPD Kota Pekalongan dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
4. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan, sesuai dengan surat edaran Walikota Pekalongan

D. Penetapan Renja Perubahan OPD

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan menyempurnakan rancangan Renja dengan berpedoman pada RKPD Kota Pekalongan yang telah ditetapkan kemudian diverifikasi.

1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2024 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan;
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan;
19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan;

20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015.
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penetapan Atas Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
25. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
26. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Pekalongan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk :

1. Menjadi pedoman untuk mendukung capaian kinerja dalam Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
2. Menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan tahun 2023 dalam menjalankan program dan kegiatannya;
3. Menjadi pedoman evaluasi kinerja sebagai rujukan perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan tahun 2025.

B. Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Pekalongan Tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk :

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dijabarkan dari Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024;
3. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota Pekalongan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renstra Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2021 -2026 (Tabel.T-C.29)
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan (Tabel.T-30)
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31)
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel T-C.32)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Penetapan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan
3.3. Program , Kegiatan sub kegiatan (Tabel T-C.33)

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota Pekalongan

Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renstra Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026.

Terdapat 6 (enam) program yang menjadi garapan wajib Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan pada tahun 2022. Penempatan program tersebut dilakukan dengan alasan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan telah berusaha sebaik mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Pekalongan, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah dengan dapat dilaksanakannya seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Kegiatan – kegiatan dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dalam Renstra yaitu Pemenuhan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan serta Permukiman tidak Kumuh, mendukung indikator Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam RKPD Kota Pekalongan yaitu (Tabel T-C.29).

Tabel TC-29
HASIL REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

NO	Indikator Program /Indikator Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2021-2026	Kondisi Kinerja Kinerja pada Awal Renstra (2016-2021)	Realisasi Tahun 2023	2023		Capaian Renstra Tahun 2023	Presentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026	Status Ketercapaian Tahun Target Akhir Renstra
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	99.17	100	99.17	99.17	99.17	Tidak Tercapai
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
Program Pengembangan Perumahan										
	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	91.35`	0	109,47	91.35	109,47	109,47	109,47	Tercapai
Program Kawasan Permukiman										
	Luas kawasan permukiman kumuh	Hektar	291.47	0	291.47	291.47	128.09	128.09	128.09	Tercapai
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh										
	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	Hektar	1,856.41	0	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	Tercapai
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan										
/////////	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	Persen	100	0	100	100	100	100	100	Tercapai
Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee										
	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	100	0	100	100	100	100	100	Tercapai

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	Nilai Sakip OPD			82.50 Indeks	82 Indeks	84.50 Indeks	85.50 Indeks	89.16 Indeks	N/A	
2	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni			47,46 %						
3	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister			95,99 %	93,43 %					
4	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang tidak kumuh			97,33 %						
5	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (IKK Outcome)			1649,41 ha	1728,41 Ha	1856,41 Ha	1973,41 Ha			

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, bagian kedua Tugas dan Fungsi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari:
    1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
    2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
    1. Kepala Seksi Pertanahan
    2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
e. Kelompok Jabatan Fungional.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dapat digambarkan pada Gambar pada halaman berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINPERKIM

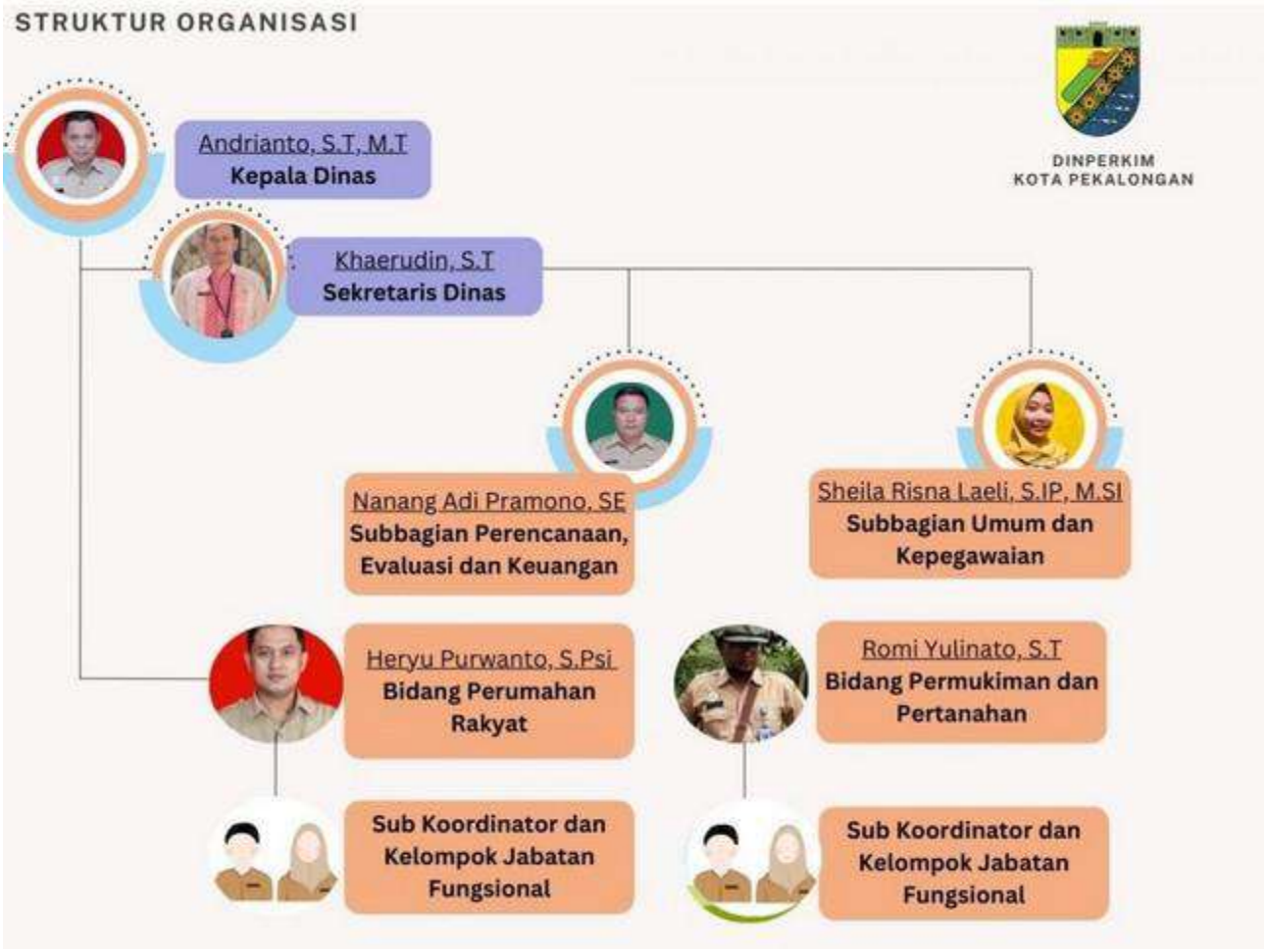

Permasalahan-permasalahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dalam pelayanan sebagai berikut :

a) Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak diimbangi dengan penambahan jumlah rumah menyebabkan angka kekurangan rumah (backlog)semakin bertambah tinggi;
b) Rendahnya kualitas perumahan penduduk berpenghasilan rendah;
c) Belum optimalnya layanan drainase lingkungan permukiman;
e) Kondisi jalan lingkungan belum optimal;

Pada Dokumen RPJMD Kota Pekalongan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan mendukung Urusan Perencanaan dengan tujuan dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD, adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan adalah Misi ke -3 (tiga) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak diimbangi dengan penambahan jumlah rumah menyebabkan angka kekurangan rumah (backlog) semakin bertambah tinggi
2. Keterbatasan lahan untuk pengembangan perumahan dan permukiman baru;
3. Adanya rumah-rumah yang berada di lahan illegal;
4. Timbulnya Rumah Tidak Layak Huni baru akibat kemiskinan dan genangan air;
5. Kondisi topografis Kota Pekalongan menyulitkan pengaturan saluran drainase, yaitu dengan kemiringan lahan rata-rata antara 0-5%;
6. Genangan air yang memicu timbulnya kawasan kumuh baru
7. Ketergantungan air baku untuk air bersih pada Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Sementara pemanfaatan sumur dalam, baik oleh PDAM ataupun oleh PAMSIMAS dan Swasta seperti hotel ataupun
   perusahaan dapat menjadi pemicu terjadinya penurunan permukaan tanah.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Adanya program pembangunan Rumah Susun Sewa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Adanya program sejuta rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Akan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
4. Adanya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pusat, bantuan pugar rumah dari Provinsi dan DAK Perumahan dan Permukiman

Isu Strategis berkaitan dengan infrastruktur sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

1. Pemenuhan rumah / perumahan yang layak huni.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur drainase dan infrastruktur dasar permukiman lainnya sesuai dengan kondisi topografi disertai dengan upaya mendorong kesadaran masyarakat agar berperan aktif menjaga kualitas lingkungan permukiman.Pugar Rumah Tidak Layak Huni disertai dengan pemenuhan infrastruktur dasar permukiman secara memadai.Penanganan kawasan kumuh.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2024 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Pekalongan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan, dengan arahan Walikota Pekalongan terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan berdasarkan rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2024.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2024, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tahapan kegiatan telahaan yang dilakukan, adalah:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2024;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan analisis;
4. Melakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting;
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
6. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, dilakukan langkah berikut:
   a. Mengecek apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak sesuai, maka menentukan indikator yang akan dipilih;
   b. Meneliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat perbedaan, maka mengkaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian renstra serta ketersediaan sumber dana lainnya; dan
   c. Memberi catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan.
7. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), dilakukan langkah berikut:
   a. Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2024, maupun yang hanya terdapat dalam

identifikasi kebutuhan hasil analisis,melakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;

b. Meneliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;
c. Meneliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024, target capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta ketersediaan sumber dana lainnya;
d. Memberi catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.

8. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
9. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Rancangan awal Renja 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, tidak ada perubahan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun. Proses perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai/tidak sesuai, cocok/ketidakcocokan besarannya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Langkah yang telah dilakukan dalam mengkaji usulan program dan kegiatan dari musrenbang kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Membuat desk batasan usulan program/kegiatan yang dapat diusulkan oleh masyarakat;
2. Menginventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
3. Menyesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;
4. Meneliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan;
5. Bila belum lengkap melakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau memberi catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
7. Membuat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.lampiran pada
   (Tabel.T-C31)

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**30.011.392.000,00**	**44.429.626.000,00**	**44.178.402.000,00**	**14.167.010.000,00**							**12.872.466.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**29.534.274.000,00**	**43.602.508.000,00**	**43.255.584.000,00**	**13.721.310.000,00**							**11.788.571.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**29.534.274.000,00**	**43.602.508.000,00**	**43.255.584.000,00**	**13.721.310.000,00**							**11.788.571.000,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja**				**100,00 persen**	**100,00 persen**	**4.427.004.000,00**	**4.568.524.000,00**	**4.635.634.000,00**	**-37.102.000,00**							**4.389.902.000,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 persen	100 persen	15.861.000,00	15.861.000,00	15.861.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinperkim		25.350.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.262.000,00	2.262.000,00	2.262.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.750.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.599.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	15 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.950.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*				100 persen	100 persen	2.838.448.000,00	2.918.131.000,00	2.811.925.000,00	-26.523.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		2.909.899.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.782.066.000,00	2.861.749.000,00	2.755.543.000,00	-26.523.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.857.549.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	54.900.000,00	54.900.000,00	54.900.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.700.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 persen	100 persen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		9.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*				100 persen	100 persen	221.686.000,00	221.686.000,00	231.686.000,00	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		192.414.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	4 Paket	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			44.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	4 Paket	49.186.000,00	49.186.000,00	49.186.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.414.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				73 Laporan	73 Laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			94.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen	1.018.478.000,00	1.054.024.000,00	1.209.024.000,00	190.546.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		970.407.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	6.800.000,00	5.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.800.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	812.400.000,00	812.400.000,00	962.400.000,00	150.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			758.200.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	204.278.000,00	239.824.000,00	239.824.000,00	35.546.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			210.407.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen	327.531.000,00	353.822.000,00	362.138.000,00	34.607.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		282.332.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	126.361.000,00	146.352.000,00	154.668.000,00	28.307.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			90.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			72.332.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	151.170.000,00	157.470.000,00	157.470.000,00	6.300.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN 12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni**				**91,68 persen**	**91,68 persen**	**1.603.761.000,00**	**2.197.825.000,00**	**2.167.825.000,00**	**34.929.000,00**							**1.638.690.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen data rumah pada kawasan rawan bencana yang disusun*				1 dokumen	1 dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Dinperkim Kota Pekalongan		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah*				3 kegiatan	3 kegiatan	44.280.000,00	44.280.000,00	44.280.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																		
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator																		
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				6 Orang	6 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				2 Orang	2 Orang	9.280.000,00	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase rumah layak huni bagi warga korban bencana dan relokasi program pemerintah (SPM/IKK Outcome)*				100 persen	100 persen	232.061.000,00	232.061.000,00	232.061.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Korban Bencana		264.461.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				6 Unit Rumah	6 Unit Rumah	132.061.000,00	132.061.000,00	132.061.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			164.461.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*				100 Persen	100 Persen	1.197.050.000,00	1.791.114.000,00	1.831.484.000,00	634.434.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		1.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				3 Laporan	3 Laporan	1.197.050.000,00	1.791.114.000,00	1.831.484.000,00	634.434.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			1.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Persentase pelaksanaan penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*				100 persen	100 persen	70.370.000,00	70.370.000,00	0,00	-70.370.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Pengembang Perumahan		74.229.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				20 Laporan	0 Laporan	70.370.000,00	70.370.000,00	0,00	-70.370.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			74.229.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Luas kawasan permukiman kumuh**				**174,47 Hektar**	**174,47 Hektar**	**16.614.300.000,00**	**22.641.270.000,00**	**22.677.236.000,00**	**-15.983.900.000,00**							**630.400.000,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Presentase dokumen penataan kawasan permukiman kumuh yang disusun*				100 Persen	100 Persen	233.500.000,00	233.500.000,00	146.500.000,00	-87.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Kota Pekalongan		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				2 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	33.000.000,00	-117.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				4 Dokumen	1 Dokumen	83.500.000,00	83.500.000,00	113.500.000,00	30.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Luasan kawasan kumuh yang tertangani*				117 Hektar	117 Hektar	16.380.800.000,00	22.407.770.000,00	22.530.736.000,00	6.149.936.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan		380.400.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				4 Laporan	4 Laporan	246.800.000,00	246.800.000,00	446.034.000,00	199.234.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			306.400.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				1 Ha	3 Ha	16.134.000.000,00	22.160.970.000,00	22.084.702.000,00	5.950.702.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN-AFIRMASI-PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			74.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Luas kawasan permukiman tidak kumuh**				**1973,41 hektar**	**1973,41 hektar**	**5.478.688.000,00**	**12.539.368.000,00**	**11.939.368.000,00**	**-954.993.000,00**							**4.523.695.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencegahan rumah tidak layak huni*				0,78 persen	0,78 persen	5.478.688.000,00	12.539.368.000,00	11.939.368.000,00	6.460.680.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Warga Penghuni RTLH		4.523.695.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				401 Unit Rumah	599 Unit Rumah	5.478.688.000,00	12.539.368.000,00	11.939.368.000,00	6.460.680.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN-AFIRMASI-PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			4.523.695.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (IKK Outcome)**				**14,51 persen**	**14,51 persen**	**1.410.521.000,00**	**1.655.521.000,00**	**1.835.521.000,00**	**-804.637.000,00**							**605.884.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*persentase perumahan yang sudah menyerahkan PSU*				57,61 persen	57,61 persen	1.410.521.000,00	1.655.521.000,00	1.835.521.000,00	425.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	PSU Perumahan		605.884.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	12 Dokumen	230.000.000,00	230.000.000,00	260.000.000,00	30.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			230.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				10 Lokasi	12 Lokasi	1.080.000.000,00	1.325.000.000,00	1.475.000.000,00	395.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			280.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	100.521.000,00	100.521.000,00	100.521.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			95.884.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**477.118.000,00**	**827.118.000,00**	**922.818.000,00**	**445.700.000,00**							**1.083.895.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**477.118.000,00**	**827.118.000,00**	**922.818.000,00**	**445.700.000,00**							**1.083.895.000,00**	
1.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani**				**100 persen**	**100 persen**	**468.032.000,00**	**818.032.000,00**	**863.732.000,00**	**606.905.000,00**							**1.074.937.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Luasan Bidang Tanah yang Terselesaikan Ganti Ruginya*				73,35 persen	73,35 persen	468.032.000,00	818.032.000,00	863.732.000,00	395.700.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Warga terdampak		1.074.937.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	468.032.000,00	818.032.000,00	863.732.000,00	395.700.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 06. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh			1.074.937.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Presentase Tindaklanjut Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Tanah Absentee**				**50 persen**	**50 persen**	**9.086.000,00**	**9.086.000,00**	**59.086.000,00**	**-128.000,00**							**8.958.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Ketercapaian Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee*				50 persen	50 persen	9.086.000,00	9.086.000,00	59.086.000,00	50.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng	Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Pekalongan		8.958.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.086.000,00	9.086.000,00	59.086.000,00	50.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng 07. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang & pengendalian kualitas lingkungan hidup, dg lebih memperhatikan kebijakan2 yg bersifat regional yg mjd kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Prov Jateng			8.958.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	J U M L A H								**30.011.392.000,00**	**44.429.626.000,00**	**44.178.402.000,00**	**60.472.776.000,00**							**12.872.466.000,00**	

Tabel T-C-32

Usulan Program/Kegaiatn dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2024 Kota Pekalongan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan		4,655,359,000	
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16,000,000	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	3,102,461,000	
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	9,500,000	
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	234,000,000	
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	954,000,000	

			Pemerintahan Daerah		
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339,398,000	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, LahanLahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan, Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya	4,949,196,000	
a	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	75,000,000	
b	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	90,000,000.	
c	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah	Kota Pekalongan	Presentase Rumah Layak	3,584,196,000	

	Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah (SPM/IKK Outcome)		
d.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Pekalongan	Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1,200,000,000	
3	ROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pekalongan	Luas kawasan permukiman kumuh	2,645,400,000	
a.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kota Pekalongan	Persentase pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	236,400,000	
b	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Pekalongan	Persentase dokumen penataan kawasan permukiman kumuh yang disusun	550,000,000	
c	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Pekalongan	Luasan kawasan kumuh yang tertangani	1,859,000,000	
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kota Pekalongan	Persentase Pencegahan Rumah Tidak Layak Huni	6,620,000,000	
a.	Pencegahan	Kota	Jumlah Rumah Tidak	6,620,000,000	

	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kota Pekalongan	Persentase Perumahan yang Sudah Menyerahkan PSU	628,030,000	
a	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Pekalongan	Persentase Pencegahan Rumah Tidak Layak Huni	628,030,000	
6	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kota Pekalongan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	320,000,000	
a	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase luasan bidang tanah yang terselesaikan ganti ruginya	320,000,000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Kota Pekalongan antara lain sudah menjadi bagian dari Daftar Proyek Prioritas Strategis berupa Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa, berupa Teratasinya bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon. Proyek ini dilatarbelakangi oleh Banjir rob yang terjadi di beberapa kawasan perkotaan Pantai Utara Jawa (termasuk juga di Petanglong), serta kualitas air di 10 wilayah sungai di Kawasan Pantai Utara Pulau Jawa tercemar sedang hingga berat.

Sedangkan indikasi target yang akan diwujudkan adalah berupa Terpasangnya alat pemantauan penurunan tanah, terbangunnya tanggul laut dan bangunan pengaman pantai, terbangunnya SPALDT (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat) permukiman dan Perkotaan, serta terbangunnya stasiun pemantauan kualitas air yang beroperasi secara kontinyu melalui Online Monitoring (ONLIMO). Selain itu, terdapat juga pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota dan Kawasan, Jalan Lingkar Pekalongan; serta Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir.

Gambaran ringkas tersebut serta berbagai permasalahan dan isu strategis lain berdasarkan gambaran umum yang ada, maka perlu mempertimbangkan aspek sinergitas antara berbagai sumber daya dan pemerintahan di dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang kemudian akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat dalam mengimplementasikannya selama periode tahun 2021-2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026, Kota Pekalongan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dari Wilayah Pengembangan Petanglong yang meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Simpul utama pada kawasan Petanglong adalah kawasan perkotaan Pekalongan

dan sekitarnyam dengan sektor unggulan berupa pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan dan Pedagang Kaki Lima.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, maka Arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Petanglong adalah "Pengembangan Wilayah Petanglong Berbasis Industri Pengolahan Kreatif dan Pertanian Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan". Pengembangan wilayah Petanglong ini ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama pada tahun 2023, yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00% sampai dengan 5,60%, Angka Kemiskinan pada kisaran 4,5% sampai dengan 9,13%; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,05% sampai dengan 5,55% serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 70,60 sampai dengan 75,13.

Untuk mencapai indikator makro tersebut maka dilakukan beberapa upaya, antara lain : Pemantapan konektivitas dan aksesibilitas; Pemenuhan kebutuhan air baku melalui pembangunan SPAM Regional Petanglong (Kabupaten Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan); serta Pengelolaan lingkungan diantaranya : utamanya rehabilitasi dan konservasi Kawasan Dieng (Pekalongan, Batang) serta Konservasi CAT Pekalongan – Pemalang; penanganan kerusakan pesisir; Penanganan Limbah Batik dan TPST Regional.

3.3 Program, Kegiatan dan sub Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi OPD juga ada pertimbangan lain seperti :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

   Sesuai dengan visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan terpilih, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 ini diarahkan untuk mencapai Visi "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius". Dan telah dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan mempunya tugas dan tanggungjawa untuk dapat mendukung misi ke 3,4 dan 7.

2. Pencapaian SDG's

Penerapan Sdgs pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tujuan meningkatkan konektivitas jalan dan jembatan antar wilayah kota, dengan target mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata serta dapat melayani warga kota termasuk warga yang berkebutuhan khusus.

3. Pengentasan kemiskinan

Melalui pembangunan dari infrastruktur kota beserta sarana dan prasarananya diharapkan dapat menimgkatkan kesejahteraan masyarakat yang selanjutka akan berdampak positif pada pengentasan kemiskinan yang ada pada Kota Pekalongan

4. Pencapaian NSPK dan SPM

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/ Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab/Kota, jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pendayagunaan Potensi Daerah

Kota Pekalongan merupakan simpul strategis di koridor pantai Utara Pulau Jawa. Berdasarkan sistem pengembangan wilayah pun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi. Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan batik sebagai penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus dikembangkan yaitu sektor perikanan dan industri

5. Pengembangan Daerah terisolir

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6 RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 | BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 19 50' 42" s.d. 6 55' 44" Lintang Selatan dan 109 37' 55" s.d. 109 42' 19" Bujur Timur serta dengan koordinat fiktif

510.00 – 518.00 Km membujur dan 517.75 – 526.75 Km melintang. Batas wilayah secara administratif adalah :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kab. Batang
- Sebelah Selatan : Kab. Pekalongan dan Kab. Batang
- Sebelah Barat : Kab. Pekalongan

Sehingga yang perlu mendapat perhatian adalah daerah yang bersebelahan dengan kota atau kabupaten lain.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota 2021-2026, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan :

1. Program Kawasan Permukiman
   a. Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
   c. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
   d. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
   e. Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
   f. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
   g. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

2. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
   a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Ustilitas Umum (Psu)
    a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
    b. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
    c. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
4. Program Pengembangan Perumahan
    a. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
    b. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
    c. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
    d. Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana
5. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
    a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    b. Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1) Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
        2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
        3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
        3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD

4) Korrdinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   1) Rekonsiiasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangnan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyedian Peralatn Rumah Tangga
   4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   7) Penyelenggaran Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   3) Pemelihraan/ Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINPERKIM KOTA PEKALONGAN

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan pada tahun 2024 dan perkiraan maju pada tahun 2024, yang dilakukan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2021 – 2026, adapun faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana kerja dan pendanaan adalah :

1. Program dan Kegiatan yang bersifat rutin se tiap tahun.
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilakukan.
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan yang mendukung infrastruktur Kota PekalonganSebagaimana Tabel T–C. 3.3

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Capaian Target Kinerja		Sumber		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman				100 persen	19,497,985,000	APBD			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	16,000,000	APBD		2 Dokumen	17,350,000
		Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja yang disusun		2 Dokumen	2,500,000	APBD		2 Dokumen	2,750,000
		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1,500,000	APBD		2 Dokumen	1,650,000 0
		Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Renja yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Dokumen	12,000,000	APBD		4 Dokumen	12,950,000

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	3,102,461,000	APBD		100 persen	3,352,671,000
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 kali 0 Orang/bulan	3,070,811,000	APBD		100 Persen	3,321,021,000
		Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Bulan	30,000,000	APBD		12 Bulan	30,000,000
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan SKPD disusun		1 Dokumen	1,650,000	APBD		1 Dokumen	1,650,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		2 kali	9,500,000	APBD		2 kali	9,500,000
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny **a**	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 kali	9,500,000	APBD		2 kali	9,500,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		12 Bulan	234,000,000	APBD		12 bulan	209,686,000

		Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Bulan	5.000.000	APBD		12 Bulan	5.000.000
		Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor diadakan		35 unit	52,000,000	APBD		35 unit	52,000,000
		Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Bulan	2,000,000	APBD		12 Bulan	2.000.000
		Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Bulan	65,000,000	APBD		11 Bulan	49,186,000
		Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Bulan	7,500,000.	APBD		12 Bulan	5,000,000
		Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang undangan Jumlah		12 Bulan	2,500,000	APBD		12 Bulan	2,500,000

		Perundang undangan i	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							
		Sub kegiatan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 persen	100,000,000	APBD		100 persen	98,000,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	1,800,000	APBD		100 persen	1,800,000
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	1,800,000	APBD		12 Bulan	1,800,000
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Bulan	757,200,000	APBD		12 Bulan	758,200,000
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Bulan	195,000,000	APBD		12 Bulan	195,000,000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	339,398,000	APBD		12 Bulan	286,357,000

		Pemerintahan Daerah								
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Pemeliharaan kendaraan Dinas/Oprasional Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12 Bulan	113,398,000	APBD		12 Bulan	90,000,000
		SubKegiatanPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin berkala		1 unit	**126,000,000**	APBD		1 unit	**76,357,0000**
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	100,000,000	APBD		1 unit	120,000,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Jumlah Dokumen Data Rumah pada Kawasan Rawan Bencana yang disusun		1 dokumen	4,949,196,000	APBD		1 dokumen	1,714,461,000
		Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan		91,35 persen	75,000,000	APBD		91,35 persen	60,000,000

			Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, LahanLahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan, Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnyayang Belum Tertangani, data Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota							
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				90,000,000	APBD			50,000,000
		Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat / sukarelawan tanggap bencana yang dilaksanakan		91,35 persen	10,000,000	APBD		91,35 persen	10,000,000

		Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih		91,35 persen	50,000,000	APBD		91,35 persen	30,000,000
		Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan rembug warga yang dilaksanakan		91,35 perse	30,000,000	APBD		91,35 perse	30,000,000
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Rumah Layak Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah (SPM/IKK Outcome)		91,35 persen	1.420.000.000	APBD		89,66 Persen	1.420.000.000
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) didaerah kab/kota dilaksanakan		91,35 persen	3,584,196,000	APBD		100 Persen	264,461,000
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	umlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Jumlah rumah yang direhabilitasi		91,35 perse	262,500,000	APBD		320 SR	164,461,000
		Sub Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan	Jumlah Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		1 lokasi	700,000,000	APBD		91,35 perse	0

		Rumah bagi Korban Bencana								
		Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun Jumlah unit rumah yang terbangun bagi korban bencana		**5 Unit**	**2,621,696,000**	APBD		**91,35 persen**	**100,000,000**
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		100 Persen	1,200,000,000	APBD		100 Persen	1,200,000,000
		Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah rusunawa yang dipelihara Jumlah unit villa/pesanggrahan (Pondok Boro) yang dipelihara		3 Unit 1 unit	1,200,000,000	APBD		**91,35 persen**	1,200,000,000
	Program Kawasan Permukiman				1 dokumen	2,645,400,000	APBD		1 dokumen	17,004,276,000
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		291,47 hektar	236,400,000	APBD		291,47 hektar	236,400,000
		Sub kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan	Jumlah Dokumen DE Konsultan Perencana disusun		2 Dokumen	168,000,000	APBD		2 Dokumen	168,000,000

		Permukiman Kumuh								
		Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha yang dilaksanakan		12 Kali	68,400,000	APBD		12 Kali	68,400,000
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase dokumen penataan kawasan permukiman kumuh yang disusun		**4 Kecamatan**	**550,000,000**	APBD		**4 Kecamatan**	**550,000,000**
		Sub kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		4 Kecamatan	400,000,000	APBD		4 Kecamatan	100,000,000
		Sub kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang disusun		1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	0

		Kumuh dan Permukiman Kumuh								
		Sub kegiatan Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah program pemerintah pusat atau provinsi yang difasilitasi		2 Paket	50,000,000	APBD		2 Paket	150,000,000
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1,859,000,000	APBD			16,447,876,000
		Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh yang disusun		1 Dokumen	74,000,000	APBD		291.47 Hektar	74,000,000
		Sub KegiatanPerbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH (IKK Output)		93 Unit	1,785,000,000	APBD		93 Unit	1,000,000,000
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh					6,620,000,000	APBD			4,588,188,000
		Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Rangka Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk		650 Unit	6,620,000,000	APBD		650 Unit	4,588,188,000

		Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki							
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)					628,030,000	APBD			614,521,000
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Sudah Menyerahkan PSU		1 Dokumen	628,030,000	APBD		1 Dokumen	614,521,000
		Sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome))		1 Aplikasi	240,000,000	APBD		1 Aplikasi	230,000,000
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah fasilitas jalan lingkungan yang ditangani Jumlah fasilitas RTNH yang ditangani Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		**330 meter 2 Unit 4 Lokasi**	**280,000,000**	APBD		**330 meter 2 Unit 4 Lokasi**	**280,000,000**
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi tentang PSU Perumahan (Unit Rumah yang Terfasilitasi Air Minum, Jalan Lingkungan, Akses Sanitasi, RTNH, dan PJU) Jumlah		1 Dokumen 10 Unit	108,030,000	APBD		1 Dokumen 10 Unit	104,521,000

			perumahan yang telah menyerahkan aset PSU							
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan					320,000,000	APBD			1,090,262,000
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100 persen	320,000,000	APBD		100 persen	1,090,262,000
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kab/Kota yang disusun Jumlah Dokumen Proses Legalisasi Pengadaan Tanah Jumlah Ganti Rugi atas Tanah /Bangunan atas proyek Pemerintah Jumlah Lokasi Pengadaan Tanah		4 Dokumen 2 Dokumen 2 lokasi 5 lokasi	320,000,000	APBD		4 Dokumen 2 Dokumen 2 lokasi 5 lokasi	1,090,262,000
	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee					9,285,0000	APBD			9,086,000
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian	Persentase ketercapaian Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah		100 persen	9,285,000	APBD		100 persen	9,086,000

		Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee							
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah peresentase ketercapaian penetapan subjek dan objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		25 persen	9,285,000			25 persen	9,086,000
					TOTAL	43,155,230,000				43,155,230,000

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Pekalongan merupakan gambaran rencana kerja dalam menunjang tercapainya visi, misi dan arah pembangunan yang telah ditetapkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam mewujudkan Kota Pekalongan yang maju

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasa Permukiman Kota Pekalongan Tahun Angaran 2024 Kota Pekalongan menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program – program Rencana Kerja Penetapan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan sebaik – baiknya;

2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan tahun 2024, Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2024 ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
   Pada akhirnya keberhasilan pembangunan di Kota Pekalongan selain dilaksanakan

Jajaran Pemerintah Kota Pekalongan juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Pekalongan, 09 September 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman Kota
Pekalongan

ANDRIANTO, ST,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730111 199803 1 006

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

RENJA PERUBAHAN SATPOL P3KP TAHUN 2024

Jl. Majapahit No. 7 Kota Pekalongan

satpolpekalongankota@gmail.com

satpolpp.pekalongankota.go.id

satpolpp.kotapekalongan

Satpol News Kota Pekalongan

BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
Kota Pekalongan,

SRIYANA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680709 199003 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud Dan Tujuan 2
1.4 Sistematika Penulisan 3
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 4
2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja SATPOL PP Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 17
BAB IV PENUTUP 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan peraturan peralihannya dimana menyebutkan setiap Pemerintah di Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu selama 20 tahun, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan jangka waktu pembangunan selama 5 tahun.

Dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tersebut dituangkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan mencakup sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra).

Hal tersebut diatas kemudian diatur dan didasari juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Pekalongan yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan atas Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
2. Perwaturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
4. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Perubahan atas Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan arah kebijakan dan strategi serta menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Peklaongan Tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Memberikan landasan operasional bagi para pelaksana sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. Menjadi salah satu dokumen pengawasan dan pengendalian untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
c. Mengukur tingkat pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dalam menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Berisi hasil evaluasi renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi pagu anggaran dan target kinerja perubahan tahun 2024

BAB V PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 360 menyebutkan bahwa penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2024 berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan sampai dengan triwulan II tahun 2024 ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan II, seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan

Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan	Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Pergeseran APBD		Realisasi Capaian s/d Triwulan II	
			Target	Satuan	Fisik	%
1	2	3	4	5	6	7
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	persen	38,89	38,89
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	33,81	33,81
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	9,51	9,51
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	persen	11,11	11,11
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	0	0
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	0	0
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan	5	33,33

Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan	Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Pergeseran APBD		Realisasi Capaian s/d Triwulan II	
			Target	Satuan	Fisik	%
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	persen	66,67	66,67
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	Orang/ bulan	42	113,51
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	6	50
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	100
1.05.01.2.05.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	persen	0	0
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	0	0
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	51,43	51,43
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penarangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	2	50
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	2	50
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	2	50
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	2	50

Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan	Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Pergeseran APBD		Realisasi Capaian s/d Triwulan II	
			Target	Satuan	Fisik	%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	1	50
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	1	50
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	90	60
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	50	50
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	2	50
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	6	50
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	9,51	9,51
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29	Unit	3	10,34
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	0	0
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	66	Unit	12	18,18

Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan	Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Pergeseran APBD		Realisasi Capaian s/d Triwulan II	
			Target	Satuan	Fisik	%
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	66	persen	60	85,71
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (IKK Outcome)	95	persen	100	105,26
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	300	Laporan	160	53,33
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2000	Laporan	765	38,25
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelrindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	40	Dokumen	23	57,50
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	Dokumen	0	0

Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan	Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Pergeseran APBD		Realisasi Capaian s/d Triwulan II	
			Target	Satuan	Fisik	%
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	155	Orang	120	77,42
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemyitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2	Dokumen	1	50
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4	Laporan	0	0
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Koya dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)	20	Perda	12	60
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12	Laporan	4	33,33
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48	Laporan	24	50

Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan	Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Pergeseran APBD		Realisasi Capaian s/d Triwulan II	
			Target	Satuan	Fisik	%
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12	Laporan	6	50
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	16	persen	8,33	52,08
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	3	laporan	0	0
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	persen	100	100
1.05.04.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran	100	persen	100	100
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4	Dokumen	5	125
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	250	Laporan	210	84
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis	38	Orang	38	100

Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan	Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Pergeseran APBD		Realisasi Capaian s/d Triwulan II	
			Target	Satuan	Fisik	%
		dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	2	Desa/ Kelurahan	0	0
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	3	Unit	0	0
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	3	Dokumen	2	66,67
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya	100	Persen	100	100
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12	dokumen	3	25

Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan	Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Pergeseran APBD		Realisasi Capaian s/d Triwulan II	
			Target	Satuan	Fisik	%
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran	100	persen	100	100
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	320	Orang	100	31,25
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	21	Desa/ Kelurahan	0	0
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penanganan kondisi membahayakan	100	persen	100	100
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	24	laporan	12	50

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan kuat yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan semakin kritisnya pemikiran masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan, disamping adanya pengaruh globalisasi. Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah untuk selalu tanggap atas tuntutan masyarakat dan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pelayanan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat memiliki fungsi strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif minim gangguan trantibum. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum dapat meningkatkan ketenangan dan ketentraman masyarakat serta semangat motivasi bekerja.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. penyelenggaraan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

4. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
5. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
6. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
7. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
8. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
9. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
10. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Isu-isu strategis dalam perumusan program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja Satpol PP dalam bertugas seperti patroli rutin, pengamanan kegiatan-kegiatan yang melibatkan keramaian, pengamanan obyek-obyek vital guna menjaga ketertiban umum;
2. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat guna membangun hubungan yang kuat dalam mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Peningkatan pemantauan dan teknologi keamanan seperti kamera pengawas pada ATCS dan menghimbau pelanggar Perda melalui pengeras suara yang ada;
4. Peningkatan penegakan Perda dengan memperkuat sistem penegakan Perda seperti intelejen/deteksi dini, penanganan pelanggaran Perda dan pemberian efek jera pada pelanggar;

5. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang praktik-praktik keamanan yang berkaitan dengan kebakaran, seperti penggunaan listrik yang aman, pengelolaan limbah yang tepat, dan pemeliharaan peralatan rumah tangga. Selain itu, melakukan inspeksi rutin pada bangunan dan fasilitas untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko kebakaran;
6. Peningkatan kapasitas pemadam kebakaran dan sarana prasarana pemadam kebakaran diharapkan dapat optimal dalam menangani kebakaran;
7. Membangun kerjasama yang erat antara pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya seperti polisi, rumah sakit, dan dinas pemadam kebakaran lainnya. Hal ini penting untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam penanggulangan kebakaran dan evakuasi yang aman.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja atas evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat kami sajikan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing-masing sub kegiatan. Namun demikian ada yang perlu menjadi catatan, antara lain:
   a. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD, serapan anggaran pada Triwulan II sebesar Rp. 84.067.029,00 dari anggaran penetapan sebesar Rp. 88.000.000,00 sehingga capaian sampai dengan Triwulan II adalah 95,53%, sehingga perlua ada tambahan anggaran guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.
2. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing-masing sub kegiatan. Namun demikian ada yang perlu menjadi catatan, antara lain:

a. Sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum perlu penambahan anggaran guna kegiatan pemberdayaan anggota Satlinmas Tk. Kota dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.

3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebekaran dan penyelamatan non kebakaran secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing-masing sub kegiatan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sejalan dengan visi dan misi Walikota Pekalongan 2021-2026, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan memiliki tanggung jawab dalam pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kota Pekalongan baik dari segi akses maupun kualitas. Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pada tahun 2023 capaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori Tuntas Paripurna dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dengan capaian 100%
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan capaian 100%

Selanjutnya guna mengampu upaya pemenuhan capaian dan mutu SPM Ketentraman dan ketertiban umum, pada tahun 2024 Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan melaksanakan 3 program yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Rencana kerja perubahan dan pendanaan tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan secara rinci kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Perubahan Renja 2023

Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan	Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Pergeseran APBD		Pagu APBD Perubahan
			Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				13.157.628.000,00
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				13.157.628.000,00
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	persen	5.558.043.000,00
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	persen	15.960.000,00
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	2.320.000,00
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	1.640.000,00
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan	12.000.000,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daeraj	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	persen	4.730.987.000,00

Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan	Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Pergeseran APBD		Pagu APBD Perubahan
			Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41	Orang/bulan	4.669.367.000,00
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	60.100.000,00
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.520.000,00
1.05.01.2.05.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	persen	5.000.000,00
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	5.000.000,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100	persen	248.720.000,00
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penarangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	5.625.000,00
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	29.195.000,00
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	7.500.000,00
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	96.400.000,00
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	7.500.000,00
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	2.500.000,00

Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan	Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Pergeseran APBD		Pagu APBD Perubahan
			Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110	orang/kali	100.000.000,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	127.651.000,00
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	2.000.000,00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	125.651.000,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	429.725.000,00
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29	Unit	369.230.000,00
1.05.012.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	30.495.000,00
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	66	Unit	30.000.000,00
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	82	persen	6.587.360.000,00
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (IKK Outcome)	90	persen	2.492.736.000,00

Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan	Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Pergeseran APBD		Pagu APBD Perubahan
			Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	300	Laporan	43.000.000,00
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2000	Laporan	213.480.000,00
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelrindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	40	Dokumen	1.976.146.000,00
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	Dokumen	102.270.000,00
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	155	Orang	21.100.000,00
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemyitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketrtiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2	Dokumen	123.500.000,00

Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan	Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Pergeseran APBD		Pagu APBD Perubahan
			Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4	Laporan	13.240.000,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Koya dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)	20	Perda	4.092.693.000,00
1.05.02.2.02.10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12	Laporan	51.699.000,00
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48	Laporan	15.000.000,00
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12	Laporan	4.025.994.000,00
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	13	persen	1.931.000,00
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1	laporan	1.931.000,00

Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan	Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Pergeseran APBD		Pagu APBD Perubahan
			Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	persen	1.012.225.000,00
1.05.04.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran	100	persen	826.313.000,00
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4	Dokumen	24.750.000,00
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	250	Laporan	734.013.000,00
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	38	Orang	15.000.000,00
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	2	Desa/ Kelurahan	7.500.000,00

Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan	Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Pergeseran APBD		Pagu APBD Perubahan
			Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6
1.05.04.2.01.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	3	Unit	11.250.000,00
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	3	Dokumen	33.800.000,00
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya	100	persen	34.071.000,00
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12	Dokumen	34.071.000,00
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran	100	persen	97.328.000,00
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	320	Orang	37.500.000,00

Kode OPD/ Kode Bidang Urusan/ Kode Program/Kode Kegiatan/ Kode Sub Kegiatan	Nama OPD/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Pergeseran APBD		Pagu APBD Perubahan
			Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	21	Desa/ Kelurahan	59.828.000,00
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penanganan kondisi membahayakan	100	persen	54.513.000,00
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	24	Laporan	54.513.000,00

BAB IV
PENUTUP

Rencana kerja perubahan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun sebagai upaya pencapaian Renstra Satpol P3KP Kota Pekalongan 2021-2026 dengan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024 serta RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan segenap jajaran Satpol P3KP dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan secara konsisten dalam mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkeadilan, melaksanakan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM guna peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Pekalongan.

Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan penganggaran program dan kegiatan untuk selanjutnya dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Tak lupa kami mohon masukan, kritik dan saran yang membangun demi hasil yang lebih baik di masa depan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Pekalongan,

SRIYANA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680709 199003 1 008

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN 2024

KOTA PEKALONGAN

BPBD KOTA PEKALONGAN

JL. SRIWIJAYA NO.5B, BENDAN, PEKALONGAN BARAT

KOTA PEKALONGAN

(0285) 4151508

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) TA 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Pelaksana
BPBD KOTA PEKALONGAN

APRILYANTO DWI PURNOMO, S.E., M.Si.
NIP. 196704230198603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1. Latar Belakang 4

2. Landasan Hukum 5

3. Maksud dan Tujuan 6

BAB II EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKALONGAN KOTA PEKALONGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IITAHUN 2024 7

1. Evaluasi Renja Triwulan II 7

2. Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Badan Penang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan 18

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 19

1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah 19

BAB IV PENUTUP 34

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan adalah dokumen yang disusun berdasarkan evaluasi perkembangan keadaan dalam 1 (satu) tahun berjalan. Perkembangan sebagaimana dimaksud adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan / atau keadaan darurat.

RKPD Perubahan adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan tetap relevan dan efektif dalam memajukan wilayahnya. Dengan mengakomodasi perubahan dan dinamika yang ada, RKPD Perubahan membantu memastikan bahwa rencana pembangunan dapat terus menjawab kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Dalam perjalanan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan terdapat berbagai perkembangan. Perkembangan dimaksud terjadi pada sisi pendapatan dan belanja. Pada sisi pendapatan, telah terjadi perubahan target dikarenakan alasan tertentu yang mempengaruhi penurunan target sampai akhir tahun anggaran 2024. Akibatnya dibutuhkan penyesuaian pendapatan. Sedangkan dari aspek belanja, terdapat penambahan, perubahan rincian belanja, serta terdapat pula perubahan target output kegiatan.

Menindaklanjuti perkembangan kerangka perubahan pendanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan disusunlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan berjalan efisien, efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
6. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024

3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan anggaran 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan adalah sebagai pedoman penyusunan Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Serta memberikan informasi kondisi riil beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah melakukan evaluasi dan menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka kegiatan sehingga tercipta sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai yakni;

1. Penyesuaian anggaran kegiatan untuk memenuhi kebutuhan selama satu tahun sehingga anggaran lebih efisien, lebih efektif, tepat sasaran, tepat waktu dan akuntabel berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga merupakan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta dasar perencanaan program dan kegiatan mendatang sehingga dapat mengakomodir semua aspirasi masyarakat / kebutuhan yang dinamis.
3. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam rangka pencapaian Visi Misi Walikota Pekalongan Tahun 2021-2026.

BAB II
EVALUASI RENJA DINPARBUDPORA KOTA PEKALONGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

1. Evaluasi Renja Triwulan II

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

a) Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

b) Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

c) Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagaiberikut:

SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			RAPBD (Rp)	REALISASI CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	Target	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Badan Penanggulangan Bencana Daerah				**4.097.465.000**					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVAKUASI PERANGKAT DAERAH	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	1.740.000	0 dokumen	0 dokumen			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	1.230.000	0 dokumen	0 dokumen			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan	12.000.000	4 laporan	2 laporan			
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	Orang/bulan	1.594.847.000	13 orang/bulan	13 orang/ bulan			

SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			RAPBD (Rp)	REALISASI CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	Target	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	36.900.000	3 dokumen	3 dokumen			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.140.000	1 laporan	0 laporan			
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH									
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	95.900.000	0 paket	0 paket			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Orang	8.265.000	0 orang	0 orang			
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH									
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	1.875.000	1 paket	1 paket			

SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			RAPBD (Rp)	REALISASI CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	Target	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	58.400.000	1 paket	1 paket			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	902.000	1 paket	1 paket			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	24.258.000	1 paket	1 paket			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	9.000.000	1 paket	0 paket			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	2.500.000	1 paket	0 paket			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	75.000.000	10 laporan	10 laporan			
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	1.500.000	1 laporan	1 laporan			

SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			RAPBD (Rp)	REALISASI CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	Target	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	58.313.000	3 laporan	3 laporan			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	52.181.000	3 laporan	3 laporan			
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	11	Unit	82.877.000	3 unit	3 laporan			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	64.017.000	1 unit	0 unit			
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi	57	Unit	46.341.000	10 unit	17 unit			
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA									
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	Dokumen	0	0 dokumen	0 dokumen			

SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			RAPBD (Rp)	REALISASI CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	Target	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	200	Orang	59.265.000	50 orang	50 orang			
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA									
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1	Dokumen	76.500.000	0 dokumen	0 dokumen			
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	2	Unit	33.911.000	2 unit	0 unit			
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	400	Kawasan	63.300.000	50 kawasan	150 kawasan			
PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA									
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang	1	Dokumen	1.369.840.000	0 dokumen	0 dokumen			

	Ditetapkan Paling Lama 124 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat								
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2500	Orang	166.750.000	1250 orang	250 orang			
PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA									
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1	Dokumen	40.125.000	0 dokumen	0 dokumen			
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	4	Kegiatan	37.500.000	1 kegiatan	1 kegiatan			

2. Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan APBD 2024

Berdasarkan hasil evaluasi Renja D Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Triwulan II terhadap pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Tahun 2024 Kota dengan APBD 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan

No	Uraian	Renja 2024	APBD 2024
1	Program	2	2
2	Kegiatan	10	10
3	Sub Kegiatan	30	30
4	Pagu Anggaran	3.932.050.000	4.119.620.000

Untuk jumlah program, kegaiatan dan sub kegiatan dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan pada RKPD 2024 dan APBD 2024 sudah sama yaitu sejumlah 2 program, 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Tetapi terdapat perbedaan jumlah pagu di Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dengan jumlah pagu yang terdapat di APBD 2024. Adanya perbedaan pagu anggaran pada Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan 2024 dengan pagu anggaran pada APBD 2024 terjadi dari proses hasil dinamika dalam pembahasan KUA-PPAS.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 terdari dari 2 Program, 10 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.097.465.000 turun sebesar Rp. 22.155.000 jika di bandingkan pagu penetapan APBD tahun 2024 sebesar Rp. 4.119.620.000.

Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dan 1 (satu) Sekretariat

Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pekalongan. Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKAROR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			**3.932.050.000**						**4.097.465.000**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA											
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVAKUASI PERANGKAT DAERAH	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.740.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.740.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.740.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.230.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.230.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.230.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000		

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKAROR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.695.648.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.638.090.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.594.847.000		(43.243.000,00)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	36.900.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	36.900.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	36.900.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.140.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.140.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.140.000		
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH											

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKAROR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	45.900.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	95.900.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	95.900.000		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	8.265.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	8.265.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	8.265.000		
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.875.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.875.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.875.000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	63.541.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	63.541.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	58.400.000		(5.141.000)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	902.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	902.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	902.000		

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG(Rp.)	
	URAIAN INDIKAROR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADA PRKPD	TERHADAP APBD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	27.258.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	27.258.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	24.258.000		(3.000.000)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.000.000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.500.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.500.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.500.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	55.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	75.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	75.000.000		
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH											
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.500.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	58.313.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	58.313.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	58.313.000		

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKAROR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	47.524.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	47.524.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	52.181.000		5.141.000
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH URUSAN PEMERINTAH DAERAH											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	11 Unit	82.877.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	11 Unit	82.877.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	11 Unit	82.877.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	57 Unit	11.250.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	11.250.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	64.017.000		
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi	57 Unit	46.341.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi	57 Unit	46.341.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi	57 Unit	46.341.000		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKAROR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA											
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	72.263.000	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	72.263.000	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	0 Dokumen	0		(72.263.000)
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	200 Orang	59.265.000	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	200 Orang	59.265.000	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	200 Orang	59.265.000		
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA											
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	57.004.000	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	57.004.000	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	76.500.000		19.496.000

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG(Rp.)	
	URAIAN INDIKAROR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADA PRKPD	TERHADAP APBD
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	2 Unit	33.911.000	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	2 Unit	33.911.000	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	2 Unit	33.911.000		
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	400 Kawasan	63.300.000	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	400 Kawasan	63.300.000	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	400 Kawasan	63.300.000		
PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA											
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 124 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	899.228.000	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 124 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1.369.840.000	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 124 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1.369.840.000		

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKAROR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2500 Orang	458.750.000	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2500 Orang	163.750.000	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2500 Orang	166.750.000		3.000.000
PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA											
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	77.625.000	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	40.125.000	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	40.125.000		
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	4 Kegiatan	40.125.000	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	4 Kegiatan	37.500.000	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	4 Kegiatan	37.500.000		

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan program-program yang ada. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan sangat ditentukan oleh dukungan dan kerjasama dari seluruh pegawai dan stakeholder yang ada. Diharapkan dengan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dapat mencapai target kinerja dalam Tahun 2024 sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dapat diukur dan dinilai keberhasilannya.

Selanjutnya, dalam rangka merinci pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan rencana anggaran, dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Pelaksana
BPBD KOTA PEKALONGAN

APRILYANTO DWI PURNOMO, S.E., M.Si.
NIP. 196704230198603 1 003

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN

PERUBAHAN RENJA

DINSOSP2KB
KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2024

dinsosp2kb.pekalongankota.go.id
dinsosp2kb@gmail.com
(0285) 422868
Jl. Sriwijaya No. 40 Kota Pekalongan

PERUBAHAN RENJA 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DINSOSP2KB)

Pemerintah Kota Pekalongan
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jl. Sriwijaya No. 40 Telp. (0285) 422868 Pekalongan
Email. dinsosp2kb@gmail.com
Web : dinsosp2kb.pekalongankota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP2KB) Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat disusun tanpa ada halangan sesuatu apapun.

Perubahan Renja DinsosP2KB Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024, dalam rangka menjalankan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara umum, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun dalam 4 bab. Bab I membahas tentang Pendahaluan, Bab II membahas tentang Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, Bab III membahas Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan terakhir Bab IV penutup.

Kami menyadari Perubahan Renja DinsosP2KB Kota Pekalongan Tahun 2024 ini belum sempurna, sehingga masukan, saran dan koreksi semua pihak akan menjadi lebih baik untuk penyusunan renja pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya Perubahan Renja DinsosP2KB Tahun 2024 ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik agar dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

YOS ROSYIDI S.I.P., M.Si.
NIP. 19660516 198603 1 007

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL i
BAB I. PENDAHULUAN 1
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 8
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 20
BAB IV. PENUTUP 26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Evaluasi Renja smpai dengan Triwulan II Tahun 2024 9

Tabel 2. Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat daerah Perubahan Renja 2024 ……... 21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Gambaran Pelayanan

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang penanggulangan bencana, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada DINSOSP2KB Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja utama Rencana Stategis DINSOSP2KB Kota Pekalongan.

Kinerja pelayanan DINSOSP2KB Kota Pekalongan dapat dilihat pada capaian pelaksanaan tugas pokoknya memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik pada urusan Sosial, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

1.2 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis Tingkat Kinerja

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada Pemerintah Kota Pekalongan, DINSOSP2KB Kota Pekalongan telah menyusun program kerja dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, DINSOSP2KB Kota Pekalongan mendukung pencapaian visi "*Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius*" dengan misi pertama "*Meningkatkan Kualitas pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat*" dan misi ketujuh *"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisiem berdasarkan prinsop-prinsip Good Governance dan Clean Government"*

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Isu Strategis berkaitan dengan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);
3. Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif.

Permasalahan dan Hambatan

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana dan pengendalian penduduk keluarga berencana.

Selama menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Kapasitas sumberdaya manusia di DINSOSP2KB Kota Pekalongan jika dibandingkan dengan tingginya target pencapaian sasaran dan tujuan indikator belumlah ideal. Pengalaman penanganan kemiskinan, kebencanaan dan *stunting* yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum optimalnya sistem pelayanan publik.
2. Belum optimalnya kinerja organisasi
3. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta menurunnya jumlah PPKS
4. Belum optimalnya pencapaian peserta KB aktif

Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi

Penanggulangan bencana yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini DINSOSP2KB Kota Pekalongan memegang peranan dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik DINSOSP2KB Kota Pekalongan akan berdampak langsung pada kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, kinerja DINSOSP2KB Kota Pekalongan berdampak pada pencapaian visi "*Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius*" dengan misi pertama "*Meningkatkan Kualitas pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat*" dan misi ketujuh "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisiem berdasarkan prinsop-prinsip Good Governance dan Clean Government"

Tantangan dan Peluang

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan pada Dinsosp2kb antara lain :

1. **Urusan Sosial**

a) Belum optimalnya system pelayanan publik

b) Minimnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan pekerja sosial.

c) banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial tetapi masih terbatasnya sarana penunjang.

d) belum adanya database PMKS serta belum adanya terminasi (penyelesaian penanganan) PMKS secara berkelanjutan.

e) Terbatasnya jumlah personil yang ada dibanding dengan jumlah PMKS yang perlu ditangani.

2. **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

a) Belum optimalnya para penyelenggara kegiatan kelompok kegiatan (Poktan) BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS.

b) Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok kegiatan (Poktan) oleh petugas.

c) Perlu lebih besar lagi dukungan stakeholder, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meningkatkan keluarga yg berketahanan.

d) Cara kerja / sistem komando yg kurang singkron antara OPD KB kabupaten kota dengan para penyuluh KB yg statusnya sebagai tenaga pusat.

e) Kurangnya pemahaman remaja tentang usia kawin pertama.

2. Peluang

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, maka tugas dan fungsi terkait urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program pada urusan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Pekalongan antara lain :

a. Makin pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah PMKS dan penurunan angka fertilitas penduduk;

b. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat
c. Terbukanya pengembangan kapasitas DINSOSP2KB melalui kerjasama dengan lembaga baik urusan sosial maupun pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
d. Makin terbukanya komunikasi dan koordinasi antar DINSOSP2KB Kota Pekalongan dengan masyarakat.
e. Adanya peran serta masyarakat, PSKS dan LSM dalam penurunan jumlah PMKS,
f. Adanya dukungan peningkatan sarana dan prasarana dalam operasional urusan sosial maupun pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana melalui kementerian / lembaga teknis.
g. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana dari APBD dan peluang belanja (Dana Alokasi Khusus) oleh pemerintah pusat.
h. Adanya usaha-usaha peningkatan SDM tenaga pengelola KB oleh BKKBN perwakilan Provinsi Jawa Tengah berupa kegiatan orientasi dan pelatihan
i. Adanya advokasi program KB terhadap pimpinan daerah kabupaten/kota.
j. Tercukupinya rasio jumlah Penyuluh KB terhadap jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut maka kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan implementasi SOP Pelayanan Publik dalam mendukung capaian kinerja;
2. Meningkatkan dukungan administrasi perkantoran;
3. Meningkatkan dukungan ketercukupan sarpras aparatur;
4. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
5. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan;
7. Peningkatan Perlindungan dan layanan jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin.;
8. Peningkatan pelayanan sosial bagi PPKS(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);
9. Peningkatan graduasi KPM PKH;
10. Optimalisasi database kemiskinan;
11. Optimalisasi bantuan sosial bagi kelompok rentan;
12. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Taman Makam pahlawan;
13. Optimalisasi pendataan/updating data keluarga;
14. Penurunan angka kelahiran umur 15-19 tahun;
15. Peningkatan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
16. Peningkatan peran serta ormas dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kebijakan yang tepat bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang guna mendukung pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan serta program nasional maupun program SDGs (Sustainable Development Goals).

Penentuan Isu-isu Stategis

Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah.

Isu Strategis pada pelayanan urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pelayanan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, maka tugas dan fungsi terkait urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Sosial

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Sasaran Jangka Menengah pada Kementerian Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan.
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu

3. Sasaran jangka menengah pada Renstra BKKBN

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, sasaran Renstra pada BKKBN adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga.

2. Menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
3. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran.
4. Meningkatkan advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran.
5. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, telah ditetapkan 3 (tiga) pengembangan Kawasan Strategis Kota (KSK), yang meliputi : KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, KSK dari sudut kepentingan sosial budaya dan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan untuk struktur ruang wilayah kota meliputi Pusat Kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Pusat Pelayanan Kota (PPK), 4 (empat) Sub Pusat Pelayanan Kota dan 6 (enam) Pusat Lingkungan; serta Sistem Jaringan Prasarana

Meninjau RTRW Kota Pekalongan tentang pengembangan kawasan strategis Kota Pekalongan tersebut maka pelayanan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan memiliki peluang dalam mencapai Indikator Kinerja Penurunan Warga Miskin (DTKS)

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kondisi lingkungan di Kota Pekalongan merupakan wilayah rawan bencana hal ini disebabkan letak/wilayah Kota Pekalongan yang berada di pesisir pantai utara dan adanya penurunan permukaan tanah dengan rata-rata 11-23 cm per tahun, bencana yang terjadi di Kota Pekalongan ini menyebabkan rusaknya infrastruktur, mengganggu kesehatan dan berdampak secara ekonomi baik langsung maupun tidak langsung, Peningkatan abrasi merusak bangunan di sekitar pesisir, hilangnya tambak dan sawah serta meningkatnya kerusakan mangrove.

Ditinjau dari kondisi lingkungan di Kota Pekalongan tersebut, maka pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki hambatan yang cukup besar terutama pada kondisi bencana rob yang menyebabkan banyaknya warga Kota Pekalongan yang terkena dampak rob yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya dan hal ini dapat menjadi penyebab menurunnya kesejahteraan hidup masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, terutama pada faktor KLHS dapat diketahui bahwa Isu yang muncul di Kota pekalongan adalah pada permasalahan lingkungan hidup Kota Pekalongan yang dapat menurunkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat seperti pencemaran air dan penurunan muka tanah (amblesan) yang berdampak besar terhadap peningkatan wilayah rawan bencana banjir dan rob.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

II.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Rencana kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen perencaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan rencanan strategis DINSOSP2KB Kota Pekalongan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2024 memuat 9 (sembilan) program, 17 (Tujuh Belas) kegiatan dan 53 subkegiatan dengan anggaran senilai Rp. 13.036.773.000,- . Setelah melalui beberapa tahapan proses perencanaan, subkegiatan yang mengalami dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Pekalongan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 12.460.916.000.

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan renja 2024 DinsosP2KB Kota Pekalongan telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II. Berbagai kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja tahun 2024 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja DinsosP2KB Tahun 2024 adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan renstra DinsosP2KB serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Secara rinci rekapitulasi evaluasi renja dan renstra sampai dengan triwulan II Tahun 2024 akan dijabarkan dalam tabel lebih lanjut.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 pada DinsosP2KB Kota pekalongan dapat dilihat pada Tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator			Pagu Anggaran		
			Target	Capaian	Persentase	Target	Capaian	Persentase
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100 persen**	**42.23 persen**	**42.23**	**3.841.554.000**	**1.670.601.969**	**43.49%**
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**100 persen**	**36.35 persen**	**36.35 persen**			
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	**100 persen**	**53.65 persen**	**53.65 persen**			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	17.78 persen	17.78 persen	21.606.000	7.559.000	34.99%
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	0 dokumen	0 persen	2.552.000	1.749.000	68.53%
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	0 dokumen	0 persen	1.804.000	510.000	28.27%
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	8 dokumen	53.33 persen	17.250.000	5.300.000	30.72%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	66.67 persen	66.67 persen	2.782.843.000	1.287.179.142	46.25%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang/bulan	18 orang/bulan	94.74 persen	2.739.321.000	1.265.867.142	46.21%
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	6 dokumen	50 persen	41.850.000	20.050.000	47.91%
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100 persen	1.672.000	1.162.000	69.50%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	0 persen	0 persen	5.000.000	0	0%
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	0 paket	0 persen	5.000.000	0	0%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	59.05 persen	59.05 persen	249.718.000	116.208.957	46.54%
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	4 paket	2 paket	50 persen	7.500.000	1.476.000	19.68%

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	1 paket	50 persen	50.867.000	18.410.500	36.19%
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	2 paket	50 persen	5.625.000	2.708.300	48.15%
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	2 paket	50 persen	76.726.000	32.629.000	42.53%
4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	2 paket	50 persen	7.500.000	5.557.800	74.10%
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	2.500.000	1.140.000	52.00%
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	95 laporan	63.33 persen	99.000.000	54.287.357	54.84%
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	50 persen	50 persen	351.026.000	153.177.549	43.64%
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	2 laporan	50 persen	2.400.000	480.000	20.00%
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	6 laporan	50 persen	162.561.000	62.349.777	38.35%
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 laporan	6 laporan	50 persen	186.065.000	90.347.772	48.56%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	53.65 persen	53.65 persen	431.361.000	106.577.321	24.71%
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 unit	8 unit	11.94 persen	230.725.000	68.880.821	29.85%
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	2 unit	25 persen	181.736.000	26.096.500	14.36%
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	31 unit	124 persen	18.900.000	11.600.000	61.38%
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan**	**67 persen**	**47.17 persen**	**70.40**	**490.778.000**	**155.446.365**	**31.67%**
7.	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen	4.58 persen	45.81 persen	184.825.000	87.770.808	47.49%
7.1	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Keluarga	0 keluarga	0 persen	184.825.000	87.770.802	47.49%

8.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen	96 persen	128 persen	305.953.000	67.675.563	22.12%
8.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	24 orang	80 persen	74.336.000	0	0%
8.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 orang	4 orang	66.67 persen	162.867.000	62.925.563	38.64%
8.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lembaga	0 lembaga	0 persen	68.750.000	4.750.000	6.91%
III	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**2.060.482.000**	**571.239.799**	**27.72%**
9.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 persen	96 persen	96 persen	1.194.633.000	543.722.991	45.51%
9.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	78 orang	97.50 persen	365.520.000	160.427.6000	43.89%
9.2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	78 orang	97.50 persen	829.113.000	383.295.361	46.23%
10.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.68 persen	1.81 persen	49.13 persen	865.849.000	27.516.808	3.18%
10.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 orang	0 orang	0 persen	672.578.000	550.000	0.08%
10.2	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu	7 orang	0 orang	0 persen	31.913.000	1.860.000	5.83%

		dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota						
10.4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	0 orang	0 persen	51.161.000	2.500.000	4.89%
10.5	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	0 orang	0 persen	56.986.000	0	0%
10.6	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83 orang	65 orang	78.31 persen	53.211.000	22.606.808	42.49%
IV	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial**	**55.12 persen**	**72.06 persen**	**130.73 persen**	**1.526.198.000**	**400.670.644**	**26.25%**
11.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase graduasi KPM PKH	10 persen	0.79 persen	7.91 persen	1.526.198.000	400.670.644	26.25%
11.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2000 orang	1742 orang	87.10 persen	612.094.000	104.927.129	17.14%
11.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	950 keluarga	484 orang	50.95 persen	914.104.000	295.743.515	32.35%
V	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**720.967.000**	**150.064.669**	**20.81%**
12.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen	51.43 persen	51.43 persen	720.967.000	150.064.669	20.81%
12.1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang	1543 orang	77.15 persen	426.177.000	150.064.669	35.21%
12.2	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	1666 orang	0 orang	0 persen	277.000.000	0	0%
12.3	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan	2000 orang	1543 orang	0 persen	17.790.000	0	0%

		Kabupaten/Kota						
VI	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan**	**100 persen**	**0 persen**	**0 persen**	**265.306.000**	**25.896.722**	**9.76%**
13	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen	0 persen	0 persen	265.306.000	25.896.722	9.76%
13.1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen	0 dokumen	0 persen	200.000.000	0	0%
13.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	1 makam	100 persen	65.306.000	25.869.722	39.65%
VII	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga**	**100 persen**	**0 persen**	**0 persen**	**254.523.000**	**35.079.178**	**13.78%**
14.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen	0 persen	0 persen	254.523.000	35.079.178	13.78%
14.1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	0 dokumen	0 persen	61.403.000	21.009.278	34.22%
14.2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	6 laporan	1 laporan	16.67 persen	145.120.000	8.670.000	5.97%
14.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 dokumen	7 dokumen	58.33 persen	48.000.000	5.399.900	11.25%
VIII	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Penurunan angka perkawinan di bawah 21 Tahun**	**7.60 persen**	**4.82 persen**	**157.84 persen**	**1.883.987.000**	**410.120.866**	**21.77%**
15.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB SesuaiKearifan Budaya Lokal	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	8.73 perseribu	0 perseribu	0 persen	977.304.000	209.084.505	21.39%
15.1	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 laporan	1 laporan	50 persen	80.010.000	6.450.000	8.06%
15.2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 laporan	8 laporan	66.67 persen	196.000.000	53.964.046	27.53%
15.3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi	48 laporan	24 laporan	50 persen	111.360.000	37.120.000	33.33%

	(Minilok)	Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						
15.4	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	389.934.000	60.896.709	15.62%
15.5	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 organisasi	3 organisasi	100 persen	200.000.000	50.653.750	25.33%
16.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20.4 persen	0 persen	0 persen	906.683.000	201.036.361	22.17%
16.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	6 laporan	100 persen	62.452.000	9.120.000	14.60%
16.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1026 orang	650 orang	63.35 persen	427.747.000	111.781.000	26.13%
16.3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	0 unit	100 persen	199.995.000	0	0%
16.4	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 laporan	0 laporan	0 persen	216.489.000	80.135.361	37.02%
IX	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Unmeet need KB**	**14 persen**	**11.52 persen**	**121.50 persen**	**1.992.978.000**	**281.707.576**	**14.14%**
17.	Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	100 persen	100 persen	1.992.978.000	281.707.576	14.14%
17.1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan	5 organisasi	3 organisasi	60 persen	506.178.000	69.607.576	13.75%

	dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						
17.2	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan	6 laporan	54.55 persen	708.000.000	0	0%
17.3	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat Pendampingan	11 laporan	6 laporan	54.55 persen	778.800.000	212.100.000	27.23%

II.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan kuat yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan semakin kritisnya pemikiran masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan, disamping adanya pengaruh globalisasi. Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah untuk selalu tanggap atas tuntutan masyarakat dan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang penanggulangan bencana, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada DINSOSP2KB Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja utama Rencana Stategis DINSOSP2KB Kota Pekalongan.

Sesuai Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, kegiatan urusan sosial dan pengendalian penduduk di Pemerintah Kota Pekalongan secara teknis ditangani oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Sosial dan Pengendalian Penduduk.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana;
b. Perumusan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana;

c. Perumusan pedoman pelaksanaan dan pengendalian di bidang sosial;
d. Perumusan pedoman pelaksanaan dan pengendalian di bidang rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial;
e. Perumusan pedoman pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;
g. Pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
h. Pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
i. Pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Isu Strategis berkaitan dengan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);
3. Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja atas evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dapat kami sajikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan namun demikian ada beberapa yang perlu menjadi catatan, yaitu :
    a. Pembangunan lanjutan kluaster anak sudah dalam proses tahap perencanaan
    b. Penyesuaian dalam subkegiatan Gaji dan Tunjangan dikarenakan terdapat PNS pension dan PPPK baru ditahun yang sama.

2. Program Pemberdayaan Sosial secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan namun demikian ada beberapa yang perlu menjadi catatan, yaitu :
    a. Pemberian Hibah ke Lembaga Karang Taruna sudah dalam agenda pemberian di semester II
    b. Pengadaan Mesin jahit sudah dalam proses pelimpahan pengadaan ke system *e-catalog*.
3. Program Rehabilitasi Sosial secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan namun demikian ada beberapa yang perlu menjadi catatan, yaitu :
    a. Penyesuian penerima bantuan sosial untuk Lansia, disabilitas, veteran dan pejuang 3 oktober telah melaksanakan verifikasi dan validasi sehinnga pelaksanaannya bisa dilaksanakan di semester II.
    b. Tidak ada kendala pada verifikasi dan validasi untuk penerima bansos barang kepada yayasan.
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan.
5. Program Penanganan Bencana secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan namun demikian ada beberapa yang perlu menjadi catatan, yaitu :
    a. Pelaksanaan pada subkegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan belum terlaksana dikarenakan penerima bantuan yang masih di verval oleh tim rehabsos.
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan namun demikian ada beberapa yang perlu menjadi catatan, yaitu :
    a. Pekerjaan fisik sudah selesai tahap perencanaan, dan pekerjaan akan dimulai pada bulan Juli.
7. Program Pengendalian Penduduk secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan.

8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan dan hanya penyesuaian pagu pada subkegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB untuk pekerjaan DAK Fisik.
9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program, kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan kebijakan pemerintah daerah.

Rencana kerja Perubahan tahun 2021 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan. Pada prinsipnya program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan tahun 2024 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan secara rinci kami sajikan sebagai berikut :

Tabel 2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan RENJA 2024

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator	Pagu Anggaran
			Target	Target
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100 persen**	**3.662.369.000**
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**100 persen**	
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	**100 persen**	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	21.606.000
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.552.000
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2.614.000
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	16.440.000
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2.583.658.000
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang/bulan	2.540.136.000
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	41.850.000
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.672.000
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000.000
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	5.000.000
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	277.508.000
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	7.500.000
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	78.657.000
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	5.625.000
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	76.726.000
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	7.500.000

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator	Pagu Anggaran
			Target	Target
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.500.000
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	99.000.000
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	351.026.000
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	2.400.000
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	162.561.000
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 laporan	186.065.000
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	423.571.000
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 unit	217.333.000
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	187.338.000
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 unit	18.900.000
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan**	**67 persen**	**440.708.000**
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen	182.395.000
1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Keluarga	182.395.000
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen	258.313.000
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	56.816.000
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 orang	132.747.000
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lembaga	68.750.000
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)**	**100 persen**	**2.087.927.000**

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator	Pagu Anggaran
			Target	Target
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 persen	1.244.173.000
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	415.635.000
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	828.538.000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.68 persen	843.754.000
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 orang	672.578.000
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	18 orang	29.378.000
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	37.036.000
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	51.551.000
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	145 orang	53.211.000
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial**	**55.12 persen**	**1.427.838.000**
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase graduasi KPM PKH	10 persen	1.427.838.000
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2000 orang	612.094.000
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	950 keluarga	815.744.000
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)**	**100 persen**	**448.352.000**
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen	448.352.000
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1550 orang	353.562.000
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok	1666 orang	77.000.000

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator	Pagu Anggaran
			Target	Target
		Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang	17.790.000
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan**	**100 persen**	**265.306.000**
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen	265.306.000
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen	200.000.000
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	65.306.000
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga**	**100 persen**	**254.523.000**
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen	254.523.000
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	61.403.000
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 laporan	145.120.000
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	8 dokumen	48.000.000
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Penurunan angka perkawinan di bawah 21 Tahun**	**7.60 persen**	**1.880.915.000**
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB SesuaiKearifan Budaya Lokal	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	8.73 perseribu	977.304.000
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 laporan	80.010.000
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 laporan	196.000.000
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	48 laporan	111.360.000
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	389.934.000
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	3 organisasi	200.000.000

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator	Pagu Anggaran
			Target	Target
		Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20.4 persen	903.611.000
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	62.452.000
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1026 orang	427.747.000
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	196.923.000
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 laporan	216.489.000
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Unmeet need KB**	**14 persen**	**1.992.978.000**
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	1.992.978.000
2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 organisasi	506.178.000
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan	708.000.000
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat Pendampingan	10 laporan	778.800.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program,kegiatan dan subkegiatan selama satu tahun dan pencapaiannya pada triwulan tahun anggaran 2024. Renja Perubahan ini disusun mengacu pada visi misi Walikota Pekalongan dan berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2121, Perubahan Ketiga Rencana Strategis (Renstra) DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024.

Terbatasnya alokasi anggaran serta proses penganggaran yang masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin harus mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna peningktan mutu pelayanan bidang sosial. Untuk pelaksanaan semua program,kegiatan dan subkegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

Semoga Renja Perubahan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Pekalongan sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Pekalongan

YOS ROSYIDI S.I.P., M.Si.
NIP. 19660516 198603 1 007

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DOKUMEN PERUBAHAN
RENJA
RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 7
1.3. Maksud dan Tujuan 9
1.4. Sistematika Penulisan 10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 11
2.1. Hasil Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024. 11
2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan 30
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 33
3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 33
3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024 34
BAB IV PENUTUP 52
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama) Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 13
Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II 2024 16
Tabel 2. 3 Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 17
Tabel 2. 4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2024 30
Tabel 2. 5 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 31
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan DLH 33
Tabel 3. 2 Rekap Perubahan Pagu Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 34
Tabel 3. 3 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 35

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, ditetapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan sasaran program urusan Lingkungan Hidup;
b. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang tata lingkungan dan penaatan hukum lingkungan;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengelolaan RTH;
f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
g. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kemampuan daya dukung kota dan daya dukung lingkungan alamiah semakin berkurang untuk meregenerasi berbagai permasalahan lingkungan perkotaan yang semakin komplek akibat aktivitas pembangunan yang menimbulkan pencemaran. Kota Pekalongan dengan letak geografis berbatasan langsung dengan laut, maka tidak bisa mengesampingkan isu lingkungan di wilayah pesisir. Terdapat juga isu pencemaran sungai-sungai yang melintas di Kota Pekalongan dan kurangnya ruang terbuka hijau serta tingginya timbulan sampah. Selain itu isu tentang pemanasan global merupakan fenomena seluruh negara yang krusial, karena kalau tidak segera ditangani akan menuju pada kerusakan lingkungan hidup secara menyeluruh.

Isu strategis tentang lingkungan hidup menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Masing-masing aspek tidak dapat dipisah-pisahkan karena akan saling mempengaruhi satu sama lain. Seluruh isu ini harus ditangani secara bersama oleh lembaga-lembaga yang berwenang dengan penekanan pada tanggungjawab sesuai tugas

pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing lembaga. Dengan kerjasama dan kemitraan yang kuat, maka diharapkan pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Pekalongan akan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai sasaran serta memberikan kontribusi positif.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Permasalahan

Setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap menjaga keberadaan suatu organisasi. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Tidak semua industri melakukan uji laboratorium terhadap kualitas air limbah yang dihasilkan secara rutin.
2. Masih banyaknya industri kecil dan menengah yang tidak mempunyai IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).
3. Sebagian besar industri kecil dan menengah membuang langsung air limbahnya ke saluran air atau sumber air.
4. Belum ditentukannya kelas air sungai.
5. Belum memiliki peralatan laboratorium yang memadai untuk uji kualitas udara.
6. Belum dilakukannya penetapan baku mutu kualitas udara emisi dan ambien.
7. Belum adanya pos pengaduan masyarakat yang mengakomodasi akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Selama ini pengaduan langsung ditujukan ke LH.
8. Masih minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
9. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
10. Belum optimalnya dukungan SDM.

B. Tantangan dan Peluang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya DLH kota Pekalongan menghadapi tantangan sebagai berikut:

1. Letak geografis dan topografi yang berada di daerah pesisir.
2. Ketersediaan sumber utama air menurun dengan sangat cepat, diakibatkan kurangnya pencarian sumber air tanah yang baru untuk Kota Pekalongan.
3. Meningkatnya polusi terhadap air permukaan dan air tanah.
4. Kualitas udara terus menurun.
5. Produksi limbah padat/sampah naik secara signifikan.

6. Kurangnya SDM yang berkompeten sesuai bidang dan tanggungjawab pekerjaan, serta personil teknis yang dapat menganalisa dan membuat perencanaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
7. Masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan.
8. Rendahnya kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Peluang yang dapat disiasati dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pekalongan antara lain:

1. Memperbaiki ketersediaan sistem pembuangan limbah.
2. Mengelola sumber daya air.
3. Mengurangi kepadatan lalu-lintas dan emisi kendaraan.
4. Libatkan sektor swasta dalam pengurangan efek gas rumah kaca.
5. Libatkan publik dan sektoir swasta dalam penngelolaan limbah padat/sampah.
6. Membersihkan polusi dari perusahaan-perusahaan yang ada.
7. Mengurangi kadar polusi perusahaan-perusahaan.
8. Mengoptimalkan peran pihak terkait atau stakeholder.
9. Mongoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan.
10. Meningkatkan kapasitas SDM.

C. Penentuan Isu-isu Stategis

Perumusan dan pengidetifikasian isu-isu yang tepat, cermat yang bersifat strategis sangat penting sekali karena merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu-isu strategis dimaksud adalah:

1. Pengendalian Pencemaran Air

   Kota Pekalongan merupakan dataran rendah dengan wilayah pantai, dan merupakan pula kota perdagangan dan industri yang didominasi oleh industri produk tekstil dan batik yang cukup dikenal baik dalam lingkup nasional maupun global, disamping ada pula industri dibidang perikanan dan industri lainnya yang berpotensi menimbulkan pencemaran baik air, tanah maupun udara. Berkaitan dengan permasalahan limbah industri berbagai upaya perbaikan telah dilakukan baik melalui sosialisasi masyarakat terutama kalangan industri dan UKM, fasilitasi pembangunan IPAL skala kecil ataupun IPAL bersama, namun belum dapat

menyelesaiakan permasalahan yang ada, mengingat sumber pencemar tidak hanya berasal dari wilayah Kota Pekalongan saja, mengingat Kota Pekalongan merupakan wilayah hilir maka sumber pencemarannya pun berasal dari daerah di luar Kota Pekalongan, yang juga banyak menghasilkan limbah industri.

2. Pengendalian Pencemaran Udara

   Kota Pekalongan merupakan daerah yang berada disisi sebelah utara Pulau Jawa yang dilalui oleh jalur transportasi utama di Pulau Jawa. Jumlah kendaraan berat yang melintasi Kota Pekalongan sangat banyak yang berdampak pada tingginya jumlah emisi gas buang di Kota Pekalongan yang menyebabkan pencemaran udara. Selain berasal dari sumber emisi bergerak, pencemaran udara berasal dari emisi tidak bergerak, yaitu industri yang menggunakan bahan bakar batu bara, bensin maupun solar dan sejenisnya yang menghasilkan gas buang melalui cerobong yang menyebabkan pencemaran udara sehingga kualitas udara menurun. Permasalahan pencemaran udara juga muncul, sehingga kualitas udarapun semakin menurun akibat semakin banyak dihasilkannnya emisi gas buang baik dari transportasi ataupun asap industri.

3. Pengelolaan Sampah/Limbah Padat

   Isu persampahan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus, karena pada dasarnya setiap hari semua orang menghasilkan sampah, sehingga volume sampah semakin lama akan semakin bertambah. Dalam jangka panjang apabila tidak dilakukan pengelolaan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang diharuskan akan menjadi permasalahan lingkungan yang sangat mengkhawatirkan, apabila untuk kawasan perkotaan dengan luas lahan yang relatif terbatas, sebagaimana telah terjadi di berbagai daerah. Untuk itu isu/permasalahan persampahan di masyarakat ini perlu mendapatkan perhatian dan penerapan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan sehinga secara bertahap volume sampah dapat dikurangi dan tidak terus meningkat.

   TPA Degayu yang saat ini menjadi satu satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Pekalongan masih menggunakan open dumping, disamping itu tumpukan sampah di TPA Degayu volumenya semakin banyak sehingga sudah mendekati kapasitas maksimal, sedangkan untuk penambahan lahan TPA sudah tidak memungkinkan karena daerah tersebut peruntukannya bukan untuk TPA.

4. Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Pemanasan Global (Global Warming)

   Isu pemanasan global yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan dan ekosistem bumi akibat efek gas rumah kaca, rusaknya lapisan ozon akibat banyaknya emisi gas buang yang dihasilkan kegiatan manusia dampaknya akan sangat mengerikan, secara makro yang dapat memacu terjadinya perubahan iklim, mencairnya es di kutub utara dan selatan, serta

kerusakan bumi lainnya. Untuk itu isu pemanasan global ini harus menjadi perhatian semua kalangan serta perlu dilakukannya tindakan-tidakan pencegahan, pemulihan kondisi lingkungan guna meminimalisir terjadinya dampak pemanasan global tersebut.

5. Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau dan Perubahan Penggunaan Lahan

   Ruang terbuka hijau memiliki peranan yang cukup penting untuk mengurangi pencemaran udara di Kota Pekalongan, sekaligus meningkatkan kesejukan dan kerapian kota. Sebagaimana kita ketahui, keberadaan ruang terbuka hijau kota telah menjadi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu besar ruang terbuka hijau tersebut minimal 30% dari luas kota. Sementara ini luas ruang terbuka hijau di Kota Pekalongan adalah sebesar 108,53 ha. Perbandingan luas ruang terbuka hijau dibanding luas wilayah Kota Pekalongan adalah 108,53 ha : 3.742 ha (luas wilayah Kota Pekalongan dikurangi sawah, tambak dan badan air) atau sebesar 2,900%. Persentase tersebut masih jauh dari luas RTH yang dipersyaratkan dalam UU No. 26 Tahun 2007. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan harus berupaya untuk menambah luasan RTH yang ada. Terutamanya penambahan ruang-ruang hijau untuk publik yang dirasa masih kurang seperti taman kota, taman lingkungan baik di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW dan sebagainya.

   Perubahan penggunaan lahan juga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena berubahnya fungsi lahan, misalnya dari semula lahan pertanian menjadi lahan perumahan atau lahan industri, sehingga mengakibatkan kurangnya daerah resapan air yang dampaknya ketika hujan terjadi banjir.

6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan.

   Kita ketahui bersama bahwa saat ini, tingkat kesadaran masyarakat tentang kepedulian terhadap lingkungan masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan, sebagai contoh membuang sampah/limbah sembarangan, melakukan penebangan tanaman/hutan tanpa berusaha melakukan penanaman kembali, kurang perhatian terhadap gerakan penghijauan, kurang menyadari bahwa bumi ini nantinya perlu dijaga dan dilestarikan untuk kepentingan geerasi selanjutnya. Kurangnya kesadaran masyarakat tersebut salah satu sebabnya antara lain belum tersosialisasikannya secara optimal peraturan-peraturantentang lingkungan hidup serta masih lemahnya penegakan peraturan tentang lingkungan hidup.

7. Adaptasi dan Mitigasi Rob.

   Rob merupakan permasalahan yang sangat sulit diatasi, disamping disebabkan oleh penurunan permukaan tanah juga disebabkan oleh

meningkatnya permukaan air laut yang disebabkan oleh Global Warming *(Pemanasan Global)*.

Penurunan permukaan tanah salah satunya disebabkan oleh banyaknya pengambilan air bawah tanah untuk kebutuhan hidup dan untuk industri yang tidak terkendali. *Global Warming* (Pemanasan Global) merupakan fenomena alam yang terjadi secara global di bergabagi belahan dunia. Hal ini disebabkan karena tingginya Gas Rumah Kaca (GRK) yang berasal dari pembakaran fosil.

Kawasan yang terkena dampak rob saat ini semakin meluas, hal ini menyebabkan kerentanan masyarakat terhadap penyakit semakin tinggi. Semua kelurahan yang berada didaerah pesisir Kota Pekalongan diantaranya Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Degayu, Panjang Wetan, Pasirkratonkramat, Krapyak, Klego dan Pabean terkena dampak rob.

8. Kerusakan biomasa

   Tingginya jumlah pupuk kimia yang digunakan untuk pertanian saat ini menjadi kendala disemua daerah termasuk Kota Pekalongan. Pupuk kimia yang digunakan secara terus menerus akan menghasilkan panen yang maksimal akan tetapi lama kelamaan akan menyebabkan ketergantungan terhadap pupuk kimia yang menyebabkan tanah tersebut akan mengalami kerusakan. Selain dari pupuk kimia, kerusakan biomasa juga diakibatkan oleh tingginya pencemaran air industri sehingga biomasa menjadi kurang berfungsi dengan maksimal.

9. Konservasi Sumber Daya Air (SDA)

   Kota Pekalongan merupakan kota jasa yang memiliki banyak sekali industri kecil yang berpotensi mencemari lingkungan. Dampaknya adalah berkurangnya ketersediaan air bersih dari sumur dangkal di wilayah tersebut. Didaerah pantai sumur dangkal sudah tercemar karena adanya intrusi air laut sehingga rasa air sumur menjadi asin. Salah satu upaya untuk mendapatkan air bersih tersebut adalah dengan membuat sumur dalam / sumur artesis atau dengan mengambil air dari Kabupaten Batang maupun Kabupaten Pekalongan. Perlu adanya konservasi sumber daya air agar jumlah air bersih di Kota Pekalongan terjaga.

10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan.

    Kota Pekalongan memiliki daerah yang wilayahnya secara ekonomis sangat menguntungkan, tetapi dilihat dari dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat merugikan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya sarana dan prasarana pendukung agar dampak lingkungan yang ditimbulkan dapat tertangani dengan baik. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan diantaranya adalah sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air, udara, persampahan, limbah B3, rob dan lain lain.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan PD sebagai penjabaran dari perubahan RKPD. Dokumen Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 22 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2024 sebagaimana Perubahan RKPD Kota Pekalongan tahun 2024, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai triwulan II tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi:

a. Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
d. Pergeseran anggaran, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);

13. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 22 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah:

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah:

1. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidaksesuaian yang terjadi setelah dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024;
2. Mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah tahun 2024;
3. Memberikan pedoman perubahan indikator kinerja kegiatan yang meliputi perubahan keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan dan pagu indikatif kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 ini adalah:

1. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Untuk menyikapi berbagai dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan ataupun berbagai perubahan kebijakan dari Provinsi dan Pemerintah Pusat;
3. Untuk menjaga konsistensi rencana pembangunan daerah dengan anggaran pembangunan daerah yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024;
4. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi; dan
5. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Menguraikan analisis gambaran pelayanan, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II : Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan II tahun 2024.

2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan

Memuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan pengendalian pelaksanaanya.

Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan rencana pendanaan Dinas Lingkungan Hidup

Bab IV : Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan angaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Hasil Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.

Untuk memantapkan perubahan rencana kerja tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024. Pada pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 secara umum Dinas Lingkungan Hidup telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi.

Tujuan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Dinas Lingkungan Hidup disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan Kota Pekalongan. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam capaian kinerja strategis Dinas Lingkungan Hidup.

Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2024 memuat 10 (sepuluh) program dan 16 (enam belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 31.940.108.000,-. Setelah melalui beberapa tahapan proses perencanaan dan pembahasan oleh TAPD, dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2024

anggaran berubah menjadi sebesar Rp. 32.591.270.000,-. dengan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan sama dengan penetapan APBD.

Realisasi Target Kinerja (sasaran strategis, program, kegiatan dan anggaran) Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 berserta analisisnya, tersaji dalam tabel 2.1, tabel 2.2 dan tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Capaian Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama) Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Tipe Perhitungan	Target		Triwulan I			Triwulan II		
			Renstra	PK	Realisasi	(%)	Analisis	Realisasi	(%)	Analisis
Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Akumulasi	70,68%	70,68%	22,96%	32,48	**Analisis** Jumlah sampah terkelola sampai akhir bulan Maret sebesar 13.722.816 kg,Timbulan sampah: 59.767.925 kg **Hambatan/permasalahan** - Perhitungan sampah kurang akurat karena hanya di penimbangan TPA - Belum ada kontrol jumlah sampah di tangani di TPS3R - Keterbatasan TPA **Rencana tindak lanjut** - Percepatan revitalisasi TPA - Optimalisasi cakupan pelayanan	23,65%	65,95	**Analisis** Jumlah sampah terkelola sampai akhir bulan Juni sebesar 14.136.029 kg dari timbulan sampah Timbulan sampah: 59.767.925kg **Hambatan/permasalahan** - Perhitungan sampah kurang akurat karena hanya di penimbangan TPA - Belum ada kontrol jumlah sampah di tangani di TPS3R - Keterbatasan TPA **Rencana tindak lanjut** - Percepatan revitalisasi TPA - Optimalisasi cakupan pelayanan
Meningkatnya Tertib Hukum Lingkungan Hidup	Tertib hukum lingkungan	Akumulasi	43,00 %	43,00 %	16,88 %	39,26	**Analisis** Jumlah usaha dan atau kegiatan yang melaporkan pelaksanaan AMDAL atau UKL/UPL sampai akhir bulan Maret sebanyak 26 dari target 154 usaha kegiatan **Hambatan/permasalahan**	1,95%	43,79	**Analisis** Jumlah usaha dan atau kegiatan yang melaporkan pelaksanaan AMDAL atau UKL/UPL sampai akhir bulan Juni sebanyak 2 dari target 154 usaha kegiatan **Hambatan/permasalahan**

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Tipe Perhitungan	Target		Triwulan I			Triwulan II		
			Renstra	PK	Realisasi	(%)	Analisis	Realisasi	(%)	Analisis
							Tidak semua usaha/ kegiatan pro aktif untuk melaporkan pelaksanaan AMDAL atau UKL/UPL **Rencana tindak lanjut** - Mengalakkan sosialisasi kepada pelaku usaha/ kegiatan - Memperbanyak kegiatan pengawasan			Tidak semua usaha/ kegiatan pro aktif untuk melaporkan pelaksanaan AMDAL atau UKL/UPL **Rencana tindak lanjut** - Mengalakkan sosialisasi kepada pelaku usaha/ kegiatan - Memperbanyak kegiatan pengawasan
Meningkatnya Usaha Yang Terolah Limbahnya	Persentase Tingkat Pencemaran Air	Data terakhir	60,00%	60,00%	14,29%	23,82	**Analisis** Ada 5 parameter yang tidak sesuai baku mutu (DO, BOD, COD, TSS, TDS) **Hambatan/permasalahan** - Usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah meningkat namun tidak diiringi dengan penambahan pembangunan dan pengelolaan IPAL baik secara mandiri maupun komunal - Saat ini Sungai Loji difungsikan sebagai long storage dengan adanya Pembangunan bendung gerak dalam proyek pengendalian banjir dan rob, sehingga	14,29%	420	**Analisis** Parameter yang tidak sesuai baku mutu pada 5 sungai = 3 parameter x 5 sungai = 15 Jumlah parameter air pada 5 sungai = 5 parameter **Hambatan/permasalahan** - Usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah meningkat namun tidak diiringi dengan penambahan pembangunan dan pengelolaan IPAL baik secara mandiri maupun komunal - Saat ini Sungai Loji difungsikan sebagai long storage dengan adanya Pembangunan bendung gerak dalam proyek

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Tipe Perhitungan	Target		Triwulan I			Triwulan II		
			Renstra	PK	Realisasi	(%)	Analisis	Realisasi	(%)	Analisis
							menambah beban pencemaran di badan sungai **Rencana tindak lanjut** - Pembangunan IPAL Komunal Jenggot II di Kelurahan Jenggot - Pembangunan IPAL Komunal per Kecamatan untuk mengolah limbah UKM			pengendalian banjir dan rob, sehingga menambah beban pencemaran di badan sungai **Rencana tindak lanjut** - Pembangunan IPAL Komunal Jenggot II di Kelurahan Jenggot - Pembangunan IPAL Komunal per Kecamatan untuk mengolah limbah UKM
Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Kenaikan Luasan RTH	Data terakhir	0,343	0,343	0	0	**Analisis** belum ada penambahan luasan RTH karena kegatan pembuatan taman kota belum dilaksanakan **Hambatan/permasalahan** – **Rencana tindak lanjut** –	0	0	**Analisis** Luas RTH N = 0 Ha Luas RTH N-1 = 145,2623 Ha Beluma da penambahan RTH di TW II ini. **Hambatan/permasalahan** – **Rencana tindak lanjut**
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Data terakhir	88	88	0	0	**Analisis** Menunggu rilis nilai dari Inspektorat Kota Pekalongan di TW. IV **Hambatan/permasalahan** – **Rencana tindak lanjut** –	0	0	**Analisis** Menunggu rilis nilai dari Inspektorat Kota Pekalongan di TW. IV **Hambatan/permasalahan** – **Rencana tindak lanjut** –

Tabel 2. 2
Capaian Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II 2024

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Per Triwulan		Realisasi Capaian s.d TW. II	Status Capaian target	Jenis Indikator
				I	II			
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	100,00	29,45	11,67	41,12	Akan tercapai di TW IV	Indikator Program
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	19,46	14,80	34,26	Akan tercapai di TW IV	Indikator Program
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	%	100,00	67,77	17,08	84,85	Akan tercapai di TW IV	Indikator Program
4	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	0,00	0	0	0	Tahun 2024 tidak ada penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Indikator Program
5	Persentase limbah yang diolah	%	45,02	27,06	27,06	54,11	Akan tercapai di TW IV	Indikator Program
6	Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	2,93	3,13	3,13	3,13	Luas RTH tahun N = 145,2623 Luas wilayah Kota Pekalongan sesuai RTRW = 4642 Ha	Indikator Program
7	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	%	13,33	4,44	2,22	6,67	Akan tercapai di TW IV	Indikator Program
8	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	%	16,67	4,33	0,67	5,00	Akan tercapai di TW IV	Indikator Program
9	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	%	50,00	20	80	100,00	Akan tercapai di TW IV	Indikator Program
10	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	%	75,00	25,00	0,00	25,00	Akan tercapai di TW IV	Indikator Program
11	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Indikator Program
12	Persentase pengelolaan sampah	%	0,29	0	0	0	Akan tercapai di TW IV	Indikator Program

Tabel 2. 3
Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	
			APBD			I		II		Kinerja (%)	Rp (%)
			Kinerja	Satuan	Anggaran	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup				32.113.668.000		5.651.152.871		15.081.693.588		46,96
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	persen	14.672.021.000	29,45	2.890.255.082	11,67	8.246.441.773	41,12	56,21
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	persen	15.960.000	8,89	2.889.000	15,56	8.109.000	15,56	50,81
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun	2	dokumen	2.320.000	0	600.000	0	2.020.000	0,00	87,07
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2	dokumen	1.640.000	0	600.000	0	600.000	0,00	36,59
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	15	laporan	12.000.000	4	1.689.000	3	5.489.000	46,67	45,74
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian	100	Persen	10.329.603.000	50,00	1.962.756.247	16,67	5.841.719.043	66,67	56,55

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	
			APBD			I		II		Kinerja (%)	Rp (%)
			Kinerja	Satuan	Anggaran	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
		administrasi keuangan perangkat daerah									
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	116	Orang/bulan	10.216.515.000	101	1.941.092.041	101	5.798.312.033	87,07	56,75
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	dokumen	111.568.000	3	21.664.206	3	42.787.010	50,00	38,35
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	laporan	1.520.000	1	0	0	620.000	100,00	40,79
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	910.574.000	19,46	291.415.867	14,80	415.517.570	34,26	45,63
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	Persen	16.880.000	0	0	0	11.286.000	0,00	66,86
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	paket	16.880.000	0	0	0	11.286.000	0,00	66,86

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	
			APBD			I		II		Kinerja (%)	Rp (%)
			Kinerja	Satuan	Anggaran	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	327.105.000	33,38	29.663.250	19,40	136.250.079	52,78	41,65
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	paket	4.275.000	1	485.000	1	2.033.500	50,00	47,57
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	paket	53.380.000	1	1.350.000	1	9.434.100	50,00	17,67
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4	paket	750.000	1	0	1	743.000	50,00	99,07
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4	paket	131.700.000	1	13.957.750	1	49.970.500	50,00	37,94
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	paket	24.500.000	1	4.587.500	0	19.582.500	50,00	79,93
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2	dokumen	2.500.000	1	510.000	0	1.430.000	50,00	57,20
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	95	laporan	110.000.000	32	8.773.000	34	53.056.479	69,47	48,23
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa	100	Persen	566.589.000	25	132.269.931.	25	267.981.491	50,00	47,30

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	
			APBD			I		II		Kinerja (%)	Rp (%)
			Kinerja	Satuan	Anggaran	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	laporan	2.400.000	1	90.000	1	690.000	50,00	28,75
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	laporan	267.960.000	3	60.735.761	3	120.474.651	50,00	44,96
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor	12	laporan	296.229.000	3	71.444.170	3	146.816.840	50,00	49,56
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	3.415.884.000	67,77	762.676.654	17,08	1.981.096.160	84,85	58,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	3.415.884.000	67,77	762.676.654	17,08	1.981.096.160	84,85	58,00
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	43	unit	25.000.000	23	4.027.500	8	8.027.500	72,09	32,11

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	
			APBD			I		II		Kinerja (%)	Rp (%)
			Kinerja	Satuan	Anggaran	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	19	unit	208.787.000	9	21.191.500	5	61.135.500	73,68	29,287
2.11.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	47	unit	3.070.077.000	33	714.484.500	11	1.863.959.070	93,62	60,71
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	112.020.000	1	22.973.154	0	47.974.090	100,00	42,83
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	0	Persen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan dokumen KLHS untuk perencanaan	0	dokumen	0		0		0	0,00	0,00
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RDTR Kabupaten/Kota yang Disusun	1	dokumen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	1	dokumen		0	0	0		0,00	
		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	dokumen		0	0	0		0,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	
			APBD			I		II		Kinerja (%)	Rp (%)
			Kinerja	Satuan	Anggaran	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
		Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1	dokumen		0	0	0		0,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase limbah yang diolah	45,02	Persen	1.697.441.000	27,06	210.134.460	27,06	432.974.796	120,20	25,51
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya	51,09	Persen	863.902.000	31,90	154.790.888	31,90	328.081.676	62,45	37,98
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	1	dokumen	567.126.000	0	119.106.970	0	223.230.450	0,00	39,36
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1	dokumen	18.750.000	0	0	0	800.000	0,00	4,27
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	dokumen	278.026.000	0	35.683.918	0	104.051.226	0,00	37,42

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	
			APBD			I		II		Kinerja (%)	Rp (%)
			Kinerja	Satuan	Anggaran	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase upaya penanggulangan pencemaran air	76,47	Persen	833.539.000	0	55.343.572	20	104.893.120	26,15	12,58
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Masyarakat di kab/kota yang dilaksanakan	3	laporan	104.368.000	0	0	1	1.707.000	33,33	1,64
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	73	titik	729.171.000	0	55.343.572	0	103.186.120	0,00	14,15
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,93	Persen	4.680.999.000	3,13	634.329.131	3,13	1.471.997.106	106,84	31,45
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik	109,61	Ha	4.680.999.000	0	634.329.131	0	1.471.997.106	109,94	31,45
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	108,00	Ha	3.772.619.000	109,94	465.586.839	0	1.131.494.786	101,80	29,99
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman kehati lainnya yang dikelola lingkung kewenangan kab/kota	34	unit	908.380.000	7	168.742.292	7	340.502.320	20,59	37,48

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	
			APBD			I		II		Kinerja (%)	Rp (%)
			Kinerja	Satuan	Anggaran	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33	Persen	2.271.000	4,44	0	2,22	240.000	50,01	10,57
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3	6	persen	2.271.000	0,33	0	0,17	240.000	8,33	10,57
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	1	laporan	2.271.000	0	0	0	240.000	0,00	10,57
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67	Persen	40.500.000	4,33	638.000	0,67	12.321.000	29,99	30,42

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	
			APBD			I		II		Kinerja (%)	Rp (%)
			Kinerja	Satuan	Anggaran	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan	10	Kegiatan	40.500.000	0,30	638.000	3	12.321.000	33,00	30,42
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	1	dokumen	14.250.000	0	0	0	1.800.000	0,00	12,63
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	67	Badan usaha	26.250.000	5	638.000	23	10.521.000	41,79	40,08
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50	Persen	268.393.000	20	53.200.000	80	51.535.000	200,00	19,20

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	
			APBD			I		II		Kinerja (%)	Rp (%)
			Kinerja	Satuan	Anggaran	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/komunitas peduli LH yang mendapat edukasi lingkungan hidup	100	Persen	268.393.000	0	53.200.000	50	51.535.000	50,00	19,20
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Pendidikan formal/Lembaga Masyarakat/komunitas/kelompok Masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	9	Lembaga	72.000.000	1	10.275.000	4	6.310.000	55,56	8,76
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	1	dokumen	52.500.000	0	37.465.000	0	38.030.000	0,00	72,44
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	700	orang	143.893.000	70	5.460.000	630	7.195.000	100,00	5,00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	75	Persen	63.750.000	25	0	0	6.024.000	33,33	9,45
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	3	penghargaan	63.750.000	0	0	1	6.024.000	33,33	9,45

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	
			APBD			I		II		Kinerja (%)	Rp (%)
			Kinerja	Satuan	Anggaran	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia Pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	4	entitas	63.750.000	1	0	1	6.024.000	50,00	9,45
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100	Persen	14.625.000	100	918.000	100	1.398.000	100,00	9,45
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	6	kasus	14.625.000	0,33	918.000	1	1.398.000	22,22	9,56
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemarang dan perusakan lingkungan hidup Tingkat kab/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	18	pengadua n	12.750.000	2	508.000	8	838.000	55,56	6,57
	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah penerapan sanksi administrative yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kab/kota	1	Perkara	1.875.000	1	410.000	0	560.000	100,00	29,87

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	
			APBD			I		II		Kinerja (%)	Rp (%)
			Kinerja	Satuan	Anggaran	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	0,29	Persen	10.673.668.000	0	1.914.878.198	0	4.858.761.913	0,00	45,52
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	17,69	Persen	10.673.668.000	19,38	1.914.878.198	17,61	4.858.761.913	104,47	45,52
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kab/kota atau TPA/TPST regional	56.324.807	ton	7.862.107.000	14.136.029	1.613.548.614	14.136.029	3.400.864.273	49,46	43,26
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, kelompok Masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	35	kelompok	639.245.000	8	52.089.584	11	185.428.140	54,29	29,01

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Proram (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan (tahun n) yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	
			APBD			I		II		Kinerja (%)	Rp (%)
			Kinerja	Satuan	Anggaran	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana Bersama Pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kab/kota untuk pengelolaan sampah kab/kota pengeloilaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada jakstrada	1	dokumen	2.172.316.000	0	249.240.000	0	1.272.469.500	0,00	58,58

2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan

Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada DLH Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja utama Rencana Stategis DLH Kota Pekalongan. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Kinerja pelayanan DLH Kota Pekalongan dapat dilihat pada capaian pelaksanaan tugas pokoknya yaitu memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang bidang tata lingkungan dan penaatan hukum lingkungan, bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengelolaan RTH, serta bidang kebersihan dan pengelolaan sampah. Pada tahun 2024 sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya usaha yang terolah limbahnya dengan 1 (satu) indikator;
2. Meningkatnya ruang terbuka hijau dengan 1 (satu) indikator;
3. Optimalnya cakupan layanan persampahan dengan 1 (satu) indikator;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan 1 (satu) indikator; dan
5. Meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup dengan 1 (satu) indikator.

Tabel 2. 4
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Meningkatnya usaha yang terolah limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	$= \frac{\sum \text{Parameter yang tidak sesuai baku mutu pada 5 sungai}}{\sum \text{Parameter air pada 5 sungai (7 x 5)}} \times 100\ \%$
2	Meningkatkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase kenaikan luasan RTH	$= \frac{\text{Luas RTH tahun N - Luas RTH tahun N-1}}{\text{Luas RTH tahun N-1}} \times 100\ \%$
3	Optimalnya cakupan layanan persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	$= \frac{\sum \text{sampah terkelola tahun N} - \sum \text{sampah terkelola tahun N-1}}{\sum \text{sampah terkelola tahun N-1}} \times 100\ \%$
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD Tahun N

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
5	Meningkatnya penataan dan ketaatan hukum lingkungan	Tertib hukum lingkungan	∑ usaha dan/atau kegiatan yang melaporkan pelaksanaan AMDAL/UKL/UPL = ---------- x 100 % ∑ usaha dan/atau kegiatan yang memiliki AMDAL/UKL/UPL

Penilaian capaian kinerja utama DLH Kota Pekalongan tahun 2023 difokuskan pada 10 (sepuluh) program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlinduangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
10. Program Pengelolaan Persampahan.

Tabel 2. 5
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran Stretegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya usaha yang terolah limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	60%	14,29%	420
2	Meningkatkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase kenaikan luasan RTH	0,343%	0%	0
3	Optimalnya cakupan layanan persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	70,68%	46,61%	65,95
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	88	0	0
5	Meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup	Tertib hukum lingkungan	43,00%	18,83%	43,79

Hasil analisis berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel diatas adalah sebagai berikut:

a. Capaian kinerja yang masih proses dalam pencapaian target ditunjukkan pada indikator persentase tingkat pencemaran air dengan capaian kinerja 420%,

indikator persentase peningkatan pengelolaan sampah dengan capaian kinerja 65,95% dan indikator tertib hukum lingkungan dengan capaian kinerja 43,79%.

b. Capaian kinerja yang yang masih 0% ada pada indikator persentase kenaikan luasan RTH dan nilai SAKIP OPD karena penilaian dilakukan di akhir tahun atau triwulan IV.
c. Hambatan dan rencana tindak lanjut dalam pencapaian sasaran strategis (Indikator Kinerja Utama) telah tercantum pada tabel 2.1

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pada bab ini memuat tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Tahun 2024 ini akan dijelaskan perubahan target kinerja dan perubahan pagu RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 berdasarkan perubahan kebijakan sebagaimana dijelaskan dalam Bab I. Pada perubahan ini akan dimuat tentang kegiatan yang mengalami penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif, kegiatan yang mengalami penghapusan, serta kegiatan dengan pagu indikatif tetap.

3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Secara ringkas dibandingkan dengan APBD 2024, dari total sub kegiatan sebanyak 40 sub kegiatan, terdapat 2 sub kegiatan (5%) dengan anggaran tetap, 16 sub kegiatan (40%) dengan anggaran bertambah, 22 sub kegiatan (55%) dengan anggaran berkurang. Adapun pola perubahan kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut ini :

Tabel 3. 1
Rekapitulasi Perubahan Kegiatan DLH

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA					
		TETAP	BER-TAMBAH	BER-KURANG	KEG BARU	KEG DI-HAPUS	JML
1.	DLH	2	16	22	0	1	40

Sumber : Data dielaborasi

Dari tabel diatas dapat diketahui Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan paling banyak adalah pengurangan anggaran, hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan refocussing anggaran karena penetapan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun anggaran sebelumnya terlalu tinggi dengan realisasi yang lebih rendah dan menurunnya DAU dari pusat sehingga harus mengurangi anggaran tahun berjalan.

3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024

Perubahan asumsi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan **menyebabkan** perubahan pagu kegiatan dan target kinerja pada setiap Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan pagu indikatif pada Dinas Lingkungan Hidup ditunjukkan dalam tabel 3.2. Adapun perubahan target kinerja per urusan yang diikuti penyesuaian pagu indikatif ditunjukkan dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Rekap Perubahan Pagu Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD PENETAPAN	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4
1	DLH	31.940.108.000	32.113.668.000	32.591.270.000	651.162.000

Sumber : Data Bappeda

Tabel 3. 3
Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
										Target 2024		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**31.940.108.000**	**33.729.875.000**	**32.591.270.000**
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen		persen	100 persen	100 persen	**14.479.021.000**	**14.479.021.000**	**15.700.271.000**
2	**11**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**15.960.000**	**15.960.000**	**15.960.000**
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan perangkat daerah				2 dokumen	2 dokumen	2.320.000	2.320.000	2.320.000
2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD				2 dokumen	2 dokumen	1.640.000	1.640.000	1.640.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
										Target 2024		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
												12.000.000	12.000.000	
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 laporan	15 laporan			12.000.000
2	**11**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**10.321.603.000**	**10.321.603.000**	**10.275.130.000**
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				116 orang/bulan	116 orang/bulan	10.208.515.000	10.208.515.000	10.162.042.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
										Target 2024		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				12 dokumen	12 dokumen	111.568.000	111.568.000	111.568.000
2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.520.000	1.520.000	1.520.000
2	**11**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**16.880.000**	**16.880.000**	**23.417.000**
2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan				1 paket	1 paket	16.880.000	16.880.000	23.417.000
2	**11**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**327.105.000**	**327.105.000**	**394.205.000**
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				4 paket	4 paket	4.275.000	4.275.000	4.275.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
										Target 2024		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				4 paket	4 paket	53.380.000	53.380.000	75.820.000
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan				4 paket	4 paket	750.000	750.000	750.000
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan				4 paket	4 paket	115.700.000	115.700.000	131.700.000
2	11	01	2.01	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				2 paket	2 paket	24.500.000	24.500.000	32.000.000
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.560.000
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				95 laporan	95 laporan	110.000.000	110.000.000	147.100.000
2	**11**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**566.589.000**	**566.589.000**	**566.589.000**
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				4 laporan	4 laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
										Target 2024		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
2	11	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan				12 laporan	12 laporan	267.960.000	267.960.000	267.960.000
2	11	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				12 laporan	12 laporan	296.229.000	296.229.000	296.229.000
2	**11**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**4.424.970.000**	**4.424.970.000**	**4.424.970.000**
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				19 unit	19 unit	173.151.000	173.151.000	173.151.000
2	11	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yangd dipelihara dan dibayarkan perizinannya				47 unit	47 unit	4.114.799.000	4.114.799.000	4.114.799.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
										Target 2024		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 unit	1 unit	112.020.000	112.020.000	112.020.000
2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				43 unit	43 unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen		persen		20 persen	**0**	**0**	**0**
2	**11**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Jumlah penyusunan dokumen KLHS untuk perencanaan	dokumen		dokumen		0 dokumen	**0**	**0**	**0**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
										Target 2024		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RDTR Kabupaten/Kota yang tervalidasi Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun Jumlah Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten/Kota yang Disusun Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang terverifikasi				0	0	0	0	0
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase limbah yang diolah	persen		persen	40,95 persen	40,95 persen	**1.716.881.000**	**1.716.881.000**	**1.363.066.000**
2	**11**	**03**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya	persen		persen	51,09 persen	51,09 persen	**883.342.000**	**883.342.000**	**906.527.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
										Target 2024		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut				1 dokumen	1 dokumen	567.126.000	567.126.000	572.126.000
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan				1 dokumen	1 dokumen	18.750.000	18.750.000	35.110.000
2	11	03	2.01	0003	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 dokumen	1 dokumen	297.466.000	297.466.000	299.291.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
										Target 2024		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
2	**11**	**03**	2.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase upaya penanggulangan pencemaran air	persen		persen	76.47 persen	76.47 persen	**833.539.000**	**833.539.000**	**456.539.000**
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				3 laporan	3 laporan	104.368.000	104.368.000	104.368.000
2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				73 titik	73 titik	729.171.000	729.171.000	352.171.000
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase Ruang Terbuka Hijau	persen		persen	2,919 persen	2,919 persen	4.680.999.000	**4.680.999.000**	**4.248.163.000**
2	**11**	**04**	2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Luas RTH Publik	Ha		Ha	109,61 Ha	109,61 Ha	**4.103.826.000**	**4.103.826.000**	**4.248.163.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
										Target 2024		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				108,00 Ha	108,00 Ha	3.772.619.000	3.772.619.000	3.339.783.000
2	11	04	2.01	0005	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				34 unit	34 unit	908.380.000	908.380.000	908.380.000
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	persen		persen	13,33 persen	13,33 persen	2.271.000	**2.271.000**	**2.271.000**
2	**11**	**05**	2.01		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3	persen		persen	6 persen	6 persen	**2.271.000**	**2.271.000**	**2.271.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
										Target 2024		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 laporan	1 laporan	2.271.000	2.271.000	2.271.000
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	persen		persen	16,67 persen	16,67 persen	**40.500.000**	**40.500.000**	**39.713.000**
2	**11**	**06**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	**40.500.000**	**40.500.000**	**39.713.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
										Target 2024		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 dokumen	1 dokumen	14.250.000	14.250.000	14.250.000
2	11	06	2.01	0003	Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				67 badan usaha	67 badan usaha	26.250.000	26.250.000	25.463.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
										Target 2024		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
2	**11**	**08**	2.01		**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	persen		persen	50,00 persen	50,00 persen	**268.393.000**	**268.393.000**	**254.393.000**
2	**11**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	Komunitas		komunitas	5 komunitas	5 komunitas	**268.393.000**	**268.393.000**	**254.393.000**
2	11	08	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				9 lembaga	9 lembaga	72.000.000	72.000.000	58.000.000
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 dokumen	1 dokumen	52.500.000	52.500.000	52.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
										Target 2024		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				700 orang	700 orang	143.893.000	143.893.000	143.893.000
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	persen		persen	75 persen	75 persen	**63.750.000**	**63.750.000**	**60.750.000**
2	**11**	**09**	2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	penghargaan		penghargaan	3 penghargaan	3 penghargaan	**63.750.000**	**63.750.000**	**60.750.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
										Target 2024		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				4 entitas	4 entitas	63.750.000	63.750.000	60.750.000
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	100 persen	**14.625.000**	**14.625.000**	**13.875.000**
2	**11**	**10**	2.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	kasus		kasus	6 kasus	6 kasus	**14.625.000**	**14.625.000**	**13.875.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
										Target 2024		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tk kab/kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				18 pengaduan	18 pengaduan	12.750.000	12.750.000	12.000.000
2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 perkara	1 perkara	1.875.000	1.875.000	1.875.000
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengelolaan sampah	persen		persen	0,28 persen	0,28 persen	**10.673.668.000**	**10.673.668.000**	**10.908.768.000**
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**	Persentase pengurangan sampah	persen		persen	17.69 persen	17.69 persen	**10.673.668.000**	**10.673.668.000**	**10.908.768.000**
2	11	11	2.01	0020	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional)				56,324,807 ton	56,324,807 ton	7.862.107.000	7.862.107.000	7.896.107.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
										Target 2024		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				35 kelompok	35 kelompok	639.245.000	639.245.000	752.445.000
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 dokumen	1 dokumen	2.172.316.000	2.172.316.000	2.261.216.000
									TOTAL			**31.940.108.000**	**31.940.108.000**	**32.591.270.000**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Perangkat Daerah DLH Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan draft Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan lingkungan hidup yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Semoga Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait. Sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEKALONGAN

Dr. SRI BUDI SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701214 199003 1 004

LAMPIRAN

Pekalongan

World's City of Batik

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN

Jl. Majapahit No.18
(0285) 422814
0856 4055 7650
https://disdukcapil.pekalongankota.go.id
dindukcapil.pekalongankota@gmail.com

disdukcapilkotapkl
@disdukcapilkotapkl
Disdukcapil Kota Pekalongan
Linktr.ee/layanan_dukcapil33775

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kami telah menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2024. Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dalam mengimplementasikan perencanaan tahunan unit kerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (RENJA) PD dalam rangka penyusunan RAPBD.

Kemudian dalam rangka menyesuaiakn dengan kondisi dan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Pekalongan yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024.

Sehubungan dengan adanya hal tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menyesuaikan juga dengan menyusun perubahan dokumen kerja yaitu Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Demikian dengan tersusunnya Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 ini, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai pedoman oleh semua pihak yang terkait dengan pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil dan pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kota Pekalongan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DISDUKCAPIL

SLAMET HARIYADI, SH.,M.Hum.

Pembina Utama Muda

NIP 19650204 198603 1 016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ….…… i
Daftar Isi …….. ii
Daftar Tabel …….. iii
BAB I Pendahuluan …… 1
1.1 Latar Belakang …..…. 1
1.2 Landasan Hukum ...…… 2
1.3 Maksud dan Tujuan ……..... 3
1.4 Sistematika Penulisan …… 4
BAB II Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 ……... 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil s.d Triwulan II Tahun 2024…….…… 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …… 13
BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ……... 15
BAB IV Penutup ……... 22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil s.d Triwulan II Tahun 2024 …… 7

Tabel 3.1 Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Disdukcapil Tahun 2024 …. 16

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah Disdukcapil Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Disdukcapil untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kota Pekalongan.

Rencana Kerja (Renja) perubahan Disdukcapil Kota Pekalongan ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana perubahan tahunan, rencana kerja perubahan ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung tujuan Disdukcapil Kota Pekalongan mengingat bahwa:

1) Rencana kerja perubahan merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan sesuai dengan Peraturan Wali Kota nomor 22 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota nomor 52 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.
2) Rencana Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA), prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan (PPASP), rencana kerja dan anggaran perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi dokumen pelaksanaan anggaran perubahaan (DPA-P) melalui penetapan anggaran pendapatan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) Kota Pekalongan.
3) Rencana Kerja perubahan merupakan salah satu instrumen untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian dan

realisasi kinerja Perangkat Daerah serta capaian dan realisasi Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang telah tercapai.

Dokumen perubahan Renja Disdukcapil Kota Pekalongan Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota nomor 22 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota nomor 52 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja perubahan Disdukcapil Kota Pekalongan Tahun 2024 memuat rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2024 ini adalah :

1) Undang-Undang nomor 13 tahun 1954 tentang penetapan Undang-Undang nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang pembentukan kota-kota besar dan kota kota ketjil di Djawa;
2) Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;
3) Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasinal tahun 2005-2025;
5) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 1988 tentang penetapan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II Pekalongan, Kabupaten daerah tingkat II Pekalongan dan Kabupaten daerah tingkat II bidang;
8) Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah;

9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
10) Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah;
11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12) Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 15 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
13) Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;
14) Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 24 C Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;
15) Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota nomor 52 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman untuk mendukung capaian kinerja dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 dalam menjalankan program, kegiatan dan subkegiatannya;
3. Menjadi pedoman evaluasi kinerja sebagai rujukan perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Rencana kerja perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

a. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan Pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. Menjaga konsistensi rencana kerja Pengelola Daerah dengan anggaran kerja Pengelola Daerah;
c. Mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dijabarkan dari rancangan awal RKPD Kota Pekalongan tahun 2024;
d. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayaan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Disdukcapil Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan bagaimana menguraikan analisis gambaran pelayanan, penetuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada bagian ini menyajikan hasil evaluasi renja perangkat daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan menguraikan analisis hasil pengendalian pelaksanaanya.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini menyajikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Sesuai dengan tugas pokoknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Kota Pekalongan di bidang kependudukan dan catatan sipil sejalan dengan pembangunan bidang kependudukan di daerah yang mendukung pelaksanaan program yang disusun oleh Pemerintah Pusat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Administrasi Kependudukan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan sasaran program bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
b. perumusan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pelayanan pencatatan sipil;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
g. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja untuk tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan telah melaksanakan berbagai sasaran-sasaran strategis yang dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Pada bab ini akan disajikan uraian hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Adapun Evaluasi Pelaksanaan Renja Program Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II sebagai berikut :

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

s.d Triwulan II Tahun 2024

Kode OPD / Kode Bidang Urusan / Kode Program / Kode Kegiatan / Kode Sub Kegiatan	Nama OPD / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target APBD		Realisasi Capaian Per Triwulan	
			Target	Satuan	Total	
					Fisik	%
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	persen	41,12	41,12
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	15,56	15,56
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	0	0
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	0	0
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	laporan	7	46,67
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	persen	66,67	66,67
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	orang/ bulan	28	100

2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	6	50,00
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP	1	laporan	1	100
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	persen	50	50
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	0	0
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51	orang	51	100
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100	persen	43,81	43,81
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	2	50
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	paket	2	50
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	paket	2	50
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	2	50
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	dokumen	0	0

2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	0	0
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	laporan	32	106,67
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	50	50
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	2	50
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	6	50
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	6	50
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	69,87	69,87
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	unit	8	61,54
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	2	66,67
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43	unit	35	81,40

2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	85,30	persen	87,93	103,08
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	404.772	dokumen	387.176	95,65
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	46.000	dokumen	31687	68,88
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	laporan	0	0
2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2	laporan	0	0
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	93,7	persen	87,87	93,78
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	6981	dokumen	3947	56,54
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	9285	dokumen	3947	42,51
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1	layanan	0	0
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	10	OPD	9	90
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian data kependudukan (IKK Output)	2	kali	1	50

2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	laporan	1	50
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	laporan	1	50
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabka	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1	dokumen	1	100

Sumber data : RKPD Triwulan II Tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja yang terukur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, maka perlu ditetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan ini merupakan ukuran keberhasilan, kualitatif dan kuantitatif guna pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan organisasi pemerintah daerah serta memperjelas arah kemajuan pembangunan berkesinambungan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.

IKU Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator		Target Penetapan APBD 2024	
				Tahun 2024	Real s.d Triwulan II 2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai SAKIP OPD	85,00	n/a
2	Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan	1	Tingkat Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	89,50	87,90

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja atas evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dapat kami sajikan sebagai berikut :

1. Pada Program Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah target indikator sub kegiatan dapat tercapai, begitu juga dengan serapan anggaran pada masing-masing sub kegiatan. Namun demikian ada yang perlu menjadi beberapa catatan, antara lain :
   - Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor¸ serapan anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp1.460.000 dari pagu penetapan sebesar Rp1.500.000, mengingat adanya beberapa lampu pada gedung Disdukcapil yang sudah tidak berfungsi (mati) sehingga perlu penambahan anggaran pada sub kegiatan ini.
   - Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, serapan anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp46.403.774 dari pagu penetapan sebesar Rp81.800.000, mengingat banyaknya undangan rapat koordinasi sampai dengan triwulan II sehingga perlu penambahan anggaran pada sub kegiatan ini.
2. Pada Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target indikator sub.kegiatan dapat tercapai, begitu juga dengan serapan anggaran pada masing-masing sub.kegiatan. Namun demikian ada yang perlu menjadi catatan, yaitu :
   - Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, pagu yang dianggarkan untuk bantuan transport piket hari sabtu (hari libur) masih 8 bulan, sehingga pada perubahan perlu diusulkan menjadi 12 bulan.
3. Pada Program Pencatatan Sipil target indikator sub.kegiatan dapat tercapai, begitu juga dengan serapan anggaran pada masing-masing sub.kegiatan. Namun demikian ada yang perlu menjadi catatan, yaitu :
   - Sub kegiatan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil, pagu yang dianggarkan untuk honorarium PPTK dan Kasir kegiatan masih 6 bulan, sehingga perlu diusulkan menjadi 12 bulan, bantuan transport jemput bola akta kelahiran masih 8 bulan, sehingga perlu diusulkan menjadi 12 bulan dan belanja makan dan minuman rapat monev jemput bola dokumen kependudukan yang belum terakomodir.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) perubahan merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan di dukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam Upaya mewujudkan Pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan renja perubahan berpedoman pada renstra perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan. Penyusunan renja perubahan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rumusan rencana kerja perubahan dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				5.780.009.000,00	5.841.708.000,00	5.512.455.000,00							5.833.147.598,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN				5.780.009.000,00	5.841.708.000,00	5.512.455.000,00							5.833.147.598,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN				5.780.009.000,00	5.841.708.000,00	5.512.455.000,00							5.833.147.598,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	5.001.122.000,00	5.024.997.000,00	4.719.644.000,00							5.093.941.598,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	15.564.000,00	15.564.000,00	15.564.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		37.919.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.088.000,00	2.088.000,00	2.088.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.476.000,00	1.476.000,00	1.476.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	15 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.519.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	3.636.751.000,00	3.634.437.000,00	3.634.437.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		3.319.890.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	28 Orang/ bulan	3.574.083.000,00	3.590.169.000,00	3.486.503.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.255.240.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	61.300.000,00	42.900.000,00	39.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			63.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.650.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	10.313.000,00	10.313.000,00	10.313.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		20.487.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51 Orang	51 Orang	5.313.000,00	5.313.000,00	5.313.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.987.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	904.297.000,00	922.697.000,00	922.697.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		1.275.267.598,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	3.525.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6 Paket	736.437.000,00	754.837.000,00	526.312.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.085.767.598,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	4 Paket	36.360.000,00	36.360.000,00	36.360.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			39.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	40 Laporan	83.000.000,00	83.000.000,00	93.900.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	269.447.000,00	277.236.000,00	277.236.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		291.304.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	136.500.000,00	136.500.000,00	136.500.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			110.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	129.947.000,00	137.736.000,00	147.936.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			178.204.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	164.750.000,00	164.750.000,00	164.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Disdukcapil		149.074.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	14 Unit	73.195.000,00	73.195.000,00	94.283.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			56.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	26.500.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			23.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	12	01	2.09	0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 Unit	42 Unit	66.555.000,00	66.555.000,00	51.580.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			70.074.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2	12	02				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	85,30 persen	88,00 persen	354.829.000,00	370.543.000,00	339.175.000,00							336.070.000,00	
	2	12	02	2.01			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	404772 dokumen	404772 dokumen	354.829.000,00	370.543.000,00	370.543.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		336.070.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0002		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
								Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	46000 Dokumen	46000 Dokumen	311.208.000,00	326.412.000,00	295.044.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			268.570.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0004		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
								Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	17.471.000,00	17.981.000,00	17.981.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			31.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0007		Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
								Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	26.150.000,00	26.150.000,00	26.150.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			36.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	2	12	03				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	93,70 persen	93,70 persen	328.970.000,00	347.840.000,00	355.308.000,00							279.699.000,00	
	2	12	03	2.01			Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	6981 dokumen	6981 dokumen	328.970.000,00	347.840.000,00	347.840.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		279.699.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	9285 Dokumen	9285 Dokumen	311.350.000,00	329.470.000,00	329.470.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			267.699.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	1 Layanan	17.620.000,00	18.370.000,00	25.838.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	10,00 OPD	10,00 OPD	95.088.000,00	98.328.000,00	98.328.000,00							123.437.000,00	
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian data kependudukan (IKK Output)	2 kali	2 kali	95.088.000,00	98.328.000,00	98.328.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat Kota Pekalongan		123.437.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	27.230.000,00	27.230.000,00	27.230.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			26.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	26.350.000,00	28.600.000,00	28.600.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			75.437.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan														
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	1 Dokumen	41.508.000,00	42.498.000,00	42.498.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							J U M L A H			**5.780.009.000,00**	**5.841.708.000,00**	**5.512.455.000,00**							**5.833.147.598,00**	

Sumber Data : Laporan SIPD Perubahan Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan merupakan gambaran program, kebijakan dan kegiatan yang telah, sedang dan yang belum dilaksanakan.

Perencanaan kinerja sebagai dasar untuk melihat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sehingga dapat dilakukan upaya-upaya konkret untuk perbaikan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang secara berkelanjutan, dan selanjutnya menjadi semakin terbuka dalam mewujudkan terciptanya kondisi ketenangan kerja. Keberhasilan operasional perencanaan sangat tergantung pada komitmen penuh dari seluruh komponen, melalui proses saling komunikasi timbal balik dalam menciptakan kebersamaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan adanya perubahan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan sesama perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan maupun dengan perangkat daerah yang membidangi fungsi lain.

Dengan segala keterbatasan pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan menjadi salah satu kendala untuk menghasilkan perencanaan yang memiliki bobot kualitas memadai dalam menterjemahkan kebutuhan program dan kegiatan yang sebenarnya, sehingga diharapkan dapat mewujudkan produk perencanaan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

SLAMET HARIYADI, SH.M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP 19650204 198603 1 016

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024

Pekalongan
World's City of Batik

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan pertolongan dan kemudahan dari-Nya, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini selain mempertimbangkan aspek-aspek pendekatan teknokratik juga sudah mengkolaborasikan pendekatan politis berupa Visi Misi Walikota-Wakil Walikota Pekalongan Periode 2021-2026 dan pendekatan *bottom-up*.

Hal yang paling mendasar adalah bahwa penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini telah berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

Secara umum, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun dalam 4 bab. Bab I membahas tentang Pendahuluan, Bab II membahas tentang Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan, Bab III membahas tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, dan terakhir Bab IV Penutup.

Harapan kami, Dokumen ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan penganggaran program dan kegiatan untuk selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan

PUJI WINARTI, SKM, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700502 199501 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan 2

1.4. Sistematika Penulisan 2

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 4

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 4

2.2 Evaluasi Renja Triwulan II 23

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 35

BAB IV PENUTUP 46

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berbagai alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi yang diterima setelah penetapan APBD, maka harus diakomodir dalam Perubahan APBD.

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi :

a. Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
d. Pergeseran anggaran, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

1.2. Landasan Hukum

1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan

Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMPPA Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah :

a. Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024.
b. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) DPMPPA Kota Pekalongan Tahun 2024, adalah :

a. Untuk menyikapi berbagai dinamika penyelenggaraan kegiatan DPMPPA Kota Pekalongan ataupun berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
b. Menjaga konsistensi rencana pembangunan daerah dengan anggaran pembangunan daerah yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini menjelaskan tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah dan Evaluasi Renja Triwulan II.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Perubahan RKPD Tahun 2024.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2023

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Per Triwulan		Cara Membaca Perhitungan Capaian s.d				Data Capaian Realisasi s.d TW. II	Tingkat Capaian s.d TW. II
			I	II	Data Terakhir (data terakhir di TW. Bersangkutan)	Akumulasi Per Triwulan (TW. Berjalan + Jml. TW. Sebelumnya)	Jumlah penyebut dibagi jml. Pembilang	Memperhitungkan capaian tahun sebelumnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*	*Indeks*	59,59	-	-	√				-	-
- *Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG*	*Indeks*	28,52	-	-	√				-	-
- Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	persen	7,39	5,98	-				√	5,98	80,92
- Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender	persen	16,67	-	-	√				-	-
- Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	-	-	√				-	-
- Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan	Persen	26,67	20,00	-				√	20,00	74,99

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Per Triwulan		Cara Membaca Perhitungan Capaian s.d				Data Capaian Realisasi s.d TW. II	Tingkat Capaian s.d TW. II
			I	II	Data Terakhir (data terakhir di TW. Bersangkutan)	Akumulasi Per Triwulan (TW. Berjalan + Jml. TW. Sebelumnya)	Jumlah penyebut dibagi jml. Pembilang	Memperhitungkan capaian tahun sebelumnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4,00	-	1,00	√				1,00	25,00
- Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita	**persen**	**100,00**	-	-	√				-	-
- Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1,00	1,00	-	√				1,00	100,00
- Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	**Persen**	**23,99**	**5,30**	**2,65**		√			**7,95**	**33,13**
- Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	**Persen**	**100,00**	**10,00**	**20,00**		√			**30,00**	**30,00**
- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	10,00	1,00	2,00	√				3,00	30,00

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Per Triwulan		Cara Membaca Perhitungan Capaian s.d				Data Capaian Realisasi s.d TW. II	Tingkat Capaian s.d TW. II
			I	II	Data Terakhir (data terakhir di TW. Bersangkutan)	Akumulasi Per Triwulan (TW. Berjalan + Jml. TW. Sebelumnya)	Jumlah penyebut dibagi jml. Pembilang	Memperhitungkan capaian tahun sebelumnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	√				**100,00**	**100,00**
- Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	24,00	19,00	9,00	√				28,00	116,67
- Kategori Kota Layak Anak	***Kategori***	***2,00***	-	-	√				-	-
- Skor Kota Layak Anak	***Skor***	***832,00***	-	-	√				-	-
- Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	**Persen**	**40,73**	**33,33**	-				√	**33,33**	**81,83**
- Persentase forum anak yang aktif	**Persen**	**28,13**	**15,63**	-				√	**15,6**	**55,6**
- Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250,00	65,00	11,00	√				76,00	30,40
- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	1,00	-	√				1,00	20,00

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Per Triwulan		Cara Membaca Perhitungan Capaian s.d				Data Capaian Realisasi s.d TW. II	Tingkat Capaian s.d TW. II
			I	II	Data Terakhir (data terakhir di TW. Bersangkutan)	Akumulasi Per Triwulan (TW. Berjalan + Jml. TW. Sebelumnya)	Jumlah penyebut dibagi jml. Pembilang	Memperhitungkan capaian tahun sebelumnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3,00	-	2,00	√				2,00	66,67
- **persentase pengaduan kasus anak yang terlayani**	**Persen**	**100,00**	100,00	100,00	√				100,00	100,00
- **Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**	**Persen**	**100,00**	-	-		√			-	-
- Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Kegiatan	1,00	-	-	√				-	-
- **Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK Outcome)**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	√				**100,00**	**100,00**
- Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang	24,00	3,00	5,00	√				8,00	33,33
- **Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus**	**Persen**	**100,00**	-	-		√			-	-

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Per Triwulan		Cara Membaca Perhitungan Capaian s.d ...				Data Capaian Realisasi s.d TW. II	Tingkat Capaian s.d TW. II
			I	II	Data Terakhir (data terakhir di TW. Bersangkutan)	Akumulasi Per Triwulan (TW. Berjalan + Jml. TW. Sebelumnya)	Jumlah penyebut dibagi jml. Pembilang	Memperhitungkan capaian tahun sebelumnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	50,00	-	-	√				-	-
- **Indeks Kepuasan Masyarakat**	***Indeks***	**84,13**	-	-	√				-	-
- ***Nilai SAKIP OPD***	***Indeks***	**85,00**	-	-	√				-	-
- **Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**Persen**	**100,00**	**29,45**	**11,67**		√			**41,12**	**41,12**
- **Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persen**	**100,00**	**8,89**	**6,67**		√			**15,56**	**15,56**
- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	-	-	√				-	-
- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	-	-	√				-	-
- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15,00	4,00	3,00	√				7,00	46,67
- **Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**100,00**	**50,00**	**16,67**		√			**66,67**	**66,67**
- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	20,00	19,00	19,00	√				38,00	190,00

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Per Triwulan		Cara Membaca Perhitungan Capaian s.d ...				Data Capaian Realisasi s.d TW. II	Tingkat Capaian s.d TW. II
			I	II	Data Terakhir (data terakhir di TW. Bersangkutan)	Akumulasi Per Triwulan (TW. Berjalan + Jml. TW. Sebelumnya)	Jumlah penyebut dibagi jml. Pembilang	Memperhitungkan capaian tahun sebelumnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	3,00	3,00	√				6,00	50,00
- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	1,00	-	√				1,00	100,00
- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**persen**	**100,00**	**12,49**	**16,33**		√			**28,82**	**28,82**
- Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	**Persen**	**100,00**	-	-		√			-	-
- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	-	-	√				-	-
- Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	**Persen**	**100,00**	**12,49**	**24,00**		√			**36,48**	**36,48**
- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	-	-	√				-	-
- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	1,00	1,00	√				2,00	50,00

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Per Triwulan		Cara Membaca Perhitungan Capaian s.d				Data Capaian Realisasi s.d TW. II	Tingkat Capaian s.d TW. II
			I	II	Data Terakhir (data terakhir di TW. Bersangkutan)	Akumulasi Per Triwulan (TW. Berjalan + Jml. TW. Sebelumnya)	Jumlah penyebut dibagi jml. Pembilang	Memperhitungkan capaian tahun sebelumnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4,00	-	4,00	√				4,00	100,00
- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	1,00	1,00	√				2,00	50,00
- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	-	-	√				-	-
- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2,00	-	-	√				-	-
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150,00	56,00	27,00	√				83,00	55,33
- Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persen**	**100,00**	**25,00**	**25,00**		√			**50,00**	**50,00**
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4,00	1,00	1,00	√				2,00	50,00
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	3,00	√				6,00	50,00
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	3,00	√				6,00	50,00
- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	**persen**	**100,00**	**14,75**	**10,44**		√			**25,19**	**25,19**

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Per Triwulan		Cara Membaca Perhitungan Capaian s.d ...				Data Capaian Realisasi s.d TW. II	Tingkat Capaian s.d TW. II
			I	II	Data Terakhir (data terakhir di TW. Bersangkutan)	Akumulasi Per Triwulan (TW. Berjalan + Jml. TW. Sebelumnya)	Jumlah penyebut dibagi jml. Pembilang	Memperhitungkan capaian tahun sebelumnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**persen**	**100,00**	**14,75**	**10,44**		√			**25,19**	**25,19**
- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13,00	5,00	2,00	√				7,00	53,85
- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00		-	√				-	-
- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	69,00	4,00	11,00	√				15,00	21,74
- Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	***Persen***	**9,02**	-	-	√				-	-
- Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	**Persen**	**66,67**	**55,56**	**5,56**		√			**61,12**	**91,68**
- Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI dan Kelurahan	**Persen**	**11,11**	**3,70**	**3,70**		√			**7,40**	**66,61**
- Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	4,00	1,00	1,00	√				2,00	50,00

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Per Triwulan		Cara Membaca Perhitungan Capaian s.d				Data Capaian Realisasi s.d TW. II	Tingkat Capaian s.d TW. II
			I	II	Data Terakhir (data terakhir di TW. Bersangkutan)	Akumulasi Per Triwulan (TW. Berjalan + Jml. TW. Sebelumnya)	Jumlah penyebut dibagi jml. Pembilang	Memperhitungkan capaian tahun sebelumnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	**Persen**	**62,96**	**70,37**	-		√			**70,37**	**111,77**
- Persentase kinerja administrasi kelurahan	**Persen**	**100,00**	**50,00**	**50,00**		√			**100,00**	**100,00**
- Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	2,00	1,00	1,00	√				2,00	100,00
- Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	**Persen**	**96,54**	-	-	√				-	-
- Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	**Persen**	**100,00**	**36,36**	**72,73**	√				**72,73**	**72,73**
- Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	2,00	1,00	-	√				1,00	50,00

Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024 Per Triwulan		Cara Membaca Perhitungan Capaian s.d ...				Data Capaian Realisasi s.d TW. II	Tingkat Capaian s.d TW. II
			I	II	Data Terakhir (data terakhir di TW. Bersangkutan)	Akumulasi Per Triwulan (TW. Berjalan + Jml. TW. Sebelumnya)	Jumlah penyebut dibagi jml. Pembilang	Memperhitungkan capaian tahun sebelumnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	2,00	1,00	1,00	√				2,00	100,00
- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1,00	1,00	-	√				1,00	100,00
- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1,00	-	1,00	√				1,00	100,00
- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1,00	-	-	√				-	-

Dari Tabel 2.1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

   Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama periode tahun 2019 sampai dengan 2021, nilai IDG Kota Pekalongan mengalami fluktuasi yang cenderung mengalami penurunan, kemudian mulai tahun 2022 mengalami peningkatan, seperti terlihat pada grafik dibawah ini.

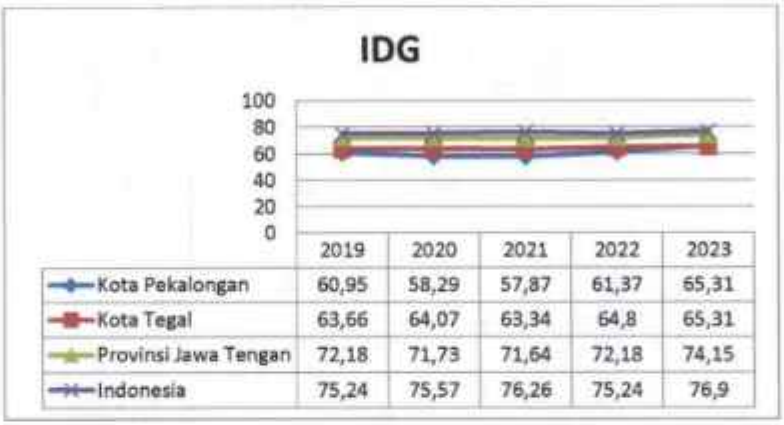

	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Pekalongan	60,95	58,29	57,87	61,37	65,31
Kota Tegal	63,66	64,07	63,34	64,8	65,31
Provinsi Jawa Tengan	72,18	71,73	71,64	72,18	74,15
Indonesia	75,24	75,57	76,26	75,24	76,9

Sumber : BPS, 2024

Tahun 2023 IDG Kota Pekalongan sama dengan Kota Tegal, namun jika disandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, sepanjang tahun 2019-2023 nilai IDG Kota Pekalongan masih di bawah rata-rata.

2. **Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG**

   Indeks Sumbangan pendapatan perempuan merupakan salah satu dari indikator yang dipakai untuk menghitung Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

   Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 angka Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan cenderung menurun.

	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan	28,53	28,5	28,21	28,04	28,56

Sumber : BPS rilis, 2024

Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan lebih rendah jika dibandingkan Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

	2019	2020	2021	2022	2022
Kota Pekalongan	28,53	28,5	28,21	28,04	28,56
Kota Tegal	30,47	30,62	30,19	29,86	30,73
Provinsi Jawa Tengan	34,31	34,29	34,6	34,59	35,21
Nasional	37,1	37,26	37,22	37,17	37,09

Sumber : BPS rilis, 2024

3. **Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender**

Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender merupakan indikator program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Dalam mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender, dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, Focal Point di tiap Perangkatt Daerah, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) oleh Tim Teknis ARG. PPRG dengan *indikator persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender* disusun tiap tahun oleh semua Perangkat Daerah dalam bentuk penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).

Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) diawali dengan dilaksanakannya bimbingan teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan praktek penyusunan GAP dan GBS dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.

Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan penyusunan Gender Budget Statement (GBS) tahun 2024 akan dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran bulan November 2024.

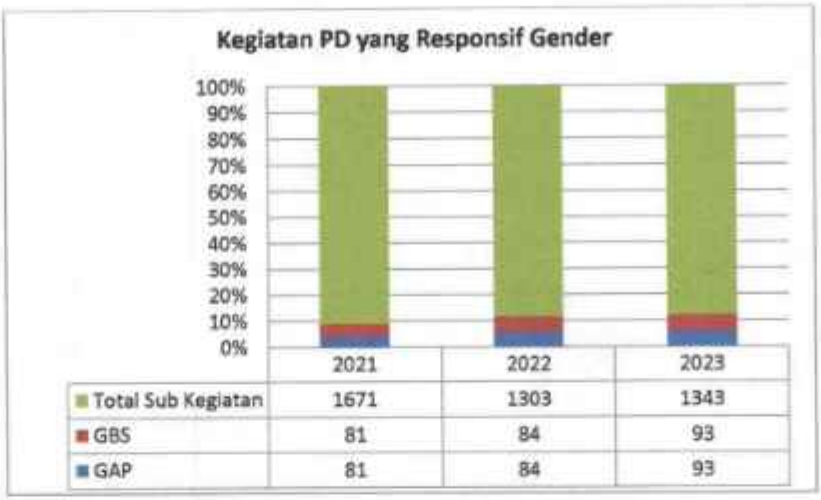

	2021	2022	2023
Total Sub Kegiatan	1671	1303	1343
GBS	81	84	93
GAP	81	84	93

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024

4. Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)

Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome) merupakan indikator program perlindungan perempuan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dengan jumlah penduduk perempuan dikalikan 100.000.

Berdasarkan Perda No. 5 tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan tindak kekerasan berbasis gender dan anak dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 B Tahun 2020 tentang Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, Dan Remaja Kota Pekalongan (LP-PAR). Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan di Kota Pekalongan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimana seluruh kasus pengaduan dapat tertangani 100 %,

Sampai dengan bulan Juni 2024 terdapat 9 (Sembilan) orang perempuan yang mengalami tindak kekerasan dari jumlah penduduk perempuan 114.868 (sumber data Dindukcapil Kota Pekalongan semester I tahun 2024).

5. Kategori Kota Layak Anak

Kategori Kota Layak Anak merupakan penghargaan yang diberikan atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PPPA RI. Tahun 2023, penghargaan Kota Layak Anak meningkat dengan kategori Nindya, yang sebelumnya dari tahun 2019, mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak

dengan Kategori Madya, dan tahun 2018 mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak dengan Kategori Pratama. Hal tersebut dikarenakan komitmen bersama Walikota Pekalongan dengan OPD terkait dan stakeholder, maupun peran LP-PAR (Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja) dan PPKBM PUSPAGA ElPePar berupa pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak serta pusat pembelajaran keluarga.

6. Skor Kota Layak Anak

Skor Kota Layak Anak adalah skor yang diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PPPA RI tentang Kota Layak Anakm

	2020	2021	2022	2023
Skor Kota Layak Anak Kota Pekalongan	626	602	637,6	769,8

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2023

Berdasarkan surat dari Kemen PPPA B-85/D.PHA/TK.05/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 hal : Perubahan Jadwal Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2024 semula dari Januari 2024 s.d 22 Juli 2024 menjadi dari Januari 2024 s.d Juli 2025.

7. Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)

Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) merupakan indikator program pemenuhan hak anak (PHA). Indikator ini diukur membandingkan kelurahan yang mengikuti evaluasi dekela dengan jumlah kelurahan yang ada. Sampai dengan tahun 2023 terdapat 9 (sembilan) kelurahan yang telah mengkuti evaluasi dekela yaitu Kelurahan Padukuhankraton, Kelurahan Podosugih, Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Nayontaansari, Kelurahan Kalibaros, Kelurahan Banyurip, Kelurahan Jenggot, Kelurahan Klego dan Kelurahan Tirto.

8. Persentase Pengaduan Kasus Anak Yang Terlayani

Persentase Pengaduan Kasus Anak Yang Terlayani merupakan indikator program perlindungan khusus anak.

Berdasarkan Perda No. 5 tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan tindak kekerasan berbasis gender dan anak dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 65 B Tahun 2020 tentang Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, Dan Remaja Kota Pekalongan (LP-PAR). Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan di Kota Pekalongan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimana seluruh kasus pengaduan dapat tertangani 100 %

Sampai dengan bulan Juni 2024 terdapat 8 (delapan) orang anak yaitu 6 (enam) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki yang mengalami tindak kekerasan.

9. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indek Kepuasan Masyarakat merupakan persepsi penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik melalui survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan. Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik di DPMPPA Kota Pekalongan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan publik yang dilaksanakan di LP-PAR. LP-PAR (Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja) yaitu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai pusat pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Selain itu tahun 2021 di bentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan nama "PUSPAGA ELPePar" (Empati, Luwes, Peduli, dan Partisipasi) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 463/0013 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga.

Dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) dan PUSPAGA "ELPePar", penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan maupun layanan pembelajaran keluarga di Kota Pekalongan dapat terlayani dan tertangani 100 %.

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024

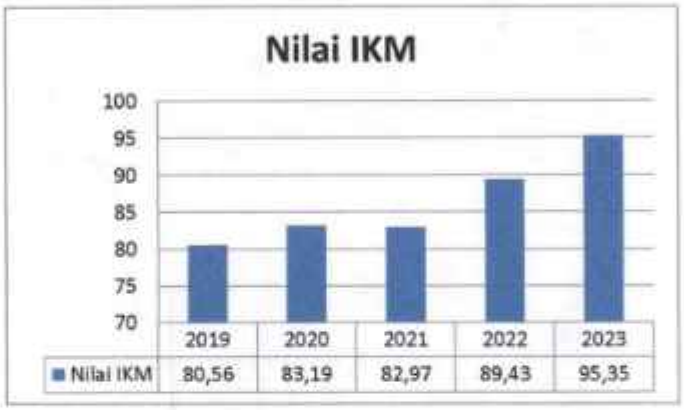

10. Nilai SAKIP OPD

Nilai SAKIP OPD merupakan indikator sasaran DPMPPA Kota Pekalongan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai SAKIP OPD berdasarkan nilai hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat pada tahun berkenaan.

Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Komponen evaluasi meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan pencapaian kinerja. Nilai Evaluasi

AKIP DPMPPA Kota Pekalongan menunjukkan peningkatan, dapat dilihat pada gambar berikut :

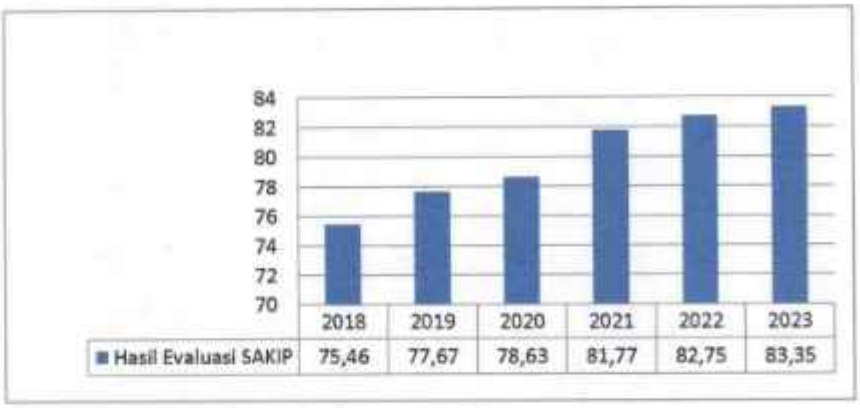

Sumber : Inspektorat Kota Pekalongan, 2024, diolah

11. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja merupakan indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Indikator ini diukur dengan Persentase capaian kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Persentase capaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Sampai dengan triwulan II realisasi capaian kinerja adalah 41.12%.

12. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Indikator ini diukur dengan menghitung Persentase capaian kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Persentase capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Persentase capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sampai dengan triwulan II realisasi capaian kinerja adalah 28.83%.

13. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah merupakan salah satu indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Indikator ini diukur dengan menghitung Persentase capaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah dan Persentase capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sampai dengan triwulan II realisasi capaian kinerja adalah 25.19%.

14. Prosentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pembangunan sumber daya manusia dengan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan ditunjukkan dengan tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. Tingkat keswadayaan masyarakat dari tahun 2017 s.d 2021 menunjukkan angka peningkatan, namun di tahun 2021 menurun 2.62%, capaian swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

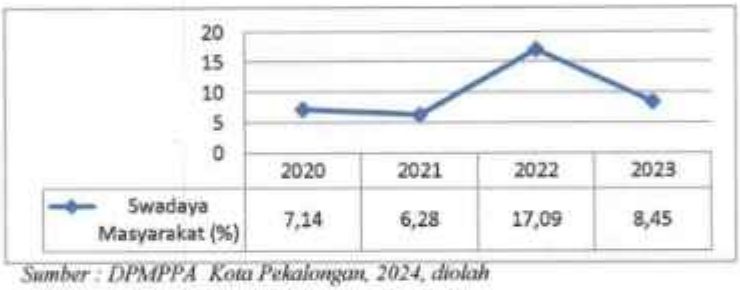

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

Tahun	Jumlah Kelurahan	Jumlah Anggaran (Rp)	Swadaya Masyarakat (Rp)	Prosentase (%)
2020	17	839.724.500	59.935.400	7.14
2021	27	4.332.379.400	272.125.750	6.28
2022	27	2.217.366.000	378.970.906	17.09
2023	27	4.005.082.000	338.567.000	8,45

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2024, diolah

15. Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan

Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan merupakan indikator program peningkatan kerjasama desa. Indikator ini diukur dengan membandingkan Jumlah kumulatif kelurahan yg difasilitasi pembangunan sarprasnya oleh TNI s.d thn n dengan jumlah target kelurahan terfasilitasi (Selama periode renstra). Sampai dengan triwulan II

realisasi capaian kinerja adalah 61.11% yaitu Kelurahan Poncol, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Banyurip, Kelurahan Tirto, Kelurahan Poncol Kuripan Yosorejo, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Gamer, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Podo sugih, Kelurahan Soko Duwet dan Kelurahan Tirto.

16. **Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"**

    Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang" merupakan indikator program administrasi pemerintahan desa. Indikator ini dihitung dengan membandingkan Jumlah Kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang" dengan jumlah seluruh kelurahan yang ada. Sampai dengan triwulan II realisasi capaian kinerja adalah 70.73% atau 19 (Sembilan belas) kelurahan dengan kriteria cepat berkembang.

17. **Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat**

    Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat merupakan indikator program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. Indikator ini diukur dengan membandingkan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif (LPM , BKM, RT, RW, PKK, Posyandu Kota, karang taruna kota) dengan jumlah LKK (LPM , BKM, RT, RW, PKK, Posyandu kota, karang taruna kota yang ada. Sampai dengan triwulan II realisasi capaian kinerja adalah 97.64% atau sejumlah 2.072 LKK yang aktif dari 2122LKK yang ada.

2.2. Evaluasi Renja Triwulan II

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah DPMPPA Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024, APBD tahun 2024 telah menerapkan numenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan.

Tabel 2.2
Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2024

KODE		INDIKATOR KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	K	RAPBD (Rp)	Pergeseran APBD (Rp)	Realisasi Capaian Per Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPBD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi %	
							TW I		TW II					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.864.179.000	6.359.179.000		1.021.494.527		2.624.378.372		3.645.872.899		57,63
2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				711.428.000	711.428.000		29.493.717		189.266.632		218.760.349		30,75
02.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	persen	7,20	275.000.000	275.000.000	5,99	-	-	104.045.000	5,99	104.045.000	80,92	37,83
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender	persen	14,67	35.000.000	35.000.000	-	-	-	2.315.000	-	2.315.000	-	6,61
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Penyelenggaraan Pelaksanaan PUG tematik/PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Advokasi Kebijakan dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PSUG) Termasuk Penerapan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	35.000.000	35.000.000	-	-	-	2.315.000	-	2.315.000	-	6,61

KODE		INDIKATOR KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	K	RAPBD (Rp)	Pergeseran APBD (Rp)	Realisasi Capaian Per Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPBD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi %	
							TW I		TW II					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan**	**Persen**	**26,67**	**220.000.000**	**220.000.000**	**20,00**	-	-	**99.403.000**	**20,00**	**99.403.000**	**74,99**	**45,18**
2.08.02.2.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	220.000.000	220.000.000	-		1,00	99.403.000	1,00	99.403.000	25,00	45,18
2.08.02.2.03	**Pengadaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita**	**persen**	**100**	**20.000.000**	**20.000.000**	-	-	-	**2.327.000**	-	**2.327.000**	-	**11,64**
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kabupaten dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	20.000.000	20.000.000	1,00		-	2.327.000	1,00	2.327.000	100,00	11,64
2.08.03	**Program Perlindungan Perempuan**	**Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)**	**Perseo**	**23,99**	**81.300.000**	**81.300.000**	**5,30**	**6.489.717**	**2,65**	**21.532.432**	**7,95**	**28.022.149**	**33,13**	**34,46**
2.08.03.2.01	**Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase ketercapaian penanganan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**	**Persen**	**100**	**20.000.000**	**20.000.000**	**10,00**	-	**20,00**	**4.685.000**	**30,00**	**4.685.000**	**30,00**	**23,43**

KODE		INDIKATOR KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	K	RAPBD (Rp)	Pergeseran APBD (Rp)	Realisasi Capaian Per Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPRD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi %	
							TW I		TW II					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemangkuan Kecamatan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemangkuan Kecamatan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	10	20.000.000	20.000.000	3,00		2,00	4.685.000	5,00	4.685.000	50,00	23,43
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)**	**Persen**	**101**	**61.308.000**	**61.308.000**	**100,00**	**6.489.717**	**100,00**	**16.947.432**	**100,00**	**23.337.149**	**100,00**	**38,07**
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	24	61.308.000	61.308.000	19,00	6.489.717	9,00	16.947.432	28,00	23.337.149	116,67	38,07
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Deteksi dini/kekerasan (kasus anak)	Persen	40,73	277.022.000	277.022.000	33,33	22.635.000	-	59.840.200	33,33	82.475.200	81,83	29,77
2.08.06.2.02	**Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase forum anak yang aktif**	**Persen**	**25,13**	**277.022.000**	**277.022.000**	**15,63**	**22.635.000**	-	**59.840.200**	**15,63**	**82.475.200**	**35,56**	**29,77**
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	124.841.000	124.841.000	55,20	16.410.000	11,00	25.082.000	70,00	41.492.000	30,49	33,24

KODE		INDIKATOR KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	K	RAPBD (Rp)	Pergeseran APBD (Rp)	Realisasi Capaian Per Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPBD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi %	
							TW I		TW II					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	113.293.000	113.293.000	1,00	6.225.000	-	17.467.200	1,00	23.692.200	20,91	20,91
2.08.06.2.02.0004	Pengaturan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengaturan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	38.890.000	38.890.000	-		2,00	17.291.000	2,00	17.291.000	66,67	44,46
02.08.07	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**persentase pengaduan kasus anak yang terlayani**	**Persen**	**100**	**70.890.000**	**70.890.000**	**100,00**	**369.000**	**100,00**	**3.849.000**	**100,00**	**4.218.000**	**100,00**	**5,40**
2.08.07.2.01	**Penyediaan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian penyediaan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**	**Persen**	**100**	**12.300.000**	**12.300.000**	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.07.2.01.0003	Pengaturan kerja sama lintas perangkat daerah untuk penyediaan kabupaten/kota layak Anak, kawasan layak Anak, dan kelurahan layak Anak, dan URPPA	Jumlah layanan penyediaan KIA terpadu	Kegiatan	1	12.300.000	12.300.000	-		-		-	-	-	-
2.08.07.2.03	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK Outcome)**	**Persen**	**100**	**57.468.000**	**57.468.000**	**100,00**	**369.000**	**100,00**	**3.849.000**	**200,00**	**4.218.000**	**200,00**	**7,34**

KODE		INDIKATOR KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	K	RAPBD (Rp)	Pergeseran APBD (Rp)	Realisasi Capaian Per Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPBD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi %	
							TW I		TW II					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang	29	57.468.000	57.468.000	3,00	360.000	5,00	3.849.000	8,00	4.218.100	33,33	7,34
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus**	**Persen**	**100**	**8.322.000**	**8.322.000**	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan pemangunan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten / Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan memberikan sertifikat Perlindungan dan Pemangunan AMPK	Orang	30	8.322.000	8.322.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13	**URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**8.192.759.000**	**8.042.759.000**		**992.000.310**		**2.435.111.740**		**3.427.112.950**		**59,66**
2.13.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**3.391.926.000**	**3.391.926.000**		**673.831.180**		**1.462.759.080**		**2.136.590.360**		**62,99**
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	**Persen**	**100**			**29,45**		**11,67**		**41,12**		**41,12**	
2.13.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**15.762.000**	**15.762.000**	**9,89**	-	**6,67**	**600.000**	**15,56**	**600.000**	**15,56**	**3,81**
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2.204.000	2.204.000	-		-		-	-	-	-

KODE		INDIKATOR KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	K	RAPBD (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	Realisasi Capaian Per Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPBD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi %	
							TW I		TW II					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.558.000	1.558.000	-		-		-	-	-	-
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	12.000.000	12.000.000	4,00		3,00	600.000	7,00	600.000	46,67	5,00
2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase keterexpsoan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**2.744.615.000**	**2.744.615.000**	**50,00**	**622.051.798**	**16,67**	**1.304.051.758**	**66,67**	**1.926.103.556**	**66,67**	**70,18**
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	20	2.703.421.000	2.703.421.000	10,00	613.570.798	10,00	1.287.926.758	38,00	1.901.503.556	190,00	70,33
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	39.790.000	39.790.000	3,00	8.473.000	3,00	16.525.000	6,00	22.600.000	50,00	56,80
2.13.01.2.02.0010	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.444.000	1.444.000	1,00		-		1,00	-	100,00	-
		Persentase keterseidiaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**persen**	**100**			**12,69**		**16,33**		**29,02**		**29,02**	
2.13.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase keterexpsoan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**5.000.000**	**5.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE		INDIKATOR KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	K	RAPBD (Rp)	Pergeseran APBD (Rp)	Realisasi Capaian Per Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPBD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi %	
							TW I		TW II					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	5.000.000	5.000.000	-		-		-	-	-	-
2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**246.601.000**	**246.601.000**	**12,48**	**5.909.500**	**24,88**	**51.866.500**	**36,48**	**57.776.000**	**36,48**	**23,43**
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1.730.000	1.730.000	-	-	-		-	-	-	-
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	68.155.000	68.155.000	1,00	1.237.900	1,00	4.478.500	2,00	5.716.400	50,00	8,39
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	2.800.000	2.800.000	-	-	4,00		4,00	-	100,00	-
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	30.636.000	30.636.000	1,00	1.222.000	1,00	4.948.000	2,00	6.170.000	50,00	20,14
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	6.000.000	6.000.000	-	-	-		-	-	-	-
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2.500.000	2.500.000	-	-	-	780.000	-	780.000	-	31,20
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	134.780.000	134.780.000	36,00	3.450.600	27,00	41.660.000	83,00	45.110.000	55,33	33,47

KODE		INDIKATOR KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	K	RAPBD (Rp)	Pergeseran APBD (Rp)	Realisasi Capaian Per Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPBD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi %	
							TW I		TW II					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**268.949.000**	**268.949.000**	**25,00**	**45.249.582**	**25,00**	**101.296.422**	**50,00**	**146.546.304**	**50,00**	**54,49**
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.400.000	2.400.000	1,00	640.000	1,00	900.000	2,00	1.560.000	50,00	65,00
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	106.200.000	106.200.000	3,00	6.410.464	3,00	24.687.598	6,00	31.098.062	50,00	29,28
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	160.348.000	160.348.000	3,00	38.173.418	3,00	75.708.824	6,00	113.888.242	50,00	71,03
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	**persen**	**100**			**14,75**		**10,44**		**25,19**		**25,19**	
2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persen**	**100**	**111.060.000**	**111.000.000**	**14,75**	**620.000**	**10,44**	**4.945.000**	**25,19**	**5.565.000**	**25,19**	**5,01**
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pendidikan, Jasa Perasuransian dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	15	71.960.000	71.960.000	5,00		2,00	3.190.000	7,00	3.190.000	33,33	4,43
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	23.000.000	23.000.000			-		-	-	-	-

KODE		INDIKATOR KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	K	RAPBD (Rp)	Penyesuaian APBD (Rp)	Realisasi Capaian Per Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPBD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi %	
							TW I		TW II					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.13.01.2.01.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	69	14.040.000	14.040.000	4,00	020.000	11,00	1.735.000	15,00	2.155.000	21,74	10,92
02.13.03	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan keluruhan**	**Persen**	**66,67**	**610.284.000**	**1.300.284.000**	**55,56**	**35.520.000**	**5,56**	**404.829.000**	**61,12**	**440.349.000**	**91,68**	**33,87**
2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI dan Kelurahan**	**Persen**	**11,11**	**610.284.000**	**1.300.284.000**	**3,70**	**35.520.000**	**3,70**	**404.829.000**	**7,40**	**440.349.000**	**66,61**	**33,87**
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	610.284.000	1.300.284.000	1,00	35.520.000	1,00	404.829.000	2,00	440.349.000	80,00	33,87
02.13.04	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase keluruhan dengan kriteria "cepat keluruhnang"**	**Persen**	**62,96**	**48.520.000**	**48.520.000**	**70,37**	**3.280.000**	**-**	**3.280.000**	**70,37**	**6.560.000**	**111,77**	**13,52**
2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase kinerja administrasi keluruhan**	**Persen**	**100**	**48.520.000**	**48.520.000**	**50,00**	**3.280.000**	**50,00**	**3.280.000**	**100,00**	**6.560.000**	**100,00**	**13,52**
2.13.04.2.01.2018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	2	48.520.000	48.520.000	1,00	3.280.000	1,00	3.280.000	2,00	6.560.000	100,00	13,52
02.13.05	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat**	**Persen**	**36,54**	**1.102.029.000**	**1.102.029.000**	**-**	**279.369.630**	**-**	**564.243.860**	**-**	**843.612.690**	**-**	**76,55**

KODE		INDIKATOR KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	K	RAPBD (Rp)	Penyesuaian APBD (Rp)	Realisasi Capaian Per Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPBD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi %	
							TW I		TW II					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Perlakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan**	**Persen**	**100**	**1.102.829.000**	**1.102.829.000**	**86,86**	**279.369.630**	**72,73**	**564.243.060**	**72,73**	**843.613.690**	**72,73**	**76,55**
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pembentukan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pembentukan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	2	177.827.000	177.827.000	1,00	22.529.987	-	51.677.002	1,00	74.206.989	50,00	41,73
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	2	327.136.000	327.136.000	1,00	190.428.717	1,00	292.701.332	2,00	489.129.049	100,00	149,52

KODE		INDIKATOR KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	K	RAPBD (Rp)	Pergeseran APBD (Rp)	Realisasi Capaian Per Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPBD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran RKPD yang dievaluasi %	
							TW I		TW II					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	73.160.000	73.000.000	1,00	-	-	11.600.000	1,00	11.600.000	100,00	15,87
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Balai Dhuha Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Balai Dhuha Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	52.500.000	52.500.000	-	-	1,00	28.585.000	1,00	28.585.000	100,00	54,45
2.13.05.2.01.0010	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1	469.566.000	469.566.000	-	80.440.926	-	179.080.726	-	240.091.032	-	51,13
	Jumlah				5.864.179.000	6.334.179.000		1.021.496.527		2.624.378.372		3.645.872.899		55,03

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDAAAN PERANGKAT DAERAH

Pada BAB III tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dalam Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 ini akan dijelaskan perubahan target kinerja dan perubahan pagu RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 berdasarkan perubahan kebijakan sebagaimana dijelaskan dalam Bab 1. Pada perubahan ini akan dimuat tentang kegiatan yang mengalami penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif, kegiatan yang mengalami penghapusan, usulan kegiatan baru, serta kegiatan dengan pagu indikatif tetap.

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode	Satker , Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Penetapan			Penetapan APBD	Perubahan Penjabaran I	Indikator Perubahan			Perubahan RKPD	Keterangan	+/- (L - H)
		Uraian Indikator	Target	Satuan			Uraian Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.864.179.000**	**6.554.179.000**				**6.833.942.000**		**279.763.000**
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**711.420.000**	**711.420.000**				**711.420.000**		-
02.08.02	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender**	**7,39**	**persen**	**275.000.000**	**275.000.000**	**Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender**	**7,39**	**persen**	**275.000.000**		-
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender**	**16,67**	**persen**	**35.000.000**	**35.000.000**	**Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender**	**16,67**	**persen**	**35.000.000**		-
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Penyelenggara Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Penyelenggara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencana Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	35.000.000	35.000.000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Penyelenggara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencana Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	35.000.000		-
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan**	**26,67**	**Persen**	**220.000.000**	**220.000.000**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan**	**26,67**	**Persen**	**220.000.000**		-

Kode	Sathar , Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Penetapan			Penetapan APBD	Perubahan Penjabaran I	Indikator Perubahan			Perubahan RKPD	Keterangan	+/- (L - H)
		Uraian Indikator	Target	Satuan			Uraian Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen	220.000.000	220.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	220.000.000	Pagu Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dialihkan ke Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	-
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita**	**100**	**person**	**20.000.000**	**20.000.000**	**Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita**	**100**	**person**	**20.000.000**		-
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1	Lembaga	20.000.000	20.000.000	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1	Lembaga	20.000.000		-
2.08.03	**Program Perlindungan Perempuan**	**Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)**	**23,99**	**Person**	**81.308.000**	**81.308.000**	**Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)**	**23,99**	**Person**	**81.308.000**		-
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**	**100**	**Person**	**20.080.000**	**20.080.000**	**Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**	**100**	**Person**	**20.000.000**		-
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Dokumen	20.000.000	20.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Dokumen	20.000.000		-

Kode	Satker , Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Penetapan			Pagu Penetapan APBD	Perubahan Penjabaran 1	Indikator Perubahan			Perubahan RKPD	Keterangan	+/- (L - H)
		Uraian Indikator	Target	Satuan			Uraian Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)**	**100**	**Persen**	**61.308.000**	**61.308.000**	**Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)**	**100**	**Persen**	**61.308.000**		-
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	24	Layanan	61.308.000	61.308.000	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Layanan	61.308.000	Perubahan target layanan berdasarkan pengaduan yang masuk ke UPPAB	-
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Dekala (desa/kelurahan layak anak)	40,73	Persen	277.022.000	277.022.000	Persentase Dekala (desa/kelurahan layak anak)	40,73	Persen	277.022.000		-
2.08.06.2.03	**Pengesahan dan Pengembangan Lembaga Penyelia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase forum anak yang aktif**	**28,13**	**Persen**	**277.022.000**	**277.022.000**	**Persentase forum anak yang aktif**	**28,13**	**Persen**	**277.022.000**		-
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	230	Orang	124.841.000	124.841.000	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	350	Orang	124.841.000	Penambahan target dari PUSPAGA 30 anak dan Advokasi Kasus/rescue Rumah 70 anak (anggaran bersasal dari pengurangan anggaran Honor Tim PUSPAGA)	-
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	113.291.000	113.291.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	113.291.000		-

Kode	Satker , Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Penetapan			Penetapan APBD	Perubahan Penjabaran I	Indikator Perubahan			Perubahan RKPD	Keterangan	+/- (L - H)
		Uraian Indikator	Target	Satuan			Uraian Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.08.06.2.02.0004	Pengaturan Sejawag antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengaturan Sejawag Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Dokumen	38.890.000	38.890.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengaturan Sejawag Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Dokumen	38.890.000		-
02.08.07	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**persentase pengadaan kasus anak yang terlayani**	**100**	**Persen**	**78.890.000**	**78.890.000**	**persentase pengadaan kasus anak yang terlayani**	**100**	**Persen**	**78.890.000**		-
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**	**100**	**Persen**	**12.300.000**	**12.300.000**	**Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**	**100**	**Persen**	**12.300.000**		-
2.08.07.2.01.1003	Pengaturan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota Layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan UKPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu	1	Kegiatan	12.300.000	12.300.000	Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu	1	Kegiatan	12.300.000		-
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK Outcome)**	**100**	**Persen**	**57.468.000**	**57.468.000**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK Outcome)**	**100**	**Persen**	**57.468.000**		-
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	74	Orang	57.468.000	57.468.000	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	13	Orang	57.468.000	Perubahan target kesesuaian berdasarkan pengaduan yang masuk ke UPPAR	-
2.08.07.2.03	**Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian pengaturan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus**	**100**	**Persen**	**8.322.000**	**8.322.000**	**Persentase ketercapaian pengaturan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus**	**100**	**Persen**	**8.322.000**		-

Kode	Satker , Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Penetapan			Penetapan APBD	Perubahan Penjabaran 1	Indikator Perubahan			Perubahan RKPD	Keterangan	+/- (L - H)
		Uraian Indikator	Target	Satuan			Uraian Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.08.07.2.03.0006	Penyelenggaraan kepemimpinan SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan pemenuhan hak AMPK tingkat daerah kabupaten / Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Pemenuhan AMPK	50	Orang	8.322.000	8.322.000	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Pemenuhan AMPK	50	Orang	8.322.000		-
2,13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**5.192.759.000**	**5.843.729.000**				**6.103.522.000**		**259.763.000**
2.13.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**3.391.926.000**	**3.391.926.000**				**3.425.279.000**		**33.353.000**
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	**100**	**Persen**			**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100**	**Persen**			
2.13.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**15.762.000**	**15.762.000**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**15.762.000**		-
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2.204.000	2.204.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2.204.000		-
2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	1.558.000	1.558.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	1.558.000		-
2.13.01.2.01.0003	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan	12.000.000	12.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan	12.000.000	Penambahan/pergeseran rekening belanja	-
2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**2.744.615.000**	**2.744.615.000**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**2.744.615.000**		-
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	Orang	2.703.421.000	2.703.421.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	Orang	2.703.421.000	Perubahan target karena 1PNS pensiun	-

Kode	Sektor , Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Penetapan			Pereiapan APBD	Perubahan Penjabaran I	Indikator Perubahan			Perubahan RKPD	Keterangan	+/- (L - H)
		Uraian Indikator	Target	Satuan			Uraian Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.01.2.02.003 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	99.750.000	99.750.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	10.750.000	Perubahan/pergeseran rekening belanja honorarium bendahara gaji	-
2.13.01.2.02.005 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.444.000	1.444.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.444.000		-
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**100**	**persen**			**Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**persen**			
2.13.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**5.000.000**	**5.000.000**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**5.000.000**		-
2.13.01.2.05.000 2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	5.000.000	5.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	5.000.000		-
2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**246.601.000**	**246.601.000**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**254.953.000**		**8.352.000**
2.13.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	1.750.000	1.750.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	1.750.000		-
2.13.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	68.153.000	68.153.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	76.507.003	Pergeseran pagu untuk penambahan 3 (tiga) unit dispenser	8.353.000
2.13.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	2.800.000	2.800.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	2.800.000		-

Kode	Sukber , Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Penetapan			Penetapan APBD	Perubahan Penjabaran I	Indikator Perubahan			Perubahan RKPD	Keterangan	+/- (L – H)
		Uraian Indikator	Target	Satuan			Uraian Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	10.036.000	10.036.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	10.636.000		-
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	6.000.000	6.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	6.000.000		-
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	2.500.000	2.500.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	2.500.000		-
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	134.780.000	134.780.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	134.780.000		-
2.13.01.2.09	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**268.948.000**	**268.948.000**	**Persentase ketersediaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**268.948.000**		-
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	2.400.000	2.400.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	2.400.000		-
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	106.200.000	106.200.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	106.200.000		-
2.13.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	160.348.000	160.348.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	160.348.000		-
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	**100**	**person**			**Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah**	**100**	**person**			
2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**person**	**111.000.000**	**111.000.000**	**Persentase ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**person**	**136.000.000**		**25.000.000**

Kode	Sub Unsur, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Penetapan			Penetapan APBD	Perubahan Penjabaran I	Indikator Perubahan			Perubahan RKPD	Keterangan	+/- (L - H)
		Uraian Indikator	Target	Satuan			Uraian Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	Unit	71.960.000	71.960.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	Unit	71.960.000		-
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	25.000.000	25.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	50.000.000	Penyesuaian DIS rehab gedung kantor	25.000.000
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	14.040.000	14.040.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	14.040.000		-
02.13.03	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Persentase ketersediaan Fasilitasi Kerjasama TNI dan keluruhan**	**66,67**	**Persen**	**610.284.000**	**1.300.284.000**	**Persentase ketersediaan Fasilitasi Kerjasama TNI dan keluruhan**	**66,67**	**Persen**	**1.448.947.000**		**148.663.000**
2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI dan Keluruhan**	**11,11**	**Persen**	**610.284.000**	**1.300.284.000**	**Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI dan Keluruhan**	**11,11**	**Persen**	**1.448.947.000**		**148.663.000**
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	9	Dokumen	610.284.000	1.300.284.000	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	9	Dokumen	1.448.947.000	Berjumlah satu kegiatan fasilitasi TMMD Sengkuyung IV	148.663.000
02.13.04	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase keluruhan dengan kriteria "sepat berkembang"**	**62,96**	**Persen**	**48.920.000**	**48.920.000**	**Persentase keluruhan dengan kriteria "sepat berkembang"**	**62,96**	**Persen**	**56.820.000**		**7.900.000**
2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase kinerja administrasi keluruhan**	**100**	**Persen**	**48.920.000**	**48.920.000**	**Persentase kinerja administrasi keluruhan**	**100**	**Persen**	**56.820.000**		**7.900.000**
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2	Dokumen	48.920.000	48.920.000	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2	Dokumen	56.820.000	Pergeseran pagu dari sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.900.000
02.13.05	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat**	**96,54**	**Persen**	**1.102.029.000**	**1.102.029.000**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat**	**96,54**	**Persen**	**1.173.277.000**		**78.248.000**

Kode	Satker , Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Penetapan			Penetapan APBD	Perubahan Penjabaran I	Indikator Perubahan			Perubahan RKPD	Keterangan	+/- (L - H)
		Uraian Indikator	Target	Satuan			Uraian Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Berperan di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan**	**100**	**Persen**	**1.102.029.000**	**1.102.029.000**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan**	**100**	**Persen**	**1.172.277.000**		**70.248.000**
2.13.05.2.01.0002	Sasaran Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2	Dokumen	177.827.000	177.827.000	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2	Dokumen	175.043.000	Perubahan/pergeseran rekening belanja dan penggunaan pagu untuk sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (pembelian dispensasi)	2.784.000
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	Lembaga	327.136.000	327.136.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	Lembaga	337.136.000	Peningkatan Kapasitas LKK Karang Taruna	10.000.000
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	75.000.000	75.000.000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	67.500.000	Perpanjangan pagu untuk kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	- 7.500.000
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Balai Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Balai Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	Laporan	52.500.000	52.500.000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Balai Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	Laporan	46.992.000	Perpanjangan pagu untuk sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (pembelian dispensasi)	- 5.508.000

Kode	Sotker , Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Penetapan			Penetapan APBD	Perubahan Penjabaran I	Indikator Perubahan			Perubahan RKPD	Keterangan	+/- (L - H)
		Uraian Indikator	Target	Satuan			Uraian Indikator	Target	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.05.2.01.000 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	Laporan	465.566.000	465.566.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	Laporan	345.666.000	Penambahan prgo untuk Perjalanan dinas luar daerah kegiatan PKK Cup dan kegiatan rakor TP PKK se Kota Pekalongan	96.100.000
	Jumlah				3.864.179.000	6.554.179.000				6.815.562.180		250.763.000

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Perangkat Daerah DPMPPA Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan penanggulangan bencana yang diemban oleh DPMPPA Kota Pekalongan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Perubahan Renja Perangkat Daerah DPMPPA Kota Pekalongan. Semoga Perubahan Renja Perangkat Daerah DPMPPA Kota Pekalongan tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait. Sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan

PUJI WINARTI, SKM, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP 19700502 199501 2 001

DOKUMEN RENJA PERUBAHAN 2024

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/ Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD).

Secara hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Dinas Perhubungan Kota Pekalongan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 202**3** menyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan tahun 202**4**. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 202**4**, merupakan Rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota Pekalongan dalam urusan Perhubungan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pekalongan tahun 202**4** dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan pada tahun 202**3**.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud kegiatan penyusunan Renja adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 202**4**. Adapun tujuan kegiatan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan adalah;

1. Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga serasi dan selaras sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026, baik dalam kebijaksanaan umum maupun strategi.
2. Untuk mengetahui/mengevaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
3. Untuk menentukan tindakan/langkah yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang diinginkan yang memuat visi, misi Kota Pekalongan serta sebagai pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil dari pelaksanaan yang dilakukan secara sistematis dan kesinambungan.

1.3. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses Rencana Kerja, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan mendefenisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja.

Pada dokumen Rencana Kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (*benchmark*) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang

dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Terdapat 2 (dua) program yang menjadi urusan wajib Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dalam mewujudkan visi Dinas Perhubungan yakni **"*Terwujudnya Profesionalisme dalam Pelayanan dan Pengembangan Sistem Transportasi yang Lancar, Aman dan Efektif*"**, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Tahun 2024 merupakan ketiga pada periode Renstra Dinas Perhubungan Kota Pekalongan 2021-2026 dan mendasar hasil evaluasi RKPD tahun 2024 yang telah dilaksanakan, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan sudah melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan capaian sebagai berikut:
Secara umum realisasi capaian program dan kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat realisasi capaian Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Terdapat Program/Kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan;
3. Terdapat Program/Kegiatan yang sesuai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi capaian Program/Kegiatan tahun 2024 secara lebih rinci akan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perubahan RPJMD 2021)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
					Target 2023	Realisasi 2023			
Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota (IKK Outcome)	ratio	0.44	0,40	0.39	0,44	0,44	0,44		Tercapai
Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	persen	94	100,00	124,7	92	164,69	164,69		Melampaui
Persentase Peningkatan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang Melaksanakan Uji Berkala	persen	0,76	0,76	(4,90)	0,75	(9,90)	(9,90)		Belum Tercapai
Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	persen	100	100	100	100	100	100		Tercapai
Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	100	100	100		Tercapai
Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100	100	100	100	100	100		Tercapai

Indikator persentase ketersediaan laporan capaian kinerja, persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, serta persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah telah mencapai target sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pencapaian ini didukung oleh sumber daya manusia Dinas Perhubungan yang kompeten dan bertekad untuk menyelesaikan program/kegiatan sesuai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2024 tidak ada kegiatan pengadaan barang milik daerah.

Diketahui dari tabel di atas, indikator kinerja lalu lintas kabupaten/kota telah melampaui target, dimana V/C Ratio semakin kecil atau mendekati angka 0 (nol) maka suatu jalan semakin baik kinerja arus lalu lintasnya atau dianggap tidak terjadi kemacetan. Hasil perhitungan V/C Ratio jalan perkotaan di Kota Pekalongan sebesar 0,44 dari target yang ditetapkan sebesar 0,44. Dari hasil diatas maka tingkat kemacetan jalan perkotaan di Kota Pekalongan mencapai batas target yang artinya kondisi lalu lintas semakin meningkat dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, indikator persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji berkala dan persentase peningkatan fasilitas LLAJ belum mencapai target. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan barang untuk melakukan kewajiban uji berkala. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan barang, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan telah melakukan upaya mengingatkan uji berkala dengan via SMS Gateway kepada pemilik kendaraan bermotor dan melaksanakan operasi laik jalan. Pada tahun 2024 ini pelaksanaan uji berkala juga sudah tidak berbayar, dengan adanya Uji Kir gratis diharapkan jumlah kendaraan yang melaksanakan uji meningkat dari tahun sebelumnya.

Target capaian kinerja yang sudah tercantum dalam dokumen Renstra menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perhubungan yaitu meski masih ada masalah dalam pencapai target tersebut ini dikarenakan beberapa faktor dan salah satunya adanya pengurangan atau rasionalisasi dari anggaran yang telah di tetapkan dalam RKPD sebelumnya. Dengan adanya rasionalisasi target yang semula tercantum tinggi tidak diturunkan seiring dengan adanya pengurangan anggaran. Dan ini menyebabkan capaian realisasi pada sebagian kegiatan tidak bisa mencapai target.

Dari hasil evaluasi tersebut, maka perlu memperhatikan faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut, di antaranya:

a. Penetapan indikator keluaran kegiatan pada tahap perencanaan agar lebih cermat lagi, sehingga bisa benar-benar mewakili output dari kegiatan dan bisa tercapai dengan baik;

b. Renja perubahan diperlukan untuk mengantisipasi perubahan beberapa kondisi atau kebijakan yang perlu ditindaklanjuti, sehingga kinerja kegiatan bisa mencapai 100%;

c. Penetapan kinerja kegiatan agar memperhatikan hasil capaian kinerja tahun lalu sehingga pencapaian yang terlalu tinggi (melebihi 100%) dan terlalu rendah (dibawah 90%) dapat dihindari.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Realisasi pencapaian IKK (Indikator Kinerja Kunci) Dinas Perhubungan selama periode Renstra Kota Pekalongan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel T-C.30 berikut ini.

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Kota Pekalongan

No.	Indikator Program/Kegiatan	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Tahun 2022	Tahun 2023 (S.d. Tw II)	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	**Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota (IKK Outcome)**			0.52	0.44	0.44	0.44	0.39	0	0.44	0.44	
1	Persentase pelaksanaan kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah pembinaan dan pengawasan kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			180	180	180	180	180	90	180	180	
3	Persentase pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan			89	89	90	92	127,3	40	92	92	
4	Persentase pelaksanaan kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)			83	83	83	83	100	0	83	83	
5	Jumlah kegiatan Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ yang dilaksanakan			2	2	2	2	2	0	2	2	
6	Jumlah jenis angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang difasilitasi			1	3	3	3	1	0	3	3	

Untuk indikator IKK (Indikator Kinerja Kunci) Dinas Perhubungan sudah melampaui target yang ditentukan, yaitu dengan capaian V/C ratio sebesar 0,39. Hal ini menandakan bahwa masalah kemacetan di Kota Pekalongan sudah ditangani dengan baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan pendanaan yang berdampak terhadap pagu anggaran yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan:
2. Kebijakan kebijakan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tidak tetap sehingga adanya penyesuaian terhadap pelaksanaan dari pada kebijakan kebijakan yang ada berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Kegiatan prioritas yang tidak masuk pada usulan untuk tahun berikutnya namun harus dilaksanakan pada tahun ini dimana kegiatan kegiatan tersebut untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan.

Isu isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekalongan ke depan yaitu :

1. Tingginya hambatan samping di jalan yang mengurangi kapasitas jalan;
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum;
3. Kurang optimalnya ketertiban lalu lintas dan pengelolaan parkir di kawasan strategis;
4. Belum optimalnya pemenuhan perlengkapan jalan (Marka, Rambu, Guardrail, RPPJ, Barrier, Lampu PJU) dikarenakan Keterbatasan APBD Kota Pekalongan;
5. Adanya tumpang tindih kewenangan dikarenakan dilokasi rencana pembangunan Terminal Tipe C tersebut juga dilewati trayek Angkutan AKDP;
6. Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasar pada hasil rancangan awal RKPD 2024 terdapat beberapa kebutuhan yang perlu ditambahkan agar memenuhi kinerja pelayanan transportasi perkotaan secara maksimal. Berikut sub kegiatan yang berubah diantaranya :

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik meningkat dari Rp. 15.000.000.000 menjadi Rp. 15.481.570.000, hal ini meningkat karena adanya penambahan unit kendaraan dinas.

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Rp. 3.899.777.000 menjadi Rp. 4.017.777.000 meningkat guna pemeliharaan Prasarana Jalan.

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota sebesar Rp. 40.000.000 menjadi Rp. 20.000.000.

Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota Pekalongan
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuha Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah ddokumrn yang disusun	2 dokumen	2.494.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah ddokumrn yang disusun	2 dokumen	2.494.000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.763.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.763.000	
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	12.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	12.000.000	
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.540.661.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.351.706.000	
5.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	92.985.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	92.985.000	
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.634.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.634.000	
7.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	32.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	32.000.000	
8.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	145.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	145.500.000	
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	7.000.000	
10.	Penyediaan Peralatan	Kota	Jumlah Paket Peralatan dan	4 Paket	70.000.000	Penyediaan Peralatan	Kota	Jumlah Paket	4 Paket	70.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuha Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Perlengkapan Kantor	Pekalongan	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			dan Perlengkapan Kantor	Pekalongan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
11.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	12.881.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	12.881.000	
12.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	315.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	350.000.000	
13.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan	12 bulan 12 bulan	153.200.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan	12 bulan 12 bulan	153.200.000	
14.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2.500.000	
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	94.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	117.900.000	
16.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1.800.000	
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	15.000.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	15.481.570.000	
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	350.228.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	350.228.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuha Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 unit	349.066.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 unit	374.218.000	
20.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	85.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	85.000.000	
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 unit	58.925.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 unit	58.925.000	
22.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	31.800.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	31.800.000	
23.	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Lebaran, Natal, dan Tahun Baru yang dilaksanakan Jumlah perlintasan sebidang yang difasilitasi	38 Dokumen	2.973.280.000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Lebaran, Natal, dan Tahun Baru yang dilaksanakan Jumlah perlintasan sebidang yang difasilitasi	38 Dokumen	2.973.280.000	
24.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	67 unit	335.735.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	67 unit	335.735.000	
25.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 unit	270.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 unit	270.000.000	
26.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kota Pekalongan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	847unit	3.899.777.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kota Pekalongan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi	847unit	4.017.777.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuha Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Prasarana Jalan					Prasarana Jalan		dan Terpelihara			
27.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Pekalongan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	60 unit	274.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Pekalongan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	60 unit	274.000.000	
28.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Pekalongan	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 unit	45.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Pekalongan	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 unit	45.000.000	
29.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3 laporan	325.850.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3 laporan	325.850.000	
30.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	5 unit	20.880.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	5 unit	20.880.000	
31.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3855 Dokumen	99.380.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3855 Dokumen	99.380.000	
32.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	102.184.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	102.184.000	
33.	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 laporan	10.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 laporan	10.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuha Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 laporan	474.559.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 laporan	474.559.000	
35.	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 dokumen	117.253.000	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 dokumen	117.253.000	
36.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Forum LLAJ	3 kali	25.000.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Forum LLAJ	3 kali	25.000.000	
37.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 laporan	15.750.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 laporan	15.750.000	
38.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 laporan	18.500.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 laporan	18.500.000	
39.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Pekalongan	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 laporan	9.400.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Pekalongan	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 laporan	9.400.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuha Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	10.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	10.000.000	
41.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	15.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	15.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berikut hasil dari musrenbang Kota Pekalongan tahun 2024 terdapat beberapa pokir yang diberikan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekalongan diantaranya disajikan tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel T-C.32.
Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pekalongan
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Pengadaan Penerangan Jalan Perum omah alit RT 7 RW 8 Klego	- 6 titik - Rp.38.350.000	Pokir 2024
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Pengadaan Penerangan Jalan RT 2 RW 7 Tegalrejo	- 10 titik - Rp.47.950.000	Pokir 2024
3	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum di RT 01 RT 03 RW 04 Jl Ki Ageng Kel Jenggot	- 20 unit - Rp.95.725.000	Pokir 2024
4	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum gg 15 Landungsari Kel. Noyontaansari Kec. Pekalongan timur	- 3 titik stang lampu 30 W dan 2 titik tiang PJU 6 meter - Rp.18.900.000	Pokir 2024
5	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum Yosorejo. Kel Kuripan Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan	- 5 titik lampu - Rp.24.300.000	Pokir 2024

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan. Berdasarkan Renstra tersebut ditetapkanlah Visi yang merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun Visi Kementerian Perhubungan adalah :

> "Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Perhubungan Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah"

Penjelasan dari Visi ini yaitu :

1. Pelayanan Perhubungan yang handal, yaitu penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Pelayanan Perhubungan yang berdaya saing, yaitu penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.
3. Pelayanan Perhubungan yang memberikan nilai tambah, yaitu penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititik beratkan kepada penambahahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan. Selain itu, dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi ditengah kondisi keuangan negara yang masih diliputi krisis keuangan global, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di

bidang keselamatan keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

2. Melaksanakan Konsolidasi melalui Restrukturisasi dan Reformasi di Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan. Melalui restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi semakin memperjelas peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Perhubungan Yang Handal dan Memberikan Nilai Tambah. Pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan memberikan arahan bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) didalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perhubungan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pekalongan di Bidang Perhubungan, yaitu :

1. Peran Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dalam upaya penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), membenahi sistem keselamatan dan keamanan, penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan, peningkatan kualitas SDM transportasi, serta pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Pembenahan regulasi dan mengoptimalkan Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi di Kota Pekalongan.
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi dengan melakukan penataan moda transportasi Darat dan Sungai, serta jenis dan mekanisme transportasi di Kota Pekalongan.
4. Peningkatan kinerja pelayanan berupa Peningkatan dan penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif, yang dapat memberikan 70 pelayanan optimal bagi masyarakat sehingga tercipta kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang di Kota Pekalongan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam program dan kegiatannya mendukung misi Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah, meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi, dimana sesuai dengan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yaitu prosentase layanan jaringan distribusi transportasi orang dan atau barang, prosentase ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi dan prosentase kenyamanan dan kehandalan angkutan umum. dengan sasaran jangka menengah adalah:

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasaranatransportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antarwilayah;
3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana.

Rancangan Pergub Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2025 transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi;

1. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan danreformasi regulasi;
2. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor faktor kunci keberhasilan adalah unsur-unsur dari suatu organisasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi organiasi. Faktor faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan strategis. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi.

   Arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius			
MISI IV : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Meningkatkan Layanan Transportasi Perkotaan	Meningkatkan Layanan Transportasi Perkotaan	Pemenuhan dan pengoptimalan Sarana dan Prasrana Perhubungan
			Peningkatan capaian Kinerja Lalu lintas
			Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala
MISI VII : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Governance			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Meningkatan kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Mutu dan Kualitas Laporan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan
			Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Dinas Perhubungan
			Peningkatan Mutu dan Kualitas pengadaan/ pemeliharaan Barang Milik Daerah

a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan,antara lain meliputi:
   1) Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan.
   2) Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumberpendanaannya.

b. Dasar dalam menetapkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan tentunya berdasarkan telaahan dan analisa dari Visi, Misi Walikota serta telaahan dari Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra dari Dinas Perhubungan. Dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terjadi penyesuaian untuk penyelarasan kinerja pada tahun 2024. Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut :

   Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keuangan
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
   4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
      - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) :

1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
   - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
   - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
   - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
   - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
   - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
   - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
3) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
   - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
   - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
4) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
5) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
6) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
   - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
   - Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
   - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
7) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
8) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
   - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ
   - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
   - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
9) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing – masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih.

Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perhubungan masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan

program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Renja Dinas Perhubungan.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan merupakan tahapan akhir yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Dinas Perhubungan yang definitif dan merupakan tanggung jawab masing – masing kepala Dinas Perhubungan yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan akhir Dinas Perhubungan, untuk itu masing – masing Dinas Perhubungan perlu membentuk tim penyusun Renja Dinas Perhubungan yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Renja Dinas Perhubungan sampai dengan penyusunan RKA – SKPD. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir Dinas Perhubungan.

Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan akhir Dinas Perhubungan, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, evaluasi pelaksanaan Renja Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Pekalongan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

Penyusunan Renja SKPD sebagaimana diatur dalam PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010 memiliki beberapa tahapan, antara lain :

1. Persiapan penyusunan Renja Dinas Perhubungan;
2. Penyusunan RENJA Dinas Perhubungan;
3. Pelaksanaan Forum Dinas Perhubungan; dan
4. Penetapan Renja Dinas Perhubungan.

Persiapan penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud diatas, meliputi :

1. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renja SKPD;
2. Orientasi mengenai Renja Dinas Perhubungan;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renja Dinas Perhubungan; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan disusun :

1. Mengacu pada rancanagan akhir Dinas Perhubungan;
2. Mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan;
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelakasanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
5. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Perhubungan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja Dinas Perhubungan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Jumlah Anggaran dalam Renja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2024, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan tahun 2024, terdapat 2 Program Rutin dan Non-Rutin yaitu 14 Kegiatan 41 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 31.020.652.000,00

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2024 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024 yang tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD.

Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pekalongan

M. RESTU HIDAYAT, S.SiT, M.T
NIP. 19750305 199803 1 005

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN RENJA OPD)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN

2024

Jl. Majapahit Nomor 5 pekalongan 51111
Telepon (0285) 421243 / 420223 fax (0285) 421243
email : diskominfo@pekalongankota.go.id
email : diskominfo@gafe.pekalongankota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Usulan perubahan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan penyusunan yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dan menyangkut keberhasilan dan pencapaian target yang telah dituangkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021 RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 ini, kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2024.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Pekalongan

ARIFKARYADI, S.Sos

NIP. 19711017 199903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

A. Latar Belakang 4

B. Landasan Hukum 5

C. Maksud dan Tujuan 5

D. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 ... 7

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dan capaian renstra 7

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 13

D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 49

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 50

A. Rencana Kerja 50

B. Pendanaan Perangkat Daerah 50

BAB IV PENUTUP 57

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024 ditetapkan melalui Peraturan Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024. Seiring dengan dinamika pembangunan yang terjadi, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan. Selain itu, perubahan kebijakan juga disebabkan oleh perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dari sisi perencanaan pembangunan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana dijelaskan bahwa RKPD dapat diubah apabila tidak sesuai dengan keadaan dalam tahun berjalan yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dengan pertimbangan diatas, serta memperhatikan kondisi hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2024, dan kondisi kapasitas kemampuan pendanaan yang bergeser dari target yang ditetapkan, menyebabkan diperlukannya perubahan/penyesuaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 agar target dan sasaran pembangunan tetap dapat dicapai demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pekalongan adalah :

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kode Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022.
2. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, RKPD Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan KUA PPAS untuk menyusun APBD Tahun 2022.
3. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan yang pemberlakuannya mulai tanggal 24 November 2021

C. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2024 ini disusun dengan tujuan untuk menjaga konsistensi Rencana Pembangunan Daerah dengan anggaran pembangunan daerah yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar

dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

D. Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

a) Latar Belakang
b) Landasan Hukum
c) Maksud dan Tujuan
d) Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II tahun 2024

a) Evaluasi Pelaksana Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
b) Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
c) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
d) Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dan capaian renstra

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo Kota Pekalongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinkominfo Pekalongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinkominfo Kota Pekalongan selama tahun 2024.

Pengukuran kinerja kegiatan/sub kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2024 Dinkominfo Kota Pekalongan sebesar Rp. 14.153.348.000,-, termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN dengan melaksanakan 4 urusan pemerintahan, 5 program, 12 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 6.485.929.223,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 45,83%.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu 2024, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2024 pada Dinkominfo Kota Pekalongan dari 3 urusan yaitu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK, URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN yang dilaksanakan dengan 5 program, 12 kegiatan dan 43 sub kegiatan.

Adapun evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 hasil/ keluaran program/kegiatan/ sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Pada pelaksanaan Renja Dinkominfo Kota Pekalongan s.d triwulan II tahun 2024 belum ada yang mencapai 100% dikarenakan kegiatan tersebut masih berlangsung.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Pada Renja Dinkominfo Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II 2024 terdapat 7 indikator program yang belum tercapai, hal ini dikarenakan kegiatan tersebut sedang berjalan sampai dengan akhir tahun.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Pada Renja Dinkominfo Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II 2024 terdapat 1 sub kegiatan yang melebihi target capaian kinerja yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan target Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Daerah sebanyak 100 % terealisasi sebanyak 114,84%
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

   Faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program/kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah dikarenakan program/kegiatan tersebut masih berlangsung.

Rencana Kerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan merupakan awal RPJMD Tahun 2021-2026, di Tahun 2024 Dinas Kominfo mengampu 2 indikator Utama Kota dan 7 Indikator Renstra. Dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun ini Dinas Kominfo mempunyai 7 target indikator program dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

1. Ada 4 Indikator Renstra yang belum tercapai di tahun 2024 ini dikarenakan evaluasi capaian sehingga sd saat ini masih NA artinya nol tanpa angka, diantaranya :
    - Indeks SPBE capaian masih NA
    - Laju pemanfaatan data statistik sektoral masih NA
    - Nilai Keterbukaan informasi publik (KIP) tingkat Kota masih NA
    - Indeks Keamanan Informasi (KAMI) masih NA
2. Ada 1 Indikator program yang capaiannya melebihi target , yakni :
    - Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai 88.39 dari target yang dipasang 81.54

Untuk melihat capaian kinerja baik secara terperinci tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo
dan Pencapaian Renja s/d triwulan II tahun 2024
Kota Pekalongan

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD s.d 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW. II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	n/a	100	100	29,45	29,45	Belum tercapai	29,45	29,45	Belum tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	n/a	91,56	100	10,37	10,37	Belum tercapai	10,37	10,37	Belum tercapai
3	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	n/a	100	100	10,33	10,33	Belum tercapai	10,33	10,33	Belum tercapai
4	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	Persen	100	n/a	100	100	95,00	95,00	Belum tercapai	95,00	95,00	Belum tercapai
5	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	3.30	n/a	2.75	3.10	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data

Capaian indeks Aspek teknologi informasi dan komunikasi memang belum mencapai target (nilai baru akan rilis di bulan November/desember) tahun 2024, untuk itu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aspek TIK:

- melakukan koordinasi dalam pembangunan aplikasi SPBE pada unit kerja/OPD sebelum melakukan pembangunan aplikasi
- memperkuat pelayanan pusat data pemerintah daerah.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2024, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaran pemerintah dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan beberapa aspek/ fokus sebagai berikut:

1. Optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kota Pekalongan

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW. II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tingkat kota	Skor	97,50	93.00	96,62	95,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82.04	80.79	95.95	81.54	88.39 (smt I)	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
3	Indeks SPBE	Indeks	3.25	2.82	111.53	3.05	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
4	Laju pemanfaatan data statistik sektoral	Persen	80	66	1,795.42	50.00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
6	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	II	I	2.00	3.00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Seperti proses kerja Perencanaan melalui beberapa tahap dari Musrenbang, Usulan dan proses sidang di Komisi dan Sidang di Badan Anggaran dengan berlakunya Perwal ASB Analisis Standar Belanja maka perlakuan penyusunan RAB juga disesuaikan seperti beberapa rekomendasi di Desk Renja Triwulan IV Tahun 2023 sebagai berikut :

a. indikator mengacu pada renstra dan pagu anggaran menjabarkan penyesuaiannya
b. Pencapaian indeks SPBE Kota Pekalongan sesuai dengan target yang telah ditentukan
c. Anggaran untuk pembangunan konektivitas data (jaringan) Fiber Optic (FO) yang pada tahun 2024 tidak dianggarkan dikarenakan adanya pengurangan anggaran.
d. Penerapan Manajemen SPBE
e. Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi
f. Transisi Pengelolaan Program Smart City (Belum didukung anggaran pada RAPBD-P 2024 pada sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas)
g. Pengadaan perangkat keamanan jaringan beruba firewall untuk sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah yang belum dianggarkan yang dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran APBD 2024.

Tabel 2.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Dinas Komunikasi dan Informatika							13.772.932.000,00	14.198.348.000,00	14.173.704.000,00							12.755.586.000,00
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.772.932.000,00	14.198.348.000,00	14.173.704.000,00							12.755.586.000,00

	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						13.504.752.000,00	13.930.168.000,00	13.905.524.000,00								12.476.818.000,00
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah				100,00 persen	100,00 persen	5.563.081.000,00	5.669.309.000,00	5.569.665.000,00								4.862.377.000,00
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 persen	100 persen	16.257.000,00	16.257.000,00	16.257.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		35.750.000,00
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.494.000,00	2.494.000,00	2.494.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.750.000,00
	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.763.000,00	1.763.000,00	1.763.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000,00

																	an Publik				
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	15 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			23.500.000,00
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 persen	100 persen	3.948.449.000,00	4.032.647.000,00	4.032.647.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfo	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		3.330.860.000,00

																	rmasi Pelayanan Publik				
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/ bulan	30 Orang/ bulan	3.897.775.000,00	3.981.973.000,00	3.882.329.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.269.360.000,00
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi				12 Dokumen	12 Dokumen	49.040.000,00	49.040.000,00	49.040.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas			60.000.000,00

							Keuangan SKPD									Barat, Podosugih	Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	manajemen ASN			
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000,00

	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 persen	100 persen	67.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		10.700.000,00
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.700.000,00

	2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	62.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0,00
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	-			100 persen	100 persen	434.989.000,00	434.989.000,00	434.989.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		465.937.000,00

																	an Publik				
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	4.087.000,00	4.087.000,00	4.087.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.600.000,00

	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	4 Paket	149.176.000,00	149.176.000,00	142.553.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			118.000.000,00
	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	3.750.000,00	3.750.000,00	10.373.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.000.000,00

																Umum	Pelayanan Publik				
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	111.176.000,00	111.176.000,00	111.176.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			120.500.000,00
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa				12 Paket	2 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	Dana Transfer Umum-Dana Aloka	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas			46.800.000,00

							n yang Disediakan									Podosugih	si Umum	Transformasi Pelayanan Publik	manajemen ASN			
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2 Dokumen	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			15.690.000,00
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi				120 Laporan	120 Laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	124.700.000,00	Kota Pekalongan, Pekal	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukh	12. Peningkatan kapasitas dan			149.347.000,00

							dan Konsultasi SKPD									ongan Barat, Podosugih	Dana Alokasi Umum	ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kualitas manajemen ASN			
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	100 persen	662.576.000,00	668.396.000,00	668.396.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		564.700.000,00
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan				12 Laporan	4 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Pekalongan,	Dana Transfer Umu	Memperkuat Stabilitas	12. Peningkatan kapasitas			2.700.000,00

							Jasa Surat Menyurat									Pekalongan Barat, Podosugih	m-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	dan kualitas manajemen ASN			
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	526.560.000,00	526.560.000,00	511.860.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			455.000.000,00
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	133.616.000,00	139.436.000,00	139.436.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			107.000.000,00
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	100 persen	433.810.000,00	445.020.000,00	445.020.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas kominfo		454.430.000,00

	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit	24 Unit	189.600.000,00	200.810.000,00	200.810.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			210.000.000,00
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			112.000.000,00

																	an Publik				
	2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				75 Unit	75 Unit	169.210.000,00	169.210.000,00	169.210.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			132.430.000,00
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik				100 persen	100 persen	5.232.036.000,00	5.432.210.000,00	5.482.210.000,00							4.971.618.000,00

	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Daerah	-			87 persen	87 persen	5.232.036.000,00	5.432.210.000,00	5.432.210.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Masyarakat dan ASN		4.971.618.000,00
	2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																
							Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	40.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			75.000.000,00

	2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				12 Dokumen	14 Dokumen	145.500.000,00	145.500.000,00	145.500.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			25.000.000,00
	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	122.884.000,00	127.796.000,00	127.796.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			126.000.000,00

																	an Publik				
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				8 Dokumen	8 Dokumen	2.991.014.000,00	3.021.544.000,00	3.086.544.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.002.568.000,00

	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				6 Dokumen	6 Dokumen	204.697.000,00	208.189.000,00	208.189.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			387.000.000,00
	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media															
							Jumlah Layanan Hubungan Media				2 Layanan	2 Layanan	1.112.854.000,00	1.317.510.000,00	1.317.510.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			930.000.000,00

																	an Publik				
	2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan															
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			33.300.000,00
	2	16	02	2.01	0009	Manajemen Komunikasi Krisis															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis				12 Dokumen	12 Dokumen	439.928.000,00	396.512.000,00	396.512.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfo	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			366.250.000,00

																Podosugih	Umum	rmasi Pelayanan Publik			
	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas															
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				12 Dokumen	1 Dokumen	115.159.000,00	115.159.000,00	115.159.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			26.500.000,00
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Aspek Teknologi Informasi				3,10 indeks	3,10 indeks	2.709.635.000,00	2.828.649.000,00	2.853.649.000,00						2.642.823.000,00

							dan Komunikasi														
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kerja yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo (IKK Output)	-			62.42 persen	62.42 persen	1.579.749.000,00	1.685.845.000,00	1.685.845.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN dan Masyarakat		1.681.598.000,00
	2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Subdomain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	Dana Transfer Umum-Dana Aloka	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas			10.000.000,00

							Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									Podosugih	si Umum	Transformasi Pelayanan Publik	manajemen ASN			
	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																
							Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				3 Unit	181 Unit	1.574.499.000,00	1.680.595.000,00	1.705.595.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.671.598.000,00
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup	Persentase sistem elektronik	-			9.35 persen	9.35 persen	1.129.886.000,00	1.142.804.000,00	1.142.804.000,00			Memperkuat Stabilita	12. Peningkatan	Pemerintah Kota		961.225.000,00

						Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (IKK Output)											s Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Pekalongan		
	2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik															
							Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				3 Dokumen	3 Dokumen	250.020.000,00	250.020.000,00	250.020.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			100.000.000,00

																ongan , Pekal ongan Barat, Podos ugih					
	2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah															
							Jumlah Pusat Data Pemerintah an Daerah yang Dikelola				2 Unit	2 Unit	154.420 .000,00	154.420 .000,00	154.4 20.00 0,00	Kota Pekal ongan , Pekal ongan Barat, Podos ugih	Dana Transf er Umu m-Dana Aloka si Umu m	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfo rmasi Pelayan an Publik	12. Peningkat an kapasitas dan kualitas manajem en ASN			144.000 .000,00
	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik															

							Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				3 Unit	3 Unit	368.682.000,00	381.600.000,00	381.600.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			449.725.000,00
	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas																
							Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	1 Dokumen	297.214.000,00	297.214.000,00	297.214.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			185.000.000,00

	2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah															
							Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	32.066.000,00	32.066.000,00	32.066.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			45.000.000,00
	2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE															
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				1 Dokumen	1 Dokumen	27.484.000,00	27.484.000,00	27.484.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	Dana Transfer Umum-Dana Aloka	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas			37.500.000,00

							Penyelenggaraan SPBE									Podosugih	si Umum	Transformasi Pelayanan Publik	manajemen ASN			
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						115.500.000,00	115.500.000,00	115.500.000,00							107.494.000,00
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral				100,00 persen	100,00 persen	115.500.000,00	115.500.000,00	115.500.000,00							107.494.000,00
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Jumlah dokumen data statistik sektoral	-			2 dokumen	2 dokumen	115.500.000,00	115.500.000,00	115.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas	ASN dan Masyarakat		107.494.000,00

						Kabupaten/Kota	yang disusun											Dan Transformasi Pelayanan Publik	manajemen ASN			
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral															
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				8 Dokumen	10 Dokumen	115.500.000,00	115.500.000,00	115.500.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			107.494.000,00

	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							152.680.000,00	152.680.000,00	152.680.000,00							171.274.000,00
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan				2,80 persen	2,80 persen	152.680.000,00	152.680.000,00	152.680.000,00							171.274.000,00
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik	-			9.35 persen	9.35 persen	113.365.000,00	113.365.000,00	113.365.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	ASN ASN dan Masyarakat		141.274.000,00
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																

							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan				2 Laporan	2 Laporan	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			15.000.000,00
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis				4 Laporan	4 Laporan	72.870.000,00	72.870.000,00	72.870.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayan	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000,00

							Elektronik dan Non Elektronik											an Publik					
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	29.245.000,00	29.245.000,00	29.245.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			96.274.000,00
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelancaran pengiriman dan penerimaan naskah dinas melalui	-			100 persen	100 persen	39.315.000,00	39.315.000,00	39.315.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transfo	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinas Kominfo		30.000.000,00

							jaring komunikasi sandi										rmasi Pelayanan Publik				
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	39.315.000,00	39.315.000,00	39.315.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			30.000.000,00
	JUMLAH												13.772.932.000,00	14.198.348.000,00	14.173.704.000,00						12.755.586.000,00

D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

Tabel T.C.32

Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kota Pekalongan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Rencana Kerja

Didalam rumusan rencana program kegiatan bagi OPD tahun 2024 dan prakiraan maju 2025 Sebagai bahan evaluasi terdapat target (sesuai jenis sasaran dengan target indikator yang ingin dicapai), di masing-masing kegiatan terdapat keluaran dan Hasil. Adapun kegiatan yang mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke 2024 dikarenakan kenaikan tarif tahunan dan standarisasi, selain itu juga kenaikan atau penurunan yang menurut evaluasi indikator diantara sub kegiatan sama dipadukan dan dihitung ulang mengalami penurunan yang semula menyebar menjadi satu pelaksanaan di salah satu sub kegiatan juga dari memonitor viewer yang kurang untuk dihapus dan mengambil viewer memuat berita pemerintahan Kota Pekalongan.

B. Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan prioritas di Dinas Kominfo Kota Pekalongan tahun 2024. Perubahan Kebutuhan pendanaan pada Dinas Kominfo Kota Pekalongan untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Daftar Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Perubahan	Sumber Dana
1	2		3	4
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp14.198.348.000	14.173.704.000	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Perubahan	Sumber Dana
1	2		3	4
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Rp5.669.309.000**	**5.569.665.000**	**DAU**
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp16.257.000**	**16.257.000**	**DAU**
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp2.494.000	2.494.000	DAU
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp1.763.000	1.763.000	DAU
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp12.000.000	12.000.000	DAU
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp4.032.647.000**	**3.933.003.000**	**DAU**
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.981.973.000	3.882.329.000	DAU
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp49.040.000	49.040.000	DAU
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp1.634.000	1.634.000	DAU
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp72.000.000**	**72.000.000**	**DAU**
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp5.000.000	5.000.000	DAU
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp67.000.000	67.000.000	DAU
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp434.989.000**	**449.689.000**	**DAU**
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp4.087.000	4.087.000	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Perubahan	Sumber Dana
1	2		3	4
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp149.176.000	142.553.000	DAU
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Rp3.750.000	10.373.000	DAU
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp111.176.000	111.176.000	DAU
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp40.000.000	40.000.000	DAU
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp16.800.000	16.800.000	DAU
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp110.000.000	124.700.000	DAU
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp668.396.000**	**653.696.000**	**DAU**
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp2.400.000	2.400.000	DAU
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 526.560.000	511.860.000	DAU
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp139.436.000	139.436.000	DAU
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp445.020.000**	**445.020.000**	**DAU**
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp200.810.000	200.810.000	DAU
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp75.000.000	75.000.000	DAU
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp169.210.000	169.210.000	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Perubahan	Sumber Dana
1	2		3	4
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**5.432.210.000**	**5.482.210.000**	**DAU**
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**5.432.210.000**	**5.482.210.000**	**DAU**
2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	55.000.000	40.000.000	DAU
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	145.500.000	145.500.000	DAU
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	127.796.000	127.796.000	DAU
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.021.544.000	3.086.544.000	DAU
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	208.189.000	208.189.000	DAU
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	1.317.510.000	1.317.510.000	DAU
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	45.000.000	45.000.000	DAU
2.16.02.2.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis	396.512.000	396.512.000	DAU
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	115.159.000	115.159.000	DAU
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**2.828.649.000**	**2.853.649.000**	**DAU**
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1.685.845.000**	**1.710.845.000**	**DAU**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Perubahan	Sumber Dana
1	2		3	4
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Subdomain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.250.000	5.250.000	DAU
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.680.595.000	1.705.595.000	DAU
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1.142.804.000**	**1.142.804.000**	**DAU**
2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	250.020.000	250.020.000	DAU
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	154.420.000	154.420.000	DAU
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	381.600.000	381.600.000	DAU
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	297.214.000	297.214.000	DAU
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	32.066.000	32.066.000	DAU
2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	27.484.000	27.484.000	DAU
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**115.500.000**	**115.500.000**	**DAU**
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**115.500.000**	**115.500.000**	**DAU**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Perubahan	Sumber Dana
1	2		3	4
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**115.500.000**	**115.500.000**	**DAU**
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	115.500.000	115.500.000	DAU
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**152.680.000**	**152.680.000**	**DAU**
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**152.680.000**	**152.680.000**	**DAU**
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**113.365.000**	**113.365.000**	**DAU**
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp11.250.000	11.250.000	DAU
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp72.870.000	72.870.000	DAU
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp29.245.000	29.245.000	DAU
2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**39.315.000**	**39.315.000**	**DAU**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Perubahan	Sumber Dana
1	2		3	4
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp39.315.000	39.315.000	DAU

BAB IV

PENUTUP

Laporan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2024 ini disusun untuk dijadikan sebagai dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah Kota Pekalongan, serta sebagai panduan dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kominfo Tahun 2024. Penyusunan Perubahan Renja 2024 dilakukan setelah mempelajari visi, misi, dan program Pemerintah Kota Pekalongan sebagai muatan dan masukan dalam penyusunan visi, misi, strategi, kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan dinas kominfo kota pekalongan satu tahun kedepan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan ini dapat menjadi acuan dan pedoman yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan peran serta dan partisipasi aktif dari semua stakeholder yang terkait serta menjadi dasar dan bahan untuk melakukan evaluasi dan guna penyusunan laporan pelaksanaan kinerja PD tahunan maupun lima tahunan.

Dengan demikian, diharapkan perubahan renja dinas kominfo tahun 2024 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan dinas kominfo kota pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan komunikasi dan informatika kota pekalongan di tahun mendatang.

Demikian Laporan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, Terima kasih.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pekalongan

PEMERINTAH KOTA ★ DINKOMINFO ★ PEKALONGAN

ARIF KARYADI, S.Sos
NIP. 19711017 199903 1 007

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekalongan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024

(0285) 432086
oss.pekalongankota.go.id
Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No. 1
Kota Pekalongan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat disusun tanpa ada halangan sesuatu apapun.

Perubahan Renja DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024, dalam rangka menjalankan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen renja ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP Kota Pekalongan yang disertai indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif. Selanjutnya, Perubahan Renja akan menjadi acuan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari Perubahan Renja DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2024 ini belum sempurna, sehingga masukan, saran dan koreksi semua pihak akan menjadi lebih baik untuk penyusunan renja pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2024 ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik agar dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKALONGAN

BENO HERITRIONO, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19650118 198903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra 8
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 10
2.4 Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 12
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 36
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 37
BAB V PENUTUP 41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Program DPMPTSP Kota Pekalongan sd Triwulan II Tahun 2024 9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Pekalongan 11
Tabel 2.3 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan 16
Tabel 2.4 Usulan Program/Kegiatan dari Pemangku Kepeningan Tahun 2023 Kota Pekalongan 36
Tabel 3.1 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Anggaran 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan pemerintah Kota Pekalongan, Kota Pekalongan mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal daerah.

Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah serta meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Kegiatan penanaman modal di daerah selama ini sangat berperan penting antara lain dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi guna mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Pekalongan yang semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui reformasi birokrasi dan regulasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Mendorong birokrasi yang efesien dan efektif dengan kemudahan pelayanan, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan dapat menjadikan Kota Pekalongan menjadi daerah yang menarik bagi penanaman modal sehingga tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Dalam konteks otonomi daerah atau desentralisasi, penanaman modal atau investasi menjadi salah satu fokus penting dan sudah menjadi tugas struktural dari setiap organisasi pemerintah daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan

pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Oleh karena itu peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan di bidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Berkaitan dengan pelayanan di bidang penanaman modal, agar Kota Pekalongan menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem *Online Single Submission Risk Base Approcah* (OSS RBA). Selain itu pemberian kepastian hukum dan keadilan dalam pelayanan berusaha juga harus diterapkan kepada semua calon investor

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah. Dalam rangka pelaksanaan amanat ketiga Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah salah satunya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. RKPD tersebut merupakan kompilasi atau gabungan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang ada dalam Pemerintah Daerah setempat.

UU Nomor 25 tahun 2004 pasal 7 mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu kepada RKPD, RENJA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Darah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Seiring dengan dinamika pembangunan yang terjadi, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan. Selain itu, perubahan kebijakan juga disebabkan oleh perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dari sisi perencanaan pembangunan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk Perubahan

RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana dijelaskan bahwa RKPD dapat diubah apabila tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

Dengan pertimbangan diatas, serta memperhatikan kondisi hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dan kondisi kapasitas kemampuan pendanaan yang bergeser dari target yang ditetapkan, menyebabkan diperlukannya perubahan/penyesuaian Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Tahun 2024 agar target dan sasaran pembangunan tetap dapat dicapai demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timor, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
15. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 dibuat dengan maksud sebagai pedoman penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024..

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja DPMPTSP adalah :

1. Penyesuaian anggaran kegiatan untuk memenuhi kebutuhan selama satu tahun sehingga anggaran lebih efisien, efektif, tepat sasaran, tepat waktu dan akuntabel;

2. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam rangka pencapaian Visi Misi Wali Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
3. Sebagai tolak ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang penanaman modal
4. Sebagai acuan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Berisi uraian mengenai :

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daeran sampai dengan Triwulan II dan capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

2.4 penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana kerja dan pendanaan indikatif perangkat daerah.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang diberi wewenang dan bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Pendelegasian kewenangan Kepada DPMPTSP meliputi :

1. Pelayanan Perizinan Berusaha, terdapat 8 jenis pelayanan meliputi konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikasi laik fungsi (SLF), nomor induk berusaha (NIB), sertifikasi standar dan izin
2. Pelayanan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha, jenis pelayanannya : pengolahan pangan industri rumah tangga (P-IRT), sertifikasi laik higiene sanitasi, sertifikasi sanitasi hotel, sertifikasi laik sehat, sertifikasi pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga (SPP-IRT), sertifikasi standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas pratama di RS Pemerintah, tanda daftar gudang, surat tanda pendaftaran waralaba, izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan, jenis layanan izin yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pelayanan perizinan non berusaha dan/atau persetujuan pemerintah; beberapa jenis pelayanannya yaitu sertifikat penyuluh keamanan pangan (SPKP), surat izin praktik dokter umum, surat izin praktik dokter gigi, surat izin praktik dokter spesialis, surat izin praktik keperawatan dll
4. Pelayanan non perizinan, pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada kepala DPMPTSP meliputi : kemudahan pelayanan antara lain penyederhanaan, fasilitas fiskal dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dan informasi antara lain penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal

Semua jenis pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak dipungut biaya, namun ada 3 (tiga) jenis izin yang dibebani izin retribusi daerah, yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Izin Trayek, dan Reklame yang dibayarkan kepada OPD Teknis. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selain memiliki potensi dan peluang, juga menghadapi kendala dan tantangan yang menjadi permasalahan di bidang Penanaman modal yang harus diatasi dalam upaya menciptakan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*). Hal ini diwujudkan dengan diperolehnya Standar ISO 9001 : 2015 untuk manajemen pelayanan secara menyeluruh. Masing- masing bidang mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) guna pelaksanaan tugas sehari-hari. Tekad dan komitmen semua pegawai DPMPTSP untuk melaksanakan pelayanan prima juga diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Ikrar Pelayanan Prima. Dengan kondisi lingkungan internal yang menjadi permasalahan utama yaitu :

1. Belum sepenuhnya dukungan produk hukum daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM aparatur yang ada.
3. Seiring dengan berkembangnya dunia usaha terdapat jenis izin yang belum dilimpahkan kewenanganya ke DPMPTSP.
4. Penerapan aturan pengadaan barang/jasa yang menerapkan e-katalog lokal, sedangkan penyedia lokal yang memenuhi syarat KBLI yang sesuai masih terbatas;
5. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dan rusak, sedangkan anggaran untuk perbaikan / pengadaan baru terbatas.

Menghadapi permasalahan / kendala dan tantangan yang menjadi isu strategis tersebut, dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka telah ditetapkan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2021–2026, yang memuat rumusan visi dan misi Perangkat Daerah, indikator kinerja utama organisasi, tujuan dan sasaran strategis, serta kebijakan yang akan ditempuh, yang dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan, dengan mengambil solusi sebagai berikut:

1. Perumusan pengkajian dan penyesuaian produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan.
2. Mengusulkan tambahan SDM PNS dan memaksimalkan PNS yang ada, serta mengikutsertakan Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
3. Melakukan optimalisasi anggaran agar sesuai dengan perencanaan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi digunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Hasil evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Program DPMPTSP Kota Pekalongan sd Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal (2021)	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian sd Triwulan II Tahun 2024	Status Ketercapaian terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12
Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal												
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal												
1	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Tercapai	4,00	66,67	Belum Tercapai
Program Promosi Penanaman Modal												
2	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	Belum Tercapai	-	0,00	Belum Tercapai
Program Pelayanan Penanaman Modal												
3	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	dokumen	2.500,00	2.500,00	3.847,00	2.500,00	2.554,00	102,16	Tercapai	2.554,00	102,16	Tercapai
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal												
4	Nilai Invetasi Baru pertahun	Miliar Rupiah	40,51	6,42	152,43	6,82	142,60	2.090,97	Tercapai	92,35	227,95	Tercapai
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal												

No	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal (2021)	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2024	Realisasi sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian sd Triwulan II Tahun 2024	Status Ketercapaian terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
5	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota												
6	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	40,00	40,00	Belum Tercapai	40,00	40,00	Belum Tercapai
7	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	35,87	35,87	Belum Tercapai	35,87	35,87	Belum Tercapai
8	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	80,96	80,96	Belum Tercapai	80,96	80,96	Belum Tercapai

1. Capaian indikator Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota tidak memenuhi target dikarenakan Penyusunan Peraturan terkait fasilitas/insentif di bidang penanaman modal sampai akhir tahun RPJMD direncanakan ada 6 dokumen. pada Tahun 2024 telah disusun Perda Nomor 2 Tahun 2024 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Tahun 2025 dan 2026 masing-masing direncanakan menyusun Perwal Turunan Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Perwal RUPM.
2. Capaian indikator Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota tidak memenuhi target dikarenakan kegiatan akan dilaksanakan pada TW 4, berupa keikutsertaan dalam pameran promosi penanaman modal.
3. Capaian indikator Nilai Invetasi Baru pertahun jauh melebihi target dikarenakan *berdasrakan hasil download di sistem OSS RBA melaluli Pelaporan LKPM Non UMK untuk sementara nilai realisasi investasi triwulan 2 tahun 2024 per 2 Juli 2024 sebesar 72.002.262.359. * karena untuk periode pelaporan LKPM di TW 2 tahun 2024 baru di buka tlg 1 sd 20 juli 2024. * sehingga kami cantumkan nilai sementara sambil menunggu Press Release Resmi dari Kementerian Investasi/ BKPM RI.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan dasar hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, untuk itu capaian kinerja pelayanan DPMPTSP dapat dilihat dari capaian nilai investasi.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	sd TW II Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana			200,277	204,282	208,367	212,534	152,43	637,82	142,604	208,367	212,534	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini DPMPTSP adalah :

a. Hasil Survey Daya Saing Daerah (SDSD) yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah terkait perkembangan ekonomi di daerah tertentu dalam dunia usaha dan investasi daerah.

   Faktor-faktor penilaian daya saing daerah yang mempengaruhi dunia usaha dan pengambilan keputusan investasi adalah :

   1. Kebijakan dan peraturan memulai usaha, perdagangan, pariwisata, dan sebagainya.
   2. Stabilitas ekonomi makro.
   3. Lingkungan investasi dan hukum (kepastian hukum, persaingan yang sehat).
   4. Kualitas dan biaya tenaga kerja.
   5. Ketersediaan dan kualitas layanan dasar infrastruktur, sarana prasarana, properti dan sebagainya.
   6. Iklim bisnis secara umum seperti keamanan, perilaku terhadap dunia usaha dan sebagainya.
   7. Fasilitas bisnis seperti insentif, biaya melaksanakan bisnis dan sebagainya.

   Dengan menggunakan analisa SWOT Pemerintah Kota Pekalongan dinilai dan berada pada urutan ke-6 di wilayah Bakorwil III Jawa Tengah dengan beberapa kelemahannya sebagai berikut :

   a) Kinerja Ekonomi
      1) Sangat rendahnya pertumbuhan PDRB
      2) Pertumbuhan kredit macet
      3) Rendahnya pertumbuhan PDRB per kapita
      4) Tingkat pengangguran
   b) Persepsi Iklim Bisnis

      Kinerja pemerintah dalam hal penyediaan regulasi yang tidak menghambat masih dianggap perlu ditingkatkan.
   c) Kinerja investasi

      Hampir semua indikator kinerja investasi berperforma rendah dibawah median Jawa Tengah, khususnya terkait dengan jumlah perusahaan yang berinvestasi, penyerapan volume investasi, tenaga kerja maupun rasio volume investasi dan alokasi anggaran promosi masih rendah.
   d) Kinerja Pemerintah

Dari sisi kualitas program dukungan pemerintah masih dinilai kurang memuaskan, rendahnya ketersediaan informasi potensi investasi dan prosentase alokasi anggaran promosi investasi.

e) Struktur

Rendahnya jumlah ketersediaan dan kualitas lembaga vokasi dan ketersediaan perbankan per 1000 penduduk penduduk.

f) Dinamika Bisnis

Rendahnya tingkat aplikasi kredit dan kebutuhan akan pendanaan eksternal.

b. Isu strategis yang kedua adalah terbitnya Perpres No.16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

1) Pemerintah menetapkan RUPM dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal.
2) RUPM merupakan amanat Pasal Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3) RUPM disusun dengan memperhatikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan Kementrian / Lembaga, Pemerintah Daerah, KADIN Akademisi, dunia usaha, asosiasi dan lain-lain.
4) RUPM adalah dokumen perencanaan jangka panjang sampai dengan 2025 yang bersifat Komplementer terhadap perencanaan sektoral sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait di bidang penanaman modal.
5) Pada Perpres nomor 16 tentang RUPM pasal 4 ayat (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RUPM mengacu pada RUPM Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota.

c). Pada tahun 2016 DPMPTSP Kota Pekalongan telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang diupayakan peningkatannya melalui kegiatan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan ISO 9001 : 2008, DPMPTSP menjadi satu-satunya PD di Kota Pekalongan yang telah berhasil memperoleh standar pelayanan mutu yang telah diakui oleh berbagai kalangan.

Namun penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal meskipun sudah berjalan dengan baik, masih sangat memerlukan upaya peningkatan dan mencari solusi permasalahan atau kendala pada saat pelaksanaan fungsi dan tugas DPMPTSP sehingga mempengaruhi penerbitan Izin yang melebihi

SOP. Permasalahan yang ada dan menjadi isu strategis pada urusan bidang penanaman modal adalah :

a. Belum optimalnya promosi potensi dan peluang investasi serta produk unggulan daerah yang mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kota Pekalongan.
b. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dan antar kelembagaan terkait dalam melakukan kegiatan promosi dan pengembangan penanaman modal dalam rangka meningkatkan realisasi investasi.
c. Pelayanan perizinan usaha yang belum sepenuhnya satu pintu, sehingga dapat memperlambat proses penanaman modal dan kemungkinan menjadikan ekonomi biaya tinggi.
d. Penerbitan Izin yang melebihi SOP, yang disebabkan belum optimalnya Aplikasi dan pengelolaan yang ada karena terbatasnya anggaran, kurangnya staf pemprosesan, Belum sepenuhnya SKPD teknis menyerahkan wewenangnya.
e. Masih rendahnya realisasi investasi di Kota Pekalongan, yang terlihat dari rendahnya perkembangan investasi.
f. Belum optimalnya fasilitasi, pembinaan dan pengendalian penanaman modal melalui pelaporan kegiatan penanaman modal.
b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung investasi untuk pengembangan penanaman modal.

Guna mengatasi berbagai permasalahan atau isu strategis yang dihadapi, DPMPTSP senantiasa bekerjasama dan meningkatkan koordinasi baik dengan Kemendagri, BKPM RI, BPMD Provinsi Jawa Tengah maupun dengan OPD teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Strategi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan di atas sesuai dengan tugas pokok DPMPTSP adalah :

a. Meningkatkan upaya promosi investasi / penanaman modal dan produk unggulan Kota Pekalongan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
b. Meningkatkan kerjasama dalam rangka promosi investasi dan pengembangan penanaman modal, baik pemerintah dan kalangan dunia usaha maupun dengan kelembagaan lainnya.
c. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan perizinan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang cepat dan memberi kepastian serta penyederhanaan prosedur perizinan.

d. Agar penerbitan izin tidak melebihi SOP, maka mengoptimalkan staf dan sarpras yang ada, melakukan administrasi penanggalan secara manual dan lebih kooperatif dalam koordinasi dengan PD teknis.
e. Meningkatkan fasilitasi pelayanan perizinan berbasis tenologi informasi (OSS dan *Website*).
f. Meningkatkan berbagai upaya fasilitasi, pembinaan dan pengendalian penanaman modal serta pengembangan dunia usaha melalui asosiasi pengusaha dan melasanakan Sosialisasi tentang LKPM.
b. Meningkatkan fasilitasi peningkatan prasarana dan sarana pendukung investasi untuk pengembangan penanaman modal di Kota Pekalongan.
c. Mempersiapkan berbagai upaya dalam rangka penyusunan RUPM Kota Pekalongan.

Tabel 2.3 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				6.146.648.000,00	6.574.861.000,00	6.448.253.000,00						3.515.969.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.146.648.000,00	6.574.861.000,00	6.448.253.000,00						3.515.969.000,00
02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6.146.648.000,00	6.574.861.000,00	6.448.253.000,00						3.515.969.000,00
02.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen	100,00 persen	4.661.505.000,00	4.796.413.000,00	4.789.485.000,00						1.613.748.000,00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	15.069.000,00	15.069.000,00	15.069.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP	30.450.000,00
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.798.000,00	1.798.000,00	2.598.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.500.000,00
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000,00
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	15 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.450.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2.18.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	3.736.657.000,00	3.371.845.000,00	3.371.845.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		423.011.000,00
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.682.079.000,00	3.317.267.000,00	3.112.291.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			372.911.000,00
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25 Dokumen	12 Dokumen	53.400.000,00	53.400.000,00	42.900.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			48.600.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.178.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000,00
2.18.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		35.447.000,00
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			35.447.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2.18.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	278.747.000,00	768.747.000,00	768.747.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		333.888.000,00
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000,00
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	57.147.000,00	527.147.000,00	527.147.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			76.388.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000,00
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	45.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			60.000.000,00
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	59.100.000,00	59.100.000,00	33.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			60.000.000,00
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	712 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.500.000,00
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			130.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2.18.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	504.156.000,00	512.796.000,00	512.796.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		605.952.000,00
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	7.127.000,00	7.127.000,00	7.127.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.952.000,00
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	435.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			300.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	197.029.000,00	205.669.000,00	243.377.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			300.000.000,00
2.18.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	121.876.000,00	122.956.000,00	122.956.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	DPMPTSP		185.000.000,00
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	15 Unit	86.737.000,00	87.817.000,00	134.357.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			115.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			20.000.000,00
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	92 Unit	35 Unit	20.139.000,00	20.139.000,00	22.139.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.000.000,00
02.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,00 dokumen	1,00 dokumen	77.882.000,00	77.882.000,00	77.882.000,00							143.325.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
2.18.02.2.01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah audit ISO yang dilaksanakan Jumlah peraturan penanaman modal yang disusun	1 kali 1 peraturan	1 kali 1 peraturan	37.057.000,00	37.057.000,00	37.057.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		68.325.000,00
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal													
		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Dokumen	2 Dokumen	37.057.000,00	37.057.000,00	37.057.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			68.325.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2.18.02.2.02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi penanaman modal yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	40.825.000,00	40.825.000,00	40.825.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		75.000.000,00
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota													
		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	40.825.000,00	40.825.000,00	40.825.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			75.000.000,00
02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan	100,00 persen	100,00 persen	46.930.000,00	46.930.000,00	39.630.000,00							80.620.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Daerah Kabupaten/Kota												
2.18.03.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2 Kegiatan	1 Kegiatan	46.930.000,00	46.930.000,00	46.930.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		80.620.000,00
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	46.930.000,00	46.930.000,00	39.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			80.620.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2500,00 dokumen	2500,00 dokumen	846.700.000,00	890.936.000,00	781.256.000,00							991.233.000,00
2.18.04.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang disusun	12 bulan	12 bulan	846.700.000,00	890.936.000,00	890.936.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		991.233.000,00
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah													
		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			20.000.000,00
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	2750 Pelaku Usaha	515.000.000,00	555.972.000,00	446.292.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			557.820.000,00
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko													
		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	120 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	91.700.000,00	91.700.000,00	91.700.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			113.413.000,00
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	60 Kegiatan Usaha	60 Kegiatan Usaha	225.000.000,00	228.264.000,00	228.264.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			300.000.000,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Baru pertahun	6,82 Miliar Rupiah	6,96 Miliar Rupiah	412.043.000,00	657.656.000,00	657.656.000,00							572.043.000,00
2.18.05.2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dikunjungi dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100 Perusahaan	150 Perusahaan	412.043.000,00	657.656.000,00	657.656.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		572.043.000,00
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	3 Kegiatan Usaha.	3 Kegiatan Usaha.	70.711.000,00	116.789.000,00	116.789.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			80.711.000,00
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	360 Pelaku Usaha	360 Pelaku Usaha	260.342.000,00	358.373.000,00	358.373.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			360.342.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Khusus Non Fisik				
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal												
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	120 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	80.990.000,00	182.494.000,00	182.494.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif		130.990.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	100,00 persen	101.588.000,00	105.044.000,00	102.344.000,00							115.000.000,00
2.18.06.2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi perizinan dan non perizinan kab/kota yang disajikan	6 aplikasi	6 aplikasi	101.588.000,00	105.044.000,00	105.044.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif	MASYARAKAT		115.000.000,00
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	12 Dokumen	101.588.000,00	105.044.000,00	102.344.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	09. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif			115.000.000,00
JUMLAH					**6.146.648.000,00**	**6.574.861.000,00**	**6.448.253.000,00**							**3.515.969.000,00**

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelomppok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan
b. usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

Tabel 2.4
Usulan Program/Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Pekalongan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan DPMPTSP Kota Pekalongan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kota Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama DPMPTSP Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kota Pekalongan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dalam Renja DPMPTSP Kota Pekalongan Tahun 2024 terdapat 11 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Untuk tercapainya target dari setiap indicator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan prioritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Tahun 2024. Perubahan kebutuhan pendanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan untuk Tahun 2024 dapat dilihat pada table di bawah ini:

Kegiatan DPMPTSP Kota Pekalongan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebutuhan pendanaan DPMPTSP Kota Pekalongan untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Anggaran

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
2.18	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL**	**6.448.253.000,00**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.789.485.000,00**	
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.869.000,00**	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.598.000,00	DAU
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.271.000,00	DAU
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	DAU
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.156.369.000,00**	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.112.291.000,00	DAU
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.900.000,00	DAU
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.178.000,00	DAU
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5.000.000,00**	
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	DAU
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**753.247.000,00**	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	DAU
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	527.147.000,00	DAU
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	DAU
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.000.000,00	DAU
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.600.000,00	DAU
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	DAU
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00	DAU
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**685.504.000,00**	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.127.000,00	DAU
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	435.000.000,00	DAU
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	243.377.000,00	DAU
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**173.496.000,00**	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134.357.000,00	DAU
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.000.000,00	DAU
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.139.000,00	DAU
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**77.882.000,00**	
2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**37.057.000,00**	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	37.057.000,00	DAU
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	40.825.000,00	DAU
2.18.02.2.02.0004	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	40.825.000,00	DAU
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**39.630.000,00**	
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**39.630.000,00**	
2.18.03.2.01.002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	39.630.000,00	DAU
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**781.256.000,00**	
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**781.256.000,00**	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	15.000.000,00	DAU
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	446.292.000,00	DAU
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	91.700.000,00	DAU
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang peizinan berusaha berbasis risiko	228.264.000,00	DAU
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**657.656.000,00**	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**657.656.000,00**	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	116.789.000,00	DAU DAK
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	358.373.000,00	DAU DAK
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	182.494.000,00	DAU DAK
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**102.344.000,00**	
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**102.344.000,00**	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	102.344.000,00	DAU

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan ini disusun guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan; mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*); dan sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Pekalongan. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan ini mengacu pada RPJM Pemerintah Daerah Kota Pekalongan tahun 2021 - 2026, sehingga perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun akan dapat berkelanjutan, konsisten dan berada pada kerangka acuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga Dapat tercapainya tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2024.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKALONGAN

BENO HERITRIONO, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19650118 198903 1 002

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA PEKALONGAN
JL. H SABRAWI TIRTO KOTA PEKALONGAN

Pekalongan
World's City of Batik

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Usulan perubahan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan penyusunan yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan dan menyangkut keberhasilan dan pencapaian target yang telah dituangkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021 RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 ini, kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2024.

Pekalongan, 08 Agustus 2024
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Pekalongan

Drs. SOEROSO M.Pd.
NIP. 19640921 198803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I 4
PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang 4
B. Landasan Hukum 4
C. Maksud dan Tujuan 5
D. Sistematika Penulisan 5
BAB II 7
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan capaian renstra 7
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 9
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 10
D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 26
BAB III 40
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 27
A. Rencana Kerja 27
B. Pendanaan Perangkat Daerah 27
BAB IV 32
PENUTUP 32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024 ditetapkan melalui Peraturan WaliKota Pekalongan nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024. Seiring dengan dinamika pembangunan yang terjadi, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan. Selain itu, perubahan kebijakan juga disebabkan oleh perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dari sisi perencanaan pembangunan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana dijelaskan bahwa RKPD dapat diubah apabila tidak sesuai dengan keadaan dalam tahun berjalan yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dengan pertimbangan di atas, serta memperhatikan kondisi hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2024, dan kondisi kapasitas kemampuan pendanaan yang bergeser dari target yang ditetapkan, menyebabkan diperlukannya perubahan/penyesuaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 agar target dan sasaran pembangunan tetap dapat dicapai demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan adalah:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
2. Peraturan WaliKota Pekalongan nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.
3. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, RKPD Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan KUA PPAS untuk menyusun APBD Tahun 2023.
4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kota Pekalongan,

C. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2024 ini disusun dengan tujuan untuk menjaga konsistensi Rencana Pembangunan Daerah dengan anggaran pembangunan daerah yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

D. Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
- a) Latar Belakang
- b) Landasan Hukum
- c) Maksud dan Tujuan
- d) Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II tahun 2024

a) Evaluasi Pelaksana Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
b) Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
c) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
d) Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB IV Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dan capaian renstra

Rencana Kerja Dinarpus Kota Pekalongan merupakan awal RPJMD Tahun 2021-2026, di Tahun 2024 Dinas Dinarpus mengampu 2 indikator Utama Kota dan 3 Indikator Renstra. Dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun ini Dinarpus mempunyai 9 target indikator program dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Ada 2 Indikator Renstra yang belum tercapai di tahun 2024 ini dikarenakan evaluasi capaian sehingga sd saat ini masih NA artinya nol tanpa angka, diantaranya :
   - Meningkatnya Kualitas Layanan Publik masih NA
   - Meningkatkan kegemaran membaca masyarakat masih NA
2. Ada Indikator program yang capaianya melebihi target , yakni :
   - Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome).

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau belum tercapainya target kinerja program/kegiatan, Ada beberapa faktor, diantaranya:

1. Pagu yang dipasang sudah dilakukan analisa perumusan target.
2. Akan muncul pada triwulan IV karena berdasarkan akumulasi tiap triwulan.

Untuk melihat capaian kinerja baik secara terperinci tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinarpus
dan Pencapaian Renja s/d triwulan II tahun 2024
Kota Pekalongan

No.	Aspek	Satuan	Targer Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW. II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks	100	n/a	75,30	77,00	0	0	Data Triwulan IV	0	0	Belum tercapai
2	Meningkatnya pengawasan kearsipan	Indeks	100	n/a	91,02	73,60	0	0	Data Triwulan IV	0	0	Belum tercapai
3	Meningkatnya Kegemaran membaca masyarakat	Indeks	100	n/a	19,25	20,32	0	0	Data Triwulan IV	0	0	Belum tercapai

1. Capaian indeks akuntabilitas kinerja perangkat daerah, pengawasan kearsipan dan Tingkat kegemaran membaca memang belum mencapai target (nilai baru akan rilis pada triwulan IV), untuk itu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aspek TIK:
   - melakukan koordinasi rutin kesemua bidang
   - meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat ataupun instansi
   - Optimalisasi penggunaan anggaran untuk menunjanag capaian Renja

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2024, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaran pemerintah dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan beberapa aspek/ fokus sebagai berikut:

1. Meningkatnya kegemaran membaca
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan

No.	Aspek	Satuan	Targer Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024				Realisasi Capaian RPJMD sd 2024	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target penetapan RKPD 2024	Realisasi s.d TW. II Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2024	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2024			
1	Meningkatnya kualitas layanan public	Indeks	79,20	n/a	95,59	79,20	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
2	Meningkatkan kegemaran membaca masyarakat	Persen	1	n/a	0	1	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Seperti proses kerja Perencanaan melalui beberapa tahap dari Musrenbang, Usulan dan proses sidang di Komisi dan Sidang di Badan Anggaran dengan berlakunya Perwal ASB Analisis Standar Belanja maka perlakuan penyusunan RAB juga disesuaikan seperti beberapa rekomendasi di Desk Renja Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut :

a) indikator mengacu pada renstra dan pagu anggaran menjabarkan penyesuaiannya
b) Pencapaian indeks SPBE Kota Pekalongan sesuai dengan target yang telah ditentukan
c) Untuk kegiatan tahun 2024 akan lebih memperhatikan aspek untuk keamanan gedung perpustakaan baru
d) Penambahan daya Listrik untuk gedung baru belum bisa dikarenakan minimnya anggaran

Tabel 2.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan							4.868.436.000,00	5.303.143.000,00	5.155.285.000,00							4.150.825.270,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.868.436.000,00	5.303.143.000,00	5.155.285.000,00							4.150.825.270,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							840.911.000,00	923.562.000,00	936.762.000,00							521.126.000,00	
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)				16,25 indeks	28 indeks	830.911.000,00	913.562.000,00	926.762.000,00							521.126.000,00	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (IKK Output)	-			2 persen	1.66 persen	410.231.000,00	492.882.000,00	492.882.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinarpus		276.252.250,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																
		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				800 Layanan	800 Layanan	106.626.000,00	111.690.000,00	111.690.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			101.737.750,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																
		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				64 Perpustakaan	5 Perpustakaan	70.339.000,00	72.867.000,00	86.067.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			35.054.750,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																

		Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				130 Orang	130 Orang	44.140.000,00	44.140.000,00	44.140.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			54.254.750,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																
		Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				1 Layanan	1 Layanan	139.126.000,00	144.185.000,00	144.185.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			20.650.250,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																

		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				300 Eksemplar	200 Eksemplar	50.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			64.554.750,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan Nilai Budaya Baca	-			33.77 persen	33.77 persen	420.680.000,00	420.680.000,00	420.680.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Dinarpus		244.873.750,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																

		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				1 Lokus	1 Lokus	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			41.795.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																
		Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2 Perpustakaan	1 Perpustakaan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			68.693.750,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																

		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				1 Orang	6 Orang	27.680.000,00	27.680.000,00	27.680.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			43.695.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																
		Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			90.690.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																

		Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				1 Orang	1 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan				1 regulasi	1 regulasi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00							0,00	
	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) (IKK Output)	-			5 koleksi	5 koleksi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																	
		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan				4 Eksemplar	1 Eksemplar	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							4.027.525.000,00	4.379.581.000,00	4.218.523.000,00							3.629.699.270,00	

3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah				100,00 persen	100,00 persen	3.545.845.000,00	3.883.129.000,00	3.727.161.000,00							3.130.576.270,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 persen	100 persen	29.882.000,00	29.882.000,00	29.882.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		18.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.863.000,00	3.863.000,00	3.863.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			10.250.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.009.000,00	3.009.000,00	3.009.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.350.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	15 Laporan	23.010.000,00	23.010.000,00	23.010.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			7.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 persen	100 persen	2.600.819.000,00	2.858.591.000,00	2.858.591.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		2.326.126.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.555.575.000,00	2.813.347.000,00	2.576.279.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.277.326.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	43.800.000,00	43.800.000,00	43.800.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			47.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.444.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.300.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 persen	100 persen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		9.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	-			100 persen	100 persen	162.892.000,00	209.892.000,00	209.892.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		217.470.970,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.686.200,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	47.285.000,00	94.285.000,00	94.285.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			109.655.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	1.686.000,00	1.686.000,00	1.686.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.686.200,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	4 Paket	42.831.000,00	42.831.000,00	42.831.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			53.281.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			5.706.450,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			2.141.290,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	90.600.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			40.314.830,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	100 persen	515.652.000,00	522.996.000,00	522.996.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		388.370.300,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.800.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	364.500.000,00	364.500.000,00	414.500.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			303.858.050,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	149.952.000,00	157.296.000,00	157.296.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			82.712.250,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	100 persen	231.600.000,00	256.768.000,00	256.768.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		170.509.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	85.000.000,00	106.496.000,00	106.496.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			76.889.550,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	119.000.000,00	122.672.000,00	118.172.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			67.119.450,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				61 Unit	39 Unit	27.600.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			26.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)				53,3347,50 persen indeks	53,3 3 47,5 0 persen indeks	319.504.000,00	328.156.000,00	322.924.500,00							341.306.000,00	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang di Tata Arsip Dinamisnya	-			32.26 persen	32.26 persen	251.325.000,00	259.977.000,00	259.977.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		253.518.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																	
		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				3 Berkas	6 Berkas	179.782.000,00	185.962.000,00	182.165.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			169.769.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Laporan	30 Laporan	71.543.000,00	74.015.000,00	73.210.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			83.748.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Arsip Statis OPD yang diserahkan ke Depo Arsip	-			16 persen	16 persen	41.600.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		42.727.330,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																	

		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				3 Arsip	3 Arsip	41.600.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			42.727.330,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemahaman Pengelola Arsip tentang Kearsipan	-			80 persen	80 persen	26.579.000,00	26.579.000,00	26.579.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		45.060.670,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	26.579.000,00	26.579.000,00	25.949.500,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			45.060.670,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)				100 persen	100 persen	162.176.000,00	168.296.000,00	168.437.500,00							157.817.000,00	

	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK (IKK Output)	-			100 persen	100 persen	105.000.000,00	108.672.000,00	108.672.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		93.980.750,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																	
		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				2500 Arsip	2500 Arsip	80.000.000,00	83.672.000,00	82.913.500,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			75.838.250,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																	
		Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				2500 Berkas	2000 Berkas	25.000.000,00	25.000.000,00	25.900.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			18.142.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip hasil alih media kabupaten/kota	-			100 persen	100 persen	57.176.000,00	59.624.000,00	59.624.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Dinarpus		63.836.250,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																	
		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				900 Arsip	1300 Arsip	57.176.000,00	59.624.000,00	59.624.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			63.836.250,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	JUMLAH							**4.868.436.000,00**	**5.303.143.000,00**	**5.155.285.000,00**							**4.150.825.270,00**	

D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

Tabel T.C.32

Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kota Pekalongan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Rencana Kerja

Didalam rumusan perubahan rencana program kegiatan bagi OPD tahun 2024 dan prakiraan maju 2025 Sebagai bahan evaluasi terdapat target (sesuai jenis sasaran dengan target indikator yang ingin dicapai), dimasing-masing kegiatan terdapat keluaran dan Hasil. Adapun kegiatan yang mengalami kenaikan di tahun 2024 dikarenakan kenaikan tarif tahunan dan standarisasi, selain itu juga kenaikan atau penurunan yang menurut evaluasi indikator diantara sub kegiatan sama dipadukan dan dihitung ulang mengalami penurunan yang semula menyebar menjadi satu pelaksanaan di salah satu sub kegiatan juga dari memonitor viewer yang kurang untuk dihapus dan mengambil viewer memuat berita pemerintahan Kota Pekalongan.

B. Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan prioritas di Dinarpus Kota Pekalongan tahun 2024. Perubahan Kebutuhan pendanaan pada Dinarpus Kota Pekalongan untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Daftar Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan
Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**5.155285.000**	**DAU**
2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	3.727.161.000	**DAU**
2.24.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	29.882.000	**DAU**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.863.000	DAU
2.24.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.009.000	DAU
2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.010.000	DAU
2.24.01.2.02	**Administrasi KeuanganPerangkat Daerah**	**2.621.523.000**	**DAU**
2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.576.279.000	DAU
2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	43.800.000	DAU
2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.444.000	DAU
2.24.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5.000.000**	**DAU**
2.24.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	DAU
2.24.01.2.06	**Administrasi Umum PerangkatDaerah**	**245.492.000**	**DAU**
2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.690.000	DAU
2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.285.000	DAU
2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.686.000	DAU
2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan LogistikKantor	42.831.000	DAU
2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.900.000	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	DAU
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.600.000	DAU
2.24.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	572.996.000	**DAU**
2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	DAU
2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	414.500.000	DAU
2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.296.000	DAU
2.24.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**252.268.000**	**DAU**
2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.496.000	DAU
2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	118.172.000	DAU
2.24.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.600.000	DAU
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**322.924.500**	DAU
2 24 02 2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**255.375.000**	**DAU**
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	182.165.000	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	73.210.000	DAU
2 24 02 2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**41.600.000**	**DAU**
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	41.600.000	DAU
2 24 02 2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**25.949.500**	**DAU**
2 24 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	25.949.500	DAU
2 24 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**168.437.500**	**DAU**
2 24 03 2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**108.672.000**	DAU
2 24 03 2.01 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	82.913.500	DAU
2 24 03 2.01 02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	25.900.000	DAU
2 24 03 2.04	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**59.624.000**	DAU
2 24 03 2.04 02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	59.624.000	DAU
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**936.762.000**	**DAU**
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PEPRUSTAKAAN**	**936.762.000**	**DAU**
2 23 02 2.01	**Pengelolan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**492.882.000**	**DAU**
2 23 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	111.690.000	DAK
2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	86.067.000	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
2 23 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.140.000	DAU
2 23 02 2.01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	144.185.000	DAU
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	120.000.000	DAU
2 23 02 2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**420.680.000**	**DAU**
2 23 02 2.02 01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	30.000.000	DAU
2 23 02 2.02 02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di TempatTempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	DAU
2 23 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	27.680.000	DAU
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	300.000.000	DAU
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.000.000	DAU
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	10.000.000	DAU
	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	DAU
	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	10.000.000	DAU

BAB IV

PENUTUP

Laporan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinarpus Kota Pekalongan Tahun 2024 ini disusun untuk dijadikan sebagai dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah Kota Pekalongan, serta sebagai panduan dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinarpus Tahun 2024. Penyusunan Perubahan Renja 2024 dilakukan setelah mempelajari visi, misi, dan program Pemerintah Kota Pekalongan sebagai muatan dan masukan dalam penyusunan visi, misi, strategi, kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan Dinarpus kota pekalongan satu tahun kedepan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinarpus Kota Pekalongan ini dapat menjadi acuan dan pedoman yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan peran serta dan partisipasi aktif dari semua stakeholder yang terkait serta menjadi dasar dan bahan untuk melakukan evaluasi dan guna penyusunan laporan pelaksanaan kinerja PD tahunan maupun lima tahunan.

Dengan demikian, diharapkan perubahan renja Dinarpus tahun 2024 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan dinas Kearsipan dan Perpustakaan kota pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan kota pekalongan di tahun mendatang.

Demikian Laporan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, Terima kasih.

Pekalongan, 08 Agustus 2024
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Pekalongan

Drs. SOEROSO M.Pd.
NIP. 19640921 198803 1 007

Pekalongan
World's City of Batik

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERUBAHAN RENJA
TAHUN ANGGARAN 2024

(0285) 423993

dkp.pekalongankota.go.id

dkpkotapekalongan@gmail.com

Jl. Yos Sudarso No. 46 Panjang Wetan,
Pekalongan Utara, Kota Pekalongan 51114

PERUBAHAN RENJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 46 Kota Pekalongan Kode Pos 51114 Telepon: (0285) 423993 Faksimile 423993

e-mail dkpkotapekalongan@gmail.com *Website* dkpkotapekalongan.go.id

DAFTAR ISI

Cover i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud Dan Tujuan 5
1.3.1 Maksud 5
1.3.2 Tujuan 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 6
2.1 Tugas, Fungsi,dan Struktur Organisas 6
2.1.1 Tugas 6
2.1.2 Fungsi 6
2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas kelautan dan Perikanan 11
2.3 Evaluasi Renja Triwulan II 12
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 27
BAB IV PENUTUP 35

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan 13

Tabel 3. 1 Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendaian, daan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai ketentauan dalam pasal 363, pasal 364 dan pasal 367 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

(1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.

(2) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

(3) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.

(4) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

(5) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(6) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun berdasarkan evaluasi perkembangan keadaan dalam 1 (satu) tahun berjalan. Perkembangan sebagaimana dimaksud adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan / atau keadaan darurat.

Selanjutnya, dari sisi dinamika penyerenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diakomodir terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah Kota pekarongan yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dirakukan perubahan atas Rencana Kerja Dinas keluatan dan Perikanan Kota pekarongan Tahun 2024 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Dinas Kelautadan dan Perikanan Kota Pekalongan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 No3);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
20. Peraturan Walikota 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
21. Surat Sekretaris Daerah Kota Pekalongan tanggal 15 Juli 2024 Nomor B/319/000.7.2.4/2024/i perihal Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan perubahan anggaran 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan adalah sebagai pedoman penyusunan Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Serta memberikan informasi kondisi riil dinas beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah melakukan evaluasi dan menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka kegiatan sehingga tercipta sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.

1.3.2 Tujuan

1) Penyesuaian anggaran kegiatan untuk memenuhi kebutuhan selama satu tahun sehingga anggaran lebih efisien ,lebih efektif, tepat sasaran, tepat waktu dan akuntabel berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah;
2) Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga merupakan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta dasar perencanaan program dan kegiatan mendatang sehingga dapat mengakomodir semua aspirasi masyarakat / kebutuhan dinas yang dinamis.
3) Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam rangka pencapaian Visi Misi Walikota Pekalongan Tahun 2021 – 2026.
4) Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi,dan Struktur Organisas

Peraturan Walikota 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kelautan dan perikanan dipimpin oleh Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah Kota Pekalongan memiliki 1 (satu) sekretariat, 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya serta 2 (Dua) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional.

2.1.1 Tugas

1) DKP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2) DKP mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas DKP menyelenggarakan fungsi :

1. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
   a. Perumusan dan penetapan sasaran program bidang kelautan dan perikanan
   b. Perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
   c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perikanan tangkap;
   d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perikanan budidaya;
   e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
   f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD;

g. Pengarahan dan pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP);
h. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan program dan pelaksanaan kegiatan; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perumusan kebijakan, pelaksanaan rencana kerja dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum serta administrasi di bidang keluatan dan perikanan;

2. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
   a. Perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
   b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis dinas;
   c. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
   d. Pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
   e. Pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah,bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
   f. Pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
   g. Pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang kepegawaian;
   h. Pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi;
   i. Pengkoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
   j. Pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
   k. Pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
   l. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;dan
   m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:
    a. Perumusan program kerja bidang perikanan tangkap;
    b. Perumusan bahan kebijakan bidang bidang perikanan tangkap;
    c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap;
    d. Penyelenggaraan pengelolaan penangkapan ikan;
    e. Penyelenggaraan pemberdayaan nelayan kecil;
    f. Penyelenggaraan penerbitan tanda daftar kapal penangkapan ikan ≤ 10 GT;
    g. Penyelenggaraan penerbitan izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan ≤ 10 GT;
    h. Penyelenggaraan layanan pendaftaran kapal penangkapan ikan ≤ 10 GT;
    i. Penyelenggaraan pengawasan sumber daya perikanan;
    j. Pengkoordinasian pengelolaan wilayah pesisir dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
    k. Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang perikanan tangkap;
    l. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
    m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:
    a. Perumusan program kerja bidang perikanan budidaya;
    b. Perumusan bahan kebijakan bidang perikanan budidaya;
    c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perikanan budidaya;
    d. Penyelenggaraan rekomendasi penerbitan izin usaha budidaya perikanan;
    e. Penyelenggaraan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
    f. Penyelenggaraan penerbitan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
    g. Pengkoordinasian pengelolaan budidaya perikanan;
    h. Penyelenggaraan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan budidaya;
    i. Penyelenggaraan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan ikan budidaya;
    j. Pengkoordinasian penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan;

k. Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang perikanan budidaya;
l. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Gambar 1. 1

Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

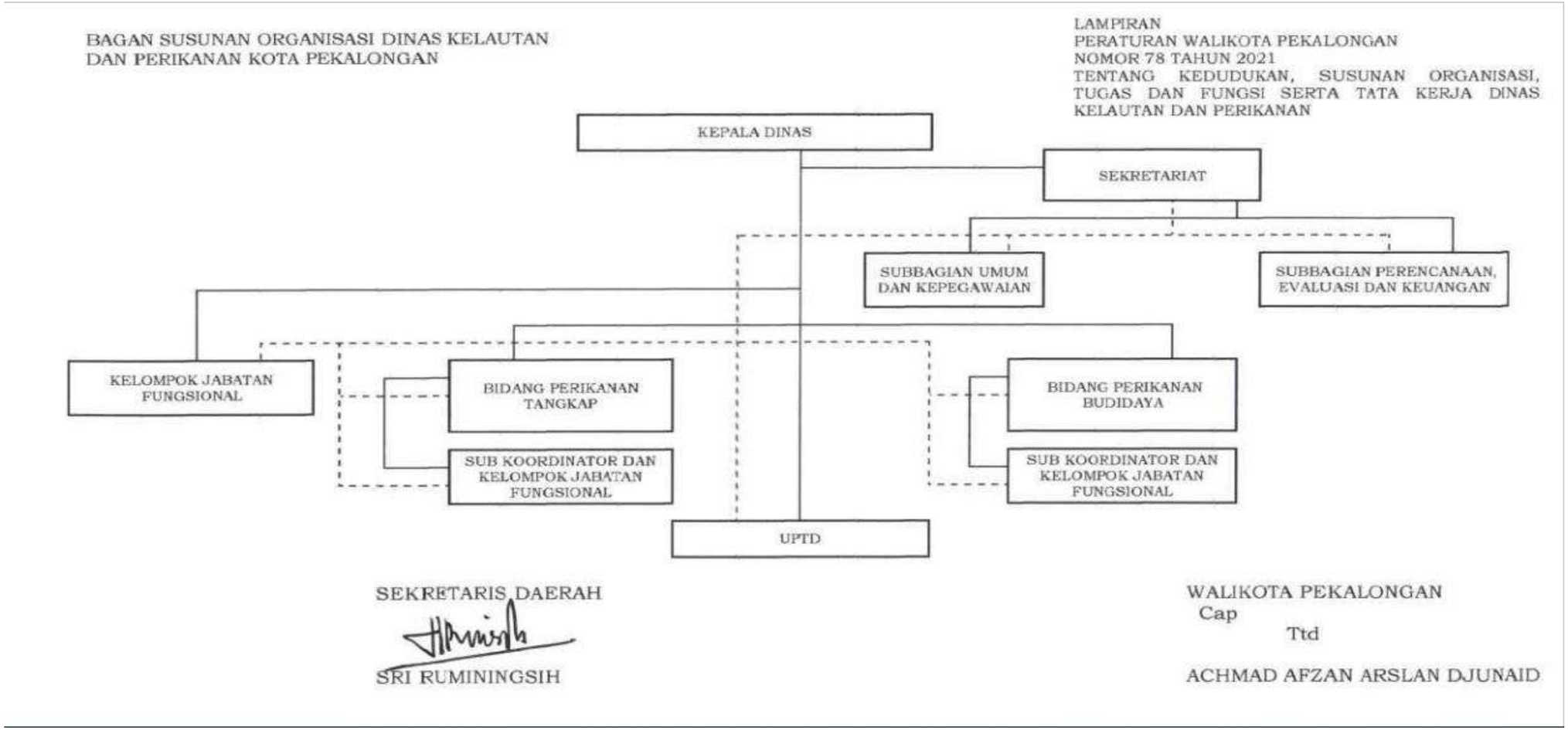

2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas kelautan dan Perikanan

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program, kegiatan maupun sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan refocusing anggaran dari sisa anggaran sewa TPI;
2. Adanya kendala ketersediaan BBM solar bersubsidi
3. Penerapan aturan pengadaan barang / jasa yang menerapkan *e-catalog* local, sementara adanya keterbatasan penyedia lokal yang memenuhi syarat KBLI yang sesuai;
4. Juknis sulit untuk dipenuhi sesuai persyaratan (karena kondisi di lapangan);
5. Penerapan aturan pengadaan barang / jasa yang menerapkan *e-catalog* local, sementara adanya keterbatasan penyedia lokal yang memenuhi syarat KBLI yang sesuai;
6. Sarana dan prasarana yang kurang memadahi dan rusak, sementara keterbatasan anggaran untuk perbaikan;
7. Kondisi cuaca yang tidak menentu dan seringnya terjadi banjir rob menjadi kendala dalam pelaksanaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
8. Tuntutan sistem aplikasi;
9. Keterbatasan benih yang berkualitas;
10. Penetapan harga sewa TPI yang mengalami keterlambatan karena adanya update harga sewa dari PT Perindo.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dalam pelaksanaan urusan pilihan perikanan dan kelautan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan priotitas tahun yang berjalan ataupun perencanaan untuk program/ kegiatan tahun depan yakni:

1) Perencanaan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Dermaga dan TPI di Timur Muara Loji
2) Rehabilitasi Kawasan Gedung Technopark
3) Rehabilitasi Gedung DKP Tahap II
4) Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Rekom BBM menggunakan SIAPKan
5) Pelaksanaan Kegiatan Gemar Makan Ikan sebagai salah satu upaya pengentasan kondisi balita stunting di kota Pekalongan.
6) Normalisasi saluran tambak
7) Pemeliharaan/ Pengadaan Sarana dan prasarana yang kurang memadahi dan rusak
8) Penetapan sewa TPI dilakukan di maksimal dalam Triwulan I

2.3 Evaluasi Renja Triwulan II

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Semester I.

Hasil evaluasi Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024,adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	Satuan	Catatan
	Tujuan				
	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,4	86,54	indeks	Mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023.
	Pertumbuhan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	1%	-0,46	persen	Perikanan Budidaya TW 2 Sementara = 289.509 Kg = 289,51 Ton* Perikanan Tangkap TW2= 5.139.914 Kg = 5.139,914 Ton Total Perikanan TW2=5.429,42 Ton Perikanan 2023=10.123,79 ton TW 2 : (5.429,42 - 10.123,79) / 10.123,79 x 100% Tidak optimalnya pada jumlah produksi perikanan tangkap dikarenakan: 1. Terdapat 10 hari pada bulan april tidak ada kegiatan lelang ketika menjelang dan setelah Idul fitri (Syawal) 2. Perolehan BBM solar bersubsidi mengalami kendala pada ketersediaan, sehingga kapal kapal tertentu (Kapal Arek Rembang dan Arek Obor) beserta kapal pengikutnya memilih beristirahat
	Sasaran				
	Nilai Evaluasi SAKIP	83	n/a	indeks	Data belum tersedia

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	Satuan	Catatan
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	15.293	2.257,31	ton	Produksi Budidaya Sementara TW 2 = 130.080 Kg = 130,080 Ton Produksi Tangkap TW2 = 2.127.234 Kg= 2.127,234 Ton Total Perikanan Sementara=TW2 = 2.257,314 Ton Tidak optimalnya pada jumlah produksi perikanan tangkap dikarenakan: 1. Terdapat 10 hari pada bulan april tidak ada kegiatan lelang ketika menjelang dan setelah Idul fitri (Syawal) 2. Perolehan BBM solar bersubsidi mengalami kendala pada ketersediaan, sehingga kapal kapal tertentu (Kapal Arek Rembang dan Arek Obor) beserta kapal pengikutnya memilih beristirahat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	41.12	persen	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	25	persen	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	Satuan	Catatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	0	dokumen	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan pada Triwulan III dan IV
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	0	dokumen	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dilaksanakan pada triwulan III dan IV
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	7	dokumen	1. dokumen Monev SPIP TW 1 2. Dokumen evaluasi renja (RKPD TW1) 3. Dokumen SAKIP Penetapan (PK penetapan, LKJ) 4. Laporan Monev triwulan TW 1 5. dokumen Monev SPIP TW 2 6. Dokumen evaluasi renja (RKPD TW2) 7. Laporan Monev triwulan TW 2
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	69.05	persen	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	26	25	Orang/bulan	Jumlah ASN pada bulan januari dan februari 25 orang PNS, Bulan Maret 24 orang PNS dan pada Bulan April -Juni menjadi 25 orang ASN (24 orang PNS dan 1 orang PPPK) Diusulkan perubahan target menjadi 25 orang/bulan
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	6	dokumen	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	Satuan	Catatan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	dokumen	1 dokumen Laporan CaLK yang tersusun di TW I
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	34.88	persen	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	0	persen	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	kali	pelaksanakan pengadaan paket pakaian karnaval di Triwulan IV
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100	45.78	persen	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	Satuan	Catatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	2	paket	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	2	paket	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	2	paket	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	2	paket	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	1	paket	1 paket meliputi map, dan amplop
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	0	dokumen	Langganan koran setiap bulan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	66	Laporan	Diusulkan perubahan target menjadi 100 laporan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	Satuan	Catatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	50	persen	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	2	Laporan	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	6	Laporan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	6	Laporan	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100	48.46	persen	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	50	persen	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	26	17	unit	Kendaraan yang telah dilakukan pembayaran pajak sebanyak :

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	Satuan	Catatan
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				TW 1= 1 unit mobil, motor 4unit. TW 2= 12 unit meliputi : Motor 11 unit ; mobil 1 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	unit	Pengusulan perubahan target menjadi 3 unit meliputi: Gedung DKP, Gedung DKP baru (BP Paru), Gedung Technopark pemeliharaan gedung sedang berlangsung
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	6	bulan	Pengusulan perubahan target sebesar 56 unit dengan rincian realisasi TW 1= 3 unit AC; 2 unit Laptop; 2 unit pemotong rumput; 2 unit printer=9 unit TW2= 4 unit AC, 4 unit laptop, 3 unit printer=11 unit
Program Perikanan Tangkap					
	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1	0.54	persen	Tidak optimalnya pada jumlah produksi perikanan tangkap dikarenakan: 1. Terdapat 10 hari pada bulan april tidak ada kegiatan lelang ketika menjelang dan setelah Idul fitri (Syawal) 2. Perolehan BBM solar bersubsidi mengalami kendala pada ketersediaan, sehingga kapal kapal tertentu (Kapal Arek Rembang dan Arek Obor) beserta kapal pengikutnya memilih beristirahat
	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1	0.43	persen	Tidak optimalnya pendapatan daerah bersumber dari TPI diakibatkan oleh jumlah produksi perikanan tangkap yang tidak optimal dikarenakan:

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	Satuan	Catatan
					1. Terdapat 10 hari pada bulan april tidak ada kegiatan lelang ketika menjelang dan setelah Idul fitri (Syawal) 2. Perolehan BBM solar bersubsidi mengalami kendala pada ketersediaan, sehingga kapal kapal tertentu (Kapal Arek Rembang dan Arek Obor) beserta kapal pengikutnya memilih beristirahat
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sarpras Perikanan Tangkap yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5%	0	persen	Sarana usaha perikanan yang tersedia sedang dalam tahap pekerjaan Perencanaan
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	0	dokumen	Realisasi pendataan diselesaikan pada Triwulan IV
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1	0	unit	Pelaksanaan Pos Jaga menunggu penyelesaian paket pengendalian Banjir Rob oleh BWWS Pemali Juana. Terdapat paket pekerjaan penyelidikan tanah Sedimentasi Pengembangan TPI baru.

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	Satuan	Catatan
					TW I. Proses pengadaan penyelidikan tanah TW II Saat ini dalam tahapan Penyelesaian pekerjaan penyelidikan tanah
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1	0	unit	Juknis sulit untuk dipenuhi sesuai persyaratan (karena kondisi di lapangan);
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nelayan Kecil yang dibina	10	36.53	persen	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30	30	orang	Sosialisasi Permen KP no 36/2023
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	19	6	kelompok	
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Bersumber dari TPI	1%	0.43	persen	Tidak optimalnya nilai produksi perikanan tangkap bersumber dari TPI diakibatkan oleh jumlah produksi perikanan tangkap yang tidak optimal dikarenakan: 1. Terdapat 10 hari pada bulan april tidak ada kegiatan lelang ketika menjelang dan setelah Idul fitri (Syawal) 2. Perolehan BBM solar bersubsidi mengalami kendala pada ketersediaan, sehingga kapal kapal tertentu (Kapal

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	Satuan	Catatan
					Arek Rembang dan Arek Obor) beserta kapal pengikutnya memilih beristirahat
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	0	layanan	Indikator target layanan sebaiknya diubah sesuai jumlah kesediaan layanan lelang yang dilaksanakan oleh TPI (Definisi Operasional = jumlah hari kesediaan pelayanan lelang dalam 1 tahun) sebesar 351 hari.
Program Perikanan Budidaya					
Program Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1	-46,42	persen	Januari 66.510kg Februari 45.890kg Maret 47.029kg April 41.230kg Mei 45.550kg Juni 43.300kg Produksi Tahun 2024 sampai dengan TW 2 = 289.509 kg* Data sementara belum melalui proses validasi Produksi 2023= 540.289 kg
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase ketercapaian aspek-aspek pengelolaan pembudidayaan ikan	100	40	persen	aspek-aspek pengelolaan pembudiyaan ikan terdiri dari 5 aspek yaitu dokumen budidaya, Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang difasilitasi, bantuan saprodi, Prasarana Pembudidaya yang tersedia, Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	Satuan	Catatan
					TW 1 :Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat yang dilaksanakan secara contiinue TW 2: Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang difasilitasi, dan bantuan saprodi berupa bantuan benih
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	0	dokumen	realisasi dokumen statistik perikanan budidaya dilaksanakan pada Triwulan IV
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	0	unit	Anggaran penyediaan waring pada perubahan anggaran
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	0	unit	BBI yang dikelola setiap bulannya
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4	3	dokumen	Pengujian Kualitas Air Hg, Pb dan Cd di tiga pembudidaya ikan di pokdakan Clarias Gebang Asri, Pokdakan Bule, Pokdakan Bagas Damas Cat fish

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	Satuan	Catatan
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30	20	orang	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 20 orang berupa pembinaan dan monev budidaya ikan.
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan					
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	2	0	pelaku usaha	
	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12,12	42,75	persen	Jumlah pengusaha perikanan pengolahan dan pemasaran yang dibina 140 unit usaha; Jumlah pengusaha perikanan pengolahan dan pemasaran 345 unit usaha Terdapat perbedaan formulasi antar target dan indikator (antara peningkatan jumlah pengusaha dan pembinaan pengusaha perikanan). Dapat diusulkan perubahan formulasi pada perubahan renstra.
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha	16,67	11	persen	Jumlah pengusaha mikro dan kecil di bidang pengolahan hasil perikanan yang diusulkan memperoleh PIRT 11 unit usaha yaitu: 1. Omah Peyek "Bu Rina";

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	Satuan	Catatan
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				2. Ramysa Dan Keikai; 3. Hars Food; 4. Yunie 77 ...Megono Tongkol; 5. Yira; 6. Nyoss; 7. Annisa Snack & Cookies /Dapoer Annisa; 8. Karima; 9. Eno Food ; 10. Peyek 47; 11. Iwak Cilik Dan Dunia Laut
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	285	295	Unit usaha	
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam	70	54.09	persen	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	Satuan	Catatan
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	30	0	Pelaku usaha	Pada TW 2, Telah dilaksanakan pembinaan peminat pelaku usaha di bidang pengolahan ikan kepada 30 orang. Definisi operasional diubah menjadi jumlah pelaku usaha pemula di bidang pengolahan ikan. Target 2024 diusulkan diubah menjadi 2 pelaku usaha.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berikut kami sampaikan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Tabel 3. 1
Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Penetapan APBD		Target Perubahan APBD	
			Target Tahunan	Pagu APBD	Target Tahunan	Pagu APBD
1	2	3	4	5	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				**9.462.184.000**		**8.979.844.000**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**Presentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**Persen**	**100**	**5.796.871.000**	**100**	**5.955.815.000**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**15.564.000**	**100**	**18.339.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2.088.000	2	2.088.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Penetapan APBD		Target Perubahan APBD	
			Target Tahunan	Pagu APBD	Target Tahunan	Pagu APBD
1	2	3	4	5	5	6
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	1.476.000	2	2.175.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	12.000.000	15	14.076.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**3.724.577.000**	**100**	**3.627.149.000**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	26	3.664.589.000	25	3.567.161.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	58.620.000	12	58.620.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.368.000	1	1.368.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Presentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**5.000.000**	**100**	**5.000.000**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Penetapan APBD		Target Perubahan APBD	
			Target Tahunan	Pagu APBD	Target Tahunan	Pagu APBD
1	2	3	4	5	5	6
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**persen**	**100**	**302.944.000**	**100**	**508.293.000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	7.348.000	4	13.349.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	97.530.000	4	235.663.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4.500.000	4	9.500.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	53.566.000	4	58.568.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	7.500.000	2	7.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2.500.000	2	2.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	130.000.000	100	181.213.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Penetapan APBD		Target Perubahan APBD	
			Target Tahunan	Pagu APBD	Target Tahunan	Pagu APBD
1	2	3	4	5	5	6
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**553.679.000**	**100**	**559.853.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	1.700.000	4	1.700.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	179.475.000	12	181.375.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	372.504.000	12	376.778.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**1.195.107.000**	**100**	**1.237.181.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	26	153.919.000	26	143.251.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.011.000.000	3	1.045.817.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Penetapan APBD		Target Perubahan APBD	
			Target Tahunan	Pagu APBD	Target Tahunan	Pagu APBD
1	2	3	4	5	5	6
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	30.188.000	56	48.113.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Peningkatan produksi perikanan tangkap bersumber dari TPI**	**persen**	**1**	**2.915.533.000**	**1**	**2.277.215.000**
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Presentase Sarpras Tangkap yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota**	**persen**	**5**	**392.263.000**	**5**	**215.163.000**
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	42.483.000	1	40.083.000
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	1	168.430.000	1	168.430.000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	1	181.350.000	0	6.650.000
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase Nelayan Kecil yang dibina**	**Persen**	**10**	**59.576.000**	**10**	**56.358.000**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Penetapan APBD		Target Perubahan APBD	
			Target Tahunan	Pagu APBD	Target Tahunan	Pagu APBD
1	2	3	4	5	5	6
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	30	35.321.000	30	34.503.000
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	19	24.255.000	19	21.855.000
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap yang bersumber dari TPI**	**persen**	**1**	**2.463.694.000**	**1**	**2.005.694.000**
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	1	2.463.694.000	351	2.005.694.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	**persen**	**1**	**246.498.000**	**1**	**257.536.000**
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Presentase ketercapaian aspek - aspek pengelolaan pembuddidayaan ikan kecil**	**persen**	**100**	**246.498.000**	**100**	**257.536.000**
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	13.998.000	1	12.998.000
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	13.801.000	2	24.861.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Penetapan APBD		Target Perubahan APBD	
			Target Tahunan	Pagu APBD	Target Tahunan	Pagu APBD
1	2	3	4	5	5	6
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	163.516.000	1	165.206.000
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	4	20.400.000	4	19.688.000
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	30	34.783.000	30	34.783.000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan**	**Persen**	**12,12**	**503.282.000**	**12,12**	**489.278.000**
	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	**pelaku usaha**	**2**		**2**	
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Presentase penyediaan dan penyaluran Bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerahh kabupaten/kota**	**persen**	**70**	**434.343.000**	**70**	**54.935.000**
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	30	434.343.000	2	54.935.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Penetapan APBD		Target Perubahan APBD	
			Target Tahunan	Pagu APBD	Target Tahunan	Pagu APBD
1	2	3	4	5	5	6
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Presentase Fasilitasi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**persen**	**16,67**	**68.939.000**	**16,67**	**434.343.000**
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	unit usaha	285	68.939.000	285	434.343.000

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman, acuan dan tujuan penyelenggaraan pembangunan, keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan. Latar belakang dilaksanakannya perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah antara lain :

1. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun sebagai upaya untuk merespon kebutuhan dari berbagai aspek yang dibutuhkan.
2. Adanya kebijakan refocusing anggaran dari sisa anggaran sewa TPI;

Dengan adanya Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Kota Pekalongan, kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024.

Pekalongan, 08 Agustus 2024
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONANGAN

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Drs. SUGIYO
Pembina Tk. I
NIP. 19680509199512100

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TA 2024

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024

DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN
Jl. Wr Supratman Nomor 1 Pekalongan kode Pos 51141
Telepon/ fax : (0285) 4151574
e-mail : dinparbudporapkl@gmail.com
Website : **http://www.tourism.pekalongankota.go.id**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) TA 2024 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Pekalongan dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan
Dan Olahraga Kota Pekalongan,

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINPARBUDPORA

SABARYO PRAMONO, S.Sos, MSi.
NIP. 19710122 199603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1. Latar Belakang 4

2. Landasan Hukum 5

3. Maksud dan Tujuan 6

BAB II EVALUASI RENJA DINPARBUDPORA KOTA PEKALONGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 7

1. Evaluasi Renja Triwulan II 7

2. Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan APBD 2024 18

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 19

1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah 19

BAB IV PENUTUP 34

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan adalah dokumen yang disusun berdasarkan evaluasi perkembangan keadaan dalam 1 (satu) tahun berjalan. Perkembangan sebagaimana dimaksud adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan / atau keadaan darurat.

RKPD Perubahan adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa Dinas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan tetap relevan dan efektif dalam memajukan wilayahnya. Dengan mengakomodasi perubahan dan dinamika yang ada, RKPD Perubahan membantu memastikan bahwa rencana pembangunan dapat terus menjawab kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Dalam perjalanan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan terdapat berbagai perkembangan. Perkembangan dimaksud terjadi pada sisi pendapatan dan belanja. Pada sisi pendapatan, telah terjadi perubahan target dikarenakan alasan tertentu yang mempengaruhi penurunan target sampai akhir tahun anggaran 2024. Akibatnya dibutuhkan penyesuaian pendapatan. Sedangkan dari aspek belanja, terdapat penambahan, perubahan rincian belanja, serta terdapat pula perubahan target output kegiatan.

Menindaklanjuti perkembangan kerangka perubahan pendanaan pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan disusunlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan berjalan efisien, efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
6. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024

3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan anggaran 2024 Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan adalah sebagai pedoman penyusunan Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Serta memberikan informasi kondisi riil dinas beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah melakukan evaluasi dan menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka kegiatan sehingga tercipta sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai yakni;

1. Penyesuaian anggaran kegiatan untuk memenuhi kebutuhan selama satu tahun sehingga anggaran lebih efisien, lebih efektif, tepat sasaran, tepat waktu dan akuntabel berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga merupakan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta dasar perencanaan program dan kegiatan mendatang sehingga dapat mengakomodir semua aspirasi masyarakat / kebutuhan dinas yang dinamis.
3. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam rangka pencapaian Visi Misi Walikota Pekalongan Tahun 2021-2026.

BAB II
EVALUASI RENJA DINPARBUDPORA KOTA PEKALONGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

1. Evaluasi Renja Triwulan II

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

a) Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

b) Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

c) Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			RAPBD (Rp)	REALISASI CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	Target	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga				**26.784.542.000**					
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	94.31	Persen		19.05	0.00			
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (IKK Outcome)	0.76	Persen		0.72	0.71			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30	Orang	50.000.000	0	50.00			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	48	Orang	100.520.000	0	0			
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	300	Orang	350.000.000	0	0			
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (IKK Outcome)	0.51	Persen		0.93	0.85			

SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			RAPBD (Rp)	REALISASI CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	Target	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1	Dokumen	760.000.000	1.00	0.00			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	34.29	persen		52.38	0.00			
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarpras olahraga pada jenjang pendidikan	76.19	persen		80.00	0.00			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	Unit	1.882.553.000	1.00	0.00			
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan prestasi olahraga tingkat kota	38.10	persen		0.00	80.00			
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	21	Dokumen	3.247.000.000	0.00	5.00			
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	71	Orang	256.500.000	0.00	71.00			
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi	25	persen		0.00	0.00			
Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	200	Orang	215.380.000	150.00	50.00			

SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			RAPBD (Rp)	REALISASI CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	Target	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	1	Pelatda	100.000.000	0.00	1.00			
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	5	Orang	2.546.449.000	0.00	100.00			
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Peningkatan event olahraga tk Provinsi dan Nasional	10.53	Persen		0.00	0.00			
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2	Dokumen	102.907.000	0.00	0.00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen		28.34	11.46			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	Persen		50.00	0.00			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	5.000.000	0.00	0.00			
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	912.076.000	3,000.00	0.00			
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100	Persen		20.00	31.25			

SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			RAPBD (Rp)	REALISASI CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	Target	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Event kesenian dan kebudayaan yang dikembangkan	6	Even		0.17	0.17			
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	41	Objek	1.022.598.000	1.00	0.00			
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Event kesenian dan kebudayaan yang dilestarikan	10	Event		0.25	0.13			
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1	Objek	459.500.000	1.00	1.00			
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100	Persen		0.00	0.00			
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	26	Komunitas		0.00	0.00			
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga	209.560.000	1.00	0.00			
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100	Persen		0.00	0.00			
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Akses Masyarakat dalam Perolehan Data Sejarah dan Tradisi	100	Persen		0.00	0.00			

SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			RAPBD (Rp)	REALISASI CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	Target	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1	Dokumen	40.000.000	0.00	1.00			
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	93.97	Persen		91.67	0.00			
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.48	Persen		0.00	0.00			
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3	Objek	177.500.000	0.00	0.00			
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengunjung museum batik	4.71	Persen		0.00	0.00			
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung museum batik	28,000.00	Orang		0.40	12.21			
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1310	Unit	240.597.000	0.00	1,310.00			
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	4	Unit	1.080.374.000	0.00	3.00			
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	9	Unit	838.176.000	0.00	9.00			
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	11.50	Persen		0.00	0.00			
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase usaha pariwisata yang difasilitasi	100	Persen		0.00	20.00			

SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			RAPBD (Rp)	REALISASI CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	Target	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1	Lokasi	217.000.000	0.00	0.00			
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1	Laporan	109.000.000	0.00	0.00			
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang berkembang	100	Persen		0.00	43.48			
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2	Dokumen	350.000.000	0.00	0.00			
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1	Dokumen	207.020.000	0.00	0.00			
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1	Kegiatan	100.000.000	0.00	1.00			
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2	Promosi	25.000.000	0.00	2.00			
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	41.67	Persen		0.00	0.00			

SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			RAPBD (Rp)	REALISASI CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	Target	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Prasarana ruang kreatif	1	Persen		0.00	0.00			
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1	Unit	428.262.000	0.00	0.00			
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase ketercapaian pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	100	Persen		0.00	100.00			
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	25	Produk	25.000.000	0.00	25.00			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	60	Persen		0.00	0.00			
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan kapasitas SDM EKRAF tingkat dasar	16.67	Persen		0.00	17.00			
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1	Laporan	400.000.000	0.00	0.00			
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi	50	Orang	30.000.000	0.00	20.00			

SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			RAPBD (Rp)	REALISASI CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	Target	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
	Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif								
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	100	Orang	300.000.000	0.00	100.00			
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30	Orang	50.000.000	0.00	0.00			
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif									
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	60	Orang	30.000.000	0.00	0.00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	Persen		28.34	11.46			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Persen		6.67	6.67			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	3.538.000	0.00	0.00			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	2.583.000	0.00	0.00			

SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			RAPBD (Rp)	REALISASI CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	Target	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	12.000.000	3.00	3.00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	Persen		50.00	0.00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	Orang	4.411.287.000	30.00	30.00			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	63.300.000	3.00	3.00			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	8.994.000	1.00	0.00			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100	Persen		29.50	19.88			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	7.500.000	1.00	1.00			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	788.688.000	1.00	1.00			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	7.500.000	1.00	1.00			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	Paket	55.300.000	1.00	1.00			

SATKER / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN			RAPBD (Rp)	REALISASI CAPAIAN PER TRIWULAN				KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	Target	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	19.500.000	1.00	0.00			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen		25.00	25.00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	2.400.000	1.00	1.00			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	324.000.000	3.00	3.00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	256.200.000	1.00	1.00			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen		45.61	8.77			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	Unit	113.980.000	7.00	5.00			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	70.824.000	0.00	0.00			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	20.000.000	1.00	0.00			

2. Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan APBD 2024

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan Tahun 2024 Triwulan II terhadap pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Tahun 2024 Kota dengan APBD 2024 Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan

No	Uraian	Renja 2024	APBD 2024
1	Program	12	12
2	Kegiatan	26	26
3	Sub Kegiatan	58	58
4	Pagu Anggaran	26.784.542.000	28.290.468.000

Untuk jumlah program, kegaiatan dan sub kegiatan dalam Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan pada RKPD 2024 dan APBD 2024 sudah sama yaitu sejumlah 12 program, 26 kegiatan dan 58 sub kegiatan. Tetapi terdapat perbedaan jumlah pagu di Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Kota Pekalongan dengan jumlah pagu yang terdapat di APBD 2024. Adanya perbedaan pagu anggaran pada Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Kota Pekalongan 2024 dengan pagu anggaran pada APBD 2024 terjadi dari proses hasil dinamika dalam pembahasan KUA-PPAS.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan Tahun 2024 terdari dari 12 Program, 24 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 27.835.468.000,00 naik sebesar Rp. 1.050.926.000,00 jika di bandingkan pagu penetapan APBD tahun 2024 sebesar Rp. 26.784.542.000,00.

Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang yang ada di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan dan 1 (satu) Sekretariat

Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pekalongan. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKAROR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			9.048.880.000			9.519.179.000			6.559.630.000	-2.489.250.000	-2.959.549.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	94,31 persen	1.046.470.000		94.31	1.260.520.000		94,81 persen	1.081.970.000	35.500.000	-178.550.000
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (IKK Outcome)	0,76 persen	950.700.000		0.76	500.520.000		0.99 persen	366.970.000	-583.730.000	-133.550.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				30.00	50.000.000		30 Orang	10.950.000	10.950.000	-39.050.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	80 orang	500.000.000		48.00	100.520.000			100.520.000	-399.480.000	0
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	300 Orang 2 Kegiatan 2 Kegiatan 300 Orang 300 Orang 30 Orang	450.700.000		300.00	350.000.000		3 Kegiatan	356.020.000	-94.680.000	6.020.000

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKAROR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (IKK Outcome)	0.505 Persen	95.770.000,00		0.51	760.000.000		0.563 Persen	715.000.000	619.230.000	-45.000.000
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	150 Orang	95.770.000,00		1.00	760.000.000		1 Organisasi	715.000.000	619.230.000	-45.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	34,29 persen	2.357.781.000		34.29	8.350.789.000		40,00 persen	5.477.660.000	-3.119.879.000	-2.873.129.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarpras olahraga pada jenjang pendidikan	76.19 Persen	659.984.000		76.19	1.882.553.000		76.19 persen	893.370.000	233.386.000	-989.183.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Lokasi 4 Paket 1 Lokasi 1 Lokasi	659.984.000		1.00	1.882.553.000		3 Unit	893.370.000	233.386.000	-989.183.000
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan prestasi olahraga tingkat kota	38,1 persen	935.000.000		38.10	3.503.500.000		42.86 Persen	1.453.700.000	-518.700.000	-2.049.800.000
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	10 Cabor 21 Cabor 16 Cabor	735.000.000		21.00	3.247.000.000		1 Kegiatan	56.420.000	-678.580.000	-3.190.580.000
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	71 sekolah	200.000.000		71.00	256.500.000		70 Orang	287.040.000	87.040.000	30.540.000

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKAROR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi	39 orang	519.890.000		25.00	2.861.829.000		0 orang	2.956.450.000	2.436.560.000	94.621.000
Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	250 orang	215.800.000		200.00	215.380.000		150 Orang	186.460.000	-29.340.000	-28.920.000
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	72 orang	120.000.000		1.00	100.000.000		1 Pelatda	0	-120.000.000	-100.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	6 Cabor 5 Cabor	-		5.00	2.546.449.000		150 Orang	2.769.990.000	2.769.990.000	223.541.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Peningkatan event olahraga tk Provinsi dan Nasional	4 event	202.907.000		10.53	102.907.000		4 Event	174.140.000	-28.767.000	71.233.000
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	5 Cabor	102907000		2.00	102.907.000		3 Laporan	174.140.000	71.233.000	71.233.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang	100 persen	5.892.402.000		100.00	6.338.094.000		100 persen	6.362.312.000	469.910.000	24.218.000

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKAROR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
	urusan pemerintah daerah										
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	259.500.000		100.00	917.076.000		100 Persen	915.726.000	656.226.000	-1.350.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 kali	9.500.000		3.00	5.000.000		2 Paket	3.650.000	-5.850.000	-1.350.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kali	250.000.000		3,000.00	912.076.000		100 Orang	912.076.000	662.076.000	0
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100 persen	1.777.130.000		100.00	1.482.098.000		100 persen	1.259.890.000	-517.240.000	-222.208.000
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Event kesenian dan kebudayaan yang dikembangkan	6 event	1.000.000.000		6.00	1.022.598.000		5 Event	867.700.000	-132.300.000	-154.898.000
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	12 Kegiatan 22 Komunitas 1 Kegiatan	1.000.000.000		41.00	1.022.598.000		1 Objek	867.700.000	-132.300.000	-154.898.000
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Event kesenian dan kebudayaan yang dilestarikan	10 Event	777.130.000		10.00	459.500.000		8 Event	392.190.000	-384.940.000	-67.310.000

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKAROR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Cabang 2 Event 1 Kegiatan 1 Paket	747.130.000		1.00	459.500.000		3 Objek	392.190.000	-354.940.000	-67.310.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100,00 persen	535.138.000		100.00	209.560.000		100,00 persen	155.480.000	-379.658.000	-54.080.000
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	26 komunitas	535.138.000		26.00	209.560.000		26 komunitas	155.480.000	-379.658.000	-54.080.000
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 komunitas	495.138.000		1.00	209.560.000		1 Lembaga	155.480.000	-339.658.000	-54.080.000
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100 persen	68.141.000		100.00	40.000.000		100,00 persen	31.250.000	-36.891.000	-8.750.000
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Akses Masyarakat dalam Perolehan Data Sejarah dan Tradisi	100 persen	68.141.000		100.00	40.000.000		100 Persen	31.250.000	-36.891.000	-8.750.000
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 dokumen	68.141.000		1.00	40.000.000		1 Dokumen	31.250.000	-36.891.000	-8.750.000
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	93,97 persen	19.534.000		93.97	173.000.000		95,74 persen	20.000.000	466.000	-153.000.000
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar	2.48 Persen	19.534.000		2.48	173.000.000		2.84 Persen	20.000.000	466.000	-153.000.000

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKAROR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
	Budaya Peringkat Kabupaten/Kota										
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1 Dokumen 2 Unit	19.534.000		3.00	173.000.000		3 Objek	20.000.000	466.000	-153.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengunjung museum batik	4,71 persen	1.208.085.000		4.71	2.159.147.000		4,75 persen	1.623.800.000	415.715.000	-535.347.000
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung museum batik	28.000 Orang	1.208.085.001		28,000.00	2.159.147.000		29000 Orang	1.623.800.000	415.714.999	-535.347.000
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	12 Bulan	210.684.000		1,310.00	240.597.000		1310 Unit	240.457.000	29.773.000	-140.000
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	7 Kegiatan	876.190.000		4.00	1.080.374.000		4 Unit	1.270.293.000	394.103.000	189.919.000
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	12 Bulan	121.211.000		9.00	838.176.000		9 Unit	113.050.000	8.161.000	725.126.000
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	11,50 persen	3.859.537.000		11.50	3.892.476.000		12,00 persen	3.292.957.000	-566.580.000	-599.519.000
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase usaha pariwisata yang difasilitasi	100 Persen	2.914.126.000		100.00	326.000.000		100 Persen	0	-2.914.126.000	-326.000.000

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKAROR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1.00	217.000.000			217.000.000	217.000.000	0
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	60 Lokasi	20.000.000		1.00	109.000.000		1 Laporan	0	-20.000.000	-109.000.000
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang berkembang	100 Persen	925.411.000		100.00	3.556.476.000		100 Persen	3.285.657.000	2.360.246.000	-270.819.000
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen 2 Kegiatan	275.387.000		2.00	350.000.000		2 Dokumen	300.000.000	24.613.000	-50.000.000
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Pameran	495.000.000		1.00	207.020.000		1 Dokumen	203.342.000	-291.658.000	-3.678.000
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan	224.000.000		1.00	100.000.000		2 Kegiatan	50.000.000	-174.000.000	-50.000.000

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKAROR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 media	53.500.000		2.00	25.000.000		2 Promosi	125.000.000	71.500.000	100.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	41,67 persen	272.566.000		41.67	453.262.000		51,28 persen	165.000.000	-107.566.000	-288.262.000
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Prasarana ruang kreatif				1.00	428.262.000		1 event	150.000.000	150.000.000	-278.262.000
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 event	272.566.000		1.00	428.262.000		1 Unit	150.000.000	-122.566.000	-278.262.000
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase ketercapaian pengembangan ekosistem ekonomi kreatif				100.00	25.000.000		100 persen	15.000.000	15.000.000	-10.000.000
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif					25.000.000		15 Produk	15.000.000	15.000.000	-10.000.000

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKAROR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	60,00 persen	272.567.000		60.00	822.000.000		80,00 persen	712.500.000	439.933.000	-109.500.000
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan kapasitas SDM EKRAF tingkat dasar	16.67 Persen	272.567.001		16.67	792.000.000		15.38 Persen	697.500.000	424.932.999	-94.500.000
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 kali	100.000.000		1.00	400.000.000		1 Laporan	373.000.000	273.000.000	-27.000.000
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	2 kali	32.567.000		50.00	30.000.000		50 Orang	15.000.000	- 17.567.000	-15.000.000
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				100.00	300.000.000		100 Orang	273.000.000	273.000.000	-27.000.000
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				30.00	50.000.000		25 Orang	36.500.000	36.500.000	-13.500.000
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					0.00	30.000.000		100 persen	15.000.000	15.000.000	-15.000.000

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKAROR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				60.00	30.000.000		60 Orang	15.000.000	15.000.000	-15.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 Persen	5.892.402.000		100.00	6.338.094.000		100 persen	6.362.312.000	469.910.000	24.218.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100Persen	22.850.000		100.00	18.121.000		100 Persen	29.788.000	6.938.000	11.667.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.750.000		2.00	3.538.000		2 Dokumen	8.538.000	5.788.000	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.650.000		2.00	2.583.000		2 Dokumen	2.501.000	851.000	-82.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan 4 Dokumen 5 Dokumen	18.450.000		15.00	12.000.000		15 Laporan	18.749.000	299.000	6.749.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	4.715.791.000		100.00	4.483.581.000		100 Persen	4.243.188.000	- 472.603.000	-240.393.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	4.633.691.000		32.00	4.411.287.000		30 Orang/bulan	4.182.818.000	- 450.873.000	-228.469.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	80.450.000		12.00	63.300.000		12 Dokumen	57.900.000	- 22.550.000	-5.400.000

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKAROR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1.650.000		12.00	8.994.000		1 Laporan	2.470.000	820.000	-6.524.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	289.827.000		100.00	1.048.988.000		100 Persen	244.330.000	-45.497.000	-804.658.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	7.500.000		4.00	7.500.000		4 Paket	5.480.000	-2.020.000	-2.020.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan 6 Unit	40.000.000		4.00	788.688.000		4 Paket	54.200.000	14.200.000	-734.488.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	10.000.000		4.00	7.500.000		4 Paket	5.480.000	-4.520.000	-2.020.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Bulan	58.500.000		4.00	55.300.000		5 Paket	60.370.000	1.870.000	5.070.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	20.000.000		2.00	19.500.000		13 Paket	14.600.000	-5.400.000	-4.900.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	447.400.000		100.00	582.600.000		100 Persen	632.600.000	185.200.000	50.000.000

NAMA OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PENETAPAN RKPD			APBD			PERUBAHAN RKPD			PAGU BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	
	URAIAN INDIKAROR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	TERHADAP RKPD	TERHADAP APBD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	2.400.000		4.00	2.400.000		4 Laporan	2.400.000	-	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	268.000.000		12.00	324.000.000		12 Laporan	374.000.000	106.000.000	50.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	2.400.000		4.00	2.400.000		4 Laporan	2.400.000	-	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	157.034.000		100.00	204.804.000		100 Persen	296.680.000	139.646.000	91.876.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 unit	74.840.000		19.00	113.980.000		19 Unit	84.730.000	9.890.000	-29.250.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	62.194.000		1.00	70.824.000		1 Unit	182.350.000	120.156.000	111.526.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	20.000.000		1.00	20.000.000		1 Unit	29.600.000	9.600.000	9.600.000

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan program-program yang ada. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan sangat ditentukan oleh dukungan dan kerjasama dari seluruh pegawai dan stakeholder yang ada. Diharapkan dengan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dapat mencapai target kinerja dalam Tahun 2024 sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dapat diukur dan dinilai keberhasilannya.

Selanjutnya, dalam rangka merinci pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan rencana anggaran, dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2024 ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

SABARYO PRAMONO, S.Sos, M.Si.
NIP. 19710122 199603 1 003

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2024

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA PEKALONGAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Robbil Aalamiin kami panjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan dapat menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun dalam rangka optimalisasi pencapaian program dan kegiatan serta untuk mengakomodir kebijakan pusat dan/ atau Provinsi Jawa Tengah, adanya penyesuaian indicator, penyesuaian hasil desk evaluasi RKPD triwulan I dan II Tahun 2024, serta penyesuaian hasil reviu Inspektorat.

Atas kerjasama semua pihak akhirnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2024, dapat disusun dan menjadi pedoman serta acuan bagi pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan di Kota Pekalongan Tahun 2024.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA PEKALONGAN

LILI SULISTYAWATI, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700711 199603 2 003

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 1

B. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 7

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 10

A. Evaluasi Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 10

B. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan 14

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 17

A. Tabel Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 17

BAB IV. PENUTUP 24

BAB I
PENDAHULUAN

A. ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan pangan Kota Pekalongan selama Tahun 2023 dan tahun berjalan 2024 serta perkiraan target anggaran tahun 2025.

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan renja Perangkat daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil- hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian Renstra OPD adalah untuk mengidentifikasikan sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasikan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara rinci rekapitulasi evaluasi Rencana Kerja OPD dan Renstra sampai dengan Tahun 2023 dan Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 akan dijabarkan dalam tabel lebih lanjut.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan dalam mencapai target sasaran yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel I.A.1. dibawah ini.

Tabel I.A.1. Target dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023

No	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp)	%
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	318.676.000	313.921.554	98,51
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	142.376.000	142.475.900	100,07
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	20.000.000	19.900.000	99,50
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	112.101.000	112.301.000	100,18
	Pemantauan stok, Pasokan , Harga Pangan	10.275.000	10.274.900	100
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	99.500.000	94.705.754	95,18
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	87.460.000	82.665.754	94,75
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	12.040.000	11.840.000	98,34
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	76.800.000	76.739.900	99,92
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	76.800.000	76.739.900	99,92
2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	45.840.000	45.088.000	98,36
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	45.840.000	45.088.000	98,36
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentahanan dan Kerentanan Pangan	45.840.000	45.088.000	98,36
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	74.190.000	73.539.900	99,12
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	74.190.000	73.539.900	99,12
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujuan Mutu dan Keamanaan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	74.190.000	73.539.900	99,12
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.277.603.000	5.033.258.371	95,37
	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	16.000.000	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1.500.000	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.689.507.000	4.461.454.182	95,14
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.600.586.000	4.372.558.482	95,04

			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87.271.000	87.245.680	99,97
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000	1.650.000	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5.000.000	5.000.000	100
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	5.000.000	5.000.000	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		213.794.000	209.528.082	98,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.250.000	1.238.000	99,04
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.500.000	36.406.000	99,74
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000	2.500.000	100
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	37.550.500	93,68
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	10.000.000	8.545.900	85,46
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.500.000	2.244.900	89,80
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.044.000	121.042.792	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah		286.668.000	284.340.427	99,19
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.705.000	85,25
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	118.318518	98,60
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164.668.000	164.316.900	99,79
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		66.634.000	56.935.700	85,45
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.514.000	36.977.700	79,50
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.500.000	8.390.000	98,71
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Lainya	11.620.000	11.568.000	99,56
5		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		416.690.000	412.269.524	98,94
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		108.732.000	107.659.961	99,01
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	108.732.000	107.659.961	99,01
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabuopaten/Kota		64.597.000	64.236.220	9 9,44
			Penjaminan Permunian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	52.297.000	51.936.220	99,31
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12.300.000	12.300.000	100
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam daerah Kabupaten/Kota		91.361.000	88.983.843	97,40
			Pengawasan peredaran bahan pakan / pakan benih/ bibit hijauan pakan ternak	70.500.000	68.297.000	96,88
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan	20.861.000	20.666.843	99,17

			Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		
		Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/ bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/ kota		152.000.000	151.388.500	99,60
			Penjaminan peredaran benih / bibit ternak	152.000.000	151.388.500	99,60
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			400.347.000	386.657.110	98,58
		Pembangunan Prasarana Pertanian		400.347.000	386.657.110	98,58
			Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan irigasi usaha tani	245.000.000	241.191.100	98,45
			Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	155.347.000	145.466.010	93,64
7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERIER			397.417.000	347.744.639	87,50
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabpuaten/Kota		56.200.000	49.328.904	87,77
			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	56.200.000	49.328.904	87,77
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		185.575.000	143.009.700	77,08
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	185.575.000	143.009.700	77,08
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tekhnis Kesehatan Masyarakat Veteriner		144.642.000	143.481.935	99,20
			Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	107.142.000	106.799.935	99,68
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	37.500.000	36.682.000	97,82
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			43.961.000	42.023.500	95,59
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		43.961.000	42.023.500	95,59
			Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikura, Perkebunan	15.250.000	14.865.000	97,48
			Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan hortikultura perkebunan peternakan dan kesehatan hewan	28.711.000	27.158.500	94,59
9	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			23.498.000	18.522.800	78,83
		Penerbitan izin usaha produksi benih / bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, Rumah Sakit Hewan, Rumah Potong Hewan		23.498.000	18.522.800	78,83
			Pengawasan pelaksanaan izin usaha rumah potong hewan	23.498.000	18.522.800	78,83
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			48.644.000	46.941.800	96,50
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		48.644.000	46.941.800	96,50
			Peningkatan Kapasitas Kelembagan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	26.200.000	25.800.000	98,47

			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	22.444.000	21.141.800	94,20
			JUMLAH :	**7.046.866.000**	**6.719.966.198**	**95,36**

Dari tabel I.A.1. diatas dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran Belanja pada tahun 2023 tercapai 95,36 % dari pagu Rp. 7.046.866.000,- terserap Rp. 6.719.966.198,-. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyerapan anggaran sangat berhasil dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan pertanian dan pangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2023 yang mendukung kepada pencapaian visi dan misi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan sesuai dengan hasil evaluasi pencapaian kinerja masing- masing sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2023, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2023 sebesar 152,65% dan dikategorikan "Sangat Berhasil".

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan sebagai berikut :

Tabel I.A.2. Capaian Kinerja Per Sasaran Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Optimalnya penanganan rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	100	100	100
2	Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Nilai Produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp.juta	55863, 63	637811, 34	257,62

3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	75,50	75,75	100,33

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Persentase penanganan daerah rawan pangan yang ditetapkan adalah 100 %. Berdasarkan formulasi bahwa Kota Pekalongan adalah kategori daerah yang tidak termasuk rawan pangan, sehingga apabila ada kejadian terkait kerawanan pangan dan dapat tertangani maka dapat disimpulkan bahwa Kota Pekalongan termasuk daerah tahan pangan, dan diperoleh realisasi sebesar 100%, sehingga capaian untuk indicator tersebut sebesar 100%. Dari capaian tersebut dapat dikatakan terdapat efektivitas dalam pencapaian target indikator.
2. Indikator kinerja Nilai produksi tanaman pangan yang ditetapkan adalah sebesar 55863,63 juta rupiah. Berdasarkan formulasi perhitungan nilai produksi tanaman pangan + nilai produksi hortikultura + nilai produksi peternakan / Rp. juta, sehingga realisasi sebesar 637811,34 juta rupiah, dan capaian untuk indicator kinerja tersebut sebesar 257,62 persen. Hal ini disebabkan karena tingginya harga gabah.
3. Indikator kinerja nilai SAKIP OPD yang ditetapkan adalah sebesar 75,50 indeks. Berdasarkan sumber penilaian dari Inspektorat untuk nilai SAKIP tahun N. Maka diperoleh realisasi sebesar 75,75 indeks, sehingga capaian untuk indicator kinerja tersebut adalah 100,33%. Dari capaian tersebut dapat dikatakan terdapat efektivitas dalam pencapaian target indikator.

Sehingga secara umum pencapaian sasaran untuk Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2023 sebesar 152,65% dengan kategori "SANGAT BERHASIL".

Mengacu pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan tahun 2021-2026, maka terdapat perbandingan sasaran kinerja pada tahun 2023 dan tahun sebelumnya. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.A.3.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023

Indikator Sasaran	Tahun 2022	Tahun 2023
Sasaran 1		
Persentase daerah rawan pangan	100%	100%
Sasaran 2		
Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan	62,25%	257,62%
Sasaran 3		
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	103%	100,33%

B. ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD.

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya Dinas Pertanian dan pangan Kota Pekalongan dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain :

1. Masih belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat di Kota Pekalongan, tercermin dari skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kota Pekalongan yang masih belum mencapai skor 100 (skor Tahun 2023 baru mencapai 93,7 skor). Hal ini perlu diatasi dengan berbagai upaya diantaranya yaitu melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) serta peningkatan ketrampilan dalam pengolahan pangan berbasis pangan lokal dan berbagai upaya diversifikasi pangan lainnya baik melalui sosialisasi, lomba maupun pelatihan.
2. Jumlah cadangan pangan daerah Pemerintah Kota Pekalongan yang belum sesuai dengan jumlah yang dianjurkan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional RI No. 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
3. Masih kurangnya dukungan pemerintah daerah dan lintas sektoral dalam pembangunan ketahanan pangan.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk olahan pangan variasi. Hal ini perlu diatasi dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan B2SA dan upaya meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam upaya diversifikasi pangan melalui sosialisasi,

lomba dan pelatihan. untuk olahan pangan variasi melalui sosialisasi dan pelatihan;

5. Faktor alam berupa banjir hujan/ air pasang (rob), mengakibatkan lahan pertanian yang terdampak rob dengan kadar salinitas yang lebih tinggi dari normal. Solusi permasalahan tersebut dengan mengajukan bantuan bibit padi tahan salinitas tinggi ke Pemerintah Pusat sebagai upaya agar petani yang terdampak rob tetap bisa melakukan usaha tani ;
6. Lokasi Kota Pekalongan yang berada di pesisir Pantai, mengakibatkan pengairan air irigasi pertanian mengandalkan kiriman dari wilayah sekitar, sehingga saat musim kemarau, volume air yang sampai ke Pekalongan jumlahnya berkurang, sementara kondisi irigasi yang ada juga sudah banyak yang mengalami penyempitan/ pendangkalan.
7. Kesadaran para petani untuk menanam secara serentak dalam 1 (satu) area yang kurang, sehingga resiko serangan hama dimungkinkan silih berganti.
8. Pemanfaatan alsintan yang masih terbatas, dimana petani masih mengandalkan tenaga manusia, dari pembenihan hingga panen, yang membutuhkan biaya besar, sementara tenaga kerja sudah mulai berkurang.
9. Menyempitnya lahan budidaya ternak di wilayah Kota Pekalongan, oleh karena itu perlu dilakukan intensifikasi usaha ternak dengan memanfaatkan teknologi berwawasan lingkungan ;
10. Merebaknya isu penyakit hewan menular baru (New Emerging Disease), maka perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis dengan konsep One Health, terpadu bersama instansi terkait kesehatan dan lembaga pendidikan ;
11. Penjualan bahan pangan asal hewan yang kurang memenuhi syarat ASUH di pasar tradisional, terutama pasar darurat Banjarsari. Permasalahan ini diatasi dengan meningkatkan peran masyarakat dan aparatur pengawas dalam proses penyediaan bahan pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal ;
12. Permintaan alih fungsi lahan pertanian yang relative tinggi. Sehingga perlu dilakukan pencermatan kondisi lapangan dan hanya memberikan rekomendasi AFL apabila lahan dimaksud peruntukan diluar non pertanian sesuai RTRW Kota Pekalongan ;
13. Penggunaan Kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi masih sangat kurang. Oleh karena itu perlu ada upaya mendorong semua petani untuk menggunakan

Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan di lapangan ;

Adapun peluang yang dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan adalah antara lain :

1. Kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk bersertifikat, khususnya untuk padi khusus dan tahan salinitas ;
2. Dukungan dari pihak- pihak terkait dalam pelaksanaan implementasi penggunaan kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi ;
3. Animo masyarakat yang cukup tinggi untuk mengikuti edukasi pertanian sejak dini, dengan mengirimkan siswa PAUD/TK/SD ke Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan ;
4. Penambahan alokasi pupuk subsidi bagi petani.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

A. EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini.

Tabel. II.A.1.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja / Capaian Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Kode OPD / Kode Bidang Urusan / Kode Program / Kode Kegiatan / Kode Sub Kegiatan	Nama OPD / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Penetapan APBD		Pagu APBD Penetapan	Realisasi Capaian Per Triwulan			
						TW I		TW II	
			T	Satuan		Fisik	%	Fisik	%
1	2	3	6	7	8	12	13	16	17
3.27.2.09.0.00.02.0000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN								
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan daerah	4,60	persen	384.650.000	0,00	0,00	0	0,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang dilaksanakan	100	persen	137.316.000	0,00	0,00	50	50,00
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya local yang tersedia	1	laporan	108.816.000	0,00	0,00	1	100
2.09.03.2.01.15	Pemantauan harga dan pasokan pangan	Informasi harga dan pasokan pangan	12	dokumen	13.500.000	3	25,00	3	25,00
2.09.03.2.01.16	Penyusunan Neraca bahan makanan (NBM)	Informasi harga dan pasokan pangan	1	dokumen	15.000.000	0,00	0,00	0	0,00
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan	100	persen	198.861.000	0,00	0,00	0	0,00
2.09.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana kebutuhan pangan lokal	1	dokumen	187.611.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02.03	Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/ kota	10	ton	11.250.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah pelaksanaan pendampingan kelompok pemberdayaan pekarangan	3	kegiatan	48.473.000	1	33,33	1	33,33

2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	laporan	48.473.000	0,00	0,00	0	0,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kecamatan tahan pangan di kota Pekalongan	100	persen	30.500.000	0,00	0,00	100	100
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	4	kecamatan	30.500.000	0,00	0,00	0	0,00
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutahirkan	1	dokumen	30.500.000	0,00	0,00	0	0,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	84,80	persen	54.500.000	0,00	0,00	0	0,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	25	sampel	54.500.000	0	0,00	0	0,00
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	dokumen	54.500.000	0	0,00	0	0,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	persen	6.076.525.000	20,84	20,84	75,76	104,09
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	persen	16.554.000	0,00	0,00	9,09	18,18
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	2	Dokumen	2.668.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	2	Dokumen	1.886.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	15	laporan	12.000.000	3	20,00	3	20,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	persen	5.181.742.000	41,67	41,67	83,33	83,33
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40	Orang/ bulan	5.128.944.000	0,00	0,00	40	100
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	dokumen	51.050.000	3	25,00	3	25,00
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1	laporan	1.748.000	1	100	0	0,00
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	persen	5.000.000	0,00	0,00	0	0,00
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	paket	5.000.000	0,00	0,00	0	0,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100	persen	250.944.000	16,95	16,95	9,58	26,53
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4	paket	1.250.000	0,00	0,00	1	11,11

3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengapan kantor yang disediakan	4	paket	84.694.000	1	25,00	1	25,00
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4	paket	2.500.000	1	25,00	1	25,00
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4	paket	40.000.000	1	25,00	1	25,00
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	paket	10.000.000	1	25,00	1	25,00
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	24	dokumen	2.500.000	6	1,00	7	29,17
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	laporan	110.000.000	30	20,00	45	75,00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	332.495.000	25	25,00	19,44	44,44
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan	12	laporan	2.000.000	3	25,00	3	25,00
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	120.000.000	3	25,00	3	25,00
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12	laporan	210.495.000	3	25,00	3	25,00
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	289.790.000	24,77	24,77	10,18	34,95
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/operasional yang terpelihara dan dibayarkan pajaknya	19	unit	68.290.000	5	26,32	2	36,84
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3	unit	211.500.000	0,00	0,00	0	0,00
3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25	unit	10.000.000	12	48,00	5	17,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai produksi pertanian pertahun	55,73	Miliar rupiah	778.405.000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nilai produksi peternakan pertahun	195,75	Miliar rupiah		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100	persen	576.770.000	25	25,00	25	25,003
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12	laporan	121.770.000	3	25,00	3	25,00

3.27.02.2.01.02	Pengawasan penggunaan sarana pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi				455.000.000				
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDG hewan, tumbuhan dan mikroorganisme wewenang kabupaten/kota	100	persen	64.213.000	25	25,00	25	25,00
3.27.02.2.02.02	Peningkatan kualitas SDG hewan/ tanaman	Jumlah pelaksanaan Peningkatan kualitas SDG hewan/ tanaman	1	dokumen	17.300.000	0	0,00	1	100
3.27.02.2.02.04	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3	Varietas unggul baru (VUB)	46.913.000	3	100	0	100
3.27.02.2.03	P2eningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5	kali	60.422.000	0	0,00	0,40	0,40
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar	6	laporan	60.422.000	1	16,67	1	33,33
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100	persen	262.018.000	0,00	0,00	0	0,00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana yang digunakan (IKK Output)	100	persen	262.018.000	0,00	0,00	0	0,00
3.27.03.2.02.10	Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1	unit	174.518.000	0	0,00	0	0,00
3.27.03.2.02.15	Pembangunan rehabilitasi pemeliharaan dan operasional rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun direhabilitasi dipelihara serta beroperasi	1	unit	87.500.000	0	0,00	0	0,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5,00	persen	311.326.000	0,00	0,00	0	0,00
3.27.04.2.03	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota	Kejadian penyakit hewan menular yang tertangani (PHM)	800	kasus	43.786.000	0	0,00	0	0,00
3.27.04.2.03	Pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kejadian dan kasus penyakit hewan menular	12	laporan	43.786.000	3	25,00	3	25,00
3.27.04.2.03	Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/ kota	Persentase pengawasan peredaran penjualan ternak	100	persen	11.250.000	0	0,00	50	50,00
3.27.04.2.03	Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan atau pengeluaran hewan dan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan atau pengeluaran hewan dan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM)	6	laporan	11.250.000	0	0,00	3	50,00

3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang tertangani di PUSKESWAN	500	ekor	26.250.000	122,20	24,44	207	164,80
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	laporan	26.250.000	3	25,00	3	25,00
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada pelaku usaha	100	persen	230.040.000	0	0,00	50	50,00
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1	laporan	37.500.000	0	0,00	1	100
3.27.04.2.04.10	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	12	Unit usaha	192.540.000	3	25,00	3	25,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100	persen	48.290.000	50,00	50,00	0	50,00
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian/peternakan	4	kali	48.290.000	2	50,00	0	50,00
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan	1	Ha	18.750.000	18	1,800	0	0
3.27.05.2.01.07	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah pelaksanaan keg penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	2	laporan	29.540.000	0	0,00	0	0,00
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian/ peternakan yang memiliki ijin	75,00	persen	30.968.000	0,00	0,00	0	0,00
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase penurunan jumlah usaha pemotongan hewan yang tidak berijin	5	persen	30.968.000	0	0,00	0	0,00
3.27.06.2.02.05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah izin usaha rumah potong hewan yang diawasi	1	laporan	30.968.000	0	0,00	0	0,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kenaikan kelas kelompok tani pertahun	5,00	persen	51.865.000	0,00	0,00	0	0,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani	100	persen	51.865.000	30	30,00	30	30,00
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1	unit	15.865.000	1	100	0	100

3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	1	unit	36.000.000	1	100	0	100

B. ANALISIS HASIL PENGENDALIAN PELAKSANAAN.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 secara kinerja sudah mendekati tercapai, akan tetapi dari penyerapan anggaran belum tercapai. Hal ini disebabkan kebanyakan kegiatan dilaksanakan pada triwulan III.

Walaupun capaian kinerja Dinas pertanian dan Pangan pada triwulan II tahun 2024 sudah mencapai target, namun langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja perlu dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dokumen perencanaan strategis (Renstra), Pengukuran Kinerja (IKU), hingga pedoman monitoring dan evaluasi agar antara dokumen- dokumen tersebut dapat berjalan sinergis, selaras dan terukur hingga dapat terlihat capaian keluaran (output), hasil (outcome), hingga manfaat (Benefit) yang mencerminkan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yang optimal, efektif dan efisien ;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tiap indikator kinerja yang diamanatkan dalam dokumen penetapan kinerja dengan mekanisme per triwulan ;
3. Melakukan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan terdiri dari pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko. Pengendalian Rutin adalah pengendalian secara simultan dilakukan terhadap proses bisnis kegiatan/ aktivitas sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku dan dilakukan setiap hari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Pengendalian Rutin telah dilaksanakan terhadap 3 kegiatan yaitu: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan Anggaran, (3) Kinerja. Adapun Pengendalian berkala fokus kegiatannya adalah mengendalikan kegiatan/pekerjaan terkait Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan,

Pengendalian Penyusunan Anggaran, Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa, Pengendalian BMD. Yang terakhir Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko adalah pengendalian yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya masalah pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan. Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dirancang dan dimulai sejak perencanaan kebijakan dan kegiatan/aktifitas. Selain itu, pengendalian ini digunakan sebagai dasar menyusun rencana pengendalian dan menjadi data dukung dan dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Telah disusun pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko disertai tingkat risiko dan respon terhadap risiko/rencana kegiatan pengendalian setiap Triwulan. Setiap kegiatan diidentifikasi factor risikonya, dicari penyebabnya dan dampaknya, dihitung tingkat risikonya berdasarkan hasil dari persepsi atas risiko dengan tiga koresponden, serta ditetapkan respon terhadap risiko kegiatan pengendalian dan besaran kemungkinan masih adanya sisa risiko setelah dilakukan kegiatan pengendalian. Dalam penilaian risiko Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan dititikberatkan di kegiatan pertanian dan pangan ;

4. Seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan memberikan kontrol serta tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kinerja jajaran dibawahnya, dengan memberlakukan mekanisme reward dan punishment, agar dapat terfokus terhadap target- target yang ditetapkan hingga tercapai hasil yang maksimal ;
5. Melakukan identifikasi terhadap lemahnya proses dan fungsi koordinasi dalam pencapaian sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan, baik koordinasi yang dilakukan dengan lingkup internal ataupun pihak/ lembaga/ instansi lain pusat dan daerah yang terkait langsung dengan upaya dan proses pencapaian sasaran strategis yang dimaksud.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. PROGRAM DAN KEGIATAN.

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan kegiatan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024.
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024.
3. Prioritas pengembangan system pertanian dan pangan yang diwujudkan dalam kegiatan.

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pertanian (Tanaman pangan, hortikultura, ketahanan pangan, peternakan, perkebunan). Maka dalam menetapkan program kegiatan harus mendukung visi, misi, tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan, maka disusun rencana program, kegiatan.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan rumusan program/ kegiatan. Dalam merumuskan program/ kegiatan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2024, ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya, antara lain :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Visi dan misi Walikota Pekalongan Tahun 2024 ditetapkan dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 ;

3. Program Nasional Kementerian/ Lembaga terkait dalam rangka percepatan mandiri pangan/ ketahanan pangan ;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan lintas sector pertanian dan ketahanan pangan dengan sector lain ;
5. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan ;
6. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan masyarakat dan potensi sumber daya pertanian yang tersedia.

Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2024 beserta anggaran penetapan dan perubahannya dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini :

Tabel. III.A.1.

Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2024 beserta Rencana anggaran Penetapan dan Perubahannya

(sesuai RKPD Perubahan Kota Pekalongan Tahun 2024 dalam SIPD)

Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RKPD Penetapan 2024	APBD Penetapan 2024	RKPD Perubahan 2024	Selisih
Dinas Pertanian dan Pangan	7.764.241.000,00	8.029.047.000,00	7.941.665.000,00	177.424.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	468.342.000,00	469.650.000,00	469.650.000,00	1.308.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	468.342.000,00	469.650.000,00	469.650.000,00	1.308.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	383.342.000,00	384.650.000,00	388.650.000,00	5.308.000,00
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	137.316.000,00	137.316.000,00	137.316.000,00	
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	108.816.000,00	108.816.000,00	109.166.000,00	350.000,00
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	197.553.000,00	198.861.000,00	198.861.000,00	1.308.000,00
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	
Pengadaan Cadangan Pangan	186.303.000,00	187.611.000,00	187.311.000,00	

Pemerintah Kabupaten/Kota				1.008.000,00
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	48.473.000,00	48.473.000,00	48.473.000,00	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	48.473.000,00	48.473.000,00	52.423.000,00	3.950.000,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	30.500.000,00	30.500.000,00	26.500.000,00	4.000.000,00
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	30.500.000,00	30.500.000,00	26.500.000,00	4.000.000,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	54.500.000,00	54.500.000,00	54.500.000,00	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	54.500.000,00	54.500.000,00	54.500.000,00	
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	54.500.000,00	54.500.000,00	54.500.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7.295.899.000,00	7.559.397.000,00	7.472.015.000,00	176.116.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	7.295.899.000,00	7.559.397.000,00	7.472.015.000,00	176.116.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.038.840.000,00	6.076.525.000,00	5.929.093.000,00	109.747.000,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.554.000,00	16.554.000,00	16.554.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.668.000,00	2.668.000,00	2.668.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.352.384.000,00	5.181.742.000,00	5.181.742.000,00	170.642.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.263.365.000,00	5.128.944.000,00	4.964.741.000,00	298.624.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87.271.000,00	51.050.000,00	51.050.000,00	36.221.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.748.000,00	1.748.000,00	1.748.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.944.000,00	250.944.000,00	250.944.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.694.000,00	84.694.000,00	84.694.000,00	

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	9.771.000,00	229.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.000.000,00	110.000.000,00	122.000.000,00	12.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.668.000,00	332.495.000,00	332.495.000,00	46.827.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000,00	120.000.000,00	125.000.000,00	5.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.668.000,00	210.495.000,00	210.495.000,00	46.827.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.290.000,00	289.790.000,00	289.790.000,00	161.500.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.290.000,00	68.290.000,00	68.290.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	211.500.000,00	211.500.000,00	161.500.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	284.730.000,00	323.405.000,00	845.943.000,00	561.213.000,00
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	95.711.000,00	121.770.000,00	121.770.000,00	26.059.000,00
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0,00	0,00	455.000.000,00	455.000.000,00
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	95.711.000,00	121.770.000,00	172.770.000,00	77.059.000,00
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	62.905.000,00	64.213.000,00	64.213.000,00	1.308.000,00
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	17.300.000,00	17.300.000,00	17.300.000,00	
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	45.605.000,00	46.913.000,00	52.913.000,00	7.308.000,00
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	59.114.000,00	60.422.000,00	60.422.000,00	1.308.000,00
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	59.114.000,00	60.422.000,00	70.960.000,00	11.846.000,00

Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	67.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	10.000.000,00
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	67.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	10.000.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	313.518.000,00	262.018.000,00	262.018.000,00	51.500.000,00
Pembangunan Prasarana Pertanian	313.518.000,00	262.018.000,00	262.018.000,00	51.500.000,00
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	51.500.000,00	0,00	0,00	51.500.000,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	174.518.000,00	174.518.000,00	174.518.000,00	
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	87.500.000,00	87.500.000,00	87.500.000,00	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	434.053.000,00	311.326.000,00	326.376.000,00	107.677.000,00
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	43.478.000,00	43.786.000,00	43.786.000,00	308.000,00
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	43.478.000,00	43.786.000,00	58.836.000,00	15.358.000,00
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	176.825.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	150.575.000,00
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	176.825.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	150.575.000,00
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	202.500.000,00	230.040.000,00	230.040.000,00	27.540.000,00
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	165.000.000,00	192.540.000,00	192.540.000,00	27.540.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	48.290.000,00	48.290.000,00	30.752.000,00	17.538.000,00
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	48.290.000,00	48.290.000,00	48.290.000,00	

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18.750.000,00	18.750.000,00	16.750.000,00	2.000.000,00
Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	29.540.000,00	29.540.000,00	14.002.000,00	15.538.000,00
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	30.968.000,00	30.968.000,00	30.968.000,00	
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	30.968.000,00	30.968.000,00	30.968.000,00	
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	30.968.000,00	30.968.000,00	30.968.000,00	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	145.500.000,00	506.865.000,00	46.865.000,00	98.635.000,00
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	145.500.000,00	506.865.000,00	506.865.000,00	361.365.000,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	35.500.000,00	15.865.000,00	15.865.000,00	19.635.000,00
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	110.000.000,00	491.000.000,00	31.000.000,00	79.000.000,00
Jumlah :	**7.764.241.000,00**	**8.029.047.000,00**	**7.941.665.000,00**	**177.424.000,00**

Adapun penjabaran Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2024 beserta anggaran penetapan dan perubahannya sebagai berikut :

1. Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Dijabarkan dalam kegiatan :
    a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/ kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 137.316.000,-
    b. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/ kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 197.553.000,- bertambah Rp. 1.308.000,- menjadi Rp. 198.861.000,-
    c. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita / tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 48.473.000,-
2. Program Penanganan kerawanan pangan. Dijabarkan dalam kegiatan :

a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 30.500.000,-

3. Program Pengawasan keamanan pangan. Dijabarkan dalam kegiatan :
   a. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/ kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 54.500.000,-
4. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah. Dijabarkan dalam kegiatan:
   a. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 16.554.000,-
   b. Administrasi keuangan, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp.5.352.384,000,- berkurang Rp. 170.642.000,- menjadi Rp. 5.181.742.000,-
   c. Administrasi kepegawaian, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp.5.000,000,-
   d. Administrasi Umum, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 250.944.000,-
   e. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 285.668.000,- bertambah Rp. 46.827.000,- menjadi Rp. 332.495.000,-
   f. Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 128.290.000,- bertambah Rp. 161.500.000,- menjadi Rp. 289.790.000,-
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Dijabarkan dalam kegiatan :
   a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 95.711.000,- bertambah Rp. 26.059.000,- menjadi Rp. 121.770.000,-
   b. Pengelolaan sumberdaya genetic (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 62.905.000,- bertambah Rp. 1.308.000,- menjadi Rp. 64.213.000,-
   c. Peningkatan mutu dan peredaran benih / bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/ Kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 59.114.000,- bertambah Rp. 1.308.000,- menjadi Rp. 60.422.000,-

d. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/ Kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 67.000.000,- bertambah Rp. 10.000.000,- menjadi Rp. 77.000.000,-

6. Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Dijabarkan dalam kegiatan :
   a. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 313.518.000,- berkurang Rp. 51.500.000,- menjadi Rp. 262.018.000,-
7. Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Dijabarkan dalam kegiatan :
   a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/ kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 43.478.000,- bertambah Rp. 308.000,- menjadi Rp. 43.786.000,-
   b. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/ kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 11.250.000,-
   c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/ kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 176.825.000,- berkurang Rp. 150.575.000,- menjadi Rp. 26.250.000,-
   d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 202.500.000,- bertambah Rp. 27.540.000,- menjadi Rp. 230.040.000,-
8. Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Dijabarkan dalam kegiatan :
   a. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 48.290.000,-
9. Program Perizinan Usaha Pertanian. Dijabarkan dalam kegiatan :
   a. Penerbitan izin usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan pakan, Fasilitas Pemeliharaan hewan, rumah sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah potong Hewan, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 30.968.000,-

10. Program Penyuluhan pertanian. Dijabarkan dalam kegiatan :

    a. Pelaksanaan Penyuluhan pertanian, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 145.500.000,- bertambah Rp. 361.365.000,- menjadi Rp. 506.865.000,-

BAB IV
P E N U T U P

Secara umum Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Akan tetapi terdapat hambatan yang muncul selama triwulan II tahun 2024 antara lain Faktor alam berupa banjir hujan/ air pasang (rob), mengakibatkan lahan pertanian yang terdampak rob dengan kadar salinitas yang lebih tinggi dari normal. Solusi permasalahan tersebut dengan mengajukan bantuan bibit padi tahan salinitas tinggi ke Pemerintah Pusat sebagai upaya agar petani yang terdampak rob tetap bisa melakukan usaha tani.

Walaupun capaian kinerja Dinas pertanian dan Pangan pada triwulan II tahun 2024 sudah mencapai target, namun langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja perlu dilakukan antara lain :

- Meningkatkan kualitas dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dokumen perencanaan strategis (Renstra), Pengukuran Kinerja (IKU), hingga pedoman monitoring dan evaluasi agar antara dokumen- dokumen tersebut dapat berjalan sinergis, selaras dan terukur hingga dapat terlihat capaian keluaran (output), hasil (outcome), hingga manfaat (Benefit) yang mencerminkan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yang optimal, efektif dan efisien ;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tiap indikator kinerja yang diamanatkan dalam dokumen penetapan kinerja dengan mekanisme per triwulan ;
- Seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan memberikan kontrol serta tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kinerja jajaran dibawahnya, dengan memberlakukan mekanisme reward dan punishment, agar dapat terfokus terhadap target- target yang ditetapkan hingga tercapai hasil yang maksimal ;
- Melakukan identifikasi terhadap lemahnya proses dan fungsi koordinasi dalam pencapaian sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan, baik koordinasi yang dilakukan dengan lingkup internal ataupun pihak/ lembaga/ instansi lain pusat dan daerah yang terkait langsung dengan upaya dan proses pencapaian sasaran strategis yang dimaksud.

Akhir kata semoga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat berguna baik untuk mengukur kinerjanya sendiri maupun sebagai umpan balik bagi pihak- pihak yang berkepentingan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA PEKALONGAN

LILI SULISTYAWATI, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700711 199603 2 003

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK

PERUBAHAN

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA PEKALONGAN

https://dindagkop.pekalongankota.go.id @dindagkopukm.kotapekalongan @dindagkopukm.kotapekalongan

Jl. Majapahit No.9, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah
Telepon: (0285) 425174

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Alhamdulillah dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Dindagkop & UKM) Kota Pekalongan Tahun 2024 telah berhasil disusun dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa sholawat berangkai salam kita panjatkan kehadirat Nabi Besar Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumil hisab kelak.

Penyusunan Renja Perubahan Dindagkop & UKM Kota Pekalongan tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024, dan telah disesuaikan juga dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perubahan ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan, disamping guna mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan yang berkesinambungan. Usulan perubahan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan penyusunan perubahan Renja yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dindagkop & UKM dan menyangkut keberhasilan dan pencapaian target. Penyusunan Perubahan Renja ini pada hakekatnya merupakan fundamental dalam sistem perencanaan daerah.

Diharapkan Perubahan Renja ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh jajaran Dindagkop & UKM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pekalongan dapat tercapai dengan optimal. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 ini membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan pada tahun-tahun yang akan datang. Atas bantuan dan partisipasi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan berlangsung diucapkan terima kasih.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dindagkop & UKM
Kota Pekalongan

Drs. SUPRIONO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19661008 199203 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 16
2.4 Review Terhadap RKPD 2024 17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 39
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 41
BAB IV PENUTUP 56

DAFTAR TABEL

Tabel T.C 29 Hasil Evaluasi Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 11
Tabel T.C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2024 14
Tabel T.C 31 Review terhadap RKPD Tahun 2024 18
Tabel T.C 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 40
Tabel T.C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 43

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra OPD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan dalam Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Pasal 363 disebutkan sebagai berikut :

(1.) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.

(2.) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 ayat (3).

(3.) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Dalam Pasal 364 disebutkan sebagai berikut :

(1.) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.

(2.) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Paragraf 3 Pasal 367 disebutkan sebagai berikut:

(1.) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2.) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Perubahan Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Perubahan Renja ini disususn berdasarkan evaluasi perkembangan keadaan dalam 1 (satu) tahun berjalan. Perkembangan sebagaimana dimaksud adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangkaan pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah,

keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjjalan dan/atau keadaan darurat.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan Pemerintah Daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diakomodir terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Pekalongan yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan perubahan atas Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2024 didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD) Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pekalongan Tahun 2024, berlandaskan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Panghapusan Kemiskinan Ekstrim.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 77);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan anggaran 2024 Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan adalah sebagai pedoman penyusunan Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Serta memberikan informasi kondisi riil dinas beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah melakukan evaluasi dan menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi-asumsi kerangka kegiatan sehingga tercipta sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan.

Tujuan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi:

a) Program dan pagu indikatif yang dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan;
b) Program dan pagu indikatif yang dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan;
c) Program dan pagu indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan;
d) Penyesuaian anggaran kegiatan untuk memenuhi kebutuhan selama satu tahun sehingga anggaran lebih efisien ,lebih efektif, tepat sasaran, tepat waktu dan akuntabel berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah;
e) Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga merupakan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta dasar perencanaan program dan kegiatan mendatang sehingga dapat mengakomodir semua aspirasi masyarakat / kebutuhan dinas yang dinamis;
f) Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam rangka pencapaian Visi Misi Walikota Pekalongan Tahun 2021 –2026.
g) Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
b) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;

c) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

d) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

e) Sebagai bahan evaluasi dan pengukuran kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan meliputi :

1. Bab I : PENDAHULUAN
   - 1.1 Latar Belakang
   - 1.2 Landasan Hukum
   - 1.3 Maksud dan Tujuan
   - 1.4 Sistematika Penulisan
2. Bab II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
   - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
   - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
   - 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
   - 2.4 Review terhadap RKPD
   - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. Bab III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4. Bab IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dindagkop & UKM Kota Pekalongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dindagkop & UKM Kota Pekalongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dindagkop & UKM Kota Pekalongan selama tahun 2024.

Pengukuran kinerja kegiatan/sub kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui

tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator

kinerja kegiatan/sub kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2024 Dindagkop & UKM Kota Pekalongan

sebesar Rp. 22.238.374.000,-, termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN dengan melaksanakan 2 urusan pemerintahan, 10 program, 18 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 8.9.54.830.149,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 95.15% dan capaian kinerja keuangan sebesar 40.27%.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan II tahun 2024 pada Dindagkop & UKM Kota Pekalongan dari 2 urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan , Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan dengan 10 program, 18 kegiatan dan 35 sub kegiatan.

Adapun evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 hasil/ keluaran/program/kegiatan/sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Pada pelaksanaan Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan s.d triwulan II tahun 2024 terdapat 9 indikator program yang belum tercapai, dikarenakan kegiatan tersebut masih berlangsung.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Pada Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II 2024 terdapat 3 indikator program yang telah tercapai.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Pada Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II 2024 tidak terdapat capaian program/kegiatan yang melebihi target.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

   Faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program/kegiatan sampai dengan

   triwulan II tahun 2024 adalah dikarenakan program/kegiatan tersebut masih berlangsung.

Hasil evaluasi Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel T.C. 29 Hasil evaluasi Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Presentase capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Realisasi 2024 TW II			
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	Persen	33.23	20.66	31.49	20.66	20.66	62.17	Belum Tercapai
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Persen	59.68	35.01	58.77	35.01	35.01	58.66	Belum Tercapai
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	Persen	12.37	0.31	12.16	0.31	0.31	2.51	Belum Tercapai
5	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	Persen	77.70	82.59	76.17	82.59	82.59	106.29	Melebihi Target
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persen	100	75.00	93.75	75.00	75.00	75.00	Belum Tercapai
7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	Persen	100.00	100	92	100	100	100.00	Tercapai

8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume ekspor	Persen	8.19	3.47	7.79	3.47	3.47	42.37	Belum Tercapai
9	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	Persen	83.99	43.51	79.99	43.51	43.51	51.80	Belum Tercapai
10	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	Persen	7.50	0.63	5.34	0.63	0.63	8.40	Belum Tercapai
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	41.42	100	41.42	41.42	41.42	Belum Tercapai
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	40.07	100	40.07	40.07	40.07	Belum Tercapai

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan OPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2023 nilai indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sebesar 88,69 (A) atau predikat sangat baik. Hal tersebut dikarenakan peningkatan pelayanan Masyarakat yang antara lain; pelayanan perpanjangan Kartu Ijin Pemakaian Tempat (KIPT) Pasar, pengajuan rekomendasai subsidi bahan bakar, pelayanan tera/ tera ulang, pembinaan UMKM dan koperasi dan pelayanan umum lainnya. Sedangkan nilai evaluasi AKIP Dindagkop & UKM Kota Pekalongan pada tahun 2023 sebesar 85,45 (A) dengan predikat memuaskan. Evaluasi AKIP menggambarkan efektivitas dan efisiensi atas penggunaan sumberdaya dan capaian target kinerja dalam organisasi. Nilai 85,45 menunjukan bahwa Dindagkop & UKM Kota Pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai target kinerjanya telah sesuai dengan arah, tujuan dan sasaran kinerja secara efektif dan efisien. Berbagi Upaya telah dilakukan dalam rangka peningktakan pelayanan publik dan akuntabilitas antara lain;

a. Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan dan Retribusi (Sitantri)
b. Optimalisasi E-kinerja dan E-presensi
c. Penggunaan Casecading dan pelaporan kinerja triwulan
d. Pengaduan pelayanan masyarakat melalui akun sosial media di @dindagkopukm.kotapekalongan, https://dindagkop.pekalongankota.go.id/, www.facebook.com/dindagkopukmkotapekalongan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat dilihat sebagaimana tabel Tabel.T.C.30.

Tabel T.C. 30 Pencapaian kinerja Pelayanan Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)*	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi (Rp. Trilyun)			Rp.8,12 Trilyun	Rp.8,42 Trilyun	Rp.8,72 Trilyun	Rp.9,02 Trilyun	Rp.11,54 Trilyun	Rp. 10,23 Trilyun	Rp.8,42 Trilyun	Rp.8,72 Trilyun	
2	Nilai Ekspor Perdagangan			26,71 Juta US$	26.97 Juta US$	27,24 Juta US$	27,51 Juta US$	11,09 Juta US$	5,96 US$	26,97 Juta US$	27,24 Juta US$	
3	Nilai Evaluasi AKIP			85.50	86.5	87.5	88.50	85.45	n/a	86.5	87.5	
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			76.78	77.08	77.38	77.68	88.69	77.08	77.08	77.38	
5	Prosentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi			3,84 persen	3,69 persen	3,56 persen	3,44 persen	n/a	3,69 persen	3,69 persen	3,56 persen	
6	Persentase koperasi berkualitas			30,94 persen	31,49 persen	32,36 persen	33,23 persen	29,70 persen	20,66	31,49 persen	32,36 persen	
7	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota			58,31 persen	58,77 persen	59,22 persen	59,68 persen	97,20 persen	35,01 persen	58,77 persen	59,22 persen	
8	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha			12,06 persen	12,16 persen	12,27 persen	12,37 persen	23,09 persen	23,71 persen	12,16 persen	12,27 persen	
9	Prosentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko)			75,42 persen	76,17 persen	76,92 persen	77,70 persen	81,07 persen	82,59 persen	76,17 persen	76,92 persen	

10	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan diwilayah kerjanya			81,25 persen	93,75 persen	100 pesen	100 persen	68,75 persen	75,00 persen	93,75 persen	100 pesen	
11	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya			54,55 persen	72,73 persen	90,91 persen	100 persen	100 persen	100 persen	72,73 persen	90,91 persen	
12	Persentase peningkatan volume ekspor			7,6 persen	7,79 persen	7,99 persen	8,19 persen	-0,04 persen	3,47 persen	7,79 persen	7,99 persen	
13	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			77,99 persen	79,99 persen	81,99 persen	83,99 persen	59,02 persen	43,51 persen	79,99 persen	81,99 persen	
14	Persentase ketercapaian jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaranya			4,26 persen	5,24 persen	6,42 persen	7,5 persen	0,96 persen	0,63 persen	5,24 persen	6,42 persen	
15	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	36,58 persen	100 persen	100 persen	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan adalah :

a. Koperasi dan UMKM

1. Lemahnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM di bidang manajemen termasuk SDM, permodalan dan pemasaran.
2. Lemahnya akses koperasi dan UMKM terhadap sumber permodalan dan pembiayaan usaha.
3. Masih rendahnya tingkat keberlanjutan (eksistensi) dan ketahanan koperasi sebagai salah satu pilar penyangga ekonomi
4. Isu kesetaraan gender dalam distribusi pendapatan menjadi permasalahan yang perlu digali penyelesaiannya ketika jumlah UMKM sektor kuliner yang ternyata memiliki peran dalam peningkatan ekonomi. Selain itu nilai modal usaha UMKM dari koperasi dan kontribusi peran gender dalam perkoperasian di Kota Pekalongan perlu digali dan dikembangkan.
5. Masih lemahnya daya saing kualitas produk UMKM di pasar domestik maupun global

b. Perdagangan

1. Lemahnya koordinasi antara sektor produksi, transportasi dan jasa sehingga menghambat distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
2. Kenaikan beberapa komoditas kebutuhan pokok terutama minyak goreng, cabe, kedelai yang berdampak pada tingkat laju inflasi harus dikendalikan dan dibutuhkan koordinasi lintas lembaga dan sektor serta langkah-langkah taktis pengendalian harga.
3. Kurang optimalnya pengembangan pasar dengan pola jejaring dan kemitraan antar pelaku usaha dalam pengembangan pasar dalam negeri.
4. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha mikro terhadap peraturan perundangan perlindungan konsumen dan UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Peralatanya).

5. Masih rendahnya pengetahuan pelaku usaha produk unggulan untuk melaksanakan kegiatan ekspor dan bisnis internasional.

c. Pasar dan PK-5

1. Pembangunan kembali Pasar Banjarsari sebagai icon dan pusat perbelanjaan di Kota Pekalongan.
2. Masih kurang optimalnya pendapatan retrbusi yang bersumber dari pasan PK-5 dalam memberikan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).
3. Adanya PK-5 yang masih melakukan aktivitas berjualan di badan jalan serta kurangnya kesadaran terhadap kebersihan, ketertiban dan keindahan.
4. Keberadaan pusat fashion dan kuliner Sugihwaras yang belum digunakan secara maksimal oleh PK-5.

2.4. Review terhadap RKPD 2024

Dari Renja 2024 yang telah disusun oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja tahun 2024 terdapat penyesuaian pagu, program dan kegiatan. Penyesuaian Rancangan awal RKPD terhadap Renja tahun 2024 tersebut melihat urgensi dan target indikator kinerja organisasi. Pada RKPD Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sebesar Rp. 22.238.374.000,- menjadi Rp.19.341.510.000,- yang terdapat dalam beberapa kegiatan-kegiatan. Penyesuaian pada Program antara lain; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota . Review terhadap RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T.C. 31

Tabel.T-C.31. Review terhadap RKPD Tahun 2024
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

No	RKPD Penetapan 2024					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2024)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH***					
1	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	31,49 persen		**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	31,49 persen		

1.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanny a dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pekalo ngan	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	63,64 persen		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pekalongan	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatann ya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaa n dalam daerah kewenanga n kabupaten / kota	63,64 persen		
1.1.a	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanny a Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalo ngan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 Unit Usaha	110,667,00 0	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaa n dan pengawasa n	100 Unit Usaha	110,667,0 00	
2	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI AN**		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	58,77 persen		**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIA N**		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah	58,77 persen		

			dalam daerah kab/kota					keanggotaan dalam daerah kab/kota			
2.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0.98 persen		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0.98 persen		
2.1.a	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Pekalongan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	225 Orang	606,707,000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Pekalongan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	225 Orang	606,707,000	

3	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,16 persen		**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,16 persen		
3.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Pekalongan	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	4,85 persen		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Pekalongan	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	4,85 persen		
3.1.a	Pengembangan Usaha Mikro	Kota Pekalongan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	186 Unit Usaha	952,998,000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Pekalongan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	209 Unit Usaha	952,998,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					*URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN*					

4	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	75,42 persen		**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	75,42 persen		
4.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kota Pekalongan	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 persen		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kota Pekalongan	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 persen		

4.1.a	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pekalongan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8 Dokumen	8,400,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pekalongan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan	8 Dokumen	6,200,000	
4.2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kota Pekalongan	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	100 persen		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kota Pekalongan	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	100 persen		
4.2.a	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	8,400,000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen Tanda Daftar Gudang (TDG)	1 Dokumen	2,460,000	

5	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	93,75 persen		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	93,75 persen		
5.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	6.25 persen		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	6.25 persen		
5.1.a	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	2,050,000,000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	87,075,000	
5.1.a	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	7,652,231,000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	6,797,905,000	

5.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	81,25 Persen		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	81,25 Persen		
5.2.a	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	67,600,000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	222,750,000	
6	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	88,00 persen		**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	88,00 persen		

6.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	54.55 persen		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	54.55 persen		
6.1.a	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	18 Laporan	113,338,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	19 Laporan	130,148,000	
6.2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)			

6.2.a	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Laporan	8,515,000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Laporan	8,515,000	
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**		Persentase peningkatan volume ekspor	7,79 persen		**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**		Persentase peningkatan volume ekspor	7,60 persen		
7.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir (SIDa)	25 Pelaku Usaha		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir (SIDa)	25 Pelaku Usaha		

7.1.a	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kota Pekalongan	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	30 Produk	136,241,000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kota Pekalongan	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	30 Produk	114,131,000	
8	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	79,99 Persen		**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	79,99 Persen		
8.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Pekalongan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	79,99 Persen		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Pekalongan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	79,99 Persen		

8.1.a	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Pekalongan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5038 Unit	281,874,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Pekalongan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5038 Unit	281,874,000	
8.1.b	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Pekalongan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	85 Orang	34,110,000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Pekalongan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	85 Orang	34,110,000	
9	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	6,26 persen		**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	5,34 Persen		
9.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Pekalongan	peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	100 persen		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Pekalongan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	100 persen		

9.1.a	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	128 UMKM	899,483,000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	160 UMKM	902,033,000	
9.1.b	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	112,750,000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	55 UMKM	110,640,000	
	Non Urusan					**Non Urusan**					

10	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		
10.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		
10.1.a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,146,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,146,000	
10.1.b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1,517,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1,517,000	

10.1.c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12,000,000	
10.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		
10.2.a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	7,240,958,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan	6,985,107,000	
10.2.b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	67,800,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	67,800,000	
10.2.c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	1,406,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1,406,000	

			Keuangan Akhir Tahun SKPD					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
11	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		
11.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		
11.1.a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5,000,000	

11.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		
11.2.a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5,500,000	
11.2.b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	82,553,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	92,351,000	
11.2.c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2,500,000	
11.2.d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	82,850,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4 Paket	85,850,000	

								Disediakan			
11.2.e	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	60,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	2 Paket	61,302,000	
11.2.f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2,500,000	
11.2.g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	272,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	272,000,000	

11.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		
11.3.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2,400,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2,400,000	
11.3.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	337,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	319,300,000	
11.3.c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	485,355,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	487,355,000	

12	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah			
12.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		
12.1.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit	478,075,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44 Unit	496,163,000	

12.1.b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	30,000,000	
12.1.c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	26,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	76 Unit	41,100,000	
JUMLAH				**22,238,374,000**					**19,341,510,000**		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2024 diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Sarana distribusi perdagangan berupa pasar rakyat merupakan instrument penting dalam alur distribusi dalam pemenuhan stok dan pengendalian harga masyarakat. Terdapat beberapa usulan pengembangan sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi sarana distribusi perdagangan usulan Masyarakat Kota Pekalongan pada tahun 2024. Adapun usulan Masyarakat terkait penyediaan sarana distribusi perdagangan dan pengembangan Koperasi Kota Pekalongan antara lain:

a. Bantuan Sarana Pemasaran berupa gerobak UMKM sebanyak 18 unit gerobak.

Usulan program dan kegiatan penelaahan masyarakat pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel T.C-32.

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME/ BESARAN	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**				
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				
	Bantuan Sarana Pemasaran Berupa Gerobak UMKM	*Kota Pekalongan*	*Jumlah UMKM terfasilitasi bantuan sarana pemaasaran*	*18 UMKM*	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dindagkop & UKM Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menetapkan tujuan, sasaran, stategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan. Untuk dapat menjalankan proses tersebut, beberapa kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2024 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja ini selain sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsi, juga dalam upaya melaksanakan pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024. Rencana kerja DIndagkop & UKM Tahun 2024 mengacu kepada Renstra Dindagkop & UKM 2021-2026, mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dindagkop & UKM Tahun 2024 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang sudah ada dalam SIPD, sehingga ketercapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

Berpedoman juga pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 70 tahun 2019 bahwa pemerintah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah memanfaatkan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangannya.

Kegiatan Dindagkop & UKM Kota Pekalongan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Rencana Program, Kegaiatan dan pendanaan dalam

Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024 dilakukan malalui https://sipd-ri.kemendagri.go.id dan dapat dilihat sebagaimana dokumen terlampir.

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN**				**19,341,510,000**	DAU			**20,301,719,000**
2.17	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH***				**1,670,372,000**	DAU			**385,300,000**
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)		31,49 persen	**110,667,000**	DAU		**32,36 persen**	**61,780,000**

2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	Kota Pekalongan	63,64 persen	110,667,000	DAU		64,46 persen	61,780,000
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kota Pekalongan	100 Unit Usaha	110,667,000	DAU		100 unit usaha	61,780,000
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota		58,77 persen	**606,707,000**	DAK Non Fisik-P2KUMK	Dana DAK Non Fisik PK2UMK tidak dialokasikan pada Tahun 2025	**0**	**000**
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Kota Pekalongan	0.98 persen	606,707,000	DAK Non Fisik-P2KUMK		0	000

2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Pekalongan	225 Orang	606,707,000	DAK Non Fisik-P2KUMK		0	000
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)		12,16 persen	**952,998,000**	DAU		**12,27 persen**	**323,520,000**
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	Kota Pekalongan	4,85 persen	952,998,000	DAU		6,06 persen	323,520,000
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Pekalongan	209 Unit Usaha	952,998,000	DAU		47 UMKM	323,520,000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				**17,671,138,000**	DAU			**19,916,419,000**
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)		75,42 persen	**8,660,000**	DAU		**76.93%**	**6,330,000**

3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	Kota Pekalongan	100 persen	6,200,000	DAU		100 persen	4,530,000
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pekalongan	8 Dokumen	6,200,000	DAU		6 Dokumen	4,530,000
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	Kota Pekalongan	100 persen	2,460,000	DAU		100 Persen	1,800,000
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kota Pekalongan	1 Dokumen	2,460,000	DAU		1 Dokumen	1,800,000
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		93,75 persen	**7,107,730,000**	DAU		**100 persen**	**8,682,729,000**

3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Kota Pekalongan	6.25 persen	6,884,980,000	DAU		18.75 persen	8,633,379,000
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	1 Unit	87,075,000	DAU		1 Unit	1,500,000,000
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	12 Unit	6,797,905,000	DAU		12 Unit	7,133,379,000
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	Kota Pekalongan	81,25 Persen	222,750,000	DAU		57,47 persen	49,350,000
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	2 Dokumen	222,750,000	DAU		2 Dokumen	49,350,000
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya		88,00 persen	**138,663,000**	DAU		**96 persen**	**102,960,000**

	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	Kota Pekalongan	54.55 persen	130,148,000	DAU		90,91 persen	96,740,000
3.30.04	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	19 Laporan	130,148,000	DAU		18 Laporan	96,740,000
3.30.04.2.02	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	Kota Pekalongan	100 Persen	8,515,000	DAU		100 persen	6,220,000
3.30.04.2.02.0001	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kota Pekalongan	3 Laporan	8,515,000	DAU		3 Dokumen	6,220,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume ekspor		7,60 persen	**114,131,000**	DAU		**7,99 persen**	**98,970,000**

3.30.04.2.03	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir (SIDa)	Kota Pekalongan	25 Pelaku Usaha	114,131,000	DAU		26 Pelaku Usaha	98,970,000
3.30.04.2.03.0003	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Kota Pekalongan	30 Produk	114,131,000	DAU		30 UMKM	98,970,000
3.30.05	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)		79,99 Persen	**315,984,000**	DAU		**81,99 persen**	**279,022,000**
3.30.05.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	Kota Pekalongan	79,99 Persen	315,984,000	DAU		81,99 persen	279,022,000
3.30.05.2.01.0005	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kota Pekalongan	5038 Unit	281,874,000	DAU		5164 UTTP	254,112,000
3.30.06	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kota Pekalongan	85 Orang	34,110,000	DAU		100 Orang	24,910,000

3.30.06.2.01	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)		5,34 Persen	**1,012,673,000**	DAU		**6,42 persen**	**969,080,000**
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	Kota Pekalongan	100 persen	1,012,673,000	DAU		128 UMKM	969,080,000
3.30.06.2.01.0002	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	160 UMKM	902,033,000	DAU		150 UMKM	872,330,000
3.30.07	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Kota Pekalongan	55 UMKM	110,640,000	DAU		30 UMKM	96,750,000
3.30.07.2.01	**Non Urusan**					DAU			
3.30.07.2.01.0005	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		100 persen	**7,069,976,000**	DAU		**100 persen**	**7,014,252,000**

3.30.07.2.01.0006	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 persen	15,663,000	DAU		100 persen	18,084,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	2 Dokumen	2,146,000	DAU		3 Dokumen	3,132,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	2 Dokumen	1,517,000	DAU		2 Dokumen	2,952,000
3.30.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	15 Laporan	12,000,000	DAU		15 Laporan	12,000,000
3.30.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 persen	7,054,313,000	DAU		100 persen	6,996,168,000
3.30.01.2.01.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	60 Orang/Bulan	6,985,107,000	DAU		62 Orang/Bulan	6,926,650,000
3.30.01.2.01.0002	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	12 Dokumen	67,800,000	DAU		12 Dokumen	67,800,000

3.30.01.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	1 Laporan	1,406,000	DAU		1 Dokumen	1,718,000
3.30.01.2.02	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen	**1,903,321,000**	DAU		**100 persen**	**2,763,076,000**
3.30.01.2.02.0001	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 persen	5,000,000	DAU		100 persen	9,500,000
3.30.01.2.02.0003	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pekalongan	1 Paket	5,000,000	DAU		2 Paket	9,500,000
3.30.01.2.02.0005	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 persen	522,003,000	DAU		100 persen	633,441,000
3.30.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	5,500,000	DAU		4 Paket	5,000,000

3.30.01.2.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	92,351,000	DAU		4 Paket	196,011,000
3.30.01.2.05.0002	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pekalongan	1 Paket	2,500,000	DAU		4 Paket	5,000,000
3.30.01.2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	85,850,000	DAU		4 Paket	85,850,000
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekalongan	2 Paket	61,302,000	DAU		13 Paket	67,000,000
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekalongan	2 Dokumen	2,500,000	DAU		2 Dokumen	2,580,000
3.30.01.2.06.0003	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	200 Laporan	272,000,000	DAU		200 Laporan	272,000,000

3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	100 persen	809,055,000	DAU		100 persen	1,498,735,000
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	4 Laporan	2,400,000	DAU		4 Laporan	2,500,000
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekalongan	12 Laporan	319,300,000	DAU		12 Laporan	979,300,000
3.30.01.2.06.0009	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	12 Laporan	487,355,000	DAU		12 Laporan	516,935,000
3.30.01.2.08	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Kota Pekalongan	100 persen	567,263,000	DAU		100 Persen	621,400,000
3.30.01.2.08.0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	100 persen	567,263,000	DAU		100 persen	621,400,000
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pekalongan	44 Unit	496,163,000	DAU		44 Unit	465,000,000

3.30.01.2.08.0004	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan	2 unit	30,000,000	DAU		2 Unit	130,000,000
3.30.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan	76 Unit	41,100,000	DAU		50 Unit	26,400,000

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan ini disusun guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan; mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*); dan sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Pekalongan. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan ini mengacu pada RPJM Pemerintah Daerah Kota Pekalongan tahun 2021-2026, sehingga perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun akan dapat berkelaniutan, konsisten dan berada pada kerangka acuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Perubahan Renja Dindagkop & UKM Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat tercapainya tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dindagkop & UKM
Kota Pekalongan

Drs. SUPRIONO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19661008 199203 1 010

Kota Pekalongan

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Designated UNESCO Creative City in 2014

BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

RENJA PERUBAHAN
DINPERINAKER KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024

(0285) 421731
dinperinaker.pekalongankota.go.id
Jl. Majapahit No. 14 Pekalongan

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINPERINAKER KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA (DINPERINAKER)

KOTA PEKALONGAN

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan proses Penyusunan Perubahan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2024 ini pada hakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya Dinperinaker Kota Pekalongan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai serta sarana evaluasi atas pencapaian kinerjanya dengan memperhatikan kriteria komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

KEPALA DINPERINAKER
KOTA PEKALONGAN

BETTY DAHFIANI DAHLAN, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19690203 199803 2 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 2
Daftar Isi 3
Daftar Tabel 4

BAB I PENDAHULUAN 5
1.1. Landasan Hukum 6
1.2. Maksud dan Tujuan 8
1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan 9
1.4. Sistematika Penulisan Renja Perubahan 9

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 11

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 11
2.2. Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja Dinperinaker Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 12

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 30

3.1. Rekapitulasi Sub Kegiatan Perubahan Kegiatan Renja Dinperinaker Tahun 2024 30
3.1.1. Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran 31
3.1.2. Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran 34
3.1.3. Sub Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran 35
3.1.4. Sub Kegiatan Yang Mengalami Penghapusan Pagu Anggaran 36
3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024 37

BAB IV PENUTUP 52

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2023	11
Tabel 2.2.	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinperinaker Kota Pekalongan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	12
Tabel 2.3.	Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Dinperinaker Kota Pekalongan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	14
Tabel 3.1.	Rekapitulasi Sub Kegiatan Perubahan Renja Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2024	31
Tabel 3.2.	Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024	32
Tabel 3.3.	Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024	34
Tabel 3.4.	Sub Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024	36
Tabel 3.5.	Kegiatan Yang Dihapus/Dinolkan Pada Perubahan Renja Tahun 2024	36
Tabel 3.6.	Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Perubahan Renja Tahun 2024	38

BAB I
PENDAHULUAN

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi jangka menengah daerah. Perubahan Rencana Kerja Dinperinaker Kota Pekalongan merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinperinaker Kota Pekalongan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD Perubahan berpedoman pada Renstra Dinperinaker Kota Pekalongan dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efesien dan akuntanbilitas yang berorientasi pada hasil dan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja di tahun yang akan datang, maka perlu segera menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinperinaker Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 yang memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan sebagai tolok ukur dalam menghitung keberhasilan organisasi Instansi Pemerintah Dinperinaker Kota Pekalongan yang akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinperinaker Kota Pekalongan pada akhir tahun anggaran. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

1.1. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan Perubahan Renja Dinperinaker Kota Pekalongan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Nasional;

8. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021- 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;

15. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan;
16. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinperinaker Tahun 2024 adalah menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Sebagai acuan dalam penyusunan perubahan RKA Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2024, adalah :

1. Mensinkronkan dan mensinergikan kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam rangka pencapaian Visi Misi Walikota Pekalongan Tahun 2021-2026;
3. Sebagai acuan dalam Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Dinperinaker Tahun 2024;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
5. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah dan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,

menurut prinsip- prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

1.3. DASAR PERTIMBANGAN

Perubahan Rencana Kerja Dinperinaker Kota Pekalongan tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan, meliputi :

a. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah yang ada di Dinperinaker;

b. Penyesuaian kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran serta rencana program dan kegiatan;

c. Pergeseran anggaran, penghapusan dan penambahan kegiatan/sub kegiatan alternatif, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan/sub kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA

Perubahan Rencana Kerja Dinperinaker Kota Pekalongan tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Landasan Hukum

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Pertimbangan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

2.2. Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja

Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja Dinperinaker Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rekapitulasi Sub Kegiatan Perubahan Kegiatan Renja Dinperinaker Tahun 2024.

3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinperinaker 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinperinaker Tahun 2021 – 2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinperinaker tahun-tahun sebelumnya, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai SAKIP OPD	Indeks	73	74,70	102,33
2	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	Persen	52,26	49,26	94,27
3	Pertumbuhan Industri	Persen	0,099	n/a	n/a

Dari table tersebut dapat diketahui capaian indicator kinerja utama pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Capaian kinerja pada indikator Nilai SAKIP OPD sebesar 102,33%, capaian ini melebihi/melampaui target yang ditetapkan.
- Capaian kinerja pada indikator Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan sebesar 94,27%, capaian ini kurang dari target yang ditetapkan.
- Capaian kinerja pada indikator Pertumbuhan Industri sebesar n/a atau belum tercapai, hal ini disebabkan capaian indikator tersebut berdasarkan angka yang direalese oleh BPS, sedangkan pada saat laporan ini dibuat angka tersebut belum realese.

Sedangkan untuk Capaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan target kinerja sasaran dalam pelayanan Dinperinaker Kota Pekalongan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 ini dapat dilihat pada tabel 2.2. dibawah ini :

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan
Triwulan II Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi TW II	Capaian %
1	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74.50	-	-
2	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	Persen	52.29	40,34	77,15
3	Pertumbuhan Industri	Persen	0,09	-	-

Sampai dengan Triwulan II pelayanan kinerja Dinperinaker Kota Pekalongan berdasarkan target kinerja Sasaran baru tercapai indikator "Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan" dengan capaian sebesar 77,15%, sedangkan indikator yang lain baru akan tercapai pada akhir tahun atau pada Triwulan IV.

2.2. Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja Dinperinaker Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Dinperinaker Kota Pekalongan Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk yang kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai pada akhir tahun anggaran 2024 nanti.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Dinperinaker Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang melaksanakan 2 urusan penunjang

pemerintahan, 7 program dengan 18 kegiatan dan 51 Sub kegiatan, dengan anggaran Belanja Rp. 12.694.945.000 dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 5.119.596.327 atau 39,05%. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif masih rendah belum sesuai target, dikarenakan masih ada pekerjaan yang sudah dilaksanakan, namun belum selesai pertanggungjawaban keuangannya.

Adapun realisasi target kinerja dan anggaran Dinperinaker Kota Pekalongan sampai denga triwulan II Tahun 2024 secara terperinci dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Dinperinaker Kota Pekalongan s/d Triwulan II Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan (N) Yang DiEvaluasi (2024)						Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RENJA Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Dan Realisasi RENJA Yang Dievaluasi	
			RENJA			APBD			I		II					
			K	Satuan	Anggaran (Rp.)	K	Satuan	Anggaran (Rp.)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)* 100	17= (15/6)* 100
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				**13.108.713.000**			**12.694.945.000**		**2.284.930.303**		**5.119.596.327**		**5.119.596.327**		**39,05**
	Urusan Pemerintahan Wajib Yg Tidak Berkaitan Dg Pelayanan Dasar															
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja															
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	0.46	persen	**3.507.090.000**	0.46	persen	**3.724.570.000**	-	**347.820.809**	**0,87**	**1.166.629.215**	**0,87**	**1.166.629.215**	**189,23**	**33,26**
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	100	persen	**3.315.449.000**	100	persen	**3.551.399.000**	-	**333.969.833**	**41,67**	**1.137.052.255**	**41,67**	**1.137.052.255**	**41,67**	**34,30**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)* 100	17= (15/6)* 100
	Unit Kompetensi															
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1621	orang	2.827.939.000	1621	orang	3.065.939.000	200	3.050.000	160	998.273.200	360	998.273.200	22,21	35,30
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Pra-sarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1	lembaga	252.049.000	1	lembaga	249.999.000	-	58.597.833	1	94.779.055	1	94.779.055	100	37,60
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten /Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	39	unit	235.461.000	39	unit	235.461.000	-	-	4	44.000.000	4	44.000.000	10,26	18,69
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	80	persen	**67.214.000**	80	persen	**67.214.000**	**-**	**-**	**90,91**	**1.000.000**	**90,91**	**1.000.000**	**113,64**	1,49
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20	lembaga	67.214.000	20	lembaga	67.214.000	-	-	20	1.000.000	20	1.000.000	100	1,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)* 100	17= (15/6)* 100
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dilaksanakan	6	tenant	**79.126.000**	6	tenant	**79.126.000**	**-**	**13.850.976**	**-**	**23.084.960**	**-**	**23.084.960**	**-**	**29,17**
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	6	Perusa-haan	79.126.000	6	Perusa-haan	79.126.000	-	13.850.976	-	23.084.960	-	23.084.960	-	29,17
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan	40	persen	**45.301.000**	40	persen	**45.301.000**	**-**	**-**	**56,82**	**5.492.000**	**56,82**	**5.492.000**	**142,05**	**12,12**
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2	doku men	45.301.000	2	doku men	26.831.000	1	-	1	5.492.000	2	5.492.000	100	12,12
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	**25,93**	persen	**795.797.000**	**25,93**	persen	**795.797.000**	**-**	**11.815.490**	**22,66**	**53.614.384**	**22,66**	**53.614.384**	**87,39**	6,74
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabu-paten/ Kota	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota yg dilaksanakan	11,86	persen	**425.947.000**	11,86	persen	**425.947.000**	**-**	**4.890.000**	**64,53**	**32.071.900**	**64,53**	**32.071.900**	**544,11**	**7,53**
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan	120	orang	18.750.000	120	orang	18.750.000	-	-	**-**	-	-	-	**-**	**-**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)* 100	17= (15/6)* 100
	antar Kerja	Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi														
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	210	orang	32.072.000	210	orang	32.072.000	350	4.890.000	70	32.071.900	420	32.071.900	200	100
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	20	orang	8.625.000	20	orang	8.625.000	-	-	20	-	20	-	100	-
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jmh Tenaga Kerja yg Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	83	orang	366.500.000	83	orang	254.586.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun	**12**	**buku**	**265.740.000**	**12**	**buku**	**265.740.000**	**-**	**6.925.490**	**6**	**21.542.484**	**6**	**21.542.484**	**50**	**8,11**
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	dokumen	58.860.000	1	dokumen	31.140.000	-	6.925.490	-	11.542.484	-	11.542.484	-	19,61
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	700	orang	110.500.000	700	orang	110.500.000	-	-	203	10.000.000	203	10.000.000	29	9,05
	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100	orang	96.380.000	100	orang	96.380.000	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)* 100	17= (15/6)* 100
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah CPMI yang terlayani secara legal	44	orang	**104.110.000**	44	orang	**104.110.000**	**-**	-	**59,21**	-	**59,21**	-	**134,57**	**-**
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	60	orang	75.000.000	60	orang	28.130.000	**-**	-	-	-	-	-	**-**	**-**
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	102	orang	29.110.000	102	orang	29.110.000	**-**	-	45	-	45	-	44,12	**-**
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yg menerapkan tata kelola kerja yg layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah,	47,51	persen	**450.369.000**	47,51	persen	**450.369.000**	**-**	**19.304.500**	**50,93**	**174.474.700**	**50,93**	**174.474.700**	**107,20**	**38,74**
		dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)														
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang	40,17	persen	**328.864.000**	40,17	persen	**328.864.000**	**-**	**19.304.500**	**1,48**	**111.128.800**	**1,48**	**111.128.800**	**3,68**	**33,79**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)* 100	17= (15/6)* 100
	Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan														
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yg Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	40	perusahaan	19.150.000	40	perusahaan	19.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	30	perusahaan	13.614.000	30	perusahaan	11.184.000	-	-	30	11.010.000	30	11.010.000	100	80,87
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	13	laporan	296.100.000	13	laporan	293.723.000	1	19.304.500	-	100.118.800	1	100.118.800	7,69	33,81
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,	72,45	persen	**121.505.000**	72,45	persen	**121.505.000**	-	-	**58,71**	**63.345.900**	**58,71**	**63.345.900**	**81,03**	**52,13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)* 100	17= (15/6)* 100
	Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan														
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, & Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25	perkara	11.534.000	25	perkara	11.534.000	-	-	10	-	10	-	40	-
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, & Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10	perkara	7.500.000	10	perkara	6.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	80	Asosias dan Serikat Pekerja	16.758.000	80	Asosias dan Serikat Pekerja	15.258.000	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)* 100	17= (15/6)* 100
	pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi															
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	lembaga	74.250.000	1	lembaga	73.150.000	-	-	1	63.345.900	1	63.345.900	100	85,31
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	40	orang	11.463.000	40	orang	11.113.000	-	-	40	-	40	-	100	-
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	**100**	**persen**	**7.891.187.000**	**100**	**persen**	**7.476.890.000**	**28,34**	**1.885.949.807**	**10,56**	**3.658.198.533**	**38,89**	**3.658.198.533**	**38,89**	**46,36**
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,	**100**	**persen**		**100**	**persen**		**13,89**		**15,91**		**29,80**		**29,80**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)* 100	17= (15/6)* 100
	KABUPATEN/ KOTA	administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah														
		Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	**100**	**persen**		**100**	**persen**		**31,48**		**15,74**		**47,22**		**47,22**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	persen	**17.148.000**	100	persen	**17.148.000**	**6,67**	**1.507.000**	**4,44**	**6.190.000**	**11,11**	**6.190.000**	**11,11**	**36,10**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	3.016.000	2	dokumen	3.016.000	0	1.507.000	0	1.507.000	0	1.507.000	0	49,97
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	2.132.000	2	dokumen	2.132.000	0	-	0	-	0	-	0	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	laporan	12.000.000	15	laporan	12.000.000	3	-	2	4.683.000	5	4.683.000	33,33	39,03
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	persen	**6.699.778.000**	100	persen	**6.699.778.000**	**50**	**1.516.788.811**	**16,67**	**3.309.680.188**	**66,67**	**3.309.680.188**	**66,67**	**49,40**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47	orang	6.646.402.000	47	orang	6.163.965.000	46	1.512.913.811	45	3.291.132.588	46	3.291.132.588	97,87	49,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)* 100	17= (15/6)* 100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	51.400.000	12	dokumen	51.400.000	2	3,875.000	4	17.149.800	6	17.149.800	50	33,37
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1.976.000	1	laporan	1.976.000	1	-	0	1.397.800	1	1.397.800	100	70,74
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	persen	**5.000.000**	100	persen	**5.000.000**	**-**	-	-	-	-	-	**-**	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	5.000.000	1	paket	5.000.000	-	-	-	-	-	-	**-**	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100	persen	**163.558.000**	100	persen	**313.873.000**	**16,67**	**10.014.400-**	**22,74**	**58.148.400**	**39,40**	**58.148.400**	**39,40**	**35,55**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	2.250.000	4	paket	4.250.000	1	-	3	2.250.000	4	2.250.000	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	paket	120.873.000	4	paket	135.873.000	1	4.797.000	1	11.358.000	2	11.358.000	50	9,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)* 100	17= (15/6)* 100
	Kantor	yang Disediakan														
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yg Disediakan	4	paket	3.750.000	4	paket	3.750.000	1	329.000	1	1.375.500	2	1.375.500	50	36,68
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	39.400.000	4	paket	59.400.000	1	2.157.900	1	20.237.200	2	20.237.200	50	51,36
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	7.000.000	2	paket	7.000.000	-	-	-	2.999.800	-	2.999.800	-	42,85
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	3.600.000	2	dokumen	3.600.000	-	300.000	-	1.500.000	-	1.500.000	-	41,67
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	laporan	83.000.000	120	laporan	100.000.000	20	2.430.500	11	18.427.900	31	18.427.900	25,83	22,20
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	**611.088.000**	100	persen	**625.228.000**	**25**	**102.434.961**	**25**	**221.253.542**	**50**	**221.253.542**	**50**	**36,21**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	2.400.000	4	laporan	2.400.000	1	160.000	1	919.800	2	919.800	50	38,33
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12	laporan	255.000.000	12	Laporan	260.500.000	3	41.504.301	3	99.923.904	6	99.923.904	50	39,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)* 100	17= (15/6)* 100
	dan Listrik	Daya Air dan Listrik yang Disediakan														
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg Disediakan	12	lapor an	353.688.000	12	lapor an	362.328.000	3	60.770.660	3	120.409.838	6	120.409.838	50	34,04
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	**298.300.000**	100	persen	**298.300.000**	**31,48**	**22.514.645**	**15,74**	**62.926.403**	**47,22**	**62.926.403**	**47,22**	**21,10**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27	unit	98.300.000	27	unit	98.300.000	18	15.400.645	-	31.327.189	18	31.327.189	66,67	31,87
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	180.000.000	2	unit	180.000.000	-	3.539.000	-	24.569.014	-	24.569.014	-	13,65
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	36	unit	20.000.000	36	unit	20.000.000	10	3.575.000	17	7.030.200	27	7.030.200	75	35,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)* 100	17= (15/6)* 100
	atau Bangunan Lainnya	Direhabilitasi														
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP.	20,75	persen	**359.669.000**	20,75	persen	**359.669.000**	**-**	**20.039.697**	**59,11**	**66.679.495**	**59,11**	**66.679.495**	**284,87**	**18,54**
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan	3,5	persen	**359.669.000**	3,5	persen	**359.669.000**	**-**	**20.039.697**	**22,22**	**66.679.495**	**22,22**	**66.679.495**	**634,92**	**18,54**
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	dokumen	13.800.000	1	dokumen	13.800.000	-	-	-	3.240.000	-	3.240.000	-	23,48
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3	dokumen	106.846.000	3	dokumen	106.846.000	1	20.039.697	-	34.884.495	1	34.884.495	33,33	32,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)* 100	17= (15/6)* 100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	dokumen	135.000.000	1	dokumen	135.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	dokumen	66.523.000	1	dokumen	66.523.000	-	-	-	28.555.000	-	28.555.000	-	42,93
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	dokumen	37.500.000	1	dokumen	16.220.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase jumlah hasil peman-tauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yg dikeluarkan oleh instansi terkait	25	persen	**10.221.000**	25	persen	**10.221.000**		-	**15,88**	-	**15,88**	-	**63,53**	-
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha	Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI,	28	persen	**10.221.000**	28	persen	**10.221.000**	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)* 100	17= (15/6)* 100
	Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota														
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	dokumen	10.221.000	1	dokumen	10.221.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100	persen	**94.380.000**	100	persen	**94.380.000**		-		-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)* 100	17= (15/6)* 100
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan	30	persen	**94.380.000**	30	persen	**94.380.000**	**-**	-	**15,88**	-	**15,88**	-	**52,94**	**-**
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2	dokumen	90.000.000	2	dokumen	90.000.000	**-**	-	-	-	-	-	**-**	**-**
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	1	dokumen	4.380.000	1	dokumen	4.380.000	**-**	-	-	-	-	-	**-**	**-**

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2024 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan Renja Dinperinaker terkait perubahan pagu anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan, serta perubahan terhadap indikator kinerja dan target, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan keuangan daerah, serta pencapaian target-target kinerja.

3.1. Rekapitulasi Sub Kegiatan Perubahan Kegiatan Renja Dinperinaker Tahun 2024

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 7 program dengan 18 kegiatan dan 51 Sub kegiatan dalam Renja penetapan, terdapat 31 sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu, sebanyak 20 sub kegiatan yang mengalami perubahan pagu (7 sub kegiatan mengalami penambahan pagu dan 13 sub kegiatan mengalami pengurangan pagu). Sedangkan dari 31 sub kegiatan yang tidak berubah pagunya tetapi mengalami perubahan sub rinciannya ada 12 sub kegiatan, dan yang tidak mengalami perubahan pagu serta tidak mengalami perubahan sub rincian ada 19 sub kegiatan.

Adapun rincian sub kegiatan dala Perubahan Renja Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1. Rekapitulasi Sub Kegiatan Perubahan Renja Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Sub kegiatan dalam Perubahan Renja					
		Tetap		Bertambah	Berkurang	Baru	Jumlah
		Rincian Berubah	Rincian Tetap				
1.	Dinperinaker Kota Pekalongan	12	19	7	13	-	51

3.1.1. Sub Kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam Renja Penepatan Tahun 2024 dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan pagu indikatif pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebanyak 31 sub kegiatan. Sedangkan dari 31 sub kegiatan yang tidak berubah pagunya tetapi mengalami perubahan sub rinciannya ada 12 sub kegiatan, dan yang tidak mengalami perubahan pagu serta tidak mengalami perubahan sub rincian ada 19 sub kegiatan. Dari 12 Sub Kegiatan yang mengalami perubahan sub rincian ada 4 Sub Kegiatan yang mengalami perubahan target Kinerja. Adapun sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran pada Renja Perubahan seperti tersebut dalam tabel 3.2. dibawah ini.

Tabel 3.2. Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024

No.	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)		Target Kinerja
		Renja Penetapan	Perubahan Renja	
1	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	235.461.000	235.461.000	berubah
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	67.214.000	67.214.000	tetap
3	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	79.126.000	79.126.000	tetap
4	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	18.750.000	18.750.000	tetap
5	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	32.072.000	32.072.000	tetap
6	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	8.625.000	8.625.000	tetap
7	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	110.500.000	110.500.000	tetap
8	Job Fair/Bursa Kerja	96.380.000	96.380.000	tetap
9	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	29.110.000	29.110.000	tetap
10	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	19.150.000	19.150.000	tetap
11	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.534.000	11.534.000	tetap
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.016.000	3.016.000	tetap
13	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.132.000	2.132.000	tetap
14	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	tetap
15	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.400.000	51.400.000	tetap

No.	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)		Target Kinerja
		Renja Penetapan	Perubahan Renja	
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.976.000	1.976.000	tetap
17	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	5.000.000	tetap
18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.750.000	3.750.000	tetap
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000	7.000.000	tetap
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	tetap
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.400.000	tetap
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.300.000	98.300.000	berubah
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.000.000	180.000.000	tetap
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	tetap
25	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	13.800.000	13.800.000	tetap
26	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	106.846.000	106.846.000	berubah
27	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana industri	135.000.000	135.000.000	tetap
28	Koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran masyarakat	66.523.000	66.523.000	tetap
29	Koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan kab/kota	10.221.000	10.221.000	tetap

No.	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)		Target Kinerja
		Renja Penetapan	Perubahan Renja	
30	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri, serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)	90.000.000	90.000.000	berubah
31	Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten/kota melalui SIINas	4.380.000	4.380.000	tetap

3.1.2. Sub Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran

Sub kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yag ada dalam Renja Penetapan Tahun 2024 dan mengalami pengurangan baik target kinerja dan/ pagu indikatif sebanyak 13 sub kegiatan. Hal ini menyesuaikan Perubahan RKPD, yang disebabkan adanya penyesuaian kembali terhadap belanja guna serta efektifitas pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.3. dibawah ini.

Tabel 3.3. Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024

No.	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)		Berkurang
		Renja Penetapan	Perubahan Renja	
1	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	252.049.000	249.999.000	2.050.000
2	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	45.301.000	26.831.000	18.470.000
3	Perluasan Kesempatan Kerja	366.500.000	254.586.000	111.914.000

No.	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)		Berkurang
		Renja Penetapan	Perubahan Renja	
4	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	58.860.000	31.140.000	27.720.000
5	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia(PMI)	75.000.000	28.130.000	46.870.000
6	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	13.614.000	11.184.000	2.430.000
7	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	296.100.000	293.723.000	2.377.000
8	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat atau berdampak pada kepentingan di 1 daerah kab/kota	7.500.000	6.240.000	1.260.000
9	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi, dan konfederasi Serikat Pekerja/ serikat buruh non afiliasi	16.758.000	15.258.000	1.500.000
10	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kab/Kota	74.250.000	73.150.000	1.100.000
11	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	11.463.000	10.963.000	500.000
12	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	6.646.402.000	6.163.965.000	482.437.000
13	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	37.500.000	16.220.000	21.280.000

3.1.3. Sub Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah sub kegiatan yang ada dalam Renja Penetapan Tahun 2024 dan mengalami penambahan baik target kinerja dan/ pagu indikatif sebanyak 7 sub kegiatan. Sub

kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4. Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Penambahan Pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024

No.	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)		Bertambah
		Renja Penetapan	Perubahan Renja	
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.827.939.000	3.065.939.000	238.000.000
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.250.000	4.250.000	2.000.000
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.873.000	135.873.000	15.000.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.400.000	59.400.000	20.000.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.000.000	100.000.000	17.000.000
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	255.000.000	260.500.000	5.500.000
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	353.688.000	362.328.000	8.640.000

3.1.4. Sub Kegiatan yang mengalami penghapusan

Sub kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang sebelumnya dianggarkan dalam Renja Penetapan Tahun 2024, namun diusulkan untuk dihapuskan/ dinolkan dalam Perubahan Renja Tahun 2024 ini sebanyak nihil. Kegiatan yang dihapus/dinolkan dapat dilihat dalam tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5. Sub Kegiatan Yang Dihapus/Dinolkan Pada Perubahan Renja Tahun 2024

No.	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)		Bertambah
		Renja Penetapan	Perubahan Renja	
	N I H I L			

3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2024 diarahkan pada :

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indicator kinerja daerah pada tahun 2024.
2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan program pemerintah untuk fasilitasi pembangunan infrastruktur dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 terkait bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota.
3. Sub Kegiatan baru maupun penghapusan sub kegiatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan Renja Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2024 terlihat dalam tabel 3.6. dibawah ini.

Tabel 3.6

PERUBAHAN TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024
DINPERINAKER KOTA PEKALONGAN

KODE REKENING	NAMA OPD/ PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	RENJA PENETAPAN				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3-31.2-07.0-00.05	**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**	Kota Pekl.				12.566.722.000				13.108.713.000				12.694.945.000	128.223.000	(413.768.000)
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Kota Pekl.	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	0,46	persen	**3.312.225.000**	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	0,46	persen	**3.507.090.000**	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	0,46	persen	**3.724.570.000**	**412.345.000**	**217.480.000**
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Kota Pekl.	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	100	persen	**3.123.200.000**	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	100	persen	**3.315.449.000**	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	100	persen	**3.551.399.000**	**428.199.000**	**235.950.000**
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Pekl.	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1972	orang	2.645.146.000	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1621	orang	2.827.939.000	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1733	orang	3.065.939.000	420.793.000	238.000.000
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Pekl.	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi & Produktivitas pada Tahun n	1	lembaga	242.593.000	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi & Produktivitas pada Tahun n	1	lembaga	252.049.000	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi & Produktivitas pada Tahun n	1	lembaga	249.999.000	7.406.000	(2.050.000)
2.07.03.2.	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Kota Pekl.	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan	39	Unit	235.461.000	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan	39	Unit	235.461.000	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan	39	Unit	235.461.000	0	0

KODE REKENING	NAMA OPD/ PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	RENJA PENETAPAN				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.0003	Kabupaten/Kota		Sarana Pelatihan Kerja				Sarana Pelatihan Kerja				Sarana Pelatihan Kerja					
2.07.03.2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Kota Pekl.	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	80	persen	**67.214.000**	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	80	persen	**67.214.000**	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	80	persen	**67.214.000**	**0**	**0**
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Pekl.	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20	lembaga	67.214.000	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20	lembaga	67.214.000	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20	lembaga	67.214.000	0	0
2.07.03.2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Kota Pekl.	Jumlah kegiatan Konsultansi Produktivitas pd Perusahaan Kecil dilaksanakan	6	tenant	**76.510.000**	Jumlah kegiatan Konsultansi Produktivitas pd Perusahaan Kecil dilaksanakan	6	tenant	**79.126.000**	Jumlah kegiatan Konsultansi Produktivitas pd Perusahaan Kecil dilaksanakan	6	tenant	**79.126.000**	**2.616.000**	**0**
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Pekl.	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas.	6	Perusahaan	76.510.000	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas.	6	Perusahaan	79.126.000	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas.	6	Perusahaan	79.126.000	2.616.000	0
2.07.03.2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Kota Pekl.	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dilaksanakan	40	persen	**45.301.000**	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dilaksanakan	40	persen	**45.301.000**	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dilaksanakan	40	persen	**26.831.000**	**(18.470.000)**	**(18.470.000)**
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2	dokumen	45.301.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2	dokumen	45.301.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2	dokumen	26.831.000	(18.470.000)	(18.470.000)
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Kota Pekl.	Persentase tenaga kerja yg ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui	**25,93**	**persen**	**693.181.000**	Persentase tenaga kerja yg ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui	**25,93**	**persen**	**795.797.000**	Persentase tenaga kerja yg ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui	**25,93**	**persen**	**609.293.000**	**(83.888.000)**	**(186.504.000)**

KODE REKENING	NAMA OPD/ PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	RENJA PENETAPAN				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/ kota				mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/ kota				mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/ kota					
2.07.04.2.01	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota**	Kota Pekl.	Persentase kegiatan Pelayan-an Antarkerja di Daerah Kab/ Kota yg dilaksanakan	**11,86**	**persen**	**425.947.000**	Persentase kegiatan Pelayan-an Antarkerja di Daerah Kab/ Kota yg dilaksanakan	**11,86**	**persen**	**425.947.000**	Persentase kegiatan Pelayan-an Antarkerja di Daerah Kab/ Kota yg dilaksanakan	**11,86**	**persen**	**314.033.000**	**(111.914.000)**	**(111.914.000)**
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja.	Kota Pekl.	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yg Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	120	orang	18.750.000	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yg Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	120	orang	18.750.000	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yg Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	120	orang	18.750.000	0	0
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja.	Kota Pekl.	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	210	orang	32.072.000	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	210	orang	32.072.000	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	210	orang	32.072.000	0	0
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.	Kota Pekl.	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	20	orang	8.625.000	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	20	orang	8.625.000	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	20	orang	8.625.000	0	0
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Pekl.	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	83	orang	366.500.000	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	162	orang	366.500.000	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	162	orang	254.586.000	(111.914.000)	(111.914.000)
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Kota Pekl.	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yg disusun.	12	buku	**163.124.000**	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yg disusun.	12	buku	**265.740.000**	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yg disusun.	12	buku	**238.020.000**	**74.896.000**	**(27.720.000)**

KODE REKENING	NAMA OPD/ PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	RENJA PENETAPAN				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online.	Kota Pekl.	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	dokumen	56.244.000	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	dokumen	58.860.000	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	dokumen	31.140.000	(25.104.000)	(27.720.000)
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.	Kota Pekl.	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	700	orang	10.500.000	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	700	orang	110.500.000	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	700	orang	110.500.000	100.000.000	0
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/ Bursa Kerja	Kota Pekl.	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100	orang	96.380.000	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100	orang	96.380.000	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100	orang	96.380.000	0	0
2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra & Purna Penempatan) di Daerah Kab/ Kota.**	Kota Pekl.	Jumlah CPMI yang terlayani secara legal	44	orang	**104.110.000**	Jumlah CPMI yang terlayani secara legal	44	orang	**104.110.000**	Jumlah CPMI yang terlayani secara legal	44	orang	**57.240.000**	**(46.870.000)**	**(46.870.000)**
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI).	Kota Pekl.	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	60	orang	75.000.000	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	25	orang	75.000.000	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	25	orang	28.130.000	(46.870.000)	(46.870.000)
2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran.	Kota Pekl.	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	102	Orang	29.110.000	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	102	Orang	29.110.000	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	102	Orang	29.110.000	0	0
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Kota Pekl.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang	**47,51**	**persen**	**450.369.000**	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang	**47,51**	**persen**	**450.369.000**	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang	**47,51**	**persen**	**441.202.000**	**(9.167.000)**	**(9.167.000)**

KODE REKENING	NAMA OPD/ PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	RENJA PENETAPAN				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome).				layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome).				layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome).					
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota**	Kota Pekl.	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan.	**40,17**	**persen**	**328.864.000**	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan.	**40,17**	**persen**	**328.864.000**	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan.	**40,17**	**persen**	**324.057.000**	**(4.807.000)**	**(4.807.000)**
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan.	Kota Pekl.	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yg Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	40	perusahaan	19.150.000	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yg Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	40	perusahaan	19.150.000	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yg Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	40	perusahaan	19.150.000	0	0
2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan.	Kota Pekl.	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	30	perusahaan	13.614.000	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	30	perusahaan	13.614.000	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	30	perusahaan	11.184.000	(2.430.000)	(2.430.000)
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana	Kota Pekl.	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,	13	Laporan	296.100.000	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,	11	Laporan	296.100.000	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,	11	Laporan	293.723.000	(2.377.000)	(2.377.000)

KODE REKENING	NAMA OPD/ PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	RENJA PENETAPAN				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.		Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan					
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab /Kota**	Kota Pekl.	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota dilaksanakan.	**72,45**	**persen**	**121. 505.000**	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota dilaksanakan.	**72,45**	**persen**	**121. 505.000**	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota dilaksanakan.	**72,45**	**persen**	**117.145.000**	**(4.360.000)**	**(4.360.000)**
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kab / Kota.	Kota Pekl.	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25	perkara	11.534.000	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25	perkara	11.534.000	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25	perkara	11.534.000	0	0
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota.	Kota Pekl.	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10	perkara	7.500.000	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	6	perkara	7.500.000	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	6	perkara	6.240.000	(1.260.000)	(1.260.000)
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitu-lasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan	Kota Pekl.	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yg Diverifikasi	80	Asosiasi dan Serikat Pekerja	16.758.000	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yg Diverifikasi	80	Asosiasi dan Serikat Pekerja	16.758.000	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yg Diverifikasi	80	Asosiasi dan Serikat Pekerja	15.258.000	(1.500.000)	(1.500.000)

KODE REKENING	NAMA OPD/ PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	RENJA PENETAPAN				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi.															
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kab /Kota.	Kota Pekl.	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	lembaga	74.250.000	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	lembaga	74.250.000	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	lembaga	73.150.000	(1.100.000)	(1.100.000)
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.	Kota Pekl.	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	40	orang	11.463.000	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	40	orang	11.463.000	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	40	orang	10.963.000	(500.000)	(500.000)
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA.**	Kota Pekl.	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	**100** **100** **100**	**persen** **persen** **persen**	**7.550.493.000**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	**100** **100** **100**	**persen** **persen** **persen**	**7.891.187.000**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	**100** **100** **100**	**persen** **persen** **persen**	**7.476.890.000**	**(73.603.000)**	**(414.297.000)**
3.31.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**	Kota Pekl.	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	**100**	**persen**	**17.148.000**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	**100**	**persen**	**17.148.000**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	**100**	**persen**	**17.148.000**	0	**0**

KODE REKENING	NAMA OPD/ PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	RENJA PENETAPAN				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	2	dokumen	3.016.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	2	dokumen	3.016.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	2	dokumen	3.016.000	0	0
3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	2.132.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	2.132.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	2.132.000	0	0
3.31.01.2.01.0003	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Kota Pekl.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	Laporan	12.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan	12.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan	12.000.000	0	0
3.31.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**	Kota Pekl.	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah.	**100**	**persen**	**6.644.072.000**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah.	**100**	**persen**	**6.699.778.000**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah.	**100**	**persen**	**6.217.341.000**	**(426.731.000)**	**(482.437.000)**
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Kota Pekl.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	orang/ bulan	6.590.696.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47	orang/ bulan	6.646.402.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47	orang/ bulan	**6.163.965.000**	**(426.731.000)**	**(482.437.000)**
3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	51.400.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	51.400.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	51.400.000	0	0
3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Kota Pekl.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.976.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.976.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.976.000	0	0
3.31.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**	Kota Pekl.	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian.	**100**	**persen**	**5.000.000**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian	**100**	**persen**	**5.000.000**	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian	**100**	**persen**	**5.000.000**	0	**0**

KODE REKENING	NAMA OPD/ PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	RENJA PENETAPAN				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			perangkat daerah				perangkat daerah				perangkat daerah					
3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.	Kota Pekl.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	paket	5.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	5.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	5.000.000	0	0
3.31.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah.**	Kota Pekl.	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah.	**100**	**persen**	**234.873.000**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah.	**100**	**persen**	**259.873.000**	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah.	**100**	**persen**	**313.873.000**	79.000.000	54.000.000
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kota Pekl.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	2.250.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	2.250.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4.250.000	2.000.000	2.000.000
3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Kota Pekl.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	95.873.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	120.873.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	135.873.000	40.000.000	15.000.000
3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekl.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	3.750.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	3.750.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	3.750.000	0	0
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Kota Pekl.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	Paket	39.400.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	39.400.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	59.400.000	20.000.000	20.000.000
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan.	Kota Pekl.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	7.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	7.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	7.000.000	0	0
3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	3.600.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	3.600.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	3.600.000	0	0

KODE REKENING	NAMA OPD/ PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	RENJA PENETAPAN				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Kota Pekl.	Jmlh Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Laporan	83.000.000	Jmlh Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordina-si & Konsultasi SKPD	120	Laporan	83.000.000	Jmlh Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordina-si & Konsultasi SKPD	120	Laporan	100.000.000	17.000.000	17.000.000
3.31.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	Kota Pekl.	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	**100**	**persen**	**501.100.000**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	**100**	**persen**	**611.088.000**	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	**100**	**persen**	**625.228.000**	**124.128.000**	**14.140.000**
3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekl.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.400.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	2.400.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	2.400.000	0	0
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.	Kota Pekl.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	255.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	255.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	260.500.000	5.500.000	5.500.000
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Kota Pekl.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	243.700.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	353.688.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	362.328.000	118.628.000	8.640.000
3.31.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	Kota Pekl.	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	**100**	**persen**	**148.300.000**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	**100**	**persen**	**298.300.000**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	**100**	**persen**	**298.300.000**	150.000.000	**0**
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kota Pekl.	Jmlh Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	27	unit	98.300.000	Jmlh Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	27	unit	98.300.000	Jmlh Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	27	unit	98.300.000	0	0

KODE REKENING	NAMA OPD/ PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	RENJA PENETAPAN				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dinas Jabatan.		Pajaknya				Pajaknya				Pajaknya					
3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Kota Pekl.	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	unit	30.000.000	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	unit	180.000.000	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	unit	180.000.000	150.000.000	0
3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kota Pekl.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yg Dipelihara/ Direhabilitasi	36	Unit	20.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yg Dipelihara/ Direhabilitasi	36	Unit	20.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yg Dipelihara/ Direhabilitasi	36	Unit	20.000.000	0	0
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Kota Pekl.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	**20,75**	**persen**	**455.853.000**	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	**20,75**	**persen**	**359.669.000**	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	**20,75**	**persen**	**338.389.000**	**(117.464.000)**	**(21.280.000)**
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota.**	Kota Pekl.	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota dilaksanakan.	**3,5%**	**persen**	**455.853.000**	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota dilaksanakan.	**3,5%**	**persen**	**359.669.000**	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota dilaksanakan.	**3,5%**	**persen**	**338.389.000**	**(117.464.000)**	**(21.280.000)**
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan,	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan,	1	Dokumen	13.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan,	1	Dokumen	13.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan,	1	Dokumen	13.800.000	0	0

KODE REKENING	NAMA OPD/ PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	RENJA PENETAPAN				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyebaran dan Perwilayahan Industri.		Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri					
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2	Dokumen	203.030.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dokumen	106.846.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dokumen	106.846.000	(96.184.000)	0
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dokumen	135.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dokumen	135.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dokumen	135.000.000	0	0
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dokumen	66.523.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dokumen	66.523.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dokumen	66.523.000	0	0
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industr	1	Dokumen	37.500.000	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industr	1	Dokumen	37.500.000	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industr	1	Dokumen	16.220.000	(21.280.000)	(21.280.000)
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	Kota Pekl.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri	**25,00**	**persen**	**10.221.000**	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri	**25,00**	**persen**	**10.221.000**	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri	**25,00**	**persen**	**10.221.000**	0	**0**

KODE REKENING	NAMA OPD/ PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	RENJA PENETAPAN				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)				Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)				Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)					
3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan.**	Kota Pekl.	Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/ Kota.	**28**	**persen**	**10.221.000**	Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/ Kota.	**28**	**persen**	**10.221.000**	Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/ Kota.	**28**	**persen**	**10.221.000**	0	**0**
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekl.	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	1	Dokumen	10.221.000	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	1	Dokumen	10.221.000	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	1	Dokumen	10.221.000	0	0
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI**	Kota Pekl.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK	**100**	**persen**	**94.380.000**	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK	**100**	**persen**	**94.380.000**	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK	**100**	**persen**	**94.380.000**	0	**0**

KODE REKENING	NAMA OPD/ PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	RENJA PENETAPAN				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	NASIONAL		Outcome).				Outcome).				Outcome).					
3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kota Pekl.	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan.	**30**	**persen**	**94.380.000**	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan.	**30**	**persen**	**94.380.000**	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan.	**30**	**persen**	**94.380.000**	0	**0**
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten /Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	90.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2	Dokumen	90.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	90.000.000	0	0
3.31.04.2.01.0001	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kota Pekl.	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1	Dokumen	4.380.000	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1	Dokumen	4.380.000	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1	Dokumen	4.380.000	0	0

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan baik terkait dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Pekalongan dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Dinperinaker Kota Pekalongan Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024.
2. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah periode berikutnya.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan konsisten guna mencapai target perubahan yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

BETTY DAHFIANI DAHLAN, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19690203 199803 2 004

LAMPIRAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja																			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 4.453.847.000	Rp. 299.409.000			Rp. 4.753.256.000	Rp. 4.480.216.000	Rp. 294.849.000			Rp. 4.775.065.000	Rp. 4.489.804.000,00
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				Rp. 4.453.847.000	Rp. 299.409.000			Rp. 4.753.256.000	Rp. 4.480.216.000	Rp. 294.849.000			Rp. 4.775.065.000	Rp. 4.489.804.000,00
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				Rp. 3.212.241.000	Rp. 294.849.000			Rp. 3.507.090.000	Rp. 3.429.721.000	Rp. 294.849.000			Rp. 3.724.570.000	Rp. 3.452.547.000,00
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				Rp. 3.020.600.000	Rp. 294.849.000			Rp. 3.315.449.000	Rp. 3.256.550.000	Rp. 294.849.000			Rp. 3.551.399.000	Rp. 3.130.606.000,00
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.765.810.000	Rp. 62.129.000			Rp. 2.827.939.000	Rp. 3.003.810.000	Rp. 62.129.000			Rp. 3.065.939.000	Rp. 2.645.146.000,00
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 252.049.000				Rp. 252.049.000	Rp. 249.999.000				Rp. 249.999.000	Rp. 249.999.000,00
2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.741.000	Rp. 232.720.000			Rp. 235.461.000	Rp. 2.741.000	Rp. 232.720.000			Rp. 235.461.000	Rp. 235.461.000,00
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				Rp. 67.214.000				Rp. 67.214.000	Rp. 67.214.000				Rp. 67.214.000	Rp. 136.326.000,00
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 67.214.000				Rp. 67.214.000	Rp. 67.214.000				Rp. 67.214.000	Rp. 136.326.000,00
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				Rp. 79.126.000				Rp. 79.126.000	Rp. 79.126.000				Rp. 79.126.000	Rp. 97.884.000,00
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 79.126.000				Rp. 79.126.000	Rp. 79.126.000				Rp. 79.126.000	Rp. 97.884.000,00
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 45.301.000				Rp. 45.301.000	Rp. 26.831.000				Rp. 26.831.000	Rp. 87.731.000,00
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 45.301.000				Rp. 45.301.000	Rp. 26.831.000				Rp. 26.831.000	Rp. 87.731.000,00
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				Rp. 791.237.000	Rp. 4.560.000			Rp. 795.797.000	Rp. 609.293.000				Rp. 609.293.000	Rp. 761.548.000,00
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 421.387.000	Rp. 4.560.000			Rp. 425.947.000	Rp. 314.033.000				Rp. 314.033.000	Rp. 509.586.000,00
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.750.000				Rp. 18.750.000	Rp. 18.750.000				Rp. 18.750.000	Rp. 90.000.000,00
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 32.072.000				Rp. 32.072.000	Rp. 32.072.000				Rp. 32.072.000	Rp. 45.000.000,00
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.625.000				Rp. 8.625.000	Rp. 8.625.000				Rp. 8.625.000	Rp. 20.000.000,00
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 361.940.000	Rp. 4.560.000			Rp. 366.500.000	Rp. 254.586.000				Rp. 254.586.000	Rp. 354.586.000,00
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				Rp. 265.740.000				Rp. 265.740.000	Rp. 238.020.000				Rp. 238.020.000	Rp. 193.832.000,00
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 58.860.000				Rp. 58.860.000	Rp. 31.140.000				Rp. 31.140.000	Rp. 59.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 110.500.000				Rp. 110.500.000	Rp. 110.500.000				Rp. 110.500.000	Rp. 17.000.000,00
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 96.380.000				Rp. 96.380.000	Rp. 96.380.000				Rp. 96.380.000	Rp. 117.832.000,00
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 104.110.000				Rp. 104.110.000	Rp. 57.240.000				Rp. 57.240.000	Rp. 58.130.000,00
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 75.000.000				Rp. 75.000.000	Rp. 28.130.000				Rp. 28.130.000	Rp. 28.130.000,00
2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.110.000				Rp. 29.110.000	Rp. 29.110.000				Rp. 29.110.000	Rp. 30.000.000,00
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				Rp. 450.369.000				Rp. 450.369.000	Rp. 441.202.000				Rp. 441.202.000	Rp. 275.709.000,00
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 328.864.000				Rp. 328.864.000	Rp. 324.057.000				Rp. 324.057.000	Rp. 114.661.000,00
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.150.000				Rp. 19.150.000	Rp. 19.150.000				Rp. 19.150.000	Rp. 25.000.000,00
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.614.000				Rp. 13.614.000	Rp. 11.184.000				Rp. 11.184.000	Rp. 18.000.000,00
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 296.100.000				Rp. 296.100.000	Rp. 293.723.000				Rp. 293.723.000	Rp. 71.661.000,00
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 121.505.000				Rp. 121.505.000	Rp. 117.145.000				Rp. 117.145.000	Rp. 161.048.000,00
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.534.000				Rp. 11.534.000	Rp. 11.534.000				Rp. 11.534.000	Rp. 15.000.000,00
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.500.000				Rp. 7.500.000	Rp. 6.240.000				Rp. 6.240.000	Rp. 12.000.000,00
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.758.000				Rp. 16.758.000	Rp. 15.258.000				Rp. 15.258.000	Rp. 22.048.000,00
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 74.250.000				Rp. 74.250.000	Rp. 73.150.000				Rp. 73.150.000	Rp. 97.000.000,00
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.463.000				Rp. 11.463.000	Rp. 10.963.000				Rp. 10.963.000	Rp. 15.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				Rp. 8.001.052.000	Rp. 354.405.000			Rp. 8.355.457.000	Rp. 7.560.200.000	Rp. 359.680.000			Rp. 7.919.880.000	Rp. 8.524.912.600,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				Rp. 8.001.052.000	Rp. 354.405.000			Rp. 8.355.457.000	Rp. 7.560.200.000	Rp. 359.680.000			Rp. 7.919.880.000	Rp. 8.524.912.600,00
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 7.652.712.000	Rp. 238.475.000			Rp. 7.891.187.000	Rp. 7.229.635.000	Rp. 247.255.000			Rp. 7.476.890.000	Rp. 7.791.204.000,00
3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 17.148.000				Rp. 17.148.000	Rp. 17.148.000				Rp. 17.148.000	Rp. 27.656.000,00
3	31	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.016.000				Rp. 3.016.000	Rp. 3.016.000				Rp. 3.016.000	Rp. 10.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	31	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.132.000				Rp. 2.132.000	Rp. 2.132.000				Rp. 2.132.000	Rp. 250.000,00
3	31	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.000.000				Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000				Rp. 12.000.000	Rp. 16.906.000,00
3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 6.699.778.000				Rp. 6.699.778.000	Rp. 6.217.341.000				Rp. 6.217.341.000	Rp. 6.706.702.000,00
3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.646.402.000				Rp. 6.646.402.000	Rp. 6.163.965.000				Rp. 6.163.965.000	Rp. 6.642.202.000,00
3	31	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 51.400.000				Rp. 51.400.000	Rp. 51.400.000				Rp. 51.400.000	Rp. 62.000.000,00
3	31	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.976.000				Rp. 1.976.000	Rp. 1.976.000				Rp. 1.976.000	Rp. 2.500.000,00
3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 9.500.000,00
3	31	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 9.500.000,00
3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 163.558.000	Rp. 96.315.000			Rp. 259.873.000	Rp. 206.348.000	Rp. 107.525.000			Rp. 313.873.000	Rp. 325.523.000,00
3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.250.000				Rp. 2.250.000	Rp. 4.250.000				Rp. 4.250.000	Rp. 4.250.000,00
3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 24.558.000	Rp. 96.315.000			Rp. 120.873.000	Rp. 28.348.000	Rp. 107.525.000			Rp. 135.873.000	Rp. 135.873.000,00
3	31	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.750.000				Rp. 3.750.000	Rp. 3.750.000				Rp. 3.750.000	Rp. 5.000.000,00
3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 39.400.000				Rp. 39.400.000	Rp. 59.400.000				Rp. 59.400.000	Rp. 59.400.000,00
3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.000.000				Rp. 7.000.000	Rp. 7.000.000				Rp. 7.000.000	Rp. 7.000.000,00
3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.600.000				Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000				Rp. 3.600.000	Rp. 3.000.000,00
3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 83.000.000				Rp. 83.000.000	Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 111.000.000,00
3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 611.088.000				Rp. 611.088.000	Rp. 625.228.000				Rp. 625.228.000	Rp. 486.267.000,00
3	31	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.400.000				Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000				Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000,00
3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 255.000.000				Rp. 255.000.000	Rp. 260.500.000				Rp. 260.500.000	Rp. 228.867.000,00
3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 353.688.000				Rp. 353.688.000	Rp. 362.328.000				Rp. 362.328.000	Rp. 255.000.000,00
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 156.140.000	Rp. 142.160.000			Rp. 298.300.000	Rp. 158.570.000	Rp. 139.730.000			Rp. 298.300.000	Rp. 235.556.000,00
3	31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 98.300.000				Rp. 98.300.000	Rp. 98.300.000				Rp. 98.300.000	Rp. 35.556.000,00
3	31	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 37.840.000	Rp. 142.160.000			Rp. 180.000.000	Rp. 40.270.000	Rp. 139.730.000			Rp. 180.000.000	Rp. 180.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	31	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000,00
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Rp. 243.739.000	Rp. 115.930.000			Rp. 359.669.000	Rp. 225.964.000	Rp. 112.425.000			Rp. 338.389.000	Rp. 580.293.800,00
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				Rp. 243.739.000	Rp. 115.930.000			Rp. 359.669.000	Rp. 225.964.000	Rp. 112.425.000			Rp. 338.389.000	Rp. 580.293.800,00
3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.800.000				Rp. 13.800.000	Rp. 13.800.000				Rp. 13.800.000	Rp. 22.880.000,00
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 106.846.000				Rp. 106.846.000	Rp. 106.846.000				Rp. 106.846.000	Rp. 206.846.000,00
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.070.000	Rp. 115.930.000			Rp. 135.000.000	Rp. 22.575.000	Rp. 112.425.000			Rp. 135.000.000	Rp. 198.000.000,00
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 66.523.000				Rp. 66.523.000	Rp. 66.523.000				Rp. 66.523.000	Rp. 97.567.800,00
3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 37.500.000				Rp. 37.500.000	Rp. 16.220.000				Rp. 16.220.000	Rp. 55.000.000,00
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				Rp. 10.221.000				Rp. 10.221.000	Rp. 10.221.000				Rp. 10.221.000	Rp. 14.990.800,00
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				Rp. 10.221.000				Rp. 10.221.000	Rp. 10.221.000				Rp. 10.221.000	Rp. 14.990.800,00
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.221.000				Rp. 10.221.000	Rp. 10.221.000				Rp. 10.221.000	Rp. 14.990.800,00
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				Rp. 94.380.000				Rp. 94.380.000	Rp. 94.380.000				Rp. 94.380.000	Rp. 138.424.000,00
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				Rp. 94.380.000				Rp. 94.380.000	Rp. 94.380.000				Rp. 94.380.000	Rp. 138.424.000,00
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 90.000.000				Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000				Rp. 90.000.000	Rp. 132.000.000,00
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.380.000				Rp. 4.380.000	Rp. 4.380.000				Rp. 4.380.000	Rp. 6.424.000,00
Jumlah									**Rp. 12.454.899.000**	**Rp. 653.814.000**			**Rp. 13.108.713.000**	**Rp. 12.040.416.000**	**Rp. 654.529.000**			**Rp. 12.694.945.000**	**Rp. 13.014.716.600,00**

Kota Pekalongan, ...
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pencari Kerja Kota Pekalongan
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.065.939.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.645.146.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	1,10 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.065.939.000,00
Keluaran	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1733 Orang
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 3.065.939.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 3.003.810.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 9.000.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 9.000.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 9.000.000,00**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 9.000.000,00**
	[#] Latker BLK; Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker; Latker Kewirausahaan; Latker MPS **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 9.000.000,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp. 9.000.000,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	20	Orang / Kali	200.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	20	Orang / Kali	250.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.994.810.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.916.251.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.916.251.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 144.267.000,00**
	[#] Latker BLK **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 1.920.000,00**
	[-] Toolkit Siswa Latker BLK					**Rp. 1.920.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : -	6 x 16 x 20000	Paket Buah Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	[#] Latker BLK; Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker; Latker Kewirausahaan; Latker MPS **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] ATK Kegiatan					**Rp. 10.000.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : -	1 x 10000000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	[#] Latker BLK tahap 2 **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 640.000,00**
	[-] Toolkit Siswa Latker BLK tahap 2					**Rp. 640.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : -	2 x 16 x 20000	Paket Orang Rupiah	1,00	0 %	Rp. 640.000,00
	[#] Latker Kewirausahaan **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 112.200.000,00**
	[-] ATK Latker Kewirausahaan; 55 Paket @ Rp. 100.000,-					**Rp. 5.500.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : -	55 x 100000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 5.500.000,00
	[-] Perlengkapan Tas Latker Kewirausahaan					**Rp. 84.700.000,00**
	Tas Spesifikasi : -	55 x 20	Paket Buah	77.000,00	0 %	Rp. 84.700.000,00
	[-] Toolkit Siswa Latker Kewirausahaan					**Rp. 22.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : -	55 x 20 x 20000	Paket Buah Rupiah	1,00	0 %	Rp. 22.000.000,00
	[#] Latker LPKS/ BLKK/ Mitra Latker Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 3.200.000,00**
	[-] Toolkit Peserta Latker					**Rp. 3.200.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : -	8 x 20 x 20000	Paket Buah Rupiah	1,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	[#] Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 4.000.000,00**
	[-] Toolkit Latker MPS					**Rp. 4.000.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : -	10 x 20 x 20000	Paket Buah Rupiah	1,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[#] Latker MPS tahap 2 Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 800.000,00**
	[-] ATK Peserta Latker MPS					**Rp. 800.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : -	20 x 2 x 20000	Buah Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[#] Latker Singkat (1 hari luar kota) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.687.000,00**
	[-] ATK Administrasi					**Rp. 1.807.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : -	1807000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.807.000,00
	[-] Tas Pelatihan					**Rp. 3.080.000,00**
	Tas Spesifikasi : -	1 x 40	Kali Orang	77.000,00	0 %	Rp. 3.080.000,00
	[-] Toolkit Peserta Latker					**Rp. 800.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : -	1 x 40 x 20000	Kali Orang Rupiah	1,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[#] Latker Singkat (2 Hari Luar Kota) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.940.000,00**
	[-] Perlengkapan Tas Latker					**Rp. 1.540.000,00**
	Tas Spesifikasi : -	20 x 1	Orang Kali	77.000,00	0 %	Rp. 1.540.000,00
	[-] Toolkit Peserta Latker					**Rp. 400.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : -	20 x 1 x 20000	Orang Kali Rupiah	1,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] Latker Singkat (2 Paket) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.880.000,00**
	[-] Perlengkapan Tas Latker					**Rp. 3.080.000,00**
	Tas Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Kali	77.000,00	0 %	Rp. 3.080.000,00
	[-] Toolkit Peserta Latker					**Rp. 800.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : -	20 x 2 x 20000	Orang Kali Rupiah	1,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 102.703.000,00**
	[#] Latker BLK Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 13.920.000,00**
	[-] Cetak dan Penulisan Sertifikat BLK					**Rp. 1.920.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	6 x 16 x 20000	Paket Lembar Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	[-] Modul Pelatihan Latker di BLK (6 Pkt; 20 Buku)					**Rp. 12.000.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	6 x 20 x 100000	Paket Buku Rupiah	1,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[#] Latker BLK; Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker; Latker Kewirausahaan; Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 26.511.500,00**
	[-] ATK KEGIATAN					**Rp. 0,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	-	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Buku Laporan Tahunan DBHCHT (1 Kali; 3 buah)					**Rp. 225.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	1 x 3 x 75000	Kali Buku Rupiah	1,00	0 %	Rp. 225.000,00
	[-] Cetak stopmap dinas Spesifikasi					**Rp. 3.500.000,00**
	Cetak stopmap dinas Spesifikasi : -	500	Lembar	7.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[-] Fotokopi Administrasi Umum 12 Bulan					**Rp. 8.314.500,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	27715	Lembar	300,00	0 %	Rp. 8.314.500,00
	[-] Kertas HVS A4					**Rp. 2.700.000,00**
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 ; 80 gr; 216 X 297 mm	50	Rim	54.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	[-] Kertas HVS F4					**Rp. 3.600.000,00**
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	60	Rim	60.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] Laporan Per Program/ Jurusan - Rangkap 4					**Rp. 4.800.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	16 x 4 x 75000	Laporan Buku Rupiah	1,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[-] Laporan Triwulanan DBHCHT (4 Kali; 3 Buah)					**Rp. 180.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	4 x 3 x 15000	Kali Buku Rupiah	1,00	0 %	Rp. 180.000,00
	[-] Stopmap Untuk Peserta (Tempat Piagam/ Sertifikat)					**Rp. 3.192.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak stopmap dinas Spesifikasi : -	456	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 3.192.000,00
	[#] Latker BLK tahap 2 Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 4.640.000,00**
	[-] Cetak dan Penulisan Sertifikat BLK					**Rp. 640.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	2 x 16 x 20000	Paket Orang Rupiah	1,00	0 %	Rp. 640.000,00
	[-] Cetak Sertifikat dan Penulisan Sertifikat Latker BLK					**Rp. 0,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	-	Paket Orang Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Modul Latker BLK					**Rp. 4.000.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	2 x 20 x 100000	Paket Buku Rupiah	1,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[#] Latker Kewirausahaan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 6.600.000,00**
	[-] Belanja Penggandaan (Fotocopy Materi Latker)					**Rp. 6.600.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	55 x 20 x 20	Paket Orang Lembar	300,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	[#] Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 20.800.000,00**
	[-] Cetak dan Penulisan Sertifikat LPKS/BLK K					**Rp. 3.200.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	8 x 20 x 20000	Paket Lembar Rupiah	1,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	[-] Modul Latker LPKS/ BLK K					**Rp. 17.600.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	8 x 22 x 100000	Paket Buku Rupiah	1,00	0 %	Rp. 17.600.000,00
	[#] Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 20.000.000,00**
	[-] Modul Latker MPS					**Rp. 20.000.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	10 x 20 x 100000	Paket Buku Rupiah	1,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[#] Latker MPS tahap 2 Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 5.060.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 660.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2200	Lembar	300,00	0 %	Rp. 660.000,00
	[-] Modul Latker MPS					**Rp. 4.400.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	22 x 2 x 100000	Buku Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 4.400.000,00
	[#] Latker Singkat (1 hari luar kota) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.632.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 1.488.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	4960	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.488.000,00
	[-] Fotocopy Materi					**Rp. 144.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	12 x 40	Lembar Orang	300,00	0 %	Rp. 144.000,00
	[#] Latker Singkat (2 Hari Luar Kota) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.682.400,00**
	[-] ATK dan Administrasi umum					**Rp. 300.000,00**
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	5	Rim	60.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Fotocopy					**Rp. 1.081.500,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3605	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.081.500,00
	[-] Fotocopy Administrasi					**Rp. 45.900,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1 x 153	Kali Lembar	300,00	0 %	Rp. 45.900,00
	[-] Fotocopy Materi					**Rp. 255.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	25 x 34	Orang Lembar	300,00	0 %	Rp. 255.000,00
	[#] Latker Singkat (2 Paket) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.857.100,00**
	[-] Fotocopy Administrasi					**Rp. 1.713.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	5710	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.713.000,00
	[-] Fotocopy Materi					**Rp. 144.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	12 x 20 x 2	Lembar Orang Kali	300,00	0 %	Rp. 144.000,00
	[-] pembulatan					**Rp. 100,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 56.867.000,00**
	[#] Cetak X-Banner Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 13.650.000,00**
	[-] Cetak X-Banner					**Rp. 13.650.000,00**
	Banner Spesifikasi : manual, bentuk roll	10	Buah	1.365.000,00	0 %	Rp. 13.650.000,00
	[#] Latker BLK Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 1.980.000,00**
	[-] Spanduk Latker BLK Per Jurusan					**Rp. 712.800,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	6 x 3 x 1 x 0.6	Paket Meter Meter %	66.000,00	0 %	Rp. 712.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Spanduk Pembukaan dan Penutupan Pelatihan BLK (2 Kl)					**Rp. 1.267.200,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	4 x 4 x 2 x 0.6	Kali Meter Meter %	66.000,00	0 %	Rp. 1.267.200,00
	[#] Latker BLK; Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker; Latker Kewirausahaan; Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 28.090.000,00**
	[-] Baliho Publikasi Pelatihan Institusional					**Rp. 4.000.000,00**
	Baliho Spesifikasi : -	1 x 4 x 1000000	Buah Kecamatan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Cetak Brosur-Brosur Latker					**Rp. 12.000.000,00**
	Cetak Brosur Spesifikasi : -	6000 x 2000	Rupiah Lembar	1,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[-] Dokumentasi (Cetak Foto Peserta Pelatihan)					**Rp. 2.000.000,00**
	Cetak Film Foto Spesifikasi : Ukuran 4 R	500	Lembar	4.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Ink Jet Catridge					**Rp. 2.320.000,00**
	Ink Jet Cartridge Spesifikasi : Yellow/Magenta/Cyan Ink Cartridge	10	Buah	232.000,00	0 %	Rp. 2.320.000,00
	[-] Refill Tinta					**Rp. 3.810.000,00**
	Refil Tinta Spesifikasi : 60 ml, Ber ID	30	Botol	127.000,00	0 %	Rp. 3.810.000,00
	[-] Spanduk Rapat-Rapat Koordiinasi					**Rp. 3.960.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	10 x 2 x 5 x 0.6	Kali Meter Meter %	66.000,00	0 %	Rp. 3.960.000,00
	[#] Latker Kewirausahaan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 8.712.000,00**
	[-] Spanduk Pelaksanaan Latker Kewirausahaan					**Rp. 8.712.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	4 x 1 x 55 x 0.6	Meter Meter Paket %	66.000,00	0 %	Rp. 8.712.000,00
	[#] Latker LPKS/ BLKK/ Mitra Latker Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 2.059.000,00**
	[-] Spanduk Pelatihan di LPKS/BLKK					**Rp. 1.267.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	8 x 1 x 4 x 0.5999053	Paket Meter Meter %	66.000,00	0 %	Rp. 1.267.000,00
	[-] Spanduk Pembukaan Latker LPKS/BLKK					**Rp. 792.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	2 x 5 x 2 x 0.6	Buah Meter Meter %	66.000,00	0 %	Rp. 792.000,00
	[#] Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 1.584.000,00**
	[-] Spanduk Latker MPS					**Rp. 1.584.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	10 x 1 x 4 x 0.6	Paket Meter Meter %	66.000,00	0 %	Rp. 1.584.000,00
	[#] Latker Singkat (1 hari luar kota) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 158.400,00**
	[-] SPANDUK PELATIHAN					**Rp. 158.400,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	1 x 4 x 0.6	Meter Meter %	66.000,00	0 %	Rp. 158.400,00
	[#] Latker Singkat (2 Hari Luar Kota) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 316.800,00**
	[-] Spanduk Latker Luar Kota					**Rp. 316.800,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	2 x 1 x 4 x 0.6	Kali Meter Meter %	66.000,00	0 %	Rp. 316.800,00
	[#] Latker Singkat (2 Paket) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 316.800,00**
	[-] Spanduk Latker Singkat					**Rp. 316.800,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	1 x 4 x 0.6 x 2	Meter Meter %	66.000,00	0 %	Rp. 316.800,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 1.100.000,00**
	[#] Latker BLK; Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker; Latker Kewirausahaan; Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 1.000.000,00**
	[-] Materai @10.000,-					**Rp. 1.000.000,00**
	Materai 10000 Spesifikasi : -	100	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[#] Latker Singkat (2 Hari Luar Kota) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 100.000,00**
	Materai 10000 Spesifikasi : -	10	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.060.000,00**
	[#] Latker BLK; Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker; Latker Kewirausahaan; Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 1.060.000,00**
	[-] USB Flasdisk 16 GB (ATK Kegiatan)					**Rp. 1.060.000,00**
	Flashdisk Spesifikasi : USB Flasdisk 16 Gb	10	Buah	106.000,00	0 %	Rp. 1.060.000,00
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp. 180.500.000,00**
	[#] Latker Kewirausahaan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 165.000.000,00**
	[-] Kaos Lapangan Lengan Panjang Peserta Latker Kewirausahaan					**Rp. 165.000.000,00**
	Kaos Lapangan Lengan Panjang Spesifikasi : -	55 x 30	Paket Buah	100.000,00	0 %	Rp. 165.000.000,00
	[#] Latker Singkat (1 hari luar kota) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Kaos Latker singkat Luar Kota					**Rp. 5.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kaos Lapangan Lengan Panjang Spesifikasi : -	1 x 50	Kali Orang	100.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[#] Latker Singkat (2 Hari Luar Kota) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.500.000,00**
	Kaos Lapangan Lengan Panjang Spesifikasi : -	35 x 1	Orang Kali	100.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[#] Latker Singkat (2 Paket) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.000.000,00**
	[-] Kaos Latker singkat					**Rp. 7.000.000,00**
	Kaos Lapangan Lengan Panjang Spesifikasi : -	2 x 35	Kali Orang	100.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 602.646.000,00**
	[#] Latker BLK Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 110.750.000,00**
	[-] Las					**Rp. 20.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	1 x 20000000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] Pelatihan Menjahit Pakaian					**Rp. 13.200.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	1 x 13200000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 13.200.000,00
	[-] Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue					**Rp. 15.600.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	1 x 15600000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 15.600.000,00
	[-] Perlengkapan Latker BLK/ Ransel Siswa Latker					**Rp. 19.950.000,00**
	Ransel Spesifikasi : Standart	6 x 25 x 0.5	Paket Buah %	266.000,00	0 %	Rp. 19.950.000,00
	[-] Service AC					**Rp. 20.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	1 x 20000000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] Service Kendaraan Ringan					**Rp. 10.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	1 x 10000000	Paket Paket	1,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	[-] Tata Boga					**Rp. 12.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	1 x 12000000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[#] Latker BLK tahap 2 Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 48.256.000,00**
	[-] Bahan Pelatihan Barista					**Rp. 24.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	1 x 24000000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	[-] Bahan Pelatihan Salon Kecantikan					**Rp. 20.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	1 x 20000000	Paket %	1,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] latker					**Rp. 0,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	-	-	1,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Ransel Latker BLK tahap 2					**Rp. 4.256.000,00**
	Ransel Spesifikasi : Standart	2 x 16 x 0.5	Paket Orang %	266.000,00	0 %	Rp. 4.256.000,00
	[#] Latker Kewirausahaan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 220.000.000,00**
	[-] Bahan Praktek Latker Kewirausahaan					**Rp. 220.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	55 x 4000000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 220.000.000,00
	[#] Latker LPKS/ BLKK/ Mitra Latker Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 28.000.000,00**
	[-] Bahan Latker Hantaran					**Rp. 28.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	2 x 14000000	Orang / Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 28.000.000,00
	[#] Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 92.420.000,00**
	[-] Bahan Latker Menjahit					**Rp. 50.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	5 x 10000000	Orang / Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
	[-] Bahan Latker Roti dan Kue					**Rp. 10.500.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	1 x 10500000	Orang / Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	[-] Perlengkapan Latker LPKS-BLKK/ Ransel Latker					**Rp. 31.920.000,00**
	Ransel Spesifikasi : Standart	8 x 30 x 0.5	Paket Orang %	266.000,00	0 %	Rp. 31.920.000,00
	[#] Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 79.900.000,00**
	[-] Bahan latker Kerajinan					**Rp. 20.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	5 x 4000000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] Bahan Latker Roti dan Kue					**Rp. 20.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	5 x 4000000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] Perlengkapan Latker MPS/ Ransel					**Rp. 39.900.000,00**
	Ransel Spesifikasi : Standart	10 x 30 x 0.5	Paket Buah %	266.000,00	0 %	Rp. 39.900.000,00
	[#] Latker MPS tahap 2 Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 13.320.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bahan Latker MPS 2 Paket					**Rp. 8.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	2 x 4000000	Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	[-] Perlengkapan Latker MPS/ Ransel					**Rp. 5.320.000,00**
	Ransel Spesifikasi : Standart	40 x 0.5	Buah %	266.000,00	0 %	Rp. 5.320.000,00
	[#] Latker Singkat (1 hari luar kota) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.000.000,00**
	[-] Bahan Pelatihan Kerja					**Rp. 2.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	1 x 2000000	Kali Rupiah	1,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[#] Latker Singkat (2 Hari Luar Kota) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	1 x 2 x 2000000	Paket Hari Rupiah	1,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[#] Latker Singkat (2 Paket) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	1 x 2 x 2000000	Paket Kali Rupiah	1,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 722.078.000,00**
	[#] FKLPI / FKJPPID **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 7.360.000,00**
	[-] RAKOR KEMITRAAN FKJPPID					**Rp. 7.360.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	40 x 4	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.760.000,00
	Jamuan makan (prasmanan) Spesifikasi : -	40 x 4	Orang Kali	35.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
	[#] Latker BLK **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 240.564.000,00**
	[-] Makan Materi umum Latker BLK					**Rp. 18.720.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	6 x 26 x 4	Paket Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 18.720.000,00
	[-] Makan Pelaksanaan Latker Teknis BLK					**Rp. 140.400.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	6 x 30 x 26	Paket Hari Orang	30.000,00	0 %	Rp. 140.400.000,00
	[-] Makan Pembukaan dan Penutupan Latker BLK (2 Gelombang; 1 Hr)					**Rp. 10.800.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 6 x 2	Orang Paket Kali	30.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	[-] Makan Rakor Persiapan/ Evaluasi Latker BLK					**Rp. 9.000.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 10	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Snack Materi umum Latker BLK					**Rp. 6.864.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	6 x 26 x 4	Paket Orang Hari	11.000,00	0 %	Rp. 6.864.000,00
	[-] Snack Pelaksanaan Latker Teknis BLK					**Rp. 51.480.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	6 x 30 x 26	Paket Hari Orang	11.000,00	0 %	Rp. 51.480.000,00
	[-] Snack Rakor Persiapan/ Evaluasi Latker BLK					**Rp. 3.300.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	30 x 10	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
	[#] Latker BLK tahap 2 **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 66.256.000,00**
	[-] Makan Snack Latker Teknis BLK tahap 2					**Rp. 59.040.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	2 x 30 x 24	Paket Hari Orang	30.000,00	0 %	Rp. 43.200.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	2 x 30 x 24	Paket Hari Orang	11.000,00	0 %	Rp. 15.840.000,00
	[-] Makan snack Materi umum Latker BLK tahap 2					**Rp. 7.216.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	2 x 22 x 4	Paket Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 5.280.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	-	-	30.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	2 x 22 x 4	Paket Orang Hari	11.000,00	0 %	Rp. 1.936.000,00
	[#] Latker Kewirausahaan **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 171.650.000,00**
	[-] Pelaksanaan Latker Kewirausahaan					**Rp. 157.850.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	55 x 2 x 35	Paket Hari Orang	30.000,00	0 %	Rp. 115.500.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	55 x 2 x 35	Paket Hari Orang	11.000,00	0 %	Rp. 42.350.000,00
	[-] Rakor Umum Latker Kewirausahaan					**Rp. 13.800.000,00**
	Jamuan makan (prasmanan) Spesifikasi : -	50 x 6	Orang Kali	35.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	50 x 6	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
	[#] Latker LPKS/ BLKK/ Mitra Latker **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 156.804.000,00**
	[-] Makan dan Snack Latker LPKS/ BLK K/ Mitra -- Materi Umum					**Rp. 25.920.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	27 x 8 x 4	Orang Paket Hari	30.000,00	0 %	Rp. 25.920.000,00
	[-] Makan dan Snack Latker (Materi Teknis) LPKS/ BLKK					**Rp. 123.984.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	8 x 14 x 27	Paket Hari Orang	30.000,00	0 %	Rp. 90.720.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	8 x 14 x 27	Paket Orang Orang	11.000,00	0 %	Rp. 33.264.000,00
	[-] Rakor Latker LPKS/ BLKK/ Mitra Latker					**Rp. 6.900.000,00**
	Jamuan makan (prasmanan) Spesifikasi : -	50 x 3	Orang Kali	35.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	50 x 3	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	[#] Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 27.216.000,00**
	[-] Makan dan Snack Latker LPKS/ BLK K/ Mitra -- Materi Umum					**Rp. 9.504.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	27 x 8 x 4	Orang Paket Hari	11.000,00	0 %	Rp. 9.504.000,00
	[-] Pembukaan dan Penutupan Pelatihan - LPKS/ BLKK					**Rp. 17.712.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	2 x 8 x 27	Kali Paket Orang	30.000,00	0 %	Rp. 12.960.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	2 x 8 x 27	Kali Paket Orang	11.000,00	0 %	Rp. 4.752.000,00
	[#] Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 30.840.000,00**
	[-] Makan Snack Pelaksanaan Latker MPS					**Rp. 26.240.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 2 x 32	Paket Hari Orang	30.000,00	0 %	Rp. 19.200.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 2 x 32	Paket Hari Orang	11.000,00	0 %	Rp. 7.040.000,00
	[-] Rakor Latker MPS (Pekerja Pabrik Pokok)					**Rp. 4.600.000,00**
	Jamuan makan (prasmanan) Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Kali	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	50 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	[#] Latker MPS tahap 2 Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 5.248.000,00**
	[-] Makan Snack Pelaksanaan Latker MPS					**Rp. 5.248.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	32 x 2 x 2	Orang Hari Paket	30.000,00	0 %	Rp. 3.840.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	32 x 2 x 2	Orang Hari Paket	11.000,00	0 %	Rp. 1.408.000,00
	[#] Latker Singkat (1 hari luar kota) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.460.000,00**
	[-] Makan snack Latker singkat luar kota					**Rp. 2.460.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	1 x 60	Kali Orang	11.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	1 x 60	Kali Orang	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[#] Latker Singkat (2 Hari Luar Kota) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.940.000,00**
	[-] Makan Latker Singkat Luar Kota					**Rp. 4.800.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	40 x 2 x 2	Orang Kali Hari	30.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[-] Makan Rakor Persiapan dan Evaluasi					**Rp. 1.050.000,00**
	Jamuan makan (prasmanan) Spesifikasi : -	2 x 15	Kali Orang	35.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	[-] Snack Latker singkat Luar Kota					**Rp. 1.760.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	40 x 2 x 2	Orang Kali Hari	11.000,00	0 %	Rp. 1.760.000,00
	[-] Snack Rakor Persiapan dan Evaluasi					**Rp. 330.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	2 x 15	Kali Orang	11.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	[#] Latker Singkat (2 Paket) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.740.000,00**
	[-] Makan Latker Singkat					**Rp. 4.200.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	35 x 2 x 2	Orang Hari Kali	30.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	[-] Snack Latker singkat					**Rp. 1.540.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	35 x 2 x 2	Orang Hari Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.540.000,00
5.1.02.01.01.0072	**Belanja Pakaian Kerja Bengkel**					**Rp. 105.030.000,00**
	[#] Latker BLK **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 21.060.000,00**
	[-] Pakaian Latker BLK					**Rp. 21.060.000,00**
	Wearpack Baju Kerja Spesifikasi : -	6 x 26 x 0.45	Paket Buah %	300.000,00	0 %	Rp. 21.060.000,00
	[#] Latker BLK tahap 2 **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 4.320.000,00**
	Wearpack Baju Kerja Spesifikasi : -	2 x 16 x 0.45	Paket Buah %	300.000,00	0 %	Rp. 4.320.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Latker LPKS/ BLKK/ Mitra Latker Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 27.000.000,00**
	[-] Pakaian Latker LPKS/ BLK K / Mitra					**Rp. 27.000.000,00**
	Wearpack Baju Kerja Spesifikasi : -	8 x 25 x 0.45	Paket Buah %	300.000,00	0 %	Rp. 27.000.000,00
	[#] Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 47.250.000,00**
	[-] Pakaian Latker MPS					**Rp. 47.250.000,00**
	Wearpack Baju Kerja Spesifikasi : -	10 x 35 x 0.45	Paket Buah %	300.000,00	0 %	Rp. 47.250.000,00
	[#] Latker MPS tahap 2 Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 5.400.000,00**
	Wearpack Baju Kerja Spesifikasi : -	20 x 2 x 0.45	Orang Paket %	300.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 805.600.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 549.170.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 519.050.000,00**
	[#] FKLPI / FKJPPID Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 19.300.000,00**
	[-] RAKOR KEMITRAAN FKJPPID					**Rp. 19.300.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 4 x 0.5	Orang Kali Persen	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 4 x 0.5	Orang Kali Persen	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 4 x 5	Orang Kali Persen	500.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 8 x 0.5	Orang Kali Persen	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber ha...	1 x 4 x 0.5	Orang Kali Persen	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[#] Latker BLK Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 24.100.000,00**
	[-] Honor Eselon III Pembukaan dan Penutupan Latker BLK (2 Gel)					**Rp. 1.800.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 4 x 0.5	Orang Kali %	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] Honor Eselon II Pembukaan dan Penutupan Latker BLK (2 Gel)					**Rp. 2.000.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 4 x 0.5	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Honor Eselon IV Pembukaan dan Penutupan Latker BLK (2 Gel)					**Rp. 1.500.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber ha...	1 x 4 x 0.5	Orang Kali %	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Honor Moderator Pembukaan dan Penutupan Latker BLK (2 Gel)					**Rp. 1.000.000,00**
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 4 x 0.5	Orang Kali %	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Honor Walikota/Wakil Walikota Pembukaan dan Penutupan Latker BLK (2 Gel)					**Rp. 5.200.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 4	Orang Kali	1.300.000,00	0 %	Rp. 5.200.000,00
	[-] Instruktur Non PNS Latker di BLK					**Rp. 9.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	6 x 1 x 30 x 0.05	Orang / Jam Pelajaran Paket Hari Persen	1.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Narsum Provinsi/ Set DBH CHT Provinsi Pembukaan dan Penutupan Latker BLK (2 Gel)					**Rp. 3.600.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 4 x 0.9	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[#] Latker BLK; Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker; Latker Kewirausahaan; Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 60.325.000,00**
	[-] Moderator Rakor Persiapan dan Evaluasi					**Rp. 1.250.000,00**
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 5 x 0.5	Orang Kali %	500.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	[-] Narsum Eselon III					**Rp. 9.900.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 5	Orang Kali	900.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 6	Orang Kali	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	[-] Narsum Pengantar Kerja/ Analis Tenaga Kerja Rakor Persiapan dan Evaluasi					**Rp. 1.875.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber ha...	1 x 5 x 0.5	Orang Kali %	750.000,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
	[-] Narsum Provinsi					**Rp. 9.000.000,00**
	Narasumber Profesional dengan reputasi Regional Provinsi Spesifikasi : -	1 x 0.36 x 10	Orang Persen Kali	2.500.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Narsum rakor Mitra (LPKS/Pakar/MPS/Mitra Latker)					**Rp. 10.000.000,00**
	Narasumber Profesional dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 10	Orang Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	[-] Narsum Rakor Persiapan dan Evaluasi Eselon II,					**Rp. 2.500.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 5 x 0.5	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Narsum Rakor Persiapan dan Evaluasi (Eselon III)					**Rp. 2.250.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 5 x 0.5	Orang Kali %	900.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	[-] Rakor Persiapan; Evaluasi Latker (Latker Kewirausahaan; Latker MPS; Latker BLK; Latker LPKS/ BLK K/ Mitra Latker)					**Rp. 20.950.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 4	Orang Kali	1.300.000,00	0 %	Rp. 5.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 10 x 0.5	Orang Kali Persen	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 10 x 0.5	Orang Kali Persen	900.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber ha...	1 x 10 x 0.5	Orang Kali Persen	750.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 10 x 0.5	Orang Kali Persen	500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Walikota/Wakil Walikota Rakor Persiapan dan Evaluasi					**Rp. 2.600.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 2	Orang Kali	1.300.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
	[#] Latker BLK tahap 2 Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 3.500.000,00**
	[-] Jasa Mengajar Kompetensi Dasar/Umum					**Rp. 2.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	4 x 1 x 0.5	Orang Kegiatan %	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Materi Umum Latker BLK					**Rp. 1.500.000,00**
	Jasa Mengajar Kompetensi Dasar/Umum BLK Spesifikasi : -	2 x 1	Orang Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[#] Latker Kewirausahaan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 249.525.000,00**
	[-] Eselon II					**Rp. 27.500.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 55 x 0.5	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 27.500.000,00
	[-] Eselon III					**Rp. 30.150.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 55 x 0.5	Orang Kali %	900.000,00	0 %	Rp. 24.750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 6	Orang Kali	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	[-] Eselon IV					**Rp. 20.625.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber ha...	1 x 55 x 0.5	Orang Kali %	750.000,00	0 %	Rp. 20.625.000,00
	[-] Moderator					**Rp. 13.750.000,00**
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 55 x 0.5	Orang Kali %	500.000,00	0 %	Rp. 13.750.000,00
	[-] Narsum/ Instruktur					**Rp. 110.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 2 x 55 x 0.5	Orang Hari Paket %	1.000.000,00	0 %	Rp. 110.000.000,00
	[-] Narsum Pakar Kewirausahaan/Manajemen					**Rp. 27.500.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 55 x 0.5	Orang Paket %	1.000.000,00	0 %	Rp. 27.500.000,00
	[-] Narsum Provinsi					**Rp. 13.500.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 15 x 0.9	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
	[-] Walikota/ Wakil Walikota					**Rp. 6.500.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 5	Orang Kali	1.300.000,00	0 %	Rp. 6.500.000,00
	[#] Latker LPKS/ BLKK/ Mitra Latker **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 3.500.000,00**
	[-] Jasa Mengajar Kompetensi Dasar/Umum					**Rp. 2.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 2 x 0.5	Orang Kegiatan Persen	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Narsum Eseslon II,					**Rp. 1.500.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 3 x 0.5	Orang Kali Persen	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[#] Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 71.300.000,00**
	[-] Instruktur latker di LPKS/BLK K/ Mitra					**Rp. 67.200.000,00**
	Narasumber Profesional dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	8 x 12 x 14 x 0.05	Paket Orang / Jam Pelajaran Hari Persen	1.000.000,00	0 %	Rp. 67.200.000,00
	[-] Materi umum/ Kewirausahaan					**Rp. 2.000.000,00**
	Narasumber Profesional dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 2 x 0.5	Orang Kegiatan Persen	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Moderator					**Rp. 750.000,00**
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 3 x 0.5	Orang Kali Persen	500.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] Narsum Eselon III					**Rp. 1.350.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 3 x 0.5	Orang Kali Persen	900.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	[#] Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 54.250.000,00**
	[-] Eselon II					**Rp. 5.000.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 10 x 0.5	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] Eselon III					**Rp. 4.500.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 10 x 0.5	Orang Kali %	900.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[-] Eselon IV					**Rp. 3.750.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber ha...	1 x 10 x 0.5	Orang Kali Persen	750.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	[-] Instruktur latker MPS					**Rp. 20.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 2 x 10 x 0.5	Orang Hari Paket %	1.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] Ketuan Dekranasda					**Rp. 1.500.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 3 x 0.5	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Moderator					**Rp. 2.500.000,00**
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 10 x 0.5	Orang Kali Persen	500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Narsum Manajemen MPS					**Rp. 5.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 10 x 0.5	Orang Paket %	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] Narsum Provinsi					**Rp. 3.600.000,00**
	Narasumber Profesional dengan reputasi Regional Provinsi Spesifikasi : -	1 x 4 x 0.36	Orang Kali Persen	2.500.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] 'Pakar/Mitra/Stakeholder Terkait					**Rp. 4.500.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 10 x 0.45	Orang Kali Persen	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[-] Walikota/ Wakil Walikota					**Rp. 3.900.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 3	Orang Kali	1.300.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
	[#] Latker MPS tahap 2 **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Instruktur latker MPS					**Rp. 4.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 2 x 2 x 0.5	Paket Orang Hari %	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Narsum Manajemen MPS					**Rp. 1.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 2 x 0.5	Orang Kegiatan %	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[#] Latker Singkat (1 hari luar kota) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.500.000,00**
	[-] Narasumber Profesional					**Rp. 500.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 1 x 0.5	Kali Orang %	1.000.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Narsum Eselon II/ DPRD					**Rp. 1.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 1	Kali Orang	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Narsum Teknis					**Rp. 1.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 2 x 0.5	Kali Orang %	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[#] Latker Singkat (2 Hari Luar Kota) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.000.000,00**
	[-] Narsum Eselon II/ DPRD					**Rp. 2.000.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 2	Orang Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Narsum Pakar					**Rp. 2.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Narsum Teknis					**Rp. 2.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 2 x 0.5	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[#] Latker Singkat (2 Paket) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.500.000,00**
	[-] Narsum Eselon II/ DPRD					**Rp. 2.000.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 1 x 2	Kali Orang Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Narsum Praktisi					**Rp. 1.500.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 1 x 2 x 0.75	Kali Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Narsum Teknis					**Rp. 2.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 2 x 0.5 x 2	Kali Orang % Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[#] Materi Umum Latker BLK **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 9.250.000,00**
	[-] Eselon II					**Rp. 1.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 2 x 0.5	Orang Kali Persen	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Eselon III					**Rp. 900.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 2 x 0.5	Orang Kali Persen	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Eselon IV					**Rp. 750.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber ha...	1 x 2 x 0.5	Orang Kali Persen	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] Jasa Mengajar Kompetensi Dasar/Umum					**Rp. 3.500.000,00**
	Jasa Mengajar Kompetensi Dasar/Umum BLK Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Kali	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 2 x 0.5	Orang Kali Persen	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Moderator					**Rp. 500.000,00**
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 2 x 0.5	Orang Kali Persen	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Walikota/ Wakil Walikota					**Rp. 2.600.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 2	Orang Kali	1.300.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
	[#] Pembukaan Latker LPKS/BLKK/ Mitra Latker Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Eselon II					**Rp. 1.000.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon II /DPRD/ yang disetarakan (Honor Narasumbe...	1 x 2 x 0.5	Orang Kali Persen	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Eselon III					**Rp. 900.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber h...	1 x 2 x 0.5	Orang Kali Persen	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Moderator					**Rp. 500.000,00**
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 2 x 0.5	Orang Kali Persen	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Walikota/ Wakil Walikota					**Rp. 2.600.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 2	Orang Kali	1.300.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
5.1.02.02.01.0013	**Belanja Jasa Tenaga Pendidikan**					**Rp. 9.000.000,00**
	[#] Latker BLK tahap 2 **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 9.000.000,00**
	[-] Materi umum Latker BLK					**Rp. 9.000.000,00**
	Instruktur Pengajar Non PNS di BLK Spesifikasi : 1 jam = 45 menit	1 x 1 x 6 x 30	Orang Paket Orang / Jam Pelajaran Hari	50.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 5.120.000,00**
	[#] Jasa Tenaga Caraka **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 5.040.000,00**
	[-] LATKER KEWIRAUSAHAAN					**Rp. 4.400.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	2 x 55	Orang Lokasi	40.000,00	0 %	Rp. 4.400.000,00
	[-] LATKER LPKS/BLK K					**Rp. 640.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	2 x 8	Orang Lokasi	40.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
	[#] Latker Singkat (2 Hari Luar Kota) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 80.000,00**
	[-] Tenaga Caraka					**Rp. 80.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp. 16.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 8.500.000,00**
	[-] Publikasi Lewat Surat Kabar					**Rp. 6.000.000,00**
	Publikasi melalui media cetak Spesifikasi : -	6000000 x 1	Rupiah Kali	1,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Publikasi Pelatihan					**Rp. 2.500.000,00**
	Biaya Penayangan dan Penyiaran Melalui Media Elektronik : Spesifikasi : Radio Siaran Pemerintah	1	Kali	2.500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] h Perusahaan yang mengadakan kemitraan MOU dg BLK melalui kios 3 in 1 **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 7.500.000,00**
	Biaya Penayangan dan Penyiaran Melalui Media Elektronik : Spesifikasi : TV LOKAL	1	Kali	7.500.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 68.310.000,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 19.500.000,00**
	[#] Latker Singkat (1 hari luar kota) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.500.000,00**
	[-] Sewa Bus					**Rp. 6.500.000,00**
	Bus 40 - 60 seat Spesifikasi : Di Jateng dan DIY	1 x 1	Unit Hari	6.500.000,00	0 %	Rp. 6.500.000,00
	[#] Latker Singkat (2 Hari Luar Kota) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 13.000.000,00**
	Bus 40 - 60 seat Spesifikasi : Di Jateng dan DIY	1 x 2	Unit Hari	6.500.000,00	0 %	Rp. 13.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp. 6.960.000,00**
	[#] Latker Kewirausahaan; Latker BLK; Latker MPS; Latker LPKS/BLK K **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 6.000.000,00**
	[-] Sewa kursi lipat					**Rp. 6.000.000,00**
	Kursi lipat Spesifikasi : -	100 x 10	Buah Kali	6.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Latker Singkat (1 hari luar kota) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 360.000,00**
	Kursi lipat Spesifikasi : -	1 x 60	Kali Buah	6.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	[#] Latker Singkat (2 Hari Luar Kota) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 600.000,00**
	Kursi lipat Spesifikasi : -	50 x 2	Buah Kali	6.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.02.04.0123	**Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 41.850.000,00**
	[#] Latker BLK; Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker; Latker Kewirausahaan; Latker MPS **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 31.000.000,00**
	[-] Sewa sound system					**Rp. 31.000.000,00**
	Sound system Spesifikasi : 1000 watt	10 x 2	Kali Hari	1.550.000,00	0 %	Rp. 31.000.000,00
	[#] Latker Singkat (1 hari luar kota) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.550.000,00**
	Sound system Spesifikasi : 1000 watt	1 x 1	Kali Buah	1.550.000,00	0 %	Rp. 1.550.000,00
	[#] Latker Singkat (2 Hari Luar Kota) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.100.000,00**
	Sound system Spesifikasi : 1000 watt	1 x 2	Buah Kali	1.550.000,00	0 %	Rp. 3.100.000,00
	[#] Latker Singkat (2 Paket) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.200.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sound system Spesifikasi : 1000 watt	2 x 1 x 2	Hari Buah Kali	1.550.000,00	0 %	Rp. 6.200.000,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp. 33.000.000,00**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp. 33.000.000,00**
	[#] Latker BLK; Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker; Latker Kewirausahaan; Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 24.000.000,00**
	[-] Sewa ruangan pelatihan					**Rp. 24.000.000,00**
	Sewa Gedung / Meeting Room Spesifikasi : -	2 x 10	Hari Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	[#] Latker Singkat (1 hari luar kota) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.200.000,00**
	Sewa Gedung / Meeting Room Spesifikasi : -	1	Hari	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[#] Latker Singkat (2 Hari Luar Kota) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Sewa Ruangan Latker Luar Kota					**Rp. 3.000.000,00**
	Sewa Gedung dan Bangunan Spesifikasi : -	1 x 2 x 1500000	Tempat Hari Rupiah	1,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] Latker Singkat (2 Paket) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.800.000,00**
	[-] Sewa ruangan pelatihan					**Rp. 4.800.000,00**
	Sewa Gedung / Meeting Room Spesifikasi : -	2 x 1 x 2	Hari Tempat Kali	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 155.120.000,00**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp. 155.120.000,00**
	[#] Banpot OJT Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 6.000.000,00**
	[-] Bantuan transpot siswa selama 3 bln (kemitraan)					**Rp. 6.000.000,00**
	Bantuan Transport siswa OJT-BLK Spesifikasi : -	20 x 15	Orang Hari	20.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Latker BLK Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 63.360.000,00**
	[-] Banport Peserta BLK					**Rp. 63.360.000,00**
	Transport siswa pelatihan BLK / LPKS Spesifikasi : -	16 x 6 x 33	Orang Paket Hari	20.000,00	0 %	Rp. 63.360.000,00
	[#] Latker BLK tahap 2 Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 21.760.000,00**
	Transport siswa pelatihan BLK / LPKS Spesifikasi : -	2 x 34 x 16	Paket Hari Orang	20.000,00	0 %	Rp. 21.760.000,00
	[#] Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 64.000.000,00**
	[-] Banport Peserta LPKS					**Rp. 64.000.000,00**
	Transport siswa pelatihan BLK / LPKS Spesifikasi : -	20 x 8 x 20	Orang Paket Hari	20.000,00	0 %	Rp. 64.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 272.959.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 272.959.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 56.679.000,00**
	[#] Latker Kewirausahaan singkat **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 3.600.000,00**
	[-] Uang harian peserta Latker singkat					**Rp. 3.600.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekitar Kota Pekalongan Spesifikasi : Kabupaten (Batang,Pekalongan dan Pemalang)	24 x 1	Orang Kali	150.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[#] Latker Singkat (1 hari luar kota) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 10.953.000,00**
	[-] BBM kendaraan dinas					**Rp. 363.000,00**
	Transport Perjalanan Dinas Mobil dibawah 1700cc (BBM Pertamax/Dexlite) Spesifikasi : Ungaran	1	Mobil	363.000,00	0 %	Rp. 363.000,00
	[-] Representasi Eselon II/DPRD					**Rp. 300.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Eselon II / Anggota DPRD	2 x 1	Orang Kali	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Tol					**Rp. 300.000,00**
	Jasa Jalan Tol Spesifikasi : -	2 x 150000	Kali Rupiah	1,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Uang harian DPRD					**Rp. 370.000,00**
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	1 x 1	Kali Orang	370.000,00	0 %	Rp. 370.000,00
	[-] Uang harian Kepala Dinas					**Rp. 370.000,00**
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	1 x 1	Kali Orang	370.000,00	0 %	Rp. 370.000,00
	[-] Uang Harian Peserta					**Rp. 4.440.000,00**
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	40 x 1 x 0.3	Orang Hari %	370.000,00	0 %	Rp. 4.440.000,00
	[-] Uang Harian Tim Pendamping					**Rp. 4.810.000,00**
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	1 x 13	Kali Orang	370.000,00	0 %	Rp. 4.810.000,00
	[#] Latker Singkat (2 Hari Luar Kota) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 31.118.000,00**
	[-] Penginapan Eselon II/DPRD					**Rp. 3.330.000,00**
	Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Jawa Tengah	2 x 1	Orang Kali	1.665.000,00	0 %	Rp. 3.330.000,00
	[-] Penginapan Instruktur dan Panitia					**Rp. 3.645.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I Spesifikasi : Jawa Tengah	10 x 1 x 0.54	Orang Kali %	675.000,00	0 %	Rp. 3.645.000,00
	[-] Penginapan Peserta Latker					**Rp. 9.113.000,00**
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I Spesifikasi : Jawa Tengah	25 x 1 x 0.5400296	Orang Kali %	675.000,00	0 %	Rp. 9.113.000,00
	[-] Representasi Eselon II/DPRD					**Rp. 600.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Eselon II / Anggota DPRD	2 x 2	Orang Kali	150.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] Uang Harian Eselon II dan III					**Rp. 2.220.000,00**
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	3 x 2	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 2.220.000,00
	[-] Uang Harian Narsum (DPRD)					**Rp. 740.000,00**
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	1 x 2	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 740.000,00
	[-] Uang Harian Peserta					**Rp. 5.550.000,00**
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	25 x 2 x 0.3	Orang Hari %	370.000,00	0 %	Rp. 5.550.000,00
	[-] Uang Harian Tim Pendamping					**Rp. 5.920.000,00**
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	8 x 2	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 5.920.000,00
	[#] SPPD ke Provinsi Jateng **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 11.008.000,00**
	[-] BBM Kendaraan Dinas					**Rp. 2.288.000,00**
	Transport Perjalanan Dinas Mobil dibawah 1700cc (BBM Pertamax/Dexlite) Spesifikasi : Semarang	8 x 1	Kali Kendaraan	286.000,00	0 %	Rp. 2.288.000,00
	[-] SPPD ke Provinsi Jateng					**Rp. 1.600.000,00**
	Jasa Jalan Tol Spesifikasi : -	8 x 200000	Kali Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	[-] Uang Harian SPPD ke Jateng					**Rp. 5.920.000,00**
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	2 x 8	Orang Kali	370.000,00	0 %	Rp. 5.920.000,00
	[-] Uang Representasi					**Rp. 1.200.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Eselon II / Anggota DPRD	1 x 8	Orang Kali	150.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 88.680.000,00**
	[#] Banport TNA **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 6.750.000,00**
	[-] Banport TNA					**Rp. 6.750.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	15 x 5 x 3	Orang Kali Kegiatan	30.000,00	0 %	Rp. 6.750.000,00
	[#] FKLPI / FKJPPID Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 4.200.000,00**
	[-] Monitoring Koordinasi ke Perusahaan dan FKJPPID/ FJ LPKI					**Rp. 4.200.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	10 x 2 x 7	Orang Kali Bulan	30.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	[#] Latker BLK Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 3.600.000,00**
	[-] Bantuan transport monitoring siswa OJT					**Rp. 3.600.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	4 x 30	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[#] Latker Kewirausahaan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 34.650.000,00**
	[-] Koordinasi dan Monitoring Latker Kewirausahaan					**Rp. 14.850.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	3 x 3 x 55	Orang Kali Paket	30.000,00	0 %	Rp. 14.850.000,00
	[-] SPPD Tim Kelurahan (Pendataan, Rekrutmen, Koordinasi ke RT/RW)					**Rp. 19.800.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	6 x 2 x 55	Orang Kali Paket	30.000,00	0 %	Rp. 19.800.000,00
	[#] Latker LPKS/ BLKK/ Mitra Latker Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 2.880.000,00**
	[-] SPPD Dalam Daerah (Koordinasi, Monitoring Pelatihan kerjasama dengan LPKS/ BLK Komunitas)					**Rp. 2.880.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	3 x 4 x 8	Orang Kali Lokasi	30.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
	[#] Latker MPS Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp. 31.800.000,00**
	[-] Banpot Panitian Pendukung Unsur manajement PT MPS Urip Sugiharto (Latker MPS (Pekerja Pabrik Rokok))					**Rp. 4.000.000,00**
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Transport lokal Khusus untuk diluar Pegawai Pemkot...	4 x 10 x 2	Orang Paket Hari	50.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Banpot Peserta (Latker MPS (Pekerja Pabrik Rokok))					**Rp. 20.000.000,00**
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Transport lokal Khusus untuk diluar Pegawai Pemkot...	20 x 2 x 10	Orang Hari Paket	50.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] Banpot Peserta Rakor Non PNS					**Rp. 1.000.000,00**
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Transport lokal Khusus untuk diluar Pegawai Pemkot...	20 x 1	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Banpot Petugas Mitra (Asisten Teknis Narsum) Angkut alat alat ke pabrik Rokok Lokasi Latker MPS					**Rp. 2.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Transport lokal Khusus untuk diluar Pegawai Pemkot...	2 x 10 x 2	Orang Paket Hari	50.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Koordinasi dan Monitoring Latker MPS					**Rp. 4.800.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	10 x 4 x 4	Paket Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[#] Latker MPS tahap 2 **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 4.800.000,00**
	[-] Banpot Panitia Pendukung Unsur manajemen/ Serikat Pekerja PT MPS Urip Sugiarto					**Rp. 400.000,00**
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Transport lokal Khusus untuk diluar Pegawai Pemkot...	2 x 2 x 2	Orang Hari Paket	50.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Banpot Peserta (Latker MPS (Pekerja Pabrik Rokok))					**Rp. 4.000.000,00**
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Transport lokal Khusus untuk diluar Pegawai Pemkot...	20 x 2 x 2	Orang Hari Paket	50.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Banpot Petugas Mitra (Asisten Teknis Narsum) Angkut alat alat ke pabrik Rokok Lokasi Latker MPS					**Rp. 400.000,00**
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Transport lokal Khusus untuk diluar Pegawai Pemkot...	2 x 2 x 2	Orang Hari Paket	50.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 127.600.000,00**
	[#] FKLPI / FKJPPID **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Banpot Peserta Rakor Non PNS					**Rp. 5.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	25 x 4	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[#] Latker Kewirausahaan **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 114.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	20 x 4	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Transport Peserta Latker Kewirausahaan (Latker Kewirausahaan)					**Rp. 110.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	20 x 2 x 55	Orang Hari Paket	50.000,00	0 %	Rp. 110.000.000,00
	[#] Latker LPKS/BLKK/Mitra Latker **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 2.000.000,00**
	[-] Banpot Peserta Rakor Non PNS					**Rp. 2.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	20 x 2	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[#] Latker MPS **Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Banpot Panitian Pendukung Unsur manajement PT MPS Urip Sugiharto (Latker MPS (Pekerja Pabrik Rokok))					**Rp. 0,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	-	Orang Paket Hari	50.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Banpot Peserta (Latker MPS (Pekerja Pabrik Rokok))					**Rp. 0,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	-	Orang Hari Paket	50.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Banpot Peserta Rakor Non PNS					**Rp. 3.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	20 x 3	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Banpot Petugas Mitra (Asisten Teknis Narsum) Angkut alat alat ke pabrik Rokok Lokasi Latker MPS					**Rp. 0,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	-	Orang Paket Hari	50.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] Latker Singkat (2 Paket) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.600.000,00**
	[-] Banpot Angkut alat					**Rp. 1.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	4 x 5 x 1	Hari Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Banpot Kebersihan					**Rp. 600.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	4 x 3 x 1	Hari Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] Banpot Peserta					**Rp. 2.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	2 x 20 x 1	Hari Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 62.129.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 62.129.000,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 31.912.000,00**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 24.972.000,00**
5.2.02.05.01.0004	**Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**					**Rp. 24.972.000,00**
	[#] Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 24.972.000,00**
	[-] Belanja Filing cabinet					**Rp. 1.703.000,00**
	Filing Cabinet Besi Spesifikasi : bahan:metal. ukuran :P:580. L:485. T:710 mm	1	Unit	1.703.000,00	0 %	Rp. 1.703.000,00
	[-] Belanja Lemari					**Rp. 9.219.000,00**
	Lemari Kayu Spesifikasi : Uk. :P:500. L:400. T:1780 mm	1	Unit	5.936.000,00	0 %	Rp. 5.936.000,00
	Lemari Kayu Spesifikasi : Uk. :P:910. L:460. T:910 mm	1	Unit	3.283.000,00	0 %	Rp. 3.283.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Rak arsip					**Rp. 14.050.000,00**
	Rak Kayu Spesifikasi : ukuran :P:1050. L:600. T:2250 mm	2	Unit	7.025.000,00	0 %	Rp. 14.050.000,00
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 6.940.000,00**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp. 6.940.000,00**
	[#] Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.940.000,00**
	[-] Belanja Kursi Putar					**Rp. 6.940.000,00**
	Kursi Putar Spesifikasi : Chrome	10	Unit	694.000,00	0 %	Rp. 6.940.000,00
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 30.217.000,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 27.717.000,00**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 27.717.000,00**
	[#] Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 27.717.000,00**
	[-] Belanja Laptop					**Rp. 12.000.000,00**
	Laptop Office Medium Level Spesifikasi : Setara Proccessor Core i5 Ram 4 GB SSD 512gb VGA I...	1	Unit	12.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[-] Belanja PC					**Rp. 15.717.000,00**
	P.C Unit Spesifikasi : Core i7 8700, 8GB, 1TB, Nvidia Geforce GT720 2GB, ...	1	Unit	15.717.000,00	0 %	Rp. 15.717.000,00
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 2.500.000,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 2.500.000,00**
	[#] Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.500.000,00**
	[-] Scanner					**Rp. 2.500.000,00**
	Scanner ADF (Automatic Document Feeder) Spesifikasi : -	1 x 2500000	Unit Rupiah	1,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
					Jumlah :	**Rp. 3.065.939.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pencari Kerja Kota Pekalongan
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 249.999.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 249.999.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	1,10 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 249.999.000,00
Keluaran	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 249.999.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 249.999.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 2.550.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 2.550.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 2.550.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 2.100.000,00**
	[#] Kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.100.000,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp. 1.200.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 4	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Honor Kasir					**Rp. 900.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	4	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 450.000,00**
	[#] Kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 450.000,00**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan					**Rp. 200.000,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	[-] Honor PPKOM					**Rp. 250.000,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 247.449.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.441.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.441.000,00**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp. 1.000.000,00**
	[#] Kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.000.000,00**
	[-] Belanja Bahan- bahan Bangunan dan Konstruksi					**Rp. 1.000.000,00**
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi Spesifikasi : -	1000000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 5.097.000,00**
	[#] Kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.097.000,00**
	[-] BLK					**Rp. 138.000,00**
	Oli Mesin Spesifikasi : SAE 40	3	Buah	46.000,00	0 %	Rp. 138.000,00
	[-] MESIN POTONG RUMPUT BLK					**Rp. 4.959.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BBM Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi : -	348	Liter	14.250,00	0 %	Rp. 4.959.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 344.000,00**
	[#] Kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 344.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 344.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1146	Lembar	300,00	0 %	Rp. 343.800,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 0,00**
	[#] Instruktur yang dinilai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] Rapat Penilaian Angka Kredit					**Rp. 0,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	-	-	11.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	-	-	30.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] Kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] Rapat BLK					**Rp. 0,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	-	-	11.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	-	-	30.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 224.208.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 213.600.000,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 181.200.000,00**
	[#] Kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 181.200.000,00**
	[-] JASA TENAGA ADMINISTRASI BARU					**Rp. 49.200.000,00**
	Tenaga Administrasi DINPERINAKER Spesifikasi : -	2 x 12	Orang Bulan	2.050.000,00	0 %	Rp. 49.200.000,00
	[-] JASA TENAGA ADMINISTRASI LAMA					**Rp. 132.000.000,00**
	Tenaga Administrasi DINPERINAKER Spesifikasi : -	5 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 132.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 2.400.000,00**
	[#] Kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.400.000,00**
	[-] Tenaga Harian Lepas					**Rp. 2.400.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tukang Harian Lepas Pekerjaan Swakelola Spesifikasi : -	20	Kali	120.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.01.0039	**Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi**					**Rp. 30.000.000,00**
	[#] Kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 30.000.000,00**
	[-] JASA TENAGA OPERATOR					**Rp. 30.000.000,00**
	Tenaga Operator IT, Pengalaman Kerja di Pemkot lebih dari 8 tahun Spesifikasi : meliputi : Teknis jaringan, Entri data, Pengisi ko...	1 x 12	Orang Bulan	2.500.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 10.608.000,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 9.264.000,00**
	[#] Kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.264.000,00**
	[-] BPJS KESEHATAN					**Rp. 9.264.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	7 x 12 x 96000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 8.064.000,00
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	1 x 12 x 100000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 576.000,00**
	[#] Kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 576.000,00**
	[-] BPJS KETENAGAKERJAAN					**Rp. 576.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	8 x 12 x 6000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 576.000,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 768.000,00**
	[#] Kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 768.000,00**
	[-] BPJS KETENAGAKERJAAN					**Rp. 768.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	8 x 12 x 8000	Orang Bulan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 768.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 16.800.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 16.800.000,00**
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp. 1.500.000,00**
	[#] Kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.500.000,00**
	[-] OTOMOTIF SEPEDA MOTOR					**Rp. 1.500.000,00**
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	5 x 0.6	Unit %	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.03.02.0040	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus**					**Rp. 1.530.000,00**
	[#] Kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.530.000,00**
	[-] Otomotif Mobil					**Rp. 1.530.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)	1 x 0.18	Unit %	8.500.000,00	0 %	Rp. 1.530.000,00
5.1.02.03.02.0068	**Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya**					**Rp. 3.000.000,00**
	[#] Kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] PERALATAN KEJURUAN LAS					**Rp. 1.500.000,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	3 x 500000	Buah Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Teknik Listrik (Perbaikan Mesin Steam)					**Rp. 1.500.000,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	3 x 500000	Unit Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp. 5.670.000,00**
	[#] Kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.670.000,00**
	[-] Tata Usaha dan Kios, Manufaktur, Otomotif (Mobil & Motor), Las, TIK, Listrik, Menjahit, Pariwisata, Processing, dan Kecantikan					**Rp. 5.670.000,00**
	AC Split sd 1 PK Spesifikasi : Ringan	14	Unit	405.000,00	0 %	Rp. 5.670.000,00
5.1.02.03.02.0123	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 2.100.000,00**
	[#] Kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.100.000,00**
	[-] Kejuruan Menjahit (Service Mesin Jahit)					**Rp. 1.600.000,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	16 x 100000	Unit Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	[-] Kejuruan Menjahit (Service Mesin Obras)					**Rp. 300.000,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	1 x 300000	Buah Rupiah	1,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Kejuruan Menjahit (Service Mesin Pelubang Kancing)					**Rp. 200.000,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	1 x 200000	Unit Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp. 2.400.000,00**
	[#] Kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.400.000,00**
	[-] TIK, WORKSHOP DESAIN, TATA USAHA DAN KIOS					**Rp. 2.400.000,00**
	Personal Komputer (PC) / Laptop Spesifikasi : Ringan	8 x 0.6	Unit %	500.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.03.02.0411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp. 600.000,00**
	[#] Kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 600.000,00**
	[-] TIK, WORKSHOP DESAIN, TATA USAHA DAN KIOS					**Rp. 600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Printer Spesifikasi : Ringan	4 x 0.5	Unit %	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
					Jumlah :	**Rp. 249.999.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pencari Kerja Kota Pekalongan
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 235.461.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 235.461.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	1,10 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 235.461.000,00
Keluaran	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	29 Unit
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 235.461.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.741.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.350.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.350.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.350.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.350.000,00
	[#] Kejuruan dan perlengkapan pelatihan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.350.000,00
	[-] Honorarium Penatausahaan Keuangan					Rp. 1.350.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	1 x 6	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.391.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.391.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.391.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 571.000,00**
	[#] Kejuruan dan perlengkapan pelatihan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 571.000,00**
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					**Rp. 571.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1903	Lembar	300,00	0 %	Rp. 570.900,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 820.000,00**
	[#] Kejuruan dan perlengkapan pelatihan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 820.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp. 820.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 232.720.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 232.720.000,00**
5.2.02.03	**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**					**Rp. 52.950.000,00**
5.2.02.03.01	**Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin**					**Rp. 52.950.000,00**
5.2.02.03.01.0008	**Belanja Modal Peralatan Las**					**Rp. 52.950.000,00**
	[#] Kejuruan dan perlengkapan pelatihan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 52.950.000,00**
	[-] Kejuruan Las (Blower dan Instalasi)					**Rp. 35.000.000,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	1 x 35000000	Pekerjaan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 35.000.000,00
	[-] Kejuruan Las (Mesin Las)					**Rp. 17.950.000,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	1 x 17950000	Unit Rupiah	1,00	0 %	Rp. 17.950.000,00
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 19.325.000,00**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 7.641.000,00**
5.2.02.05.01.0004	**Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**					**Rp. 7.641.000,00**
	[#] Kejuruan dan perlengkapan pelatihan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.641.000,00**
	[-] Tata Usaha					**Rp. 7.641.000,00**
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4 x 0.611475672	Buah %	3.124.000,00	0 %	Rp. 7.641.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 11.684.000,00**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp. 6.684.000,00**
	[#] Kejuruan dan perlengkapan pelatihan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 6.684.000,00**
	[-] Tata Usaha					**Rp. 6.684.000,00**
	Belanja Modal Mebel	1 x 0.977951984	Buah %	2.041.000,00	0 %	Rp. 1.996.000,00
	Belanja Modal Mebel	5 x 0.66214689	Buah %	1.416.000,00	0 %	Rp. 4.688.000,00
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 5.000.000,00**
	[#] Kejuruan dan perlengkapan pelatihan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] BLK (SPEAKER AKTIF PORTABLE)					**Rp. 5.000.000,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	1 x 5000000	Unit Rupiah	1,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 48.345.000,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 48.345.000,00**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 41.255.000,00**
	[#] Kejuruan dan perlengkapan pelatihan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 41.255.000,00**
	[-] Tata Usaha					**Rp. 24.000.000,00**
	Laptop Office Medium Level Spesifikasi : Setara Proccessor Core i5 Ram 4 GB SSD 512gb VGA I...	2	Unit	12.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	[-] Workshop Desain (Belanja Modal Pengadaan PC)					**Rp. 17.255.000,00**
	P.C Unit Spesifikasi : Core i7 8700, 8GB, 1TB, Nvidia Geforce GT720 2GB, ...	1	Unit	17.255.000,00	0 %	Rp. 17.255.000,00
5.2.02.10.01.0003	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**					**Rp. 7.090.000,00**
	[#] Kejuruan dan perlengkapan pelatihan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.090.000,00**
	[-] TATA USAHA DAN KIOS					**Rp. 7.090.000,00**
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : M130FN	2	Unit	3.545.000,00	0 %	Rp. 7.090.000,00
5.2.02.16	**Belanja Modal Alat Peraga**					**Rp. 112.100.000,00**
5.2.02.16.01	**Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan**					**Rp. 112.100.000,00**
5.2.02.16.01.0003	**Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya**					**Rp. 112.100.000,00**
	[#] Kejuruan dan perlengkapan pelatihan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 112.100.000,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp. 1.800.000,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	4	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	4	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	0 %	Rp. 800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kejuruan Pariwisata (Mesin ice cube/es batu)					**Rp. 4.500.000,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	1 x 4500000	Unit Rupiah	1,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[-] Kejuruan Processing (Mesin proofing)					**Rp. 5.800.000,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	1 x 5800000	Unit Rupiah	1,00	0 %	Rp. 5.800.000,00
	[-] Kejuruan Processing (Showing case/ Lemari es pintu kaca)					**Rp. 8.500.000,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	1 x 8500000	Unit Rupiah	1,00	0 %	Rp. 8.500.000,00
	[-] Kejuruan Teknik Listrik (Trainer PLC Omron CP1E N 30 DRA/SDRA)					**Rp. 44.000.000,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	4 x 11000000	Unit Rupiah	1,00	0 %	Rp. 44.000.000,00
	[-] Otomotif Mobil (Kelistrikan bodymobil trainer kijang 5K)					**Rp. 17.500.000,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	1 x 17500000	Unit Rupiah	1,00	0 %	Rp. 17.500.000,00
	[-] Otomotif Mobil (Sistem pengapian trainer kijang 5K)					**Rp. 0,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	-	-	1,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Radiator and cup tester sepeda motor (Otomotif Sepeda Motor)					**Rp. 9.000.000,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	1 x 9000000	Unit Rupiah	1,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Scanner injeksi sepeda motor (Otomotif Sepeda Motor)					**Rp. 13.000.000,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	1 x 13000000	Unit Rupiah	1,00	0 %	Rp. 13.000.000,00
	[-] TIK (Belanja Mesin CUTTING STICKER)					**Rp. 8.000.000,00**
	Pekerjaan Spesifikasi : -	1 x 8000000	Unit Rupiah	1,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 235.461.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Alumni siswa pelatihan dan Peminat magang Jepang Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 26.831.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 87.731.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	1,10 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.831.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen
Hasil	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	40.00 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 26.831.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 26.831.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.500.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.500.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.500.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.500.000,00
	[#] alumni siswa pelatihan yang termonitor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 900.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 3	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[#] Alumni siswa pelatihan yang termonitor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 600.000,00**
	[-] Honorarium Kasir Kegiatan					**Rp. 600.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 3	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 25.331.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 9.671.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 9.671.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 4.063.000,00**
	[#] Alumni siswa pelatihan yang termonitor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 815.800,00**
	[-] Foto copy					**Rp. 695.800,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2319	Lembar	300,00	0 %	Rp. 695.700,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
	[-] Penggandaan Buku Laporan					**Rp. 120.000,00**
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	4	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	[#] peminat magang Jepang yang mengikuti pembekalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 90.000,00**
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	3	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[#] Peminat magang jepang yang mengikuti pembekalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.157.200,00**
	[-] Foto copy					**Rp. 907.200,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3024	Lembar	300,00	0 %	Rp. 907.200,00
	[-] Foto copy Materi Peserta					**Rp. 2.250.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	15 x 150000	Buku Rupiah	1,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 688.000,00**
	[#] Alumni siswa pelatihan yang termonitor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 192.000,00**
	[-] Dokumentasi					**Rp. 192.000,00**
	Cetak Film Foto Spesifikasi : Ukuran 3 R	96	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
	[#] peminat magang Jepang yang mengikuti pembekalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 396.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Spanduk Magang Jepang					**Rp. 396.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3 x 1 x 2	Meter Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 396.000,00
	[#] Peminat magang jepang yang mengikuti pembekalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 100.000,00**
	[-] Dokumentasi					**Rp. 100.000,00**
	Cetak Film Foto Spesifikasi : Ukuran 3 R	50	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 0,00**
	[#] Peminat magang jepang yang mengikuti pembekalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] Bahan Praktek Pelatihan					**Rp. 0,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	-	Orang Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Seragam Peserta Pelatihan Magang					**Rp. 0,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	-	Orang Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 4.920.000,00**
	[#] peminat magang Jepang yang mengikuti pembekalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.920.000,00**
	[-] Makan Pembekalan					**Rp. 3.600.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 4	Orang Hari	30.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] Snack Pembekalan					**Rp. 1.320.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	30 x 4	Orang Hari	11.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 6.460.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 3.460.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 2.500.000,00**
	[#] Peminat magang jepang yang mengikuti pembekalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.500.000,00**
	[-] Narasumber Perusahaan					**Rp. 1.500.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 2 x 0.75	Orang Kali %	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Narasumber Provinsi					**Rp. 1.000.000,00**
	Narasumber Profesional dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.01.0043	**Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan**					**Rp. 960.000,00**
	[#] Peminat magang jepang yang mengikuti pembekalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 960.000,00**
	[-] Jasa Pelatih/ Pemandu Bhs Jepang					**Rp. 960.000,00**
	Instruktur Bahasa Asing Spesifikasi : -	1 x 4 x 4	Orang Orang / Jam / Pelajaran Hari	60.000,00	0 %	Rp. 960.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 0,00**
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp. 0,00**
	[#] Peminat magang jepang yang mengikuti pembekalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] Sewa Kursi					**Rp. 0,00**
	Kursi lipat Spesifikasi : -	-	Hari Buah	6.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02.04.0123	**Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 0,00**
	[#] Peminat magang jepang yang mengikuti pembekalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] Sewa sound system					**Rp. 0,00**
	Sound system Spesifikasi : 1000 watt	-	Kali Hari	1.550.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp. 0,00**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp. 0,00**
	[#] Peminat magang jepang yang mengikuti pembekalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] Sewa Ruang					**Rp. 0,00**
	Sewa Gedung / Meeting Room Spesifikasi : -	-	Kali Hari	1.200.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 3.000.000,00**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 3.000.000,00**
	[#] Peminat magang jepang yang mengikuti pembekalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Bantuan Transport peserta					**Rp. 3.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	15 x 4	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 9.200.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 9.200.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 9.000.000,00**
	[#] alumni siswa pelatihan yang termonitor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.000.000,00**
	[-] Bantuan Transport Petugas Monev					**Rp. 9.000.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	10 x 10 x 3	Orang Bulan Kali	30.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 200.000,00**
	[#] Peminat magang jepang yang mengikuti pembekalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 200.000,00**
	[-] Transport Provinsi					**Rp. 200.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Narasumber Spesifikasi : -	1 x 200000	Orang Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200.000,00
					Jumlah :	**Rp. 26.831.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: 1. Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja Transmigrasi, WUB Kota Pekalongan
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 254.586.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 354.586.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	25,93 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 254.586.000,00
Keluaran	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	162 Orang
Hasil	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	11.86 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 254.586.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 254.586.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 450.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 450.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 450.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 450.000,00**
	[#] - **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 450.000,00**
	[-] Honorarium Kasir Kegiatan					**Rp. 450.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta ...	1 x 2	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[#] Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 0,00**
	[-] Kasir					**Rp. 0,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	-	-	200.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] PPTK					**Rp. 0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	-	-	300.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 0,00**
	[#] Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 0,00**
	[-] Pejabat pengadaan					**Rp. 0,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	-	-	200.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] PPKOM					**Rp. 0,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	-	-	200.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 254.136.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 136.509.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 136.509.000,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 4.200.000,00**
	[#] lokasi pelaksanaan padat karya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.200.000,00**
	[-] Belanja BBM Truk					**Rp. 4.200.000,00**
	BBM Mobil Operasional Armada Sampah (ArmRoll,Dump Truck) Spesifikasi : BBM Solar (10 L/rit x Rp. 7.000), max 365 hr/th	2 x 2 x 15	Kendaraan Lokasi Hari	70.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
5.1.02.01.01.0005	**Belanja Bahan-Bahan Baku**					**Rp. 480.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] lokasi pelaksanaan padat karya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 480.000,00**
	[-] Belanja Bambu					**Rp. 480.000,00**
	Bambu tali die. 8-10 cm panj. 10 m Spesifikasi : -	24	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
5.1.02.01.01.0019	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian**					**Rp. 9.120.000,00**
	[#] lokasi pelaksanaan padat karya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.120.000,00**
	[-] Belanja Cangkul					**Rp. 3.720.000,00**
	Cangkul Spesifikasi : -	24	Buah	155.000,00	0 %	Rp. 3.720.000,00
	[-] Belanja Sekop					**Rp. 5.400.000,00**
	Sekop Besar Spesifikasi : -	18	Buah	300.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.240.000,00**
	[#] Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] fotocopy					**Rp. 0,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	-	-	300,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Fotocopy Materi					**Rp. 0,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	-	-	300,00	0 %	Rp. 0,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	-	-	1,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] Kegiatan Pelatihan Visi Misi Walikota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 620.000,00**
	[-] fotocopy					**Rp. 619.800,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2066	Lembar	300,00	0 %	Rp. 619.800,00
	[-] pembulatan					**Rp. 200,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
	[#] lokasi pelaksanaan padat karya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 987.000,00**
	[-] Belanja Penggandaan Formulir					**Rp. 600.000,00**
	Kertas Dan Cover Spesifikasi : -	4 x 150000	Rim Rupiah	1,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] buku laporan					**Rp. 90.000,00**
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	3	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[-] foto copy					**Rp. 297.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	990	Lembar	300,00	0 %	Rp. 297.000,00
	[#] Perjanjian Kerja Yang Disahkan Oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kab/Kota (Transmigrasi)(IKK Output) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] buku laporan					**Rp. 0,00**
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	-	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] #Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kab/Kota (Transmigrasi) (IKK Output)) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 90.000,00**
	[-] fotocopy					**Rp. 0,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	-	Lembar	300,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] penggandaan buku laporan					**Rp. 90.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	3 x 30000	Buku Rupiah	1,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[#] Tenaga Kerja Non Formal Terdaftar dalam Satu Kab/Kota (WUB) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 543.000,00**
	[-] buku laporan					**Rp. 90.000,00**
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover Art carton 1 warna, tebal < 5cm	3	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[-] Fotocopy					**Rp. 453.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1510	Lembar	300,00	0 %	Rp. 453.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 150.000,00**
	[#] Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] Cetak spanduk					**Rp. 0,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	-	-	66.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Cetak X-Banner					**Rp. 0,00**
	Banner Spesifikasi : manual, bentuk roll	-	-	1.365.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] lokasi pelaksanaan padat karya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 100.000,00**
	[-] Dokumentasi					**Rp. 100.000,00**
	Cetak Film Foto Spesifikasi : Ukuran 3 R	50	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	[#] #Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kab/Kota (Transmigrasi) (IKK Output)) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] Cetak Foto					**Rp. 0,00**
	Cetak Film Foto Spesifikasi : Ukuran 3 R	-	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 0,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tenaga Kerja Non Formal Terdaftar dalam Satu Kab/Kota (WUB) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 50.000,00**
	[-] Dokumentasi					**Rp. 50.000,00**
	Cetak Film Foto Spesifikasi : Ukuran 3 R	25	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 0,00**
	[#] #Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kab/Kota (Transmigrasi) (IKK Output)) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 0,00**
	[-] Materai 10.000					**Rp. 0,00**
	Materai 10000 Spesifikasi : -	-	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 1.200.000,00**
	[#] lokasi pelaksanaan padat karya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.200.000,00**
	[-] belanja sabit					**Rp. 1.200.000,00**
	Sabit/arit Spesifikasi : -	24	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 90.960.000,00**
	[#] Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 0,00**
	[-] Bantuan sosialisasi perluasan kerja dan sarana usaha					**Rp. 0,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	-	-	1,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] Kegiatan Pelatihan Visi Misi Walikota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 74.000.000,00**
	[-] Bahan Pelatihan					**Rp. 74.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	20 x 1 x 2 x 1850000	Orang Paket Paket Rupiah	1,00	0 %	Rp. 74.000.000,00
	[#] lokasi pelaksanaan padat karya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 6.960.000,00**
	[-] belanja basket					**Rp. 2.400.000,00**
	Basket/Keranjang Spesifikasi : -	24	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Garuk sampah					**Rp. 4.560.000,00**
	Garpu Pacul Spesifikasi : -	24	Buah	190.000,00	0 %	Rp. 4.560.000,00
	[#] Pelatihan dan bantuan peralatan usaha **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 0,00**
	[-] Pelatihan dan bantuan peralatan usaha					**Rp. 0,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	-	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] #Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kab/Kota (Transmigrasi) (IKK Output)) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 0,00**
	[-] Bantuan uang saku transmigrasi					**Rp. 0,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	-	KK Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] Tenaga Kerja Non Formal Terdaftar dalam Satu Kab/Kota (WUB) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Bahan Praktek Pelatihan					**Rp. 10.000.000,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	10000000	Paket	1,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 28.159.000,00**
	[#] 11 bulan penyediaan makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 132.000,00**
	[-] snack rapat tim					**Rp. 132.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	6 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 132.000,00
	[#] Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] Konsumsi Sosialisasi Perluasan Kerja					**Rp. 0,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	-	-	11.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	-	-	30.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] Kegiatan Pelatihan Visi Misi Walikota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.280.000,00**
	[-] Makan Panitia dan Instruktur					**Rp. 1.800.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 1 x 2 x 2	Orang Kali Hari Paket	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] Makan Peserta Pelatihan					**Rp. 2.400.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 1 x 2 x 2	Orang Kali Hari Paket	30.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Snack Panitia dan Instruktur					**Rp. 1.320.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 2 x 2 x 2	Orang Kali Hari Paket	11.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
	[-] Snack Peserta Pelatihan					**Rp. 1.760.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	20 x 2 x 2 x 2	Orang Kali Hari Paket	11.000,00	0 %	Rp. 1.760.000,00
	[#] lokasi pelaksanaan padat karya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 15.650.000,00**
	[-] Makan Rapat					**Rp. 300.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Makan sosialisasi penyuluhan					**Rp. 2.700.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	45 x 2	Orang Lokasi	30.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Snack pekerja					**Rp. 11.550.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	35 x 15 x 2	Orang Hari Lokasi	11.000,00	0 %	Rp. 11.550.000,00
	[-] Snack Rapat					**Rp. 110.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
	[-] Snack sosialisasi penyuluhan					**Rp. 990.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	45 x 2	Orang Lokasi	11.000,00	0 %	Rp. 990.000,00
	[#] Perjanjian Kerja Yang Disahkan Oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kab/Kota (Transmigrasi)(IKK Output) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 410.000,00**
	[-] Makan rapat					**Rp. 300.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Snack Rapat					**Rp. 110.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
	[#] #Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kab/Kota (Transmigrasi) (IKK Output)) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.407.000,00**
	[-] makan pelepasan Transmigrasi					**Rp. 390.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	13 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 390.000,00
	[-] Makan rapat					**Rp. 360.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	6 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	[-] Makan rapat Tim					**Rp. 360.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	6 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	[-] Snack pelepasan Transmigrasi					**Rp. 165.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 165.000,00
	[-] Snack Rapat					**Rp. 132.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	6 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 132.000,00
	[#] Tenaga Kerja Non Formal Terdaftar dalam Satu Kab/Kota (WUB) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.280.000,00**
	[-] Makmin pelatihan					**Rp. 3.280.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	20 x 2 x 2	Orang Hari Kali	11.000,00	0 %	Rp. 880.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	20 x 2 x 2	Orang Kali Hari	30.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 105.167.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 96.580.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 17.100.000,00**
	[#] Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] Deskranada					**Rp. 0,00**
	Honor Narasumber Ketua PKK Tingkat Kota Spesifikasi : -	-	-	750.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Honor Narasumber Praktisi					**Rp. 0,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	-	-	1.000.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Honor Narasumber Teknis					**Rp. 0,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	-	-	1.000.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Honor Walikota					**Rp. 0,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	-	-	1.300.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] Kegiatan Pelatihan Visi Misi Walikota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 14.100.000,00**
	[-] Honor Instruktur Teknis					**Rp. 8.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 2 x 2	Orang Hari Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	[-] Honor Narasumber Ibu Walikota					**Rp. 1.500.000,00**
	Honor Narasumber Ketua PKK Tingkat Kota Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Paket	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Honor Narasumber Materi Umum					**Rp. 2.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 1 x 2 x 0.5	Orang Hari Paket %	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Honor Narasumber Walikota					**Rp. 2.600.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 2	Orang Paket	1.300.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
	[#] Tenaga Kerja Non Formal Terdaftar dalam Satu Kab/Kota (WUB) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Narasumber Pengajar SMK					**Rp. 3.000.000,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 2 x 0.75	Orang Hari %	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 16.500.000,00**
	[#] Pelatihan dan bantuan peralatan usaha Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 16.500.000,00**
	[-] Honor KDH					**Rp. 9.000.000,00**
	Honorarium Panitia Kegiatan Spesifikasi : Pengarah/Pembina/Penasehat/Penanggung Jawab/Ketua ...	1 x 12	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Honor WKDH					**Rp. 7.500.000,00**
	Honorarium Panitia Kegiatan Spesifikasi : Pengarah/Pembina/Penasehat/Penanggung Jawab/Ketua ...	1 x 12	Orang Bulan	625.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 62.400.000,00**
	[#] lokasi pelaksanaan padat karya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 62.400.000,00**
	[-] Transport Kepala Kelompok					**Rp. 9.900.000,00**
	Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja padat Karya Infrastruktur Spesifikasi : Kepala Kelompok	6 x 15 x 2	Orang Hari Lokasi	55.000,00	0 %	Rp. 9.900.000,00
	[-] Transport Pekerja					**Rp. 52.500.000,00**
	Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja padat Karya Infrastruktur Spesifikasi : Pekerja	35 x 15 x 2	Orang Hari Lokasi	50.000,00	0 %	Rp. 52.500.000,00
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 500.000,00**
	[#] lokasi pelaksanaan padat karya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 500.000,00**
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan					**Rp. 500.000,00**
	Jasa tenaga kebersihan yang mendapat penugasan tambahan Spesifikasi : -	5 x 2	Orang Lokasi	50.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 80.000,00**
	[#] Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] Caraka					**Rp. 0,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	-	-	40.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] Tenaga Kerja Non Formal Terdaftar dalam Satu Kab/Kota (WUB) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 80.000,00**
	[-] Banpot Caraka					**Rp. 80.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 2.587.000,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 1.278.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] lokasi pelaksanaan padat karya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.278.000,00**
	[-] JKK					**Rp. 1.278.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	16800 x 76	Rupiah Orang	1,00	0 %	Rp. 1.276.800,00
	Premi Asuransi Spesifikasi : -	1200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.200,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 1.309.000,00**
	[#] lokasi pelaksanaan padat karya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.309.000,00**
	[-] JKM					**Rp. 1.309.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	17200 x 76	Rupiah Orang	1,00	0 %	Rp. 1.307.200,00
	Premi Asuransi Spesifikasi : -	1800	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.800,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 0,00**
5.1.02.02.04.0043	**Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya**					**Rp. 0,00**
	[#] #Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kab/Kota (Transmigrasi) (IKK Output)) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 0,00**
	[-] SEWA ANGKUTAN TRANSPORTASI ORANG DAN BARANG DARI DAERAH TK II KE TRANSITO SEMARANG					**Rp. 0,00**
	Sewa Sarana Mobilitas Spesifikasi : -	-	KK Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp. 1.500.000,00**
5.1.02.02.09.0013	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen**					**Rp. 1.500.000,00**
	[#] lokasi pelaksanaan padat karya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.500.000,00**
	[-] Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan					**Rp. 1.500.000,00**
	Jasa Konsultasi Spesifikasi : -	1 x 1500000	Pekerjaan Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 4.500.000,00**
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 4.500.000,00**
	[#] lokasi pelaksanaan padat karya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.500.000,00**
	[-] Transport Peserta Penyuluhan					**Rp. 3.500.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	35 x 2	Orang Lokasi	50.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[#] #Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kab/Kota (Transmigrasi) (IKK Output)) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 0,00**
	[-] BANTUAN TRANSPORTUNTUK MASYARAKAT PESERTA SOSIALISASI					**Rp. 0,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	-	Kali	50.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] transport caraka					**Rp. 0,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	-	Orang	50.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] Tenaga Kerja Non Formal Terdaftar dalam Satu Kab/Kota (WUB) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.000.000,00**
	[-] Transport Peserta Pelatihan					**Rp. 1.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 12.460.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 12.460.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 8.460.000,00**
	[#] Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] Koordinasi dan Monitoring Sosialisasi perluasan kerja dan bantuan sarana usaha					**Rp. 0,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	-	-	30.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] lokasi pelaksanaan padat karya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.960.000,00**
	[-] Jasa Juru Bayar					**Rp. 240.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	1 x 8	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	[-] Jasa Koordinator Lapangan					**Rp. 720.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	3 x 8	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	[-] Jasa Pengawas					**Rp. 720.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	3 x 8	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	[-] Jasa Petugas lapangan					**Rp. 2.400.000,00**
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Transport lokal Khusus untuk diluar Pegawai Pemkot...	2 x 12 x 2	Orang Hari Lokasi	50.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Jasa Petugas Teknis					**Rp. 720.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	3 x 8	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	[-] Jasa Transport Koordinasi Lapangan					**Rp. 1.000.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	1 x 10 x 2	Orang Kali Lokasi	50.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Transport Identifikasi Potensi					**Rp. 360.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	3 x 2 x 2	Orang Kali Lokasi	30.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	[-] Transport Panitia					**Rp. 1.800.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	10 x 3 x 2	Orang Kali Lokasi	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[#] Tenaga Kerja Non Formal Terdaftar dalam Satu Kab/Kota (WUB) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 500.000,00**
	[-] Bantuan Transport Panitia					**Rp. 500.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	5 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 4.000.000,00**
	[#] Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] Transport Sosialisasi perluasan kerja dan bantuan sarana usaha					**Rp. 0,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	-	-	50.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] Kegiatan Pelatihan Visi Misi Walikota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.000.000,00**
	[-] Transport Peserta Pelatihan					**Rp. 4.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	20 x 1 x 2 x 2	Orang Kali Hari Paket	50.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 254.586.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: 1. Operator Informasi pasar kerja online dan Laporan Pencaker, 2. Layanan dan Leafleat, 3. Perusahaan Kota Pekalongan
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 31.140.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 59.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.140.000,00
Keluaran	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen
Hasil	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun	12 buku

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 31.140.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 31.140.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 2.400.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 2.400.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 2.400.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 2.400.000,00**
	[#] Operator yang menangani aplikasi informasi pasar kerja online Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.400.000,00**
	[-] Kasir kegiatan					**Rp. 2.400.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 12	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 28.740.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.020.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.020.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 610.000,00**
	[#] Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 460.000,00**
	[-] Buku Laporan					**Rp. 240.000,00**
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover bufalo 1 warna, tebal <5cm	12	Buku	20.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	[-] Fotocopy					**Rp. 219.900,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	733	Lembar	300,00	0 %	Rp. 219.900,00
	[-] Pembulatan					**Rp. 100,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
	[#] Operator yang menangani aplikasi informasi pasar kerja online **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 150.000,00**
	[-] Fotocopy Bahan Rapat					**Rp. 150.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	500	Lembar	300,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 410.000,00**
	[#] Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 410.000,00**
	[-] Makan Rapat					**Rp. 300.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Snack Rapat					**Rp. 110.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 27.720.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 26.400.000,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 26.400.000,00**
	[#] Operator yang menangani aplikasi informasi pasar kerja online **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 26.400.000,00**
	[-] Jasa Administrasi Bursa Kerja Online					**Rp. 26.400.000,00**
	Tenaga Administrasi DINPERINAKER Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 26.400.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 1.320.000,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 1.152.000,00**
	[#] Operator yang menangani aplikasi informasi pasar kerja online **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.152.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BPJS KESEHATAN					**Rp. 1.152.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi : -	1 x 96000 x 12	Orang Rupiah Bulan	1,00	0 %	Rp. 1.152.000,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 72.000,00**
	[#] Operator yang menangani aplikasi informasi pasar kerja online **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 72.000,00**
	[-] JAMINAN KECELAKAAN KERJA					**Rp. 72.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi : -	1 x 6000 x 12	Orang Rupiah Bulan	1,00	0 %	Rp. 72.000,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 96.000,00**
	[#] Operator yang menangani aplikasi informasi pasar kerja online **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 96.000,00**
	[-] ASURANSI KEMATIAN					**Rp. 96.000,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi : -	1 x 8000 x 12	Orang Rupiah Bulan	1,00	0 %	Rp. 96.000,00
					Jumlah :	**Rp. 31.140.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: CPMI Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 28.130.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 28.130.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.130.000,00
Keluaran	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	25 Orang
Hasil	Jumlah CPMI yang terlayani secara legal	44 orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 28.130.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 28.130.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 28.130.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 21.500.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 21.500.000,00**
5.1.02.01.01.0005	**Belanja Bahan-Bahan Baku**					**Rp. 12.500.000,00**
	[#] #Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja (IKK Output) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 12.500.000,00**
	[-] bahan pelatihan cpmi					**Rp. 12.500.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi : -	500000 x 25	Rupiah Orang	1,00	0 %	Rp. 12.500.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 738.000,00**
	[#] #Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja (IKK Output) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 738.000,00**
	[-] Buku Laporan					**Rp. 90.000,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	3 x 30000	Buku Rupiah	1,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[-] Fotocopy					**Rp. 648.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2160	Lembar	300,00	0 %	Rp. 648.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.342.000,00**
	[#] #Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja (IKK Output) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.342.000,00**
	[-] Cetak leafleat					**Rp. 2.400.000,00**
	Cetak Leafleat Spesifikasi : -	800 x 3000	Lembar Rupiah	1,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Dokumentasi					**Rp. 150.000,00**
	Cetak Film Foto Spesifikasi : Ukuran 3 R	75	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	[-] spanduk standart					**Rp. 792.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3 x 2 x 2	Meter Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 792.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 4.920.000,00**
	[#] #Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja (IKK Output) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.920.000,00**
	[-] Makan Rakor Panitia					**Rp. 1.500.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 5	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Makan Sosialisasi					**Rp. 770.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	35 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 770.000,00
	[-] makan sosialisasi /pelatihan					**Rp. 2.100.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	35 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[-] snack rapat panitia					**Rp. 550.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 5	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 6.630.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 4.130.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 4.050.000,00**
	[#] #Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja (IKK Output) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.050.000,00**
	[-] keynote speaker					**Rp. 1.300.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 x 1	Orang Kali	1.300.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	[-] Narasumber Luar					**Rp. 2.000.000,00**
	Narasumber Profesional dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] narsum eselon IV / Fungsional dari BKD					**Rp. 750.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber ha...	1 x 2 x 0.5	Orang Kali %	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 80.000,00**
	[#] #Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja (IKK Output) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 80.000,00**
	[-] Transport Caraka					**Rp. 80.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 2.500.000,00**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp. 0,00**
	[#] #Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja (IKK Output) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 0,00**
	[-] Biaya pelatihan					**Rp. 0,00**
	Biaya Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Spesifikasi : -	-	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02.12.0002	**Belanja Sosialisasi**					**Rp. 2.500.000,00**
	[#] #Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja (IKK Output) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.500.000,00**
	[-] transport sosialisasi/pelatihan					**Rp. 2.500.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	25 x 2	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
					Jumlah :	**Rp. 28.130.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Kegiatan	: 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Maret
Kelompok Sasaran	: Perusahaan di Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 11.184.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 18.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	50,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.184.000,00
Keluaran	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	30 Perusahaan
Hasil	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	40.17 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Maret
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 11.184.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 11.184.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 700.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 700.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 700.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 700.000,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 700.000,00**
	[-] Honor Kasir					**Rp. 400.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 2	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Honor PPTK					**Rp. 300.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 1	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.484.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.614.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.614.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 660.000,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 660.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 660.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2200	Lembar	300,00	0 %	Rp. 660.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 264.000,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 264.000,00**
	[-] Cetak Spanduk MMT					**Rp. 264.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	4 x 1	Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.690.000,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.690.000,00**
	[-] Konsumsi Panitia dan Narsum Pelaksanaan Kegiatan					**Rp. 1.230.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan					**Rp. 2.460.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 2.870.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 2.870.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 2.750.000,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.750.000,00**
	[-] Honor Moderator					**Rp. 1.000.000,00**
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 1	Orang Kali	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Honor Narasumber					**Rp. 1.750.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber ha...	1 x 1	Orang Kali	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 120.000,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 120.000,00**
	[-] Banpot Caraka					**Rp. 120.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.000.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 0,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 0,00**
	[-] Transport monev					**Rp. 0,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	-	-	30.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 3.000.000,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Banpot Peserta					**Rp. 3.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 11.184.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Kegiatan	: 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Maret
Kelompok Sasaran	: Perusahaan di Kota Pekalongan Kota Pekalongan
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 11.184.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 18.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	50,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.184.000,00
Keluaran	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	30 Perusahaan
Hasil	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	40.17 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Maret
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 11.184.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 11.184.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 700.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 700.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 700.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 700.000,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 700.000,00**
	[-] Honor Kasir					**Rp. 400.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 2	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Honor PPTK					**Rp. 300.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 1	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.484.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.614.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.614.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 660.000,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 660.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 660.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2200	Lembar	300,00	0 %	Rp. 660.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 264.000,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 264.000,00**
	[-] Cetak Spanduk MMT					**Rp. 264.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	4 x 1	Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.690.000,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.690.000,00**
	[-] Konsumsi Panitia dan Narsum Pelaksanaan Kegiatan					**Rp. 1.230.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan					**Rp. 2.460.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 2.870.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 2.870.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 2.750.000,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.750.000,00**
	[-] Honor Moderator					**Rp. 1.000.000,00**
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	2 x 1	Orang Kali	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Honor Narasumber					**Rp. 1.750.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber ha...	1 x 1	Orang Kali	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 120.000,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 120.000,00**
	[-] Banpot Caraka					**Rp. 120.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.000.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 0,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 0,00**
	[-] Transport monev					**Rp. 0,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	-	-	30.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 3.000.000,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Banpot Peserta					**Rp. 3.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	30 x 2	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 11.184.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 6.240.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 12.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	50,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.240.000,00
Keluaran	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	6 Perkara
Hasil	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	72.45 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 6.240.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 6.240.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.200.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.200.000,00**
	[#] Perusahaan yang difasilitasi Mediasi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.200.000,00**
	[-] Honorarium Kasir Kegiatan					**Rp. 1.200.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 6	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 5.040.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.540.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.540.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 460.000,00**
	[#] Perusahaan yang difasilitasi Mediasi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 460.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 460.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1533	Lembar	300,00	0 %	Rp. 459.900,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.080.000,00**
	[#] Perusahaan yang difasilitasi Mediasi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.080.000,00**
	[-] Rapat persiapan/klarifikasi/mediasi					**Rp. 3.080.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 28	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 3.080.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 600.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 600.000,00**
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 600.000,00**
	[#] Perusahaan yang difasilitasi Mediasi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 600.000,00**
	[-] Banpot Caraka					**Rp. 600.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 15	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 900.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 900.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 900.000,00**
	[#] Perusahaan yang difasilitasi Mediasi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 900.000,00**
	[-] Transport ke perusahaan dlm rangka monev penyelesaian kasus PHI					**Rp. 900.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	6 x 5	Orang / Kali Bulan	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
					Jumlah :	**Rp. 6.240.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: September s.d Oktober
Kelompok Sasaran	: Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 15.258.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 22.048.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	50,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.258.000,00
Keluaran	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	80 Asosiasi dan Serikat Pekerja
Hasil	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	72.45 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi
Waktu Pelaksanaan	: September s.d Oktober
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 15.258.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 15.258.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 701.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 701.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 701.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 701.000,00**
	[#] ASB 001-Pembinaan APINDO & SP-SB **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 700.000,00**
	[-] Honor Kasir					**Rp. 400.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 2	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Honor PPTK					**Rp. 300.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 1	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[#] Pembinaan APINDO & SP-SB **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.000,00**
	[-] pembulatan					**Rp. 1.000,00**
	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : -	1000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 14.557.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.587.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.587.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 993.000,00**
	[#] Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/ Pengusaha/ Manajemen Perusahaan,dan Organisasi Pengusaha yg mengikuti pembinaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 993.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 993.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3310	Lembar	300,00	0 %	Rp. 993.000,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	-	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 264.000,00**
	[#] ASB 001-Pembinaan APINDO & SP-SB **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 264.000,00**
	[-] Spanduk					**Rp. 264.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	4 x 1	Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 5.330.000,00**
	[#] ASB 001-Pembinaan APINDO & SP-SB **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 5.330.000,00**
	[-] Konsumsi narsum dan panitia					**Rp. 1.230.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 330.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Konsumsi peserta					**Rp. 3.280.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	40 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 880.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	40 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Konsumsi Rapat Persiapan Monev					**Rp. 820.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 1.870.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 1.870.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 1.750.000,00**
	[#] ASB 001-Pembinaan APINDO & SP-SB **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.750.000,00**
	[-] Honor Moderator					**Rp. 1.000.000,00**
	Moderator, dengan reputasi Regional Provinsi Spesifikasi : -	1 x 2 x 0.7142857	Orang Kali %	700.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Honor Narasumber					**Rp. 750.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber ha...	1 x 1	Orang Kali	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 120.000,00**
	[#] ASB 001-Pembinaan APINDO & SP-SB **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 120.000,00**
	[-] Banpot caraka					**Rp. 120.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 6.100.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 6.100.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 2.100.000,00**
	[#] Pembinaan APINDO & SP-SB **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.100.000,00**
	[-] Pembinaan APINDO & SP-SB					**Rp. 2.100.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	7 x 10	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 4.000.000,00**
	[#] ASB 001-Pembinaan APINDO & SP-SB **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Banpot Peserta					**Rp. 4.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	40 x 2	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 15.258.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 73.150.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 97.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	50,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 73.150.000,00
Keluaran	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga
Hasil	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	72.45 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah LKS Tripartit yang Dibina
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	**Uraian**	**Rinci Perhitungan**				**Jumlah**
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 73.150.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 73.150.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.800.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.800.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.800.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.800.000,00**
	[#] Honorarium Sekretariat LKS TRiPartit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] pembulatan					**Rp. 0,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : -	-	-	1,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] Jumlah Sidang/ Rapat LKS Tripartit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.800.000,00**
	[-] Honor Kasir Rapat LKS Tripartit					**Rp. 1.200.000,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 6	Orang Kali	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Honor PPTK Rapat LKS Tripartit					**Rp. 600.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 2	Orang Kali	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 71.350.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 37.581.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 37.581.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 2.060.000,00**
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti PORSENI TRIPARTIT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.192.000,00**
	[-] Fotocopy - PORSENI Tripartit					**Rp. 1.192.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3973	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.191.900,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
	[#] Jumlah Sidang/ Rapat LKS Tripartit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 868.000,00**
	[-] Fotocopy - Rapat LKS Tripartit					**Rp. 867.900,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2893	Lembar	300,00	0 %	Rp. 867.900,00
	[-] pembulatan					**Rp. 100,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi : -	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 858.000,00**
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti PORSENI TRIPARTIT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 858.000,00**
	[-] spanduk lomba PORSENI TRIPARTIT					**Rp. 594.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3 x 3	Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 594.000,00
	[-] Spanduk PORSENI TRIPARTIT					**Rp. 264.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	4 x 1	Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 1.400.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti PORSENI TRIPARTIT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.400.000,00**
	[-] Piala Lomba PORSENI TRIPARTIT					**Rp. 1.400.000,00**
	Piala Beregu Spesifikasi : -	2 x 0.875	Set %	800.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 32.513.000,00**
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti PORSENI TRIPARTIT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 31.775.000,00**
	[-] Konsumsi Juri Lomba					**Rp. 533.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	13	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 143.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	13	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 390.000,00
	[-] Konsumsi Panitia Lomba					**Rp. 2.050.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	50	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	50	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Konsumsi Peserta Jalan Sehat					**Rp. 8.200.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	200	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	200	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Konsumsi Peserta Lomba Karaoke					**Rp. 3.690.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	90	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 990.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	90	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	[-] Konsumsi Peserta Tenis Meja					**Rp. 4.100.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	100	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	100	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Konsumsi Petugas Keamanan dan Kebersihan					**Rp. 2.255.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	55	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	55	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 605.000,00
	[-] Konsumsi Rapat Panitia Lomba PORSENI TRIPARTIT					**Rp. 7.380.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	60 x 3	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 1.980.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	60 x 3	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	[-] Konsumsi Rapat Sekretariat dan Rapat Anggota LKS Tripartit					**Rp. 2.952.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	18 x 4	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 792.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	18 x 4	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
	[-] Konsumsi Tamu Undangan					**Rp. 615.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15	Orang / Kali	11.000,00	0 %	Rp. 165.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[#] Jumlah Sidang/ Rapat LKS Tripartit **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 738.000,00**
	[-] Konsumsi Rapat Sekretariat dan Rapat Anggota LKS Tripartit					**Rp. 738.000,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	18	Orang	30.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	18	Orang	11.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 750.000,00**
	[#] Makan Minum Lomba TriPartit **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 750.000,00**
	[-] Minum panitia PORSENI					**Rp. 750.000,00**
	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	25	Dos	30.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 18.674.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 13.210.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 9.000.000,00**
	[#] Honorarium Sekretariat LKS TRiPartit **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 0,00**
	[-] Honor Wali Kota - Rapat LKS Tripartit					**Rp. 0,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	-	-	1.300.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] Jumlah Sidang/ Rapat LKS Tripartit **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 9.000.000,00**
	[-] Honor Rapat LKS Tripartit					**Rp. 9.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Narasumber Spesifikasi : (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota,...	6 x 4	Orang Kali	250.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Staf (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali ...	3 x 2	Orang Kali	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 0,00**
	[#] Jumlah Sidang/ Rapat LKS Tripartit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 0,00**
	[-] Honor Wakil Walikota					**Rp. 0,00**
	Honorarium Panitia Kegiatan Spesifikasi : Pengarah/Pembina/Penasehat/Penanggung Jawab/Ketua ...	-	Orang / Kali	625.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Honor Walikota					**Rp. 0,00**
	Honorarium Panitia Kegiatan Spesifikasi : Pengarah/Pembina/Penasehat/Penanggung Jawab/Ketua ...	-	Orang / Kali	750.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 360.000,00**
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti PORSENI TRIPARTIT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 200.000,00**
	[-] Banpot Caraka PORSENI					**Rp. 200.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 5	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	[#] Jumlah Sidang/ Rapat LKS Tripartit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 160.000,00**
	[-] Banpot Caraka Rapat Tripartit					**Rp. 160.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 4	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
5.1.02.02.01.0037	**Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan**					**Rp. 3.850.000,00**
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti PORSENI TRIPARTIT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 3.850.000,00**
	[-] Honor Juri Lomba Karaoke					**Rp. 1.350.000,00**
	Juri Perlombaan/Seni Spesifikasi : Lokal	0.6 x 3	Persen Orang	750.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	[-] Honor Juri Lomba Tenis Meja					**Rp. 2.500.000,00**
	Juri Ketangkasan Spesifikasi : Lokal	10	Orang	250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 5.464.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 1.300.000,00**
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti PORSENI TRIPARTIT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.300.000,00**
	[-] Sewa Layos PORSENI					**Rp. 1.300.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Layos Besar biasa ful slisir Spesifikasi : -	2	Set	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp. 2.050.000,00**
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti PORSENI TRIPARTIT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.050.000,00**
	[-] Sewa Kursi PORSENI					**Rp. 1.600.000,00**
	Kursi susun Plastik Spesifikasi : -	200	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	[-] Sewa Meja PORSENI					**Rp. 450.000,00**
	Meja bundar / kotak + cover Spesifikasi : -	10	Buah	45.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02.02.04.0123	**Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 2.114.000,00**
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti PORSENI TRIPARTIT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.114.000,00**
	[-] Sewa Panggung PORSENI					**Rp. 386.000,00**
	Panggung + karpet Spesifikasi : 4 X4 M	1	Set	386.000,00	0 %	Rp. 386.000,00
	[-] Sewa Sound System PORSENI					**Rp. 1.728.000,00**
	Sound System 1000 watt Spesifikasi : 4 microphones~8x12 m	1	Set	1.728.000,00	0 %	Rp. 1.728.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 5.970.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 5.970.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.270.000,00**
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti PORSENI TRIPARTIT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.650.000,00**
	[-] Banpot petugas keamanan dan kebersihan					**Rp. 1.650.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	55	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	[#] Jumlah Sidang/ Rapat LKS Tripartit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.620.000,00**
	[-] Monev Sekretariat LKS Tripartit					**Rp. 1.620.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	9 x 6	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 2.700.000,00**
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti PORSENI TRIPARTIT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.200.000,00**
	[-] Banpot Rapat Juri Lomba					**Rp. 1.200.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	8 x 3	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[#] Jumlah Sidang/ Rapat LKS Tripartit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.500.000,00**
	[-] Banpot Rapat LKS Tripartit					**Rp. 1.500.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	6 x 5	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 9.125.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 9.125.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 9.125.000,00**
	[#] Jumlah peserta yang mengikuti PORSENI TRIPARTIT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 9.125.000,00**
	[-] Doorprize Jalan Sehat					**Rp. 1.875.000,00**
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1875000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
	[-] Hadiah Lomba Karaoke					**Rp. 2.250.000,00**
	Hadiah Lomba Kesenian Spesifikasi : Juara II	1	Regu	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Hadiah Lomba Kesenian Spesifikasi : Juara III	1	Regu	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Hadiah Lomba Kesenian Spesifikasi : Juara I	1	Regu	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Hadiah Lomba Tenis Meja					**Rp. 5.000.000,00**
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1750000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1500000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1000000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	750000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 750.000,00
					Jumlah :	**Rp. 73.150.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d Agustus
Kelompok Sasaran	: Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 10.963.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 15.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	50,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.963.000,00
Keluaran	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	40 Orang
Hasil	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	72.45 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d Agustus
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 10.963.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 10.963.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 700.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 700.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 700.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 700.000,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 700.000,00**
	[-] Honor Kasir					**Rp. 400.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 2	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Honor PPTK					**Rp. 300.000,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 x 1	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.263.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.503.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.503.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.164.000,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.164.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 1.164.000,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3880	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.164.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 264.000,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 264.000,00**
	[-] Cetak Spanduk MMT					**Rp. 264.000,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	4 x 1	Meter Buah	66.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.075.000,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 3.075.000,00**
	[-] Konsumsi Panitia dan Narsum Pelaksanaan Kegiatan					**Rp. 615.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	15 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 165.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	15 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Konsumsi peserta					**Rp. 1.640.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	40 x 1	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	40 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Konsumsi Rapat Persiapan & Evaluasi					**Rp. 820.000,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Kali	11.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi : -	10 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 1.870.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 1.870.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 1.750.000,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.750.000,00**
	[-] Honor Moderator					**Rp. 0,00**
	Moderator, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	-	-	500.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Honor Narasumber					**Rp. 1.750.000,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon IV / yang disetarakan (Honor Narasumber ha...	1 x 1	Orang Kali	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**Rp. 120.000,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 120.000,00**
	[-] Banpot Caraka					**Rp. 120.000,00**
	Banpot caraka Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.890.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.890.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 1.890.000,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.890.000,00**
	[-] Transport Monev					**Rp. 1.890.000,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/eva...	9 x 7	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.890.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 2.000.000,00**
	[#] ASB-001 : Sosialisasi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 2.000.000,00**
	[-] Banpot Peserta					**Rp. 2.000.000,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	40 x 1	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 10.963.000,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 6.163.965.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.163.965.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.163.965.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**6.163.965.000,00**					**6.163.965.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**6.163.965.000,00**					**6.163.965.000,00**	**0,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**6.163.965.000,00**					**6.163.965.000,00**	**0,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**3.963.956.000,00**					**3.963.956.000,00**	**0,00**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**2.619.092.000,00**					**2.619.092.000,00**	**0,00**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**2.573.200.000,00**					**2.573.200.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**2.539.600.000,00**					**2.539.600.000,00**	**0,00**
	[-] Acress					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	0 Tahun	Tahun	28.303.000,00	-	0,00	0 Tahun	Tahun	28.303.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Gaji Pokok PNS Gol II					**84.000.000,00**					**84.000.000,00**	**0,00**
	0	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	3.000.000,00	-	84.000.000,00	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	3.000.000,00	-	84.000.000,00	0,00
	[-] Gaji Pokok PNS Gol III					**1.755.600.000,00**					**1.755.600.000,00**	**0,00**
	0	33 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	3.800.000,00	-	1.755.600.000,00	33 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	3.800.000,00	-	1.755.600.000,00	0,00
	[-] Gaji Pokok PNS Gol IV					**700.000.000,00**					**700.000.000,00**	**0,00**
	0	10 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	5.000.000,00	-	700.000.000,00	10 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	5.000.000,00	-	700.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS					**33.600.000,00**					**33.600.000,00**	**0,00**
	[-] Gaji Pokok PNS Gol I					**33.600.000,00**					**33.600.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	0	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	2.400.000,00	-	33.600.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	2.400.000,00	-	33.600.000,00	0,00
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**45.892.000,00**					**45.892.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**45.892.000,00**					**45.892.000,00**	**0,00**
	[-] Acress					**1.092.000,00**					**1.092.000,00**	**0,00**
	0	1 Tahun	Tahun	1.092.000,00	-	1.092.000,00	1 Tahun	Tahun	1.092.000,00	-	1.092.000,00	0,00
	[-] Gaji Pokok PPPK					**44.800.000,00**					**44.800.000,00**	**0,00**
	0	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	3.200.000,00	-	44.800.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	3.200.000,00	-	44.800.000,00	0,00
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**273.979.000,00**					**273.979.000,00**	**0,00**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**267.554.000,00**					**267.554.000,00**	**0,00**
	[#] Tunjangan Keluarga ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**267.554.000,00**					**267.554.000,00**	**0,00**
	[-] Acress					**1.554.000,00**					**1.554.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	1.554.000,00	-	1.554.000,00	1 Tahun	Tahun	1.554.000,00	-	1.554.000,00	0,00
	[-] Gol I					**2.800.000,00**					**2.800.000,00**	**0,00**
	0	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	200.000,00	-	2.800.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	200.000,00	-	2.800.000,00	0,00
	[-] Gol II					**8.400.000,00**					**8.400.000,00**	**0,00**
	0	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	300.000,00	-	8.400.000,00	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	300.000,00	-	8.400.000,00	0,00
	[-] Gol III					**184.800.000,00**					**184.800.000,00**	**0,00**
	0	33 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	400.000,00	-	184.800.000,00	33 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	400.000,00	-	184.800.000,00	0,00
	[-] Gol IV					**70.000.000,00**					**70.000.000,00**	**0,00**
	0	10 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	500.000,00	-	70.000.000,00	10 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	500.000,00	-	70.000.000,00	0,00
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**6.425.000,00**					**6.425.000,00**	**0,00**
	[#] Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**6.425.000,00**					**6.425.000,00**	**0,00**
	[-] Acress					**125.000,00**					**125.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	125.000,00	-	125.000,00	1 Tahun	Tahun	125.000,00	-	125.000,00	0,00
	[-] Kenaikan Tunjangan Keluarga PPPK					**2.100.000,00**					**2.100.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	2.100.000,00	-	2.100.000,00	1 Tahun	Tahun	2.100.000,00	-	2.100.000,00	0,00
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK					**4.200.000,00**					**4.200.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	300.000,00	-	4.200.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	300.000,00	-	4.200.000,00	0,00
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**167.419.000,00**					**167.419.000,00**	**0,00**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**167.419.000,00**					**167.419.000,00**	**0,00**
	[#] Tunjangan Jabatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**167.419.000,00**					**167.419.000,00**	**0,00**
	[-] Acress					**4.669.000,00**					**4.669.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	4.669.000,00	-	4.669.000,00	1 Tahun	Tahun	4.669.000,00	-	4.669.000,00	0,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					**45.360.000,00**					**45.360.000,00**	**0,00**
	0	6 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	540.000,00	-	45.360.000,00	6 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	540.000,00	-	45.360.000,00	0,00
	[-] Kenaikan Tunjangan Jabatan PNS					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	0 Tahun	Tahun	20.000.000,00	-	0,00	0 Tahun	Tahun	20.000.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon III A					**17.640.000,00**					**17.640.000,00**	**0,00**
	0	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.260.000,00	-	17.640.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.260.000,00	-	17.640.000,00	0,00
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon III B					**41.160.000,00**					**41.160.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	980.000,00	-	41.160.000,00	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	980.000,00	-	41.160.000,00	0,00
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon IV A					**30.240.000,00**					**30.240.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	540.000,00	-	30.240.000,00	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	540.000,00	-	30.240.000,00	0,00
	[-] Tunjangan Jabatan PNS Eselon II B					**28.350.000,00**					**28.350.000,00**	**0,00**
	0	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	2.025.000,00	-	28.350.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	2.025.000,00	-	28.350.000,00	0,00
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**437.466.000,00**					**437.466.000,00**	**0,00**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**429.553.000,00**					**429.553.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					**42.000.000,00**					**42.000.000,00**	**0,00**
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Mediator HI					**25.200.000,00**					**25.200.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	600.000,00	-	25.200.000,00	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	600.000,00	-	25.200.000,00	0,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Penyuluh Perindag					**16.800.000,00**					**16.800.000,00**	**0,00**
	0	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	600.000,00	-	16.800.000,00	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	600.000,00	-	16.800.000,00	0,00
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**387.553.000,00**					**387.553.000,00**	**0,00**
	[-] Acress					**11.553.000,00**					**11.553.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	11.553.000,00	-	11.553.000,00	1 Tahun	Tahun	11.553.000,00	-	11.553.000,00	0,00
	[-] Kenaikan Tunjangan Fungsional PNS					**140.800.000,00**					**140.800.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	140.800.000,00	-	140.800.000,00	1 Tahun	Tahun	140.800.000,00	-	140.800.000,00	0,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Instruktur Muda					**72.800.000,00**					**72.800.000,00**	**0,00**
	0	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.300.000,00	-	72.800.000,00	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.300.000,00	-	72.800.000,00	0,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Instruktur Penyelia					**15.400.000,00**					**15.400.000,00**	**0,00**
	0	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.100.000,00	-	15.400.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.100.000,00	-	15.400.000,00	0,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Instruktur Pertama					**33.600.000,00**					**33.600.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	600.000,00	-	33.600.000,00	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	600.000,00	-	33.600.000,00	0,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Pengantar Kerja					**8.400.000,00**					**8.400.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	600.000,00	-	8.400.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	600.000,00	-	8.400.000,00	0,00
	[-] Tunjangan Funsgsional PNS Instruktur Madya					**105.000.000,00**					**105.000.000,00**	**0,00**
	0	5 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.500.000,00	-	105.000.000,00	5 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.500.000,00	-	105.000.000,00	0,00
5.1.01.01.04.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**					**7.913.000,00**					**7.913.000,00**	**0,00**
	[#] Tunjangan Fungsional PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**7.913.000,00**					**7.913.000,00**	**0,00**
	[-] Acress					**413.000,00**					**413.000,00**	**0,00**
	0	1 Tahun	Tahun	413.000,00	-	413.000,00	1 Tahun	Tahun	413.000,00	-	413.000,00	0,00
	[-] Kenaikan Tunjangan Fungsional PPPK					**500.000,00**					**500.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun	Tahun	500.000,00	-	500.000,00	1 Tahun	Tahun	500.000,00	-	500.000,00	0,00
	[-] Tunjangan Fungsional PPPK					**7.000.000,00**					**7.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	500.000,00	-	7.000.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	500.000,00	-	7.000.000,00	0,00
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**48.266.000,00**					**48.266.000,00**	**0,00**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**48.266.000,00**					**48.266.000,00**	**0,00**
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**48.266.000,00**					**48.266.000,00**	**0,00**
	[-] Acress					**1.206.000,00**					**1.206.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	1.206.000,00	-	1.206.000,00	1 Tahun	Tahun	1.206.000,00	-	1.206.000,00	0,00
	[-] Gol I					**2.450.000,00**					**2.450.000,00**	**0,00**
	0	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	175.000,00	-	2.450.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	175.000,00	-	2.450.000,00	0,00
	[-] Gol II					**5.040.000,00**					**5.040.000,00**	**0,00**
	0	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	180.000,00	-	5.040.000,00	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	180.000,00	-	5.040.000,00	0,00
	[-] Gol III					**20.720.000,00**					**20.720.000,00**	**0,00**
	0	8 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	185.000,00	-	20.720.000,00	8 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	185.000,00	-	20.720.000,00	0,00
	[-] Kenaikan Tunjangan Fungsional Umum PNS					**18.850.000,00**					**18.850.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	18.850.000,00	-	18.850.000,00	1 Tahun	Tahun	18.850.000,00	-	18.850.000,00	0,00
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Acress					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	0	0 Tahun	Tahun	42.000,00	-	0,00	0 Tahun	Tahun	42.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Kenaikan Tunjangan Fungsional Umum PPPK					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0 Tahun	Tahun	300.000,00	-	0,00	0 Tahun	Tahun	300.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PPPK					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	180.000,00	-	0,00	0 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	180.000,00	-	0,00	0,00
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**168.050.000,00**					**168.050.000,00**	**0,00**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**163.569.000,00**					**163.569.000,00**	**0,00**
	[#] Tunjangan Beras PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**163.569.000,00**					**163.569.000,00**	**0,00**
	[-] Acress					**3.968.000,00**					**3.968.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	3.968.000,00	-	3.968.000,00	1 Tahun	Tahun	3.968.000,00	-	3.968.000,00	0,00
	[-] Gol I					**1.680.000,00**					**1.680.000,00**	**0,00**
	0	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	120.000,00	-	1.680.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	120.000,00	-	1.680.000,00	0,00
	[-] Gol II					**5.040.000,00**					**5.040.000,00**	**0,00**
	0	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	180.000,00	-	5.040.000,00	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	180.000,00	-	5.040.000,00	0,00
	[-] Gol III					**110.880.000,00**					**110.880.000,00**	**0,00**
	0	33 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	240.000,00	-	110.880.000,00	33 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	240.000,00	-	110.880.000,00	0,00
	[-] Gol IV					**40.460.000,00**					**40.460.000,00**	**0,00**
	0	10 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	289.000,00	-	40.460.000,00	10 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	289.000,00	-	40.460.000,00	0,00
	[-] Kenaikan Tunjangan Beras PNS					**1.541.000,00**					**1.541.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	1.541.000,00	-	1.541.000,00	1 Tahun	Tahun	1.541.000,00	-	1.541.000,00	0,00
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**4.481.000,00**					**4.481.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**4.481.000,00**					**4.481.000,00**	**0,00**
	[-] Acress					**91.000,00**					**91.000,00**	**0,00**
	0	1 Tahun	Tahun	91.000,00	-	91.000,00	1 Tahun	Tahun	91.000,00	-	91.000,00	0,00
	[-] Kenaikan Tunjangan Beras PPPK					**1.310.000,00**					**1.310.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	1.310.000,00	-	1.310.000,00	1 Tahun	Tahun	1.310.000,00	-	1.310.000,00	0,00
	[-] Tunjangan Beras PPPK					**3.080.000,00**					**3.080.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	220.000,00	-	3.080.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	220.000,00	-	3.080.000,00	0,00
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**24.815.000,00**					**24.815.000,00**	**0,00**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**24.815.000,00**					**24.815.000,00**	**0,00**
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**24.815.000,00**					**24.815.000,00**	**0,00**
	[-] Acress					**295.000,00**					**295.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	295.000,00	-	295.000,00	1 Tahun	Tahun	295.000,00	-	295.000,00	0,00
	[-] Gol III					**7.920.000,00**					**7.920.000,00**	**0,00**
	0	33 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	20.000,00	-	7.920.000,00	33 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	20.000,00	-	7.920.000,00	0,00
	[-] Gol IV					**8.400.000,00**					**8.400.000,00**	**0,00**
	0	10 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	70.000,00	-	8.400.000,00	10 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	70.000,00	-	8.400.000,00	0,00
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Tunjangan PPH Gaji ke 13					**4.100.000,00**					**4.100.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Kali	Kali	4.100.000,00	-	4.100.000,00	1 Kali	Kali	4.100.000,00	-	4.100.000,00	0,00
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Tunjangan PPH Gaji ke 14					**4.100.000,00**					**4.100.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Kali	Kali	4.100.000,00	-	4.100.000,00	1 Kali	Kali	4.100.000,00	-	4.100.000,00	0,00
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**41.000,00**					**41.000,00**	**0,00**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**40.000,00**					**40.000,00**	**0,00**
	[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**40.000,00**					**40.000,00**	**0,00**
	[-] Pembulatan Gaji					**40.000,00**					**40.000,00**	**0,00**
	0	1 Tahun	Tahun	40.000,00	-	40.000,00	1 Tahun	Tahun	40.000,00	-	40.000,00	0,00
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**1.000,00**					**1.000,00**	**0,00**
	[#] Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.000,00**					**1.000,00**	**0,00**
	[-] Pembulatan Gaji					**1.000,00**					**1.000,00**	**0,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	1.000,00	-	1.000,00	1 Tahun	Tahun	1.000,00	-	1.000,00	0,00
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**198.093.000,00**					**198.093.000,00**	**0,00**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**196.000.000,00**					**196.000.000,00**	**0,00**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**196.000.000,00**					**196.000.000,00**	**0,00**
	[-] Acress					**1.300.000,00**					**1.300.000,00**	**0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	1.300.000,00	-	1.300.000,00	1 Tahun	Tahun	1.300.000,00	-	1.300.000,00	0,00
	[-] Gol I					**2.700.000,00**					**2.700.000,00**	**0,00**
	0	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	225.000,00	-	2.700.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	225.000,00	-	2.700.000,00	0,00
	[-] Gol II					**7.200.000,00**					**7.200.000,00**	**0,00**
	0	2 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	300.000,00	-	7.200.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	300.000,00	-	7.200.000,00	0,00
	[-] Gol III					**118.800.000,00**					**118.800.000,00**	**0,00**
	0	33 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	300.000,00	-	118.800.000,00	33 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	300.000,00	-	118.800.000,00	0,00
	[-] Gol IV					**66.000.000,00**					**66.000.000,00**	**0,00**
	0	10 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	550.000,00	-	66.000.000,00	10 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	550.000,00	-	66.000.000,00	0,00
	[-] Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan PNS					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	0,00	-	0,00	0,00
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**2.093.000,00**					**2.093.000,00**	**0,00**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**2.093.000,00**					**2.093.000,00**	**0,00**
	[-] Acress					**5.000,00**					**5.000,00**	**0,00**
	0	1 Tahun	Tahun	5.000,00	-	5.000,00	1 Tahun	Tahun	5.000,00	-	5.000,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					**2.088.000,00**					**2.088.000,00**	**0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	174.000,00	-	2.088.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	174.000,00	-	2.088.000,00	0,00
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**6.684.000,00**					**6.684.000,00**	**0,00**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**6.574.000,00**					**6.574.000,00**	**0,00**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**6.574.000,00**					**6.574.000,00**	**0,00**
	[-] Acress					**146.000,00**					**146.000,00**	**0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	146.000,00	-	146.000,00	1 Tahun	Tahun	146.000,00	-	146.000,00	0,00
	[-] Gol I					**96.000,00**					**96.000,00**	**0,00**
	0	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	8.000,00	-	96.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	8.000,00	-	96.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Gol II					**216.000,00**					**216.000,00**	**0,00**
	0	2 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	9.000,00	-	216.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	9.000,00	-	216.000,00	0,00
	[-] Gol III					**4.356.000,00**					**4.356.000,00**	**0,00**
	0	33 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	11.000,00	-	4.356.000,00	33 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	11.000,00	-	4.356.000,00	0,00
	[-] Gol IV					**1.560.000,00**					**1.560.000,00**	**0,00**
	0	10 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	13.000,00	-	1.560.000,00	10 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	13.000,00	-	1.560.000,00	0,00
	[-] Kenaikan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					**200.000,00**					**200.000,00**	**0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	200.000,00	-	200.000,00	1 Tahun	Tahun	200.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**110.000,00**					**110.000,00**	**0,00**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**110.000,00**					**110.000,00**	**0,00**
	[-] Acress					**2.000,00**					**2.000,00**	**0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	2.000,00	-	2.000,00	1 Tahun	Tahun	2.000,00	-	2.000,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					**108.000,00**					**108.000,00**	**0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	9.000,00	-	108.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	9.000,00	-	108.000,00	0,00
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**20.051.000,00**					**20.051.000,00**	**0,00**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**19.721.000,00**					**19.721.000,00**	**0,00**
	[#] Iuran Jaminan Kematian **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**19.721.000,00**					**19.721.000,00**	**0,00**
	[-] Acress					**221.000,00**					**221.000,00**	**0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	221.000,00	-	221.000,00	1 Tahun	Tahun	221.000,00	-	221.000,00	0,00
	[-] Gol I					**240.000,00**					**240.000,00**	**0,00**
	0	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	20.000,00	-	240.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	20.000,00	-	240.000,00	0,00
	[-] Gol II					**600.000,00**					**600.000,00**	**0,00**
	0	2 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	25.000,00	-	600.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	25.000,00	-	600.000,00	0,00
	[-] Gol III					**13.860.000,00**					**13.860.000,00**	**0,00**
	0	33 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	35.000,00	-	13.860.000,00	33 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	35.000,00	-	13.860.000,00	0,00
	[-] Gol IV					**4.800.000,00**					**4.800.000,00**	**0,00**
	0	10 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	40.000,00	-	4.800.000,00	10 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	40.000,00	-	4.800.000,00	0,00
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**330.000,00**					**330.000,00**	**0,00**
	[#] Iuran Jaminan Kematian PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**330.000,00**					**330.000,00**	**0,00**
	[-] Acress					**6.000,00**					**6.000,00**	**0,00**
	0	1 Tahun	Tahun	6.000,00	-	6.000,00	1 Tahun	Tahun	6.000,00	-	6.000,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian PPPK					**324.000,00**					**324.000,00**	**0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	27.000,00	-	324.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	27.000,00	-	324.000,00	0,00
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.12.0001	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	0	46 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	0,00	-	0,00	46 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	0,00	-	0,00	0,00
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0 Tahun	Tahun	555.000,00	-	0,00	0 Tahun	Tahun	555.000,00	-	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Acress					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	0 Tahun	Tahun	4.000,00	-	0,00	0 Tahun	Tahun	4.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	0 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	26.000,00	-	0,00	0 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	26.000,00	-	0,00	0,00
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**2.188.809.000,00**					**2.188.809.000,00**	**0,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**889.910.000,00**					**889.910.000,00**	**0,00**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**888.510.000,00**					**888.510.000,00**	**0,00**
	[#] Tambahan Penghasilan beban kerja PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**888.510.000,00**					**888.510.000,00**	**0,00**
	[-] Acress					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	0,00	-	0,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan beban kerja PNS Eselon IV A					**95.200.000,00**					**95.200.000,00**	**0,00**
	0	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.700.000,00	-	95.200.000,00	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.700.000,00	-	95.200.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan beban kerja PNS Eselon IV Penyeteraan Jabatan ke JF					**134.400.000,00**					**134.400.000,00**	**0,00**
	0	6 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.600.000,00	-	134.400.000,00	6 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.600.000,00	-	134.400.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Tambahan Penghasilan beban kerja PNS Instruktur Madya					**84.000.000,00**					**84.000.000,00**	**0,00**
	0	5 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.200.000,00	-	84.000.000,00	5 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.200.000,00	-	84.000.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan beban kerja PNS Instruktur Muda					**61.600.000,00**					**61.600.000,00**	**0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.100.000,00	-	61.600.000,00	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.100.000,00	-	61.600.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan beban kerja PNS Instruktur Penyelia					**15.400.000,00**					**15.400.000,00**	**0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.100.000,00	-	15.400.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.100.000,00	-	15.400.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan beban kerja PNS Instruktur Pertama					**61.600.000,00**					**61.600.000,00**	**0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.100.000,00	-	61.600.000,00	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.100.000,00	-	61.600.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan beban kerja PNS Mediator HI					**46.200.000,00**					**46.200.000,00**	**0,00**
	0	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.100.000,00	-	46.200.000,00	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.100.000,00	-	46.200.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan beban kerja PNS Pegantar Kerja					**11.970.000,00**					**11.970.000,00**	**0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	855.000,00	-	11.970.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	855.000,00	-	11.970.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan beban kerja PNS Penyuluh Perindag					**23.940.000,00**					**23.940.000,00**	**0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	855.000,00	-	23.940.000,00	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	855.000,00	-	23.940.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan beban kerja PNS Staff Gol I					**8.540.000,00**					**8.540.000,00**	**0,00**
	0	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	610.000,00	-	8.540.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	610.000,00	-	8.540.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan beban kerja PNS Staff Gol II					**20.300.000,00**					**20.300.000,00**	**0,00**
	0	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	725.000,00	-	20.300.000,00	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	725.000,00	-	20.300.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan beban kerja PNS Staff Gol III					**95.760.000,00**					**95.760.000,00**	**0,00**
	0	8 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	855.000,00	-	95.760.000,00	8 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	855.000,00	-	95.760.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Eselon II B					**70.000.000,00**					**70.000.000,00**	**0,00**
	0	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	5.000.000,00	-	70.000.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	5.000.000,00	-	70.000.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Eselon III A					**46.200.000,00**					**46.200.000,00**	**0,00**
	0	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	3.300.000,00	-	46.200.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	3.300.000,00	-	46.200.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Eselon III B					**113.400.000,00**					**113.400.000,00**	**0,00**
	0	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	2.700.000,00	-	113.400.000,00	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	2.700.000,00	-	113.400.000,00	0,00
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**1.400.000,00**					**1.400.000,00**	**0,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.400.000,00**					**1.400.000,00**	**0,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					**1.400.000,00**					**1.400.000,00**	**0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	100.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	100.000,00	-	1.400.000,00	0,00
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**					**1.298.899.000,00**					**1.298.899.000,00**	**0,00**
5.1.01.02.05.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**					**1.296.799.000,00**					**1.296.799.000,00**	**0,00**
	[#] Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.296.799.000,00**					**1.296.799.000,00**	**0,00**
	[-] Acress					**399.000,00**					**399.000,00**	**0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	399.000,00	-	399.000,00	1 Tahun	Tahun	399.000,00	-	399.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Eselon II B					**105.000.000,00**					**105.000.000,00**	**0,00**
	0	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	7.500.000,00	-	105.000.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	7.500.000,00	-	105.000.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Eselon III A					**70.000.000,00**					**70.000.000,00**	**0,00**
	0	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	5.000.000,00	-	70.000.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	5.000.000,00	-	70.000.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Eselon III B					**168.000.000,00**					**168.000.000,00**	**0,00**
	0	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	4.000.000,00	-	168.000.000,00	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	4.000.000,00	-	168.000.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Eselon IV A					**112.000.000,00**					**112.000.000,00**	**0,00**
	0	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	2.000.000,00	-	112.000.000,00	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	2.000.000,00	-	112.000.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Eselon IV Penyeteraan Jabatan ke JF					**168.000.000,00**					**168.000.000,00**	**0,00**
	0	6 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	2.000.000,00	-	168.000.000,00	6 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	2.000.000,00	-	168.000.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Instruktur Madya					**147.000.000,00**					**147.000.000,00**	**0,00**
	0	5 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	2.100.000,00	-	147.000.000,00	5 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	2.100.000,00	-	147.000.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Instruktur Muda					**95.200.000,00**					**95.200.000,00**	**0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.700.000,00	-	95.200.000,00	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.700.000,00	-	95.200.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Instruktur Penyelia					**21.000.000,00**					**21.000.000,00**	**0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.500.000,00	-	21.000.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.500.000,00	-	21.000.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Instruktur Pertama					**84.000.000,00**					**84.000.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.500.000,00	-	84.000.000,00	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.500.000,00	-	84.000.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Mediator HI					**63.000.000,00**					**63.000.000,00**	**0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.500.000,00	-	63.000.000,00	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.500.000,00	-	63.000.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Pengantar Kerja					**19.600.000,00**					**19.600.000,00**	**0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.400.000,00	-	19.600.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.400.000,00	-	19.600.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Penyuluh					**39.200.000,00**					**39.200.000,00**	**0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.400.000,00	-	39.200.000,00	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.400.000,00	-	39.200.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Staff Gol I					**14.000.000,00**					**14.000.000,00**	**0,00**
	0	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.000.000,00	-	14.000.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.000.000,00	-	14.000.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Staff Gol II					**33.600.000,00**					**33.600.000,00**	**0,00**
	0	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.200.000,00	-	33.600.000,00	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.200.000,00	-	33.600.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Staff Gol III					**156.800.000,00**					**156.800.000,00**	**0,00**
	0	8 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.400.000,00	-	156.800.000,00	8 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	1.400.000,00	-	156.800.000,00	0,00
5.1.01.02.05.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK**					**2.100.000,00**					**2.100.000,00**	**0,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**2.100.000,00**					**2.100.000,00**	**0,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					**2.100.000,00**					**2.100.000,00**	**0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	150.000,00	-	2.100.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	150.000,00	-	2.100.000,00	0,00
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**11.200.000,00**					**11.200.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.02	**Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**					**11.200.000,00**					**11.200.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.02.0014	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah**					**8.600.000,00**					**8.600.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					**8.600.000,00**					**8.600.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					**8.600.000,00**					**8.600.000,00**	**0,00**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun	Tahun	8.600.000,00	-	8.600.000,00	1 Tahun	Tahun	8.600.000,00	-	8.600.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0032	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)**					**2.600.000,00**					**2.600.000,00**	**0,00**
	[#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**2.600.000,00**					**2.600.000,00**	**0,00**
	[-] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)					**2.600.000,00**					**2.600.000,00**	**0,00**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1 Tahun	Tahun	2.600.000,00	-	2.600.000,00	1 Tahun	Tahun	2.600.000,00	-	2.600.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**6.163.965.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**6.163.965.000,00**	**0,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.250.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.250.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.250.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**4.250.000,00**					**4.250.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**4.250.000,00**					**4.250.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**4.250.000,00**					**4.250.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**4.250.000,00**					**4.250.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**4.250.000,00**					**4.250.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**4.250.000,00**					**4.250.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					**3.250.000,00**					**3.250.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Komponen Instalasi Listrik dan Lampu					**3.250.000,00**					**3.250.000,00**	**0,00**
	Lampu LED 12 Watt Spesifikasi :	20 Buah	buah	100.000,00	-	2.000.000,00	20 Buah	buah	100.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Lampu LED 19 Watt Spesifikasi :	10 Buah	buah	125.000,00	-	1.250.000,00	10 Buah	buah	125.000,00	-	1.250.000,00	0,00
	[#] Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Komponen Instalasi Listrik dan Lampu					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
	Kabel Spesifikasi : 2 X 2 mm2	11 Meter	meter	20.000,00	-	220.000,00	11 Meter	meter	20.000,00	-	220.000,00	0,00
	Kabel Spesifikasi : 2 X 2 mm2	-	meter	20.000,00	-	0,00	-	meter	20.000,00	-	0,00	0,00
	Steker Spesifikasi : Augen	10 Buah	buah	15.000,00	-	150.000,00	10 Buah	buah	15.000,00	-	150.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Stop Kontak Spesifikasi : Multicord Polux 5 lub	10 Buah	buah	63.000,00	-	630.000,00	10 Buah	buah	63.000,00	-	630.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**4.250.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**4.250.000,00**	**0,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 135.873.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.873.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.873.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**135.873.000,00**					**135.873.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**28.348.000,00**					**28.348.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**28.348.000,00**					**28.348.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**28.348.000,00**					**28.348.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**28.348.000,00**					**28.348.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**7.180.000,00**					**7.180.000,00**	**0,00**
	[#] Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**7.180.000,00**					**7.180.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**717.000,00**					**717.000,00**	**0,00**
	Spidol Spesifikasi : White Board	1 Dos	Dus	132.000,00	-	132.000,00	1 Dos	Dus	132.000,00	-	132.000,00	0,00
	Stabillo Spesifikasi :	10 Buah	buah	21.000,00	-	210.000,00	10 Buah	buah	21.000,00	-	210.000,00	0,00
	Staples Spesifikasi : No. 10	5 Buah	buah	75.000,00	-	375.000,00	5 Buah	buah	75.000,00	-	375.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**6.463.000,00**					**6.463.000,00**	**0,00**
	Ballpoint Spesifikasi : Biasa	50 Buah	buah	3.000,00	-	150.000,00	50 Buah	buah	3.000,00	-	150.000,00	0,00
	Binder Clips Spesifikasi : No 155	20 Dos	dos	47.000,00	-	940.000,00	20 Dos	dos	47.000,00	-	940.000,00	0,00
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : Isi 100 lembar	1 Buah	Buah	32.000,00	-	32.000,00	1 Buah	Buah	32.000,00	-	32.000,00	0,00
	Buku Kas Kwarto Spesifikasi : Isi 100 lembar	1 Buah	buah	15.000,00	-	15.000,00	1 Buah	buah	15.000,00	-	15.000,00	0,00
	Buku Nota Spesifikasi : 30 lbr besar (10)	10 Buah	buah	31.000,00	-	310.000,00	10 Buah	buah	31.000,00	-	310.000,00	0,00
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 58 lembar	5 Buah	buah	5.000,00	-	25.000,00	5 Buah	buah	5.000,00	-	25.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Clip Spesifikasi : Ukuran Besar	3 Dus	doos	25.000,00	-	75.000,00	3 Dus	doos	25.000,00	-	75.000,00	0,00
	Cutter Spesifikasi : lebar pisau 2 cm	3 Buah	buah	40.000,00	-	120.000,00	3 Buah	buah	40.000,00	-	120.000,00	0,00
	Gunting Spesifikasi : Gunting FL 8,5"	4 Buah	buah	21.000,00	-	84.000,00	4 Buah	buah	21.000,00	-	84.000,00	0,00
	Isi Cutter Spesifikasi : lebar pisau 2 cm	2 Dos	dos	36.000,00	-	72.000,00	2 Dos	dos	36.000,00	-	72.000,00	0,00
	Isi Pentel Spesifikasi :	10 Buah	buah	21.000,00	-	210.000,00	10 Buah	buah	21.000,00	-	210.000,00	0,00
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10	10 Pack	pak	14.000,00	-	140.000,00	10 Pack	pak	14.000,00	-	140.000,00	0,00
	Isi Staples Spesifikasi : No. 369	2 Pack	pak	36.000,00	-	72.000,00	2 Pack	pak	36.000,00	-	72.000,00	0,00
	Isolasi Spesifikasi : Kecil, Bening	6 Buah	Buah	5.000,00	-	30.000,00	6 Buah	Buah	5.000,00	-	30.000,00	0,00
	Jepitan Kertas Spesifikasi : Logam	5 Buah	buah	7.000,00	-	35.000,00	5 Buah	buah	7.000,00	-	35.000,00	0,00
	Lakban Spesifikasi : 2", Hitam	4 Roll	roll	35.000,00	-	140.000,00	4 Roll	roll	35.000,00	-	140.000,00	0,00
	Lem kertas Spesifikasi : Stick	10 Buah	Buah	5.000,00	-	50.000,00	10 Buah	Buah	5.000,00	-	50.000,00	0,00
	Odner Spesifikasi : Karton Logam	25 Buah	buah	54.000,00	-	1.350.000,00	25 Buah	buah	54.000,00	-	1.350.000,00	0,00
	Paper Clips Spesifikasi :	10 Dos	dos	31.000,00	-	310.000,00	10 Dos	dos	31.000,00	-	310.000,00	0,00
	Pensil Spesifikasi : 2B	10 Buah	buah	6.000,00	-	60.000,00	10 Buah	buah	6.000,00	-	60.000,00	0,00
	Perporator Spesifikasi : Kecil, 220	1 Buah	buah	74.000,00	-	74.000,00	1 Buah	buah	74.000,00	-	74.000,00	0,00
	Setip Spesifikasi : Biasa	4 Buah	buah	6.000,00	-	24.000,00	4 Buah	buah	6.000,00	-	24.000,00	0,00
	Spidol Spesifikasi : Permanent	1 Dos	lusin	210.000,00	-	210.000,00	1 Dos	lusin	210.000,00	-	210.000,00	0,00
	Stick Notes Spesifikasi : Post-it 76x76 mm; 1 warna 70 gram	12 Pak	pak	21.000,00	-	252.000,00	12 Pak	pak	21.000,00	-	252.000,00	0,00
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan kertas	30 Buah	buah	4.000,00	-	120.000,00	30 Buah	buah	4.000,00	-	120.000,00	0,00
	Stopmap / Snelechter Spesifikasi : bahan plastik	30 Buah	buah	27.000,00	-	810.000,00	30 Buah	buah	27.000,00	-	810.000,00	0,00
	Stopmap Spesifikasi : bahan plastik	19 Buah	buah	27.000,00	-	513.000,00	19 Buah	buah	27.000,00	-	513.000,00	0,00
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	30 Buah	buah	4.000,00	-	120.000,00	30 Buah	buah	4.000,00	-	120.000,00	0,00
	Tinta Stempel Spesifikasi : Botolan	5 Botol	botol	24.000,00	-	120.000,00	5 Botol	botol	24.000,00	-	120.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**13.971.000,00**					**13.971.000,00**	**0,00**
	[#] Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**13.971.000,00**					**13.971.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**13.879.000,00**					**13.879.000,00**	**0,00**
	Amplop Spesifikasi : 80 gr ; kecil	15 Dos	doos	7.000,00	-	105.000,00	15 Dos	doos	7.000,00	-	105.000,00	0,00
	Amplop Spesifikasi : EV90 ; 100 lbr	20 Dos	doos	28.000,00	-	560.000,00	20 Dos	doos	28.000,00	-	560.000,00	0,00
	Amplop Spesifikasi : Panjang (kabinet)	5 Dos	doos	40.000,00	-	200.000,00	5 Dos	doos	40.000,00	-	200.000,00	0,00
	Kertas Facsimile Spesifikasi : 30 x 210 mm	4 Roll	rol	62.000,00	-	248.000,00	4 Roll	rol	62.000,00	-	248.000,00	0,00
	Kertas Gambar Spesifikasi : 80/85 Folio; Kertas Kalkir	2 Rim	pak	36.000,00	-	72.000,00	2 Rim	pak	36.000,00	-	72.000,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 ; 70 gr; 210 X297 mm	22 Rim	rim	54.000,00	-	1.188.000,00	22 Rim	rim	54.000,00	-	1.188.000,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 ; 70 gr ; 216 X 330 mm	191 Rim	rim	60.000,00	-	11.460.000,00	191 Rim	rim	60.000,00	-	11.460.000,00	0,00
	Kertas Karbon Spesifikasi : folio	1 Dos	dos	46.000,00	-	46.000,00	1 Dos	dos	46.000,00	-	46.000,00	0,00
	[-] Cetak dan Penggandaan					**200,00**					**200,00**	**0,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1,00	-	200,00	200 Rupiah	Rupiah	1,00	-	200,00	0,00
	[-] Fotocopy					**91.800,00**					**91.800,00**	**0,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	306 Lembar	lembar	300,00	-	91.800,00	306 Lembar	lembar	300,00	-	91.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**5.095.000,00**					**5.095.000,00**	**0,00**
	[#] Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**5.095.000,00**					**5.095.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**2.853.000,00**					**2.853.000,00**	**0,00**
	Refil Tinta Spesifikasi : Photo Warna, 120 ml	25 Botol	botol	99.000,00	-	2.475.000,00	25 Botol	botol	99.000,00	-	2.475.000,00	0,00
	Refil Toner Laser+drum Spesifikasi : 1500 - 2500 lembar	1 Buah	buah	378.000,00	-	378.000,00	1 Buah	buah	378.000,00	-	378.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**2.242.000,00**					**2.242.000,00**	**0,00**
	Ink Jet Cartridge Spesifikasi : Yellow/Magenta/Cyan Ink Cartridge	2 Buah	buah	232.000,00	-	464.000,00	2 Buah	buah	232.000,00	-	464.000,00	0,00
	Refil Tinta Spesifikasi : 60 ml, Ber ID	14 Botol	botol	127.000,00	-	1.778.000,00	14 Botol	botol	127.000,00	-	1.778.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**850.000,00**					**850.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**850.000,00**					**850.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Materai					**850.000,00**					**850.000,00**	**0,00**
	Materai 10000 Spesifikasi :	85 Buah	buah	10.000,00	-	850.000,00	85 Buah	buah	10.000,00	-	850.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**212.000,00**					**212.000,00**	**0,00**
	[#] Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**212.000,00**					**212.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**212.000,00**					**212.000,00**	**0,00**
	Flashdisk Spesifikasi : USB Flasdisk 16 Gb	2 Buah	unit	106.000,00	-	212.000,00	2 Buah	unit	106.000,00	-	212.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**1.040.000,00**					**1.040.000,00**	**0,00**
	[#] Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.040.000,00**					**1.040.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**1.040.000,00**					**1.040.000,00**	**0,00**
	Batu Baterai Spesifikasi : Besar	5 Buah	Buah	24.000,00	-	120.000,00	5 Buah	Buah	24.000,00	-	120.000,00	0,00
	Batu Baterai Spesifikasi : Kecil	20 Buah	Buah	10.000,00	-	200.000,00	20 Buah	Buah	10.000,00	-	200.000,00	0,00
	Batu Baterai Spesifikasi : Tanggung	40 Buah	buah	18.000,00	-	720.000,00	40 Buah	buah	18.000,00	-	720.000,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**107.525.000,00**					**107.525.000,00**	**0,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**107.525.000,00**					**107.525.000,00**	**0,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**48.024.000,00**					**48.024.000,00**	**0,00**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**11.053.000,00**					**11.053.000,00**	**0,00**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**11.053.000,00**					**11.053.000,00**	**0,00**
	[#] Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**11.053.000,00**					**11.053.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat Penghancur Kertas					**2.158.000,00**					**2.158.000,00**	**0,00**
	Alat Penghancur Kertas Spesifikasi : 220 mm width, Strip Cut 6mm, 16 sheets, 23 litres	1 Unit	buah	2.158.000,00	-	2.158.000,00	1 Unit	buah	2.158.000,00	-	2.158.000,00	0,00
	[-] Pengadaan LCD					**8.895.000,00**					**8.895.000,00**	**0,00**
	LCD Projector/Infocus Spesifikasi : IN 1142-ANSI LUMENS 700 WXGA – DLP	1 Unit	unit	8.895.000,00	-	8.895.000,00	1 Unit	unit	8.895.000,00	-	8.895.000,00	0,00
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**36.971.000,00**					**36.971.000,00**	**0,00**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**13.438.000,00**					**13.438.000,00**	**0,00**
	[#] Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**13.438.000,00**					**13.438.000,00**	**0,00**
	[-] pengadaan kursi kerja					**13.438.000,00**					**13.438.000,00**	**0,00**
	Kursi Putar Spesifikasi : Kursi Putar Tangan, Rangka Besi, bahan kain dan kulit, sandaran kepala	1 Unit	unit	4.669.000,00	-	4.669.000,00	1 Unit	unit	4.669.000,00	-	4.669.000,00	0,00
	Kursi Putar Spesifikasi : Uk 300 x 500 x 560 mm	6 Unit	buah	1.416.000,00	-	8.496.000,00	6 Unit	buah	1.416.000,00	-	8.496.000,00	0,00
	Pembelian Meubelair Spesifikasi :	273000 Rupiah	buah	1,00	-	273.000,00	273000 Rupiah	buah	1,00	-	273.000,00	0,00
	[-] Pengadaan Sarpras ruang lobby					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Kursi Putar Spesifikasi : Chrome	0 Unit	buah	694.000,00	-	0,00	0 Unit	buah	694.000,00	-	0,00	0,00
	Meja Resepsionis Spesifikasi : Meja Sirkulasi/Layanan, Jati, Uk. 6300 x 600 x 1100 mm	0 Unit x 0.5 Persen	unit	19.935.000,00	-	0,00	0 Unit x 0.5 Persen	unit	19.935.000,00	-	0,00	0,00
	Pembelian Meubelair Spesifikasi :	0 Rupiah	buah	1,00	-	0,00	0 Rupiah	buah	1,00	-	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**23.533.000,00**					**23.533.000,00**	**0,00**
	[#] Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**23.533.000,00**					**23.533.000,00**	**0,00**
	[-] Pengadaan Sarpras ruang lobby					**23.533.000,00**					**23.533.000,00**	**0,00**
	A.C. Split Spesifikasi : Split, 1 PK	3 Unit	Unit	7.511.000,00	-	22.533.000,00	3 Unit	Unit	7.511.000,00	-	22.533.000,00	0,00
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	-	400.000,00	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	-	400.000,00	0,00
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 100 juta s.d 200 juta	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000,00	-	600.000,00	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000,00	-	600.000,00	0,00
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**9.091.000,00**					**9.091.000,00**	**0,00**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**9.091.000,00**					**9.091.000,00**	**0,00**
5.2.02.06.01.0002	**Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film**					**9.091.000,00**					**9.091.000,00**	**0,00**
	[#] Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**9.091.000,00**					**9.091.000,00**	**0,00**
	[-] Pengadaan Kamera					**9.091.000,00**					**9.091.000,00**	**0,00**
	Kamera Spesifikasi : Canon EOS 90D Kit 18-135 mm DSLR Camera	1 Unit x 0.3 Persen	Unit	30.301.000,00	-	9.090.300,00	1 Unit x 0.3 Persen	Unit	30.301.000,00	-	9.090.300,00	0,00
	Pekerjaan Spesifikasi :	700 Rupiah	Rupiah	1,00	-	700,00	700 Rupiah	Rupiah	1,00	-	700,00	0,00
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**50.410.000,00**					**50.410.000,00**	**0,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**46.410.000,00**					**46.410.000,00**	**0,00**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**34.478.000,00**					**34.478.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**34.478.000,00**					**34.478.000,00**	**0,00**
	[-] Pengadaan Laptop					**34.478.000,00**					**34.478.000,00**	**0,00**
	Laptop Office Entry Level Spesifikasi : Setara Proccessor Core i3 Ram 4 GB SSD 256 gb VGA Integrated Monitor min 12,5inch OS	4 Unit	Unit	8.500.000,00	-	34.000.000,00	4 Unit	Unit	8.500.000,00	-	34.000.000,00	0,00
	Laptop Office Medium Level Spesifikasi : Setara Proccessor Core i5 Ram 4 GB SSD 512gb VGA Integrated Monitor min 12,5inch OS	0 Unit	Unit	12.000.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	12.000.000,00	-	0,00	0,00
	Pekerjaan Spesifikasi :	478000 Rupiah	Rupiah	1,00	-	478.000,00	478000 Rupiah	Rupiah	1,00	-	478.000,00	0,00
	[-] Pengadaan PC Komputer					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	P.C Office Entry Level 1 Branded - OS Spesifikasi : Setara Proccessor Core i3 Ram 2 GB HDD 500gb/SSD 128gb VGA OB Monitor min 15inch OS	0 Unit	Unit	8.500.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	8.500.000,00	-	0,00	0,00
	P.C Unit Spesifikasi : Intel J5005, 4GB, 1TB, Intel HD, Wifi, K/B + Mouse, LCD 21.5 Inch LED , Win 10, A10	0 Unit	Unit	6.989.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	6.989.000,00	-	0,00	0,00
5.2.02.10.01.0003	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**					**11.932.000,00**					**11.932.000,00**	**0,00**
	[#] Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**11.932.000,00**					**11.932.000,00**	**0,00**
	[-] Pengadaan Printer					**11.932.000,00**					**11.932.000,00**	**0,00**
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Tabung Tinta Infus Resmi Seri L365 (Print , Scan , Copy, Wifi)	2 Unit	unit	3.605.000,00	-	7.210.000,00	2 Unit	unit	3.605.000,00	-	7.210.000,00	0,00
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Tabung Tinta Infus Resmi Seri L455 (Print , Scan , Copy, Wifi)	1 Unit	unit	4.722.000,00	-	4.722.000,00	1 Unit	unit	4.722.000,00	-	4.722.000,00	0,00
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**4.000.000,00**					**4.000.000,00**	**0,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**4.000.000,00**					**4.000.000,00**	**0,00**
	[#] Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**4.000.000,00**					**4.000.000,00**	**0,00**
	[-] pengadaan scanner					**4.000.000,00**					**4.000.000,00**	**0,00**
	Scanner Spesifikasi : Portable	1 Unit	Unit	4.000.000,00	-	4.000.000,00	1 Unit	Unit	4.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**135.873.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**135.873.000,00**	**0,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.750.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.750.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.750.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**3.750.000,00**					**3.750.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**3.750.000,00**					**3.750.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**3.750.000,00**					**3.750.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**3.750.000,00**					**3.750.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**3.750.000,00**					**3.750.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**2.400.000,00**					**2.400.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					**2.400.000,00**					**2.400.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					**2.400.000,00**					**2.400.000,00**	**0,00**
	Gas LPG Spesifikasi : 12 kg	12 Tabung	Kg	200.000,00	-	2.400.000,00	12 Tabung	Kg	200.000,00	-	2.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**1.350.000,00**					**1.350.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					**1.350.000,00**					**1.350.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					**1.350.000,00**					**1.350.000,00**	**0,00**
	Ember Plastik Spesifikasi : Sedang	4 Buah	Buah	50.000,00	-	200.000,00	4 Buah	Buah	50.000,00	-	200.000,00	0,00
	Engkrak Spesifikasi : Kecil; Plastik	3 Buah	buah	25.000,00	-	75.000,00	3 Buah	buah	25.000,00	-	75.000,00	0,00
	Kain Pel Spesifikasi : Biasa	4 Buah	buah	22.000,00	-	88.000,00	4 Buah	buah	22.000,00	-	88.000,00	0,00
	keset Karet Spesifikasi : Karet; 40 x 60	4 Buah	buah	71.000,00	-	284.000,00	4 Buah	buah	71.000,00	-	284.000,00	0,00
	Keset Spesifikasi : Keset Karet; 180 x 120cm	0 Buah	buah	212.000,00	-	0,00	0 Buah	buah	212.000,00	-	0,00	0,00
	Sapu Spesifikasi : Cemara	6 Buah	buah	18.000,00	-	108.000,00	6 Buah	buah	18.000,00	-	108.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Sapu Spesifikasi : Lidi	4 Buah	Ikat	9.000,00	-	36.000,00	4 Buah	Ikat	9.000,00	-	36.000,00	0,00
	Sapu Spesifikasi : Lowo-lowo, Bambu / Ijuk	4 Buah	Buah	42.000,00	-	168.000,00	4 Buah	Buah	42.000,00	-	168.000,00	0,00
	Sikat Spesifikasi : WC, Kayu / ijuk	3 Buah	buah	21.000,00	-	63.000,00	3 Buah	buah	21.000,00	-	63.000,00	0,00
	sulak Spesifikasi : Kemoceng bulu ayam	4 Buah	buah	19.000,00	-	76.000,00	4 Buah	buah	19.000,00	-	76.000,00	0,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Kecil; Plastik	3 Buah	buah	24.000,00	-	72.000,00	3 Buah	buah	24.000,00	-	72.000,00	0,00
	Tongkat Pel Spesifikasi :	4 Buah	Buah	45.000,00	-	180.000,00	4 Buah	Buah	45.000,00	-	180.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**3.750.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**3.750.000,00**	**0,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d November
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 59.400.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.400.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.400.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d November
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**59.400.000,00**					**59.400.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**59.400.000,00**					**59.400.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**59.400.000,00**					**59.400.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**59.400.000,00**					**59.400.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**59.400.000,00**					**59.400.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**59.000,00**					**59.000,00**	**0,00**
	[#] 11 bulan penyediaan bahan logistik kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**200,00**					**200,00**	**0,00**
	[-] Fotocopy					**200,00**					**200,00**	**0,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1,00	-	200,00	200 Rupiah	Rupiah	1,00	-	200,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**58.800,00**					**58.800,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**58.800,00**					**58.800,00**	**0,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	196 Lembar	lembar	300,00	-	58.800,00	196 Lembar	lembar	300,00	-	58.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**35.356.000,00**					**35.356.000,00**	**0,00**
	[#] 11 bulan penyediaan bahan logistik kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**2.730.000,00**					**2.730.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					**790.000,00**					**790.000,00**	**0,00**
	Air Mineral Galon Spesifikasi :	10 Galon	galon	68.000,00	-	680.000,00	10 Galon	galon	68.000,00	-	680.000,00	0,00
	Teh Celup Spesifikasi :	10 Pak	pak	11.000,00	-	110.000,00	10 Pak	pak	11.000,00	-	110.000,00	0,00
	[-] Makanan dan minuman tamu					**1.940.000,00**					**1.940.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Air Mineral Botol Spesifikasi : 330 ml	20 Dos	doos	37.000,00	-	740.000,00	20 Dos	doos	37.000,00	-	740.000,00	0,00
	Natura Spesifikasi :	300000 Rupiah x 4 Bulan	Rupiah	1,00	-	1.200.000,00	300000 Rupiah x 4 Bulan	Rupiah	1,00	-	1.200.000,00	0,00
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura					**32.626.000,00**					**32.626.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					**25.080.000,00**					**25.080.000,00**	**0,00**
	Gula Pasir Spesifikasi :	5 Kg x 11 Bulan x 22 Hari	kg	15.000,00	-	18.150.000,00	5 Kg x 11 Bulan x 22 Hari	kg	15.000,00	-	18.150.000,00	0,00
	Teh Tubruk Spesifikasi :	14 Pak x 11 Bulan	pak	45.000,00	-	6.930.000,00	14 Pak x 11 Bulan	pak	45.000,00	-	6.930.000,00	0,00
	[-] Belanja Natura dan Pakan-Natura					**6.900.000,00**					**6.900.000,00**	**0,00**
	Isi Ulang Air Mineral Galon Spesifikasi :	300 Galon	galon	23.000,00	-	6.900.000,00	300 Galon	galon	23.000,00	-	6.900.000,00	0,00
	[-] Konsumsi Rapat					**646.000,00**					**646.000,00**	**0,00**
	Air Mineral gelas Spesifikasi :	19 Dos	doos	34.000,00	-	646.000,00	19 Dos	doos	34.000,00	-	646.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**23.985.000,00**					**23.985.000,00**	**0,00**
	[#] 11 bulan penyediaan bahan logistik kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**7.380.000,00**					**7.380.000,00**	**0,00**
	[-] Konsumsi Rapat					**7.380.000,00**					**7.380.000,00**	**0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	20 Orang x 3 Kali x 3 Bulan	Org/Kl	30.000,00	-	5.400.000,00	20 Orang x 3 Kali x 3 Bulan	Org/Kl	30.000,00	-	5.400.000,00	0,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	20 Orang x 3 Bulan x 3 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	1.980.000,00	20 Orang x 3 Bulan x 3 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	1.980.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**16.605.000,00**					**16.605.000,00**	**0,00**
	[-] Konsumsi Rapat					**16.605.000,00**					**16.605.000,00**	**0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	15 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Org/Kl	30.000,00	-	12.150.000,00	15 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Org/Kl	30.000,00	-	12.150.000,00	0,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	15 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Org/Kl	11.000,00	-	4.455.000,00	15 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Org/Kl	11.000,00	-	4.455.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**59.400.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**59.400.000,00**	**0,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 7.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**7.000.000,00**					**7.000.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**7.000.000,00**					**7.000.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**7.000.000,00**					**7.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**7.000.000,00**					**7.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**7.000.000,00**					**7.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**6.200.000,00**					**6.200.000,00**	**0,00**
	[#] 12 bulan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**2.450.000,00**					**2.450.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**2.450.000,00**					**2.450.000,00**	**0,00**
	Cetak stopmap dinas Spesifikasi :	350 Buah	buah	7.000,00	-	2.450.000,00	350 Buah	buah	7.000,00	-	2.450.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**1.980.000,00**					**1.980.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**1.980.000,00**					**1.980.000,00**	**0,00**
	Cetak amplop dinas Spesifikasi :	400 Buah	buah	1.200,00	-	480.000,00	400 Buah	buah	1.200,00	-	480.000,00	0,00
	Cetak Kartu Kendali Masuk Spesifikasi :	60 Eksemplar / Buku	buku	25.000,00	-	1.500.000,00	60 Eksemplar / Buku	buku	25.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[#] Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.770.000,00**					**1.770.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**875.000,00**					**875.000,00**	**0,00**
	Cetak Lembar Disposisi Spesifikasi :	7 Rim	rim	125.000,00	-	875.000,00	7 Rim	rim	125.000,00	-	875.000,00	0,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1,00	-	100,00	100 Rupiah	Rupiah	1,00	-	100,00	0,00
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2983 Lembar	lembar	300,00	-	894.900,00	2983 Lembar	lembar	300,00	-	894.900,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**800.000,00**					**800.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**800.000,00**					**800.000,00**	**0,00**
	[-] Cetak AK.I					**800.000,00**					**800.000,00**	**0,00**
	Cetak Kertas HVS Warna, 70 gram Spesifikasi : 1 muka; 1/2 Folio	800 Lembar	lembar	1.000,00	-	800.000,00	800 Lembar	lembar	1.000,00	-	800.000,00	0,00
	[-] Cetak Blangko AK.2					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Cetak Kertas HVS Warna, 70 gram Spesifikasi : 1 muka; 1 Folio	0 Lembar	lembar	1.000,00	-	0,00	0 Lembar	lembar	1.000,00	-	0,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**7.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**7.000.000,00**	**0,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	Hasil	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**100.000.000,00**					**100.000.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**100.000.000,00**					**100.000.000,00**	**0,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**8.250.000,00**					**8.250.000,00**	**0,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**8.250.000,00**					**8.250.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**8.250.000,00**					**8.250.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**8.250.000,00**					**8.250.000,00**	**0,00**
	[#] Fasilitasi Rapat Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**8.250.000,00**					**8.250.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					**1.725.000,00**					**1.725.000,00**	**0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	1.050.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	1.050.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	3 Orang	Orang / Bulan	225.000,00	-	675.000,00	3 Orang	Orang / Bulan	225.000,00	-	675.000,00	0,00
	[-] Honorarium Penatausahaan Keuangan					**6.525.000,00**					**6.525.000,00**	**0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta s.d 1 miliar	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000,00	-	4.050.000,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000,00	-	4.050.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta s.d 1 miliar	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	275.000,00	-	2.475.000,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	275.000,00	-	2.475.000,00	0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**91.750.000,00**					**91.750.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**770.000,00**					**770.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**770.000,00**					**770.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**770.000,00**					**770.000,00**	**0,00**
	[#] Fasilitasi Rapat Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**432.000,00**					**432.000,00**	**0,00**
	[-] Fotocopy					**432.000,00**					**432.000,00**	**0,00**
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 ; 70 gr; 210 X297 mm	8 Rim	rim	54.000,00	-	432.000,00	8 Rim	rim	54.000,00	-	432.000,00	0,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**338.000,00**					**338.000,00**	**0,00**
	[-] Fotocopy					**338.000,00**					**338.000,00**	**0,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1,00	-	200,00	200 Rupiah	Rupiah	1,00	-	200,00	0,00
	Fotocopy Spesifikasi : A.4	1126 Lembar	lembar	300,00	-	337.800,00	1126 Lembar	lembar	300,00	-	337.800,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**90.980.000,00**					**90.980.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**90.980.000,00**					**90.980.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**90.980.000,00**					**90.980.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**18.500.000,00**					**18.500.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Semarang dan Sekitarnya)					**18.500.000,00**					**18.500.000,00**	**0,00**
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	25 Orang x 2 Hari	OH	370.000,00	-	18.500.000,00	25 Orang x 2 Hari	OH	370.000,00	-	18.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Keluar Provinsi dalam Pulau Jawa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**21.000.000,00**					**21.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Keluar Provinsi dalam Pulau Jawa					**16.000.000,00**					**16.000.000,00**	**0,00**
	Biaya Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : Jawa Tengah	4 Orang x 1 Hari	OH	360.000,00	-	1.440.000,00	4 Orang x 1 Hari	OH	360.000,00	-	1.440.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Jawa Tengah	4 Orang x 1 Hari	OH	850.000,00	-	3.400.000,00	4 Orang x 1 Hari	OH	850.000,00	-	3.400.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Jawa Tengah	6 Orang x 1 Hari	OH	450.000,00	-	2.700.000,00	6 Orang x 1 Hari	OH	450.000,00	-	2.700.000,00	0,00
	Transport Menggunakan Mobil Dinas Spesifikasi : Mobil dibawah 1.700 cc	4 Orang x 100 Km x 1000 Liter	km/lt	10,00	-	4.000.000,00	4 Orang x 100 Km x 1000 Liter	km/lt	10,00	-	4.000.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	2 Orang x 4 Hari	OH	370.000,00	-	2.960.000,00	2 Orang x 4 Hari	OH	370.000,00	-	2.960.000,00	0,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Eselon II / Anggota DPRD	2 Orang x 5 Hari	OH	150.000,00	-	1.500.000,00	2 Orang x 5 Hari	OH	150.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Semarang dan Sekitarnya)					**5.000.000,00**					**5.000.000,00**	**0,00**
	Transport Menggunakan Mobil Dinas Spesifikasi : Mobil dibawah 1.700 cc	500 Km x 1000 Liter	km/lt	10,00	-	5.000.000,00	500 Km x 1000 Liter	km/lt	10,00	-	5.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Selain Semarang) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**24.360.000,00**					**24.360.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Selain Semarang) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**11.410.000,00**					**11.410.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Selain Semarang)					**24.360.000,00**					**24.360.000,00**	**0,00**
	Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Jawa Tengah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	1.480.000,00	-	5.920.000,00	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	1.480.000,00	-	5.920.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : Jawa Tengah	2 Orang x 2 Hari	OH	360.000,00	-	1.440.000,00	2 Orang x 2 Hari	OH	360.000,00	-	1.440.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Jawa Tengah	2 Orang x 2 Hari	OH	850.000,00	-	3.400.000,00	2 Orang x 2 Hari	OH	850.000,00	-	3.400.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Jawa Tengah	4 Orang x 2 Hari	OH	450.000,00	-	3.600.000,00	4 Orang x 2 Hari	OH	450.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	Transport Menggunakan Mobil Dinas Spesifikasi : Mobil dibawah 1.700 cc	1000 Km x 1000 Liter	km/lt	10,00	-	10.000.000,00	1000 Km x 1000 Liter	km/lt	10,00	-	10.000.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Jawa Tengah	2 Orang x 14 Hari	OH	370.000,00	-	10.360.000,00	2 Orang x 14 Hari	OH	370.000,00	-	10.360.000,00	0,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Eselon II / Anggota DPRD	1 Orang x 7 Hari	OH	150.000,00	-	1.050.000,00	1 Orang x 7 Hari	OH	150.000,00	-	1.050.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Semarang dan Sekitarnya) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**13.820.000,00**					**13.820.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Semarang dan Sekitarnya)					**13.820.000,00**					**13.820.000,00**	**0,00**
	Biaya Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : Jawa Tengah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	1.480.000,00	-	5.920.000,00	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	1.480.000,00	-	5.920.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Jawa Tengah	1 Orang x 4 Hari	OH	850.000,00	-	3.400.000,00	1 Orang x 4 Hari	OH	850.000,00	-	3.400.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Jawa Tengah	2 Orang x 5 Hari	OH	450.000,00	-	4.500.000,00	2 Orang x 5 Hari	OH	450.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	[#] Fasilitasi Rapat Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.890.000,00**					**1.890.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Semarang dan Sekitarnya)					**1.890.000,00**					**1.890.000,00**	**0,00**
	Perjalanan Dinas Spesifikasi :	90000 Rupiah	Rupiah	1,00	-	90.000,00	90000 Rupiah	Rupiah	1,00	-	90.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Eselon II / Anggota DPRD	12 Orang x 1 Hari	OH	150.000,00	-	1.800.000,00	12 Orang x 1 Hari	OH	150.000,00	-	1.800.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**100.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**100.000.000,00**	**0,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 260.500.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 260.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 260.500.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Hasil	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**260.500.000,00**					**260.500.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**260.500.000,00**					**260.500.000,00**	**0,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**260.500.000,00**					**260.500.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**304.000,00**					**304.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**304.000,00**					**304.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**304.000,00**					**304.000,00**	**0,00**
	[#] Bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**304.000,00**					**304.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**303.900,00**					**303.900,00**	**0,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1013 Lembar	lembar	300,00	-	303.900,00	1013 Lembar	lembar	300,00	-	303.900,00	0,00
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan					**100,00**					**100,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1,00	-	100,00	100 Rupiah	Rupiah	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**260.196.000,00**					**260.196.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**260.196.000,00**					**260.196.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**1.800.000,00**					**1.800.000,00**	**0,00**
	[#] Bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.800.000,00**					**1.800.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Telepon Kantor Dinperinaker dan BLK					**1.800.000,00**					**1.800.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa telepon Spesifikasi :	150000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1,00	-	1.800.000,00	150000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1,00	-	1.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**10.296.000,00**					**10.296.000,00**	**0,00**
	[#] Bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**10.296.000,00**					**10.296.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Air Kantor Dinperinaker					**9.360.000,00**					**9.360.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa air Spesifikasi :	780000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1,00	-	9.360.000,00	780000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1,00	-	9.360.000,00	0,00
	[-] Belanja Air Kantor UPTD BLK					**936.000,00**					**936.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa air Spesifikasi :	78000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1,00	-	936.000,00	78000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1,00	-	936.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**212.100.000,00**					**212.100.000,00**	**0,00**
	[#] Bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**212.100.000,00**					**212.100.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Listrik Kantor Dinperinaker					**60.000.000,00**					**60.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa listrik Spesifikasi :	5000000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1,00	-	60.000.000,00	5000000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1,00	-	60.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Listrik Kantor UPTD BLK dan LIK					**152.100.000,00**					**152.100.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa listrik Spesifikasi :	12675000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1,00	-	152.100.000,00	12675000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1,00	-	152.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**36.000.000,00**					**36.000.000,00**	**0,00**
	[#] Bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**36.000.000,00**					**36.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Internet Kantor Dinperinaker					**22.800.000,00**					**22.800.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi :	1900000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1,00	-	22.800.000,00	1900000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1,00	-	22.800.000,00	0,00
	[-] Belanja Internet Kantor UPTD BLK					**13.200.000,00**					**13.200.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi :	1100000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1,00	-	13.200.000,00	1100000 Rupiah x 12 Bulan	per bulan	1,00	-	13.200.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**260.500.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**260.500.000,00**	**0,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 362.328.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 362.328.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 362.328.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Hasil	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**362.328.000,00**					**362.328.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**362.328.000,00**					**362.328.000,00**	**0,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**450.000,00**					**450.000,00**	**0,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**450.000,00**					**450.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**450.000,00**					**450.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**450.000,00**					**450.000,00**	**0,00**
	[#] Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**450.000,00**					**450.000,00**	**0,00**
	[-] Perancangan Sistem Aplikasi/Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Umum					**450.000,00**					**450.000,00**	**0,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000,00	-	250.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000,00	-	250.000,00	0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**361.878.000,00**					**361.878.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**16.479.000,00**					**16.479.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**16.479.000,00**					**16.479.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**371.000,00**					**371.000,00**	**0,00**
	[#] Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**371.000,00**					**371.000,00**	**0,00**
	[-] Perancangan Sistem Aplikasi/Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Umum					**371.000,00**					**371.000,00**	**0,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1,00	-	200,00	200 Rupiah	Rupiah	1,00	-	200,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1236 Lembar	lembar	300,00	-	370.800,00	1236 Lembar	lembar	300,00	-	370.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**396.000,00**					**396.000,00**	**0,00**
	[#] Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**396.000,00**					**396.000,00**	**0,00**
	[-] Piket Posko Lebaran					**396.000,00**					**396.000,00**	**0,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3 Meter x 2 Buah	m x 90 cm	66.000,00	-	396.000,00	3 Meter x 2 Buah	m x 90 cm	66.000,00	-	396.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**7.512.000,00**					**7.512.000,00**	**0,00**
	[#] Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**7.512.000,00**					**7.512.000,00**	**0,00**
	[-] Bahan kebersihan					**7.512.000,00**					**7.512.000,00**	**0,00**
	Pembersih Spesifikasi : Kaca, Besar	12 Botol	Botol	24.000,00	-	288.000,00	12 Botol	Botol	24.000,00	-	288.000,00	0,00
	Pembersih Spesifikasi : Lantai, 900 ml / 800 ml (Refill)	24 Buah	buah	28.000,00	-	672.000,00	24 Buah	buah	28.000,00	-	672.000,00	0,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : otomatis	4 Buah	buah	333.000,00	-	1.332.000,00	4 Buah	buah	333.000,00	-	1.332.000,00	0,00
	Pewangi Spesifikasi : Ruangan, Refill	10 Kaleng	kaleng	64.000,00	-	640.000,00	10 Kaleng	kaleng	64.000,00	-	640.000,00	0,00
	sabun cuci piring Spesifikasi : 900ml	24 Buah	buah	30.000,00	-	720.000,00	24 Buah	buah	30.000,00	-	720.000,00	0,00
	Sabun cuci tangan Spesifikasi :	24 Buah	buah	30.000,00	-	720.000,00	24 Buah	buah	30.000,00	-	720.000,00	0,00
	Tissue Spesifikasi : Kotak, 200 play sheets/ 2 ply	100 Dos	doss	22.000,00	-	2.200.000,00	100 Dos	doss	22.000,00	-	2.200.000,00	0,00
	Toilet Colour Ball Spesifikasi : 12bungkus	20 Buah	Buah	47.000,00	-	940.000,00	20 Buah	Buah	47.000,00	-	940.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**8.200.000,00**					**8.200.000,00**	**0,00**
	[#] Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**8.200.000,00**					**8.200.000,00**	**0,00**
	[-] Kajian Pengembangan Aplikasi/ Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Umum					**615.000,00**					**615.000,00**	**0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	15 Orang x 1 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	450.000,00	15 Orang x 1 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	450.000,00	0,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	15 Orang x 1 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	165.000,00	15 Orang x 1 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	165.000,00	0,00
	[-] Perancangan Sistem Aplikasi/Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Umum					**615.000,00**					**615.000,00**	**0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	15 Orang x 1 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	450.000,00	15 Orang x 1 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	450.000,00	0,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	15 Orang x 1 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	165.000,00	15 Orang x 1 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	165.000,00	0,00
	[-] Piket Posko Lebaran					**6.970.000,00**					**6.970.000,00**	**0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	17 Orang x 10 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	5.100.000,00	17 Orang x 10 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	5.100.000,00	0,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	17 Orang x 10 Hari	Org/Kl	11.000,00	-	1.870.000,00	17 Orang x 10 Hari	Org/Kl	11.000,00	-	1.870.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**336.899.000,00**					**336.899.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**226.483.000,00**					**226.483.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**153.000.000,00**					**153.000.000,00**	**0,00**
	[#] Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**153.000.000,00**					**153.000.000,00**	**0,00**
	[-] Gaji Tenaga Non ASN (Driver)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Tenaga Administrasi DINPERINAKER Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Gaji Tenaga Non ASN SK Dinas					**153.000.000,00**					**153.000.000,00**	**0,00**
	Tenaga Administrasi DINPERINAKER Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	79.200.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	79.200.000,00	0,00
	Tenaga Administrasi DINPERINAKER Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	73.800.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	73.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**34.983.000,00**					**34.983.000,00**	**0,00**
	[#] Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**34.983.000,00**					**34.983.000,00**	**0,00**
	[-] Gaji Non ASN Tenaga Kontrak SK Walikota 7jam					**34.983.000,00**					**34.983.000,00**	**0,00**
	Tenaga Kontrak SK Walikota (waktu kerja 7 jam) Spesifikasi :	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.691.000,00	-	34.983.000,00	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.691.000,00	-	34.983.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**8.200.000,00**					**8.200.000,00**	**0,00**
	[#] Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**8.200.000,00**					**8.200.000,00**	**0,00**
	[-] Gaji Tenaga Non ASN (Driver)					**8.200.000,00**					**8.200.000,00**	**0,00**
	Jasa Tenaga Sopir Operasional Spesifikasi :	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	8.200.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	8.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	**Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi**					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	[#] Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	[-] Gaji Tenaga Non ASN SK Dinas					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	Tenaga Operator IT, Pengalaman Kerja di Pemkot lebih dari 8 tahun Spesifikasi : meliputi : Teknis jaringan, Entri data, Pengisi konten web, Teknis multimedia, Operator komputer	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	30.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	30.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0051	**Belanja Jasa Pengolahan Sampah**					**300.000,00**					**300.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**300.000,00**					**300.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Jasa Pengolahan Sampah					**300.000,00**					**300.000,00**	**0,00**
	Retribusi Kebersihan Spesifikasi :	12 Bulan	per bulan	25.000,00	-	300.000,00	12 Bulan	per bulan	25.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**12.416.000,00**					**12.416.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**9.792.000,00**					**9.792.000,00**	**0,00**
	[#] Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**9.792.000,00**					**9.792.000,00**	**0,00**
	[-] Premi Asuransi Kesehatan Non ASN (Driver)					**384.000,00**					**384.000,00**	**0,00**
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 4 Bulan x 96000 Rupiah	OB	1,00	-	384.000,00	1 Orang x 4 Bulan x 96000 Rupiah	OB	1,00	-	384.000,00	0,00
	[-] Premi Asuransi Kesehatan Non ASN SK Dinas					**8.112.000,00**					**8.112.000,00**	**0,00**
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 100000 Rupiah	OB	1,00	-	1.200.000,00	1 Orang x 12 Bulan x 100000 Rupiah	OB	1,00	-	1.200.000,00	0,00
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	6 Orang x 12 Bulan x 96000 Rupiah	OB	1,00	-	6.912.000,00	6 Orang x 12 Bulan x 96000 Rupiah	OB	1,00	-	6.912.000,00	0,00
	[-] Premi Asuransi Kesehatan Non ASN SK Walikota					**1.296.000,00**					**1.296.000,00**	**0,00**
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 108000 Rupiah	OB	1,00	-	1.296.000,00	1 Orang x 12 Bulan x 108000 Rupiah	OB	1,00	-	1.296.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**1.812.000,00**					**1.812.000,00**	**0,00**
	[#] Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.812.000,00**					**1.812.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					**504.000,00**					**504.000,00**	**0,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	7 Orang x 12 Bulan x 6000 Rupiah	OB	1,00	-	504.000,00	7 Orang x 12 Bulan x 6000 Rupiah	OB	1,00	-	504.000,00	0,00
	[-] Premi Asuransi JHT SK Walikota					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, JHT (3,7 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 100000 Rupiah	OB	1,00	-	1.200.000,00	1 Orang x 12 Bulan x 100000 Rupiah	OB	1,00	-	1.200.000,00	0,00
	[-] Premi Asuransi Kecelakaan Kerja Non ASN (Driver)					**24.000,00**					**24.000,00**	**0,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 4 Bulan x 6000 Rupiah	OB	1,00	-	24.000,00	1 Orang x 4 Bulan x 6000 Rupiah	OB	1,00	-	24.000,00	0,00
	[-] Premi Asuransi Kecelakaan Kerja Tenaga SK Walikota					**84.000,00**					**84.000,00**	**0,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 7000 Rupiah	OB	1,00	-	84.000,00	1 Orang x 12 Bulan x 7000 Rupiah	OB	1,00	-	84.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**812.000,00**					**812.000,00**	**0,00**
	[#] Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**812.000,00**					**812.000,00**	**0,00**
	[-] Premi Asuransi Kematian Non ASN (Driver)					**32.000,00**					**32.000,00**	**0,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 4 Bulan x 8000 Rupiah	OB	1,00	-	32.000,00	1 Orang x 4 Bulan x 8000 Rupiah	OB	1,00	-	32.000,00	0,00
	[-] Premi Asuransi Kematian Non ASN SK Dinas					**672.000,00**					**672.000,00**	**0,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	7 Orang x 12 Bulan x 8000 Rupiah	OB	1,00	-	672.000,00	7 Orang x 12 Bulan x 8000 Rupiah	OB	1,00	-	672.000,00	0,00
	[-] Premi Asuransi Kematian Tenaga SK Walikota					**108.000,00**					**108.000,00**	**0,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan x 9000 Rupiah	OB	1,00	-	108.000,00	1 Orang x 12 Bulan x 9000 Rupiah	OB	1,00	-	108.000,00	0,00
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**98.000.000,00**					**98.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.09.0013	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen**					**98.000.000,00**					**98.000.000,00**	**0,00**
	[#] Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**98.000.000,00**					**98.000.000,00**	**0,00**
	[-] Perancangan Sistem Aplikasi/Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Umum					**98.000.000,00**					**98.000.000,00**	**0,00**
	Jasa Konsultasi Spesifikasi :	98000000 Rupiah x 1 Pekerjaan	Rupiah	1,00	-	98.000.000,00	98000000 Rupiah x 1 Pekerjaan	Rupiah	1,00	-	98.000.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**8.500.000,00**					**8.500.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**8.500.000,00**					**8.500.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**8.500.000,00**					**8.500.000,00**	**0,00**
	[#] Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**8.500.000,00**					**8.500.000,00**	**0,00**
	[-] Piket Posko Lebaran					**8.500.000,00**					**8.500.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Bantuan Transport Pelayanan di luar jam kerja Spesifikasi : diberikan maks 4 kali sebulan	170 Orang / Kali	Orang / Hari	50.000,00	-	8.500.000,00	170 Orang / Kali	Orang / Hari	50.000,00	-	8.500.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**362.328.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**362.328.000,00**	**0,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 98.300.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 98.300.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 98.300.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**98.300.000,00**					**98.300.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**98.300.000,00**					**98.300.000,00**	**0,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**600.000,00**					**600.000,00**	**0,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**600.000,00**					**600.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**600.000,00**					**600.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**600.000,00**					**600.000,00**	**0,00**
	[#] Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**600.000,00**					**600.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					**600.000,00**					**600.000,00**	**0,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	600.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**97.700.000,00**					**97.700.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**41.750.000,00**					**41.750.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**41.750.000,00**					**41.750.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**31.304.000,00**					**31.304.000,00**	**0,00**
	[#] Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**31.304.000,00**					**31.304.000,00**	**0,00**
	[-] BBM Kendaraan Dinas					**31.304.000,00**					**31.304.000,00**	**0,00**
	BBM Mobil Jabatan Eselon II b & III (Ka.Dinas/Badan, Ka.Kantor, Kabag) Spesifikasi : BBM Pertamax (4 L/hr x Rp.14.000), max 22 hari/bln	21 Hari x 12 Bulan x 1	Hari	56.000,00	-	14.112.000,00	21 Hari x 12 Bulan x 1	Hari	56.000,00	-	14.112.000,00	0,00
	BBM Mobil Operasional Sekretariat Dinas Spesifikasi : BBM Pertamax (3 L/hr x Rp.14.000), max 22 hari/bln	10 Hari x 12 Bulan x 3 Unit	Hari	42.000,00	-	15.120.000,00	10 Hari x 12 Bulan x 3 Unit	Hari	42.000,00	-	15.120.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	BBM Sepeda Motor Operasional (Roda Tiga) Spesifikasi : BBM Pertamax (2 L/hr x Rp.14.000), max 22 hr/bln	2 Hari x 1 Unit	Hari	28.000,00	-	56.000,00	2 Hari x 1 Unit	Hari	28.000,00	-	56.000,00	0,00
	BBM Sepeda Motor Operasional (Roda Tiga) Spesifikasi : BBM Pertamax (2 L/hr x Rp.14.000), max 22 hr/bln	6 Hari x 12 Bulan x 1 Unit	Hari	28.000,00	-	2.016.000,00	6 Hari x 12 Bulan x 1 Unit	Hari	28.000,00	-	2.016.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**692.000,00**					**692.000,00**	**0,00**
	[#] Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**692.000,00**					**692.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**692.000,00**					**692.000,00**	**0,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1,00	-	200,00	200 Rupiah	Rupiah	1,00	-	200,00	0,00
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2306 Lembar	lembar	300,00	-	691.800,00	2306 Lembar	lembar	300,00	-	691.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.750.000,00**					**1.750.000,00**	**0,00**
	[#] Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.750.000,00**					**1.750.000,00**	**0,00**
	[-] BBM Kendaraan Dinas					**1.750.000,00**					**1.750.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi :	5 Rim x 350000 Rupiah	Rupiah	1,00	-	1.750.000,00	5 Rim x 350000 Rupiah	Rupiah	1,00	-	1.750.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**3.000.000,00**					**3.000.000,00**	**0,00**
	[#] Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**3.000.000,00**					**3.000.000,00**	**0,00**
	[-] pemeliharaan kendaraan dinas					**3.000.000,00**					**3.000.000,00**	**0,00**
	Pewangi Spesifikasi : Mobil	30 Buah	buah	80.000,00	-	2.400.000,00	30 Buah	buah	80.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	Sampo Mobil Spesifikasi :	21 Buah	buah	16.000,00	-	336.000,00	21 Buah	buah	16.000,00	-	336.000,00	0,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Kecil; Plastik	11 Unit	buah	24.000,00	-	264.000,00	11 Unit	buah	24.000,00	-	264.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**5.004.000,00**					**5.004.000,00**	**0,00**
	[#] Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**5.004.000,00**					**5.004.000,00**	**0,00**
	[-] pemeliharaan kendaraan dinas					**5.004.000,00**					**5.004.000,00**	**0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	25 Orang x 5 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	3.750.000,00	25 Orang x 5 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	3.750.000,00	0,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	38 Orang x 3 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	1.254.000,00	38 Orang x 3 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	1.254.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**13.050.000,00**					**13.050.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**13.050.000,00**					**13.050.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**8.100.000,00**					**8.100.000,00**	**0,00**
	[#] Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**8.100.000,00**					**8.100.000,00**	**0,00**
	[-] pemeliharaan kendaraan dinas					**8.100.000,00**					**8.100.000,00**	**0,00**
	Buruh Semi Terlatih Spesifikasi :	108 Orang / Kali	Hari	75.000,00	-	8.100.000,00	108 Orang / Kali	Hari	75.000,00	-	8.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**4.950.000,00**					**4.950.000,00**	**0,00**
	[#] Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**4.950.000,00**					**4.950.000,00**	**0,00**
	[-] Pajak Kendaraan					**4.950.000,00**					**4.950.000,00**	**0,00**
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Kendaraan Bermotor Roda Tiga (Viar/ sejenisnya)	2 Unit x 0.5 Persen	Unit/thn	300.000,00	-	300.000,00	2 Unit x 0.5 Persen	Unit/thn	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)	3 Unit x 0.5 Persen	Unit/thn	1.500.000,00	-	2.250.000,00	3 Unit x 0.5 Persen	Unit/thn	1.500.000,00	-	2.250.000,00	0,00
	Bea Administrasi Kendaraan Daftar Ulang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	16 Unit x 0.5 Persen	Unit/thn	300.000,00	-	2.400.000,00	16 Unit x 0.5 Persen	Unit/thn	300.000,00	-	2.400.000,00	0,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**42.900.000,00**					**42.900.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**42.900.000,00**					**42.900.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**10.500.000,00**					**10.500.000,00**	**0,00**
	[#] Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**10.500.000,00**					**10.500.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					**10.500.000,00**					**10.500.000,00**	**0,00**
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Sepeda Motor/Kendaraan Bermotor Roda Dua :	21 Unit	Unit/thn	500.000,00	-	10.500.000,00	21 Unit	Unit/thn	500.000,00	-	10.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0039	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga**					**2.400.000,00**					**2.400.000,00**	**0,00**
	[#] Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**2.400.000,00**					**2.400.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					**2.400.000,00**					**2.400.000,00**	**0,00**
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Kendaraan Bermotor Roda Tiga (khusus sampah)	2 Unit x 0.6	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	2.400.000,00	2 Unit x 0.6	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	2.400.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0040	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus**					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	[#] Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Service dan suku cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Station Wagon/Pick Up/sejenis)	4 Unit	Unit / Tahun	7.500.000,00	-	30.000.000,00	4 Unit	Unit / Tahun	7.500.000,00	-	30.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**98.300.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**98.300.000,00**	**0,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 180.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 180.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 180.000.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**180.000.000,00**					**180.000.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**40.270.000,00**					**40.270.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**40.270.000,00**					**40.270.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**24.400.000,00**					**24.400.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**24.400.000,00**					**24.400.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**22.000.000,00**					**22.000.000,00**	**0,00**
	[#] Gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**22.000.000,00**					**22.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor					**22.000.000,00**					**22.000.000,00**	**0,00**
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi Spesifikasi :	22000000 Rupiah	Rupiah	1,00	-	22.000.000,00	22000000 Rupiah	Rupiah	1,00	-	22.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**107.000,00**					**107.000,00**	**0,00**
	[#] Gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**107.000,00**					**107.000,00**	**0,00**
	[-] Fotocopy					**107.000,00**					**107.000,00**	**0,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1,00	-	200,00	200 Rupiah	Rupiah	1,00	-	200,00	0,00
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	356 Lembar	lembar	300,00	-	106.800,00	356 Lembar	lembar	300,00	-	106.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.743.000,00**					**1.743.000,00**	**0,00**
	[#] Jumlah Bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.743.000,00**					**1.743.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor					**1.743.000,00**					**1.743.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi :	600 Rupiah	Rupiah	1,00	-	600,00	600 Rupiah	Rupiah	1,00	-	600,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	16 Buah x 3 Meter x 0.55 Persen	m x 90 cm	66.000,00	-	1.742.400,00	16 Buah x 3 Meter x 0.55 Persen	m x 90 cm	66.000,00	-	1.742.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**550.000,00**					**550.000,00**	**0,00**
	[#] Gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Bendera 1,5m x 3m Spesifikasi :	0 Buah	buah	100.000,00	-	0,00	0 Buah	buah	100.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Jumlah Bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**550.000,00**					**550.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor					**550.000,00**					**550.000,00**	**0,00**
	Bambu bendera/Umbul-umbul Spesifikasi :	10 Buah	buah	55.000,00	-	550.000,00	10 Buah	buah	55.000,00	-	550.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**15.870.000,00**					**15.870.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**15.870.000,00**					**15.870.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**15.870.000,00**					**15.870.000,00**	**0,00**
	[#] Gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**15.870.000,00**					**15.870.000,00**	**0,00**
	[-] Pekerja					**15.870.000,00**					**15.870.000,00**	**0,00**
	Pekerja Spesifikasi : NaN	175 Orang / Kali	Hari	90.000,00	-	15.750.000,00	175 Orang / Kali	Hari	90.000,00	-	15.750.000,00	0,00
	Tukang Harian Lepas Pekerjaan Swakelola Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Hari	120.000,00	-	120.000,00	1 Orang / Kali	Hari	120.000,00	-	120.000,00	0,00
	[-] Pembantu Tukang					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Buruh tak terlatih Spesifikasi :	-	Hari	75.000,00	-	0,00	-	Hari	75.000,00	-	0,00	0,00
	Pembantu Tukang Harian Lepas Pekerjaan Swakelola Spesifikasi :	0 Orang	Hari	85.000,00	-	0,00	0 Orang	Hari	85.000,00	-	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**139.730.000,00**					**139.730.000,00**	**0,00**
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**					**139.730.000,00**					**139.730.000,00**	**0,00**
5.2.01.01.01	**Belanja Modal Tanah Persil**					**139.730.000,00**					**139.730.000,00**	**0,00**
5.2.01.01.01.0004	**Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja**					**139.730.000,00**					**139.730.000,00**	**0,00**
	[#] Gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**139.730.000,00**					**139.730.000,00**	**0,00**
	[-] Fotocopy					**250.000,00**					**250.000,00**	**0,00**
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1 Rupiah	Rupiah	100,00	-	100,00	1 Rupiah	Rupiah	100,00	-	100,00	0,00
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	833 Lembar	Lembar	300,00	-	249.900,00	833 Lembar	Lembar	300,00	-	249.900,00	0,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan					**200.000,00**					**200.000,00**	**0,00**
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom					**300.000,00**					**300.000,00**	**0,00**
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1 Orang	Orang	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang	Orang	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	[-] Honor tim teknis (anggota)					**100.000,00**					**100.000,00**	**0,00**
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000,00	-	100.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000,00	-	100.000,00	0,00
	[-] Honor tim teknis (ketua)					**200.000,00**					**200.000,00**	**0,00**
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	200.000,00	0,00
	[-] Honor tim teknis (Sekretaris)					**150.000,00**					**150.000,00**	**0,00**
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	150.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	150.000,00	0,00
	[-] Jamuan Makan (perseorangan)					**900.000,00**					**900.000,00**	**0,00**
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	15 Orang x 2 Kali	Orang Kali	30.000,00	-	900.000,00	15 Orang x 2 Kali	Orang Kali	30.000,00	-	900.000,00	0,00
	[-] Jamuan minum dan makanan kecil					**330.000,00**					**330.000,00**	**0,00**
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	15 Orang x 2 Kali	Orang Kali	11.000,00	-	330.000,00	15 Orang x 2 Kali	Orang Kali	11.000,00	-	330.000,00	0,00
	[-] Konsultasi Pengawas					**4.000.000,00**					**4.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1 Pekerjaan	Pekerjaan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	1 Pekerjaan	Pekerjaan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	[-] Konsultasi Perencanaan					**7.000.000,00**					**7.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1 Pekerjaan	Pekerjaan	7.000.000,00	-	7.000.000,00	1 Pekerjaan	Pekerjaan	7.000.000,00	-	7.000.000,00	0,00
	[-] Pejabat Pengadaan Konsultan Perencana dan Pengawas					**300.000,00**					**300.000,00**	**0,00**
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000,00	-	300.000,00	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000,00	-	300.000,00	0,00
	[-] Pengurugan Tanah UPTD BLK					**125.600.000,00**					**125.600.000,00**	**0,00**
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	-		400.000,00	-	0,00	-		400.000,00	-	0,00	0,00
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1 Paket	Paket	125.600.000,00	-	125.600.000,00	1 Paket	Paket	125.600.000,00	-	125.600.000,00	0,00
	[-] PPKom Konsultan Perencana dan Pengawas					**400.000,00**					**400.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	-	400.000,00	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	-	400.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**180.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**180.000.000,00**	**0,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 20.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit
Hasil	Peresentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Hasil	Peresentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**20.000.000,00**					**20.000.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**20.000.000,00**					**20.000.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**20.000.000,00**					**20.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**330.000,00**					**330.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**330.000,00**					**330.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**330.000,00**					**330.000,00**	**0,00**
	[#] Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**330.000,00**					**330.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**330.000,00**					**330.000,00**	**0,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1100 Lembar	lembar	300,00	-	330.000,00	1100 Lembar	lembar	300,00	-	330.000,00	0,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**19.670.000,00**					**19.670.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**19.670.000,00**					**19.670.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.02.0118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	[#] Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	[-] pemeliharaan mebeleir					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1 Unit	Unit	200.000,00	-	200.000,00	1 Unit	Unit	200.000,00	-	200.000,00	0,00
	Perawatan Meubelair Spesifikasi : Berat	6 Unit	unit/thn	300.000,00	-	1.800.000,00	6 Unit	unit/thn	300.000,00	-	1.800.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**500.000,00**					**500.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**500.000,00**					**500.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Mesin Potong rumput					**500.000,00**					**500.000,00**	**0,00**
	Mesin potong rumput Spesifikasi : Ringan	1 Unit / Tahun x 0.5 Persen	unit/tahun	1.000.000,00	-	500.000,00	1 Unit / Tahun x 0.5 Persen	unit/tahun	1.000.000,00	-	500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**5.670.000,00**					**5.670.000,00**	**0,00**
	[#] Bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**5.670.000,00**					**5.670.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					**5.670.000,00**					**5.670.000,00**	**0,00**
	AC Split sd 1 PK Spesifikasi : Ringan	14 Buah	Buah	405.000,00	-	5.670.000,00	14 Buah	Buah	405.000,00	-	5.670.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
	[#] Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan PC / Laptop					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
	Personal Komputer (PC) / Laptop Spesifikasi : Sedang	8 Unit / Tahun	unit/thn	750.000,00	-	6.000.000,00	8 Unit / Tahun	unit/thn	750.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**					**5.500.000,00**					**5.500.000,00**	**0,00**
	[#] Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**5.500.000,00**					**5.500.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Pemeliharaan Printer					**5.500.000,00**					**5.500.000,00**	**0,00**
	Printer Spesifikasi : Sedang	11 Unit / Tahun	unit/thn	500.000,00	-	5.500.000,00	11 Unit / Tahun	unit/thn	500.000,00	-	5.500.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**20.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**20.000.000,00**	**0,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 106.846.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	75,34 persen	Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	75,34 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 106.846.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 106.846.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**106.846.000,00**					**106.846.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**106.846.000,00**					**106.846.000,00**	**0,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**6.750.000,00**					**6.750.000,00**	**0,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**6.750.000,00**					**6.750.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**6.750.000,00**					**6.750.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**6.750.000,00**					**6.750.000,00**	**0,00**
	[#] IKM yang mengikuti Pelatihan Produksi Bersih (SIDa) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**6.750.000,00**					**6.750.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium PPTK dan Kasir kegiatan					**6.750.000,00**					**6.750.000,00**	**0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Kegiatan / Sub Kegiatan Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 500 juta s.d 1 miliar	12 Bulan x 1	Orang / Bulan	450.000,00	-	5.400.000,00	12 Bulan x 1	Orang / Bulan	450.000,00	-	5.400.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	6 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	225.000,00	-	1.350.000,00	6 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	225.000,00	-	1.350.000,00	0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**100.096.000,00**					**100.096.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**6.818.000,00**					**6.818.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**6.818.000,00**					**6.818.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**642.000,00**					**642.000,00**	**0,00**
	[#] IKM yang mengikuti Pelatihan Produksi Bersih (SIDa) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**642.000,00**					**642.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] fotocopy					**642.000,00**					**642.000,00**	**0,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2140 Lembar	lembar	300,00	-	642.000,00	2140 Lembar	lembar	300,00	-	642.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**396.000,00**					**396.000,00**	**0,00**
	[#] IKM yang mengikuti Pelatihan Produksi Bersih (SIDa) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**396.000,00**					**396.000,00**	**0,00**
	[-] Biaya pencetakan spanduk kegiatan pelatihan produksi bersih					**396.000,00**					**396.000,00**	**0,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	2 Lembar x 3 Meter	m x 90 cm	66.000,00	-	396.000,00	2 Lembar x 3 Meter	m x 90 cm	66.000,00	-	396.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**2.500.000,00**					**2.500.000,00**	**0,00**
	[#] IKM yang mengikuti Pelatihan Produksi Bersih (SIDa) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**2.500.000,00**					**2.500.000,00**	**0,00**
	[-] Bahan Praktek Pelatihan					**2.500.000,00**					**2.500.000,00**	**0,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi :	50 Buah x 1 Kegiatan x 50000 Rupiah	pekerjaan	1,00	-	2.500.000,00	50 Buah x 1 Kegiatan x 50000 Rupiah	pekerjaan	1,00	-	2.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**3.280.000,00**					**3.280.000,00**	**0,00**
	[#] IKM yang mengikuti Pelatihan Produksi Bersih (SIDa) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**2.460.000,00**					**2.460.000,00**	**0,00**
	[-] Jamuan snack kegiatan pelatihan produksi bersih					**660.000,00**					**660.000,00**	**0,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	60 Orang x 1 Hari	Org/Kl	11.000,00	-	660.000,00	60 Orang x 1 Hari	Org/Kl	11.000,00	-	660.000,00	0,00
	[-] makan kegiatan pelatihan produksi bersih					**1.800.000,00**					**1.800.000,00**	**0,00**
	0	60 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali Kali	30.000,00	-	1.800.000,00	60 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali Kali	30.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	[#] Kajian Potensi Pengembangan Industri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**220.000,00**					**220.000,00**	**0,00**
	[-] Rapat Internal					**220.000,00**					**220.000,00**	**0,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	220.000,00	10 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	220.000,00	0,00
	[#] Kegiatan Pelatihan Produksi Bersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**600.000,00**					**600.000,00**	**0,00**
	[-] Rapat Internal					**600.000,00**					**600.000,00**	**0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	600.000,00	10 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**89.578.000,00**					**89.578.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**80.580.000,00**					**80.580.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**3.100.000,00**					**3.100.000,00**	**0,00**
	[#] IKM yang mengikuti Pelatihan Produksi Bersih (SIDa) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**3.100.000,00**					**3.100.000,00**	**0,00**
	[-] Honor asisten praktisi kegiatan pelatihan produksi bersih					**800.000,00**					**800.000,00**	**0,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan x 0.4 %	OJ	1.000.000,00	-	800.000,00	2 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan x 0.4 %	OJ	1.000.000,00	-	800.000,00	0,00
	[-] Honor praktisi kegiatan pelatihan produksi bersih					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[-] Honor Walikota kegiatan pelatihan produksi bersih					**1.300.000,00**					**1.300.000,00**	**0,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Bupati / Walikota/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.300.000,00	-	1.300.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.300.000,00	-	1.300.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**77.400.000,00**					**77.400.000,00**	**0,00**
	[#] bulan penyediaan jasa Tenaga Kegiatan industri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**77.400.000,00**					**77.400.000,00**	**0,00**
	[-] Gaji penjaga LIK					**24.600.000,00**					**24.600.000,00**	**0,00**
	Tenaga Administrasi DINPERINAKER Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	24.600.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	24.600.000,00	0,00
	Tenaga Administrasi DINPERINAKER Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	52.800.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	52.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**80.000,00**					**80.000,00**	**0,00**
	[#] IKM yang mengikuti Pelatihan Produksi Bersih (SIDa) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**80.000,00**					**80.000,00**	**0,00**
	[-] caraka produksi bersih					**80.000,00**					**80.000,00**	**0,00**
	Banpot caraka Spesifikasi :	2 Orang	kali	40.000,00	-	80.000,00	2 Orang	kali	40.000,00	-	80.000,00	0,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**3.960.000,00**					**3.960.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**3.456.000,00**					**3.456.000,00**	**0,00**
	[#] bulan penyediaan jasa Tenaga Kegiatan industri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**3.456.000,00**					**3.456.000,00**	**0,00**
	[-] Premi asuransi kesehatan					**3.456.000,00**					**3.456.000,00**	**0,00**
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan (4 persen) Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan x 96000 Rupiah	OB	1,00	-	3.456.000,00	3 Orang x 12 Bulan x 96000 Rupiah	OB	1,00	-	3.456.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**216.000,00**					**216.000,00**	**0,00**
	[#] bulan penyediaan jasa Tenaga Kegiatan industri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**216.000,00**					**216.000,00**	**0,00**
	[-] Premi asuransi ketenagakerjaan, kecelakaan kerja					**216.000,00**					**216.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja(0,24 persen) Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan x 6000 Rupiah	OB	1,00	-	216.000,00	3 Orang x 12 Bulan x 6000 Rupiah	OB	1,00	-	216.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**288.000,00**					**288.000,00**	**0,00**
	[#] bulan penyediaan jasa Tenaga Kegiatan industri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**288.000,00**					**288.000,00**	**0,00**
	[-] premi asuransi ketenagakerjaan, kematian					**288.000,00**					**288.000,00**	**0,00**
	Jasa Premi Asuransi Ketenagakerjaan, Kematian (0,3 persen) Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan x 8000 Rupiah	OB	1,00	-	288.000,00	3 Orang x 12 Bulan x 8000 Rupiah	OB	1,00	-	288.000,00	0,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**5.038.000,00**					**5.038.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**2.600.000,00**					**2.600.000,00**	**0,00**
	[#] IKM yang mengikuti Pelatihan Produksi Bersih (SIDa) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**2.600.000,00**					**2.600.000,00**	**0,00**
	[-] sewa layos produksi bersih					**2.600.000,00**					**2.600.000,00**	**0,00**
	Layos Besar biasa ful slisir Spesifikasi :	4 Set x 1 Hari	Set/Hari	650.000,00	-	2.600.000,00	4 Set x 1 Hari	Set/Hari	650.000,00	-	2.600.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**920.000,00**					**920.000,00**	**0,00**
	[#] IKM yang mengikuti Pelatihan Produksi Bersih (SIDa) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**360.000,00**					**360.000,00**	**0,00**
	[-] sewa meja					**360.000,00**					**360.000,00**	**0,00**
	Meja bundar / kotak + cover Spesifikasi :	8 Buah	bh/ hari	45.000,00	-	360.000,00	8 Buah	bh/ hari	45.000,00	-	360.000,00	0,00
	[#] Kegiatan Pelatihan Produksi Bersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**560.000,00**					**560.000,00**	**0,00**
	[-] Sewa Kursi					**560.000,00**					**560.000,00**	**0,00**
	Kursi susun Besi Spesifikasi :	70 Buah	bh/ hari	8.000,00	-	560.000,00	70 Buah	bh/ hari	8.000,00	-	560.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	**Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**1.518.000,00**					**1.518.000,00**	**0,00**
	[#] IKM yang mengikuti Pelatihan Produksi Bersih (SIDa) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.518.000,00**					**1.518.000,00**	**0,00**
	[-] sewa panggung produksi bersih					**386.000,00**					**386.000,00**	**0,00**
	Panggung + karpet Spesifikasi : 4 X4 M	1 Set x 1 Hari	hari	386.000,00	-	386.000,00	1 Set x 1 Hari	hari	386.000,00	-	386.000,00	0,00
	[-] sewa sound system produksi bersih					**1.132.000,00**					**1.132.000,00**	**0,00**
	Portable Sound System 2 Spesifikasi : 2 microphones ~ sekitar 50 orang	1 Set x 1 Hari	unit/hari	1.132.000,00	-	1.132.000,00	1 Set x 1 Hari	unit/hari	1.132.000,00	-	1.132.000,00	0,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] IKM yang mengikuti Pelatihan Produksi Bersih (SIDa) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Sewa Gedung / Meeting Room					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi : Kap. s/d 100 orang	0 Hari	hari	1.800.000,00	-	0,00	0 Hari	hari	1.800.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**3.700.000,00**					**3.700.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**3.700.000,00**					**3.700.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**3.700.000,00**					**3.700.000,00**	**0,00**
	[#] IKM yang mengikuti Pelatihan Produksi Bersih (SIDa) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**3.700.000,00**					**3.700.000,00**	**0,00**
	[-] Bantuan transport peserta kegiatan pelatihan produksi bersih					**2.500.000,00**					**2.500.000,00**	**0,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	50 Orang x 1 Hari	Hari	50.000,00	-	2.500.000,00	50 Orang x 1 Hari	Hari	50.000,00	-	2.500.000,00	0,00
	[-] transport narasumber					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
	Transportasi Narasumber Spesifikasi :	3 Orang x 1 Hari x 400000	Rupiah	1,00	-	1.200.000,00	3 Orang x 1 Hari x 400000	Rupiah	1,00	-	1.200.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**106.846.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**106.846.000,00**	**0,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 135.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	75,34 persen	Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	75,34 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**135.000.000,00**					**135.000.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**22.575.000,00**					**22.575.000,00**	**0,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**1.350.000,00**					**1.350.000,00**	**0,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**1.350.000,00**					**1.350.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**1.350.000,00**					**1.350.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**1.350.000,00**					**1.350.000,00**	**0,00**
	[#] Bangunan yang dipelihara/landmark atau gazebo yang dibangun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.350.000,00**					**1.350.000,00**	**0,00**
	[-] Pembangunan Gapuro Kampung Tahu Sokoduwet					**1.350.000,00**					**1.350.000,00**	**0,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	6 Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	1.350.000,00	6 Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	1.350.000,00	0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**21.225.000,00**					**21.225.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**1.980.000,00**					**1.980.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**1.980.000,00**					**1.980.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.980.000,00**					**1.980.000,00**	**0,00**
	[#] Pemeliharaan LIK/Pembangunan Landmark LIK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.980.000,00**					**1.980.000,00**	**0,00**
	[-] spanduk promosi LIK					**1.980.000,00**					**1.980.000,00**	**0,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	5 Meter x 6 Meter x 1 Buah	m x 90 cm	66.000,00	-	1.980.000,00	5 Meter x 6 Meter x 1 Buah	m x 90 cm	66.000,00	-	1.980.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**18.795.000,00**					**18.795.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**18.795.000,00**					**18.795.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.03.0012	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar**					**18.795.000,00**					**18.795.000,00**	**0,00**
	[#] Bangunan yang dipelihara/landmark atau gazebo yang dibangun **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**18.795.000,00**					**18.795.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan bangunan LIK					**18.795.000,00**					**18.795.000,00**	**0,00**
	Pemeliharaan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Spesifikasi :	1 Pekerjaan x 18795000 Rupiah	Rupiah	1,00	-	18.795.000,00	1 Pekerjaan x 18795000 Rupiah	Rupiah	1,00	-	18.795.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**450.000,00**					**450.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**450.000,00**					**450.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**450.000,00**					**450.000,00**	**0,00**
	[#] Bangunan yang dipelihara/landmark atau gazebo yang dibangun **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**450.000,00**					**450.000,00**	**0,00**
	[-] Bantuan transport verifikasi lapangan					**450.000,00**					**450.000,00**	**0,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	3 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	30.000,00	-	450.000,00	3 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	30.000,00	-	450.000,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**112.425.000,00**					**112.425.000,00**	**0,00**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**92.075.000,00**					**92.075.000,00**	**0,00**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**92.075.000,00**					**92.075.000,00**	**0,00**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**92.075.000,00**					**92.075.000,00**	**0,00**
5.2.03.01.01.0012	**Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar**					**92.075.000,00**					**92.075.000,00**	**0,00**
	[#] Bangunan yang dipelihara/landmark atau gazebo yang dibangun **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**8.100.000,00**					**8.100.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar					**720.000,00**					**720.000,00**	**0,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	2400 Lembar	lembar	300,00	-	720.000,00	2400 Lembar	lembar	300,00	-	720.000,00	0,00
	[-] Honor Pejabat pengadaan pembangunan Gapuro Kampung Tahu Sokoduwet					**200.000,00**					**200.000,00**	**0,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
	[-] Honor pejabat pengadaan untuk perencanaan, pengawasan dan pembangunan landmark / gazebo					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	0					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	0	-		200.000,00	-	0,00	-		200.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Honor PPKom Pembangunan Gapuro kampung Tahu Sokoduwet					**250.000,00**					**250.000,00**	**0,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 1 Kali	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000,00	-	250.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan x 1 Kali	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000,00	-	250.000,00	0,00
	[-] Jamuan Makan					**900.000,00**					**900.000,00**	**0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	15 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	900.000,00	15 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	900.000,00	0,00
	[-] Jamuan snack rapat pertemuan					**330.000,00**					**330.000,00**	**0,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	15 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	330.000,00	15 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	330.000,00	0,00
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gapuro Kampung Tahu Sokoduwet					**2.490.000,00**					**2.490.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi :	2490000 Rupiah	pek	1,00	-	2.490.000,00	2490000 Rupiah	pek	1,00	-	2.490.000,00	0,00
	[-] Jasa konsultasi Perencanaan pembangunan Gapuro kampung tahu Sokoduwet					**3.210.000,00**					**3.210.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan Spesifikasi :	1 Pekerjaan x 3210000 Rupiah	pek	1,00	-	3.210.000,00	1 Pekerjaan x 3210000 Rupiah	pek	1,00	-	3.210.000,00	0,00
	[-] Perencanaan landmark/ Gazebo yang dibangun					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	0					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	0	-		250.000,00	-	0,00	-		250.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Pembangunan Gapuro Kampung Tahu Sokoduwet **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**975.000,00**					**975.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium pejabat teknis Pembangunan Gapuro kampung Tahu Sokoduwet					**150.000,00**					**150.000,00**	**0,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Teknis Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000,00	-	150.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000,00	-	150.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pengawas Lapangan Pembangunan Gapuro Kampung Tahu Sokoduwet					**125.000,00**					**125.000,00**	**0,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pengawas Lapangan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan di atas 50 juta s.d 100 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	125.000,00	-	125.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	125.000,00	-	125.000,00	0,00
	[-] Honor PPKom dan PP Perencanaan dan pengawasan Pembangunan Gapuro Kampung Tahu Sokoduwet					**700.000,00**					**700.000,00**	**0,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000,00	-	300.000,00	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000,00	-	300.000,00	0,00
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	-	400.000,00	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	-	400.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan LIK/Pembangunan Landmark LIK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**83.000.000,00**					**83.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pembangunan Gapuro Kampung Tahu Sokoduwet					**83.000.000,00**					**83.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Belanja modal yang bersifat kontraktual	83000000 Rupiah	Rupiah	1,00	-	83.000.000,00	83000000 Rupiah	Rupiah	1,00	-	83.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Pembulatan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Belanja modal yang bersifat kontraktual	-	Rupiah	1,00	-	0,00	-	Rupiah	1,00	-	0,00	0,00
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**20.350.000,00**					**20.350.000,00**	**0,00**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**					**20.350.000,00**					**20.350.000,00**	**0,00**
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**					**20.350.000,00**					**20.350.000,00**	**0,00**
5.2.04.01.01.0010	**Belanja Modal Jalan Lainnya**					**20.350.000,00**					**20.350.000,00**	**0,00**
	[#] Perencanaan Jalan dan Drainase **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**20.350.000,00**					**20.350.000,00**	**0,00**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa					**350.000,00**					**350.000,00**	**0,00**
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000,00	-	150.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000,00	-	150.000,00	0,00
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, PPKom Spesifikasi : Nilai Paket Pekerjaan s.d 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
	[-] Jasa Konsultansi penyusunan DED Perencanaan Jalan dan Drainase kawasan LIK					**20.000.000,00**					**20.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi :	1 Pekerjaan x 20000000 Rupiah	pek	1,00	-	20.000.000,00	1 Pekerjaan x 20000000 Rupiah	pek	1,00	-	20.000.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**135.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**135.000.000,00**	**0,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 66.523.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	75,34 persen	Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	75,34 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 66.523.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 66.523.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen
Hasil	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan	3.5 persen	Hasil	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan	3.5 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**66.523.000,00**					**66.523.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**66.523.000,00**					**66.523.000,00**	**0,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
	[#] IG Sarung Batik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
	[-] kasir kegiatan					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	1.200.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	1.200.000,00	0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**65.323.000,00**					**65.323.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**38.573.000,00**					**38.573.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**38.573.000,00**					**38.573.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**385.000,00**					**385.000,00**	**0,00**
	[#] Pelatihan Ecoprint / Jumputan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**116.000,00**					**116.000,00**	**0,00**
	[-] fotocopy					**116.000,00**					**116.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1,00	-	200,00	200 Rupiah	Rupiah	1,00	-	200,00	0,00
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	386 Lembar	lembar	300,00	-	115.800,00	386 Lembar	lembar	300,00	-	115.800,00	0,00
	[#] Sosialisasi/Pembinaan Industri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**269.000,00**					**269.000,00**	**0,00**
	[-] fotocopy					**269.000,00**					**269.000,00**	**0,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1,00	-	200,00	200 Rupiah	Rupiah	1,00	-	200,00	0,00
	Fotocopy Spesifikasi : A4	896 Lembar	lembar	300,00	-	268.800,00	896 Lembar	lembar	300,00	-	268.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**6.388.000,00**					**6.388.000,00**	**0,00**
	[#] IG Sarung Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**5.305.000,00**					**5.305.000,00**	**0,00**
	[-] cetak spanduk					**105.000,00**					**105.000,00**	**0,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3 Meter x 1 Meter x 0.530303 %	m x 90 cm	66.000,00	-	105.000,00	3 Meter x 1 Meter x 0.530303 %	m x 90 cm	66.000,00	-	105.000,00	0,00
	[-] Stiker IG Sarung Batik					**5.200.000,00**					**5.200.000,00**	**0,00**
	Pembuatan Stiker Spesifikasi : Sedang	1300 Lembar	Lembar	4.000,00	-	5.200.000,00	1300 Lembar	Lembar	4.000,00	-	5.200.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Digital Marketing Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**245.000,00**					**245.000,00**	**0,00**
	[-] cetak spanduk					**245.000,00**					**245.000,00**	**0,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3.5 Meter x 2 Meter x 0.530303 %	m x 90 cm	66.000,00	-	245.000,00	3.5 Meter x 2 Meter x 0.530303 %	m x 90 cm	66.000,00	-	245.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Ecoprint / Jumputan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**420.000,00**					**420.000,00**	**0,00**
	[-] cetak spanduk					**420.000,00**					**420.000,00**	**0,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	6 Meter x 2 Meter x 0.530303 %	m x 90 cm	66.000,00	-	420.000,00	6 Meter x 2 Meter x 0.530303 %	m x 90 cm	66.000,00	-	420.000,00	0,00
	[#] Sosialisasi Industri Hijau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**418.000,00**					**418.000,00**	**0,00**
	[-] Cetak Leaflet					**22.000,00**					**22.000,00**	**0,00**
	Cetak Leafleat Spesifikasi :	50 Lembar x 440 Rupiah	lembar	1,00	-	22.000,00	50 Lembar x 440 Rupiah	lembar	1,00	-	22.000,00	0,00
	[-] cetak spanduk					**396.000,00**					**396.000,00**	**0,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3 Meter x 2 Meter	m x 90 cm	66.000,00	-	396.000,00	3 Meter x 2 Meter	m x 90 cm	66.000,00	-	396.000,00	0,00
	[#] Sosialisasi/Pembinaan Industri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] fotocopy					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	0 Meter x 2 Meter	m x 90 cm	66.000,00	-	0,00	0 Meter x 2 Meter	m x 90 cm	66.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**1.350.000,00**					**1.350.000,00**	**0,00**
	[#] IG Sarung Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.350.000,00**					**1.350.000,00**	**0,00**
	[-] Kartu Anggota IG Sarung Batik					**1.350.000,00**					**1.350.000,00**	**0,00**
	Tanda Pengenal Pegawai Spesifikasi : Standart	100 Buah x 0.3 %	buah	45.000,00	-	1.350.000,00	100 Buah x 0.3 %	buah	45.000,00	-	1.350.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	[#] Pelatihan Ecoprint / Jumputan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	[-] Bahan Pelatihan Ecoprint / Jumputan					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi :	100 Orang x 120000 Rupiah	pekerjaan	1,00	-	12.000.000,00	100 Orang x 120000 Rupiah	pekerjaan	1,00	-	12.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**18.450.000,00**					**18.450.000,00**	**0,00**
	[#] IG Sarung Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**4.920.000,00**					**4.920.000,00**	**0,00**
	[-] Makmin Keg. IG Sarung Batik					**3.600.000,00**					**3.600.000,00**	**0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	40 Orang x 3 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	3.600.000,00	40 Orang x 3 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	[-] Snack Keg. IG Sarung Batik					**1.320.000,00**					**1.320.000,00**	**0,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	40 Orang x 3 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	1.320.000,00	40 Orang x 3 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	1.320.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Digital Marketing Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**4.920.000,00**					**4.920.000,00**	**0,00**
	[-] Jamuan Makan					**3.600.000,00**					**3.600.000,00**	**0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	60 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	3.600.000,00	60 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	[-] Jamuan Minum dan Makanan Kecil					**1.320.000,00**					**1.320.000,00**	**0,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	60 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	1.320.000,00	60 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	1.320.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Ecoprint / Jumputan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**5.740.000,00**					**5.740.000,00**	**0,00**
	[-] Makmin Keg. Pelatihan Ecoprint / Jumputan					**4.200.000,00**					**4.200.000,00**	**0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	70 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	4.200.000,00	70 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	4.200.000,00	0,00
	[-] Rapat Internal					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	0 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	0,00	0 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	0,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	0 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	0,00	0 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Snack Keg. Pelatihan Ecoprint / Jumputan					**1.540.000,00**					**1.540.000,00**	**0,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	70 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	1.540.000,00	70 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	1.540.000,00	0,00
	[#] Sosialisasi Industri Hijau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**2.870.000,00**					**2.870.000,00**	**0,00**
	[-] Jamuan Makan					**2.100.000,00**					**2.100.000,00**	**0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	70 Orang x 1 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	2.100.000,00	70 Orang x 1 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	2.100.000,00	0,00
	[-] Jamuan Minum dan Makanan Kecil					**770.000,00**					**770.000,00**	**0,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	70 Orang x 1 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	770.000,00	70 Orang x 1 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	770.000,00	0,00
	[#] Sosialisasi/Pembinaan Industri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Jamuan Makan Keg. Sosialisasi/Pembinaan Industri					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	0 Orang	Org/Kl	30.000,00	-	0,00	0 Orang	Org/Kl	30.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Snack Keg. Sosialisasi/Pembinaan Industri					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	0 Orang	Org/Kl	11.000,00	-	0,00	0 Orang	Org/Kl	11.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**9.450.000,00**					**9.450.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**9.450.000,00**					**9.450.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**9.250.000,00**					**9.250.000,00**	**0,00**
	[#] IG Sarung Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.750.000,00**					**1.750.000,00**	**0,00**
	[-] Honor pakar / praktisi					**1.750.000,00**					**1.750.000,00**	**0,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi :	1 Orang / Kali	OJ	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Kali	OJ	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi :	3 Orang x 1 Kali x 0.25 %	OJ	1.000.000,00	-	750.000,00	3 Orang x 1 Kali x 0.25 %	OJ	1.000.000,00	-	750.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Digital Marketing Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**3.000.000,00**					**3.000.000,00**	**0,00**
	[-] Honor asisten praktisi					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi :	2 Orang x 2 Kali x 0.25 %	OJ	1.000.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang x 2 Kali x 0.25 %	OJ	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[-] Honor pakar / praktisi					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi :	2 Orang x 2 Kali x 0.5 %	OJ	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2 Orang x 2 Kali x 0.5 %	OJ	1.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Ecoprint / Jumputan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**2.750.000,00**					**2.750.000,00**	**0,00**
	[-] Honor asisten praktisi					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari x 0.25 %	OJ	1.000.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang x 2 Hari x 0.25 %	OJ	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[-] Honor Ketua PKK					**750.000,00**					**750.000,00**	**0,00**
	Honor Narasumber Ketua PKK Tingkat Kota Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	750.000,00	-	750.000,00	1 Orang	Orang / Kegiatan	750.000,00	-	750.000,00	0,00
	[-] Honor pakar / praktisi					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kali x 0.5 %	OJ	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Kali x 0.5 %	OJ	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[#] Sosialisasi Industri Hijau Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.750.000,00**					**1.750.000,00**	**0,00**
	[-] Honor Ketua PKK					**750.000,00**					**750.000,00**	**0,00**
	Honor Narasumber Ketua PKK Tingkat Kota Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	750.000,00	-	750.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	750.000,00	-	750.000,00	0,00
	[-] Honor pakar / praktisi					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kali x 0.5 %	OJ	1.000.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang x 1 Kali x 0.5 %	OJ	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[#] Sosialisasi/Pembinaan Industri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Honor Ketua PKK					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Honor Narasumber Ketua PKK Tingkat Kota Spesifikasi :	0 Orang	Orang / Kegiatan	750.000,00	-	0,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	750.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Honor pakar / praktisi					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi :	0 Orang	OJ	1.000.000,00	-	0,00	0 Orang	OJ	1.000.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**200.000,00**					**200.000,00**	**0,00**
	[#] Pelatihan Ecoprint / Jumputan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**200.000,00**					**200.000,00**	**0,00**
	[-] Caraka					**200.000,00**					**200.000,00**	**0,00**
	Banpot caraka Spesifikasi :	5 Orang x 1	kali	40.000,00	-	200.000,00	5 Orang x 1	kali	40.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Pelatihan Ecoprint / Jumputan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Penginapan Narasumber					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I Spesifikasi : Jawa Tengah	0 Orang / Kamar x 2 Hari	Orang / Hari	675.000,00	-	0,00	0 Orang / Kamar x 2 Hari	Orang / Hari	675.000,00	-	0,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.09.0014	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] IG Sarung Batik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Akta Notaris Paguyuban IG Sarung Batik					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Spesifikasi :	0 Rupiah	pek	1,00	-	0,00	0 Rupiah	pek	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**17.300.000,00**					**17.300.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**17.300.000,00**					**17.300.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**17.300.000,00**					**17.300.000,00**	**0,00**
	[#] IG Sarung Batik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**3.800.000,00**					**3.800.000,00**	**0,00**
	[-] banpot peserta pelatihan					**3.800.000,00**					**3.800.000,00**	**0,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	0 Orang x 2 Kali	Hari	50.000,00	-	0,00	0 Orang x 2 Kali	Hari	50.000,00	-	0,00	0,00
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	16 Orang x 1 Kali	Hari	50.000,00	-	800.000,00	16 Orang x 1 Kali	Hari	50.000,00	-	800.000,00	0,00
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	60 Orang x 1 Kali	Hari	50.000,00	-	3.000.000,00	60 Orang x 1 Kali	Hari	50.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Digital Marketing **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**4.000.000,00**					**4.000.000,00**	**0,00**
	[-] banpot peserta pelatihan					**4.000.000,00**					**4.000.000,00**	**0,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	40 Orang x 2 Kali	Hari	50.000,00	-	4.000.000,00	40 Orang x 2 Kali	Hari	50.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Ecoprint / Jumputan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**4.100.000,00**					**4.100.000,00**	**0,00**
	[-] banpot peserta pelatihan					**4.100.000,00**					**4.100.000,00**	**0,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	41 Orang x 2 Kali	Hari	50.000,00	-	4.100.000,00	41 Orang x 2 Kali	Hari	50.000,00	-	4.100.000,00	0,00
	[-] Transport Narasumber					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Transportasi Narasumber Spesifikasi :	0 Orang x 1 Kali x 320000 Rupiah	Rupiah	1,00	-	0,00	0 Orang x 1 Kali x 320000 Rupiah	Rupiah	1,00	-	0,00	0,00
	[#] Sosialisasi Industri Hijau **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**2.400.000,00**					**2.400.000,00**	**0,00**
	[-] banpot peserta pelatihan					**2.400.000,00**					**2.400.000,00**	**0,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	48 Orang x 1 Kali	Hari	50.000,00	-	2.400.000,00	48 Orang x 1 Kali	Hari	50.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	[#] Sosialisasi/Pembinaan Industri **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**3.000.000,00**					**3.000.000,00**	**0,00**
	[-] banpot peserta pelatihan					**3.000.000,00**					**3.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	60 Orang x 1 Kali	Orang Kali	50.000,00	-	3.000.000,00	60 Orang x 1 Kali	Orang Kali	50.000,00	-	3.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**66.523.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**66.523.000,00**	**0,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 16.220.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	75,34 persen	Capaian Program	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	75,34 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.220.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.220.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
Waktu Pelaksanaan	: Juli s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**16.220.000,00**					**16.220.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**16.220.000,00**					**16.220.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**16.220.000,00**					**16.220.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**8.440.000,00**					**8.440.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**8.440.000,00**					**8.440.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**924.000,00**					**924.000,00**	**0,00**
	[#] Kegiatan SKKNI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**924.000,00**					**924.000,00**	**0,00**
	[-] Pembulatan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	0 Rupiah	Rupiah	1,00	-	0,00	0 Rupiah	Rupiah	1,00	-	0,00	0,00
	[-] Penggandaan					**924.000,00**					**924.000,00**	**0,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	3080 Lembar	lembar	300,00	-	924.000,00	3080 Lembar	lembar	300,00	-	924.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**792.000,00**					**792.000,00**	**0,00**
	[#] Evaluasi Pelaksanaan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**396.000,00**					**396.000,00**	**0,00**
	[-] Spanduk Evaluasi LIK					**396.000,00**					**396.000,00**	**0,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	3 Meter x 2 Kali	m x 90 cm	66.000,00	-	396.000,00	3 Meter x 2 Kali	m x 90 cm	66.000,00	-	396.000,00	0,00
	[#] Kegiatan SKKNI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**396.000,00**					**396.000,00**	**0,00**
	[-] Spanduk SKKNI					**396.000,00**					**396.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	2 Kali x 3 Meter	m x 90 cm	66.000,00	-	396.000,00	2 Kali x 3 Meter	m x 90 cm	66.000,00	-	396.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Kegiatan SKKNI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Bahan Pelatihan SKKNI					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Bahan Percontohan/Pelatihan Spesifikasi :	0 Orang x 115000 Rupiah	pekerjaan	1,00	-	0,00	0 Orang x 115000 Rupiah	pekerjaan	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**6.724.000,00**					**6.724.000,00**	**0,00**
	[#] Evaluasi Pelaksanaan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**3.280.000,00**					**3.280.000,00**	**0,00**
	[-] Makmin Evaluasi LIK					**3.280.000,00**					**3.280.000,00**	**0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	80 Orang x 1 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	2.400.000,00	80 Orang x 1 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	80 Orang x 1 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	880.000,00	80 Orang x 1 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	880.000,00	0,00
	[#] Kegiatan SKKNI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**3.444.000,00**					**3.444.000,00**	**0,00**
	[-] Makmin Keg. SKKNI					**1.800.000,00**					**1.800.000,00**	**0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	60 Orang x 1 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	1.800.000,00	60 Orang x 1 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	[-] Rapat Internal					**984.000,00**					**984.000,00**	**0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	12 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	720.000,00	12 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	720.000,00	0,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	12 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	264.000,00	12 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	264.000,00	0,00
	[-] Snack Kegiatan SKKNI					**660.000,00**					**660.000,00**	**0,00**
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	60 Orang x 1 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	660.000,00	60 Orang x 1 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	660.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**2.280.000,00**					**2.280.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**2.280.000,00**					**2.280.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	[#] Kegiatan SKKNI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	[-] Narasumber Kegiatan SKKNI					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kali	OJ	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2 Orang x 1 Kali	OJ	1.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**280.000,00**					**280.000,00**	**0,00**
	[#] Evaluasi Pelaksanaan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**120.000,00**					**120.000,00**	**0,00**
	[-] Caraka Evaluasi LIK					**120.000,00**					**120.000,00**	**0,00**
	Banpot caraka Spesifikasi :	3 Orang	kali	40.000,00	-	120.000,00	3 Orang	kali	40.000,00	-	120.000,00	0,00
	[#] Kegiatan SKKNI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**160.000,00**					**160.000,00**	**0,00**
	[-] Caraka Kegiatan SKKNI					**160.000,00**					**160.000,00**	**0,00**
	Banpot caraka Spesifikasi :	4 Orang	kali	40.000,00	-	160.000,00	4 Orang	kali	40.000,00	-	160.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**5.500.000,00**					**5.500.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**5.500.000,00**					**5.500.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**5.500.000,00**					**5.500.000,00**	**0,00**
	[#] Evaluasi Pelaksanaan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**3.250.000,00**					**3.250.000,00**	**0,00**
	[-] Banpot Evaluasi LIK					**3.250.000,00**					**3.250.000,00**	**0,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	65 Orang x 1 Hari	Hari	50.000,00	-	3.250.000,00	65 Orang x 1 Hari	Hari	50.000,00	-	3.250.000,00	0,00
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	-	Rupiah	1,00	-	0,00	-	Rupiah	1,00	-	0,00	0,00
	[#] Kegiatan SKKNI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**2.250.000,00**					**2.250.000,00**	**0,00**
	[-] Banpot Keg. SKKNI					**2.250.000,00**					**2.250.000,00**	**0,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	45 Orang x 1 Hari	Hari	50.000,00	-	2.250.000,00	45 Orang x 1 Hari	Hari	50.000,00	-	2.250.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**16.220.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**16.220.000,00**	**0,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program	: 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
Kegiatan	: 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 10.221.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25,00 persen	Capaian Program	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.221.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.221.000,00
Keluaran	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**10.221.000,00**					**10.221.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**10.221.000,00**					**10.221.000,00**	**0,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
	[#] Koordinasi dengan OPD dan IKM dalam rangka pengawasan perizinan di bidang industri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
	[-] kasir kegiatan					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola s.d 100 juta	1 Orang / Bulan x 6 Kali	Orang / Bulan	200.000,00	-	1.200.000,00	1 Orang / Bulan x 6 Kali	Orang / Bulan	200.000,00	-	1.200.000,00	0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**9.021.000,00**					**9.021.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**4.591.000,00**					**4.591.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**4.591.000,00**					**4.591.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**1.266.000,00**					**1.266.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Koordinasi dengan OPD dan IKM dalam rangka pengawasan perizinan di bidang industri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.266.000,00**					**1.266.000,00**	**0,00**
	[-] fotocopy hasil updating data					**1.266.000,00**					**1.266.000,00**	**0,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	4220 Lembar	lembar	300,00	-	1.266.000,00	4220 Lembar	lembar	300,00	-	1.266.000,00	0,00
	[-] pembulatan fotocopy					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	-	Rupiah	1,00	-	0,00	-	Rupiah	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**250.000,00**					**250.000,00**	**0,00**
	[#] Koordinasi dengan OPD dan IKM dalam rangka pengawasan perizinan di bidang industri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**250.000,00**					**250.000,00**	**0,00**
	[-] brosur kegiatan					**250.000,00**					**250.000,00**	**0,00**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50 Lembar	Lembar	5.000,00	-	250.000,00	50 Lembar	Lembar	5.000,00	-	250.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**3.075.000,00**					**3.075.000,00**	**0,00**
	[#] Koordinasi dengan OPD dan IKM dalam rangka pengawasan perizinan di bidang industri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**3.075.000,00**					**3.075.000,00**	**0,00**
	[-] makmin kegiatan					**2.255.000,00**					**2.255.000,00**	**0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	55 Orang	Org/Kl	30.000,00	-	1.650.000,00	55 Orang	Org/Kl	30.000,00	-	1.650.000,00	0,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	55 Orang	Org/Kl	11.000,00	-	605.000,00	55 Orang	Org/Kl	11.000,00	-	605.000,00	0,00
	[-] rapat internal					**820.000,00**					**820.000,00**	**0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	600.000,00	10 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	600.000,00	0,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	220.000,00	10 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	220.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**830.000,00**					**830.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**830.000,00**					**830.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**750.000,00**					**750.000,00**	**0,00**
	[#] Koordinasi dengan OPD dan IKM dalam rangka pengawasan perizinan di bidang industri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**750.000,00**					**750.000,00**	**0,00**
	[-] Honor Narsum Provinsi					**750.000,00**					**750.000,00**	**0,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Eselon III / yang disetarakan (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kot...	1 Orang x 0.833333 %	Orang / Kegiatan	900.000,00	-	750.000,00	1 Orang x 0.833333 %	Orang / Kegiatan	900.000,00	-	750.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**80.000,00**					**80.000,00**	**0,00**
	[#] Koordinasi dengan OPD dan IKM dalam rangka pengawasan perizinan di bidang industri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**80.000,00**					**80.000,00**	**0,00**
	[-] banpot caraka					**80.000,00**					**80.000,00**	**0,00**
	Banpot caraka Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kali	kali	40.000,00	-	80.000,00	2 Orang x 1 Kali	kali	40.000,00	-	80.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**3.600.000,00**					**3.600.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**3.600.000,00**					**3.600.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**1.800.000,00**					**1.800.000,00**	**0,00**
	[#] Koordinasi dengan OPD dan IKM dalam rangka pengawasan perizinan di bidang industri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.800.000,00**					**1.800.000,00**	**0,00**
	[-] banpot verifikasi lapangan					**1.800.000,00**					**1.800.000,00**	**0,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	3 Orang x 20 Kali	Orang / Hari	30.000,00	-	1.800.000,00	3 Orang x 20 Kali	Orang / Hari	30.000,00	-	1.800.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**1.800.000,00**					**1.800.000,00**	**0,00**
	[#] Koordinasi dengan OPD dan IKM dalam rangka pengawasan perizinan di bidang industri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.800.000,00**					**1.800.000,00**	**0,00**
	[-] banpot peserta					**1.800.000,00**					**1.800.000,00**	**0,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	36 Orang	Hari	50.000,00	-	1.800.000,00	36 Orang	Hari	50.000,00	-	1.800.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Koordinasi dengan OPD dan IKM dalam rangka pengawasan perizinan di bidang industri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] banpot narsum					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Transport Menggunakan Angkutan Umum Spesifikasi : Semarang dan sekitarnya	-	OK	300.000,00	-	0,00	-	OK	300.000,00	-	0,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**10.221.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**10.221.000,00**	**0,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program	: 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Kegiatan	: 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Juni s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 90.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100,00 persen	Capaian Program	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Waktu Pelaksanaan	: Juni s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**90.000.000,00**					**90.000.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**90.000.000,00**					**90.000.000,00**	**0,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**1.350.000,00**					**1.350.000,00**	**0,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**1.350.000,00**					**1.350.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**1.350.000,00**					**1.350.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**1.350.000,00**					**1.350.000,00**	**0,00**
	[#] Data IKM yang diupdate / dilakukan pendataan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.350.000,00**					**1.350.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					**1.350.000,00**					**1.350.000,00**	**0,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir (Pengeluaran/Kegiatan/Sub Kegiatan) Spesifikasi : Nilai pagu belanja yang dikelola di atas 100 juta s.d 250 juta	6 Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	1.350.000,00	6 Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	1.350.000,00	0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**88.650.000,00**					**88.650.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**14.920.000,00**					**14.920.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**14.920.000,00**					**14.920.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**630.000,00**					**630.000,00**	**0,00**
	[#] Data IKM yang diupdate / dilakukan pendataan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**630.000,00**					**630.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**252.000,00**					**252.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	112 Buah x 0.5625	buah	4.000,00	-	252.000,00	112 Buah x 0.5625	buah	4.000,00	-	252.000,00	0,00
	[-] Pendataan Industri Kecil Menengah (IKM)					**378.000,00**					**378.000,00**	**0,00**
	Ballpoint Spesifikasi : 1	112 Buah x 0.5625 %	buah	6.000,00	-	378.000,00	112 Buah x 0.5625 %	buah	6.000,00	-	378.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**3.052.000,00**					**3.052.000,00**	**0,00**
	[#] Data IKM yang diupdate / dilakukan pendataan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**3.052.000,00**					**3.052.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**100,00**					**100,00**	**0,00**
	Cetak dan Penggandaan Spesifikasi :	100 Rupiah	Rupiah	1,00	-	100,00	100 Rupiah	Rupiah	1,00	-	100,00	0,00
	[-] Pendataan Industri Kecil Menengah (IKM)					**3.051.900,00**					**3.051.900,00**	**0,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	10173 Lembar	lembar	300,00	-	3.051.900,00	10173 Lembar	lembar	300,00	-	3.051.900,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**792.000,00**					**792.000,00**	**0,00**
	[#] Data IKM yang diupdate / dilakukan pendataan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**792.000,00**					**792.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**792.000,00**					**792.000,00**	**0,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	4 Kali x 3 Meter	m x 90 cm	66.000,00	-	792.000,00	4 Kali x 3 Meter	m x 90 cm	66.000,00	-	792.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**852.000,00**					**852.000,00**	**0,00**
	[#] Data IKM yang diupdate / dilakukan pendataan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**852.000,00**					**852.000,00**	**0,00**
	[-] Pendataan Industri Kecil Menengah (IKM)					**852.000,00**					**852.000,00**	**0,00**
	Tanda Pengenal Pegawai Spesifikasi : Standart	112 Orang x 1 Buah x 0.169047619 %	buah	45.000,00	-	852.000,00	112 Orang x 1 Buah x 0.169047619 %	buah	45.000,00	-	852.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Data IKM yang diupdate / dilakukan pendataan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Topi Spesifikasi :	0 Orang x 1 Buah	Rupiah	1,00	-	0,00	0 Orang x 1 Buah	Rupiah	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**9.594.000,00**					**9.594.000,00**	**0,00**
	[#] Data IKM yang diupdate / dilakukan pendataan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**9.594.000,00**					**9.594.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**8.610.000,00**					**8.610.000,00**	**0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	210 Orang x 1 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	6.300.000,00	210 Orang x 1 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	6.300.000,00	0,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	210 Orang x 1 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	2.310.000,00	210 Orang x 1 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	2.310.000,00	0,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	12 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	720.000,00	12 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	720.000,00	0,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	12 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	264.000,00	12 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	264.000,00	0,00
	[#] Keg. Fasilitasi Kelembagaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	0 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	0,00	0 Orang x 2 Kali	Org/Kl	30.000,00	-	0,00	0,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	0 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	0,00	0 Orang x 2 Kali	Org/Kl	11.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**63.440.000,00**					**63.440.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**63.440.000,00**					**63.440.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**1.600.000,00**					**1.600.000,00**	**0,00**
	[#] Keg. Fasilitasi Kelembagaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**1.600.000,00**					**1.600.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**1.600.000,00**					**1.600.000,00**	**0,00**
	Honor Narasumber Ketua PKK Tingkat Kota Spesifikasi :	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	750.000,00	-	0,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	750.000,00	-	0,00	0,00
	Pakar/ Profesional/ Praktisi, dengan reputasi lokal Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kali x 0.8 %	OJ	1.000.000,00	-	1.600.000,00	1 Orang x 2 Kali x 0.8 %	OJ	1.000.000,00	-	1.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0023	**Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan**					**56.000.000,00**					**56.000.000,00**	**0,00**
	[#] Data IKM yang diupdate / dilakukan pendataan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**56.000.000,00**					**56.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pendataan Industri Kecil Menengah (IKM)					**56.000.000,00**					**56.000.000,00**	**0,00**
	Jasa Pewawancara Responden Survey Spesifikasi :	5600 Kali	Orang / Kali	10.000,00	-	56.000.000,00	5600 Kali	Orang / Kali	10.000,00	-	56.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**240.000,00**					**240.000,00**	**0,00**
	[#] Data IKM yang diupdate / dilakukan pendataan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**240.000,00**					**240.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Caraka					**240.000,00**					**240.000,00**	**0,00**
	Banpot caraka Spesifikasi :	3 Orang x 2 Kali	kali	40.000,00	-	240.000,00	3 Orang x 2 Kali	kali	40.000,00	-	240.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0046	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**					**5.600.000,00**					**5.600.000,00**	**0,00**
	[#] Data IKM yang diupdate / dilakukan pendataan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**5.600.000,00**					**5.600.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					**5.600.000,00**					**5.600.000,00**	**0,00**
	Entry Data Spesifikasi :	5600 Kali x 0.5 %	Per Sampel	2.000,00	-	5.600.000,00	5600 Kali x 0.5 %	Per Sampel	2.000,00	-	5.600.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**10.290.000,00**					**10.290.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**10.290.000,00**					**10.290.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**7.290.000,00**					**7.290.000,00**	**0,00**
	[#] Kegiatan Updating Data Industri **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**7.290.000,00**					**7.290.000,00**	**0,00**
	[-] Pendataan Industri Kecil Menengah (IKM)					**7.290.000,00**					**7.290.000,00**	**0,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	3 Orang x 27 Kelurahan x 3 Kali	Orang / Hari	30.000,00	-	7.290.000,00	3 Orang x 27 Kelurahan x 3 Kali	Orang / Hari	30.000,00	-	7.290.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**3.000.000,00**					**3.000.000,00**	**0,00**
	[#] Data IKM yang diupdate / dilakukan pendataan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**3.000.000,00**					**3.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pendataan Industri Kecil Menengah (IKM)					**3.000.000,00**					**3.000.000,00**	**0,00**
	Bantuan Transport untuk masyarakat peserta sosialisasi/rapat koordinasi Spesifikasi : -	60 Orang x 1 Kali	Hari	50.000,00	-	3.000.000,00	60 Orang x 1 Kali	Hari	50.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**90.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**90.000.000,00**	**0,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program	: 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Kegiatan	: 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: September s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.380.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100,00 persen	Capaian Program	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100,00 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.380.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.380.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen
Hasil	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan	30 persen	Hasil	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan	30 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
Waktu Pelaksanaan	: September s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**4.380.000,00**					**4.380.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**4.380.000,00**					**4.380.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**4.380.000,00**					**4.380.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**2.940.000,00**					**2.940.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**2.940.000,00**					**2.940.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**480.000,00**					**480.000,00**	**0,00**
	[#] ASB 001 - Diseminasi, Publikasi Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**480.000,00**					**480.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**480.000,00**					**480.000,00**	**0,00**
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	1600 Lembar	lembar	300,00	-	480.000,00	1600 Lembar	lembar	300,00	-	480.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] ASB 001 - Diseminasi, Publikasi Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Spanduk Standard Spesifikasi : huruf standard, warna menyesuaikan	0 Buah x 3 Meter	m x 90 cm	66.000,00	-	0,00	0 Buah x 3 Meter	m x 90 cm	66.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**2.460.000,00**					**2.460.000,00**	**0,00**
	[#] ASB 001 - Diseminasi, Publikasi Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**2.460.000,00**					**2.460.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**1.640.000,00**					**1.640.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	40 Orang	Org/Kl	30.000,00	-	1.200.000,00	40 Orang	Org/Kl	30.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	40 Orang	Org/Kl	11.000,00	-	440.000,00	40 Orang	Org/Kl	11.000,00	-	440.000,00	0,00
	Jamuan makan (perseorangan) Spesifikasi :	10 Orang x 2 Hari	Org/Kl	30.000,00	-	600.000,00	10 Orang x 2 Hari	Org/Kl	30.000,00	-	600.000,00	0,00
	Jamuan minum dan makanan kecil Spesifikasi :	10 Orang x 2 Hari	Org/Kl	11.000,00	-	220.000,00	10 Orang x 2 Hari	Org/Kl	11.000,00	-	220.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**540.000,00**					**540.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**540.000,00**					**540.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**500.000,00**					**500.000,00**	**0,00**
	[#] ASB 001 - Diseminasi, Publikasi Data **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**500.000,00**					**500.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**500.000,00**					**500.000,00**	**0,00**
	Honor Narasumber, Penceramah, Pengkaji, dan Pembahas dalam Rangka Seminar/Workshop/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Rakor/ Diseminasi/ FGD/ Musrenbang/ Kegiatan sejenis. Spesifikasi : Staf (Honor Narasumber hanya diberikan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD d...	1 Orang	Orang / Kegiatan	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang	Orang / Kegiatan	500.000,00	-	500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0032	**Belanja Jasa Tenaga Caraka**					**40.000,00**					**40.000,00**	**0,00**
	[#] ASB 001 - Diseminasi, Publikasi Data **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**40.000,00**					**40.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Caraka					**40.000,00**					**40.000,00**	**0,00**
	Banpot caraka Spesifikasi :	1 Orang	kali	40.000,00	-	40.000,00	1 Orang	kali	40.000,00	-	40.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**900.000,00**					**900.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**900.000,00**					**900.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**900.000,00**					**900.000,00**	**0,00**
	[#] ASB 001 - Diseminasi, Publikasi Data **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**900.000,00**					**900.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					**900.000,00**					**900.000,00**	**0,00**
	Transport lokal (perjalanan kurang dari 8 jam) Spesifikasi : Diberikan untuk kegiatan verifikasi/monitoring/evaluasi lapangan, APBD maks 8 kali per bulan kecuali pegawai luar Pemkot DAK maks 16 kali	3 Orang x 10 Kali	Orang / Hari	30.000,00	-	900.000,00	3 Orang x 10 Kali	Orang / Hari	30.000,00	-	900.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**4.380.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**4.380.000,00**	**0,00**

Kota Pekalongan,.....
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 196902031998032004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	NURPRIYANTOMO, S.E., M.M.	196903101996031002	KETUA	
2	SOESILO, S.H.	196506221994031007	WAKIL KETUA	
3	JOKO PURNOMO, S.T	196711091996031002	WAKIL KETUA	
4	drg. AGUST MARHAENDAYANA, M.M.	196508141992031005	WAKIL KETUA	
5	Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc	196507171992032014	SEKRETARIS	
6	CAYEKTI WIDIGDO ,A.P., M.Si	197507291994121001	SEKRETARIS	
7	SLAMET MULYADI, S.ST.	197502031996031002	ANGGOTA	
8	ADAM MUHAMAD ,S.H.	197904072009021004	ANGGOTA	
9	NUR SOBAH.S.Sos.M.M	197210131996032004	ANGGOTA	

PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

PERUBAHAN RENJA
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

Alamat : Jl. Mataram No. 1 Kota Pekalongan
Telepon : (0285) 421091 - 421093 Ps. 120
Fax : (0285) 424061 - 420914

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat disajikan untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi dari masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 ini pada hakikatnya merupakan fundamental dalam sistem perencanaan daerah. Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Perubahan Renja digunakan Perangkat Daerah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 ini, diharapkan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan mampu mewujudkan peningkatan pelayanan yang professional, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH

NUR PRIYANTOMO, S.E, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19690310 199603 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 6

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi..... 6
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan 8
2.3. Evaluasi Renja Triwulan II 9
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 37

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 51

BAB IV PENUTUP 61

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD..... 10

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 15

DAFTAR GAMBAR

Halaman

2.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendaian, daan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai ketentauan dalam pasal 363, pasal 364 dan pasal 367 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat kami sampaikan hal sebagai berikut :

(1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.

(2) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

(3) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.

(4) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

(5) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(6) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun berdasarkan evaluasi perkembangan keadaan dalam 1 (satu) tahun berjalan. Perkembangan sebagaimana dimaksud adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan / atau keadaan darurat .

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 No3);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 22).

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2024 Sekretariat Daerah Kota Pekalongan adalah sebagai pedoman penyusunan Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Serta memberikan informasi kondisi riil organisasi beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah melakukan evaluasi dan menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka kegiatan sehingga tercipta sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.

1.3.2 Tujuan

1) Penyesuaian anggaran kegiatan untuk memenuhi kebutuhan selama satu tahun sehingga anggaran lebih efisien, lebih efektif, tepat sasaran, tepat waktu dan akuntabel berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah;
2) Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga merupakan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta dasar perencanaan program dan kegiatan

mendatang sehingga dapat mengakomodir semua aspirasi masyarakat / kebutuhan dinas yang dinamis.

3) Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam rangka pencapaian Visi Misi Walikota Pekalongan Tahun 2021 – 2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi,dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, Tugas Sekretariat Daerah Kota Pekalongan adalah membantu Walikota Pekalongan dalam melaksanakan tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah Kota Pekalongan mempunyai fungsi:

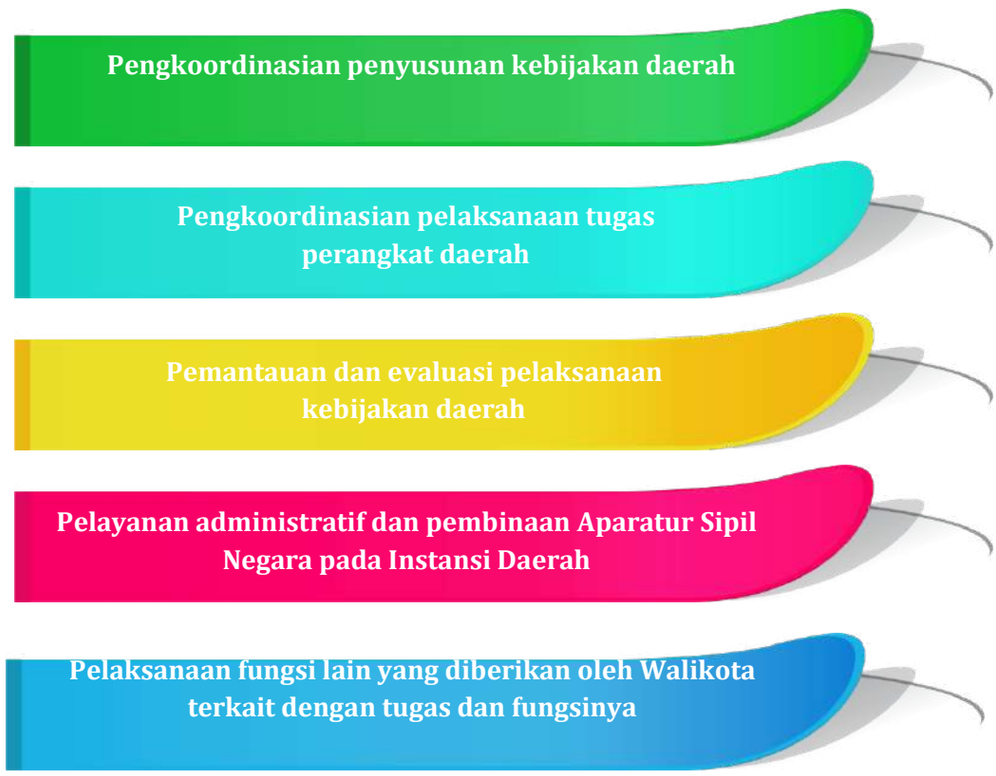

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan

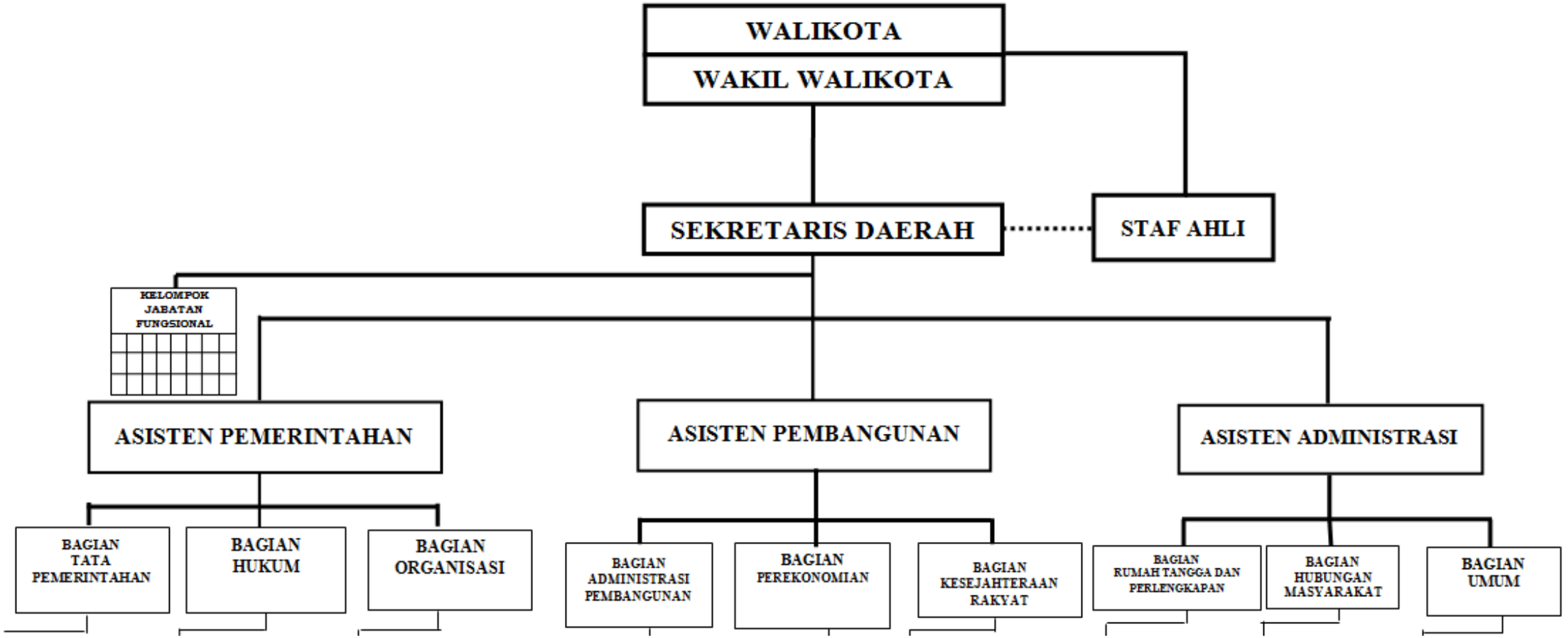

2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program, kegiatan maupun sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan Refocusing Anggaran dan Realokasi APBD;
2. Perlu adanya penyesuaian perubahan target indikator sub kegiatan;
3. Perubahan aplikasi penatausahaan keuangan, sehingga perlu menambah SDM baru.
4. Inflasi, perubahan standarisasi dan perubahan regulasi terkait perpajakan (kenaikan PPN);
5. Penerapan aturan pengadaan barang / jasa yang menerapkan *e-catalog* local, sementara adanya keterbatasan penyedia lokal yang memenuhi syarat KBLI yang sesuai;
6. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dan rusak, sementara keterbatasan anggaran untuk perbaikan; dan
7. Percepatan pencapaian target visi dan misi Walikota.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa ***isu strategis*** yang menjadi rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang berjalan ataupun perencanaan untuk program/ kegiatan tahun depan yakni:

1) Membuat kertas kerja renval untuk memilah program kerja dan kegiatan berdasarkan tingkat urgensitas, sehingga bisa diketahui apakah ada beberapa kegiatan yang bisa ditunda atau ditiadakan.

2) Mengkaji ulang beberapa usulan dari OPD terkait permintaan fasilitasi pengadaan Sarana dan Prasarana.

3) Melakukan pemetaan atau *mapping* standarisasi indikator yang baru yang sudah sesuai dengan peraturan kemendagri terbaru.

4) Melakukan rapat internal untuk menindaklanjuti aturan terkait penerapan *e-catalog* lokal dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
5) Melakukan optimalisasi anggaran agar sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat di awal tahun anggaran.
6) Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi penatausahaan yang baru di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.
7) Berkoordinasi dengan pengurus barang di Sekretariat Daerah terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang masih layak atau tidak layak untuk mendukung kinerja dalam mewujudkan percepatan pencapaian visi dan misi Walikota.

2.3 Evaluasi Renja Triwulan II

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Semester II.

Hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Pekalongan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi s.d. TW II	Catatan
1	2	3	4	5	6
Sasaran					
Nilai SAKIP SETDA		89,00	Indeks	n/a	Penilaian SAKIP OPD TA 2024 akan dilakukan di akhir TA 2024
Persentase Capaian Kinerja Pembangunan		94	Persen	n/a	Data belum bisa diolah / dihitung
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	Persen	30,56	
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	34,87	
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100	Persen	24,01	
	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	Persen	21,74	
	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100	Persen	0,72	

	Persentase pelayanan keprotokoleran	**100**	**Persen**	**100**	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**11,11**	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	0	Penyusunan Dokumen Renja Penetapan TA 2025 dan Renja Perubahan TA 2024 akan dilaksanakan pada triwulan III
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	0	Penyusunan dokumen RKA TA 2025 akan dilaksanakan pada triwulan IV
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan	5	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**50,00**	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110	Orang	0	Realisasi akan dicatatkan pada triwulan IV
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96	Dokumen	48	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD TA 2023 sudah dilaksanakan pada triwulan I
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**0**	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	0	Pengadaan Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan akan dilakukan pada triwulan IV
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**54,60**	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	2	

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4	Seluruh paket pengadaan sudah dilaksanakan pada triwulan II
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	2	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	2	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	1	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Paket	1	
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	2	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000	Laporan	1.103	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**50,00**	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	2	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	6	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	6	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**Persen**	**24,01**	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70	Unit	25	

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	Unit	0	Realisasi akan dicatatkan pada triwulan IV
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	190	Unit	69	
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan dan operasional kepala daerah**	**100**	**Persen**	**0**	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang	0	Realisasi akan dicatatkan pada triwulan IV
Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	Kali	0	Pelaksanaan MCU KDH dan WKDH belum bisa terlaksana karena padatnya jadwal kerja pimpinan
Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah**	**100**	**Persen**	**50**	
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket	6	
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket	6	
Kegiatan Penataan Organisasi	**Indeks kelembagaan kota**	**79**	**Indeks**	**79,58**	**Menggunakan skor indeks kelembagaan OPD terakhir tahun 2023**
Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	Dokumen	2	Dokumen Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Saat ini sedang dalam proses penyusunan draf Peta Jabatan Kota Pekalongan tahun 2024

Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	Laporan	0	Saat ini sedang dalam persiapan PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik) tahun 2024 - untuk persiapan penyusunan Laporan hasil fasilitasi pelayanan publik (terkait: Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik - tahun ini ditiadakan lebih fokus ke PKRI - Pemantauan dan keberlanjutan replikasi inovasi, Standar Pelayanan (dinsos P2KB, Dindik, RSUD Bendan) dan SKM)
Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	35	Dokumen	31	1 dokumen LkjIP Kota Pekalongan TA 2023 dan 30 Laporan capaian kinerja OPD
Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase ketercapaian kinerja fasilitasi keprotokolan, komunikasi tugas pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan**	**100**	**Persen**	**53,58**	
Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	Laporan	6	
Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	191	Laporan	116	
Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Laporan	6	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif**	**100**	**Persen**	**11,11**	
	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	**100**	**Persen**	**56**	
	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	**100**	**Persen**	**100**	
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Persentase Capaian Kinerja Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum**	**100**	**Persen**	**42,77**	

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	9	Dokumen	1	
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	21	Kasus	3	
Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1.000	Dokumen	1.029	TW I: 814 SK Wali Kota, 13 Perwal, 7 SE Wali Kota TW II: 191 SK Wali Kota, 3 Perwal, 1 SE Wali Kota
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase capaian kinerja bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat**	**100**	**Persen**	**42,66**	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	76	Dokumen	36	TW I: 1 Guru TPQ, 1 Guru Madin, 1 Kyai, 1 Takmir masjid, 1 Takmir musholla, 1 Lebe, 1 MTQ tingkat Kota, 1 MTQ Kec, 1 Isra Miraj, 1 Fasilitasi BPIH TW II: 2 PHBI, 22 Hibah, 1 Haji, 1 Bimtek TPQ
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	22	Dokumen	9	TW I: Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan untuk takmir musolla dan Lebe non PNS (2 dokumen Februari dan Maret) TW II: 3 dokumen Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan untuk takmir musholla dan lebe non pns (April, Mei, Juni); 4 dokumen Bansos beras untuk Ponpes (Maret - Juni)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	68	Dokumen	27	TW I: (1) Khotmil Quran hari jadi, (1) Haul Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib al-Athos, (3) Fasilitasi BP4, (5) Senam bersama masyarakat TW II: 1 Istighosah Hari Jadi; 3 Fasilitasi BP4; 11 Senam bersama masyarakat; 2 Pengajian rutin

Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase capaian kinerja penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah**	**100**	**Persen**	**77,78**	
Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	Dokumen	1	Terealisasinya penyusunan dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal
Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3	Dokumen	1	Tersusunnya dokumen monografi
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2	Dokumen	2	Terealisasinya penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ
Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	**Persentase efektivitas kerja sama daerah**	**100**	**Persen**	**15**	
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20	Dokumen	3	Kerja Sama (MoU) dengan UNNES Semarang tentang Kerja Sama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembangunan Kota Pekalongan. Dengan STMIK WIDYA PRATAMA Pekalongan tentang Kerja Sama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembangunan Kota Pekalongan. Dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta tentang Pengembangan Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi kreatif.
Program Perekonomian dan Pembangunan	**Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)**	**6**	**Persen**	**n/a**	**Sumber data belum bisa disediakan oleh aplikasi SIPD**
	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	**100**	**Persen**	**55,56**	**20 pengadaan (tender/seleksi) akan dilaksanakan pada TW III dan IV**
	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	**100**	**Persen**	**41,67**	
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD**	**100**	**Persen**	**100**	

Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2	Laporan	1	Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan yang telah disusun yaitu 1 Laporan
Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2	Laporan	1	Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang telah disusun yaitu 1 laporan
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan**	**100**	**Persen**	**55,56**	
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	Dokumen	2	
Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4	Dokumen	2	
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil**	**100**	**Persen**	**0**	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	Dokumen	0	Akan tercapai di Triwulan IV - BUMD yang dimonitoring : ada 4, yaitu PT BPR Bank Pekalongan, PT BPR BKK Jateng Pekalongan, PT BPR BKK Kota Pekalongan, Perumda Tirtayasa (terkait laporan keuangan) --> dilakukan setiap bulan - BLUD yang dimonitoring : ada 16 yaitu RSUD Bendan, Puskesmas di Pekalongan, UPTD BPSJ (terkait laporan keuangan) --> dilakukan setiap triwulan
Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	Laporan	0	Akan tercapai di Triwulan IV - Monev Penyedia Gas Elpiji : 6 penyedia - Monev Penyedia Pupuk : 4 penyedia - Rakor Pengendalian Inflasi : sudah pelaksanaan di TW I selama 3 bulan - Rakor Bidang Ekonomi : dilakukan pada menjelang lebaran dan tahun baru (sudah terlaksana 1 kali pada tanggal 27 Maret)

Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	Dokumen	0	Akan tercapai di Triwulan IV - barang cetak kegiatan aktivasi dan publikasi branding : belum ada - Rakor TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) : target 6, sudah terlaksana 1 - Rakor Monev Pemantauan Pengelolaan KUR : terlaksana 1 kali
Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Jumlah Bulan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bersumber dari DBHCHT**	**12**	**Bulan**	**6**	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1	Dokumen	0	Akan tercapai di Triwulan IV - Monev OPD pengelola DBHCHT dilakukan tiap bulan: Dinkes, Dinperinaker, Satpol P3KP, Dinsos P2KB, Dinparbudpora, Dinkominfo

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah untuk sisa tahun berjalan diproyeksikan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Tabel Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2024

No.	Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2024				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp .000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	34.798.302	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	56.851	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.842	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.009	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	52.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	15.016.198	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang	14.773.886	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	240.450	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.862	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	82.337	
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	82.337	

No.	Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2024				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp .000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%	10.442.239	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	70.000	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.380.258	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	144.500	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.429.627	
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	101.961	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	77.400	
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.685.258	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3000 Laporan	5.553.235	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	2.656.350	
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	27.600	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.139.000	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.489.750	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	4.252.608	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	74 Unit	1.800.356	

No.	Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2024				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp .000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	Dinas Jabatan				
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	2.061.552	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	190 Unit	390.700	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan dan operasional kepala daerah	100%	891.719	
22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	851.719	
23	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	40.000	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	100%	1.440.000	
24	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	840.000	
25	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	600.000	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	100%	716.807	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Kinerja Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100%	716.807	
26	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	9 Dokumen	183.657	
27	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	21 Kasus	416.259	
28	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang	1.500 Dokumen	116.891	

No.	Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2024				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp .000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
		Didokumentasi			
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	17.957.329	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kinerja bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100%	17.957.329	
29	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	92 Dokumen	16.764.265	
30	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	22 Dokumen	391.230	
31	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	68 Dokumen	891.834	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100%	317.453	
	Penataan Organisasi	Indeks Kelembagaan Kota	78/100	317.453	
32	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	91.396	
33	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	139.367	
34	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	46 Dokumen	96.690	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	6%	76.626	
	Pelaksanaan Administrasi	Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan	100%	76.626	

No.	Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2024				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp .000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan	APBD			
35	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	37.450	
36	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	39.176	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	100%	570.560	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan	100%	570.560	
37	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	203.020	
38	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	367.540	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100%	702.223	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase capaian kinerja penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	100%	582.549	
39	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	74.770	
40	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	260.428	
41	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	247.351	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase efektivitas kerja sama daerah	100%	119.674	
42	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	119.674	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	100%	356.263	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan	100%	271.263	

No.	Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2024				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp .000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
		Distribusi Perekonomian dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			
43	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	57.000	
44	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	117.360	
45	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	96.903	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Bulan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bersumber dari DBHCHT	12 bulan	85.000	
46	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	85.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	Persentase pelayanan keprotokoleran	100%	1.482.330	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase ketercapaian kinerja fasilitasi keprotokolan, komunikasi tugas pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan	100%	1.482.330	
47	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	277.400	
48	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	191 Laporan	877.186	
49	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	327.744	

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman, acuan, dan tujuan penyelenggaraan pembangunan, dan keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024. Beberapa hal yang mendasari dilaksanakannya perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 antara lain:

1. Adanya kebijakan *Refocussing* Anggaran, Rasionalisasi, dan Realokasi APBD TA 2024.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun sebagai upaya untuk merespon kebutuhan dari berbagai aspek kebutuhan yang bersifat mendesak.

Dengan adanya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024, diharapkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan selaras dengan Visi dan Misi Wali Kota Pekalongan dan mampu meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN

NUR PRIYANTOMO, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690310 199603 1 002

DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN

SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKALONGAN

Jl. Mataram No. 3 Pekalongan 51111

Telepon (0285) 421984 email : setwan@pekalongankota.go.id

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 000.7.2.4/ TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN,

Menimbang :

a. bahwa penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun sekaligus merupakan komitmen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diterbitkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tentang Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang –

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – kota Besar dan Kota – kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);

10. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

Pasal 1

(1) Dalam Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DAerah Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah;

(2) Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2021-2026.

Pasal 2

Sistematika RENJA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023, meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

Pasal 3

RENJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 5

Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 8 Agustus 2024.

Sekretaris DPRD Kota Pekalongan

WIDARJANTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660424 199603 1 002

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2024

SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini merupakan proses Penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 ini pada hakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya Sekretariat DPRD Kota Pekalongan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta sarana evaluasi atas pencapaian kinerjanya dengan memperhatikan kriteria komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja.

Pekalongan, Agustus 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA PEKALONGAN

WIDARJANTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660424 199603 1 002

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	2
	1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II.	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel.C.29)	11
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel.T- C.30)	15
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31) .	22
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel.T-C.32) .	22
BAB III.	TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024	24
	3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 (Tabel.T-C.33)	24
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
BAB V.	PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

1. Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) Kota Pekalongan 12

2. Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Daerah Kota Pekalongan 12

3. Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Pekalongan.

4. Tabel T-C.32 Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pekalongan.

5. Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pekalongan

/

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untukmenyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedomankerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi kinerja/pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh dan dilaksanakan secara transparan dan berkesinambungan.

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai sebuah dokumen perencanan Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka Menengah daerah (RPJMD) dan Resntra Daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Renja Perangkat Daerah/RKT merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program,dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Renja disyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PerangkatDaerah.

Kedudukan Renja Perangkat Daerah ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dimaksudkan sebagai tolok ukur dalam menghitung keberhasilan organisasi Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Pekalongan yang akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Pekalongan pada akhir tahun anggaran. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan renja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan tahun 2023 adalah sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerntah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2024, adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dalam menentukan prioritas program/kegiatan dan kebijakan anggaran tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Sekretariat DPRD, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Pedoman Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Tahun 2024;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
5. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah dan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip- prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan

3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berdasarkan pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan yang disajikan dalam tabel pengukuran kinerja kegiatan, maka untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, dilakukan evaluasi dan analisis efisiensi dan efektivitas pengukuran kinerja setiap indikator kinerja kegiatan, agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, tingkat efisiensi yang dilakukan dan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak dalam rangka perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dan strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 Kota Pekalongan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 terlampir pada tabel berikut :

Tabel C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Pekalongan s.d. Semester I Tahun 2024

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2023)	Realisasi 2023	Target 2024		Realisasi Capaian RPJMD sd Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Realisasi 2024			
	SEKRETARIAT DPRD									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Persentase Ketersediaan laporan capaian kinerja	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**		**tercapai**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**		**tercapai**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	**100**	**100**	**100**	**66,67**	**66,67**		**Tidak tercapai**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**		**Tidak tercapai**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									

	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	**100**	**100**	**100**	**58,40**	**58,40**		**tercapai**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**Tidak tercapai**
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**		**Tidak tercapai**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinatahan Daerah									
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	**100**	**100**	**100**	**42,79**	**42,79**		**Tidak tercapai**
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD									
	Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD									
	Persentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persen	100	**100**	**100**	**100**	**33,33**	**33,33**		**Tidak tercapai**
	Layanan Adminstrasi DPRD									
	Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD	persen	100	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**		**Tidak tercapai**
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									
	Persentase Perda yang ditetapkan									
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD									

	Persentase ketercapaian pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	persen	100	**100**	**75**	**100**	**18,75**	**18,75**		**Tidak tercapai**
	Pembahasan Kebijakan Anggaran									
	Persentase Pembahasan kebijakan anggaran	Persen	100	**100**	**100**	**100**	**20**	**20**		**Tidak tercapai**
	Peningkatan KApasitas DPRD									
	Persentase ketercapaian peningkatan kapasitas DPRD	**persen**	**100**	**100**	**114,29**	**100**	**82,86**	**82,86**		**Tidak tercapai**
	Penyerapana dan penghimpunan aspirasi masyarakat									
	Persentase ketercapaian penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	**persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**		**tercapai**
	Fasilitasi Tugas DPRD									
	Persentase ketercapaian pelaksanaan tugas DPRD	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**		**tercapai**

Berdasarkan Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Semester II Tahun 2024 Kota Pekalongan, bahwa tingkat pencapaian kinerja setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2024, sebagai berikut :

I. Kesimpulan Capai Berdasarkan Aspek Indikator Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 (empat) indikator program sebagai berikut:

   a. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

   b. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

   c. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah

   d. Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD

   Tujuan strategis 4 (empat) indikator tersebut adalah meningkatnya layanan masyarakat dan akuntabilitas kinerja. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan sasaran strategis dan IKU dari keempat indikator tersebut adalah Nilai SAKIP OPD.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 2 (dua) indikator program sebagai berikut:

   a. Persentase Peraturan Daerah yang ditetapkan

   b. Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan

Analisis efisiensi dan efektivitas pengukuran kinerja setiap indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 yang menunjukkan peran utama dan kontribusi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dalam mendukung tercapaiannya Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu "**Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri, dan Religius**".

Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi yang dilakukan dan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi, serta penentuan penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Untuk memudahkan dalam melakukan analisis capaian kinerja setiap sasaran kinerja, berikut gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output dapat dilihat pada Tabel. T-C.30 berikut :

No	Indikator Kegiatan	SPM/ Standar	I K K	Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	SPM		100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
	Persentase ketercapaian admini-strasi keuangan perangkat daerah	SPM		100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
	Persentase ketercapaian admini-strasi kepegawaian perangkat daerah	SPM		100%	100%	100%	100%	0%	100%	N/A	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
	Persentase Ketercapaian Admini-strasi umum perangkat daerah	SPM		100%	100%	100%	100%	**132,38**	100%	N/A	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
	Persentase ketercapaian penye-diaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	SPM		100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum

												Terealisasikan
	Persentase ketercapaian pemeli-haraan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	SPM		100%	100%	100%	100%	**102,08 %**	100%	N/A	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
	Persentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	SPM		100%	100%	100%	100%	**75%**	100%	N/A	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
	Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD	SPM		100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
	Persentase ketercapaian pemben-tukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	SPM		100%	100%	100%	100%	100%	75%	N/A	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	SPM		100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
	Persentase ketercapaian	SPM		100%	100%	100%	100%	**128,75**	114,29%	N/A	100%	Belum Tercapai,

	pening-katan kapasitas DPRD											Kegiatan Belum Terealisasikan
	Persentase ketercapaian penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	SPM		100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan
	Persentase ketercapaian pelaksanaan tugas DPRD	SPM		100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	Belum Tercapai, Kegiatan Belum Terealisasikan

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Berdasarkan Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, realisasi capaian kinerja Tahun 2023 sebagian besar dalam skala diatas 95% dengan kategori sangat tinggi / sangat berhasil.

Ketercapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah tercapai sangat tinggi / sangat berhasil disebabkan karena beberapa faktor antara lain:

a. Perencanaan anggaran disusun dengan lebih baik sehingga terjadi peningkatan realisasi kinerja.

b. Pelaksanaan kegiatan yang dapat dilaksanakan tepat waktu

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKALONGAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Pekalongan tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
2. Perlunya manajemen resiko dalam menghadapi kemungkinan penanganan masalah yang timbul akibat ketidakpahaman publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah;
3. Penguatan regulasi dan perbaikan celah-celah regulasi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat memperkuat proses perencanaan dan pembinaan yang semakin mengedepankan asas value for money;
4. Maturitas organisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah belum diimbangi dengan bertambahnya tingkat layanan terstandar pada unit penunjang teknologi informasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat;
5. Perlunya optimalisasi pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kota Pekalongan;

6. Mengoptimalkan koordinasi dan pelayanan dalam semua pelaksanaan kegiatan;
7. Peningkatan pelayanan Sistem Informasi Peminjaman Ruang Rapat Paripurna agar dapat diakses oleh semua OPD dan masyarakat dengan baik;
8. Optimalisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
9. Perlu digitalisasi register surat dinas di Sekretariat DPRD.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 melalui rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target capaian / tolok ukur, dan besaran dana / pagu yang dibutuhkan, review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Pekalongan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp .000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp .000)	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja 2.Persentase ketersediaan layanan adm kepegawaian, adm umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 3.Persentase ketersediaan layanan keuangan dan	100% 100% 100%	35.277.328	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja 2.Persentase ketersediaan layanan adm kepegawaian, adm umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 3.Persentase ketersediaan layanan keuangan dan	100% 100% 100%	35.277.328	

			kesejahteraan DPRD 4.Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	100%				kesejahteraan DPRD 4.Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	100%		
	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100%**	**16.500**	**Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100%**	**16.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	7.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	2.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	1.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	1.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 bulan 4 dok 2 dok 1 dok 5 dok	8.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 bulan 4 dok 2 dok 1 dok 5 dok	12.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase ketersediaan layanan adm kepegawaian, adm umum dan jasa penunjang**	**100%**	**3.183.992**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua**	**Persentase ketersediaan layanan adm kepegawaian, adm umum dan jasa penunjang**	**100%**	**3.176.192**	

			urusan pemerintah daerah				**Kelurahan**	**urusan pemerintah daerah**			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan daerah	100%	3.112.092	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan daerah	100%	3.112.092	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan daerah	100%	70.400	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan daerah	100%	62.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	1.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	1.500	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase ketersediaan layanan adm kepegawaian, adm umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**9.500**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase ketersediaan layanan adm kepegawaian, adm umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**9.500**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	9.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		9.500	
	Administrasi	**Kota**	**Persentase ketersediaa**	**100%**	**2.709.662**	**Administrasi**	**Kota**	**Persentase ketersediaa**		**2.714.082**	

	Umum Perangkat Daerah	**Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**n layanan adm kepegawaian, adm umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**			**Umum Perangkat Daerah**	**Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**n layanan adm kepegawaian, adm umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian admini-strasi umum perangkat daerah	100%	25.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian admini-strasi umum perangkat daerah		24.450	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian admini-strasi umum perangkat daerah	12 bulan 27 unit	255.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian admini-strasi umum perangkat daerah	12 bulan 27 unit	259.125	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian admini-strasi umum perangkat daerah	100%	25.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian admini-strasi umum perangkat daerah	100%	7.200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian admini-strasi umum perangkat daerah	100%	627.162	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian admini-strasi umum perangkat daerah	100%	643.182	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Persentase ketercapaian admini-strasi umum perangkat daerah	100%	142.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Persentase ketercapaian admini-strasi umum perangkat daerah	100%	141.225	

		Kelurahan					Kelurahan				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian admini-strasi umum perangkat daerah	100%	35.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian admini-strasi umum perangkat daerah	100%	35.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian admini-strasi umum perangkat daerah	100%	300.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian admini-strasi umum perangkat daerah	100%	300.000	
	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian admini-strasi umum perangkat daerah	100%	1.300.000	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian admini-strasi umum perangkat daerah	100%	1.303.900	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase ketersediaan layanan adm kepegawaian, adm umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**894.965**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase ketersediaan layanan adm kepegawaian, adm umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**941.189**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.800	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kota Pekalongan,	Persentase ketercapaian jasa	100%	200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kota Pekalongan,	Persentase ketercapaian jasa	100%	198.625	

	Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	penunjang urusan pemerintah daerah			Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	penunjang urusan pemerintah daerah			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	693.165	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	740.764	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang**	**100%**	**1.428.752**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang**	**100%**	**2.419.100**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian pemeliha-raan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	908.752	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian pemeliha-raan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.060.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian pemeliha-raan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daera	100%	400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian pemeliha-raan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daera	100%	1.250.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Kota Pekalongan, Semua	Persentase ketercapaian pemeliha-raan barang	100%	120.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Kota Pekalongan, Semua	Persentase ketercapaian pemeliha-raan barang	100%	119.100	

	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan, Semua Kelurahan	milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan, Semua Kelurahan	milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase ketersediaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**100%**	**18.871.823**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase ketersediaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**100%**	**25.002.915**	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	17.841.823	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	23.900.000	
	Penyediaan Pakaian dinas dan atribut DPRD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	500.000	Penyediaan Pakaian dinas dan atribut DPRD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	570.725	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	530.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100%	532.190	
	Layanan Administrasi DPRD	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase ketersediaan layanan administrasi DPRD**	**100%**	**1.000.000**	**Layanan Administrasi DPRD**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase ketersediaan layanan administrasi DPRD**	**100%**	**998.250**	
	Fasilitasi RApat	Kota	Persentase ketersediaa	100%	400.000	Fasilitasi RApat	Kota	Persentase ketersediaa	100%	398.250	

	Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	n layanan administrasi DPRD			Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	n layanan administrasi DPRD			
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan layanan administrasi DPRD	100%	600.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan layanan administrasi DPRD	100%	600.000	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**1.Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu** **2.Persentase perda yang ditetapkan**	**100%** **100%**	**19.423.906**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**3.Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu** **Persentase perda yang ditetapkan**	**100%** **100%**	**19.075.447**	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase perda yang ditetapkan**	**100%**	**8.300.000**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase perda yang ditetapkan**	**100%**	**8.183.720**	
	Pembahasan RAncangan Peraturan Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	100%	3.000.000	Pembahasan RAncangan Peraturan Daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	100%	2.983.720	
	Penyelenggaran Kajian Perundang-undangan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	100%	5.300.000	Penyelenggaran Kajian Perundang-undangan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Persentase ketercapaian pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	100%	5.200.000	

							Kelurahan				
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu**	**100%**	**408.849**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu**	**100%**	**412.360**	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fasilitasi pembahasan KUA PPAS	2 kali	150.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fasilitasi pembahasan KUA PPAS	2 kali	150.000	
	Pembahasan APBD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pembahasan APBD yang dilaksanakan	2 kali	150.000	Pembahasan APBD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pembahasan APBD yang dilaksanakan	2 kali	150.000	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pembahasan pertanggungjawaban APBD yang difasiltasi	1 kali	108.849	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pembahasan pertanggungjawaban APBD yang difasiltasi	1 kali	112;360	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase perda yang ditetapkan**	**100%**	**3.150.000**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase perda yang ditetapkan**	**100%**	**2.914.310**	
	Pendalaman Tugas DPRD	Kota Pekalongan, Semua	Persentase ketercapaian pening-katan	100%	2.000.000	Pendalaman Tugas DPRD	Kota Pekalongan, Semua	Persentase ketercapaian pening-katan	100%	1.815.010	

		Kecamatan, Semua Kelurahan	kapasitas DPRD				Kecamatan, Semua Kelurahan	kapasitas DPRD			
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian pening-katan kapasitas DPRD	100%	800.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian pening-katan kapasitas DPRD	100%	799.750	
	Penyelenggaraan Hubungan MAsyarakat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian pening-katan kapasitas DPRD	100%	300.000	Penyelenggaraan Hubungan MAsyarakat	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian pening-katan kapasitas DPRD	100%	249.550	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian pening-katan kapasitas DPRD	100%	50.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian pening-katan kapasitas DPRD	100%	50.000	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase perda yang ditetapkan**	**100%**	**1.700.000**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase perda yang ditetapkan**	**100%**	**1.700.000**	
	Kunjungan Kerja dalam daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	300.000	Kunjungan Kerja dalam daerah	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	300.000	
	Pelaksanaan Reses	Kota	Persentase ketercapaia	100%	1.400.000	Pelaksanaan Reses	Kota	Persentase ketercapaia	100%	1.400.000	

		Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	n kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat				Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	n kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat			
	Fasilitasi Tugas DPRD	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase perda yang ditetapkan**	**100%**	**5.865.057**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase perda yang ditetapkan**	**100%**	**5.865.057**	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian Fasilitasi tugas DPRD	100%	5.865.057	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian Fasilitasi tugas DPRD	100%	5.865.057	

Secara keseluruhan, beberapa sub kegiatan mengalami perubahan dikarenakan adanya refocusing kegiatan. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah besarannya berbeda dengan rancangan awal karena kegiatan tersebut besarannya diseragamkan se-Kota Pekalongan menggunakan formulasi ASB, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terdapat pengurangan anggaran karena adanya pengalihan honor PPTK dan Kasir kegiatan masuk dalam sub kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD berkurang karena adanya pengalihan honor PPTK masuk dalam sub kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga berkurang karena ada pengalihan anggaran masuk dalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya ada penambahan yang direncanakan untuk lanjutan pekerjaan perluasan Gedung secretariat DPRD dan masuk dalam P2 dan akan dibahas di TAPD. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut DPRD besarannya berbeda karena adanya penganggaran untuk pembelian lencana emas DPRD yang masuk dalam P2 dan selanjutnya akan dibahas di TAPD. Pembahasan Rancangan Perda berkurang pada penyusunan naskah akademik. Penyelenggaraan Kajian Perundang undangan berkurang dari rincian Jasa Konsultasi Appraisal. Penurunan angka pada sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat pada rincian toolkit seminar yang dirasionalisasi.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kota Pekalongan. Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada.

Tabel T.C-32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan upaya semua kompnen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Kota Pekalongan, maka berdasarkan Rancangan Awal RKP Tahun 2024 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Nasional	Prioritas daerah
6	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2.1. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2023 disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan untuk Tahun 2024 agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Hubungan yang selaras antara RENJA dan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Setiap Perangkat Daerah bersama-sama melakukan optimalisasi untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota Pekalongan Periode Tahun 2021-2026, oleh karena itu Renstra Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 mengadopsi Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu “**Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri, dan Religius**”.

Sedangkan Misi yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan, adalah Misi Ke-7 Pemerintah Kota Pekalongan yaitu :"**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan prinsip prinsip *Good Governance* dan *Clean Goverment***".

3.2.2. Sasaran

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Pekalongan harus dapat mewujudkan peningkatan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan.

Dalam rangka peningkatan fungsi fasilitasi tersebut, Sekretariat DPRD Kota Pekalongan berupaya meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Program-program dan Kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan fungsi dan tugas Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.

Sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah terwujudnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelesaian agenda DPRD.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1. Faktor Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan, tugas dan wewenang DPRD Kota Pekalongan dalam meningkatkan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut perlu dukungan Program dan Kegiatan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.

3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan Renja Perubahan tahun 2024 ini terbagi dalam 2 (dua) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 38 (tiga pulih delapan) sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 68.011.287.000,00 (Enam puluh delapan milyar sebelas juta tujuh dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Pekalongan.

Pembagian Program dan Kegiatan sesuai dengan rancangan akhir RKPD 2024 yang disampaikan dalam Surat Walikota tentang Penyusunan RKPD dan Renja Perubahan OPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
        3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan Daerah
        1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
        3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapnnya
    d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
        1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
        2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
        4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
        5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
        7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
        8) Penyelenggaraan Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD
    e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
        2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
        3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
    f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

g. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

h. Layanan Administrasi DPRD

1) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

1) Pembahasan RAncangan Peraturan Daerah

2) Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran

1) Pembahasan KUA dan PPAS

2) Pembahasan APBD

3) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

c. Peningkatan Kapasitas DPRD

1) Orientasi DPRD

2) Pendalaman Tugas DPRD

3) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

4) Penyusunan Program Kerja DPRD

5) Publikasi dan Dokumentasi DPRD

d. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

1) Kunjungan Kerja Dalam Daerah

2) Pelaksanaan Reses

e. Fasilitasi Tugas DPRD

1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

3.3.3. Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan RKPD

Program dan kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan untuk Tahun 2024 mendasarkan pada Rencana Kerja DPRD yang diusulkan oleh seluruh Alat Kelengkapan DPRD dan ditetapkan dalam Rencana Kerja DPRD. Mendasarkan pada hal tersebut, pagu anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024 menyesuaikan dengan hasil Rencana Kerja DPRD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024

4.1. Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD memiliki 2 (dua) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Kedua Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Sekretariat DPRD				52.401.727.000,00	64.025.789.000,00	66.951.287.000,00							61.858.299.000,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				52.401.727.000,00	64.025.789.000,00	66.951.287.000,00							61.858.299.000,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD				52.401.727.000,00	64.025.789.000,00	66.951.287.000,00							61.858.299.000,00	
1	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	100 persen	34.281.337.000,00	36.347.855.000,00	37.296.700.000,00							34.208.540.000,00	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 Persen	15.861.000,00	15.861.000,00	15.861.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.262.000,00	2.262.000,00	2.262.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Peningkatan kapasitas			10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD

													Podosugih	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	dan kualitas manajemen ASN			
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.599.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	15 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	10.800.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			8.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 Persen	3.301.199.000,00	3.408.024.000,00	3.408.024.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	sekretariat DPRD		3.212.271.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan	3.237.117.000,00	3.343.942.000,00	3.299.440.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			3.140.371.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	62.600.000,00	62.600.000,00	62.600.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			70.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 Persen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		9.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			9.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 Persen	2.868.182.000,00	4.099.910.000,00	4.099.910.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Sekretariat DPRD		2.711.740.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	24.450.000,00	24.450.000,00	40.350.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	4 Paket	259.125.000,00	800.109.000,00	750.109.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			259.125.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Peningkatan kapasi			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

												Barat, Podosugih	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	tas dan kualitas manajemen ASN				
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	4 Paket	643.182.000,00	773.151.000,00	773.151.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			625.115.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	141.225.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			142.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	32.900.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	450 Laporan	1.458.000.000,00	2.000.000.000,00	2.750.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 Persen	941.189.000,00	1.313.663.000,00	1.313.663.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		867.389.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	198.625.000,00	293.625.000,00	347.125.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	740.764.000,00	1.018.238.000,00	1.017.638.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			665.589.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 Persen	1.339.630.000,00	1.435.485.000,00	1.435.485.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		1.340.530.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	23 Unit	1.070.530.000,00	704.760.000,00	690.936.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.070.530.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	500.000.000,00	600.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	143 Unit	119.100.000,00	230.725.000,00	230.725.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 persen	100 Persen	24.812.026.000,00	25.019.912.000,00	25.019.912.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		24.843.110.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	23.781.211.000,00	23.941.645.000,00	23.961.645.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			23.910.920.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														

							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	175 Paket	4 Paket	498.625.000,00	520.000.000,00	509.275.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	35 Orang	532.190.000,00	558.267.000,00	515.463.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			532.190.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD	100 persen	100 Persen	998.250.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		1.204.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	398.250.000,00	450.000.000,00	625.200.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			604.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														

							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100,00 persen	100,00 persen	18.120.390.000,00	27.677.934.000,00	29.654.587.000,00							27.649.759.000,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase ketercapaian pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD	100 persen	100 Persen	6.828.720.000,00	6.575.401.000,00	6.575.401.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Kota Pekalongan		6.361.581.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	9 Dokumen	2.783.720.000,00	4.996.701.000,00	4.374.663.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			4.782.881.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen	8 Dokumen	4.045.000.000,00	1.578.700.000,00	2.047.968.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manaj			1.578.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD

															emen ASN				
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah pembahasan dokumen anggaran dan evaluasi	100 persen	5 dokumen	412.360.000,00	407.910.000,00	407.910.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		412.360.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	148.648.000,00	148.648.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	146.902.000,00	146.902.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														

							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	112.360.000,00	112.360.000,00	4.450.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			112.360.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase ketercapaian Peningkatan kapasitas DPRD	100 persen	100 Persen	3.314.310.000,00	3.163.815.000,00	3.163.815.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat		3.365.010.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	305.315.000,00	268.915.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	4 Dokumen	1.815.010.000,00	1.618.500.000,00	1.442.100.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.815.010.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														

							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	20 Dokumen	20 Dokumen	249.550.000,00	275.000.000,00	232.390.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	60 Dokumen	12 Dokumen	799.750.000,00	900.000.000,00	998.000.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase ketercapaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 persen	100 Persen	1.700.000.000,00	1.720.000.000,00	1.720.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manaj	Kota Pekalongan		1.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

															emen ASN				
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah													
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	96 Laporan	40 Laporan	300.000.000,00	320.000.000,00	259.655.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses													
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	2 Dokumen	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	934.140.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN			1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase ketercapaian Fasilitasi Tugas DPRD	100,00 persen	100 Persen	5.865.000.000,00	15.810.808.000,00	15.810.808.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN	Sekretariat DPRD		15.810.808.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	12 Dokumen	5.865.000.000,00	15.810.808.000,00	18.731.756.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Peningkatan kapasitas dan kualitas			15.810.808.000,00	SEKRETARIAT DPRD

														Umum	Pelayanan Publik	manajemen ASN				
	JUMLAH									**52.401.727.000,00**	**64.025.789.000,00**	**66.951.287.000,00**							**61.858.299.000,00**	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2024 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sekretariat DPRD Kota Pekalongan.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinciagar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2024 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga dapat mendukung agenda kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2024 nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2024.

Pekalongan, Agustus 2024
SEKRETARIS DPRD KOTA PEKALONGAN

WIDARJANTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660424 199603 1 002

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAPPEDA
Membangun
Bersama
Masyarakat

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

Pekalongan
World's City of Batik

BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN
2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, berkat kerja sama yang baik dari seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan, serta atas ridho Allah SWT, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024, dalam rangka menjalankan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen perubahan Rencana Kerja (Renja) ini memuat program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan beserta indikator serta target kinerja perubahan. Dokumen ini selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan akan disahkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2024 ini merupakan proses yang dinamis. Oleh karena itu, segala bentuk masukan, saran, dan kritik konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan Renja di masa mendatang. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Kepala Bappeda Kota Pekalongan

CAYEKTI WIDIGDO, AP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19750729 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii
DAFTAR ISI.....iii
DAFTAR TABEL.....iv
BAB I PENDAHULUAN.....1
1.1 Landasan Hukum 2
1.2 Maksud Dan Tujuan..... 5
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan 5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....7
2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 7
2.2 Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja Bappeda Kota Pekalongan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....20
3.1.1. Sub Kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran. 20
3.1.2. Sub Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran..... 22
3.1.3. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran 23
3.1.4. Sub Kegiatan Baru 25
3.1.5. Sub Kegiatan yang mengalami penghapusan..... 25
BAB IV PENUTUP.....40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2024 6

Tabel 2.2 Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Bappeda Kota Pekalongan S/D Triwulan II Tahun 2024 8

Tabel 3.1 Rekapitulasi Sub Kegiatan Perubahan Renja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2024 19

Tabel 3.2 Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024 21

Tabel 3.3 Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran Pada Renja Perubahan 2024 23

Tabel 3.4 Sub Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran Pada Perubahan Renja 2024 24

Tabel 3.5 Sub Kegiatan Baru Pada Perubahan Renja 2024 25

Tabel 3.6 Kegiatan Yang Dihapus/Dinolkan Pada Perubahan Renja Tahun 2024 25

Tabel 3.7 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Perubahan Renja Tahun 2024 27

BAB I
PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan upaya strategis dalam mengoptimalkan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan ini tercermin dalam peningkatan pendapatan per kapita, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan akses terhadap layanan publik dan partisipasi masyarakat. Daya saing daerah dan indeks pembangunan manusia menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan strategis memiliki peran krusial dalam memastikan pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, perencanaan pembangunan daerah dapat didefinisikan sebagai proses sistematis dalam merancang tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perencanaan pembangunan yang berkualitas merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana sebagai tindaklanjutnya, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai upaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan peluang otonomi seluas-luasnya maka kewenangan diberikan kepada daerah. Hal ini merupakan peluang untuk memberikan kemajuan pembangunan dengan ciri khas dan potensi daerah dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya masyarakat daerah tersebut. Salah satu hal yang mendukung dalam upaya mencapai tujuan pelayanan publik adalah dengan pelaksanaan rencana daerah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif melalui beberapa tahapan perencanaan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

Selanjutnya, dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Pekalongan yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan tahun 2024 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Bappeda Kota Pekalongan.

1.1 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Kepmendagri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keunagan daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kota Pekalongan;
19. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

   Dokumen perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan disusun sebagai tindak lanjut dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Tahun 2024.

2. Tujuan

   Penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan bertujuan untuk mencapai keselarasan antara program dan kegiatan Bappeda dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah, prioritas, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, perubahan Renja ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien.

1.3 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2024, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi : a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), bahwa perubahan renja perangkat daerah disusun berdasarkan peraturan kepala daerah tentang Perubahan RKPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah tentang perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan dasar pertimbangan perubahan RKPD yang ditindaklanjuti dengan perubahan renja perangkat daerah menurut permendagri tersebut adalah adanya perubahan pada :

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. Target sasaran pembangunan daerah;
3. Prioritas pembangunan daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan Bappeda sampai dengan triwulan II dalam pencapaian target kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan
Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Tahun 2024	Target s/d triwulan II	Realisasi Capaian s/d triwulan II	Rasio Capaian s/d triwulan II
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90	-	-	-
2	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Laporan Hasil Litbang	100%	-	-	-

Sampai dengan triwulan II, pelayanan kinerja Bappeda Kota pekalongan berdasarkan target kinerja sasaran baru tercapai indikator persentase program RKPD selaras dengan RPJMD dengan ketercapaian 100% hal tersebut dicapai oleh jumlah program RKPD tahun 2024 sesuai RPJMD sebanyak 125 program dan jumlah Program RPJMD yang direncanakan untuk tahun 2024 adalah sebanyak 125 program. Sedangkan indikator yang lain baru akan tercapai pada triwulan IV.

2.2 Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja Bappeda Kota Pekalongan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Bappeda Kota Pekalongan Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2024.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Bappeda Kota Pekalongan sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang melaksanakan 2 urusan penunjang pemerintahan, 4 program dengan 16 kegiatan dan 35 sub kegiatan, dengan anggaran Belanja Rp. 7.587.778.000,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 3.110.380.765,- atau 40,99 % dari pagu APBD. Pencapain realisasi anggaran triwulan II relatif masih rendah belum sesuai target, dikarenakan masih ada pekerjaan yang sudah dilaksanakan, namun belum selesai pertanggungjawaban keuangannya.

Sementara itu jika dianalisis besdaasarkan capaian indikator program, kegiatan sampai dengan kinerja sub kegiatan masih banyak indikator yang belum mencapai target 100% hal ini disebabkan karena rata-rata target kinerja indikator baru dapat dihitung pada periode akhir yaitu semester IV. Namun demikian beberapa indikator sub kegiatan telah dilaksanakan pada triwulan II. Adapun evaluasi berdasarkan masing-masing bidang sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sekretariat

   Kegiatan pada Sekretariat Bappeda Kota Pekalongan merupakan kegiatan rutin berupa gaji dan tunjangan ASN, pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional pegawai, fasilitasi rapat-rapat koordinasi luar daerah, fasilitasi rapat internal, belanja Listrik, air dan telekomunikasi, penyediaan administrasi umum dan kepegawaian.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD)

   Pada bidang PPEPD secara umum masih melaksanakan beberapa kegiatan dari target yang akan dicapai yaitu penyusunan RKPD tahun 2025, penyempurnaan rancangan teknokratik RPJPD, serta pembahasan rencana forum satu data. Target indikator Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala

Pelaksanaan Pembangunan Daerah telah tercapai sebesar 50% dengan tersusunnya laporan DAK dan RKPD triwulan I dan II secara tepat waktu.

3. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan

   Pada Bidang PSDAIW seara umum dalam target capaiannya akan dapat terealisasi pada akhir periode triwulan IV. Beberapa kegiatan yang masih dalam tahapan persiapan antara lain berupa kajian database IUP (Ijin Usaha Perdagangan) dan Sistem Informasi Manajemen IUP serta kajian bidang infrastruktur dan kewilayahan.

4. Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

   Pada Bidang PPM kegiatan-kegiatan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target kinerja. Rapat koordinasi, desk evaluasi dan monitoring atas kegiatan yang dilaksanakan guna pencapaian target kinerja yang berupa penyusunan laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU), laporan SDGs, laporan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), laporan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD), laporan monitoring stunting dan laporan monitoring dana kelurahan.

5. Bidang Penelitian Dan Pengembangan

   Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan hingga Triwulan II tahun 2024 yang masih dalam proses pelaksanaan antara lain; persiapan keikutsertaan pameran inovasi, evaluasi terhadap program Krenova dan Indeks Inovasi Daerah (IGA), pengelolaan situs web litbang, serta kajian terhadap berbagai publikasi ilmiah. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan secara berkala dilakukan guna mendukung pencapaian target riset Perusahaan Umum Daerah (PUD).

Adapun realisasi target kinerja dan anggaran Bappeda Kota Pekalongan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2. di bawah ini.

Tebel 2.2. Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Bappeda Kota Pekalongan S/D Triwulan II Tahun 2024

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG DIEVALUASI (2024)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI RENJA YANG DIEVALUASI (%)	
			RENJA			APBD			I		II					
			K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)*100	17= (15/9)*100
5.01.5.05.0.00.02	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**				**7.667.714.000**			**7.587.778.000**		**1.576.590.874**		**3.110.380.765**		**3.110.380.765**		40,99
5.01	**PERENCANAAN**				**6.932.859.000**			**6.849.169.000**		**1.530.282.250**		**3.010.102.959**		**3.010.102.959**		43,95
5.01.02	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	persen	**5.764.516.000**	100	persen	**5.674.484.000**	29.45	**1.384.620.376**	57.78	**2.706.911.379**	87,23	**2.706.911.379**	**87,23**	47,70
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen		100	persen		18.65		38.00		56,65		**56,65**	
		persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100	persen		100	persen		33.80		45.82		79,62		**79,62**	
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	persen	15.366.000	100	persen	15.366.000	8.89	2.985.000	6.67	3.695.000	15,56	3.695.000	**15,56**	24,05
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	1.972.000	2	dokumen	1.972.000	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG DIEVALUASI (2024)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI RENJA YANG DIEVALUASI (%)	
			RENJA			APBD			I		II					
			K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)*100	17 = (15/9)*100
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	1.394.000	2	dokumen	1.394.000	-	500.000	-	600.000	-	500.000	-	35,87
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	laporan	12.000.000	15	laporan	12.000.000	4	2.485.000	3	3.195.000	7	3.195.000	46,67	26,63
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	persen	5.031.088.000	100	persen	4.935.904.000	50,00	1.206.769.767	50,00	2.413.292.366	100	2.413.292.366	100,00	48,89
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	orang/bulan	4.984.196.000	32	orang/bulan	4.889.012.000	32	1.198.184.767	32	2.398.408.366	32	2.398.408.366	100,00	49,06
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	45.600.000	12	dokumen	45.600.000	3	8.175.000	3	14.175.000	6	14.175.000	50,00	31,09
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1.292.000	1	laporan	1.292.000	1	410.000	0	709.000	1	709.000	100,00	54,88
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	5.000.000	100	persen	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	paket	5.000.000	1	paket	5.000.000	-	-		-	-	-	-	-

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG DIEVALUASI (2024)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI RENJA YANG DIEVALUASI (%)	
			RENJA			APBD			I		II					
			K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)*100	17= (15/9)*100
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	persen	436.756.000	100	persen	436.756.000	25	112.712.550	25	168.663.150	50	168.663.150	50,00	38,62
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	1.700.000	4	paket	1.700.000	-	-	-	726.000	-	726.000	-	42,71
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	85.512.000	4	paket	85.512.000	1	43.486.100	1	48.384.600	2	48.384.600	16,67	56,58
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	paket	2.914.000	4	paket	2.914.000	1	-	1	991.000	2	991.000	16,67	34,01
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	paket	55.473.000	4	paket	55.473.000	1	10.160.000	1	23.525.000	2	23.525.000	18,18	42,41
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	13.577.000	2	paket	13.577.000	1	-	-	4.125.000	1	4.125.000	50,00	30,38
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	2.580.000	2	dokumen	2.580.000	1	585.000	-	1.170.000	1	1.170.000	8,33	45,35
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115	laporan	275.000.000	275	laporan	275.000.000	46	58.481.450	86	89.741.550	132	89.741.550	114,78	32,63
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	166.406.000	100	persen	170.310.000	25	40.494.571	25	78.654.381	50	78.654.381	50,00	46,18

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG DIEVALUASI (2024)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI RENJA YANG DIEVALUASI (%)	
			RENJA			APBD			I		II					
			K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)*100	17= (15/9)*100
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	1.362.000	4	laporan	1.362.000	1	-	1	137.000	2	137.000	50,00	10,06
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	75.000.000	12	laporan	75.000.000	3	15.789.975	3	31.228.989	6	31.228.989	50,00	41,64
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	90.044.000	12	laporan	93.948.000	3	24.704.596	3	47.288.392	6	47.288.392	50,00	50,33
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	persen	109.900.000	100	persen	111.148.000	33,80	21.658.488	12,02	42.606.482	45,82	42.606.482	45,82	38,33
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	unit	84.700.000	14	unit	85.948.000	4	17.249.488	2	36.447.482	6	36.447.482	50,00	42,41
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	unit	25.200.000	41	unit	25.200.000	16	4.409.000	4	6.159.000	20	6.159.000	166,67	24,44
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan peleporan triwulanan tepat waktu	100	persen	**581.954.000**	100	persen	**585.800.000**	25	**85.792.892**	25	**196.491.112**	50	**196.491.112**	50,00	33,54

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG DIEVALUASI (2024)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI RENJA YANG DIEVALUASI (%)	
			RENJA			APBD			I		II					
			K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)*100	17 = (15/9)*100
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100	persen		100	persen		-		-		-			
		Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100	persen		100	persen				100		100		100,00	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100	persen	489.424.000	100	persen	492.010.000	-	67.895.792	-	169.788.012	-	169.788.012		34,51
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5	dokumen	489.424.000	5	dokumen	492.010.000	-	67.895.792	-	169.788.012	-	169.788.012		34,51
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100	persen	17.200.000	100	persen	17.200.000	-	765.000	-	765.000	-	765.000		4,45
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	dokumen	17.200.000	1	dokumen	17.200.000		765.000		765.000		765.000	-	4,45

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG DIEVALUASI (2024)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI RENJA YANG DIEVALUASI (%)	
			RENJA			APBD			I		II					
			K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)*100	17= (15/9)*100
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100	persen	75.330.000	100	persen	76.590.000	25	17.132.100	25	25.938.100	50	25.938.100	50,00	33,87
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8	laporan	75.330.000	8	laporan	76.590.000	2	17.132.100	2	25.938.100	4	25.938.100	50,00	33,87
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100	persen	**586.389.000**	100	persen	**588.885.000**	-	**59.868.982**	-	**106.700.468**	-	**106.700.468**		18,12
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100	persen		100	persen		-		-		-			
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100	persen		100	persen		-		-		-			
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100	persen	187.172.000	100	persen	188.420.000	-	37.998.491	-	59.117.985	-	59.117.985		31,38

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG DIEVALUASI (2024)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI RENJA YANG DIEVALUASI (%)	
			RENJA			APBD			I		II					
			K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)*100	17 = (15/9)*100
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	Laporan	11.000.000	1	Laporan	11.000.000	-	2.520.000	-	3545000	-	3545000		32,23
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	dokumen	45.000.000	1	dokumen	45.000.000	-	12.378.000	-	13.403.000	-	13.403.000		29,78
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	laporan	30.000.000	1	laporan	30.000.000	-	1.410.000	-	7.992.500	-	7.992.500	-	26,64
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	laporan	101.172.000	1	laporan	102.420.000	-	21.690.491	-	34.177.485	-	34.177.485		33,37

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG DIEVALUASI (2024)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI RENJA YANG DIEVALUASI (%)	
			RENJA			APBD			I		II					
			K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/6)*100	17 = (15/9)*100
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100	persen	52.657.000	100	persen	153.905.000	-	9.795.491	-	16.617.483	-	16.617.483		10,80
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2	laporan	52.657.000	1	laporan	153.905.000	-	9.795.491	-	16.617.483	-	16.617.483	-	10,80
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	persen	346.560.000	100	persen	246.560.000		12.075.000		30.965.000		30.965.000		12,56
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2	laporan	167.550.000	2	laporan	186.110.000	-	12.075.000		23.700.000	-	23.700.000		12,73
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2	laporan	179.010.000	2	laporan	60.450.000	-	-	-	7.265.000	-	7.265.000		12,02
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**734.855.000**			**738.609.000**		**46.308.624**		**100.277.806**		**100.277.806**		13,58
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN**	Persentase Litbang yang sesuai dengan	100	Persen	**734.855.000**	100	Persen	**738.609.000**	-	**46.308.624**	-	**100.277.806**	-	**100.277.806**		13,58

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG DIEVALUASI (2024)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI RENJA YANG DIEVALUASI (%)	
			RENJA			APBD			I		II					
			K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)*100	17= (15/9)*100
	PENGEMBANGAN DAERAH	Arah Kebijakan RPJMD														
		Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100	persen		100	persen		-		-		-			
		Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	74	skor		74	skor		-		-		-			
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan		persen	267.940.000		persen	228.555.000		11.882.491		30.059.485		30.059.485		13,15
5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5	laporan	173.720.000	4	laporan	152.750.000	-	4.957.000	-	18.517.000	-	18.517.000		12,12
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	laporan	94.220.000	1	laporan	75.805.000	-	6.925.491	-	11.542.485	-	11.542.485	-	15,23
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100	persen	313.725.000	100	persen	199.994.000		12.516.133		25.045.121		25.045.121	-	12,52
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3	Kali	313.725.000	3	Kali	199.994.000	-	12516133		25045121	-	25045121	-	12,52

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN (N) YANG DIEVALUASI (2024)						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DI EVALUASI		TINGKAT CAPAIAN DAN REALISASI RENJA YANG DIEVALUASI (%)	
			RENJA			APBD			I		II					
			K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/4)*100	17 = (15/9)*100
5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Jumlah dokumen hasil penelitian dan Pengembangan perindustrian dan perdagangan	100	persen		100	persen	29.100.000							-	-
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0	dokumen	0	1	dokumen	29.100.000	-	-		-	-	-	-	-
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SIDA)	100	persen	153.190.000	100	persen	280.960.000		21.910.000		45.173.200		45.173.200	-	16,08
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2	dokumen	141.690.000	2	dokumen	269.460.000	-	21910000		45.173.200	-	45.173.200	-	16,76
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	laporan	11.500.000	1	laporan	11.500.000	-	-		-	-	-	-	-

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2024 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan renja Bappeda terkait perubahan pagu anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan, serta perubahan terhadap indikator kinerja dan target, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan keuangan daerah, serta pencapaian target-target kinerja,

3.1. Rekapitulasi Sub Kegiatan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2024

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 16 kegiatan, 35 sub kegiatan dalam renja penetapan, terdapat 11 sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu, sebanyak 17 sub kegiatan mengalami perubahan pagu (7 sub kegiatan mengalami pengurangan dan 10 sub kegiatan mengalami penambahan) dan terdapat 1 sub kegiatan baru. Adapun rincian sub kegiatan dalam Perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1. Rekapitulasi Sub Kegiatan Perubahan Renja BAPPEDA
Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Dalam Perubahan Renja					
		Tetap	Bertambah	Berkurang	baru	dinolkan	Jumlah
1.	Bappeda Kota Pekalongan	17	10	7	1	-	35

3.1.1. Sub Kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam Renja Penetapan Tahun 2024 dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan baik target kinerja maupun pagu indikatif pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebanyak 17 sub kegiatan. Adapun sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran pada renja perubahan seperti tersebut dalam tabel 3.2. dibawah ini.

Tabel. 3.2 Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024

No	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah / Berkurang
			Renja Penetapan	Perubahan Renja	
1	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.972.000	1.972.000	-
2	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.394.000	1.394.000	-
3	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	-
4	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.292.000	1.292.000	-
5	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	5.000.000	-
6	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.700.000	1.700.000	-
7	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.914.000	2.914.000	-
8	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.473.000	55.473.000	-
9	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.577.000	13.577.000	-
10	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.580.000	2.580.000	-
11	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.362.000	1.362.000	-
12	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	75.000.000	-

No	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah / Berkurang
			Renja Penetapan	Perubahan Renja	
13	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	17.200.000	17.200.000	-
14	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11.000.000	11.000.000	-
15	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	45.000.000	45.000.000	-
16	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	30.000.000	30.000.000	-
17	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	11.500.000	11.500.000	-

3.1.2. Sub Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran

Sub kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam Renja Penetapan Tahun 2024 dan mengalami pengurangan baik target kinerja dan / pagu indikatif sebanyak 7 sub kegiatan. Hal ini menyesuaikan Perubahan RKPD, yang disebabkan adanya penyesuaian kembali terhadap belanja guna serta efektifitas pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.3. dibawah ini.

Tabel. 3.3. Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran Pada Perubahan Renja 2024

No	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Berkurang
			Renja Penetapan	Perubahan Renja	
1	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.984.196.000	4.706.083.000	(278.113.000)
2	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.600.000	36.000.000	(9.600.000)
3	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	489.424.000	452.754.000	(36.670.000)
4	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	179.010.000	60.450.000	(118.560.000)
5	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	173.720.000	152.750.000	(20.970.000)
6	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	94.220.000	75.805.000	(18.415.000)
7	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	313.725.000	145.875.000	(167.850.000)

3.1.3. Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah sub kegiatan yang ada dalam Renja Penetapan Tahun 2024 dan mengalami penambahan baik target kinerja dan / pagu indikatif sebanyak 11 sub kegiatan. Sub Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4. Sub Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran Pada Perubahan Renja 2024

No	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah
			Renja Penetapan	Perubahan Renja	
1	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.512.000	85.902.000	390.000
2	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.000.000	373.552.000	98.552.000
3	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.044.000	93.948.000	3.904.000
4	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.700.000	107.036.000	22.336.000
5	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.200.000	26.800.000	1.600.000
6	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	75.330.000	76.590.000	1.260.000
7	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	101.172.000	102.420.000	1.248.000
8	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	52.657.000	153.690.000	101.033.000
9	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	167.550.000	186.110.000	18.560.000
10	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	141.690.000	289.100.000	147.410.000

3.1.4. Sub Kegiatan Baru

Sub Kegiatan yang masuk kategori ini adalah sub kegiatan yang tidak ada dalam renja 2024 namun ada dalah DPA 2024 karena dipandang sebagai kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Bappeda Kota Pekalongan dan mendukung pencapaian visi dan misi. Adapun sub kegiatan tersebut dapat dilihat pada tablel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5. Sub Kegiatan Baru Pada Perubahan Renja 2024

No	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah
			Renja Penetapan	Perubahan Renja	
1	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	-	33.200.000	33.200.000

3.1.5. Sub Kegiatan yang mengalami penghapusan

Sub Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang sebelumnya dianggarkan dalam Renja Penetapan Tahun 2024, namun diusulkan untuk dihapuskan/dinolkan dalam Perubahan Renja Tahun 2024 ini sebanyak nihil. Kegiatan yang dihapus/dinolkan dapat dilihat dalam tabel 3.5. dibawah ini.

Tabel 3.6. Kegiatan Yang Dihapus/Dinolkan
Pada Perubahan Renja Tahun 2024

No	Kode Sub Kegiatan	Kegiatan	PAGU		Berkurang
			Renja Penetapan	Perubahan Renja	
	NIHIL				

3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan

kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2024;

2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan program pemerintah untuk fasilitasi pembangunan infrastruktur dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 terkait bantuan keuangan kepada Kab./Kota;

3. Sub Kegiatan baru maupun penghapusan sub kegiatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan renja Bappeda Kota Pekalongan tahun 2024 terlihat dalam tabel 3.7. dibawah ini :

TABEL 3.7. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Perubahan Renja Tahun 2024

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.5.05.0.00.02.00	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Kota Pekalongan**				**7.667.714.000**				**7.587.778.000**				**7.447.029.000**	**(220.685.000)**	**(140.749.000)**
5.01	**PERENCANAAN**					**6.932.859.000**				**6.849.169.000**				**6.738.799.000**	**(194.060.000)**	**(110.370.000)**
5.01.02	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	persen	**5.764.516.000**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	persen	**5.674.484.000**	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	persen	**5.603.585.000**	**(160.931.000)**	**(70.899.000)**
		Kota Pekalongan	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen			
			persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100	persen		persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100	persen		persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100	persen			
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	persen	15.366.000	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	persen	15.366.000	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	persen	15.366.000		

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	1.972.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	1.972.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	1.972.000		
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	1.394.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	1.394.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	1.394.000		
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	laporan	12.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	laporan	12.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	laporan	12.000.000		
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	100	persen	5.031.088.000	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	100	persen	4.935.904.000	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	persen	4.743.375.000	**(287.713.000)**	**(192.529.000)**
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	orang/ bulan	4.984.196.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	orang/ bulan	4.889.012.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	orang/ bulan	4.706.083.000	(278.113.000)	(182.929.000)
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	45.600.000	Jumlah Dokumen Penetausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	45.600.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	36.000.000	(9.600.000)	(9.600.000)
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1	laporan	1.292.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1	laporan	1.292.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	laporan	1.292.000		

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	5.000.000	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	5.000.000	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	5.000.000	0	0
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	paket	5.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	5.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	5.000.000		
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	persen	436.756.000	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	persen	436.756.000	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	persen	535.698.000	98.942.000	98.942.000
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	1.700.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	1.700.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	1.700.000	0	0
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	85.512.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	paket	85.512.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	paket	85.902.000	390.000	390.000

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							yang Disediakan									
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	paket	2.914.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	paket	2.914.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	paket	2.914.000	0	0
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	paket	55.473.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	55.473.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	55.473.000	0	0
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	13.577.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	13.577.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	13.577.000	0	0
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	2.580.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	2.580.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	2.580.000	0	0
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115	laporan	275.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275	laporan	275.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325	laporan	373.552.000	98.552.000	98.552.000
5.01.01.2.06	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100	persen	166.406.000	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang	100	persen	170.310.000	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100	persen	170.310.000	3.904.000	0

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemerintahan Daerah				Urusan Pemerintahan Daerah				Pemerintahan Daerah					
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	1.362.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	1.362.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	1.362.000	0	0
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	75.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	75.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	75.000.000	0	0
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	90.044.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	93.948.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	93.948.000	3.904.000	0
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	persen	109.900.000	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	persen	111.148.000	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	persen	133.636.000	23.936.000	22.688.000
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	unit	84.700.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	14	unit	85.948.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	unit	107.036.000	22.336.000	21.088.000

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							dibayarkan Pajaknya									
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	unit	25.200.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41	unit	25.200.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41	unit	26.800.000	1.600.000	1.600.000
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100	persen	**581.954.000**	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100	persen	**585.800.000**	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100	persen	**546.544.000**	(35.410.000)	(39.256.000)
		Kota Pekalongan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100	persen		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100	persen		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100	persen		0	0
			Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100	persen		Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100	persen		Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100	persen		0	0
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**		Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100	persen	489.424.000	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100	persen	492.010.000	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100	persen	452.754.000	(36.670.000)	(39.256.000)
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang	5	dokumen	489.424.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/	5	dokumen	492.010.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5	dokumen	452.754.000	(36.670.000)	(39.256.000)

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Daerah Kabupaten/Kota		Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				(RPJPD/RPJMD/RKPD)					
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100	persen	17.200.000	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100	persen	17.200.000	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100	persen	17.200.000	0	0
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	dokumen	17.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	dokumen	17.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	dokumen	17.200.000	0	0
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**		Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100	persen	75.330.000	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100	persen	76.590.000	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100	persen	76.590.000	1.260.000	0
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8	laporan	75.330.000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8	laporan	76.590.000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8	laporan	76.590.000	1.260.000	0

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100	persen	**586.389.000**	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100	persen	**588.885.000**	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100	persen	**588.670.000**	2.281.000	(215.000)
		Kota Pekalongan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100	persen		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100	persen		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100	persen		0	0
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100	persen		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100	persen		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100	persen		0	0
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**		Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100	persen	187.172.000	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100	persen	188.420.000	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100	persen	188.420.000	1.248.000	0
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	Laporan	11.000.000	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	1	Laporan	11.000.000	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	Laporan	11.000.000	0	0

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Daerah Bidang Pemerintahan									
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	dokumen	45.000.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	dokumen	45.000.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	dokumen	45.000.000	0	0
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	laporan	30.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	laporan	30.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	laporan	30.000.000	0	0
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	laporan	101.172.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	laporan	102.420.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	laporan	102.420.000	1.248.000	0

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**		Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100	persen	52.657.000	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100	persen	153.905.000	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100	persen	153.690.000	101.033.000	(215.000)
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2	laporan	52.657.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	laporan	153.905.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2	laporan	153.690.000	101.033.000	(215.000)
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	persen	346.560.000	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	persen	246.560.000	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	persen	246.560.000	(100.000.000)	0
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2	laporan	167.560.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2	laporan	186.110.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2	laporan	186.110.000	18.560.000	0

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisesi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2	laporan	179.010.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2	laporan	60.450.000	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2	laporan	60.450.000	(118.560.000)	0
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					**734.855.000**				**738.608.000**				**708.230.000**	(26.625.000)	(30.379.000)
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**		**Persentase** Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100	Persen	**734.855.000**	**Persentase** Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100	Persen	**738.608.000**	**Persentase** Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100	Persen	**708.230.000**	(26.625.000)	(30.379.000)
		Kota Pekalongan	Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100	persen		Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100	persen		Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100	persen		0	0
			Skor Capaian Nilai RIDA (SIDA)	74	skor		Skor Capaian Nilai RIDA (SIDA)	74	skor		Skor Capaian Nilai RIDA (SIDA)	74	skor		0	0
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**		Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan		persen	267.940.000	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan		persen	228.555.000	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan		persen	228.555.000	(39.385.000)	0
5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan	5	laporan	173.720.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi,	4	laporan	152.750.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan	4	laporan	152.750.000	(20.970.000)	0

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah					
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	laporan	94.220.000	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	laporan	75.805.000	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	laporan	75.805.000	(18.415.000)	0
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**		Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100	persen	313.725.000	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100	persen	199.994.000	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100	persen	145.875.000	(167.850.000)	(54.119.000)
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3	Kali	313.725.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3	Kali	199.994.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3	Kali	145.875.000	(167.850.000)	(54.119.000)
5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**		Jumlah dokumen hasil penelitian dan Pengembangan perindustrian dan perdagangan	100	persen		Jumlah dokumen hasil penelitian dan Pengembangan perindustrian dan perdagangan	100	persen	29.100.000	Jumlah dokumen hasil penelitian dan Pengembangan perindustrian dan perdagangan	100	persen	33.200.000	33.200.000	4.100.000

KODE REKENING	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA				PAGU BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	
			URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	URAIAN INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU (Rp.)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0	dokumen	0	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	29.100.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	dokumen	33.200.000	33.200.000	4.100.000
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**		Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	100	persen	153.190.000	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	100	persen	280.980.000	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	100	persen	300.600.000	147.410.000	19.640.000
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2	dokumen	141.690.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2	dokumen	269.460.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2	dokumen	289.100.000	147.410.000	19.640.000
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	laporan	11.500.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	laporan	11.500.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	laporan	11.500.000	0	0

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Kerja periode berikutnya.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target perubahan yang telah ditetapkan

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Bappeda Kota Pekalongan

CAYEKTI WIDIGDO, AP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19750729 199412 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA PEKALONGAN

Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan Telp. 0285 – 429451

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala BPKAD Kota Pekalongan,

Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 196507171992032014

DAFTAR ISI

COVER i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I : PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud Dan Tujuan 4
1.4 Gambaran Pelayanan 5
1.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 7
BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 9
2.1 Hasil Evaluasi Renja s.d Triwulan II Tahun 2024 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 22
3.1 Rencana Kerja 22
3.2. Pendanaan Perangkat Daerah 24
BAB IV : PENUTUP 40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan peraturan peralihannya dimana menyebutkan setiap Pemerintah di Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu selama 20 tahun, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan jangka waktu pembangunan selama 5 tahun.

Dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tersebut dituangkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan mencakup sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra).

Hal tersebut diatas kemudian diatur dan didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024.

Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Pekalongan yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan atas Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diubah beberapa kali diubah dengan Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

6 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

8 Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;

10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

12 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
20 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya;
21 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Pekalongan Tahun 2004-2013;
22 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
23 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
24 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
25 Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024

1.3 Maksud Dan Tujuan

Perubahan atas Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

A. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai pedoman atau acuan bagi pihak-pihak kepentingan baik internal maupun eksternal

lingkup kedinasan maupun tingkat Kota Pekalongan dan merupakan penjabaran dari implementasi pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun yang akan datang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan dalam menciptakan kesepkatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kota Pekoangan 2021-2026. Serta sebagaian acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2024.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja BPKAD Kota Pekalongan dengan pembanding Renja tahun sebelumnya maupun tahun yang akan datang;
4. Pedoman dalam menyusun dokumen perubahan rencana agenda pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024;
5. Penetapan pelaksanaan program kegiatan BPKAD Kota Pekalongan yang direncanakan dalam pembebanan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun 2024.

1.4 Gambaran Pelayanan

Pada tahun 2021 dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, terjadi perubahan nomeklatur Badan Daerah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang keuangan yang semula Badan Keuangan Daerah (BKD) menjadi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan merupakan institusi pemerintah yang bertugas di bidang keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Penjelasan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, pada tahun yang sama (2021) terbit Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah. Susunan organisasi BPKAD terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat
   a. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
   b. Sub bagian Keuangan; dan
   c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi
   a. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan; dan
   b. Subbidang Penetapan dan Keberatan.
4. Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan
   a. Subbidang Penagihan dan Penindakan; dan
   b. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
5. Bidang Anggaran
   a. Subbidang Anggaran Belanja; dan
   b. Subbidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai dan Pembiayaan.
6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
   a. Subbidang Perbendaharaan; dan
   b. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
   a. Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran; dan
   b. Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan.
8. Bidang Pengelolaan BMD
   a. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Kebutuhan BMD; dan
   b. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD.
9. UPTB; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan tugas dan fungsi rincian tugas BPKAD Kota Pekalongan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2021. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan memiliki tugas pokok yaitu pendukung Wali Kota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun fungsinya sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Perumusan kebijakan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pendataan, penetapan, data dan informasi pendapatan;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penagihan, pengawasan dan pemeriksaan pendapatan;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang anggaran;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perbendaharaan dan kas daerah;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang akuntansi dan pelaporan;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengelolaan BMD;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
10. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
11. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD Kota Pekalongan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan kinerja maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan

analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan jangka menengah maka dapat ditetapkan isu strategis BPKAD Kota Pekalongan yaitu:

1. Penyusunan dokumen perencanaan BPKAD yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP;
2. Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu;
3. Mempertahankan Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana;
5. Peningkatan Pendapatan dari tahun sebelumnya melalui koordinasi yang solid dengan instansi pengelola pendapatan;
6. Penatausahaan aset daerah secara tertib.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja BPKAD Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2024 melaksanakan 1 urusan terdiri dari 4 program, 13 kegiatan, 59 sub kegiatan, dengan capaian realisasi target kinerja output kegiatan dan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Target Kinerja dan Anggaran BPKAD Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	Satuan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	**KEUANGAN**								
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**Persen**	**100**			**17,304,362,000**	**7,744,838,937**	
		Indikator Program :Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**Persen**	**100**					
		Indikator Program :Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	**Persen**	**100**					
5.02.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dareah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persen**	**100**			**17,742,000**	**5,143,000**	
5.02.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun	dokumen	2	0	0	3,364,000	852,500	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan III dan IV
5.02.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	0	0	2,378,000	-	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan III dan IV
5.02.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	15	4	3	12,000,000	4,290,500	s.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**persen**	**100**			**12,292,924,000**	**5,153,302,315**	

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	Satuan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	55	55	56	12,170,120,000	5,113,229,315	Realisasi kinerja melebihi target yang ditetapkan, dan sudah dilakukan usulan perubahan target renja
5.02.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	3	3	120,600,000	38,600,000	s.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	0	2,204,000	1,473,000	Target kinerja sudah selesai pada triwulan I
5.02.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**persen**	**100**			**5,000,000**	**-**	
5.02.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	0	0	5,000,000	-	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan IV
5.02.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**persen**	**100**			**1,294,386,000**	**369,441,443**	
5.02.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	1	1	7,500,000	2,486,500	s.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	1	1	711,386,000	181,208,200	s.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	1	1	18,000,000	3,892,800	s.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	1	1	120,000,000	54,039,050	s.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	Satuan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2	2	50,000,000	32,005,000	s.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	2	2	2,500,000	900,000	s.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	200	58	87	385,000,000	94,909,893	s.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**persen**	**100**			**1,851,000,000**	**1,752,833,000**	
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	1	1	1,219,000,000	1,226,808,000	s.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	2	1	1	632,000,000	526,025,000	s.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persen**	**100**			**777,778,000**	**389,302,612**	
5.02.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	1	1	3,000,000	2,019,000	s.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	3	3	514,116,000	249,420,523	s.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	3	3	260,662,000	137,863,089	s.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	Satuan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persen**	**100**			**1,065,532,000**	**74,816,567**	
5.02.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	41	12	30	463,009,000	50,113,917	s.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	0	0	553,544,000	66,150	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan IV
5.02.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	70	20	23	48,979,000	24,636,500	s.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Indikator Program : Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)**	**persen**	**8.08**			**5,230,574,000**	**1,965,684,891**	
5.02.02.2.01	**Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu**	**persen**	**100**			**984,001,000**	**398,600,580**	
5.02.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	dokumen	2	0	0	18,750,000	-	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan III
5.02.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	dokumen	2	0	0	16,875,000	600,000	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan III

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	Satuan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen	2	0	0	27,260,000	4,495,000	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan III dan IV
5.02.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen	2	0	0	763,348,000	357,526,580	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan IV
5.02.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	dokumen	2	0	0	80,548,000	11,486,000	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan III
5.02.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	dokumen	12	3	3	77,220,000	24,493,000	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.02.2.02	**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D**	**persen**	**100**			**377,134,000**	**109,000,119**	
5.02.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen	6500	1468	1651	232,686,000	64,402,467	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.02.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dokumen	24	6	0	17,250,000	3,942,000	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan III

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	Satuan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya								
5.02.02.2.02.0006	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	dokumen	12	3	3	18,750,000	5,043,700	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.02.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	laporan	2	0	1	51,265,000	24,413,352	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan III
5.02.02.2.02.0010	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	dokumen	1	0	0	18,750,000	6,106,600	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan IV

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	Satuan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.02.0011	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	200	0	90	38,433,000	5,092,000	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan IV
5.02.02.2.03	**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu**	**persen**	**100**			**346,039,000**	**154,345,492**	
5.02.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	dokumen	4	0	1	36,750,000	8,558,000	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan III
5.02.02.2.03.0003	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	laporan	13	3	3	5,625,000	-	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan III
5.02.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	laporan	7	7	0	89,750,000	68,111,000	Sudah tercapai di triwulan I
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	dokumen	2	0	2	69,250,000	24,794,500	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	Satuan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.03.0007	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	dokumen	2	1	0	6,000,000	451,000	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan IV
5.02.02.2.03.0009	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	dokumen	1	0	0	11,250,000	1,817,000	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan III dan IV
5.02.02.2.03.0011	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	120	0	30	127,414,000	50,613,992	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan III dan IV
5.02.02.2.04	**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos**	**persen**	**100**			**3,523,400,000**	**1,303,738,700**	
5.02.02.2.04.0009	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	laporan	12	3	3	3,523,400,000	1,303,738,700	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Indikator Program : Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)**	**persen**	**100**			**1,453,542,000**	**230,519,959**	
5.02.03.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan**	**persen**	**100**			**1,453,542,000**	**230,519,959**	

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	Satuan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Aset Tetap dan Persediaan							
5.02.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	dokumen	2	0	0	59,650,000	11,742,500	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan IV
5.02.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen	4	0	2	18,750,000	-	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan IV
5.02.03.2.01.0007	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	laporan	12	3	3	347,250,000	2,627,300	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.03.2.01.0008	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	laporan	2	0	0	96,000,000	4,971,000	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan III dan IV
5.02.03.2.01.0010	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	dokumen	2	0	1	437,171,000	64,892,931	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan IV
5.02.03.2.01.0011	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	laporan	81	81	81	494,721,000	146,286,228	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Indikator Program :Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)**	**persen**	**5**			**1,655,908,000**	**373,367,316**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BPKAD**	**persen**	**100**			**654,410,000**	**179,151,883**	

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	Satuan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Indikator Kegiatan : Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak	**persen**	**4,8**			**1,001,498,000**	**194,215,433**	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	dokumen	1	1	0	3,750,000	-	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	laporan	12	3	3	174,500,000	9,485,000	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	laporan	12	3	3	37,500,000	20,465,000	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.04.2.01.0006	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	laporan	12	3	3	92,322,000	19,487,932	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.04.2.01.0007	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	objek pajak	3000	5120	351	172,950,000	10,012,000	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	dokumen	115000	95624	6775	283,500,000	16,250,200	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.04.2.01.0009	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	layanan	14400	5469	3102	380,226,000	119,584,301	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.04.2.01.0010	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	dokumen	2500	476	590	35,000,000	8,416,000	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	Satuan	Target	Triwulan I	Triwulan II	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.04.2.01.0011	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	dokumen	3500	189	1851	344,706,000	123,611,901	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan
5.02.04.2.01.0013	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	dokumen	120	31	105	103,704,000	34,349,982	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan diusulkan penambahan target
5.02.04.2.01.0015	Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	laporan	2	0	1	27,750,000	11,705,000	S.d triwulan II sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan realisasi kinerja ditargetkan pada triwulan IV

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2024, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaran pemerintah dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD dengan beberapa aspek/ fokus sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan dengan diperolehnya opini WTP
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2.2
Realisasi Kinerja BPKAD Tahun 2024 Triwulan II

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Capaian		Tahun 2024 Triwulan II		Target Akhir RPJMD 2026
					2022	2023	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	100	Persen	100	100	100	33,33	100
		Rasio PAD	2,12	Persen	2,30	2.26	2.01	0.93	2,06
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	81,12	Indeks	84,95	84.35	84.00	n/a	85

Berdasarkan tabel 2.2 dapat dijelaskan bahwa:

1. Capaian indikator Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu sampai dengan triwulan II tercapai sebesar 33,33%, pencapaian tersebut merupakan penyusunan LKD yang telah selesai pada triwulan II. Sedangkan untuk penetapan APBD dan perubahan APBD ditargetkan pada triwulan III dan IV.
2. Capaian indikator Rasio PAD sebesar 0,93% yang nantinya ditargetkan tercapai pada akhir tahun anggaran. Salah satu faktor pada capaian tersebut yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Upaya yang akan dilakukan yaitu dengan adanya program edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat, yang rencananya akan dilaksanakan Gebyar Pajak Daerah pada triwulan IV dan penagihan secara intensif.
3. Capaian indikator nilai SAKIP OPD belum tersedia, dikarenakan penilaian sakip tahun N akan rillis pada triwulan I tahun N+1

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan menetapkan sasaran di Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang ingin dicapai/diwujudkan sesuai dengan program kerja/rencana kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan, yaitu

1. Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan
2. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah

Dengan sasaran tersebut dijabarkan menjadi 3 (tiga) indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan, yaitu:

1. Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu
2. Rasio PAD
3. Nilai SAKIP OPD

Dari 3 (tiga) indikator kinerja utama tersebut untuk tahun 2023 dapat dijabarkan kedalam beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tabel IKU, Program dan Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
1	2	3	4
1	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah
2	Rasio PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
1	2	3	4
3	Nilai SAKIP OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian sasaran ini tercemin dalam indikator-indikator kinerja dan target kinerja. Target capaian kinerja di tahun ke-2 direncanakan dalam Renstra BPKAD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Target Kinerja Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Target Kinerja Perubahan
1	2	3	3
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	100	100
	Rasio PAD	2,01	2,01
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	84,00	84,35

Pengukuran keberhasilan dari capaian indikator kinerja di atas, dapat di gambarkan dengan keberhasilan pada pencapain setiap sasaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Pendapatan Daerah

Fokus kegiatan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, penetapan pajak dan restribusi daerah, penertiban dan penyampain SPPT PBB, pendataan objek pajak dan restribusi daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase Peningkatan potensi pendapatan sebesar 4,8%.

Fokus kegiatan adalah penagihan pajak dan restribusi daerah, pengembangan dan penyuluhan pajak dan restribusi daerah, dan pemeriksaan pajak daerah

pemeriksaan pajak daerah dalam rangka mendukung target indikator 2024 yaitu Presentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak sebesar 100%, Presentase Pencapaian Target Pendapatan Restribusi yang dikelola BPKAD sebesar 100%.

b. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

Fokus kegiatan adalah fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah, peningkatan manajemen aset/barang daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome) sebesar 100%.

c. Program Pengelolaan Keuangan

Fokus kegiatan adalah

- Penyusunan Raperda tentang APBD dan Perubahan APBD, penyusunan Raperwal tentang penjabaran APBD dan Perubahan APBD dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu sebesar 100%.
- Pendanaan Perangkat Daerah pengendalian dan penertiban dokumen penatausahaan keuangan SKPKD dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D sebesar 100%
- Fasilitasi pengelolaan dana darurat dan mendesak dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos sebesar 100%.
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, pelaporan prognosis realisasi anggaran, dan pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu sebesar 100%.

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja di butuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegoatan prioritas di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024. Kebutuhan pendanaan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Perbandingan Renja 2024 dengan Perubahan Renja 2024

Kode	Kegiatan	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	+ / -
1	2	3	4	5
	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5.02	**KEUANGAN**	**25,028,276,000**	**26,811,880,000**	**1,783,604,000**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**16,739,494,000**	**17,957,674,000**	**1,218,180,000**
5.02.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dareah**	**17,742,000**	**17,742,000**	**0**
5.02.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,364,000	3,364,000	0
5.02.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,378,000	2,378,000	0
5.02.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,000,000	12,000,000	0
5.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13,379,165,000**	**13,354,587,000**	**-24,578,000**
5.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,256,361,000	13,231,783,000	-24,578,000
5.02.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120,600,000	120,600,000	0
5.02.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,204,000	2,204,000	0
5.02.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5,000,000**	**5,000,000**	**0**
5.02.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5,000,000	5,000,000	0
5.02.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**942,386,000**	**1,262,479,000**	**320,093,000**
5.02.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,500,000	7,500,000	0
5.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	359,386,000	579,479,000	220,093,000
5.02.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18,000,000	18,000,000	0
5.02.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120,000,000	120,000,000	0
5.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50,000,000	50,000,000	0
5.02.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,500,000	2,500,000	0
5.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	385,000,000	485,000,000	100,000,000
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**735,000,000**	**1,818,000,000**	**1,083,000,000**

Kode	Kegiatan	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	+ / -
1	2	3	4	5
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	444,000,000	1,237,000,000	793,000,000
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	291,000,000	581,000,000	290,000,000
5.02.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**765,252,000**	**823,683,000**	**58,431,000**
5.02.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	0
5.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	514,116,000	514,816,000	700,000
5.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	248,136,000	305,867,000	57731000
5.02.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**894,949,000**	**676,183,000**	**-218,766,000**
5.02.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152,426,000	143,660,000	-8,766,000
5.02.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	700,523,000	483,544,000	-216,979,000
5.02.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42,000,000	48,979,000	6979000
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**5,710,413,000**	**5,823,272,000**	**112,859,000**
5.02.02.2.01	**Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**993,805,000**	**945,908,000**	**-47,897,000**
5.02.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	18,750,000	15,615,000	-3,135,000
5.02.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	16,875,000	8,815,000	-8,060,000
5.02.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	27,260,000	23,000,000	-4,260,000
5.02.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	789,250,000	752,202,000	-37,048,000
5.02.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	79,450,000	78,224,000	-1,226,000
5.02.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	62,220,000	68,052,000	5,832,000
5.02.02.2.02	**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**373,183,000**	**397,925,000**	**24,742,000**
5.02.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	230,000,000	249,717,000	19717000
5.02.02.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	17,250,000	15,900,000	-1,350,000

Kode	Kegiatan	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	+ / -
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			
5.02.02.2.02.0006	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	18,750,000	22,510,000	3760000
5.02.02.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	50,000,000	51,265,000	1265000
5.02.02.2.02.0010	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	18,750,000	20,100,000	1350000
5.02.02.2.02.0011	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	38,433,000	38,433,000	0
5.02.02.2.03	**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**343,425,000**	**356,039,000**	**12614000**
5.02.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	36,750,000	36,750,000	0
5.02.02.2.03.0003	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5,625,000	5,625,000	0
5.02.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	89,750,000	99,750,000	10000000
5.02.02.2.03.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	69,250,000	69,250,000	0
5.02.02.2.03.0007	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6,000,000	6,000,000	0
5.02.02.2.03.0009	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	11,250,000	11,250,000	0
5.02.02.2.03.0011	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	124,800,000	127,414,000	2614000

Kode	Kegiatan	Renja 2024	Perubahan Renja 2024	+ / -
1	2	3	4	5
5.02.02.2.04	**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**4,000,000,000**	**4,123,400,000**	**123,400,000**
5.02.02.2.04.0009	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4,000,000,000	4,123,400,000	123,400,000
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**1,120,650,000**	**1,413,542,000**	**292,892,000**
5.02.03.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**1,120,650,000**	**1,413,542,000**	**292,892,000**
5.02.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	59,650,000	59,650,000	0
5.02.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	18,750,000	18,750,000	0
5.02.03.2.01.0007	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	227,250,000	266,950,000	39,700,000
5.02.03.2.01.0008	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	96,000,000	61,000,000	-35,000,000
5.02.03.2.01.0010	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	233,000,000	487,471,000	254,471,000
5.02.03.2.01.0011	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	486,000,000	519,721,000	33,721,000
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1,457,719,000**	**1,617,392,000**	**159,673,000**
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**1,457,719,000**	**1,617,392,000**	**159,673,000**
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	3,750,000	3,750,000	0
5.02.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	174,500,000	140,275,000	-34,225,000
5.02.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	37,500,000	37,500,000	0
5.02.04.2.01.0006	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	91,000,000	91,622,000	622,000
5.02.04.2.01.0007	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	122,950,000	172,950,000	50,000,000
5.02.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	283,500,000	283,500,000	0
5.02.04.2.01.0009	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	367,600,000	380,226,000	12,626,000
5.02.04.2.01.0010	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	35,000,000	35,000,000	0
5.02.04.2.01.0011	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	216,685,000	344,215,000	127,530,000
5.02.04.2.01.0013	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	97,484,000	100,604,000	3,120,000

Tabel 4.4
Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2024

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja				APBD				Perubahan Renja			
		Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.02.0.00.0.00.04.0000	**BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**				**25,028,276,000**				**25,644,386,000**				**26,811,880,000**
5.02	**KEUANGAN**				**25,028,276,000**				**25,644,386,000**				**26,811,880,000**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100**	**Persen**	**16,739,494,000**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100**	**Persen**	**17,304,362,000**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100**	**Persen**	**17,957,674,000**
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**100**	**Persen**		**Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**		**Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**	
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	**100**	**Persen**		**Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah**	**100**	**Persen**		**Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah**	**100**	**Persen**	
5.02.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dareah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**17,742,000**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**17,742,000**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**17,742,000**
5.02.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun	2	dokumen	3,364,000	Jumlah dokumen renja yang disusun	2	Dokumen	3,364,000	Jumlah dokumen renja yang disusun	2	dokumen	3,364,000
5.02.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	2,378,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	2,378,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	2,378,000
5.02.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	laporan	12,000,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	laporan	12,000,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	laporan	12,000,000
5.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase**	**100**	**persen**	**13,379,165,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase**	**100**	**persen**	**12,292,924,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase**	**100**	**persen**	**13,354,587,000**

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja				APBD				Perubahan Renja			
		Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah				**ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**				**ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**			
5.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	orang/bulan	13,256,361,000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	orang/bulan	12,170,120,000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	orang/bulan	13,231,783,000
5.02.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	120,600,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	120,600,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	120,600,000
5.02.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	2,204,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	2,204,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	2,204,000
5.02.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**persen**	**5,000,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**persen**	**5,000,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**persen**	**5,000,000**
5.02.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	5,000,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	5,000,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	5,000,000
5.02.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**persen**	**942,386,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**persen**	**1,294,386,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**persen**	**1,262,479,000**
5.02.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	7,500,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	7,500,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	7,500,000
5.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	4	paket	359,386,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	4	paket	711,386,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	4	paket	579,479,000

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja				APBD				Perubahan Renja			
		Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kantor yang Disediakan				Kantor yang Disediakan				Kantor yang Disediakan			
5.02.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	paket	18,000,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	paket	18,000,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	paket	18,000,000
5.02.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	120,000,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	120,000,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	120,000,000
5.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	50,000,000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	50,000,000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	50,000,000
5.02.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	2,500,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	2,500,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	2,500,000
5.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	laporan	385,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	laporan	385,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	laporan	485,000,000
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100**	**persen**	**735,000,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100**	**persen**	**1,851,000,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100**	**persen**	**1,818,000,000**
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	444,000,000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	1,219,000,000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	1,237,000,000
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	unit	291,000,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	unit	632,000,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	unit	581,000,000
5.02.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**100**	**persen**	**765,252,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang**	**100**	**persen**	**777,778,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**100**	**persen**	**823,683,000**

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja				APBD				Perubahan Renja			
		Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pemerintahan Daerah				**Urusan Pemerintahan Daerah**				**Pemerintahan Daerah**			
5.02.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	3,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	3,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	3,000,000
5.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	514,116,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	514,116,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	514,816,000
5.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	248,136,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	260,662,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	305,867,000
5.02.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**persen**	**894,949,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**persen**	**1,065,532,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**persen**	**676,183,000**
5.02.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41	unit	152,426,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41	unit	463,009,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41	unit	143,660,000
5.02.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	700,523,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	553,544,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	483,544,000
5.02.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70	unit	42,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70	unit	48,979,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70	unit	48,979,000

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja				APBD				Perubahan Renja			
		Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Indikator Program : Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)**	**8.08**	**persen**	**5,710,413,000**	**Indikator Program : Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)**	**8.08**	**persen**	**5,230,574,000**	**Indikator Program : Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)**	**8.08**	**persen**	**5,823,272,000**
5.02.02.2.01	**Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu**	**100**	**persen**	**993,805,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu**	**100**	**persen**	**984,001,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu**	**100**	**persen**	**945,908,000**
5.02.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	2	dokumen	18,750,000	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	2	dokumen	18,750,000	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	2	dokumen	15,615,000
5.02.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2	dokumen	16,875,000	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2	dokumen	16,875,000	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2	dokumen	8,815,000
5.02.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	2	dokumen	27,260,000	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	2	dokumen	27,260,000	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	2	dokumen	23,000,000
5.02.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	dokumen	789,250,000	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	dokumen	763,348,000	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	dokumen	752,202,000
5.02.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	dokumen	79,450,000	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	dokumen	80,548,000	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	dokumen	78,224,000
5.02.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12	dokumen	62,220,000	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12	dokumen	77,220,000	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12	dokumen	68,052,000
5.02.02.2.02	**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan**	**100**	**persen**	**373,183,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan**	**100**	**persen**	**377,134,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan**	**100**	**persen**	**397,925,000**

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja				APBD				Perubahan Renja			
		Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D				**SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D**				**SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D**			
5.02.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6500	dokumen	230,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6500	dokumen	232,686,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6500	dokumen	249,717,000
5.02.02.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	24	dokumen	17,250,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	24	dokumen	17,250,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	24	dokumen	15,900,000
5.02.02.2.02.0006	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12	dokumen	18,750,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12	dokumen	18,750,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12	dokumen	22,510,000
5.02.02.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	2	laporan	50,000,000	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	2	laporan	51,265,000	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	2	laporan	51,265,000

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja				APBD				Perubahan Renja			
		Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
5.02.02.2.02.0010	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	dokumen	18,750,000	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	dokumen	18,750,000	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	dokumen	20,100,000
5.02.02.2.02.0011	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200	orang	38,433,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200	orang	38,433,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200	orang	38,433,000
5.02.02.2.03	**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu**	**100**	**persen**	**343,425,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu**	**100**	**persen**	**346,039,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu**	**100**	**persen**	**356,039,000**
5.02.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4	dokumen	36,750,000	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4	dokumen	36,750,000	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4	dokumen	36,750,000
5.02.02.2.03.0003	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,	13	laporan	5,625,000	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,	13	laporan	5,625,000	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,	13	laporan	5,625,000

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja				APBD				Perubahan Renja			
		Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Triwulanan dan Semesteran				Triwulanan dan Semesteran				Triwulanan dan Semesteran			
5.02.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7	laporan	89,750,000	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7	laporan	89,750,000	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7	laporan	99,750,000
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	dokumen	69,250,000	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	dokumen	69,250,000	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	dokumen	69,250,000
5.02.02.2.03.0007	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2	dokumen	6,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2	dokumen	6,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2	dokumen	6,000,000
5.02.02.2.03.0009	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	dokumen	11,250,000	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	dokumen	11,250,000	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	dokumen	11,250,000
5.02.02.2.03.0011	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120	orang	124,800,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120	orang	127,414,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120	orang	127,414,000

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja				APBD				Perubahan Renja			
		Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.02.02.2.04	**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos**	**100**	**persen**	**4,000,000,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos**	**100**	**persen**	**3,523,400,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos**	**100**	**persen**	**4,123,400,000**
5.02.02.2.04.09	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	laporan	4,000,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	laporan	3,523,400,000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	laporan	4,123,400,000
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Indikator Program : Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)**	**100**	**persen**	**1,120,650,000**	**Indikator Program : Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)**	**100**	**persen**	**1,453,542,000**	**Indikator Program : Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)**	**100**	**persen**	**1,413,542,000**
5.02.03.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan**	**100**	**persen**	**1,120,650,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan**	**100**	**persen**	**1,453,542,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan**	**100**	**persen**	**1,413,542,000**
5.02.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	2	dokumen	59,650,000	Jumlah standar harga yang disusun	2	dokumen	59,650,000	Jumlah standar harga yang disusun	2	dokumen	59,650,000
5.02.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah	4	dokumen	18,750,000	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah	4	dokumen	18,750,000	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah	4	dokumen	18,750,000
5.02.03.2.01.0007	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12	laporan	227,250,000	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12	laporan	347,250,000	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12	laporan	266,950,000
5.02.03.2.01.0008	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	laporan	96,000,000	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	laporan	96,000,000	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	laporan	61,000,000
5.02.03.2.01.0010	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi	2	dokumen	233,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi	2	dokumen	437,171,000	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi	2	dokumen	487,471,000

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja				APBD				Perubahan Renja			
		Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
5.02.03.2.01.0011	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	81	laporan	486,000,000	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	81	laporan	494,721,000	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	81	laporan	519,721,000
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Indikator Program :Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)**	**5**	**persen**	**1,457,719,000**	**Indikator Program :Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)**	**5**	**persen**	**1,655,908,000**	**Indikator Program :Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)**	**5**	**persen**	**1,617,392,000**
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Indikator Kegiatan : Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BPKAD**	**100**	**persen**	**1,457,719,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BPKAD**	**100**	**persen**	**1,655,908,000**	**Indikator Kegiatan : Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BPKAD**	**100**	**persen**	**1,617,392,000**
		Indikator Kegiatan : Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak	**4,8**	**persen**		**Indikator Kegiatan : Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak**	**4,8**	**persen**		**Indikator Kegiatan : Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak**	**4,8**	**persen**	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	dokumen	3,750,000	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	dokumen	3,750,000	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	dokumen	3,750,000
5.02.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	laporan	174,500,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	laporan	174,500,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	laporan	140,275,000
5.02.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran	12	laporan	37,500,000	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran	12	laporan	37,500,000	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran	12	laporan	37,500,000

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja				APBD				Perubahan Renja			
		Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			
5.02.04.2.01.0006	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	laporan	91,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	laporan	92,322,000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	laporan	91,622,000
5.02.04.2.01.0007	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	3000	objek pajak	122,950,000	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	3000	objek pajak	172,950,000	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	3000	objek pajak	172,950,000
5.02.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	115000	dokumen	283,500,000	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	115000	dokumen	283,500,000	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	115000	dokumen	283,500,000
5.02.04.2.01.0009	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	14400	layanan	367,600,000	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	14400	layanan	380,226,000	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	14400	layanan	380,226,000
5.02.04.2.01.0010	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2500	dokumen	35,000,000	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2500	dokumen	35,000,000	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2500	dokumen	35,000,000
5.02.04.2.01.0011	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3500	dokumen	216,685,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3500	dokumen	344,706,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3500	dokumen	344,215,000
5.02.04.2.01.0013	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	120	dokumen	97,484,000	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	120	dokumen	103,704,000	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	120	dokumen	100,604,000
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2	laporan	27,750,000	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2	laporan	27,750,000	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2	laporan	27,750,000

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk dijadikan sebagai dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kota Pekalongan, serta dan sebagai panduan dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024. Penyusunan Perubahan Renja 2024 dilakukan setelah mempelajari visi, misi, dan program Pemerintah Kota Pekalongan sebagai muatan dan masukan dalam penyusunan visi, misi, strategi, kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan untuk satu tahun kedepan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan ini dapat menjadi sebagai acuan dan pedoman yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan peran serta dan partisipasi aktif dari semua stakeholders yang terkait didalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah serta menjadi dasar dan bahan untuk melakukan evaluasi dan guna penyusunan laporan pelaksanaan kinerja perangkat daerah tahunan maupun lima tahunan.

Dengan demikian, diharapkan Perubahan Renja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan dalam melaksanaan program dan kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah Kota Pekalongan di tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini masih memerlukan penyempurnaan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala BPKAD Kota Pekalongan,

Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 196507171992032014

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2024

Pekalongan
World's City of Batik

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat disusun tanpa ada halangan sesuatu apapun.

Usulan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan penyusunan yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan dan menyangkut keberhasilan dan pencapaian target yang telah dituangkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021 RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan Tahun 2024 ini, kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan Tahun 2024 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2024.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA PEKALONGAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19720913 199803 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 13
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 14
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 14
BAB IV PENUTUP 21
4.1 Catatan Penting 21
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 21
4.3 Rencana Tindak Lanjut 22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d (tahun 2023) BKPSDM Kota Pekalongan 7

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Pekalongan 12

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendaian, daan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai ketentuan dalam pasal 363, pasal 364 dan pasal 367 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
2. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
3. Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
4. Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
5. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun berdasarkan evaluasi perkembangan keadaan dalam 1 (satu) tahun berjalan. Perkembangan sebagaimana dimaksud adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan / atau keadaan darurat .

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pekalongan tahun 2024 didasarkan kepada :

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);

10) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;

11) Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan anggaran 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan adalah sebagai pedoman penyusunan Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Serta memberikan informasi kondisi riil Perangkat Daerah beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah melakukan evaluasi dan menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka kegiatan sehingga tercipta sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan.

Tujuan penyusunan perubahan anggaran 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1) Penyesuaian anggaran kegiatan untuk memenuhi kebutuhan selama satu tahun sehingga anggaran lebih efisien ,lebih efektif, tepat sasaran, tepat waktu dan akuntabel berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah;
2) Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga merupakan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta dasar perencanaan program dan kegiatan mendatang sehingga dapat mengakomodir semua aspirasi masyarakat / kebutuhan dinas yang dinamis.
3) Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam rangka pencapaian Visi Misi Walikota Pekalongan Tahun 2021 – 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

4.3 Rencana Tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi adalah proses menentukan nilai suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Evaluasi terhadap pembangunan daerah perlu dilakukan dalam rangka menganalisa apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran strategis yang diharapkan dan memberikan dampak dari pelaksanaan pembangunan daerah. Hasil evaluasi memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat yang dapat membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kota Pekalongan digunakan sebagai proyeksi pelaksanaan rencana kerja selanjutnya agar sasaran strategis PD dapat tercapai. Penyusunan Renja Perubahan 2024 dilaksanakan pada bulan Agustus 2024, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar proyeksi perubahan adalah evaluasi Renja sampai dengan bulan Juni (TW II). Hasil evaluasi Renja Perubahan Tahun 2024 pada BKPSDM Kota Pekalongan ditunjukkan pada Tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d (tahun 2023)
Badan Kepagawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan

N0	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s/d Tahun 2023	Persentase Capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**									
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	Tercapai
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	Tercapai
	persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	Tercapai
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	Tercapai
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Persentase Ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	Tercapai
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	Tercapai
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	102.36	100	102.36	102.36	102.36%	Tercapai
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	Tercapai

N0	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s/d Tahun 2023	Persentase Capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	Tercapai
II	**Program Kepegawaian Daerah**									
	Persentase Keterisian Jabatan	Persen	90	90	97,41	90	97,41	97,41	108,23%	Tercapai
	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	Persen	80	80	64,35	80	64,35	64,35	80,44%	Tidak tercapai
	Persentase PNS berkembang karier	Persen	50	50	66,67	50	66,67	66,67	133,33%	Tercapai
	Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	Persen	100	100	98,90	100	98,90	98,90	98,90%	Tidak tercapai
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									
	Persentase ketersediaan data PNS	Persen	100	100	100	100	100	100	100%	Tercapai
2	Mutasi dan Promosi ASN									
	Persentase Ketersediaan Data Mutasi dan Promosi ASN	Persen	110	110	118,71	110	118,71	118,71	118,71%	Tercapai
3	Pengembangan Kompetensi ASN									
	Persentase PNS berkembang kompetensinya (Diklat teknis dan Latpim)	Persen	42	42	45,35	42	45,35	45,35	107,97%	Tercapai
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
	Tingkat Disiplin ASN	Persen	100	100	99,97	100	99,97	99,97	99,97%	Tidak tercapai
III	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**									
	Persentase PNS berkembang kompetensinya	Persen	100	100	177,02	100	177,02	177,02	177,02%	Tercapai
1	Pengembangan Kompetensi Teknis									
	Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	128,42	100	128,42	128,42	128,42%	Tercapai

N0	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s/d Tahun 2023	Persentase Capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional									
	Cakupan penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Orang	207	250	20	40	20	220	88%	Tidak tercapai

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada BKPSDM Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja utama Rencana Stategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Pada awal perencanaan anggaran, cukup banyak usulan yang disampaikan baik oleh internal bidang maupun stakeholder terkait terutama ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi hanya sebagian saja yang dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran sehingga berdasarkan penentuan skala prioritas dan kebijakan yang ada.

Pada tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekalongan telah melaksanakan 2 (dua) program strategis dan 1 (satu) program penunjang yang dijabarkan dalam 12 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan pencapaian sasaran sebagai berikut :

a. Nilai Sakip OPD

Penilaian didasarkan atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang meliputi laporan kinerja instansi pemerintah, rencana aksi, perjanjian kinerja dan capaian kinerja OPD pada tingkat kota, provinsi maupun nasional. Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh inspektorat, BKPSDM mendapat nilai 82,75 dari target 83 atau ketercapaiannya 99,75%.

b. Persentase Laporan SKP ASN tepat waktu

Persentase pelaporan Kinerja ASN dengan target 87% realisasi 98,90% dengan ketercapaian 113,68%.

c. Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya

Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya dengan target 40 % yang dihitung dengan formulasi Jumlah pegawai yang mengikuti diklat / Jumlah pegawai yang potensial x 100%, untuk capaian pada tahun 2023 sebesar 85,92 %..Adapun hasil analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai Sakip OPD			83	84,50	86	82,75		84.50	Indeks
2	Persentase Laporan SKP ASN tepat waktu			87	88	89	98,90		99	Persen
3	Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya			40	40	40	85,92		65	Persen

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada Pemerintah Kota Pekalongan, BKPSDM Kota Pekalongan telah menyusun program kerja dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, BKPSDM Kota Pekalongan mendukung pencapaian misi ke-7 yaitu **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government"** dengan Tujuan "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien".

Guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, BKPSDM Kota Pekalongan menetapkan 3 indikator kinerja guna mengukur tingkat keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan. Indikator Kinerja dan capaian yang dihasilkan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1) Nilai Sakip OPD 82,75 dengan capaian 99,70%
2) Persentase Laporan SKP ASN Tepat Waktu 98,90% dengan capaian 113,68%
3) Persentase Jumlah ASN Yang Meningkat Kompetensinya 34,37% dengan capaian 85,92%

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen perubahan perencanaan selama tahun berjalan, sebagai salah satu bahan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unutk mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengambangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan perubahan tahun 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalonan disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
			APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja**	**100%**	**100%**	**Rp. 4.958.693.000**	**Rp. 4.760.180.000**	**(Rp. 198.513.000)**
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**100%**	**100%**			
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	**100%**	**100%**			
5.3.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evalasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**Rp18.614.000**	**Rp18.614.000**	-
5.3.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	Rp. 2.088.000	Rp. 2.088.000	-
5.3.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Rp. 1.476.000	Rp 1.476.000	-
5.3.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	15 laporan	Rp. 15.050.000	Rp. 15.050.000	-
5.3.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**Rp 4.093.488.000**	**Rp 3.788.829.000**	**(Rp. 304.659.000)**
5.3.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/bulan	32 orang/bulan	Rp. 4.043.920.000	Rp. 3.739.261.000	**(Rp. 304.659.000)**
5.3.01.2.02.0003	Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	Rp.48.200.000	Rp 48.200.000	-
5.3.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyususunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1laporan	1 laporan	Rp.1.368.000	Rp.1.368.000	-

KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
			APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
5.3.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**Rp 5.000.000**	**Rp 5.000.000**	-
5.3.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	Rp.5.000.000	Rp 5.000.000	-
5.3.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**Rp 304.095.000**	**Rp 360.481.000**	**Rp. 56.386.000**
5.3.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	Rp.1.500.000	Rp3.500.000	Rp 2.000.000
5.3.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	Rp. 78.190.000	Rp 105.511.000	Rp. 27.231.000
5.3.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	4 paket	Rp.1.000.000	Rp 1.000.000	-
5.3.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	Rp. 45.905.000	Rp 61.505.000	Rp 15.600.000
5.3.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	Rp.10.000.000	Rp 11.465.000	Rp 1.465.000
5.3.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	Rp.2.500.000	Rp 2.500.000	-
5.3.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultsi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 laporan	125 laporan	Rp. 165.000.000	Rp175.000.000	Rp 10.000.000
5.3.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**Rp. 361.964.000**	**Rp 361.964.000**	-
5.3.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	4 laporan	Rp.2.400.000	Rp 2.400.000	-
5.3.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	Rp.200.000.000	Rp.200.000.000	-
5.3.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 laporan	12 laporan	Rp. 159.564.000	Rp. 159.564.000	-

KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
			APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
	Umum Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					
5.3.01.2.9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**	**Rp. 175.532.000**	**Rp. 225.592.000**	**Rp 50.060.000**
5.3.01.2.9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 unit	13 unit	Rp. 52.882.000	Rp. 52.882.000	-
5.3.01.2.9.0009	Pemeliharaan/Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	Rp. 110.650.000	Rp. 131.310.000	Rp 20.660.000
5.3.01.2.9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	15 unit	Rp.12.000.000	Rp. 41.100.000	Rp 29.100.000
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Keterisian Jabatan**	**90%**	**90%**	**Rp. 1.226.091.000**	**Rp. 2.923.687.000**	**Rp 1.697.596.000**
		Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	**80%**	**80%**			
		Persentase PNS berkembang karier	**50%**	**80%**			
		Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	**100%**	**100%**			
5.03.02.2.01	**Pengadaan Pembehentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase ketersediaan data PNS**	**100%**	**100%**	**Rp. 519.775.000**	**Rp. 2.079.121.000**	**Rp 1.559.346.000**
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	1 dokumen	Rp. 357.969.000	Rp. 1.946.255.000	Rp. 1.588.286.000
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	16 dokumen	12 dokumen	Rp. 161.806.000	Rp. 132.866.000	(Rp. 28.940.000)
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase Ketersediaan Data Mutasi dan Promosi ASN**	**110%**	**90%**	**Rp. 235.512.000**	**Rp. 295.057.000**	**Rp 59.545.000**
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 dokumen	6 dokumen	Rp. 33.345.000	Rp. 38.095.000	Rp. 4.750.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
			APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 dokumen	2 dokumen	Rp. 202.167.000	Rp. 256.962.000	Rp. 54.795.000
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase PNS berkembang kompetensinya (Diklat Teknis dan Latpim)**	**42%**	**42%**	**Rp. 251.706.000**	**Rp. 372.911.000**	-
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 dokumen	1 dokumen	Rp. 31.540.000	Rp. 293.745.000	Rp 262.205.000
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	17 orang	4 orang	Rp. 165.166.000	Rp. 24.166.000	(Rp. 141.000.000)
5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	10 dokumen	10 dokumen	Rp.36.000.000	Rp.36.000.000	-
5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi jabatan fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 dokumen	1 dokumen	Rp.19.000.000	Rp. 19.000.000	-
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Tingkat Disiplin ASN**	**100%**	**100%**	**Rp. 219.098.000**	**Rp. 176.598.000**	**(Rp 42.500.000)**
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	130 orang	130 orang	Rp.43.000.000	Rp. 43.000.000	-
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1 orang	4 orang	Rp. 120.098.000	Rp. 77.598.000	(Rp. 42.500.000)
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 laporan	5 laporan	Rp.56.000.000	Rp.56.000.000	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase PNS berkembang kompetensinya**	**100%**	**100%**	**Rp. 1.938.534.000**	**Rp. 1.579.392.000**	**(Rp. 359.142.000)**
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase Penyelenggaran, Pembinaan, pengoordinasian., fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan**	**100%**	**100%**	**Rp. 1.817.534.000**	**Rp. 1.524.017.000**	**(Rp 293.517.000)**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
			APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Komptensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	260 orang	210 orang	Rp. 1.438.174.000	Rp. 1.200.237.000	(Rp 237.937.000)
5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan	3 dokumen	3 dokumen	Rp. 379.360.000	Rp. 323.780.000	(Rp. 55.580.000)
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Komptensi Manajerial dan Fungsional**	**Cakupan penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	**200 orang**	**200 orang**	**Rp. 121.000.000**	**Rp. 55.375.000**	**(Rp 65.625.000)**
5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10 orang	55 orang	Rp.50.000.000	Rp. 25.925.000	(Rp. 24.075.000)
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 laporan	1 laporan	Rp.65.000.000	Rp. 29.450.000	(Rp. 35.550.000)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		SELISIH
			APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	2 dokumen	0 dokumen	Rp. 6.000.000	0	(Rp. 6.000.000)

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan selama satu tahun kedepan. Renja disusun mengacu pada visi misi Walikota Pekalongan dan berpedoman kepada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting

Terbatasnya alokasi anggaran serta proses penganggaran dalam kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin harus mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan penyelenggaraan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Pekalongan tahun 2024, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Substansi Renja BKPSDM Kota Pekalongan disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Pekalongan tahun 2025 dan Renstra BKPSDM Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

b. BKPSDM Kota Pekalongan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024.

c. BKPSDM Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 yang berpedoman kepada Renja BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2024 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja BKPSDM Kota Pekalongan selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BKPSDM. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf BKPSDM Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Untuk dapat merealisasikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja BKPSDM Kota Pekalongan Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Apabila terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja yang telah direncanakan, baik diakibatkan oleh anggaran yang kurang memadai ataupun permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu Perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Semoga Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Pekalongan sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKALONGAN

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19720913 199803 1 001

Semoga Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Pekalongan sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKALONGAN

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Ka. Bid		
Kasubbid / Kasubbag		

RUSMANI BUDIHARJO, A.KS, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19720913 199803 1 001

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

City Of Crafts
and Folk Art
Kota Pekalongan
Designed UNNESCO
Creative City In 2014

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

INSPEKTORAT

BERANI JUJUR! HEBAT!

PERUBAHAN RENCANA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2024

#bangga melayani bangsa

Pekalongan
World's City of Batik

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan proses Perubahan Penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 ini pada hakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya Inspektorat Daerah Kota Pekalongan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta sarana evaluasi atas pencapaian kinerjanya dengan memperhatikan kriteria komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja.

Pekalongan, 31 Juli 2024

Plh. INSPEKTUR DAERAH
KOTA PEKALONGAN

SRI MULYANI, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19671003 199703 2 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2024, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD berpedoman pada renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 (RKPD 2024).

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efesien dan akuntanbilitas yang berorientasi pada hasil dan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja di tahun 2024, maka perlu diadakana Perubahan segera menetapkan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 yang memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

Penetapan Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan sebagai tolok ukur dalam menghitung keberhasilan organisasi Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Pekalongan yang akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan pada

akhir tahun anggaran. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan renja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerntah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024, adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dalam menentukan prioritas program/kegiatan dan kebijakan anggaran tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat Daerah, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Pedoman Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah Tahun 2024;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
5. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah dan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip- prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRI WULAN II INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRI WULAN II
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

Berdasarkan Berita Acara Desk RKPD/ Renja Triwulan II Tahun 2024 dengan BAPPEDA pada tanggal 02 Juli 2024 ,dengan catatan sebagai berikut :

NO	TUJUAN KOTA	INDIKATOR TUJUAN KOTA	CATATAN DESK
I. INDIKATOR TUJUAN KOTA			
OPD tidak mengampu indikator, atau tidak ditemukan inkonsistensi antara uraian, target, satuan maupun capaian pada level indikator ini			

NO	SASARAN KOTA	IKU KOTA	CATATAN DESK
II. INDIKATOR SASARAN KOTA			
OPD tidak mengampu indikator, atau tidak ditemukan inkonsistensi antara uraian, target, satuan maupun capaian pada level indikator ini			

NO	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	CATATAN DESK
III. INDIKATOR TUJUAN OPD			
OPD tidak mengampu indikator, atau tidak ditemukan inkonsistensi antara uraian, target, satuan maupun capaian pada level indikator ini			

NO	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN (IKU)	CATATAN DESK
IV. IKU OPD			
OPD tidak mengampu indikator, atau tidak ditemukan inkonsistensi antara uraian, target, satuan maupun capaian pada level indikator ini			

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CATATAN DESK
V. INDIKATOR PROGRAM			
OPD tidak mengampu indikator, atau tidak ditemukan inkonsistensi antara uraian, target, satuan maupun capaian pada level indikator ini			

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	CATATAN DESK
VI. INDIKATOR KEGIATAN			
Tidak ditemukan inkonsistensi antara uraian, target, satuan maupun capaian pada level indikator ini			

NO	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CATATAN DESK
VII. INDIKATOR SUB KEGIATAN			
1	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Agar diajukan penyesuaian target indikator saat Perubahan RKPD 2024

Hasil desk evaluasi kinerja tri wulan II tahun 2024 diperoleh hasil seperti terlampir pada tabel berikut :

(Tabel T- C. 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2024 Kota Pekalongan

I. Indikator Tujuan Kota

Kode	Uraian Tujuan Kota	indikator Tujuan Kota	Tipe Indi / Capaian / f.pengali	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
							TW 1	TW2				
Berdasarkan cascading kinerja, OPD tidak mengampu indikator ini												

II. IKU Kota

Kode	Uraian Sasaran Kota	IKU Kota	Tipe Indi / Capaian / f.pengali	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
							TW 1	TW2				
7.14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik /1	skor	74.57	73.31	n/a	n/a	n/a	n/a	belum tersedia data	
7.16.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Maturitas SPIP	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik /1	nilai	3.4	3.02	n/a	n/a	n/a	n/a	belum tersedia data	
7.16.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik /1	OPD	5	2	n/a	n/a	n/a	n/a	belum tersedia data	

III. Indikator Tujuan OPD

Kode	Uraian Tujuan	indikator Tujuan	Tipe Indi / Capaian / f.pengali	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
							TW 1	TW2				
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik /1	Indeks	80.88	0	n/a	98.7	98.7	122.04	Tercapai	Nilai IKM Semester 1: 98,704
2	Meningkatkan kualitas pengendalian internal	Maturitas SPIP	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik /1	Nilai	3.4	0	n/a	n/a	n/a	n/a	belum tersedia data	
3	Meningkatkan Implementasi Zona Integritas pada OPD	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	Akumulasi dengan Tahun sebelumnya/ Semakin Tinggi Semakin Baik /1	OPD	5	0	0.07	n/a	n/a	n/a	belum tersedia data	

IV. Indikator Sasaran (IKU)

Kode	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Tipe Indi / Capaian / f.pengali	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
							TW 1	TW2				
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik /1	Indeks	86.5	0	n/a	n/a	n/a	n/a	belum tersedia data	
2.1	Meningkatnya OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik /100	person	67.74	0	n/a	53.33	53.33	78.73	Tidak Tercapai	Jumlah Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi: TW. 1:16 Target yang harus dicapai: 30 OPD
3.1	Meningkatnya Kepatuhan OPD dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	Akumulasi dengan Tahun sebelumnya/ Semakin Tinggi Semakin Baik /1	OPD	13	3	n/a	n/a	n/a	n/a	belum tersedia data	

V. Indikator Program OPD

Kode	Hama Program	Indikator Program	Tipe Indi / Capaian / f.pengali	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
							TW 1	TW2				
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik /1	nilai	3	3	n/a	0	0	0	Tidak Tercapai	belum ada nilai kapabilitas APIP , data di desk tw 4 2023
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik /1	persen	100	93.34	29.41	13.04	42.44	42.44	Tidak Tercapai	Persentase capaian kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah : 5,83% Persentase capaian kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah : 20,24 % Jumlah kegiatan : 2
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik /1	persen	100	99.33	19.36	24.21	43.57	43.57	Tidak Tercapai	Persentase capaian kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah : 22,22% Persentase capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah : 25,41% Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : 25%
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik /1	persen	100	100	16.67	16.67	33.34	33.34	Tidak Tercapai	Persentase capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik /100	persen	85	57.14	0	0	0	0	Tidak Tercapai	belum ada Tindak lanjut

VI. Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian / f.pengali	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW2				
6.01012.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100	0	10	5.83	15.83	15.83	Tidak Tercapai	
6.01012.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0	0				
	Jumlah dokumen renja yang disusun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	dokumen	2	0	0	0	0	0	Tidak Tercapai	TW. I: 0,00 TW. II: 0,00 capaian dtw3
6.01012.0102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0	0				
	Jumah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	dokumen	2	0	0	0	0	0	Tidak Tercapai	capaian d tw 3/4
6.01012.0107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					30	17.5				
	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	bulan	12	0	3	3	6	50	Tidak Tercapai	TW. II: 3 bulan
	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	dokumen	4	0	1	1	2	50	Tidak Tercapai	TW. II: 1dokumen (evaluasi renja TW. I tahun 2023)
	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	dokumen	2	0	1	0	1	50	Tidak Tercapai	capaian d tw 3 menunggu pk perubahan yg menunggu perubahan apbd
	Jumlah dokumen SPIP (1Dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 Laporan pemantauan RTP) yang disusun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	dokumen	5	0	1	1	2	40	Tidak Tercapai	laporan pemantauan RTP tw 2
6.01012.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100	0	48.81	20.24	69.05	69.05	Tidak Tercapai	
6.01012.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					25	25				
	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	bulan	12	0	3	3	6	50	Tidak Tercapai	TW. II: 3 bulan

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian / f.pengali	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW2				
6.01012.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12.5	12.5				
	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	bulan	12	0	3	3	6	50	Tidak Tercapai	TW. II : 3 bulan
	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	unit	8	0	0	0	0	0	Tidak Tercapai	belum ada pengadaan
6.01012.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					25	25				
	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	bulan	12	0	3	3	6	50	Tidak Tercapai	TW. II : 3 bulan
6.01012.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					27.27	18.18				
	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	bulan	11	0	3	2	5	45.45	Tidak Tercapai	hanya 2 bulan karena april bulan romadon
6.01012.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					25	25				
	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	bulan	12	0	3	3	6	50	Tidak Tercapai	TW. II: 3 bulan
6.01012.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					25	25				
	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	bulan	12	0	3	3	6	50	Tidak Tercapai	TW. II: 3 bulan
6.01012.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					52.83	47.17				
	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	orang/kali	53	0	28	25	53	100	Tercapai	TW. II: 25 org/kali
6.01012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100	0	25	25	50	50	Tidak Tercapai	

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian / f.pengali	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW2				
6.01012.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					25	25				
	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	bulan	12	0	3	3	6	50	Tidak Tercapai	TW. II: 3 bulan
6.01012.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Somber Daya Air dan Listrik					25	25				
	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	bulan	12	0	3	3	6	50	Tidak Tercapai	TW. II: 3 bulan
6.01012.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					25	25				
	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	bulan	12	0	3	3	6	50	Tidak Tercapai	TW. II: 3 bulan
6.01012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100	0	16.67	16.67	33.33	33.33	Tidak Tercapai	
6.01012.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan					25	25				
	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	bulan	12	0	3	3	6	50	Tidak Tercapai	TW. II: 3 bulan
6.01012.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0	0				
	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	unit	1	0	0	0	0	0	Tidak Tercapai	rencana rehab di bulan juli sd agustus
6.01012.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau					25	25				
	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	bulan	12	0	3	3	6	50	Tidak Tercapai	TW. II: 3 bulan

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian / f.pengali	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW2				
6.0102.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal										
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100	0	25.88	15.79	4167	4167	Tidak Tercapai	Jumlah capaian Laporan Hasil Pemeriksaan Internal yang Terbit Tepat Waktu : TW. I: 59 TW. II: 36 TW. III: TW. IV : target Laporan Hasil Pemeriksaan Internal yang telah ditetapkan : 228
6.0102.2.0101	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah										
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja yang terbit tepat waktu	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	laporan	64	0	10	2	12	18.75	Tidak Tercapai	1 Audit kinerja Dinparbudpora 2. Audit kinerja Dinperpa
6.0102.2.0102	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah										
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan yang terbit tepat waktu	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	laporan	35	0	30	0	30	85.71	Tidak Tercapai	TW. II: 0,00
6.0102.2.0103	Reviu Laporan Kinerja										
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja yang disusun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	laporan	80	0	67	15	82	102.5	Tercapai	1 reviu LKE ZI WBK/WBBM (dindukcapiljkec pkl barat;DPMPTSP; DKP;Dinkes;Puskesmas Noyontaansari;RSUD BendanjPuskesmas Pkl Selatan;Dinarpus;Dpupr;Kec pkl selatan) 11OPD 2. Reviu RKPD 2024 3. Reviu Tata Kelola BMD 4. Reviu gaji p3k tenaga kesehatan formasi th 2022 5. Reviu tata kelola PAPBJ
6.0102.2.0104	Reviu Laporan Keuangan										
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan yang disusun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	laporan	40	0	40	11	51	127.5	Tercapai	1 Reviu pemberian thr guru tahun 2023 2. Reviu HPS lanjutan (SMP 6) 3. Reviu HPS Penigkatan Jalan Samudra 4. Reviu SSH (Standar satuan harga) 5. reviu ASB Fisik (HSPKj/dpupr dan non Fisik/BPKAD (2) 6. Reviu gaji p3k tenaga kesehatan formasi th 2022 7. Reviu HPS 3 Proyek strategis (3) 8. Reviu Jumlah TPG dan tamsil Gaji 13 Guru th 2023

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian / f.pengali	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW2				
6.0102.2.0106	Kerja Sama Pengawasan Internal										
	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal yang disusun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	laporan	2	0	1	0	1	50	Tidak Tercapai	
6.0102.2.0107	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan										
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	Akumulasi Tiap Triwulan/	laporan	7	0	0	2	2	28.57	Tidak Tercapai	TW. II : 2 laporan (desk TL di bulan mei dan RAKORWASDA di
6.0102.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										
	Persentase ketercapaian Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang Terbit Tepat Waktu	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100	0	0	60	60	60	Tidak Tercapai	1 audit tptgr (keruda terkait kehilangan aset motor dinas an indah budiarti) 2. riksus dana hibah bansos di setda bagian kesra 3. riksus di dishub terkait parkir (atas permintaan APH)
6.0102.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah										
	Jumlah Bulan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	bulan	12	0	3	3	6	50	Tidak Tercapai	TW. II : 3 bulan
6.0102.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										
	Jumlah Bulan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	bulan	12	0	3	3	6	50	Tidak Tercapai	TW. II: 3 bulan
6.0103.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi										
	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100	0	9.09	18.18	27.27	27.27	Tidak Tercapai	Jumlah capaian Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun : TW. 1:1(PKPT Penetapan) TW. II: 2 (SOP/Juknis, laporan penyampaian pedoman penilaian PKAPIP) TW. III : TW. IV : target dokumen kebijakan yang harus dicapai: 11(target diambil dari dokumen yang dihasilkan pada kegiatan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan)

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian / f.pengali	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW2				
6.0103.2.0101	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan										
	kebijakan/regulasi tentang Pengawasan (PKPT/Jakwas) yang disusun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	dokumen	3	0	1	0	1	33.33	Tidak Tercapai	pkpt perubahan tw 3 jakwas tw 4
	Jumlah Dokumen Peraturan/Pedoman/SOP tentang peningkatan Kapabilitas APIP yang disusun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	laporan	1	0	0	1	1	100	Tercapai	sop/juknis pk apip
	Jumlah Laporan Dokumen RAD PPK yang disusun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	laporan	1	0	0	0	0	0	Tidak Tercapai	tw 4 setelah rekap mcp kpk
	Jumlah Laporan pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	laporan	2	0	0	1	1	50	Tidak Tercapai	rapat penyampaian pedoman penilaian pk apip sosialisasi jakwas tw 4
6.0103.2.0102	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan										
	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	aplikasi	1	0	0	0	0	0	Tidak Tercapai	aplikasi simwas masih on progress
	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	laporan	3	0	0	0	0	0	Tidak Tercapai	simwas masih proses
6.0103.2.02	Pendampingan dan Asistensi										
	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	95	0	5.45	5.45	10.91	11.48	Tidak Tercapai	Jumlah capaian laporan pendampingan dan asistensi yang dilakukan : TW. I: 3 (2 laporan MCP TW. I dan laporan saber pungli TW. I) TW. II: 3 (2 laporan MCP TW. II dan laporan saber pungli TW. II) TW. III: TW. IV ; target pendampingan dan asistensi yang telah ditetapkan : 55 (target diambil dari laporan yg dihasilkan dari kegiatan pendampingan dan asistensi)

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian / f.pengali	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Ket Desk Triwulan 2
						TW 1	TW2				
6.0103.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah										
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	perangkat daerah	31	0	0	0	0	0	Tidak Tercapai	belum dimulai pengumpulan dokumen SPIP
6.0103.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi										
	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang disusun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	laporan	10,00	0	0	0	0	0	Tidak Tercapai	di tw 3 / 4
6.0103.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan										
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	laporan	8	0	2	2	4	50	Tidak Tercapai	
	Jumlah Laporan Monitoring LHKASN yang disusun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	laporan	1	0	0	0	0	0	Tidak Tercapai	
	Jumlah Laporan Monitoring LHKPN yang disusun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	laporan	1	0	0	0	0	0	Tidak Tercapai	
6.0103.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas										
	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi penegakan integritas yang disusun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	laporan	4	0	1	1	2	50	Tidak Tercapai	laporan unit pemberantasan pungli tw II

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah kota Pekalongan

Rencana Kerja ini mencerminkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti halnya pencapaian visi dan misi kepala daerah, prioritas pembangunan dan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Pekalongan. Plafon anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan untuk tahun 2024 sejumlah Rp. 6.743.019.000,- (Enam miliar tujuh ratus empat puluh tuga juta Sembilan belas ribu upiah) yang terdiri dari 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 berubah menjadi sejumlah Rp. 6.809.455.000,- (Enam miliar delapan ratus Sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau bertambah Rp. 66.436.000,- (enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Dari rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka disajikan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Inspektorat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana table berikut :

Kode OPD / Kode Bidang Urusan / Kode Program / Kode Kegiatan / Kode Sub Kegiatan	Nama OPD / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024				
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4	5		6	7
6.01.0.00.0.00.01.0000	**Inspektorat**						
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**					**6.025.233.000**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**Pekalongan**	**100**	**persen**	**5.697.872.000**	
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Pekalongan**	**100**	**persen**	**11.000.000**	**DAU**
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	**Pekalongan**	2	dokumen	2.500.000	**DAU**
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	**Pekalongan**	2	dokumen	1.500.000	**DAU**
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	**Pekalongan**	12	bulan	7.000.000	**DAU**

		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	**Pekalongan**	4	dokumen		**DAU**
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	**Pekalongan**	2	dokumen		**DAU**
		Jumlah Dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	**Pekalongan**	5	dokumen		**DAU**
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**Pekalongan**	**100**	**persen**	**5.004.870.000**	**DAU**
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	**Pekalongan**	12	bulan	4.965.570.000	**DAU**
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	**Pekalongan**	12	bulan	37.800.000	**DAU**
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	**Pekalongan**	1	dokumen	1.500.000	**DAU**
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Pekalongan**	**100**	**persen**	**147.838.000**	**DAU**
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	**Pekalongan**	2	kali	5.000.000	**DAU**
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan PAK tenaga fungsional yang disusun	**Pekalongan**	2	laporan	8.000.000	**DAU**
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri	**Pekalongan**	2	kali	134.838.000	**DAU**
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**Pekalongan**	**100**	**persen**	**304.166.000**	**DAU**
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	**Pekalongan**	12	bulan	5.000.000	**DAU**
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	**Pekalongan**	12	bulan	75.820.000	**DAU**
		jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	**Pekalongan**	2	Unit		**DAU**
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	**Pekalongan**	12	bulan	7.000.000	**DAU**
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	**Pekalongan**	11	bulan	32.000.000	**DAU**
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	**Pekalongan**	12	bulan	12.875.000	**DAU**
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	**Pekalongan**	12	bulan	2.500.000	**DAU**
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	**Pekalongan**	150	orang/kali	168.971.000	**DAU**
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pekalongan**	**100**	**persen**	**78.656.000**	**DAU**
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	**Pekalongan**	12	bulan	3.500.000	**DAU**
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	**Pekalongan**	12	bulan	34.800.000	**DAU**

6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	**Pekalongan**	12	bulan	40.356.000	**DAU**
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pekalongan**	**100**	**persen**	**151.342.000**	**DAU**
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	**Pekalongan**	16	unit	119.842.000	**DAU**
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	**Pekalongan**	1	unit	6.500.000	**DAU**
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	**Pekalongan**	12	bulan	25.000.000	**DAU**
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan**	**Pekalongan**	**85**	**persen**	**94.201.000**	**DAU**
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu**	**Pekalongan**	**100**	**persen**	**87.203.000**	**DAU**
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja yang terbit tepat waktu	**Pekalongan**	64	Laporan	10.000.000	**DAU**
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan yang terbit tepat waktu	**Pekalongan**	35	Laporan	10.000.000	**DAU**
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja yang terbit tepat waktu	**Pekalongan**	99	laporan	10.000.000	**DAU**
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan yang terbit tepat waktu	**Pekalongan**	40	laporan	10.000.000	**DAU**
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal	**Pekalongan**	2	laporan	21.388.000	**DAU**
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	**Pekalongan**	7	laporan	25.815.000	**DAU**
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase ketercapaian Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang Terbit Tepat Waktu**	**Pekalongan**	**100**	**persen**	**6.998.000**	**DAU**
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang diselesaikan tepat waktu	**Pekalongan**	5	Laporan	3.064.000	**DAU**
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang terbit tepat waktu	**Pekalongan**	5	Laporan	3.934.000	**DAU**
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Level Kapabilitas APIP**	**Pekalongan**	**3**	**poin**	**233.160.000**	**DAU**

6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun**	**Pekalongan**	**100**	**persen**	**23.612.000**	**DAU**
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan/Regulasi tentang Pengawasan (PKPT/Jakwas) yang disusun	**Pekalongan**	3	Dokumen	18.850.000	**DAU**
		Jumlah Dokumen Peraturan/Pedoman/SOP tentang peningkatan Kapabilitas APIP yang disusun	**Pekalongan**	1	laporan		**DAU**
		Jumlah Laporan Dokumen RAD PPK yang disusun	**Pekalongan**	1	laporan		**DAU**
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan yang disusun	**Pekalongan**	2	laporan		**DAU**
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pemgawasan	**Pekalongan**	4	laporan	4.762.000	**DAU**
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilakukan**	**Pekalongan**	**100**	**persen**	**209.548.000**	**DAU**
6.01.03.2.01.02	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	**Pekalongan**	31	opd	9.466.000	**DAU**
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pendampingan asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	**Pekalongan**	10	laporan	13.026.000	**DAU**
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dokumen LHKASN	**Pekalongan**	2500	Dokumen	90.140.000	**DAU**
		Jumlah Dokumen LHKPN ASN	**Pekalongan**	500	Dokumen		**DAU**
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	**Pekalongan**	8	Laporan		**DAU**
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi penegakan integritas yang disusun	**Pekalongan**	4	Laporan	96.916.000	**DAU**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran dan kebijakan daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah Program Kerja Pangawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungi serta sasaran program Inspektorat Daerah.

Selanjutnya Inspektorat Daerah Kota Pekalongan sebagai pemilik fungi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa meningkatkan kualitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi resiko pada perangkat daerah dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajemen resiko. Manajemen resiko berasal dari pemilihan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah yang memiliki resiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis resiko yang diusulkan dalam suplemen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran audit kinerja dalam rangka menjaga sinkronisasi dan konsistensi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan.

Untuk itu diperlukan rencana tindak lanjut terhadap beberapa hal tersebut yang telah direncanakan yaitu :

1. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan – kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka percepatan penyelesaian temuan dan rekomendasi.
2. Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan" BPK-RI/APIP dan pendampingan terhadap laporan keuangan, pemeriksaan/ audit kinerja dan pemeriksaan operasional serta

manajemen risiko terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

3. Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan pemenuhan dokumen MCP.
4. Membuka layanan klinik konsultasi dan pemberian advisory terhadap OPD di Pemerintah Kota Pekalongan.
5. Bekerjasama dengan KPK-RI dan Badan Statistik dalam Rangka Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI).
6. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pengawasan, Sarana dan Prasarana dalam

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 yang memuat pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas dan penunjang untuk dilaksanakan pada tahun 2024 yang disesuaikan dengan RKPD 2024 Tahun 2023. Diharapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang telah disusun dapat dimplementasikan dalam kegiatan pengawasan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja dan pendanaan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2024 rangka mendukung tugas-tugas di bidang pengawasan.

Pekalongan, 31 Juli 2024

Plh. INSPEKTUR DAERAH
KOTA PEKALONGAN

SRI MULYANI, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19671003 199703 2 001

RENCANA KERJA PERUBAHAN

RENJA PERUBAHAN 2024

Pekalongan
World's City of Batik

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
KOTA PEKALONGAN

Jalan Kusuma Bangsa No.96 Kota Pekalongan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Alhamdulillah dengan rahmatNya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2024 telah berhasil disusun.

Renja Perubahan ini di susun berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan. Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen perubahan renja ini memuat rencana program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara Kota pekalongan yang disertai indikator dan target perubahan kinerja. Renja Perubahan akan menjadi acuan untuk penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Kerja (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan (DPPA) Anggaran Kecamatan Pekalogan Utara Kota pekatongan TahunAnggaran 2024.

Diharapkan Renja ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh jajaran Kecamatan Pekalongan Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tujuan dan sasarana pembangunan Kota Pekalongan dapat tercapai dengan optimal.terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pekalongan,08Agustus 2024
CAMAT PEKALONGAN UTARA
KOTA PEKALONGAN

WISMO ADITYO,S.Pt,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19710926 199903 1 006

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR Ii
DAFTAR ISI Iii
DAFTAR TABEL Iv
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum..... 3
1.3 Maksud dan Tujuan..... 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024..... 7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Rekapitulasi Sub Kegiatan perubahan Renja Bappeda Tahun 2024
3.1.1 Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu 21
3.1.2 Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Pengurangan Pagu Tetapi Mengalami Perubahan Indikator 22
3.1.3. Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu 24
3.1.4. Sub Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran 25
3.1.5.Sub Kegiatan yang mengalami penghapusan 25
3.2 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024 26
BAB IV PENUTUP..... 41

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Kecamatan Pekalongan Utara Kota pekarongan S/D Triwulan II Tahun 2024	9
Tabel 3.1	Rekapitutasi Sub Kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2024	21
Tabel 3.2	Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Tetapi Mengalami Perubahan Indikator pada Perubahan renja 2024	22
Tabel 3.3	Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024	24
Tabel 3.4	Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024	25
Tabel 3.5	Sub Kegiatan Yang Mengalami Penambahan pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024	26
Tabel 3.6	Sub Kegiatan Yang Mengalami Penghapusan pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024	26
Tabel 3.7	Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Perubahan Renja Tahun 2024	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	3

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. lndikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin meningkatnya indeks pembangunan manusia. Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memaslikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Renja Perubahan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2024 ini disusun berdasarkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dengan mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pekalongan Utara tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Hal ini dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung samapai dengan seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sebagai upaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan peluang otonomi seluas - luasnya maka kewenangan diberikan kepada daerah. Hal ini merupakan peluang untuk memberikan kemajuan pembangunan dengan ciri khas dan potensi daerah dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya masyarakat daerah tersebut. salah satu hal yang mendukung dalam upaya mencapai tujuan pelayanan publik adalah dengan pelaksanaan rencana daerah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif melalui beberapa tahapan perencanaan.

Renja Perubahan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan penentuan pagu dalam Renja Kecamatan Pekalongan

Utara Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 mengacu kepada rencana program prioritas pada Rancangan Akhir RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024.

Rancangan Perubahan Rencana kerja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2024 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pekalongan Utara.

Gambar 1

Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

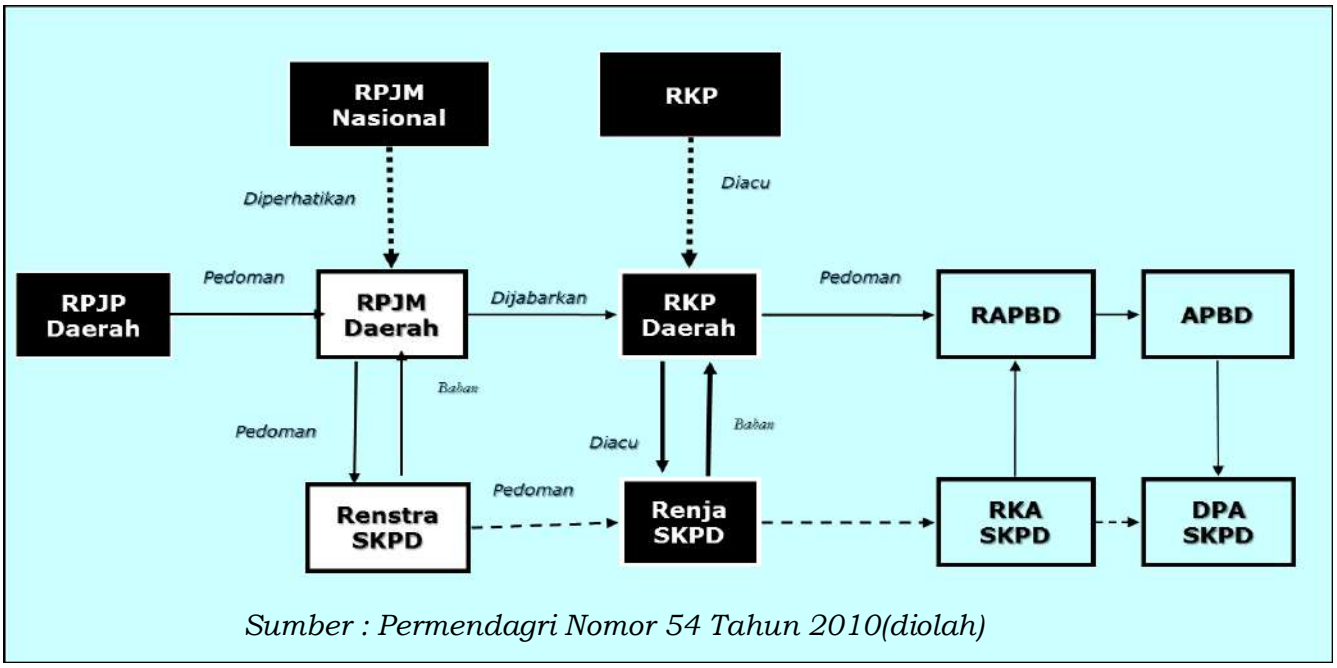

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010(diolah)

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tahun 2024 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Taun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
10. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.Maksud

Dokumen Rancangan Akhir perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Utara Kota pekalongan disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah rahun 2024 dan sebagai acuan daram penyusunan perubahan RKA Kecamatan Pekalongan Utara Kota pekalongan Tahun 2024.

2. Tujuan

Dokumen Rancangan Akhir perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Utara Kota pekalongan disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara Kota pekalongan.

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2024, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 1312), bahwa perubahan renja perangkat daerah ditetapkan berdasarkan peraturan kepala daerah tentang RKPD.

Sedangkan dasar pertimbangan perubahan RKPD yang ditindaklanjuti dengan perubahan renja perangkat daerah menurut permendagri tersebut adalah adanya perubahan pada :

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. Target sasaran pembangunan daerah:
3. Prioritas pembangunan daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Utara merupakan dokumen yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan, menindaklanjuti capaian program dan kegiatan yang dilakukan, dengan disesuaikan pada kondisi aktual daerah. Selain itu, evaluasi bertujuan untuk menilai dan memastikan pencapaian pada target rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD tahun 2024 dan sasaran RPJMD dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 dilakukan dengan memerhatikan evaluasi terhadap laporan triwulan dan tahunan sebagaimana realisasi capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD tahun 2024. Evaluasi terhadap realisasi dana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terhadap pagu indikatif. Evaluasi juga bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Kecamatan pekalongan Utara dan capaian kinerja triwulanan II tahun 2024 di dasarkan pada data yang ada pada Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 Kecamatan Pekalongan Utara, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Kecamatan Pekalongan Utara untuk tahun anggaran 2024 melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.795.840.000,00. Capaian kinerja dana anggaran Kecamatan Pekalongan Utara sampai Triwulan II dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja sebesar 118,98 % dan realisasi anggaran sebesar 75,84%, maka terdapat efesiensi penggunaan sumber daya sebesar 56,88 %.

Ada program /kegiatan yang realisasinya tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai yang direncanakan.Tapi ada juga yang memenuhi bahkan melebihi, seperti yang tercantum pada tabel 2.1 di bawah ini .

Tabel 2.1

Reatisasi Target Kinerja dan Anggaran Kecamatan Pekalongan Utara Kota pekarongan S/D Triwulan ll 2024

No	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Baru	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024	Kondisi Awal (Perubahan RPJMD 2021 – 2026)	Realisasi Tahun 2024				Jumlah Realisasi Tahun 2024 s/d TW II		Status Capaian
						Realisasi Kinerja TW I	Realisasi Angggaran TW I	Realisasi Kinerja TW II	Realisasi Anggaran TW II	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01	Kecamatan Pekalongan Utara											
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara**	**Persentase**	**100 %**	**100 %**	**29,17 %**	**0**	**29,17 %**	**5.470.500**	**58,34 %**	**5.470.500**	**Belum Tercapai**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Ketercapaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase	100 %	100 %	33,33 %	0,00	33,33 %	3.713.500	66,67 %	3.713.500	Belum Tercapai

7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	3		1	0,00	1	3.713.500	2	3.713.500	Belum Tercapai
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Ketercapaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase	100 %	100 %	25 %	0,00	25 %	1.757.000	50 %	1.757.000	Belum Tercapai
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4		1	0,00	1	1.757.000	2	1.757.000	Belum Tercapai
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara**	**Persentase**	**100 %**	**100 %**	**25 %**	**13.113.700**	**25 %**	**15.556.000**	**50 %**	**28.669.700**	Belum Tercapai

7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase	100 %	100 %	0 %	9.737.700	40 %	5.830.000	40 %	15.567.700	Belum Tercapai
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	LKK	5		0	9.737.700	2	5.830.000	2	15.567.700	Belum Tercapai
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase	100 %	100 %	25 %	3.376.000	23.83%	9.726.000	48.83%	13.102.000	Belum Tercapai
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya	Keluarga	2400		600	3.376.000	572	9.726.000	1.172	13.102.000	Belum Tercapai

		Saing										
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara**	**Persentase**	**100 %**	**100 %**	**25 %**	**100.543.169**	**16,67 %**	**77.277.937**	**41,67 %**	**177.821.106**	**Belum tercapai**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketercapaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase	100 %	100 %	25 %	**100.543.169**	16,67 %	**77.277.937**	**41,67 %**	**177.821.106**	**Belum tercapai**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12		3	**100.543.169**	2	**77.277.937**	**5**	**177.821.106**	**Belum tercapai**

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara**	**Persentase**	**100 %**	**100 %**	**0**	**0,00**	**100 %**	**5.625.000**	**100 %**	**5.625.000**	**Tercapai**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase	100 %	100 %	0	0,00	**100 %**	**5.625.000**	**100 %**	**5.625.000**	**Tercapai**
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	1		0	0,00	**1**	**5.625.000**	**1**	**5.625.000**	**Tercapai**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	- **Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja** - **Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**persentase**	**100 %** **100 %**	**100 %** **100 %**	**29,45 %** **15,48 %**	**2.113.351.107**	**11,67 %** **14,68 %**	**2.286.668.254**	- **41,12 %** **30,16 %**	**4.400.019.361**	- **Belum tercapai**

		- **Persentase Pengadaan /Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**100 %**	**100 %**	**9,41 %**		**14,17 %**		**23,58 %**		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100 %	100 %	8,89%	7.457.000	15,56 %	33.346.000	15,56 %	40.803.000	Belum tercapai
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	laporan	2		0	0,00	0	1.145.000	0	1.145.000	Belum tercapai
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	Belum tercapai
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	15		4	7.457.000	3	32.201.000	7	39.658.000	Belum Tercapai

		Daerah										
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100 %	100 %	50 %	1.846.305.968	16,67 %	1.904.875.980	66,67 %	3.751.181.948	Belum Tercapai
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	63		62 orang/bulan	1.785.982.968	62 0rang/bulan	1.848.048.980	62 0rang/bulan	3.634.031.948	Belum Tercapai
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12		3	58.575.000	3	58.575.000	6	117.150.000	Belum Tercapai
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	laporan	1		1	1.748.000	0	0,00	1	1.748.000	Tercapai

		Tahun SKPD										
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100 %	100 %	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Belum tercapai
7.01..01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	Belum tercapai
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100 %	100 %	21,43 %	23.418.900	19,05	73.503.400	40,48 %	96.922.300	Belum tercapai
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4		1	1.248.000	1	1.980.000	2	3.228.000	Belum tercapai

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	4		1	4.929.500	1	15.515.000	2	20.444.500	Belum tercapai
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	paket	4		1	832.000	1	3.017.000	2	3.849.000	Belum tercapai
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4		1	13.028.000	1	34.043.500	2	47.071.500	Belum tercapai
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	paket	2		0	2.186.400	1	11.434.900	1	13.621.300	Belum tercapai
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	paket	2		0	1.195.000	0	3.335.000	0	4.530.000	Belum tercapai (akan tercapai di akhi tahun)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	laporan	12		0	0,00	4	4.178.000	4	4.178.000	Belum tercapai

	Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100 %	100 %	25 %	226.428.339	25 %	212.250.774	50 %	438.679.113	Belum tercapai
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4		1	1.080.0000	1	2.640.000	2	3.720.000	Belum tercapai
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12		3	34.435.843	3	30.852.008	6	65.287.851	Belum tercapai
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12		3	190.912.496	3	178.758.766	6	369.671.262	Belum tercapai

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100 %	100 %	9,41	9.740.900	14,17	62.693.000	23,58 %	72.433.000	Belum tercapai
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	31		1	8.740.900	1	27.958.000	2	36.698.000	Belum tercapai
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	14		0	0,00	2	23.205.000	2	23.205.000	Belum tercapai

7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	120		30	1.000.000	30	11.530.000	60	12.530.000	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan Kegiatan dalam perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2024 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikator, lokasi, kelompok sasaran yang mengarami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Perubahan renja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan terkait perubahan pagu anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan, serta perubahan terhadap indikator kinerja dan target, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan keuangan daerah, serta pencapaian target-target kinerja,

3.1 Rekapitulasi Sub Kegiatan perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2024

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 12 kegiatan, 26 sub kegiatan daram renja penetapan, terdapat 22 sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu sebanyak 4 sub kegiatan mengalami perubahan pagu (2 sub kegiatan mengalami pengurangan dan 2 sub kegiatan mengalami penambahan).

Adapun rincian sub kegiatan dalam perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekarongan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rekapitutasi Sub Kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Sub kegiatan Dalam Perubahan Renja					
		Tetap	Bertambah	Berkurang	Baru	dinol kan	Jumlah
1	Kecamatan Pekalongan Utara	22	2	2	0	0	26

3.1.1 Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu dan Perubahan Indikator

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam Renja Penetapan Tahun 2024 dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan baik target kinerja maupun pagu indikatif pada perubahan Renja Tahun 2024 sebanyak 17 Jumlah Sub Kegiatan Adapun sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran pada renja perubahan seperti tersebut dalam tabel 3.2. dibawah ini.

Tabel 3.2

Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami perubahan pagu dan perubahan indikator Pada Perubahan Renja Tahun 2024

No	Nama Sub Kegiatan	Pagu		Bertambah/ Berkurang
		Renja Penetapan 2024	Renja Perubahan 2024	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.668.000	2.668.000	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	1.886.000	1.886.000	0
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.000.000	117.000.000	0
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	234.399.000	234.399.000	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1.748.000	1.748.000	0
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000	10.000.000	0

7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.450.000	6.450.000	0
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.062.000	128.062.000	0
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.875.000	7.875.000	0
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	201.062.000	201.062.000	0
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	40.000.000	0
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.000.000	19.000.000	0
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000	10.500.000	0
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	742.383.000	742.383.000	0
15	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan	7.125.000	7.125.000	0
16	Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	67.050.000	67.050.000	0

17	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.625.000	5.625.000	0

3.1.2 Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Tetapi Mengalami Perubahan Indikator

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam Renja Penetapan Tahun 2024 tidak mengalami perubahan pagu tetapi mengalami perubahan target pada perubahan Renja Tahun 2024 sebanyak 5 Jumlah Sub Kegiatan. Adapun sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu tetapi mengalami perubahan indikator anggaran pada renja perubahan seperti tersebut dalam tabel 3.3. dibawah ini.

Tabel 3.3

Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami perubahan pagu tetapi Mengalami Perubahan Indikator Pada Perubahan Renja Tahun 2024

No	Nama Sub Kegiatan	Indikator		Bertambah/ Berkurang
		Renja Penetapan 2024	Renja Perubahan 2024	
1	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	14 Unit	15 unit	Bertambah 1
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya	120 unit	119 unit	Berkurang 1
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	2 paket	1 paket	Berkurang 1
4	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	3 laporan	4 laporan	Bertambah 1

	pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait			
5	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	5 lkk	4 lkk	Berkurang 1

3.1.3 Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu

Sub kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam Renja Penetapan Tahun 2024 yang mengalami pengurangan pagu indikatif sebanyak 2 sub kegiatan. Hal ini menyesuaikan Perubahan RKPD, yang disebabkan adanya penyesuaian kembali terhadap belanja guna serta efektifitas pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.4. dibawah ini.

Tabel 3.4

Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024

No	Nama Sub Kegiatan	Pagu		Bertambah/ Berkurang
		Renja Penetapan 2024	Renja Perubahan 2024	
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	7.590.684.000	7.435.551.000	- 155.133.000
2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indoensia, Tentara Nasional Indoensia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	404.630.000	384.900.000	- 19.730.000

3.1.4 Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah sub kegiatan yang ada dalam Renja Penetapan Tahun 2024 mengalami penambahan pagu indikatif

sebanyak 2 sub kegiatan. Sub Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5

Sub Kegiatan Yang Mengalami Penambahan pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024

No	Nama Sub Kegiatan	Pagu		Bertambah/ Berkurang
		Renja Penetapan 2024	Renja Perubahan 2024	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.884.000	140.184.000	14.300.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	133.161.000	175.612.000	42.451.000

3.1.5. Sub Kegiatan yang mengalami penghapusan

Sub Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang sebelumnya dianggarkan dalam Renja Penetapan Tahun 2024, namun diusulkan untuk dihapuskan/dinolkan dalam Perubahan Renja Tahun 2024 ini sebanyak nihil. Kegiatan yang dihapus/dinolkan dapat dilihat dalam tabel 3.6 dibawah.

Tabel 3.6

Sub Kegiatan Yang Mengalami Penghapusan pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024

No	Nama Sub Kegiatan	Pagu		Bertambah/ Berkurang
		Renja Penetapan 2024	Renja Perubahan 2024	
1	NIHIL			

3.2 Perubahan Target Kinerja dan Pagu lndikatif Tahun 2024

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2024;
2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan program pemerintah untuk fasilitasi pembangunan infrastruktur dan kebijakanpemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 terkait bantuan keuangan kepada Kab./Kota;
3. Sub Kegiatan baru maupun penghapusan sub kegiatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2024. Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan renja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tahun 2024 terlihat dalam tabel 3.7. dibawah ini :

Tabel 3.7

Perubahan Target Kinerja dan Pagu lndikatif Perubahan Renja Tahun 2024

No	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Baru	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA Status Capaian				PAGU BERTAMBAH/BERKURANG	
			Uraian Indikator	Target	Satuan	Pagu (Rp)	Uraian Indikator	Target	Satuan	Pagu (Rp)	Uraian Indikator	Target	Satuan	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4													
7.01	**Kecamatan Pekalongan Utara**	**Kota Pekalongan**														
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kota Pekalongan**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100 %	Persentase	19.625.000	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100 %	Persentase	19.625.000	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100 %	Persentase	19.625.000	0,00	0,00-
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kota Pekalongan**	**Persentase Ketercapaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	100 %	Persentase	12.500.000	**Persentase Ketercapaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	100 %	Persentase	12.500.000	**Persentase Ketercapaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	100 %	Persentase	12.500.000	0,00	0,00-

7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3	Laporan	12.500.000	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3	Laporan	12.500.000	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	Laporan	12.500.000	0,00	0,00-
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Ketercapaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	100 %	Persentase	7.125.000	**Ketercapaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	100 %	Persentase	7.125.000	**Ketercapaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	100 %	Persentase	7.125.000	0,00	0,00-
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	Laporan	7.125.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	Laporan	7.125.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	Laporan	7.125.000	0,00	0,00-

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kota Pekalongan**	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 %	Persentase	115.311.000	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 %	Persentase	115.311.000	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 %	Persentase	115.311.000	0,00	0,00-
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kota Pekalongan**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	100 %	Persentase	**48.261.000**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	100 %	Persentase	**48.261.000**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	100 %	Persentase	**48.261.000**	0,00	0,00-
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	LKK	**48.261.000**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	LKK	48.261.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	LKK	48.261.000	0,00	0,00-
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamat**	100 %	Persentase	**67.050.000**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	100 %	Persentase	**67.050.000**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	100 %	Persentase	**67.050.000**	0,00	0,00-

			an dan Kelurahan													
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2400	Keluarga	**67.050.000**	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2400	Keluarga	67.050.000	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2400	Keluarga	67.050.000	0,00	0,00-
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kota Pekalongan**	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100 %	Persentase	352.808.000	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100 %	Persentase	404.630.000	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100 %	Persentase	404.630.000	41.830.000	0,00

7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	100 %	Persentase	352.808.000	**Persentase ketercapaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	100 %	Persentase	**404.630.000**	**Persentase ketercapaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	100 %	Persentase	**404.630.000**	41.830.000	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	352.808.000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	404.630.000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	**404.630.000**	41.830.000	0,00	0,
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kota Pekalongan**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara**	100 %	Persentase	5.625.000	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara**	100 %	Persentase	5.625.000	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara**	100 %	Persentase	5.625.000	0,00	0,00-	

7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	100 %	Persentase	5.625.000	**Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	100 %	Persentase	5.625.000	**Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	100 %	Persentase	5.625.000	0,00	0,00-
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Laporan	5.625.000	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Laporan	5.625.000	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Laporan	5.625.000	0,00	0,00-
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Kota Pekalongan**	- Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja - Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum	100 % 100 % 100 %	persentase	10.588.671.000	- Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja - Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 % 100 %	persentase	10.250.649.000	- Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja - Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa	100 % 100 % 100 %	persentase	10.277.267.000	-311.404.000	100.382.000

			dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah				- Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah					
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100 %	Persentase	**121.544.000**	**Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100 %	Persentase	**121.544.000**	**Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100 %	Persentase	**121.544.000**	0,00	0,00-
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	laporan	2.668.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	laporan	2.668.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	laporan	2.668.000	0,00	0,00-
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	2	Laporan	1.886.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2	Laporan	1.886.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2	Laporan	1.886.000	0,00	0,00-

			Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Dokumen RKA-SKPD				Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan	117.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan	117.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan	117.000.000	0,00	0,00-
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100 %	Persentase	8.179.278.000	**Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100 %	Persentase	**7.826.732.000**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100 %	Persentase	**7.671.599.000**	0,00	0,00-
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63	Orang	7.943.230.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63	Orang	7.592.684.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63	Orang	7.435.551.000	-507.679.000	-157.133.000
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	234.300.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	234.300.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	234.300.000	0,00	0,00-

7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1.748.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1.748.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1.748.000	0,00	0,00-
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100 %	Persentase	10.000.000	**Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100 %	Persentase	**10.000.000**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100 %	Persentase	**10.000.000**	0,00	0,00-
7.01..01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	paket	10.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	paket	10.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	paket	10.000.000	0,00	0,00-
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Ketercapaian Administrasi Umum**	100 %	Persentase		**Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100 %	Persentase	**414.635.000**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100 %	Persentase	**414.635.000**	0,00	0,00-

			Perangkat Daerah													
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	6.450.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	6.450.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	6.450.000	0,00	0,00-
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117 paket	paket	128.248.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	paket	128.248.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	paket	128.248.000	0,00	0,00-
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	96	paket	7.875.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	paket	7.875.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	paket	7.875.000	0,00	0,00-
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	88	paket	201.062.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	201.062.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	201.062.000	0,00	0,00-
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand	96	paket	40.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	40.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda	2	paket	40.000.000	0,00	0,00-

			aan yang Disediakan								an yang Disediakan					
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96	dokumen	12.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	dokumen	12.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dokumen	12.000.000	0,00	0,00-
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	19.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	19.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	19.000.000	0,00	0,00-
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	Persentase	834.243.000	**Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	Persentase	**878.767.000**	**Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	Persentase	**893.067.000**	**58.824.000**	**14.300.000**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	96	laporan	10.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	10.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	10.500.000	0,00	0,00-

			Menyurat													
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	125.884.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	125.884.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	140.184.000	14.300.000	14.300.000
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96	Laporan	742.383.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	742.383.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	742.383.000	0,00	0,00-
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	Persentase	1.028.961.000	**Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	Persentase	**1.123.961.000**	**Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	Persentase	**1.166.412.000**	**95.000.000**	**42.451.000**

7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31	unit	133.161.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31	unit	133.161.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37	unit	175.612.000	42.451.000	42.451.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	850.800.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14	unit	945.800.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	unit	945.800.000	95.000.000	0,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120	unit	45.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120	unit	45.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	119	unit	45.000.000		-

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan berbasis Good Governace dan Clean Goverment dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) mengikuti paradigma baru yang akan mampu menciptakan kebijakan (trickle down effect) sehingga kepentingan masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan selain menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 juga berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Renja diharapkan juga mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan suatu keputusan kebijakan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pemangku jabatan dan staf Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih optimal.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Perubahan Renja merupakan hal yang perlu diperhatikan selama tahun berjalan guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota pekalongan Tahun 2024.
2. Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan

Rancangan Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah periode berikutnya. Semoga Perubahan Rencana Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target perubahan yang telah ditetapkan

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2024 ini kami sajikan sebagai bentuk acuan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang, sehingga tercapai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan yang lebih baik dengan prinsip bersama-sama melaksanakan pembangunan dengan asas transparansi, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan bersama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara serta sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Pekalongan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
CAMAT PEKALONGAN UTARA
KOTA PEKALONGAN

WISMO ADITIYO,S.Pt,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19710926 199903 1 006

Dipindai dengan CamScanner

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN TAHUN 2024

Pekalongan
World's City of Batik

KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2024 telah berhasil disusun. Perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2024, dalam rangka menjalankan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan Renja memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Pekalongan Selatan beserta indikator serta target kinerja perubahan. Dokumen ini selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan akan disahkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2024 masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk masukan, saran, dan kritik konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan Renja di masa mendatang. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pekalongan Selatan, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Camat Pekalongan Selatan
Kota Pekalongan

ZAENAL MUHIBBIN, S.Pd.
Pembina
NIP. 19670609 199103 1 008

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	4
	1.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	4
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	6
	2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	6
	2.2 Hasil Evaluasi terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	6
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	16
	3.1 Rekapitulasi Sub Kegiatan dan Perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2024	16
	3.1.1 Sub Kegiatan yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran	17
	3.1.2 Sub Kegiatan yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran	21
	3.1.3 Sub Kegiatan yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran	22
	3.1.4 Sub Kegiatan Baru	24
	3.1.5 Sub Kegiatan yang Mengalami Penghapusan	25
	3.2 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024	25
BAB IV	PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2024	6
Tabel 2.2	Realisasi target kinerja dan anggaran Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	8
Tabel 3.1	Rekapitulasi Sub Kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2024	17
Tabel 3.2	Sub Kegiatan yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran pada Perubahan Renja Tahun 2024	18
Tabel 3.3	Sub Kegiatan yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran pada Perubahan Renja Tahun 2024	21
Tabel 3.4	Sub Kegiatan yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran pada Perubahan Renja Tahun 2024	22
Tabel 3.5	Sub Kegiatan Baru pada Perubahan Renja Tahun 2024	24
Tabel 3.6	Sub Kegiatan yang Dihapus/Dinolkan pada Perubahan Renja Tahun 2024	25
Tabel 3.7	Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Perubahan Renja Tahun 2024	26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024, guna menyesuaikan kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dan memperhatikan hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Limgkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UNdang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
12. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
13. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan No. 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

   Perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun sebagai tindak lanjut dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2024.

2. Tujuan

   Perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dengan tujuan:

   a. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran Perangkat Daerah yang belum terakomodir dalam Renja Tahun 2024;
   b. Untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebh efektif dan efisian.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan analisis gambaran pelayanan, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menyajikan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV. PENUTUP

1.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu

penting terkait tugas pokok dan fungsi kecamatan diperoleh baik melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi kecamatan di masa yang akan datang.

Adapun isu-isu penting terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekalongan Selatan sebagai berikut:

1. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya menerbangkan balon udara dan petasan pada saat tradisi Syawalan.
   b. Masih adanya peredaran Miras oplosan yang meresahkan masyarakat.
   c. Masalah kenakalan remaja.
   d. Penyalahgunaan jalur interchange tol Sokoduwet-Setono untuk kegiatan balap sepeda motor liar.
   e. Penyalahgunaan area pemakaman Bong Cina Kelurahan Kuripan Yosorejo untuk tempat prostitusi liar.
   f. Terjadinya pelanggaran pemanfaatan tata ruang.
2. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
   a. Terjadinya banjir di sebagian wilayah pada saat musim hujan dikarenakan kondisi drainase yang tidak berfungsi dengan baik.
   b. Belum adanya pengolahan limbah yang memadai sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.
   c. Masih adanya masyarakat yang buang air besar ke aliran air karena tidak mempunyai tangki septik atau jamban yang layak.
   d. Menurunnya semangat gotong royong di masyarakat.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan merupakan salah satu pelaksana pembangunan di bidang pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Pelayanan Kecamatan Pekalongan Selatan sampai dengan triwulan II dalam pencapaian target kinerja sasaran dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Tahun 2024	Target s.d Triwulan II	Realisasi Capaian s.d Triwulan II	Rasio Capaian s.d Triwulan II
1	2	3	4	5	6
1	Nilai SAKIP OPD	77	-	-	-
2	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum	100%	-	-	-

Sampai dengan triwulan II, pelayanan kinerja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan berdasarkan target kinerja sasaran belum ada yang tercapai. Kedua indikator tersebut baru akan tercapai pada triwulan IV.

2.2 Hasil Evaluasi terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan triwulan II terdapat beberapa capaian yaitu ada yang tercapai sesuai target dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2024.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Kecamatan Pekalongan

Selatan Kota Pekalongan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024 yang melaksanakan 1 (satu) urusan penunjang pemerintahan, 5 (lima) program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, dengan anggaran belanja Rp. 9.234.749.000,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 4.381.785.220,- atau 47,45% dari pagu APBD. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II belum sesuai target dikarenakan ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, namun belum selesai pertanggungjawaban keuangannya.

Sementara itu, jika dianalisis berdasarkan capaian indikator program, kegiatan dan sub kegiatan masih banyak indikator yang belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena rata-rata target kinerja indikator baru dapat dihitung pada periode akhir yaitu triwulan IV. Adapun realisasi target kinerja dan anggaran Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

TABEL 2.2 REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan (N) yang Dievaluasi (2024)						Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian dan Realisasi Renja yang Dievaluasi (%)	
			RENJA			APBD			TW I		TW II					
			Target	Satuan	Pagu (Rp)	Target	Satuan	Pagu (Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/4)*100	17=(15/9)*100
	Kecamatan Pekalongan Selatan				**9.206.551.000**			**9.214.315.000**		**1.796.161.077**		**4.464.143.710**		**4.464.143.710**		**48,45**
7	**Unsur Kewilayahan**				**9.206.551.000**			**9.214.315.000**		**1.796.161.077**		**4.464.143.710**		**4.464.143.710**		**48,45**
07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100**	**persen**	**8.768.527.000**	**100**	**persen**	**8.730.353.000**	**29,45**	**1.751.547.854**	**11,67**	**4.281.445.963**	**41,12**	**4.281.445.963**	**41,12**	**49,04**
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, aministrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**100**	**persen**		**100**	**persen**		**15,14**		**14,46**		**29,59**		**29,59**	
		Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	**100**	**persen**		**100**	**persen**		**10,39**		**7,16**		**17,55**		**17,55**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**persen**	**110.455.000**	**100**	**persen**	**110.455.000**	**8,89**	**2.710.000**	**6,67**	**21.990.000**	**15,56**	**21.990.000**	**15,56**	**19,91**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	2.610.000	2	dokumen	2.610.000	-	-		2.304.000	-	2.304.000	0,00	88,28
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	1.845.000	2	dokumen	1.845.000	-	-		360.000	-	360.000	0,00	19,51
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	laporan	106.000.000	15	laporan	106.000.000	4	2.710.000	3	19.326.000	7	19.326.000	63,64	18,23
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**persen**	**7.191.278.000**	**100**	**persen**	**6.893.600.000**	**50,00**	**1.537.496.215**	**16,67**	**3.805.994.423**	**66,67**	**3.805.994.423**	**66,67**	**55,21**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	orang/ bulan	6.983.468.000	59	orang/ bulan	6.685.790.000	56	1.537.096.215	57	3.713.634.423	57	3.713.634.423	96,61	55,55
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	206.100.000	12	dokumen	206.100.000	3	400.000	3	90.650.000	6	90.650.000	50,00	43,98

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan (N) yang Dievaluasi (2024)						Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian dan Realisasi Renja yang Dievaluasi (%)	
			RENJA			APBD			TW I		TW II					
			Target	Satuan	Pagu (Rp)	Target	Satuan	Pagu (Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/4)*100	17=(15/9)*100
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1.710.000	1	laporan	1.710.000	1	-	-	1.710.000	1	1.710.000	100,00	100,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	persen	10.000.000	100	persen	10.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	paket	10.000.000	1	paket	10.000.000	-	-		-	-	-		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	persen	386.946.000	100	persen	386.946.000	20,41	22.612.400	19,37	82.962.600	39,78	82.962.600	39,78	21,44
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	5.850.000	4	paket	5.850.000	1	658.500	1	2.861.500	2	2.861.500	16,67	48,91
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	157.728.000	4	paket	157.728.000	1	9.388.000	1	21.123.000	2	21.123.000	16,67	13,39
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	paket	8.709.000	4	paket	8.709.000	1	1.656.000	1	3.834.000	2	3.834.000	16,67	44,02
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	paket	143.159.000	4	paket	143.159.000	1	7.177.000	1	37.947.500	2	37.947.500	18,18	26,51
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	35.000.000	2	paket	35.000.000	-	1.512.800	-	6.861.100	-	6.861.100	0,00	19,60
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	dokumen	17.500.000	2	dokumen	17.500.000	-	2.040.000	-	3.790.000	-	3.790.000	0,00	21,66
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	laporan	19.000.000	7	laporan	19.000.000	3	0	2	6.545.500	5	6.545.500	125,00	34,45
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	838.740.000	100	persen	885.404.000	25,00	185.871.346	25,00	333.693.844	50,00	333.693.844	50,00	37,68

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan (N) yang Dievaluasi (2024)						Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian dan Realisasi Renja yang Dievaluasi (%)	
			RENJA			APBD			TW I		TW II					
			Target	Satuan	Pagu (Rp)	Target	Satuan	Pagu (Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/4)*100	17=(15/9)*100
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	9.300.000	4	laporan	9.300.000	3	80.000	3	1.400.000	6	1.400.000	50,00	15,05
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	98.720.000	12	laporan	98.720.000	3	7.065.942	3	22.036.647	6	22.036.647	50,00	22,32
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	728.720.000	12	laporan	777.384.000	3	178.725.404	3	310.157.197	6	310.157.197	50,00	39,90
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**persen**	**233.108.000**	**100**	**persen**	**443.948.000**	**10,39**	**2.857.893**	**7,16**	**36.905.096**	**17,55**	**36.905.096**	**17,55**	**8,31**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	unit	131.108.000	38	unit	161.948.000	5	1.857.893	2	27.765.096	7	27.765.096	58,33	17,14
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	62.000.000	9	unit	242.000.000	-	0	-	740.000	-	740.000	0,00	0,31
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12	unit	40.000.000	111	unit	40.000.000	20	1.000.000	18	8.400.000	38	8.400.000	316,67	21,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan**	**100**	**persen**	**18.524.000**	**100**	**persen**	**18.524.000**	**0**	**0**	**50,00**	**6.325.900**	**50,00**	**6.325.900**	**50,00**	**34,15**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Selatan	100	persen	12.500.000	100	persen	12.500.000		0	50,00	4.999.900	50,00	4.999.900	50,00	40,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	laporan	12.500.000	2	laporan	12.500.000	-	-	1	4.999.900	1	4.999.900	50,00	40,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan (N) yang Dievaluasi (2024)						Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian dan Realisasi Renja yang Dievaluasi (%)	
			RENJA			APBD			TW I		TW II					
			Target	Satuan	Pagu (Rp)	Target	Satuan	Pagu (Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/4)*100	17=(15/9)*100
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**persen**	**6.024.000**	**100**	**persen**	**6.024.000**		**0**		**1.326.000**	**0**	**1.326.000**	**0,00**	**22,01**
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	laporan	6.024.000	4	laporan	6.024.000	1	-	1	1.326.000	2	1.326.000	50,00	22,01
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan**	**100**	**persen**	**110.991.000**	**100**	**persen**	**110.991.000**	**25,00**	**0**	**25,00**	**23.034.000**	**50,00**	**23.034.000**	**50,00**	**20,75**
7.01.03.203	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan**	**100**	**persen**	**47.425.000**	**100**	**persen**	**47.425.000**	**25,00**	**0**	**25,00**	**12.147.000**	**50,00**	**12.147.000**	**50,00**	**25,61**
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	47.425.000	4	Lembaga Kemasyarakatan	47.425.000	1	0	1	12.147.000	2	12.147.000	50,00	25,61
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan**	**100**	**persen**	**63.566.000**	**100**	**persen**	**63.566.000**	**24,88**	**0**	**47,32**	**10.887.000**	**72,20**	**10.887.000**	**72,20**	**17,13**
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	410	keluarga	63.566.000	410	keluarga	63.566.000	102	-	194	10.887.000	296	10.887.000	72,20	17,13
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan**	**100**	**persen**	**303.034.000**	**100**	**persen**	**348.972.000**	**2,74**	**44.613.223**	**2,74**	**153.337.847**	**5,48**	**153.337.847**	**5,48**	**43,94**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**persen**	**303.034.000**	**100**	**persen**	**348.972.000**	**2,74**	**44.613.223**	**2,74**	**153.337.847**	**5,48**	**153.337.847**	**5,48**	**43,94**

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan (N) yang Dievaluasi (2024)						Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian dan Realisasi Renja yang Dievaluasi (%)	
			RENJA			APBD			TW I		TW II					
			Target	Satuan	Pagu (Rp)	Target	Satuan	Pagu (Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/4)*100	17=(15/9)*100
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	73	laporan	303.034.000	9	laporan	348.972.000	2	44.613.223	2	153.337.847	4	153.337.847	5,48	43,94
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan**	**100**	**persen**	**5.475.000**	**100**	**persen**	**5.475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Presentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**100**	**persen**	**5.475.000**	**100**	**persen**	**5.475.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	dokumen	5.475.000	1	dokumen	5.475.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	Kelurahan Jenggot				**448.216.000**			**480.652.000**		**70.190.810**		**231.565.120**		**231.565.120**		**48,18**
7	**Unsur Kewilayahan**				**448.216.000**			**480.652.000**		**70.190.810**		**231.565.120**		**231.565.120**		**48,18**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**448.216.000**			**480.652.000**		**70.190.810**		**231.565.120**		**231.565.120**		**48,18**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100**	**persen**	**448.216.000**	**100**	**persen**	**480.652.000**	**33,33**	**70.190.810**	**44,07**	**231.565.120**	**77,40**	**231.565.120**	**77,40**	**48,18**
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	7	Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	7	9.375.000	-	9.375.000	7	9.375.000	100,00	100,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	unit	145.808.000	25	unit	178.244.000	-	7.691.310	22	84.684.620	22	84.684.620	110,00	47,51
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	293.033.000	9	Pokmas / Ormas	293.033.000	-	53.124.500	2	137.505.500	2	137.505.500	22,22	46,92

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan (N) yang Dievaluasi (2024)						Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian dan Realisasi Renja yang Dievaluasi (%)	
			RENJA			APBD			TW I		TW II					
			Target	Satuan	Pagu (Rp)	Target	Satuan	Pagu (Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/4)*100	17=(15/9)*100
	Kelurahan Buaran Kradenan				**443.081.000**			**445.517.000**		**57.561.370**		**154.341.540**		**154.341.540**		**34,64**
7	**Unsur Kewilayahan**				**443.081.000**			**445.517.000**		**57.561.370**		**154.341.540**		**154.341.540**		**34,64**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**443.081.000**			**445.517.000**		**57.561.370**		**154.341.540**		**154.341.540**		**34,64**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100**	**persen**	**443.081.000**	**100**	**persen**	**445.517.000**	**33,33**	**57.561.370**	**34,17**	**154.341.540**	**67,50**	**154.341.540**	**67,50**	**34,64**
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	7	Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	7	9.375.000	-	9.375.000	7	9.375.000	100,00	100,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	unit	149.108.000	8	unit	151.544.000	-	2.563.770	5	12.229.540	5	12.229.540	62,50	8,07
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas / Ormas	284.598.000	10	Pokmas / Ormas	284.598.000	-	45.622.600	4	132.737.000	4	132.737.000	40,00	46,64
	Kelurahan Kuripan Kertoharjo				**362.405.000**			**366.739.000**		**15.425.940**		**98.458.150**		**98.458.150**		**26,85**
7	**Unsur Kewilayahan**				**362.405.000**			**366.739.000**		**15.425.940**		**98.458.150**		**98.458.150**		**26,85**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**				**362.405.000**			**366.739.000**		**15.425.940**		**98.458.150**		**98.458.150**		**26,85**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100**	**persen**	**362.405.000**	**100**	**persen**	**366.739.000**	**44,44**	**15.425.940**	**14,81**	**98.458.150**	**59,25**	**98.458.150**	**59,25**	**26,85**
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	7	Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	7	9.375.000	-	9.375.000	7	9.375.000	100,00	100,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	unit	142.908.000	9	unit	145.344.000	-	5.127.540	4	34.987.850	4	34.987.850	44,44	24,07
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	210.122.000	9	Pokmas / Ormas	212.020.000	3	923.400	-	54.095.300	3	54.095.300	33,33	25,51

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan (N) yang Dievaluasi (2024)						Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian dan Realisasi Renja yang Dievaluasi (%)	
			RENJA			APBD			TW I		TW II					
			Target	Satuan	Pagu (Rp)	Target	Satuan	Pagu (Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/4)*100	17=(15/9)*100
	Kelurahan Kuripan Yosorejo				**428.186.000**			**470.742.000**	**33,33**	**7.136.840**	**22,22**	**86.746.220**	**55,55**	**86.746.220**		**18,43**
7	**Unsur Kewilayahan**				**428.186.000**			**470.742.000**	**33,33**	**7.136.840**	**22,22**	**86.746.220**	**56**	**86.746.220**		**18,43**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**				**428.186.000**			**470.742.000**	**33,33**	**7.136.840**	**22,22**	**86.746.220**	**55,55**	**86.746.220**		**18,43**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100**	**persen**	**428.186.000**	**100**	**persen**	**470.742.000**	**33,33**	**7.136.840**	**22,22**	**86.746.220**	**55,55**	**86.746.220**	**55,55**	**18,43**
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	1	-	-	9.375.000	1	9.375.000	100,00	100,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	unit	153.753.000	12	unit	196.309.000	-	5.630.240	5	3.305.420	5	3.305.420	41,67	1,68
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	265.058.000	9	Pokmas / Ormas	265.058.000	-	1.506.600	3	74.065.800	3	74.065.800	25,00	27,94
	Kelurahan Soko Duwet				**408.005.000**			**410.441.000**	**33,33**	**36.807.340**	**29,17**	**116.319.550**	**62,50**	**116.319.550**		**28,34**
7	**Unsur Kewilayahan**				**408.005.000**			**410.441.000**	**33,33**	**36.807.340**	**29,17**	**116.319.550**	**63**	**116.319.550**		**28,34**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**				**408.005.000**			**410.441.000**	**33,33**	**36.807.340**	**29,17**	**116.319.550**	**62,50**	**116.319.550**		**28,34**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100**	**persen**	**408.005.000**	**100**	**persen**	**410.441.000**	**33,33**	**36.807.340**	**29,17**	**116.319.550**	**62,50**	**116.319.550**	**62,50**	**28,34**
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	7	Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	7	9.374.800	-	9.374.800	7	9.374.800	100,00	100,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	unit	159.446.000	10	unit	161.882.000	-	7.152.540	5	39.995.850	5	39.995.850	62,50	24,71
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	239.184.000	9	Pokmas / Ormas	239.184.000	-	20.280.000	3	66.948.900	3	66.948.900	25,00	27,99

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan (N) yang Dievaluasi (2024)						Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian dan Realisasi Renja yang Dievaluasi (%)	
			RENJA			APBD			TW I		TW II					
			Target	Satuan	Pagu (Rp)	Target	Satuan	Pagu (Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/4)*100	17=(15/9)*100
	Kelurahan Banyurip				**442.830.000**			**445.266.000**	**33,33**	**26.800.690**	**17,78**	**116.306.490**	**51,11**	**116.306.490**		**26,12**
7	**Unsur Kewilayahan**				**442.830.000**			**445.266.000**	**33,33**	**26.800.690**	**17,78**	**116.306.490**	**51**	**116.306.490**		**26,12**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**442.830.000**			**445.266.000**	**33,33**	**26.800.690**	**17,78**	**116.306.490**	**51,11**	**116.306.490**		**26,12**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100**	**persen**	**442.830.000**	**100**	**persen**	**445.266.000**	**33,33**	**26.800.690**	**17,78**	**116.306.490**	**51,11**	**116.306.490**	**51,11**	**26,12**
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	7	Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	7	9.375.000	-	9.375.000	7	9.375.000	100,00	100,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	unit	150.746.000	9	unit	153.182.000	-	9.345.690	4	31.745.690	4	31.745.690	44,44	20,72
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas / Ormas	282.709.000	10	Pokmas / Ormas	282.709.000	-	8.080.000	3	75.185.800	3	75.185.800	30,00	26,59

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan dalam perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2024 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan terkait perubahan pagu anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan serta perubahan terhadap indikator kinerja dan target disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan keuangan daerah, serta pencapaian target-target kinerja.

3.1 Rekapitulasi Sub Kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2024

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 12 kegiatan, 26 sub kegiatan dalam Renja Penetapan, terdapat 16 sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu, sebanyak 10 sub kegiatan mengalami perubahan pagu (3 sub kegiatan mengalami pengurangan dan 7 sub kegiatan mengalami penambahan).

Kecamatan Pekalongan Selatan membawahi 6 kelurahan dimana jumlah kegiatan masing-masing kelurahan sebanyak 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan sehingga total sub kegiatan di kelurahan sebanyak 18 sub kegiatan dalam Renja Penetapan. Dari 18 sub kegiatan tersebut, terdapat 10 sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu, sebanyak 8 sub kegiatan mengalami perubahan pagu (1 sub kegiatan mengalami pengurangan dan 7 sub kegiatan mengalami penambahan).

Adapun rincian sub kegiatan dalam perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Sub Kegiatan Perubahan Renja
Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja	Jumlah Sub Kegiatan Dalam Perubahan Renja					
		Tetap	Bertambah	Berkurang	Baru	Dinolkan	Jumlah
1	Kecamatan Pekalongan Selatan	16	4	6	-	-	26
	- Kelurahan Jenggot	3	-	-	-	-	3
	- Kelurahan Buaran Kradenan	3	-	-	-	-	3
	- Kelurahan Kuripan Kertoharjo	3	-	-	-	-	3
	- Kelurahan Kuripan Kertoharjo	3	-	-	-	-	3
	- Kelurahan Soko Duwet	3	-	-	-	-	3
	- Kelurahan Banyurip	3	-	-	-	-	3

3.1.1 Sub Kegiatan yang tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang terdapat dalam Renja Penetapan Tahun 2024 dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan target kinerja maupun pagu indikatif dan atau tidak mengalami penambahan maupun pengurangan pagu indikatif namun mengalami penambahan atau pengurangan target kinerja pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebanyak 16 sub kegiatan.

Sedangkan di kelurahan terdapat 18 sub kegiatan yang tidak mengalami penambahan maupun pengurangan target kinerja dan pagu indikatif dan atau tidak mengalami penambahan maupun pengurangan pagu indikatif namun mengalami penambahan atau pengurangan target kinerja dan mengalami pergeseran jenis belanja, obyek belanja maupun rincian obyek belanja. Sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran pada Renja Perubahan seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Sub Kegiatan yang Tidak Mengalami Perubahan
Pagu Anggaran pada Perubahan Renja Tahun 2024

No.	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Bertambah/ Berkurang
			Renja Penetapan	Renja Perubahan	
	Kecamatan Pekalongan Selatan				
1	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.610.000	2.610.000	-
2	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.845.000	1.845.000	-
3	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	206.100.000	206.100.000	-
4	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.710.000	1.710.000	-
5	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000	10.000.000	-
6	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000	35.000.000	-
7	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.500.000	17.500.000	-
8	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.000.000	19.000.000	-
9	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.300.000	9.300.000	-
10	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	98.720.000	98.720.000	-

No.	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Bertambah/ Berkurang
			Renja Penetapan	Renja Perubahan	
		dan Listrik			
11	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	40.000.000	-
13	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.024.000	6.024.000	-
14	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	47.425.000	47.425.000	-
15	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	63.566.000	63.566.000	-
16	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.475.000	5.475.000	-
	Kelurahan Jenggot				
1	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	9.375.000	9.375.000	-

No.	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Bertambah/ Berkurang
			Renja Penetapan	Renja Perubahan	
	Kelurahan Buaran Kradenan				
1	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	9.375.000	9.375.000	-
2	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	284.598.000	284.598.000	-
	Kelurahan Kuripan Kertoharjo				
1	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	9.375.000	9.375.000	-
	Kelurahan Kuripan Yosorejo				
1	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	9.375.000	9.375.000	-
2	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	265.058.000	265.058.000	-
	Kelurahan Soko Duwet				
1	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah	9.375.000	9.375.000	-

No.	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Bertambah/ Berkurang
			Renja Penetapan	Renja Perubahan	
		perencanaan pembangunan di kelurahan			
2	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	239.184.000	239.184.000	-
	Kelurahan Banyurip				
1	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	9.375.000	9.375.000	-
2	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	282.709.000	282.709.000	-

3.1.2 Sub Kegiatan yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran

Sub kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam Renja Penetapan Tahun 2024 dan mengalami pengurangan baik target kinerja dan atau pagu indikatif sebanyak 3 sub kegiatan. Sedangkan di kelurahan terdapat 1 sub kegiatan yang mengalami pengurangan pagu indikatif. Hal ini menyesuaikan Perubahan RKPD, yang disebabkan adanya penyesuaian kembali terhadap belanja guna efektifitas pelaksanaan kegiatan. Adapun sub kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3 Sub Kegiatan yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran pada Perubahan Renja Tahun 2024

No.	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Bertambah/ Berkurang
			Renja Penetapan	Renja Perubahan	
	Kecamatan Pekalongan Selatan				
1	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja	106.000.000	99.235.000	(6.765.000)

No.	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Bertambah/ Berkurang
			Renja Penetapan	Renja Perubahan	
		Perangkat Daerah			
2	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.983.468.000	6.564.838.000	(418.630.000)
3	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143.159.000	140.668.000	(2.491.000)
	Kelurahan Jenggot				
1	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	293.033.000	286.313.000	(6.720.000)

3.1.3 Sub Kegiatan yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran

Sub kegiatan yang masuk kategori ini adalah sub kegiatan yang ada dalam Renja Penetapan Tahun 2024 dan mengalami penambahan baik target kinerja dan atau pagu indikatif sebanyak 7 sub kegiatan. Sedangkan di kelurahan terdapat 7 sub kegiatan yang mengalami penambahan pagu indikatif dan atau penambahan target kinerja. Adapun sub kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4 Sub Kegiatan yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran pada Perubahan Renja Tahun 2024

No.	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Bertambah/ Berkurang
			Renja Penetapan	Renja Perubahan	
	Kecamatan Pekalongan Selatan				
1	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.850.000	7.891.000	2.041.000
2	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.728.000	197.853.000	40.125.000

No.	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Bertambah/ Berkurang
			Renja Penetapan	Renja Perubahan	
3	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.709.000	9.109.000	400.000
4	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	728.720.000	748.634.000	19.914.000
5	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	131.108.000	133.948.000	2.840.000
6	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.000.000	270.750.000	208.750.000
7	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	303.034.000	343.662.000	40.628.000
	Kelurahan Jenggot				
1	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	145.808.000	178.244.000	32.436.000
	Kelurahan Buaran Kradenan				
1	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.108.000	15.1544.000	2.436.000
	Kelurahan Kuripan Kertoharjo				
1	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan	142.908.000	145.344.000	2.436.000

No.	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Bertambah/ Berkurang
			Renja Penetapan	Renja Perubahan	
		Prasarana Kelurahan			
2	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	210.122.000	212.020.000	1.898.000
	Kelurahan Kuripan Yosorejo				
1	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	153.753.000	196.309.000	42.556.000
	Kelurahan Soko Duwet				
1	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	159.446.000	161.882.000	2.436.000
	Kelurahan Banyurip				
1	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.746.000	153.182.000	2.436.000

3.1.4 Sub Kegiatan Baru

Sub kegiatan yang masuk kategori ini adalah sub kegiatan yang tidak ada dalam Renja Penetapan Tahun 2024, namun ada dalam DPA 2024 karena dipandang sebagai kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan mendukung visi dan misi sebanyak nihil. Sub kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5 Sub Kegiatan Baru pada Perubahan Renja Tahun 2024

No.	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Bertambah/ Berkurang
			Renja Penetapan	Renja Perubahan	
	NIHIL				

3.1.5 Sub Kegiatan yang Mengalami Penghapusan

Sub kegiatan yang masuk kategori ini adalah sub kegiatan yang sebelumnya dianggarkan dalam Renja Penetapan Tahun 2024, namun diusulkan untuk dihapuskan/dinolkan dalam Perubahan Renja Tahun 2024 ini sebanyak nihil Sub kegiatan yang dihapus/dinolkan dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6 Sub Kegiatan Baru pada Perubahan Renja Tahun 2024

No.	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Bertambah/ Berkurang
			Renja Penetapan	Renja Perubahan	
	NIHIL				

3.2 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024

Kebijakan Belanja pada Perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2024, diarahkan pada pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2024.

Dengan kebijakan tersebut mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Adapun perubahan target kinerja dan pagu indikatif Perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.7 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Perubahan Renja Tahun 2024

Kode Rekening	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penetapan Renja		APBD		Perubahan Renja		Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
	Kecamatan Pekalongan Selatan				**9.206.551.000**		**9.214.315.000**		**9.093.363.000**	**(113.188.000)**	**(120.952.000)**
7	**Unsur Kewilayahan**				**9.206.551.000**		**9.214.315.000**		**9.093.363.000**	**(113.188.000)**	**(120.952.000)**
7.01	**Kecamatan**				**9.206.551.000**		**9.214.315.000**		**9.093.363.000**	**(113.188.000)**	**(120.952.000)**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	**100 Persen**	**8.768.527.000**	**100 Persen**	**8.730.353.000**	**100 Persen**	**8.614.711.000**	**(153.816.000)**	**(115.642.000)**
			Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**			
			Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**			
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**100 Persen**	**110.455.000**	**100 Persen**	**110.455.000**	**100 Persen**	**103.690.000**	**(6.765.000)**	**(6.765.000)**
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.610.000	2 Dokumen	2.610.000	2 dokumen	2.610.000	0	0
7.01.01.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.845.000	2 Dokumen	1.845.000	2 dokumen	1.845.000	0	0
7.01.01.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	106.000.000	15 Laporan	106.000.000	15 Laporan	99.235.000	(6.765.000)	(6.765.000)
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**7.191.278.000**	**100 persen**	**6.893.600.000**	**100 persen**	**6.772.648.000**	**(418.630.000)**	**(120.952.000)**
7.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	6.983.468.000	59 Orang/bulan	6.685.790.000	57 Orang/bulan	6.564.838.000	(418.630.000)	(120.952.000)
7.01.01.2.02 .0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	206.100.000	12 Dokumen	206.100.000	12 Dokumen	206.100.000	0	0

Kode Rekening	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penetapan Renja		APBD		Perubahan Renja		Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.710.000	1 Laporan	1.710.000	1 Laporan	1.710.000	0	0
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**10.000.000**	**100 persen**	**10.000.000**	**100 persen**	**10.000.000**	**0**	**0**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	10.000.000	2 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	0	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**386.946.000**	**100 persen**	**386.946.000**	**100 persen**	**427.021.000**	**40.076.000**	**40.076.000**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.850.000	4 Paket	5.850.000	4 Paket	7.891.000	2.041.000	2.041.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	157.728.000	4 Paket	157.728.000	4 Paket	197.853.000	40.125.000	40.125.000
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	8.709.000	4 Paket	8.709.000	4 Paket	9.109.000	400.000	400.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	143.159.000	4 Paket	143.159.000	4 Paket	140.668.000	(2.491.000)	(2.491.000)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35.000.000	2 Paket	35.000.000	2 Paket	35.000.000	0	0
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	17.500.000	2 Dokumen	17.500.000	2 Dokumen	17.500.000	0	0
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	19.000.000	7 Laporan	19.000.000	7 Laporan	19.000.000	0	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 persen**	**836.740.000**	**100 persen**	**996.404.000**	**100 persen**	**956.654.000**	**19.914.000**	**(28.760.000)**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.300.000	4 Laporan	9.300.000	4 Laporan	9.300.000	0	0

Kode Rekening	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penetapan Renja		APBD		Perubahan Renja		Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
7.01.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	98.720.000	12 Laporan	98.720.000	12 Laporan	98.720.000	0	0
7.01.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	728.720.000	12 Laporan	777.384.000	12 Laporan	748.634.000	19.914.000	(28.750.000)
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**100 persen**	**233.108.000**	**100 persen**	**443.948.000**	**100 persen**	**444.698.000**	**211.590.000**	**750.000**
7.01.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	131.108.000	38 Unit	161.948.000	38 Unit	133.948.000	2.840.000	(28.000.000)
7.01.01.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	62.000.000	9 Unit	242.000.000	9 Unit	270.750.000	208.750.000	28.750.000
7.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	40.000.000	111 Unit	40.000.000	111 Unit	40.000.000	0	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di Wilayah Selatan	**100 persen**	**18.524.000**	**100 persen**	**18.524.000**	**100 persen**	**18.524.000**	**0**	**0**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Tingkat kinerja bidang	**100 persen**	**12.500.000**	**100 persen**	**12.500.000**	**100 persen**	**12.500.000**	**0**	**0**
7.01.02.2.01 .0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	12.500.000	2 Laporan	12.500.000	2 Laporan	12.500.000	0	0
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**100 persen**	**6.024.000**	**100 persen**	**6.024.000**	**100 persen**	**6.024.000**	**0**	**0**

Kode Rekening	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penetapan Renja		APBD		Perubahan Renja		Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	6.024.000	4 Laporan	6.024.000	4 Laporan	6.024.000	0	0
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/ kelurahan di Wilayah Selatan	100 persen	110.991.000	100 persen	110.991.000	100 persen	110.991.000	0	0
7.01.03.203	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Persentase kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksankan	100 persen	47.425.000	100 persen	47.425.000	100 persen	47.425.000	0	0
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	47.425.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	47.425.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	47.425.000	0	0
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		Persentase ketercapaian pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan	100 persen	63.566.000	100 persen	63.566.000	100 persen	63.566.000	0	0
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	410 Keluarga	63.566.000	410 Keluarga	63.566.000	410 Keluarga	63.566.000	0	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	100 persen	303.034.000	100 persen	348.972.000	100 persen	343.662.000	40.628.000	(5.310.000)
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	303.034.000	100 persen	348.972.000	100 persen	343.662.000	40.628.000	(5.310.000)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	73 Laporan	303.034.000	9 Laporan	348.972.000	9 Laporan	343.662.000	40.628.000	(5.310.000)
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum di Wilayah Selatan	100 persen	6.476.000	100 persen	6.476.000	100 persen	6.476.000	0	0

Kode Rekening	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penetapan Renja		APBD		Perubahan Renja		Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 persen	5.475.000	100 persen	5.475.000	100 persen	5.475.000	0	0
7.01.05.2.01 .0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	5.475.000	1 Dokumen	5.475.000	1 Dokumen	5.475.000	0	0
	Kelurahan Jenggot				**448.216.000**		**480.652.000**		**473.932.000**	25.716.000	(6.720.000)
7	**Unsur Kewilayahan**				**448.216.000**		**480.652.000**		**473.932.000**	25.716.000	(6.720.000)
7.01	**Kecamatan**				**448.216.000**		**480.652.000**		**473.932.000**	25.716.000	(6.720.000)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	448.216.000	100 persen	480.652.000	100 persen	473.932.000	25.716.000	(6.720.000)
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	448.216.000	100 persen	480.652.000	100 persen	473.932.000	25.716.000	(6.720.000)
7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	0	0
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	145.808.000	25 Unit	178.244.000	27 Unit	178.244.000	32.436.000	0
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	293.033.000	9 Pokmas / Ormas	293.033.000	9 Pokmas / Ormas	286.313.000	(6.720.000)	(6.720.000)
	Kelurahan Buaran Kradenan				**443.081.000**		**445.517.000**		**445.517.000**	2.436.000	0
7	**Unsur Kewilayahan**				**443.081.000**		**445.517.000**		**445.517.000**	2.436.000	0
7.01	**Kecamatan**				**443.081.000**		**445.517.000**		**445.517.000**	2.436.000	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	443.081.000	100 persen	445.517.000	100 persen	445.517.000	2.436.000	0
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	443.081.000	100 persen	445.517.000	100 persen	445.517.000	2.436.000	0

Kode Rekening	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penetapan Renja		APBD		Perubahan Renja		Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	0	0
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	149.108.000	8 Unit	151.544.000	9 Unit	151.544.000	2.436.000	0
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	284.598.000	10 Pokmas / Ormas	284.598.000	10 Pokmas / Ormas	284.598.000	0	0
	Kelurahan Kuripan Kertoharjo				**362.405.000**		**366.739.000**		**366.739.000**	**4.334.000**	**0**
7	**Unsur Kewilayahan**				**362.405.000**		**366.739.000**		**366.739.000**	**4.334.000**	**0**
7.01	**Kecamatan**				**362.405.000**		**366.739.000**		**366.739.000**	**4.334.000**	**0**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	**100 persen**	**362.405.000**	**100 persen**	**366.739.000**	**100 persen**	**366.739.000**	**4.334.000**	**0**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	**100 persen**	**362.405.000**	**100 persen**	**366.739.000**	**100 persen**	**366.739.000**	**4.334.000**	**0**
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	0	0
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	142.908.000	9 Unit	145.344.000	10 Unit	145.344.000	2.436.000	0
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	210.122.000	9 Pokmas / Ormas	212.020.000	9 Pokmas / Ormas	212.020.000	1.898.000	0
	Kelurahan Kuripan Yosorejo				**428.186.000**		**470.742.000**		**470.742.000**	**42.556.000**	**0**
7	**Unsur Kewilayahan**				**428.186.000**		**470.742.000**		**470.742.000**	**42.556.000**	**0**
7.01	**Kecamatan**				**428.186.000**		**470.742.000**		**470.742.000**	**42.556.000**	**0**

Kode Rekening	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penetapan Renja		APBD		Perubahan Renja		Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	**100 persen**	**428.186.000**	**100 persen**	**470.742.000**	**100 persen**	**470.742.000**	**42.656.000**	**0**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	**100 persen**	**428.186.000**	**100 persen**	**470.742.000**	**100 persen**	**470.742.000**	**42.656.000**	**0**
7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	1 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	1 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	0	0
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	153.753.000	12 Unit	196.309.000	15 Unit	196.309.000	42.556.000	0
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	265.058.000	9 Pokmas / Ormas	265.058.000	9 Pokmas / Ormas	265.058.000	0	0
	Kelurahan Soko Duwet				**408.005.000**		**410.441.000**		**410.441.000**	**2.436.000**	**0**
7	**Unsur Kewilayahan**				**408.005.000**		**410.441.000**		**410.441.000**	**2.436.000**	**0**
7.01	**Kecamatan**				**408.005.000**		**410.441.000**		**410.441.000**	**2.436.000**	**0**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**		Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	**100 persen**	**408.005.000**	**100 persen**	**410.441.000**	**100 persen**	**410.441.000**	**2.436.000**	**0**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	**100 persen**	**408.005.000**	**100 persen**	**410.441.000**	**100 persen**	**410.441.000**	**2.436.000**	**0**
7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000	0	0
7.01.03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	159.446.000	10 Unit	161.882.000	13 Unit	161.882.000	2.436.000	0
7.01.03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	239.184.000	9 Pokmas / Ormas	239.184.000	9 Pokmas / Ormas	239.184.000	0	0

Kode Rekening	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penetapan Renja		APBD		Perubahan Renja		Pagu Bertambah/Berkurang (Rp)	
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
	Kelurahan Banyurip				442.830.000		445.266.000		445.266.000	2.436.000	0
7	**Unsur Kewilayahan**				442.830.000		445.266.000		445.266.000	2.436.000	0
7.01	**Kecamatan**				442.830.000		445.266.000		445.266.000	2.436.000	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	442.830.000	100 persen	445.266.000	100 persen	445.266.000	2.436.000	0
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen	442.830.000	100 persen	445.266.000	100 persen	445.266.000	2.436.000	0
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	7 Lembaga Kemasyarakatan	9.375.000	0	0
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	150.746.000	9 Unit	153.182.000	9 Unit	153.182.000	2.436.000	0
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	282.709.000	10 Pokmas / Ormas	282.709.000	10 Pokmas / Ormas	282.709.000	0	0

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2024 disusun guna menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan kegiatan-kegiatan yang lebih dibutuhkan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik khususnya di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2024 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2021-2026, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2024 sebaga berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Kerja periode berikutnya.

Demikian Perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2024 ini kami sajikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna mencapai target perubahan yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Camat Pekalongan Selatan
Kota Pekalongan

ZAENAL MUHIBBIN, S.Pd.
Pembina
NIP. 19670609 199103 1 008

RENCANA KERJA PERUBAHAN

RENJA PERUBAHAN 2024

Pekalongan
World's City of Batik

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
KOTA PEKALONGAN

Jalan H. Sabrawi No.1 Kota Pekalongan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Alhamdulillah dengan rahmatNya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2024 telah berhasil disusun.

Renja Perubahan ini di susun berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan. Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen perubahan renja ini memuat rencana program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pekalongan Barat Kota pekalongan yang disertai indikator dan target perubahan kinerja. Renja Perubahan akan menjadi acuan untuk penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Kerja (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan (DPPA) Anggaran Kecamatan Pekalogan Barat Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

Diharapkan Renja ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh jajaran Kecamatan Pekalongan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tujuan dan sasarana pembangunan Kota Pekalongan dapat tercapai dengan optimal.terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pekalongan,08 Agustus 2024

CAMAT PEKALONGAN BARAT
KOTA PEKALONGAN

Drs. MUCHAMAD NATSIR, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19691127 198903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR Ii

DAFTAR ISI Iii

DAFTAR TABEL Iv

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024..... 7

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rekapitulasi Sub Kegiatan perubahan Renja Bappeda Tahun 2024

3.1.1 Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu 21

3.1.2 Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Pengurangan Pagu Tetapi Mengalami Perubahan Indikator 22

3.1.3. Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu 24

3.1.4. Sub Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran 25

3.1.5.Sub Kegiatan yang mengalami penghapusan 25

3.2 Perubahan Target Kinerja dan Pagu lndikatif Tahun 2024 26

BAB IV PENUTUP..... 41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Kecamatan Pekalongan Barat Kota pekarongan S/D Triwulan ll Tahun 2O24	9
Tabel 3.1	Rekapitutasi Sub Kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2024	21
Tabel 3.2	Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Tetapi Mengalami Perubahan Indikator pada Perubahan renja 2024	22
Tabel 3.3	Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024	24
Tabel 3.4	Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024	25
Tabel 3.5	Sub Kegiatan Yang Mengalami Penambahan pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024	26
Tabel 3.6	Sub Kegiatan Yang Mengalami Penghapusan pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024	26
Tabel 3.7	Perubahan Target Kinerja dan Pagu lndikatif Perubahan Renja Tahun 2024	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. lndikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin meningkatnya indeks pembangunan manusia. Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memaslikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Renja Perubahan Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2024 ini disusun berdasarkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dengan mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pekalongan Barat tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Hal ini dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung sampai dengan seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sebagai upaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan peluang otonomi seluas - luasnya maka kewenangan diberikan kepada daerah. Hal ini merupakan peluang untuk memberikan kemajuan pembangunan dengan ciri khas dan potensi daerah dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya masyarakat daerah tersebut. salah satu hal yang mendukung dalam upaya mencapai tujuan pelayanan publik adalah dengan pelaksanaan rencana daerah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif melalui beberapa tahapan perencanaan.

Renja Perubahan Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan penentuan pagu dalam Renja Kecamatan Pekalongan

Barat Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 mengacu kepada rencana program prioritas pada Rancangan Akhir RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024.

Rancangan Perubahan Rencana kerja Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2024 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pekalongan Barat.

Gambar 1

Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

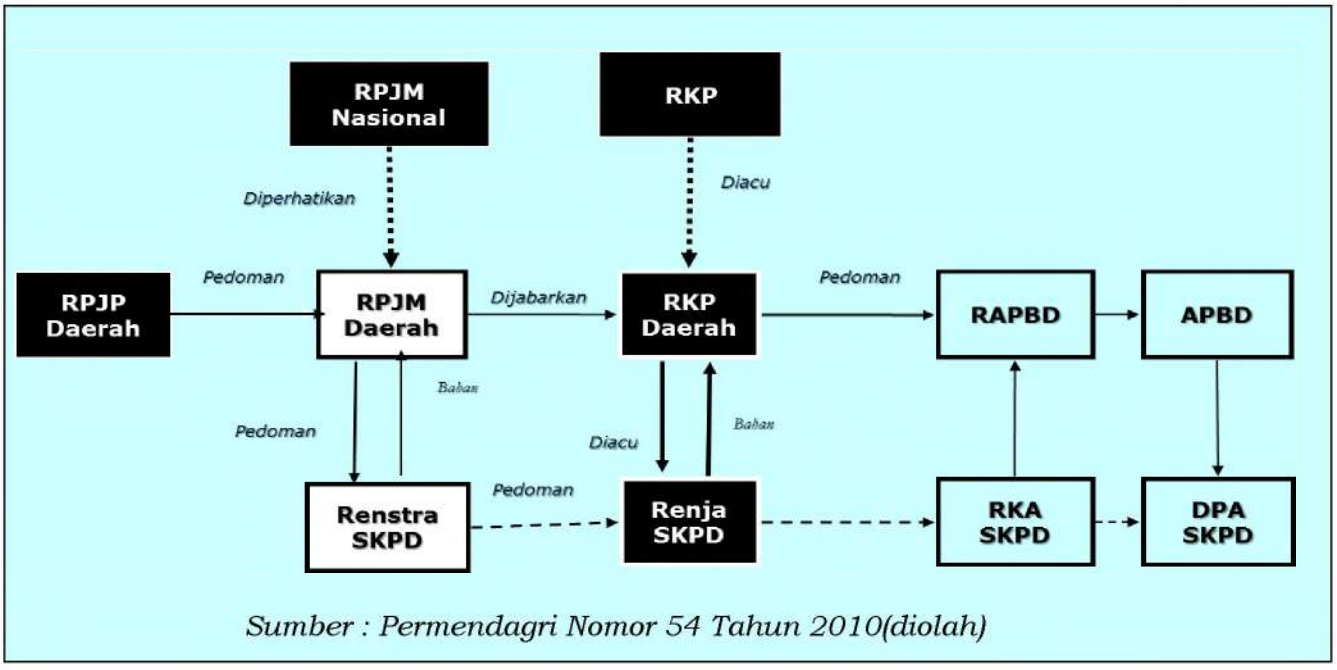

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010(diolah)

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tahun 2024 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Taun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
10. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.Maksud

Dokumen Rancangan Akhir perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Barat Kota pekalongan disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah rahun 2024 dan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan RKA Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2024.

2. Tujuan

Dokumen Rancangan Akhir perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Kecamatan Pekalongan Barat Kota pekalongan.

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2024, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 1312), bahwa perubahan renja perangkat daerah ditetapkan berdasarkan peraturan kepala daerah tentang RKPD.

Sedangkan dasar pertimbangan perubahan RKPD yang ditindaklanjuti dengan perubahan renja perangkat daerah menurut permendagri tersebut adalah adanya perubahan pada :

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. Target sasaran pembangunan daerah:
3. Prioritas pembangunan daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Barat merupakan dokumen yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan, menindaklanjuti capaian program dan kegiatan yang dilakukan, dengan disesuaikan pada kondisi aktual daerah. Selain itu, evaluasi bertujuan untuk menilai dan memastikan pencapaian pada target rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD tahun 2024 dan sasaran RPJMD dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 dilakukan dengan memerhatikan evaluasi terhadap laporan triwulan dan tahunan sebagaimana realisasi capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD tahun 2024. Evaluasi terhadap realisasi dana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terhadap pagu indikatif. Evaluasi juga bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Kecamatan pekalongan Barat dan capaian kinerja triwulanan II tahun 2024 di dasarkan pada data yang ada pada Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 Kecamatan Pekalongan Barat, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Kecamatan Pekalongan Barat untuk tahun anggaran 2024 melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.021.450.000,00. Capaian kinerja dana anggaran Kecamatan Pekalongan Barat sampai Triwulan II dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.368.745.669,- atau 53,57%, maka terdapat efesiensi penggunaan sumber daya sebesar 86,67 %.

Ada program /kegiatan yang realisasinya tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai yang direncanakan.Tapi ada juga yang memenuhi bahkan melebihi, seperti yang tercantum pada tabel 2.1 di bawah ini .

Tabel 2.1

Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Kecamatan Pekalongan Barat Kota pekarongan S/D Triwulan ll 2024

No	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Baru	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024	Kondisi Awal (Perubahan RPJMD 2021 – 2026)	Realisasi Tahun 2024				Jumlah Realisasi Tahun 2024 s/d TW II		Status Capaian
						Realisasi Kinerja TW I	Realisasi Angggaran TW I	Realisasi Kinerja TW II	Realisasi Anggaran TW II	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01	Kecamatan Pekalongan Barat											
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat**	**Persentase**	**100 %**	**100 %**	**25 %**	**0**	**50 %**	**11,034,500**	**50 %**	**11,034,500**	**Tercapai**
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Ketercapaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase	100 %	100 %	25 %	0,00	50 %	7,494,500	50%	7,494,500	Tercapai

7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1		1	0,00	1	7,494,500	1	7,494,500	Tercapai
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Ketercapaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase	100 %	100 %	25 %	0,00	50 %	3,540,000	50 %	3,540,000	Tercapai
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1		1	0,00	1	3,540,000	2	3,540,000	Tercapai
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat**	**Persentase**	**100 %**	**100 %**	**25 %**	**24,510,800**	**50 %**	**57,909,600**	**50 %**	**57,909,600**	Belum Tercapai

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase	100 %	100 %	25 %	12,467,800	50 %	28,978,800	50 %	28,978,800	Tercapai
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	LKK	4		25%	12,467,800	4	28,978,800	4	28,978,800	Tercapai
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase	100 %	100 %	25 %	12,043,000	50%	28,930,800	50%	28,930,800	Belum Tercapai
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya	Keluarga	1875		600	12,043,000	572	28,930,800	1.172	28,930,800	Belum Tercapai

		Saing										
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat**	**Persentase**	**100 %**	**100 %**	**25 %**	**113.753.331**	50%	**145.961.258**	**50 %**	145,961,258	**Tercapai**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketercapaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase	100 %	100 %	25 %	**113.753.331**	50%	**145.961.258**	**50 %**	145,961,258	**Tercapai**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12		25%	113,753,331	50%	145,961,258	50%	145,961,258	**Tercapai**

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat**	**Persentase**	**100 %**	**100 %**	**0**	**0,00**	**100 %**	**5.625.000**	**100 %**	**5.625.000**	**Tercapai**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase	100 %	100 %	0	0,00	**100 %**	**5.625.000**	**100 %**	**5.625.000**	**Tercapai**
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	1		0	0,00	**1**	**5.625.000**	**1**	**5.625.000**	**Tercapai**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**- Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja - Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**persentase**	**100 %**	**100 %**	**25 %**	**2.913.379.133**	**50%**	**5.148.215.311**	**- 50 %**	**5.148.215.311**	**Tercapai**

		- **Persentase Pengadaan /Pemeliharaan Barang Milik Daerah**										
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100 %	100 %	25%	11.410.000	50 %	33.298.500	50%	33.298.500	Belum tercapai
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	laporan	2		0	0,00	50%	1.344.000	50%	1.344.000	Belum tercapai
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	Belum tercapai
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	15		4	11.410.000	3	31.954.500	7	31.954.500	Belum Tercapai

		Daerah										
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100 %	100 %	25 %	2.481.616.130	50 %	4.310.776.737	50 %	4.310.776.737	Belum Tercapai
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	65		62 orang/bulan	2.446.291.130	62 Orang/bulan	4.225.890.737	62 Orang/bulan	4.225.890.737	Belum Tercapai
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12		3	35.325.000	3	83.100.000	6	83.100.000	Belum Tercapai
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	laporan	1		1	1.786.000	0	0,00	1	1.786.000	Tercapai

		Tahun SKPD										
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100 %	100 %	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Belum tercapai
7.01..01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	Belum tercapai
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100 %	100 %	25 %	76.079.500	50%	162.303.050	50%	162.303.050	Belum tercapai
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4		1	3.450.000	1	5.900.000	50%	5.900.000	Tercapai

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	4		1	15.115.000	1	39.769.000	2	39.769.000	Belum tercapai
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	paket	4		1	5.714.000	1	9.893.000	2	9.893.000	Belum tercapai
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4		1	32.574.500	1	70.931.000	2	70.931.000	Belum tercapai
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	paket	2		0	12.421.000	1	20.487.000	1	20.487.000	Belum tercapai
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	paket	2		0	2,295,000	0	4,385,000	0	4.530.000	Belum tercapai (akan tercapai di akhi tahun)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	laporan	12		3	4,510,000	3	10,938,050	4	10,938,050	tercapai

	Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100 %	100 %	25 %	**276,092,903**	50 %	**519,527,450**	50 %	**519,527,450**	Belum tercapai
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4		1	2,160,000	1	4,600,000	2	4,600,000	Belum tercapai
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12		3	30,579,523	3	56,395,749	6	56,395,749	Belum tercapai
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12		3	243,353,380	3	458,531,701	6	458,531,701	Tercapai

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100 %	100 %	25%	**68,180,600**	50%	**122,309,574**	50 %	**122,309,574**	Belum tercapai
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	34		1	24,178,600	3	47,547,574	4	47,547,574	Belum tercapai
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	15		5	29,487,000	3	51,487,000	8	51,487,000	Tercapai

7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	116		35	14,515,000	29	23,275,000	64	23,275,000	Tercapai

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan Kegiatan dalam perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2024 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikator, lokasi, kelompok sasaran yang mengarami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Perubahan renja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan terkait perubahan pagu anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan, serta perubahan terhadap indikator kinerja dan target, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan keuangan daerah, serta pencapaian target-target kinerja,

3.1 Rekapitulasi Sub Kegiatan perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2024

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 12 kegiatan, 26 sub kegiatan dalam renja penetapan, terdapat 19 sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu sebanyak 7 sub kegiatan mengalami perubahan pagu (3 sub kegiatan mengalami pengurangan dan 4 sub kegiatan mengalami penambahan).

Adapun rincian sub kegiatan dalam perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekarongan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rekapitutasi Sub Kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Sub kegiatan Dalam Perubahan Renja					
		Tetap	Bertambah	Berkurang	Baru	dinol kan	Jumlah
1	Kecamatan Pekalongan Barat	19	4	3	0	0	26

3.1.1 Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu dan Perubahan Indikator

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam Renja Penetapan Tahun 2024 dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan baik target kinerja maupun pagu indikatif pada perubahan Renja Tahun 2024 sebanyak 18 Jumlah Sub Kegiatan Adapun sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran pada renja perubahan seperti tersebut dalam tabel 3.2. dibawah ini.

Tabel 3.2

Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami perubahan pagu dan perubahan indikator Pada Perubahan Renja Tahun 2024

No	Nama Sub Kegiatan	Pagu		Bertambah/ Berkurang
		Renja Penetapan 2024	Renja Perubahan 2024	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.726.000	2.726.000	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA –SKPD	1.927.000	1.927.000	0
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	234.300.000	234.300.000	0
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1.786.000	1.786.000	0
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000	10.000.000	0
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	8.600.000	8.600.000	0

	Bangunan Kantor			
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.887.000	97.887.000	0
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	202.431.000	202.431.000	0
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	40.000.000	0
10	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	12.000.000	0
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000	10.500.000	0
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau kendaraan Dinas Jabatan	115.988.000	115.988.000	0
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.000.000	97.000.000	0
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000	45.000.000	0
15	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan	7.125.000	7.125.000	0
16	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	12.500.000	12.500.000	0

	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
17	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	53.742.000	53.742.000	0
18	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.625.000	5.625.000	0

3.1.2 Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Tetapi Mengalami Perubahan Indikator

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam Renja Penetapan Tahun 2024 tidak mengalami perubahan pagu tetapi mengalami perubahan target pada perubahan Renja Tahun 2024 sebanyak 3 Jumlah Sub Kegiatan. Adapun sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu tetapi mengalami perubahan indikator anggaran pada renja perubahan seperti tersebut dalam tabel 3.3. dibawah ini.

Tabel 3.3

Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami perubahan pagu tetapi Mengalami Perubahan Indikator Pada Perubahan Renja Tahun 2024

No	Nama Sub Kegiatan	Indikator		Bertambah/ Berkurang
		Renja Penetapan 2024	Renja Perubahan 2024	
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya	116 unit	126 unit	Bertambah 10
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	34 unit	33 unit	Berkurang 1

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
3	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan SDM yang berkualitasdan Berdaya saing	1875 keluarga	1550 keluarga	Berkurang 325

3.1.3 Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu

Sub kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang ada dalam Renja Penetapan Tahun 2024 yang mengalami pengurangan pagu indikatif sebanyak 3 sub kegiatan. Hal ini menyesuaikan Perubahan RKPD, yang disebabkan adanya penyesuaian kembali terhadap belanja guna serta efektifitas pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.4. dibawah ini.

Tabel 3.4

Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024

No	Nama Sub Kegiatan	Pagu		Bertambah/ Berkurang
		Renja Penetapan 2024	Renja Perubahan 2024	
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	7.556.287.000	7.384.393.000	- 171.894.000
2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indoensia, Tentara Nasional Indoensia dan Instansi Vertikal di wilayah	268.692.000	263.692.000	- 5.000.000

	Kecamatan			
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.000.000	115.950.000	- 1.050.000

3.1.4 Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah sub kegiatan yang ada dalam Renja Penetapan Tahun 2024 mengalami penambahan pagu indikatif sebanyak 4 sub kegiatan. Sub Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5

Sub Kegiatan Yang Mengalami Penambahan pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024

No	Nama Sub Kegiatan	Pagu		Bertambah/ Berkurang
		Renja Penetapan 2024	Renja Perubahan 2024	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.000.000	122.900.000	1.900.000
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.500.000	13.600.000	3.100.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	899.799.000	900.849.000	1.050.000
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.000.000	24.000.000	5.000.000

3.1.5. Sub Kegiatan yang mengalami penghapusan

Sub Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang sebelumnya dianggarkan dalam Renja Penetapan Tahun 2024, namun diusulkan untuk dihapuskan/dinolkan dalam Perubahan Renja Tahun 2024

ini sebanyak nihil. Kegiatan yang dihapus/dinolkan dapat dilihat dalam tabel 3.6 dibawah.

Tabel 3.6

Sub Kegiatan Yang Mengalami Penghapusan pagu Anggaran Pada Perubahan Renja Tahun 2024

No	Nama Sub Kegiatan	Pagu		Bertambah/ Berkurang
		Renja Penetapan 2024	Renja Perubahan 2024	
1	NIHIL			

3.2 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2024;
2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan program pemerintah untuk fasilitasi pembangunan infrastruktur dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 terkait bantuan keuangan kepada Kab./Kota;
3. Sub Kegiatan baru maupun penghapusan sub kegiatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2024. Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan renja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tahun 2024 terlihat dalam tabel 3.7. dibawah ini :

Tabel 3.7

Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Perubahan Renja Tahun 2024

No	Nama OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Baru	Lokasi	PENETAPAN RENJA				APBD				PERUBAHAN RENJA Status Capaian				PAGU BERTAMBAH/BERKURANG	
			Uraian Indikator	Target	Satuan	Pagu (Rp)	Uraian Indikator	Target	Satuan	Pagu (Rp)	Uraian Indikator	Target	Satuan	Pagu (Rp)	Terhadap RKPD	Terhadap APBD
1	2	3	4													
7.01	**Kecamatan Pekalongan Barat**	**Kota Pekalongan**														
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kota Pekalongan**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	100 %	Persentase	19.485.000	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	100 %	Persentase	19.485.000	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	100 %	Persentase	19.485.000	0,00	0,00-
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kota Pekalongan**	**Persentase Ketercapaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	100 %	Persentase	12.500.000	**Persentase Ketercapaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	100 %	Persentase	12.500.000	**Persentase Ketercapaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	100 %	Persentase	12.500.000	0,00	0,00-

7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	12.500.000	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	12.500.000	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	12.500.000	0,00	0,00-
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Ketercapaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	100 %	Persentase	6.985.000	**Ketercapaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	100 %	Persentase	6.985.000	**Ketercapaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	100 %	Persentase	6.985.000	0,00	0,00-
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	Laporan	6.985.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	Laporan	6.985.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	Laporan	6.985.000	0,00	0,00-

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kota Pekalongan**	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	100 %	Persentase	123.917.000	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	100 %	Persentase	123.917.000	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	100 %	Persentase	123.917.000	0,00	0,00-
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kota Pekalongan**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	100 %	Persentase	**53.742.000**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	100 %	Persentase	**53.742.000**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	100 %	Persentase	**53.742.000**	0,00	0,00-
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	LKK	**53.742.000**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	LKK	53.742.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	LKK	53.742.000	0,00	0,00-
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamat**	100 %	Persentase	**70.175.000**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	100 %	Persentase	**70.175.000**	**Persentase Ketercapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	100 %	Persentase	**70.175.000**	0,00	0,00-

			an dan Kelurahan													
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1875	Keluarga	**70.175.000**	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1875	Keluarga	70.175.000	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1550	Keluarga	70.175.000	0,00	0,00-
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kota Pekalongan**	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat	100 %	Persentase	268.692.000	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat	100 %	Persentase	268.692.000	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat	100 %	Persentase	263.692.000	-5.000.000	0,00

7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kota Pekalongan**	**Persentase ketercapaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	100 %	Persentase	268.692.000	**Persentase ketercapaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	100 %	Persentase	**268.692.000**	**Persentase ketercapaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	100 %	Persentase	**263.692.000**	-5.000.000	0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	268.692.000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	268.692.000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	**268.692.000**	-5.000.000	0,00	0,
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kota Pekalongan**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat**	100 %	Persentase	5.625.000	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat**	100 %	Persentase	5.625.000	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat**	100 %	Persentase	5.625.000	0,00	0,00-	

7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	100 %	Persentase	5.625.000	**Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	100 %	Persentase	5.625.000	**Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	100 %	Persentase	5.625.000	0,00	0,00-
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Laporan	5.625.000	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Laporan	5.625.000	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Laporan	5.625.000	0,00	0,00-
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Kota Pekalongan**	- Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja - Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum	100 % 100 % 100 %	persentase	9.603.731.000	- Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja - Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 % 100 %	persentase	9.603.731.000	- Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja - Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa	100 % 100 % 100 %	persentase	9.603.731.000	0,00	0.00

			dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah				- Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah					
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Pekalongan**	**Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100 %	Persentase	**121.653.000**	**Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100 %	Persentase	**121.653.000**	**Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100 %	Persentase	**120.603.000**	-1.050.000	0,00-
7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	laporan	2.726.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	laporan	2.726.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	laporan	2.726.000	0,00	0,00-
7.01.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	2	Laporan	1.927.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2	Laporan	1.927.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2	Laporan	1.927.000	0,00	0,00-

			Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Dokumen RKA-SKPD				Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan	117.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan	117.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan	115.950.000	-1.050.000	0,00-
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100 %	Persentase	7.792.373.000	**Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100 %	Persentase	**7.792.373.000**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100 %	Persentase	**7.620.479.000**	-171.894.000	0,00-
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	Orang	7.556.287.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	Orang	7.556.287.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62	Orang	7.384.393.000	-171.894.000	0,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	234.300.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	234.300.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	234.300.000	0,00	0,00-

7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1.786.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1.786.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1.786.000	0,00	0,00-
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100 %	Persentase	10.000.000	**Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100 %	Persentase	**10.000.000**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100 %	Persentase	**10.000.000**	0,00	0,00-
7.01..01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	paket	10.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	paket	10.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	paket	10.000.000	0,00	0,00-
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Ketercapaian Administrasi Umum**	100 %	Persentase	390.418.000	**Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100 %	Persentase	**390.418.000**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100 %	Persentase	**398.518.000**	8.100.000	0,00-

			Perangkat Daerah													
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	8.600.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	8.600.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	8.600.000	0,00	0,00-
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	paket	97.887.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	paket	97.887.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	paket	97.887.000	0,00	0,00-
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	paket	10.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	paket	10.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	paket	13.600.000	3.100,000	0,00-
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	paket	202.431.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	202.431.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	202.431.000	0,00	0,00-
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand	2	paket	40.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	40.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda	2	paket	40.000.000	0,00	0,00-

			aan yang Disediakan								an yang Disediakan					
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96	dokumen	12.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dokumen	12.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dokumen	12.000.000	0,00	0,00-
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	laporan	19.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	laporan	19.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9	laporan	24.000.000	5.000.000	0,00-
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	Persentase	1.031.299.000	**Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	Persentase	1.031.299.000	**Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	Persentase	1.034.249.000	**2.950.000**	**0,00**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12	laporan	10.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	10.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	10.500.000	0.00	0,00-

			Menyurat													
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	121.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	121.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	122.900.000	1.900.000	0,00
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	899.799.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	899.799.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	900.849.000	1.050.000	0,00-
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	Persentase	257.988.000	**Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	Persentase	257.988.000	**Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	Persentase	257.988.000	**0,00**	**0,00**

7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34	unit	115.988.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34	unit	115.988.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33	unit	115.988.000	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	unit	97.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	unit	97.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	unit	97.000.000	0,00	0,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	116	unit	45.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	116	unit	45.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	126	unit	45.000.000	0,00	0,00

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan berbasis Good Governace dan Clean Goverment dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) mengikuti paradigma baru yang akan mampu menciptakan kebijakan (trickle down effect) sehingga kepentingan masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan selain menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 juga berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Renja diharapkan juga mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan suatu keputusan kebijakan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pemangku jabatan dan staf Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih optimal.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Perubahan Renja merupakan hal yang perlu diperhatikan selama tahun berjalan guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota pekalongan Tahun 2024.
2. Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan

Rancangan Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah periode berikutnya. Semoga Perubahan Rencana Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target perubahan yang telah ditetapkan

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2024 ini kami sajikan sebagai bentuk acuan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang, sehingga tercapai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan yang lebih baik dengan prinsip bersama-sama melaksanakan pembangunan dengan asas transparansi, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan bersama di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat serta sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Pekalongan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

CAMAT PEKALONGAN BARAT
KOTA PEKALONGAN

Drs. MUCHAMAD NATSIR, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196911271989031006

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

TAHUN 2024

KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 27), menyebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, PengendaliandanEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancanganPwraturan Daerah

tentangRencanaPembangunan JangkaPanjang Daerah danRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, danRencanaKerjapemerintah Daerah, bahwa :

(1) Perangkat Daerah menyusunrancanganawalRenjaPerangkat Daerah sebagaimanadimaksuddalampasal 16 ayat (2) huruf b, paling lambatminggupertamabulanDesember.

(2) PenyusunanrancanganawalRenjaPerangkat Daerah berpedomanpadaRenstraPerangkat Daerah. HasilevaluasihasilRenjaPerangkat Daerah tahunlaludanhasilevaluasihasilRenjaPerangkat Daerah Tahunberjalan.

PerubahanRencana Kerja KecamatanPekalonganTimur Kota Pekalongan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunyang memuat kebijakan, programdan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2024

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan TimurKota Pekalongan tahun 2023 didasarkan kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang PerubahanUndang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besardan Kota-kota Ketjil di Djawa (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 1954Nomor 40, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia

Tahun 2004 Nomor104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun1998 tentang Perubahan Batas WilayahKotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan,Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongandan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1988 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian Dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4698);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, PengendaliandanEvaluasi Pembangunan Daereah, Tata Cara EvaluasiRancanganPeraturan Daerah tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah danRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, danRencanaKerjaPemerintah Daerah ;

10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan ;
11. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan tahun 2024

I.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Perubahan Rencana Kerja KecamatanPekalonganTimur Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun denganmaksuduntukmenyesuaikankebijakanPemerintah Daerah Kota Pekalongandan target kinerjaPerangkat Daerah yang memperhatikanhasil evaluasi indikatorkinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024.
2. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun 2024 dimaksudkan untuk dan menyelaraskan prioritas progam dan kegiatan Kecamatan Pekalongan Timur dengan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan tahun 2024, selain itu penyusunan Perubahan rencana kerja ini juga dimaksudkan untuk melakukan upaya sinkronisasi terhadap progam-program dalam rencana kerja perangkat daerah awal dengan tetap mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pembangunan tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Timuradalah :

1. Sebagai acuan/arah bagi Kecamatan Pekalongan Timurdalam menyusun program/kegiatan prioritas tahun 2024 berdasarkan ketersediaan sumberdaya yang ada dan memenuhi kebutuhan anggaran perangkat daerah yang belum terakomodir dalam renja 2024;
2. Menyesuaikan anggaran Perangkat Daerah berdasarkan prioritas kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Timurtahun 2024 sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancanganRenja Perangkat Daerah, agar substansi padabab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I.1. LatarBelakang
I.2. LandasanHukum
I.3. MaksuddanTujuan
I.4. SistematikaPenulisan

BAB II **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

II.1 Analisis Gambaran Pelayanan perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

II.2 Evaluasi Renja Triwulan III

BAB III **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang tabel perubahan RKPD triwulan ke II

BAB IV **PENUTUP**

a. Catatanpenting yang perlumendapatperhatian, baikdalamrangkapelaksanaannyamaupunseandainyaketersediaananggarantidaksesuaidengankebutuhan
b. Kaidah – kaidahpelaksanaan
c. Rencanatindaklanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1Analisis Gambaran pelayanan perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2024 diperlukan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD sampai dengan TW II atas pelaksanaan program dan kegiatan PD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan PD.

Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan merupakan salah satu pelaksana pembangunan di bidang pelayanan publik. Adapun capaian aspek kinerja pembangunan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	IndikatorKinerja Pembangunan	Target	Capaian 2023	KET
1	Kinerjapenyelenggaraanpemerintahan, pelayananpublik di wilayahTimur	100%	100%	tercapai
2	Kinerjapemberdayaanmasyarakatkecamatan/ kelurahan di wilayahTimur	100%	100%	tercapai
3	KinerjaTrantibum di wilayahTimur	100%	50%	tercapai
4	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah timur	100%	100%	tercapai

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Persentase Capaian aspek kinerja pembangunan bidang pelayanan publik Kecamatan Pekalongan Timur TW II tahun 2024 sebesar 87,5%, dengan keterangan dari 4 (empat)indikator kinerja pembangunan hanya 1(satu) indikator yang belum mencapai target sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya mencapai target, karena masih dalam proses pelaksanaan kegiatan.

II.2 EvaluasiRenjaTriwulan II

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil

darikegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

a) Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

b) Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

c) Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

EVALUASI KINERJA KEGIATAN SUB KEGIATAN OPD TRIWULAN II
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Aksi
						TW 1	TW 2				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100.00	0.00	6.67	11.11	17.78	17.78	**Tidak Tercapai**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0.00	0.00				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	Closed
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0.00	0.00				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	Closed
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.00	33.33				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	15.00	0.00	3.00	5.00	8.00	53.33	Tidak Tercapai	Closed

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Aksi
						TW 1	TW 2				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100.00	100.00	50.00	16.67	66.67	66.67	**Tidak Tercapai**	Closed
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Angka Terbanyak/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Orang/bulan	68.00	0.00	65.00	65.00	65.00	95.59	Tidak Tercapai	Closed
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	12.00	0.00	3.00	3.00	6.00	50.00	Tidak Tercapai	Closed
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	Tercapai	Closed

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Aksi
						TW 1	TW 2				
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**Tidak Tercapai**	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0.00	0.00				
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Paket	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	Closed
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100.00	100.00	23.47	21.43	44.90	44.90	**Tidak Tercapai**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					25.00	25.00				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Paket	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	50.00	Tidak Tercapai	Closed

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Aksi
						TW 1	TW 2				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					25.00	25.00				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Paket	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	50.00	Tidak Tercapai	Closed
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					25.00	25.00				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Paket	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	50.00	Tidak Tercapai	Closed
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					25.00	25.00				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Paket	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	50.00	Tidak Tercapai	Closed
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					50.00	0.00				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Paket	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00	Tidak Tercapai	Closed

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Aksi
						TW 1	TW 2				
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0.00	50.00				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00	Tidak Tercapai	Closed
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					14.29	0.00				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	7.00	0.00	1.00	0.00	1.00	14.29	Tidak Tercapai	Closed
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100.00	100.00	25.00	25.00	50.00	50.00	**Tidak Tercapai**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					25.00	25.00				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	50.00	Tidak Tercapai	Closed

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Aksi
						TW 1	TW 2				
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					25.00	25.00				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	12.00	0.00	3.00	3.00	6.00	50.00	Tidak Tercapai	Closed
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					25.00	25.00				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	12.00	0.00	3.00	3.00	6.00	50.00	Tidak Tercapai	Closed
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100.00	100.00	10.71	51.22	61.92	61.92	**Tidak Tercapai**	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					17.95	46.15				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Unit	39.00	0.00	7.00	18.00	25.00	64.10	Tidak Tercapai	Closed

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Aksi
						TW 1	TW 2				
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0.00	80.00				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Unit	10.00	0.00	0.00	8.00	8.00	80.00	Tidak Tercapai	Closed
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					14.17	27.50				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Unit	120.00	0.00	17.00	33.00	50.00	41.67	Tidak Tercapai	Closed
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
	Persentase ketercapaian kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**Tidak Tercapai**	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					0.00	0.00				
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	Closed

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Aksi
						TW 1	TW 2				
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										
	Persentase Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100.00	100.00	25.00	25.00	50.00	50.00	**Tidak Tercapai**	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					25.00	25.00				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	50.00	Tidak Tercapai	Closed
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										
	Persentase ketercapaian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100.00	100.00	25.00	25.00	50.00	50.00	**Tidak Tercapai**	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					25.00	25.00				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Lembaga Kemasyarakatan	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00	50.00	Tidak Tercapai	Closed

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Aksi
						TW 1	TW 2				
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan										
	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100.00	100.00	8.45	33.10	41.55	41.55	**Tidak Tercapai**	
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					8.45	33.10				
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Keluarga	710.00	0.00	60.00	235.00	295.00	41.55	Tidak Tercapai	Closed
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
	Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100.00	100.00	18.18	27.27	45.45	45.45	**Tidak Tercapai**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					18.18	27.27				

Activate Windows

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Aksi
						TW 1	TW 2				
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					18.18	27.27				
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Laporan	11.00	0.00	2.00	3.00	5.00	45.45	Tidak Tercapai	Closed
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah										
	Persentase ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**Tidak Tercapai**	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					0.00	0.00				
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Dokumen	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	Closed
Kode	**Nama Keg / Sub Keg / Indikator**	**Tipe Indi / Capaian**	**Satuan**	**Target Tahun 2024**	**Realisasi Tahun 2023**	**Realisasi**		**Capaian Sampai TW 2**	**Tingkat Capaian**	**Status Capaian**	**Aksi**
						TW 1	**TW 2**				

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Kelurahan Noyontaansari

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Aksi
						TW 1	TW 2				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										
	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100.00	0.00	47.62	28.57	76.19	76.19	**Tidak Tercapai**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					100.00	0.00				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Lembaga Kemasyarakatan	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	Tercapai	Closed
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					0.00	42.86				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Unit	14.00	0.00	0.00	6.00	6.00	42.86	Tidak Tercapai	Closed
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					42.86	42.86				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Pokmas / Ormas	7.00	0.00	3.00	3.00	6.00	85.71	Tidak Tercapai	Closed

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Kelurahan Poncol

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi TW 1	Capaian Sampai TW 1	Tingkat Capaian	Status Capaian	Aksi
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Persen	100.00	0.00	57.78	57.78	57.78	**Tidak Tercapai**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					100.00				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Lembaga Kemasyarakatan	7.00	0.00	7.00	7.00	100.00	Tercapai	Closed
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					40.00				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Unit	5.00	0.00	2.00	2.00	40.00	Tidak Tercapai	Closed
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					33.33				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Pokmas / Ormas	9.00	0.00	3.00	3.00	33.33	Tidak Tercapai	Closed

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Kelurahan Kauman

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Aksi
						TW 1	TW 2				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										
	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100.00	0.00	48.15	11.11	59.26	59.26	**Tidak Tercapai**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					100.00	0.00				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Lembaga Kemasyarakatan	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	100.00	Tercapai	Closed
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					22.22	11.11				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Unit	9.00	0.00	2.00	1.00	3.00	33.33	Tidak Tercapai	Closed
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					22.22	22.22				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Pokmas / Ormas	9.00	0.00	2.00	2.00	4.00	44.44	Tidak Tercapai	Closed

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Kelurahan Gamer

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Aksi
						TW 1	TW 2				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										
	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100.00	0.00	50.00	16.67	66.67	66.67	**Tidak Tercapai**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					100.00	0.00				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Lembaga Kemasyarakatan	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	100.00	Tercapai	Closed
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					16.67	16.67				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Unit	6.00	0.00	1.00	1.00	2.00	33.33	Tidak Tercapai	Closed
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					33.33	33.33				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Pokmas / Ormas	9.00	0.00	3.00	3.00	6.00	66.67	Tidak Tercapai	Closed

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Kelurahan Klego

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Aksi
						TW 1	TW 2				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										
	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100.00	0.00	38.89	33.33	72.22	72.22	**Tidak Tercapai**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					100.00	0.00				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Lembaga Kemasyarakatan	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	100.00	Tercapai	Closed
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					0.00	50.00				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Unit	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	50.00	Tidak Tercapai	Closed
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					16.67	50.00				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Pokmas / Ormas	6.00	0.00	1.00	3.00	4.00	66.67	Tidak Tercapai	Closed

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Kelurahan Setono

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi		Capaian Sampai TW 2	Tingkat Capaian	Status Capaian	Aksi
						TW 1	TW 2				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										
	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100.00	0.00	36.11	8.33	44.44	44.44	**Tidak Tercapai**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					100.00	0.00				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Lembaga Kemasyarakatan	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	Tercapai	Closed
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					0.00	0.00				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Unit	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	Closed
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					8.33	25.00				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Pokmas / Ormas	12.00	0.00	1.00	3.00	4.00	33.33	Tidak Tercapai	Closed

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Kelurahan kalibaros

Kode	Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Tipe Indi / Capaian	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Realisasi TW 1	Capaian Sampai TW 1	Tingkat Capaian	Status Capaian	Aksi
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Rata-rata Sub Kegiatan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	persen	100.00	0.00	58.89	58.89	58.89	**Tidak Tercapai**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					100.00				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Lembaga Kemasyarakatan	7.00	0.00	7.00	7.00	100.00	Tercapai	Closed
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					66.67				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Unit	6.00	0.00	4.00	4.00	66.67	Tidak Tercapai	Closed
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					10.00				
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik	Pokmas / Ormas	10.00	0.00	1.00	1.00	10.00	Tidak Tercapai	Closed

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun 2024 terdari dari 5 Program,12 Kegiatan dan 26 SubKegiatandengan total anggaran dalam penetapan RKA/RKPD sebesar Rp. **12.795.441.000**,-, sedangkan dalam penetapan APBD menjadi Rp. **12.124.641.000,-.**Dalam perkembangannya anggaran banyak mengalami perubahan baik karena refocusing, penambahan maupun pergeseran anggaran. Anggaran dalam perubahan RKPD menjadi Rp. **11.084.321.000**-. karena ada pengurangan angka pada sub kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 2 (dua) Seksi/Kasi yang ada di Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan 1 (satu) Sekretariat terdiri dari 2 Kasubbag

Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pekalongan. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TAHUN 2024 RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (8-10)	LOKASI	SUMBER DANA
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR							12.628.227.000,00	12.126.461.000,00	11.084.321.000,00	-1.543.906.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							12.628.227.000,00	12.126.461.000,00	11.084.321.000,00	-1.543.906.000,00		
	7.01	KECAMATAN							12.628.227.000,00	12.126.461.000,00	11.084.321.000,00	-1.543.906.000,00		
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen			100 persen	100 persen	12.292.737.000,00	11.747.885.000,00	10.705.745.000	-2.812.777.900,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 persen	100 persen	121.752.000,00	121.752.000,00	121.752.000,00	0,00		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.784.000,00	2.784.000,00	2.784.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS UMUM
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.968.000,00	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS UMUM
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	15 Laporan	117.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS UMUM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah*				100 persen	100 persen	8.680.729.000,00	7.929.637.000,00	7.814.238.000,00	-866.491.000,00		

Activate Windows

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (8-10)	LOKASI	SUMBER DANA
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	68 Orang/bulan	8.444.605.000,00	7.693.513.000,00	7.578.114.000,00	-866.491.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	234.300.000,00	234.300.000,00	234.300.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.824.000,00	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 persen	100 persen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah*				100 persen	100 persen	411.179.000,00	411.179.000,00	411.179.000,00	0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (8-10)	LOKASI	SUMBER DANA
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	130.640.000,00	130.640.000,00	130.640.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	7.875.000,00	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	4 Paket	187.214.000,00	187.214.000,00	187.214.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	2 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (8-10)	LOKASI	SUMBER DANA
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaiN penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 persen	100 persen	1.185.334.000,00	1.376.574.000,00	1.376.574.000,00	191.240.000,00		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4 Laporan	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	163.200.000,00	200.700.000,00	200.700.000,00	37.500.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.011.634.000,00	1.165.374.000,00	1.165.374.000,00	153.740.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Activate Windows

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (8-10)	LOKASI	SUMBER DANA
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 persen	100 persen	1.883.743.000,00	1.898.743.000,00	972.002.000,00	-911.741.000,00		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	39 Unit	169.743.000,00	169.743.000,00	169.743.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	9 Unit	1.669.000.000,00	1.684.000.000,00	757.259.000,00	-911.741.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	120 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur**	**100,00 persen**			100,00 persen	100,00 persen	**19.625.000,00**	**19.625.000,00**	**19.625.000**	**26.511.000,00**		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase ketercapaian kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 Persen	100 Persen	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00		

Activate Windows

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (8-10)	LOKASI	SUMBER DANA
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat*				100 persen	100 persen	7.125.000,00	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00		
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan												
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	4 Laporan	7.125.000,00	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan di wilayah Timur**	**100,00 persen**			**100 persen**	**100 persen**	**109.811.000,00**	**109.811.000,00**	**109.811.000**	**-33.275.000,00**		
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*				100 persen	100 persen	42.761.000,00	42.761.000,00	42.761.000,00	0,00		
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan												
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	42.761.000,00	42.761.000,00	42.761.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (8-10)	LOKASI	SUMBER DANA
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan*				100 persen	100 persen	67.050.000,00	67.050.000,00	67.050.000,00	0,00		
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing												
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				4 Keluarga	710 Keluarga	67.050.000,00	67.050.000,00	67.050.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	**100,00 persen**			100,00 100 persen persen	100,00 100 persen persen	**200.429.000,00**	**243.515.000,00**	**243.515.000**	**137.000,00**		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketercapaian koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Persetase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				100 persen	100 persen	200.429.000,00	243.515.000,00	243.515.000,00	43.086.000,00		
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				48 Laporan	11 Laporan	200.429.000,00	243.515.000,00	243.515.000,00	43.086.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (8-10)	LOKASI	SUMBER DANA
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur Tingkat kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	**100,00 persen**			100 100,00 persen persen	100,00 100 persen persen	**5.625.000,00**	**5.625.000,00**	**5.625.000**	**645.000,00**		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase ketercapaian kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 persen	100 persen	5.625.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00		
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.625.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Kelurahan Kauman

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (8-10)	LOKASI	SUMBER DANA
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KELURAHAN KAUMAN							584.911.000,00	587.347.000,00	587.347.000,00	2.436.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							584.911.000,00	587.347.000,00	587.347.000,00	2.436.000,00		
	7.01	KECAMATAN							584.911.000,00	587.347.000,00	587.347.000,00	2.436.000,00		
1,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen			100 persen	100 persen	584.911.000,00	587.347.000,00	587.347.000	-79.559.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*				100 persen	100 persen	584.911.000,00	587.347.000,00	587.347.000,00	2.436.000,00		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	9 Unit	153.808.000,00	156.244.000,00	156.244.000,00	2.436.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	421.728.000,00	421.728.000,00	421.728.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Kelurahan Poncol

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (8-10)	LOKASI	SUMBER DANA
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KELURAHAN PONCOL							**506.447.000,00**	**631.383.000,00**	**631.383.000,00**	**124.936.000,00**		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**506.447.000,00**	**631.383.000,00**	**631.383.000,00**	**124.936.000,00**		
	7.01	**KECAMATAN**							**506.447.000,00**	**631.383.000,00**	**631.383.000,00**	**124.936.000,00**		
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**			**100 persen**	**100 persen**	**506.447.000,00**	**631.383.000,00**	**631.383.000**	**-506.447.000,00**		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*				100 persen	100 persen	506.447.000,00	631.383.000,00	631.383.000,00	124.936.000,00		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Ponpol	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	6 Unit	152.446.000,00	302.382.000,00	302.382.000,00	149.936.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Ponpol Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2583 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	344.626.000,00	319.626.000,00	319.626.000,00	-25.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Ponpol	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Activate Windows

Renja Kecamatan Pekalongan Timur 2024 (Perubahan)

Kelurahan Klego

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (8-10)	LOKASI	SUMBER DANA
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KELURAHAN KLEGO							**432.836.000,00**	**460.272.000,00**	**460.272.000,00**	**27.436.000,00**		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**432.836.000,00**	**460.272.000,00**	**460.272.000,00**	**27.436.000,00**		
	7.01	**KECAMATAN**							**432.836.000,00**	**460.272.000,00**	**460.272.000,00**	**27.436.000,00**		
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**			**100 persen**	**100 persen**	**432.836.000,00**	**460.272.000,00**	**460.272.000**	**-59.082.000,00**		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*				100 persen	100 persen	432.836.000,00	460.272.000,00	460.272.000,00	27.436.000,00		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	6 Unit	139.808.000,00	167.244.000,00	167.244.000,00	27.436.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	283.653.000,00	283.653.000,00	283.653.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Renja Kecamatan Pekalongan Timur 2024 (Perubahan)

Kelurahan Gamer

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (8-10)	LOKASI	SUMBER DANA
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KELURAHAN GAMER							368.261.000,00	370.697.000,00	372.227.000,00	3.966.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							368.261.000,00	370.697.000,00	372.227.000,00	3.966.000,00		
	7.01	KECAMATAN							368.261.000,00	370.697.000,00	372.227.000,00	3.966.000,00		
1,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00 persen			100 persen	100 persen	368.261.000,00	370.697.000,00	372.227.000	-82.683.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*				100 persen	100 persen	368.261.000,00	370.697.000,00	372.227.000,00	3.966.000,00		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	7 Unit	145.608.000,00	148.244.000,00	148.244.000,00	2.436.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	213.078.000,00	213.078.000,00	214.608.000,00	1.530.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Renja Kecamatan Pekalongan Timur 2024 (Perubahan)

Kelurahan Noyontaansari

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (8-10)	LOKASI	SUMBER DANA
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KELURAHAN NOYONTAANSARI							483.851.000,00	518.787.000,00	518.787.000,00	34.936.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							483.851.000,00	518.787.000,00	518.787.000,00	34.936.000,00		
	7.01	KECAMATAN							483.851.000,00	518.787.000,00	518.787.000,00	34.936.000,00		
1,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100,00 persen			100 persen	100 persen	483.851.000,00	518.787.000,00	518.787.000	-79.549.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*				100 Persen	100 Persen	483.851.000,00	518.787.000,00	518.787.000,00	34.936.000,00		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	14 Unit	172.808.000,00	222.744.000,00	222.744.000,00	49.936.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	301.668.000,00	286.668.000,00	286.668.000,00	-15.000.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Activate Windows

Renja Kecamatan Pekalongan Timur 2024 (Perubahan)

Kelurahan Setono

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (8-10)	LOKASI	SUMBER DANA
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KELURAHAN SETONO							513.588.000,00	516.024.000,00	516.024.000,00	2.436.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							513.588.000,00	516.024.000,00	516.024.000,00	2.436.000,00		
	7.01	KECAMATAN							513.588.000,00	516.024.000,00	516.024.000,00	2.436.000,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100,00 persen			100 persen	100 persen	513.588.000,00	516.024.000,00	516.024.000	-68.361.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*				100 persen	100 persen	513.588.000,00	516.024.000,00	516.024.000,00	2.436.000,00		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	160.226.000,00	162.662.000,00	162.662.000,00	2.436.000,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	343.987.000,00	343.987.000,00	343.987.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Kelurahan kalibaros

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (8-10)	LOKASI	SUMBER DANA
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KELURAHAN KALIBAROS							**417.166.000,00**	**419.734.000,00**	**419.734.000,00**	**2.568.000,00**		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**417.166.000,00**	**419.734.000,00**	**419.734.000,00**	**2.568.000,00**		
	7.01	**KECAMATAN**							**417.166.000,00**	**419.734.000,00**	**419.734.000,00**	**2.568.000,00**		
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100,00 persen**			**100 persen**	**100 persen**	**417.166.000,00**	**419.734.000,00**	**419.734.000**	**207.834.000,00**		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan*				100 persen	100 persen	417.166.000,00	419.734.000,00	419.734.000,00	2.568.000,00		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	9.375.000,00	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	6 Unit	143.615.000,00	146.383.000,00	146.383.000,00	2.568.000,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	263.976.000,00	263.976.000,00	263.976.000,00	0,00	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

Renja Kecamatan Pekalongan Timur 2024 (Perubahan)

BAB V
PENUTUP

a. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik khususnya di wilayah Timur , yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Timur tahun 2024 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Pekalongan Timur, dimana dalam kerangka regulasi mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Adapun kaidah-kaidah dalam pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2024 merupakan wujud upaya mengakomodasi dinamika pembangunan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang sinergis dengan pencapaian tujuan pembangunan Kecamatan Pekalongan Timur ;

b. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2024 diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatkan kapasitas SDM aparatur Kecamatan Pekalongan Timur untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kinerja, gedung yang representatif dan sarana pendukung yang menunjang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan sehingga transparansi dan kemanfaatan hasil pembangunan sesuai yang diharapkan.

Pekalongan, 08 Agustus 2024

CAMAT PEKALONGAN TIMUR
KOTA PEKALONGAN

DARMINTO, S.IP, M.M
Pembina Tingkat I
NIP.19680126 199303 1 003